

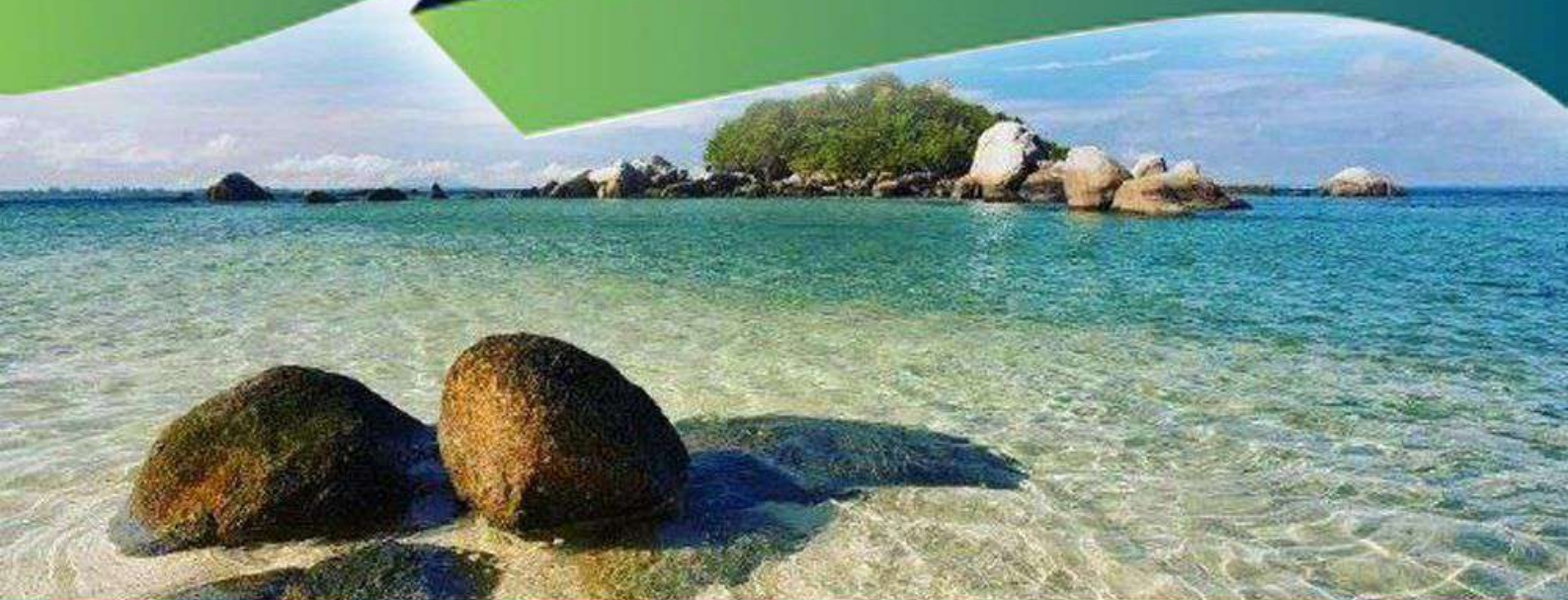


PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERUBAHAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017-2022



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. berdasarkan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa salah satu point perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila terjadi perubahan kebijakan nasional;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tahun 2019 menunjukkan ketidaksesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah serta RKPD dengan RPJMD;
 - d. bahwa telah terjadi perubahan mendasar terkait dengan kebijakan nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan terbitnya Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Negara sehingga RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu dilakukan penyesuaian terhadap RPJMN 2020-2024 dan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan Perangkat Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
dan
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10, Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

“Pasal 1”

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Gubernur dan wakil Gubernur.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
9. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
10. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.
14. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
17. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
21. Sasaran pokok adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian arah kebijakan pembangunan pada setiap tahapan pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
22. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah yang dilaksanakan secara bertahap.
23. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur untuk pencapaian kinerja suatu sasaran dalam bentuk dampak (*impact*).
24. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
25. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

26. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.
 27. Rencana tata ruang wilayah provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah rencana struktur tata ruang provinsi yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Ketentuan BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

“Pasal 5”

- 1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah.
 - 2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPJM Daerah; dan
 - b. pelaksanaan RPJM Daerah.
 - 3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJM Daerah;
 - b. pelaksanaan RPJM Daerah; dan
 - c. hasil RPJM Daerah.
 - 4) Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dengan pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah;
 - 7) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RPJM Daerah.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 6”

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJM Daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila:

- a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. sisa masa berlaku RPJM Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.
 - (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
 - (4) Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7”

Tahapan penyusunan RPJM Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJM Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 Juli 2020

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang

pada tanggal 6 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


NAZIARTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020
NOMOR 4 SERI E TAHUN 2020

DAFTAR ISI

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017-2022	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-5
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-7
1.3.1. Keselarasan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017- 2022	I-8
1.3.2. Keselarasan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017- 2022	I-8
1.3.3. Keselarasan RTRW Tahun 2014-2034 dan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017- 2022	I-9
1.3.4. Keselarasan KLHS dan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022	I-11
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-12
1.4.1. Maksud.....	I-12
1.4.2. Tujuan	I-13
1.5. Sistematika Penulisan	I-13
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
A. Kondisi Geografi Daerah.....	II-1
1. Kondisi Astronomis dan Geografi	II-1
2. Luas dan Daerah Administratif.....	II-3
3. Keadaan Topografi, Geologi dan Hidrologi.....	II-4
4. Klimatologi.....	II-5
5. Kondisi Lahan.....	II-5
B. Potensi Pengembangan Wilayah	II-6
1. Rencana Sistem Perkotaan	II-6
2. Rencana Sistem Jaringan Transportasi.....	II-6

3.	Rencana Jaringan Energi	II-9
4.	Rencana Jaringan Telekomunikasi.....	II-12
5.	Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air	II-13
6.	Sistem Prasarana Lingkungan.....	II-14
7.	Rencana Pola Ruang	II-14
2.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-32
2.2.1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-32
2.2.2.	Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-45
2.2.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-52
2.3.	Aspek Pelayanan Umum.....	II-56
2.3.1.	Fokus Layanan Urusan Wajib.....	II-57
2.3.2.	Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-67
2.3.3.	Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-88
2.3.4.	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Umum	II-99
2.3.5.	Fokus Layanan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan. II-101	
2.3.6.	Fokus Layanan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan .. II-103	
2.3.7.	Fokus Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan ... II-107	
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah	II-108
2.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-108
2.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-111
2.4.3.	Fokus Iklim Berinvestasi.....	II-114
2.4.4.	Fokus Sumber Daya Manusia	II-117
2.5.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	II-119
2.6.	Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	II-134
A.	Urusan Pendidikan.....	II-134
B.	Urusan Kesehatan.....	II-135
C.	Urusan Pekerjaan Umum.....	II-135
D.	Urusan Perumahan Rakyat	II-136
E.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	II-138
F.	Urusan Sosial	II-138

BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1.	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014-2018	III-1
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	III-2
3.1.1.1.	Kinerja Pendapatan Daerah	III-2
3.1.1.2.	Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah	III-12
3.1.1.3.	Kinerja Pembiayaan Daerah	III-20
3.1.2.	Neraca Daerah.....	III-21
3.1.2.1.	Pertumbuhan Neraca Daerah.....	III-21
3.1.2.2.	Rasio Neraca.....	III-26
3.1.3.	Prediksi Kemampuan Keuangan Daerah	III-27

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014-2018	III-29
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-29
3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah	III-29
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan.....	IV-1
4.1.1. Permasalahan Daerah	IV-1
4.1.2. Permasalahan Daerah Berdasarkan Urusan	IV-8
A. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	IV-8
B. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	IV-12
C. Urusan Pilihan.....	IV-20
D. Urusan Pendukung Urusan Pemerintah	IV-24
E. Urusan Penunjang Urusan Pemerintah.....	IV-24
F. Unsur Pengawasan Pemerintahan.....	IV-26
4.1.3. Permasalahan Prioritas Pembangunan Daerah	IV-27
4.2. Isu Strategis.....	IV-32
4.3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	IV-42
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	V-1
5.1. Visi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022	V-3
5.2. Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022	V-5
5.3. Tujuan dan Sasaran	V-6
5.4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	V-26
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	V-1
6.1. Strategi dan Arah kebijakan.....	VI-2
6.1.1 Strategi Pencapaian Sasaran.....	VI-2
6.1.2 Arah Kebijakan	VI-22
6.2. Program Pembangunan Daerah	VI-41
6.2.1 Prioritas Pembangunan Daerah.....	VI-41
6.2.2 Program Pembangunan Daerah.....	VI-43
6.2.3 Tema Prioritas Pembangunan Daerah	VI-135
6.2.4 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Progam Perangkat Daerah	VI-135
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	VII-1
7.1. Analisis Keuangan Daerah.....	VII-1
7.1.1. Pendapatan Daerah.....	VII-1

7.1.2.	Belanja Daerah	VII-5
7.2.	Kerangka Pendanaan.....	VII-6
7.2.1	Analisis Pengeluaran Perodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama.....	VII-7
7.2.2.	Proyeksi Data Masa Lalu	VII-13
7.2.3	Penghitungan Kerangka Pendanaan.....	VII-15
7.3.	Indikasi Rencana Program Prioritas.....	VII-30
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII-1
8.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	VIII-1
8.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK)	VIII-4
BAB IX	PENUTUP.....	IX-1
9.1.	Pedoman Transisi	IX-1
9.2.	Kaidah Pelaksanaan	IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Keselarasan Hubungan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.....	I-8
Tabel I.2	Keselarasan Dokumen RPJMD Dengan RPJPD.....	I-9
Tabel I.3	Keselarasan Dokumen RTRW 2014-2034 dengan Perubahan RPJMD 2017-2022.....	I-10
Tabel I.4	Capaian TPB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	I-12
Tabel II.1	Luas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.....	II-3
Tabel II.2	Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-5
Tabel II.3	Sistem Pelabuhan Laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-8
Tabel II.4	Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik 2010 – 2030– KVA... ..	II-10
Tabel II.5	Rasio Desa Berlistrik PLN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-11
Tabel II.6	Potensi Energi Baru dan Terbarukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-12
Tabel II.7	Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Sambungan Telepon 2010 – 203... ..	II-13
Tabel II.8	Luas Lahan (ha) menurut Penggunaan Lahan Per-Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018.....	II-19
Tabel II.9	Potensi Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 (ton).....	II-22
Tabel II.10	Potensi Bahan Galian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 (ton).....	II-22
Tabel II.11	Kawasan Peruntukan Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-23
Tabel II.12	Wilayah yang Berpotensi Rawan Bencana dan Jenis Bencana yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-27
Tabel II.13	Data Bencana Alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.....	II-29
Tabel II.14	Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015-2019.....	II-29
Tabel II.15	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019.....	II-30
Tabel II.16	Jumlah Penduduk Kepulauan Bangka Belitung menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019.....	II-31
Tabel II.17	PDRB Tahun 2015 –2019 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Miliar Rupiah).....	II-32

Tabel II.18	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 – 2019.....	II-34
Tabel II.19	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2015–2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Miliar Rupiah)....	II-35
Tabel II.20	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 – 2019.....	II-36
Tabel II.21	Perkembangan PDRB/PDB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional (miliar/triliun rupiah) Tahun 2015 – 2019.....	II-37
Tabel II.22	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional (miliar/triliun rupiah) Tahun 2015–2019.....	II-37
Tabel II.23	Kontribusi Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019.....	II-39
Tabel II.24	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung dan Nasional.....	II-41
Tabel II.25	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Bangka Belitung.....	II-41
Tabel II.26	Perkembangan Kemiskinan Tahun 2015-2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-42
Tabel II.27	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa Tahun 2014-2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-43
Tabel II.28	Data Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-43
Tabel II.29	Data Tingkat Pengangguran Tahun 2015 s.d. 2019 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-44
Tabel II.30	Data Pengangguran Tahun 2015 s.d. 2019 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-44
Tabel II.31	Angka Harapan Sekolah Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-45
Tabel II.32	Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2015 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-46
Tabel II.33	Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2019-2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-47
Tabel II.34	Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-48
Tabel II.35	Angka Kematian Ibu menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013 s.d. 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-48

Tabel II.36	Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2015-2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-49
Tabel II.37	Perkembangan Persentase Balita Stunting Tahun 2015 s.d. 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-50
Tabel II.38	Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2015 s.d. 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-51
Tabel II.39	Data Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2015 s.d. 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-51
Tabel II.40	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2016 s.d. 2020....	II-52
Tabel II.41	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2019-2020 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-53
Tabel II.42	Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Atletik dan Sepak Bola Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-54
Tabel II.43	Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Voli dan Bulu Tangkis Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-55
Tabel II.44	Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Basket Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-55
Tabel II.45	Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Pencak Silat Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-56
Tabel II.46	Perkembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-56
Tabel II.47	Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2015 s.d. 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-109
Tabel II.48	Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019	II-110
Tabel II.49	Indikator Pengeluaran Non Pangan Perkapita Tahun 2019 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.....	II-110
Tabel II.50	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019.....	II-111
Tabel II.51	Jumlah Penumpang Angkutan (Jiwa/Orang).....	II-112
Tabel II.52	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-112
Tabel II.53	Rasio luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-113
Tabel II.54	Infrastruktur dan Fasilitas Penunjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-113
Tabel II.55	Jumlah Peraturan Daerah yang mendukung Iklim Investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-115

Tabel II.56	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-117
Tabel II.57	Pemetaan Capaian Indikator Pembangunan terhadap Target/Indikator TPB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-119
Tabel II.58	SPM Urusan Pendidikan.....	II-134
Tabel II.59	SPM Urusan Kesehatan.....	II-135
Tabel II.60	SPM Urusan Pekerjaan Umum.....	II-136
Tabel II.61	SPM Urusan Perumahan Rakyat.....	II-137
Tabel II.62	SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	II-138
Tabel II.63	SPM Urusan Sosial.....	II-39
Tabel III.1	Target dan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bangka Belitung Tahun 2014-2018.....	III-2
Tabel III.2	Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2014-2018.....	III-2
Tabel III.3	Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pembiayaan Pembangunan Tahun Anggaran 2014-2018.....	III-4
Tabel III.4	Realisasi PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 2018 menurut jenis PAD.....	III-5
Tabel III.5	Target dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018.....	III-5
Tabel III.6	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018.....	III-6
Tabel III.7	Realisasi Hasil PMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018.....	III-6
Tabel III.8	Realisasi Lain-lain PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2016.....	III-7
Tabel III.9	Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018.....	III-8
Tabel III.10	Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018.....	III-8
Tabel III.11	Dana Alokasi Umum / Penyeimbang DAU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018.....	III-9
Tabel III.12	Realisasi Pos Dana Alokasi Khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018.....	III-10
Tabel III.13	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018.....	III-10
Tabel III.14	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014 s/d Tahun 2018.....	III-11
Tabel III.15	Target dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018.....	III-12

Tabel III.16	Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018.....	III-13
Tabel III.17	Realisasi Belanja Pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018.....	III-14
Tabel III.18	Realisasi Belanja Subsidi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018.....	III-14
Tabel III.19	Realisasi Belanja Hibah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018.....	III-15
Tabel III.20	Realisasi Belanja Bantuan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018.....	III-15
Tabel III.21	Realisasi Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2014-2018.....	III-16
Tabel III.22	Realisasi Belanja Bantuan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2014-2018.....	III-16
Tabel III.23	Realisasi Belanja Tidak Terduga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018.....	III-17
Tabel III.24	Realisasi Belanja Langsung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018.....	III-17
Tabel III.25	Realisasi Belanja Pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018.....	III-18
Tabel III.26	Realisasi Belanja Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018.....	III-18
Tabel III.27	Realisasi Belanja Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018.....	III-19
Tabel III.28	Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	III-19
Tabel III.29	Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018.....	III-20
Tabel III.30	Realisasi Penerimaan Pembiayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018.....	III-20
Tabel III.31	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018.....	III-21
Tabel III.32	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018.....	III-23
Tabel III.33	Rasio Likuiditas Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018.....	III-26
Tabel III.34	Rasio Solvabilitas Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018.....	III-27
Tabel III.35	Prediksi Kemampuan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.....	III-28

Tabel III.36	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018.....	III-29
Tabel III.37	Surplus/(Defisit) Riil Anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	III-30
Tabel III.38	Komposisi Penutup Defisit Anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	III-30
Tabel III.39	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	III-31
Tabel IV.1	8 (Delapan) Area Perubahan.....	IV-38
Tabel V.1	Perubahan Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan RPJMD 2017 – 2022Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	V-7
Tabel V.2	Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD 2017 – 2022Provinsi KepulauanBangka Belitung.....	V-8
Tabel V.3	Keterkaitan Perubahan Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja Sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2017 – 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	V-13
Tabel V.4	Visi, Misi, Tujuan, Indikator Kerja Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran Perubahan RPJMD 2017 – 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	V-23
Tabel V.5	Target Indikator Kinerja Tujuan Perubahan RPJMD 2017 – 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	V-28
Tabel V.6	Target Indikator Kinerja Sasaran Perubahan RPJMD 2017 – 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	V-31
Tabel VI.1	Perbandingan Strategi Pembangunan.....	VI-2
Tabel VI.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi.....	VI-8
Tabel VI.3	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan.....	VI-45
Tabel VI.4	Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah (Sebelum Perubahan).....	VI-104
Tabel VI.5	Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah (Setelah Perubahan).....	VI-136
Tabel VI.6	Arah Kebijakan dan Sasaran Kegiatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022.....	VI-157
Tabel VI.7	Arah Kebijakan dan Sasaran Kegiatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021dan 2022.....	VI-175
Tabel VII.1	Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018.....	VII-2
Tabel VII.2	Proyeksi dan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.....	VII-4

Tabel VII.3	Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018.....	VII-6
Tabel VII.4	Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018.....	VII-11
Tabel VII.5	Prediksi Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022.....	VII-13
Tabel VII.6	Realisasi dan Prediksi PAD dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022.....	VII-14
Tabel VII.7	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.....	VII-14
Tabel VII.8	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Lalu (SILPA) pada APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.....	VII-15
Tabel VII.9	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.....	VII-16
Tabel VII.10	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022.....	VII-18
Tabel VII.11	Realisasi dan Proyeksi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.....	VII-19
Tabel VII.12	Realisasi dan Proyeksi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.....	VII-22
Tabel VII.13	Tabel Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	VII-28
Tabel VII.14	Tabel Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	VII-29
Tabel VII.15	Indikasi Program Pembangunan Prioritas dan Pendanaan Berdasarkan Urusan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.....	VII-31
Tabel VIII.1	Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.....	VIII-2
Tabel VIII.2	Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022	VIII-5
Tabel VIII.3	Sasaran Pokok Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022	VIII-14

DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.....	II-30
Grafik II.2	Piramida Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 dan Proyeksi pada Tahun 2020.....	II-32
Grafik II.3	Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Wilayah Sumatera dan Indonesia Tahun 2016.....	II-33
Grafik II.4	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 – 2019.....	II-38
Grafik II.5	Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019.....	II-38
Grafik II.6	Perbandingan Inflasi Pangkalpinang, Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Nasional 2015 – 2019.....	II-39
Grafik II.7	Indeks Gini Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019.....	II-40
Grafik II.8	Indeks Ketimpangan Williamson Tahun 2010 – 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-42
Grafik II.9	Persentase Bayi kurus dan <i>Stunting</i> Tahun 2018 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-49
Grafik II.10	APK dan APM SMA/SMK/SLB.....	II-57
Grafik II.11	APK SMA, SMK dan SLB.....	II-58
Grafik II.12	SMA, SMK, SLB Terakreditasi A.....	II-58
Grafik II.13	Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan.....	II-59
Grafik II.14	Akreditasi Rumah Sakit.....	II-60
Grafik II.15	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap.....	II-61
Grafik II.16	Rasio Irigasi.....	II-61
Grafik II.17	Penyediaan Air Baku dan Luas Kawasan Terlindungi dari Daya Rusak Air.....	II-62
Grafik II.18	Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak.....	II-63
Grafik II.19	Akses Sanitasi Layak.....	II-63
Grafik II.20	Indeks Risiko Bencana.....	II-64
Grafik II.21	Indeks Ketahanan Daerah.....	II-65
Grafik II.22	Pelanggaran Perda dan Perkada Yang Ditindaklanjuti.....	II-65
Grafik II.23	Indeks Pembangunan Sosial.....	II-66
Grafik II.24	Data PMKS dan PSKS 2015-2019.....	II-67
Grafik II.25	Indeks Pembangunan Gender (IPG).....	II-68

Grafik II.26	Industri Rumah Tangga Bagi Perempuan.....	II-68
Grafik II.27	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan.....	II-69
Grafik II.28	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempakan.....	II-70
Grafik II.29	Skor PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi.....	II-71
Grafik II.30	Prevalence of Undernourishment.....	II-71
Grafik II.31	Penyelesaian Kasus Tanah.....	II-72
Grafik II.32	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	II-73
Grafik II.33	Pengaduan/Kasus Lingkungan Hidup.....	II-74
Grafik II.34	Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan PPLH.....	II-74
Grafik II.35	Izin Lingkungan Yang Dikeluarkan Provinsi.....	II-75
Grafik II.36	Kampung Keluarga Berencana (KB).....	II-76
Grafik II.37	Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II-76
Grafik II.38	Badan Usaha Milik Desa.....	II-77
Grafik II.39	Indeks Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan.....	II-78
Grafik II.40	Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).....	II-79
Grafik II.41	Nilai Investasi.....	II-79
Grafik II.42	Jumlah Perizinan.....	II-80
Grafik II.43	Indeks Pembangunan Pemuda.....	II-81
Grafik II.44	Indeks Pembangunan Olahraga.....	II-81
Grafik II.45	Layanan Infrastruktur Teknologi dan Kapasitas Layanan Publik Pemerintah Berbasis e-Government.....	II-82
Grafik II.46	Data dan Informasi Statistik yang Digunakan untuk Perencanaan dan Pengambilan Kebijakan.....	II-83
Grafik II.47	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKK).....	II-84
Grafik II.48	Persentase Cagar Budaya Dilestarikan dan Dikelola.....	II-84
Grafik II.49	Persentase Perpustakaan yang Dibina.....	II-85
Grafik II.50	Koleksi Buku di Perpustakaan.....	II-86
Grafik II.51	Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Standar Baku.....	II-86
Grafik II.52	Persentase Koperasi Aktif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-87
Grafik II.53	Jumlah UMKM yang Diberdayakan.....	II-88
Grafik II.54	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen).....	II-88
Grafik II.55	Pertumbuhan Produksi Perikanan.....	II-89
Grafik II.56	Pertumbuhan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan.....	II-90
Grafik II.57	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan.....	II-90

Grafik II.58	SDM Pariwisata Tersertifikasi.....	II-91
Grafik II.59	Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian.....	II-92
Grafik II.60	Produksi Komoditi Strategis Tanaman Pangan & Holtikultura.....	II-92
Grafik II.61	Produksi Lada dan Karet.....	II-93
Grafik II.62	Populasi Ternak Sapi dan Ayam.....	II-94
Grafik II.63	Kawasan Perhutanan Sosial.....	II-95
Grafik II.64	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kritis.....	II-96
Grafik II.65	Rasio Elektrifikasi.....	II-96
Grafik II.66	Perkembangan Ekspor dan Impor Tahun 2014 s.d. 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (juta U\$).....	II-97
Grafik II.67	Laju Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah.....	II-98
Grafik II.68	Kawasan Transmigrasi.....	II-99
Grafik II.69	Nilai Kebebasan Sipil	II-100
Grafik II.70	Nilai Lembaga Demokrasi.....	II-100
Grafik II.71	Nilai Hak-Hak Politik.....	II-101
Grafik II.72	Nilai SAKIP.....	II-102
Grafik II.73	Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan.....	II-102
Grafik II.74	Konsistensi Program Pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD.....	II-103
Grafik II.75	Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020.....	II-104
Grafik II.76	Indeks Profesionalitas ASN.....	II-105
Grafik II.77	Opini BPK.....	II-105
Grafik II.78	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD.....	II-106
Grafik II.79	Persentase Jumlah Pelayanan Penghubung yang Terlaksana.....	II-107
Grafik II.80	Indeks Reformasi Birokrasi.....	II-107
Grafik II.81	Persentase Meningkatnya Fungsi Lembaga DPRD.....	II-108
Grafik II.82	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019.....	II-109
Grafik II.83	Angka Kriminalitas.....	II-114
Grafik II.84	Jumlah Demo.....	II-115
Grafik II.85	Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah.....	II-117
Grafik II.86	Rasio Ketergantungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-118

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Keterkaitan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	II-1
Gambar II.1	Gambar Lokasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-1
Gambar II.2	Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).....	II-2
Gambar II.3	Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-2
Gambar II.4	<i>Traffic Flow</i> pada Ruas Jalan Nasional dan Provinsi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-7
Gambar II.5	Pengembangan Jalur Pelayaran Laut.....	II-7
Gambar II.6	Kondisi Kelistrikan Bangka Belitung.....	II-9
Gambar II.7	Rencana Pembangunan Transmisi Bangka Belitung 2017-2026 (RUPTL).....	II-10
Gambar II.8	Energi Baru dan Terbarukan.....	II-11
Gambar II.9	Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-14
Gambar II.10	Sebaran Hutan Produksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-17
Gambar II.11	Arahan Indikatif Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi dalam RKTP Tahun 2014-2034.....	II-18
Gambar II.12	Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-20
Gambar II.13	Peta Kawasan Tambang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-21
Gambar II.14	Potensi Pengembangan Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-24
Gambar II.15	Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-25
Gambar II.16	Peta Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-26
Gambar II.17	Peta Rawan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah. Dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RPJM Daerah selain merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah, RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (periode ketiga) dan RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034. Sementara itu, sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional, RPJMD juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), disamping menelaah RPJMD dan RTRW Provinsi lain yang berdekatan, agar terdapat keselarasan pembangunan antar wilayah dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain mempedomani RPJMN dan RPJP Daerah, juga dilakukan penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Penyusunan RPJM Daerah ini dilakukan secara komprehensif dan terpadu, dengan mengutamakan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dijabarkan dari Visi, Misi dan Program Gubernur/Wakil Gubernur terpilih dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat/pemangku kepentingan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Pendekatan yang dilakukan dalam menyusun RPJM Daerah terdiri dari pendekatan politik, pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif serta pendekatan atas bawah dan bawah atas, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 diarahkan untuk mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, periode 2017-2022 yaitu: ***“Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”***.

Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:

1. meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;
2. mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;
3. meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;
4. meningkatkan kesehatan masyarakat;
5. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;
6. meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.

Di dalam perkembangannya, setelah ditetapkan kurang lebih 2 (dua) tahun terjadi beberapa perubahan asumsi ekonomi dan pendapatan daerah akibat belum membaiknya perekonomian global dan nasional yang berimplikasi terhadap harga komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Turunnya harga komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengakibatkan sulitnya mencapai target pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah serta target sasaran lainnya. Hal ini tentu berpengaruh terhadap eksistensi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah disusun. Mengingat terdapat kemungkinan terjadinya kesenjangan antara prediksi yang termuat dalam perencanaan dengan perkembangan dinamika yang terjadi ditengah masyarakat maka diberikan ruang untuk melakukan perubahan.

Berdasarkan Pasal 342 (1) Permendagri 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
- c) terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Ketentuan Pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada dasarnya merupakan ketentuan yang mengatur persyaratan untuk melakukan perubahan RPJMD. Pada ayat (1) pasal 342 di atas pointnya berkenaan dengan hasil pengendalian dan evaluasi. Pasal 180 ditegaskan bahwa pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan:

1. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
2. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;
3. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;
4. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD;
5. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Selain hal tersebut, dalam pasal 342 ayat (2), dinyatakan bahwa dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. Dalam hal ini berdasarkan masa sisa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tanggal 27 April 2017 tentang Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masa jabatan 2017-2022 dan sisa masa berlaku RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan berakhir di tahun 2022 nanti sangat memungkinkan untuk dilakukan perubahan.

Berdasarkan uraian diatas, secara umum yang melatarbelakangi Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017–2022 antara lain:

1. asumsi perencanaan terhadap kemampuan keuangan yang diproyeksikan optimis berimplikasi kepada asumsi pendanaan belanja program Perangkat Daerah dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017–2022 yang akan sulit diimplementasikan jika memperhatikan kondisi real kemampuan keuangan saat ini. Asumsi perencanaan optimis ini didasarkan pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sehingga ada beberapa urusan dari kabupaten/kota yang dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi tetapi dalam penarikan pajak dan retribusi untuk peningkatan PAD Pemerintah Provinsi belum dapat dilakukan. Karena Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi yang menjadi dasar peningkatan pendapatan dari pelimpahan kewenangan belum dilakukan perubahan sampai saat ini;
2. masih belum optimalnya hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meskipun nilai SAKIP tahun 2017 yang diterima pada tahun 2018 mengalami kenaikan dari 63 menjadi 67 (dengan kategori B), namun kenaikan ini belum cukup untuk memberikan nilai tambah bagi Dana Insentif Daerah (DID). Berdasarkan evaluasi dari Kementerian PAN dan RB bahwa masih belum terintegrasinya beberapa Renstra Perangkat Daerah yang berada pada level Program Perangkat daerah dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017–2022. Sehingga ketika perlu dilakukan penajaman terhadap Program Perangkat Daerah yang berada pada Renstra Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian RPJMD, secara otomatis akan berimplikasi kepada perubahan RPJMD dimana Program Perangkat Daerah tersebut dalam RPJMD masuk kedalam Bab VII tentang Program Perangkat Daerah dan pendanaan;

3. terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Permendagri 86 Tahun 2017 tersebut ditandatangani Menteri Dalam Negeri tanggal 18 September 2017, sedangkan pengesahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 11 November 2017;
4. terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan turunannya Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mengakibatkan perubahan peraturan terkait keberadaan Perangkat daerah meliputi: Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja cabang dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peraturan Gubernur tersebut ditetapkan setelah RPJMD ditetapkan tepatnya tanggal 29 Desember 2017. Sehingga secara substansi Program Perangkat Daerah untuk intervensi ke masyarakat dan mengukur kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Cabang Dinas belum terakomodir Dalam RPJMD 2017–2022 yang ditetapkan pada tanggal 11 November 2017;
5. selain daripada itu terjadi perubahan mendasar terkait dengan kebijakan nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Presiden terpilih hasil pemilihan Presiden tanggal 17 April 2019. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJMN. RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan Rancangan RPJMN 2020-2024;
6. terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sehingga semua nomenklatur program dan kegiatan Perangkat Daerah yang digunakan didalam Perubahan RPJMD 2017–2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merujuk pada Permendagri tersebut;
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Pandemi Covid-19 membuat perlambatan dalam pencapaian target pembangunan yang berdampak langsung pada perencanaan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan sehingga dibutuhkan koreksi terhadap proyeksi target indikator makro pembangunan.

Berbagai poin-poin sebagaimana uraian di atas, mendasari penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yang dianggap penting untuk segera ditindaklanjuti dimana diantaranya menjadi pedoman/acuan Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun dokumen Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2017-2022. Perubahan Renstra PD menjabarkan rencana teknis operasional setiap urusan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun.

Dalam rangka pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan dan disusun setiap tahun. Dokumen RKPD memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja PD. Dengan berpedoman pada Renstra PD dan RKPD, setiap PD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) PD. Renja PD inilah yang menjadi acuan teknis pelaksanaan program/kegiatan tahunan PD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan idiil dalam penyusunan Perubahan RPJM Daerah ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan operasional meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah, yaitu meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional (SK Nomor 010750 A);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D).

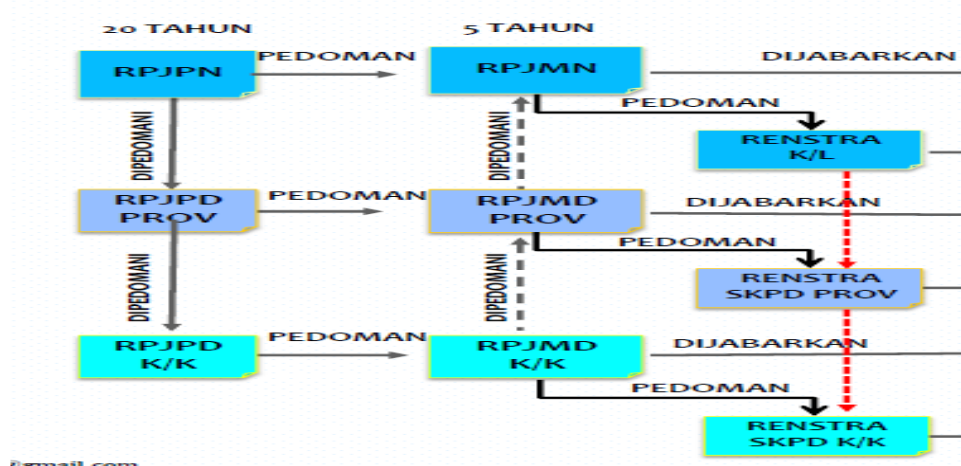
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Untuk itu RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. RPJMD merupakan dokumen perencanaan lima tahunan sebagai penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun yang mencakup RPJPN Tahun 2005-2025 dan RPJP Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025. Sedangkan dokumen perencanaan lima tahunan yaitu RPJMN 2020-2024 dan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 mengacu terhadap dokumen KLHS yang menunjukkan capaian *Sustainable Development Goals* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 juga berpedoman pada RTRW Nasional, RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Lebih lanjut, informasi dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 digunakan sebagai acuan dalam penataan ruang dalam rangka mewujudkan target pembangunan jangka menengah periode 2017-2022. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui gambar berikut,

Gambar I.1

Keterkaitan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Secara substansi, berikut adalah keselarasan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, RPJMN 2020-2024 dan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1.3.1 Keselarasan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

Untuk menjamin keselarasan dengan pembangunan nasional dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 mengacu pada RPJMN Tahun 2020-2024, sebagaimana tertuang dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Keselarasan Hubungan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

No.	RPJMN Tahun 2020-2024	Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022
	Visi	Visi
	Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi
	Misi	Misi
1.	Pembangunan Kualitas Manusia Indonesia	1. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal 2. Meningkatkan kesehatan masyarakat
2.	Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah
3.	Pembangunan Yang Merata Dan Berkeadilan	4. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas
4.	Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	5. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup
5.	Kemajuan Budaya Yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi
6.	Penegakan Sistem Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat, Dan Terpercaya	
7.	Perlindungan Bagi Segenap Bangsa Dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga	
8.	Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Dan Terpercaya	
9.	Sinergi Pemerintahan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan	

1.3.2 Keselarasan RPJPD Tahun 2005-2025 dan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

Keselarasn Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dengan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari tahapan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari visi dan misi

pembangunan RPJMD yang mendukung pada visi dan misi pembangunan RPJPD, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut,

Tabel I. 2
Keselarasan Dokumen RPJMD Dengan RPJPD

No.	RPJPD Tahun 2005-2025	Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022
	Visi	Visi
	Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Wilayah Agri-Bahari yang Maju dan Berwawasan Lingkungan, Didukung oleh Sumber Daya Manusia Handal dan Pemerintah yang Amanah Menuju Masyarakat Sejahtera	Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi
	Misi	Misi
1.	Mengembangkan potensi ekonomi lokal yang sejalan dengan upaya mewujudkan wilayah agri-bahari dan meningkatkan daya saing daerah	1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah
2.	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan IPTEK yang berbasis potensi lokal serta pemantapan Imtaq	2. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal 3. Meningkatkan kesehatan masyarakat
3.	Penguatan ketatapemerintahan yang baik (<i>good local governance</i>)	4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi
4.	Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan melalui peningkatan pembangunan daerah	5. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas
5.	Penciptaan lingkungan hidup yang asri, nyaman dan lestari bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang	6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup

1.3.3 Keselarasan RTRW Tahun 2014-2034 dan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

Keselarasan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dengan RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034. Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 - 2034. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) b yang menyatakan bahwa fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi, dengan keterkaitan sebagai berikut,

Tabel I. 3
Keselarasan Dokumen RTRW 2014-2034 dengan Perubahan RPJMD 2017-2022

No.	RTRW Tahun 2014-2034	Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022
	Tujuan	Visi
	Mewujudkan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Terpadu, Berimbang dan Berkeadilan berbasis Agro-Bahari untuk menunjang Pariwisata serta Pengendalian Wilayah Pertambangan untuk menjamin Pembangunan yang Berkelanjutan	Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi
	Strategi	Misi
1.	Penguatan karakter dan potensi unggulan pusat-pusat pertumbuhan dalam suatu sistem perkotaan yang terpadu	1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah
2.	Pengembangan ekonomi wilayah melalui perwilayahan komoditas unggulan yang berdaya saing tinggi berbasis agro-bahari	
3.	Pengembangan sektor industri pengolahan hasil agro-bahari yang didukung infrastruktur yang memadai	2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas
		3. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang mendorong penguatan fungsi-fungsi pusat pertumbuhan dan produktivitas lahan
4.	Pengembangan kepariwisataan yang berbasis budaya lokal, heritage dan bahari serta ramah lingkungan	4. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup
5.	Pengelolaan pertambangan yang lebih ramah lingkungan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal	
6.	Penciptaan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar fungsi ruang dengan basis pembangunan berkelanjutan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi

Mengacu pada tabel di atas diketahui bahwa berbagai strategi pengembangan wilayah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 telah menjadi pijakan dalam perumusan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

1.3.4 Keselarasan KLHS dan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

Keselarasannya antara RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dengan KLHS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turut berperan aktif dalam mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdapat 319 indikator sasaran dan sesuai dengan kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 202 indikator sasaran yang terbagi dalam Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17 dari TPB/SDGs dengan rincian sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan;
2. Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan;
3. Tujuan 3 : Kehidupan Sehat Dan Sejahtera;
4. Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas;
5. Tujuan 5 : Kesenjangan Gender;
6. Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi;
7. Tujuan 7 : Menjamin Akses Energi;
8. Tujuan 8 : Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak;
9. Tujuan 9 : Infrastruktur, Industri dan Inovasi;
10. Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan;
11. Tujuan 11 : Kota dan Permukiman Berkelanjutan;
12. Tujuan 12 : Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan;
13. Tujuan 13 : Penanganan Perubahan Iklim;
14. Tujuan 14 : Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Lautan;
15. Tujuan 15 : Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan;
16. Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kokoh;
17. Tujuan 17 : Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan.

Capaian indikator terbagi ke dalam 4 (empat) kategori yaitu kategori 1 (indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional), kategori 2 (indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional), kategori 3 (indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional), dan kategori 4 (indikator belum memiliki data). Capaian indikator TPB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional sebesar 25 % atau sejumlah 50 indikator. Indikator telah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional sebesar 48% atau sejumlah 96 indikator. Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebesar 10% atau sejumlah 21 indikator. Indikator yang belum memiliki data adalah sebesar 17 % atau sejumlah 35 indikator. Capaian indikator TPB setiap kategori secara rinci disajikan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Capaian TPB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Telah Mencapai Target (SS)	Belum Mencapai Target (SB)	Belum Dilaksanakan (BB)	Tidak Ada Data (T)	Jumlah Indikator
1	Tanpa Kemiskinan	5	10		3	18
2	Tanpa Kelaparan	4	6			10
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	13	20			33
4	Pendidikan Berkualitas	6	7		1	14
5	Kesetaraan Gender	5	6		1	12
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	3	7	1	10	21
7	Menjamin Akses Energi	1	2	1		4
8	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak	1	12		1	14
9	Infrastruktur, Industri, dan Inovasi		5	3		8
10	Mengurangi Kesenjangan	2	2	2		6
11	Kota dan Pemukiman Berkelanjutan	2	4	9		15
12	Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan	1	2	2		5
13	Penanganan Perubahan Iklim	1	1	1		3
14	Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Lautan	2	2	1		5
15	Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	1	2	1	1	5
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh	3	4		10	17
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan		4		8	12
		50	96	21	35	202

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan Dokumen Perubahan RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dengan maksud menyiapkan dokumen pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan sekaligus menjadi arahan serta pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4.2 Tujuan

Perubahan RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 disusun dengan tujuan:

1. menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga diperoleh tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
2. menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. menjadi pedoman penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap tahun sebagai dasar penyusunan APBD;
4. meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar PD, antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha, serta dengan masyarakat dan dengan Provinsi yang berbatasan/berdekatan;
5. memampukan Pemerintah Daerah mengukur dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan;
6. menjaga pemerataan pembangunan yang berkelanjutan antar sektor dan antar wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara efisien dan efektif;
7. menjadi pedoman penyusunan RPJM Daerah dan perencanaan penganggaran kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8. menyediakan instrumen penilaian kinerja pemerintah daerah pada setiap tahun dan akhir periode pemerintahan 5 (lima) tahunan.

1.5 Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Perubahan RPJMD terkait dengan pengaturan bab secara garis besar isi setiap bab didalamnya, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan secara singkat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan dilakukannya penyusunan RPJM Daerah.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing. Gambaran umum kondisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini akan menjadi dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah serta perumusan rencana pembangunan dalam lima tahun mendatang.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah lima tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun ke depan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Pada bab ini diuraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun ke depan, berdasarkan hasil analisis data pada bab gambaran umum kondisi daerah.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah menjadi visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022. Visi dan misi kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disertai dengan indikator kinerja dan targetnya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAERAH

Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di bab sebelumnya. Bab ini juga menguraikan arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, serta berbagai program pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan disajikan beserta indikator kinerja, nilai target indikator, pagu indikatif, serta perangkat daerah penanggung jawab penyelenggaraan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Berisikan indikator kinerja pemerintah daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB IX PENUTUP

Berisikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan sebagai landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum daerah

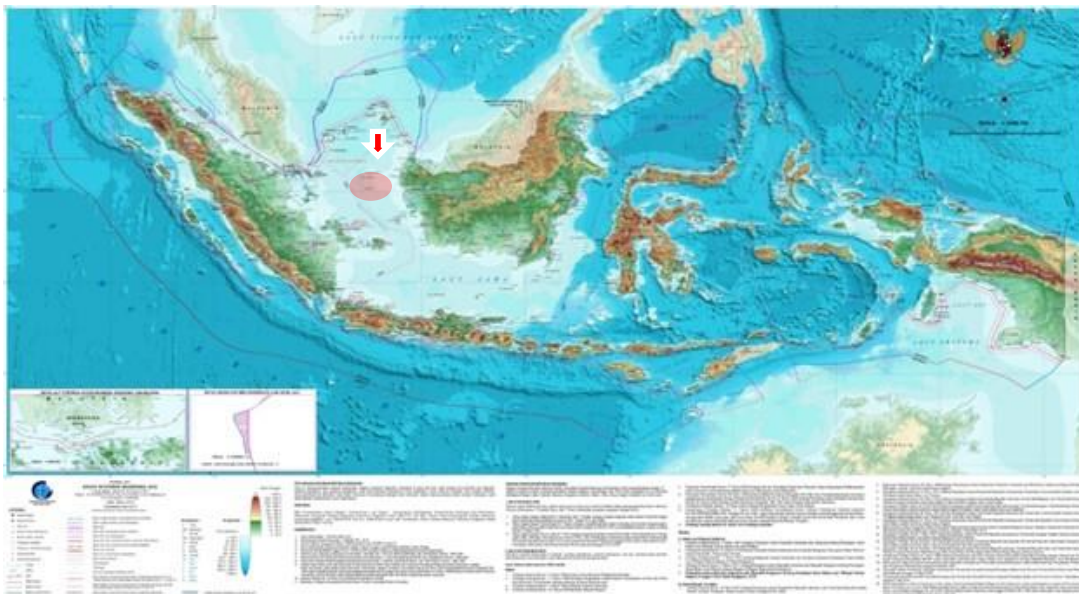
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

A. Kondisi Geografi Daerah

1. Kondisi Astronomis dan Geografi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara astronomis terletak pada 104°50' sampai 109°30' Bujur Timur dan 0°50' sampai 4°10' Lintang Selatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar II.1 berikut ini,

Gambar II.1
Gambar Lokasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG), 2018

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada wilayah Indonesia sebelah Barat, dengan posisi geografis yang sangat strategis. Berada pada pertemuan arus Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, sehingga menjadi wilayah yang kaya akan sumber daya kelautan dan perikanan. Disamping itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dekat dan berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, seperti tergambar pada peta Alur Laut Kepulauan Indonesia pada Gambar II.2. Jalur pada ALKI I yang difungsikan untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudera Hindia, dan sebaliknya; dan untuk pelayaran dari Selat Singapura melalui Laut Natuna dan sebaliknya (Alur Laut Cabang I A), berada pada posisi silang antara Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dengan Semenanjung Malaysia dan Singapura. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi berkembangnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk saat ini dan di masa yang akan datang.

Gambar II.2
Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)



Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG), 2018

Walaupun demikian, pada wilayah ALKI I terdapat beberapa potensi ancaman, terutama apabila terdapat konflik klaim wilayah di Laut Cina Selatan. Digunakannya wilayah ALKI I untuk kegiatan manuver angkatan perang negara yang terlibat konflik di Cina Selatan. Padatnya lalu lintas pelayaran di Selat Malaka, juga mempunyai potensi kerawanan dalam keamanan kawasan.

Gambar II.3
Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Sebagaimana terlihat pada Gambar II.3 posisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikelilingi oleh laut dan merupakan daerah kepulauan. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelah Barat berbatasan dengan Selat Bangka, sebelah Timur dengan Selat Karimata, sebelah Utara dengan Laut Natuna, sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.

2. Luas dan Daerah Administratif

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, yang pada saat awalnya terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung, serta 1 (satu) Kota yaitu Kota Pangkalpinang. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pemekaran, dengan membentuk 4 (empat) kabupaten baru yaitu Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota menjadi 7 (tujuh), terdiri dari 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota. Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki luas wilayah administrasi yang paling besar adalah Kabupaten Bangka Selatan dengan luas wilayah 3.607,08 km² dan Kabupaten/Kota yang paling kecil luas wilayah Administrasi adalah Kota Pangkalpinang sebesar 118,80 km².

Luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 81.725,23 km². Terdiri atas daratan seluas 16.424,23 km² atau 20,10 persen dari total wilayah, dan wilayah laut seluas 65.301,00 km² atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang secara terperinci dapat dilihat pada data Tabel II.1.

Tabel II.1
Luas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

No	Nama Kabupaten/Kota	Nama Ibu Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	Sungailiat	2.950,69	8	19	62
2	Bangka Barat	Muntok	2.820,61	6	4	60
3	Bangka Tengah	Koba	2.126,36	6	7	56
4	Bangka Selatan	Toboali	3.607,08	8	3	50
5	Belitung	Tanjung Pandan	2.293,69	5	7	42
6	Belitung Timur	Manggar	2.507,00	7	0	39
7	Pangkalpinang	Pangkalpinang	118,80	7	42	0
	Provinsi Kep. Bangka Belitung		81.725,23	47	82	309
	Luas Daratan		16.424,23			
	Luas Laut		65.301,00			

Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka, 2020

Total seluruh kecamatan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 47 kecamatan. Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan memiliki jumlah wilayah Administrasi Kecamatan yang paling banyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah masing-masing 8 kecamatan, sedangkan Kabupaten Belitung merupakan kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah Administrasi Kecamatan yakni sebanyak 5 kecamatan. Sedangkan wilayah Administrasi Kelurahan yang paling banyak adalah Kota Pangkalpinang dengan jumlah 42 kelurahan dan kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah administrasi kelurahan adalah Kabupaten Belitung Timur yang tidak memiliki wilayah kelurahan. Desa yang paling banyak adalah Kabupaten Bangka dengan jumlah 62 desa dan kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah administrasi desa adalah Kabupaten Belitung

Timur yakni sebanyak 39 desa. Adapun total seluruh desa yang ada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 309 Desa.

3. Keadaan Topografi, Geologi dan Hidrologi

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai topografi yang umumnya relatif datar yang terdiri dari dataran rendah hingga berbukit dan hanya sebagian kecil yang bergunung. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi terdapat pada puncak Gunung Maras di Kabupaten Bangka dengan ketinggian 699 meter dan puncak Gunung Tajam di Kabupaten Belitung dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut. Komposisi lahan datar di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai luas sekitar 46,19 persen, bergelombang 41,08 persen, dan sisanya 12,37 persen merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta berawa-rawa. Wilayah berawa-rawa umumnya terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah, dan sebagian kecil di Kabupaten Bangka Selatan.

Pulau Bangka dan Belitung termasuk bagian tengah dari "*Tin Mayor South East Asian Tin Belt*" dengan tipe *granit main range* yang mempunyai ciri-ciri megakristal (terutama *K-Feldspar*) dan terjadi mineralisasi timah beserta mineral ikutannya. Granit ini umumnya terdiri atas granit biotit dan granit muskovit yang semuanya merupakan tipe sedimen tipe S yang diperkirakan umurnya Trias (Sumber: Arsip PT. Koba Tin: *Survey dan Geology Department*, 2007). Oleh karena itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki cadangan timah terbesar di Indonesia yang berpotensi sebagai modal dasar pembangunan. Terdapat pula mineral-mineral ikutan timah seperti *Zircon* (ZrSiO_4), *Monazite* $[(\text{Ce}, \text{La}, \text{Dy})\text{PO}_4 (\text{ThSi})\text{O}_2]$, *Hematite* (Fe_2O_3), *Pyrite* (FeS_2), *Ilmenite* (FeTiO_3), dan *Xenotime* (YPO_4). Sedangkan secara geologis mineralisasi timah di Indonesia terikat pada sabuk granit (*granite belt*) Asia Tenggara yang memanjang dari Yunan (China) melalui Myanmar, Thailand, Semenanjung Melaka sampai pada Kepulauan Indonesia terutama di Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Singkep dan Pulau Karimun. Selain produk timah dan mineral ikutannya, ada pula produk tambang lainnya seperti pasir kuarsa (SiO_2), material Kaolin, dan *bilitonite* (dikenal dengan nama "satam"). Satam banyak digunakan untuk ornamen/hiasan cincin, bros, dan perhiasan lainnya. Sedangkan Kaolin merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas, keramik, deterjen, lem, kosmetik dan bahan untuk industri kimia. Pasir kuarsa dibandingkan dengan pasir biasa adalah lebih putih dan butirannya lebih kecil. Material ini digunakan untuk pembuatan kaca.

Hasil kajian hidrologi menyatakan bahwa daerah Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda, sehingga perairannya merupakan bagian Dangkalannya Sunda (*Sunda Shelf*) dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter. Kepulauan Bangka Belitung mempunyai dua jenis perairan yaitu perairan terbuka dan perairan semi tertutup. Perairan terbuka yang terdapat di sekitar pulau Bangka terletak di sebelah Utara, Timur dan Selatan Pulau Bangka. Sedangkan perairan semi tertutup terdapat di Selat Bangka dan Teluk Kelabat di Bangka Utara. Sementara itu perairan di Pulau Belitung umumnya bersifat perairan terbuka. Disamping sebagai daerah perairan laut, daerah Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai banyak sungai seperti: Sungai Baturusa, Sungai Kepoh, Sungai Buluh, Sungai Kotawaringin, Sungai Kampa, Sungai Layang, Sungai Manise dan Sungai Kurau di Pulau Bangka. Sedangkan di Pulau Belitung terdapat Sungai Cerucuk, Sungai Buding, dan Sungai Lenggang.

4. Klimatologi

Kepulauan Bangka Belitung memiliki Iklim Tropis yang dipengaruhi angin musim yang mengalami bulan basah dan kering. Berdasarkan data BPS yang dirilis dari BMKG selama tahun 2012-2016, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki suhu rata-rata tahunan antara 27-31 °C dan curah hujan rata-rata tahunan antara 397-580 mm. Curah hujan maximum tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 577,3 mm di Belitung dan tahun 2012 sebesar 466,2 mm di Pangkalpinang. Sementara kelembabannya relatif tinggi dengan fluktuasi yang kecil. Di bulan Desember dan Januari, biasanya musim penghujan terjadi di Kepulauan Bangka Belitung, disertai angin kencang dan ombak laut cenderung meninggi.

5. Kondisi Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh hutan negara, perkebunan, tegalan dan permukiman. Namun berdasarkan data numerik yang diperoleh dari BPS, terlihat juga bahwa lahan kering yang tidak dimanfaatkan juga cukup luas (lahan bukan sawah) mencapai 121.407 Ha. Lebih lanjut dapat diperhatikan tabel di bawah ini,

Tabel II.2
Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jenis Penggunaan Lahan	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertanian Sawah	15.719	22.771	25.058	25.093
Tegalan	113.105	117.376	99.038	97.930
Ladang	30.348	28.147	27.435	30.416
Perkebunan	441.152	367.848	391.064	394.408
Hutan Rakyat	47.753	42.637	43.315	43.661
Tambak	*	*	*	*
Kolam	*	*	*	*
Pengembalaan	1.815	2.263	3.232	3.232
Tanah kosong/ (sementara tidak diusahakan)	76.588	67.415	55.987	59.174
Lain-Lain (pekarangan)	397.806	538.195	529.810	519.497
Permukiman	517.741	455.762	489.080	490.607
Hutan Negara	*	*	*	*
Rawa	*	*	*	*
Lainnya	*	*	*	*
JUMLAH	1.642.027	1.642.414	1.664.019	1.664.018

Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka, 2019

(: dikelompokkan ke jenis penggunaan lahan lainnya)*

Dari seluruh luas lahan 69% telah digunakan untuk pertanian legal/kebun/ladang/huma, tambak, kolam/tebat/ empang, lahan untuk tanaman kayu-kayuan, perkebunan negara/swasta, dan lahan sawah. Sedangkan sisanya merupakan bangunan, pekarangan, padang rumput dan lahan yang sementara tidak diusahakan.

Luas penggunaan lahan tahun 2018 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling besar digunakan untuk lain-lain (pekarangan) 519.497 Ha, kemudian digunakan untuk permukiman sebesar 490.607 ha dan perkebunan sebesar 394.408 Ha, serta luas penggunaan lahan paling kecil diperuntukan pada pengembalaan sebesar 3.232 Ha.

B. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan potensi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034, pengembangannya disesuaikan dengan arahan yang digariskan pada RTRWN dan RTR Pulau Sumatera. Perencanaan dan pengembangan dilakukan berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis.

Perencanaan dan pengembangan rencana struktur ruang, meliputi sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem prasarana lingkungan.

1. Rencana Sistem Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014, rencana sistem perkotaan secara hierarkis dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai dengan kebijakan nasional, potensi, dan rencana pengembangan wilayah provinsi sistem perkotaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKNp), yaitu: Kota Pangkalpinang;
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi: Muntok, Tanjung Pandan, Manggar;
3. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), meliputi: Toboali dan Koba;
4. Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL), meliputi: Kelapa, Parittiga, Belinyu, Sungailiat, Sungai Selan, Sijuk, Membalong, Badau, Kelapa Kampit, Gantung, Puding Besar, Pangkalan Baru, Payung, dan Selat Nasik.

Namun berdasarkan revisi RTRW Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, ada perubahan status sistem perkotaan di mana Kota Pangkalpinang yang tadinya merupakan Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNp) naik kelas menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

2. Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Sesuai dengan karakteristik geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan wilayah kepulauan, maka sistem transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung direncanakan sebagai sistem transportasi terpadu antar moda yang meliputi sistem transportasi darat, sistem transportasi laut dan sistem transportasi udara, dengan uraian sebagai berikut:

a. Sistem Transportasi Darat

Sistem transportasi darat yang ada di Provinsi ini terdiri dari jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan serta jaringan transportasi perkotaan. Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan yang berkenaan dengan peningkatan status jalan diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, terdiri atas: jaringan jalan dan jembatan, jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Gambar. II.4
Traffic Flow pada Ruas Jalan Nasional dan Provinsi
pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Pengembangan jaringan yang menjadi kewenangan pusat diatur dengan Surat Keputusan Menteri terkait, pengembangan jaringan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi diatur dengan Surat Keputusan Gubernur. Pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan dilakukan melalui peningkatan dan pengembangan jalur penyeberangan.

b. Sistem Transportasi Laut

Sistem transportasi laut terdiri dari pelabuhan dan alur pelayaran. Pengembangan sistem transportasi laut ditujukan untuk mendukung sistem produksi, sistem pergerakan penumpang dan barang dengan sistem kegiatan perekonomian antar kawasan maupun internasional.

Gambar. II.5
Pengembangan Jalur Pelayaran Laut



Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Pengembangan sistem transportasi laut dilakukan melalui pengembangan dan/atau pembangunan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan, serta dilakukan juga melalui pengembangan alur pelayaran. Sesuai dengan RTRWN dan kewenangan Pemerintah Provinsi, sistem pelabuhan laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel II.3
Sistem Pelabuhan Laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Klasifikasi & Nama Pelabuhan	Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)
A	Pelabuhan Utama	
1	Pelabuhan Tanjung Batu	Belitung
B	Pelabuhan Pengumpul	
1	Pelabuhan Belinyu	Bangka
2	Pelabuhan Sadai	Bangka Selatan
3	Pelabuhan Muntok	Bangka Barat
4	Pelabuhan Pangkal Balam	Pangkalpinang
5	Pelabuhan Tanjung Pandan	Belitung
6	Pelabuhan Manggar	Belitung Timur
C	Pelabuhan Pengumpan	
1	Pelabuhan Sungailiat	Bangka
2	Pelabuhan Sungai Selan	Bangka Tengah
3	Pelabuhan Toboali	Bangka Selatan
4	Pelabuhan Tanjung Berikat	Bangka Tengah
5	Pelabuhan Tanjung Kalian	Bangka Barat
6	Pelabuhan Tanjung Tedung	Bangka Tengah
7	Pelabuhan Teluk Asam	Belitung Timur
8	Pelabuhan Dendang	Belitung Timur
D	Pelabuhan Khusus (Wisata)	
1	Pelabuhan Tanjung Pandan	Belitung
2	Pelabuhan Tanjung Kelayang	Belitung

Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Adapun angkutan penyeberangan meliputi simpul dan jalur sebagai berikut:

1. Pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian (Kabupaten Bangka Barat)-Tanjung Api-api (Provinsi Sumatera Selatan);
2. Pelabuhan penyeberangan Tanjung Ru (Kabupaten Bangka Barat)-Pelabuhan Belinyu (Kabupaten Bangka);
3. Pelabuhan penyeberangan Pangkal Balam (Kota Pangkal Pinang)-Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung); dan

4. Pelabuhan penyeberangan Sadai (Kabupaten Bangka Selatan)-Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung) dan Tanjung Api-api (Provinsi Sumatera Selatan).

c. **Sistem Transportasi Udara**

Sistem transportasi udara terdiri dari tatanan bandar udara dan ruang lalu lintas udara. Tatanan bandar udara terdiri dari: a) bandar udara pengumpul (*hub*); dan b) bandar udara pengumpan (*spoke*). Bandar udara pengumpul merupakan bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.

Pengembangan sistem transportasi udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdiri atas Bandar Udara Depati Amir Pangkalan Baru di Pangkalpinang dan Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin di Tanjung Pandan. Dalam pembangunan dan pengembangan bandar udara harus memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

3. **Rencana Jaringan Energi**

Rasio elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 100 persen. Dengan kondisi semua rumah tangga dan desa sudah dialiri listrik PLN. Jumlah pelanggan listrik PLN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 berjumlah 472.186 pelanggan, dengan daya terpasang sebesar 352.917 KW dan jumlah produksi listrik sebesar 1.218.892.656 KWh (Babel Dalam Angka, 2020).

Gambar. II.6
Kondisi Kelistrikan Bangka Belitung



Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Pengembangan jaringan energi ditujukan bagi pengembangan jaringan prasarana energi listrik yang meliputi prasarana pembangkit dan jaringan listrik. Pengembangan prasarana pembangkit energi listrik dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya primer, terutama sumber energi terbarukan yang banyak tersedia di Kabupaten/Kota diantaranya tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, biogas, biomassa, gelombang laut dan sumber energi alternatif lainnya. Pengembangan jaringan energi listrik dilakukan melalui pembangunan

pembangkit listrik, gardu induk dan jaringan listrik. Seiring dengan bertambahnya penduduk dan pembangunan wilayah, kebutuhan akan energi listrik tentunya akan semakin meningkat, proyeksi kebutuhan energi listrik dapat dilihat pada Tabel II.4 di bawah ini,

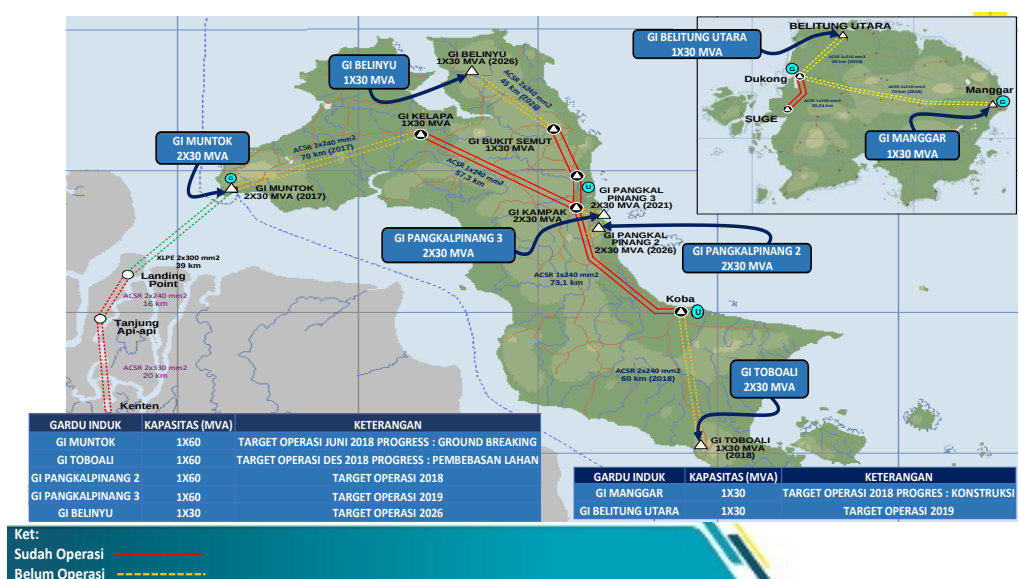
Tabel II.4
Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik 2010 – 2030– KVA

WILAYAH		2010	2015	2020	2025	2030
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. PULAU BANGKA						
1	Bangka	138.036	147.013	160.571	175.380	190.182
2	Bangka Barat	73.556	78.340	85.564	93.456	101.344
3	Bangka Tengah	89.821	95.662	104.484	114.120	123.752
4	Bangka Selatan	86.245	91.854	100.325	109.578	118.826
5	Pangkal Pinang	89.501	94.440	102.543	111.341	120.738
JUMLAH		477.159	507.309	553.487	603.875	654.842
B. PULAU BELITUNG						
6	Belitung	83.842	87.455	92.464	97.759	104.266
7	Belitung Timur	62.441	65.133	68.863	72.807	77.653
JUMLAH		146.283	152.588	161.327	170.566	181.919
JUMLAH TOTAL		623.442	659.897	714.814	774.441	836.761

Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Proyeksi kebutuhan Kebutuhan Daya Listrik 2010 – 2030– KVA pada tahun 2010 sebanyak 623.442 KK. Dimana kebutuhan daya listrik di Pulau Bangka sebanyak 477.159 KK sedangkan di Pulau Belitung sebanyak 146.283 KK. Pada tahun 2030 kebutuhan daya listrik semakin meningkat dimana kebutuhan daya listrik di Pulau Bangka sebanyak 454.842 KK sedangkan di Pulau Belitung sebanyak 836.761 KK. Artinya dari tahun 2010 kebutuhan daya listrik 2010-2030- KVA semakin meningkat sampai dengan tahun 2030 mendatang.

Gambar. II.7
Rencana Pembangunan Transmisi Bangka Belitung 2017-2026 (RUPTL)



Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Gambar. II.8
Energi Baru dan Terbarukan



Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Dengan keterbatasan alternatif pembangkit listrik maka arahan pengembangan energi listrik di Provinsi Bangka Belitung adalah pembangkit listrik berbahan bakar non minyak, salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan menggunakan bahan bakar batubara. Sedangkan untuk daerah terpencil arahan penyediaan prasarana listrik adalah dengan membangun jaringan terisolasi. Arahan pengaturan penempatan pembangkit dan jaringan transmisi bertegangan tinggi dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat dan lingkungan.

Tabel II.5
Rasio Desa Berlistrik PLN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	*Jumlah Desa	Desa Berlistrik PLN	Rasio Desa Berlistrik PLN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(%)
1	Bangka	71	71	100
2	Bangka Barat	64	64	100
3	Bangka Tengah	63	63	100
4	Pangkalpinang	42	42	100
5	Bangka Selatan	53	53	100
6	Belitung Timur	39	39	100
7	Belitung	49	49	100
Bangka Belitung		381	381	100

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian daerah. Keberhasilan pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi sangat ditentukan oleh sistem, nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun pada berbagai sistem kebijakan dalam

pelaksanaan program-program pertambangan dan energi yang ada, termasuk potensi swasta harus dapat berperan aktif sebagai mitra pembangunan di bidang pertambangan dan energi, terwujudnya pembangunan di bidang pertambangan dan energi juga dipengaruhi berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor Pertambangan dan Energi melainkan juga menjadi tanggung jawab berbagai sektor terkait.

Tabel II.6
Potensi Energi Baru dan Terbarukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	JENIS ENERGI BARU DAN TERBARUKAN (EBT)	POTENSI
(1)	(2)	(3)
1	Energi Surya	220 MW
2	Biomassa	72,45 MW
3	Energi Angin	1,67 MW
4	Energi Air	-
5	Energi Biogas POME	9,4 MW
6	Energi Biodiesel	5 MW

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Untuk kekurangan energi listrik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pihak PT. PLN (Persero) telah melakukan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x30 Megawatt di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan 2 x 16,5 MW di Suge Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006. Saat ini kedua PLTU tersebut sudah beroperasi. Sementara itu, hingga tahun 2019 dari 6 (enam) potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang tidak ada hanya jenis energi. Sedangkan untuk jenis energi surya potensinya sampai dengan tahun 2050 sebesar 220 MW.

4. Rencana Jaringan Telekomunikasi

Kebutuhan akan telepon terdiri atas kebutuhan domestik dan non domestik. Kebutuhan domestik terdiri atas untuk rumah kecil, rumah sedang dan rumah besar dengan standar masing-masing sebagai berikut:

1. 4 (empat) rumah kecil memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst);
2. 2 (dua) rumah sedang memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst); dan
3. Setiap rumah besar memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst).

Sedangkan standar kebutuhan non-domestik adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan umum dan komersil: 15 persen dari domestik;
2. Wartel: 250 jiwa per wartel; dan
3. Telepon umum: 800 jiwa per unit.

Kedepannya seiring dengan pertambahan penduduk dan pembangunan wilayah, kebutuhan akan sambungan telepon tentunya akan semakin meningkat, proyeksi kebutuhan sambungan telepon per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.7
Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Sambungan Telepon 2010 – 2030

WILAYAH		2010	2015	2020	2025	2030
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. PULAU BANGKA						
1	Bangka	32.582	36.207	39.546	43.193	45.552
2	Bangka Barat	17.363	19.294	21.073	23.017	24.258
3	Bangka Tengah	21.202	23.560	25.733	28.106	30.379
4	Bangka Selatan	20.358	22.622	24.708	26.987	29.170
5	Pangkal Pinang	21.179	23.259	25.255	27.421	29.502
	JUMLAH	112.683	124.942	136.315	148.724	158.861
B. PULAU BELITUNG						
6	Belitung	19.173	19.963	21.106	22.315	23.491
7	Belitung Timur	14.278	14.867	15.719	16.619	17.495
	JUMLAH	33.451	34.830	36.825	38.934	40.986
	JUMLAH TOTAL	146.134	159.772	173.140	187.658	199.847

Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi sistem terestrial dan sistem satelit sebagai penghubung lokal dan interlokal, pengembangan jaringan ini dilakukan hingga ke pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi. Tersedianya fasilitas telepon sangat diperlukan bagi kelancaran komunikasi dan arus informasi. Sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan kegiatan ekonomi, maka permintaan terhadap sambungan telepon akan semakin meningkat pada masa yang akan datang. Kebutuhan sambungan telepon se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2010 adalah sebanyak 146.134 sambungan telepon. Jika diasumsikan peningkatan sambungan telepon terus meningkat setiap tahunnya maka kebutuhan sambungan telepon di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan tahun 2030 adalah sebanyak 199.847 sambungan telepon. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk tiap tahunnya.

5. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Rencana sistem pengembangan sumber daya air di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi: sistem jaringan sungai, sistem jaringan irigasi, sistem jaringan air baku, sistem pengendalian banjir dan sistem pengamanan pantai, dengan rincian sebagai berikut:

- Sistem jaringan sungai berupa Wilayah Strategis Nasional yaitu WS Bangka dan Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota yaitu WS Belitung;
- Sistem jaringan irigasi terdiri atas daerah irigasi kewenangan pemerintah dan daerah irigasi kewenangan pemerintah provinsi;
- Sistem jaringan air baku terdiri dari: sumber air baku, sistem pengelolaan air baku, dan peruntukan air baku;

- d. Sistem pengendalian banjir berupa: pengamanan kawasan tangkapan air hujan, pemeliharaan dan pelestarian kawasan konservasi, pengamanan sempadan sungai, pembuatan cek dam penghambat laju daya rusak air, dan pembangunan kanal pengatur distribusi air sungai serta normalisasi sungai;
- e. Sistem pengamanan pantai dilakukan dengan cara: naturalisasi pantai dengan penghijauan, pengamanan gundukan pasir, pemecah ombak, turap dan pengamanan sempadan pantai

6. Sistem Prasarana Lingkungan

Sistem prasarana lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi: tempat pemrosesan akhir sampah (TPA Regional); tempat pengolahan dan/atau pengelolaan limbah domestik; sistem drainase; sistem pengelolaan air minum (SPAM); dan sarana prasarana lingkungan yang sifatnya menunjang kebutuhan dasar masyarakat. SPAM dikembangkan di setiap pusat kegiatan wilayah dan lokal (PKNp, PKW, PKWp, dan PKL).

Gambar II.9

Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

7. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Provinsi yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Dalam rencana pola ruang wilayah provinsi ini juga akan dijabarkan peruntukan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi.

a. Kawasan Lindung

Kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya yang terletak di wilayah kota/kabupaten lain, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi. Kawasan budidaya provinsi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Rencana pengembangan kawasan lindung, meliputi:

1) **Hutan lindung**

Sesuai dengan arahan dalam RTRWN dan kondisi ekosistem di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, rencana minimal luas kawasan lindung yang harus dipulihkan kembali dan/atau dipertahankan di provinsi ini mencapai 492.700 ha, di mana 32 persen diantaranya (atau 156.730 ha) merupakan kawasan hutan lindung. Hutan lindung yang dimaksud terdapat di Kabupaten Bangka Barat (28.589 ha), Kabupaten Bangka (15.736 ha), Kabupaten Bangka Tengah (32.226 ha), Kabupaten Bangka Selatan (28.234 ha), Kabupaten Belitung (37.583 ha) dan Kabupaten Belitung Timur (45.874 ha).

2) **Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya**

Merupakan kawasan gambut dan atau kawasan resapan air hujan. Kawasan bergambut ditetapkan dengan kriteria: kawasan tanah bergambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang termasuk dalam kategori ini hanyalah kawasan bergambut di Bangka Barat, tepatnya di Kecamatan Muntok, Sungai Teritip, Kelapa dan Jebus.

3) **Kawasan perlindungan setempat**

a) **Sempadan Pantai.** Sebagaimana diketahui bahwa Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 2 (dua) pulau besar: Bangka dan Belitung. Disamping itu terdapat pulau-pulau lain yang lebih kecil yaitu Pulau Nangka, Pulau Penyu, Pulau Burung, Pulau Lepar, Pulau Pongok, Pulau Gelasa, Pulau Panjang, Pulau Tujuh, Pulau Lima, Pulau Lengkuas, Pulau Selindung, Pulau Pelanduk, Pulau Seliu, Pulau Nadu, Pulau Mendanau, Pulau Batu Dinding, Pulau Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya. Kriteria untuk sempadan pantai adalah wilayah pantai dengan jarak 100 (seratus) meter atau lebih dari titik pasang tertinggi; atau daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

b) **Sempadan Sungai.** Adapun sungai-sungai besar yang terdapat di Kepulauan Bangka Belitung diantaranya adalah Sungai Baturusa, Sungai Buluh, Sungai Kotawaringin, Sungai Kampa, Sungai Layang, Sungai Manise dan Sungai Kurau. Ketentuan terkait sempadan sungai adalah daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar 5 (lima) meter atau lebih dari kaki tanggul sebelah luar; daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar 100 (seratus) meter atau lebih dari titik pasang tertinggi; dan daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar 50 (lima puluh) meter atau lebih dari titik pasang tertinggi.

c) **Sempadan Kolong.** Berupa kolam-kolam bekas galian timah yang tergenang air hujan atau sungai yang dalam hal ini dapat diperlakukan sebagai danau/waduk. Kawasan sempadan kolong ditetapkan dengan kriteria: wilayah daratan dengan jarak antara 50 (lima puluh) meter sampai 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi; atau daratan sepanjang tepian kolong yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik kolong.

4) **Kawasan suaka alam, pelestarian alam, situs dan kawasan cagar budaya**

a) **Kawasan Cagar Alam.** Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat cagar alam sebagai berikut: Cagar Alam Gunung Lalang-Belitung, Gunung Menumbing, Gunung

Maras, Gunung Mangkol, Gunung Permisan, dan Jering Menduyung, kawasan Gunung Tajam Belitung.

- b) **Taman Wisata Alam Laut.** Taman Wisata Alam Laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Taman Alam Laut Perairan Belitung, Perairan Belitung Timur, dan Perairan Bangka Selatan.
- c) **Kawasan Suaka Alam Laut** dan perairan lainnya adalah Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Kabupaten Bangka Tengah yang meliputi Pulau Panjang, Pulau Ketawai, Pulau Bebuar, Pulau Gusung Asam dan Pulau Semujur.

Kepulauan Bangka Belitung memiliki kawasan cagar budaya berskala internasional yang berada di bawah naungan UNESCO yaitu kawasan Kota Tua Muntok dan Bukit Menumbing. Di kawasan pusat kota terdapat mercusuar Tanjung Kalian dan Benteng Kuta Seribu yang di bangun tahun 1812-1817, Masjid Jamik dan Kelenteng Kung Fuk Nio serta Komplek Perumahan Mayor Chung A Thiam yang berusia ratusan tahun (dibangun 1830-an). Bukit Menumbing yang mempunyai ketinggian hampir 500 meter dpa dan dikelilingi hutan lindung terdapat bangunan tua yang dikenal dengan Giri Sasana Menumbing yang dibangun Belanda pada tahun 1932. Bangunan-bangunan yang dimaksud bukan saja berusia ratusan tahun namun juga mempunyai nilai sejarah, arsitektur dan budaya yang tinggi, sehingga pemerintah daerah bersama UNESCO telah menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan cagar budaya.

5) Kawasan rawan bencana

Berdasarkan data yang tersedia pada laporan RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung dapat diketahui kawasan rawan bencana, yaitu:

- a) Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Muntok, Parittiga, Kelapa, Jebus (Kabupaten Bangka Barat), Lubuk Besar, Koba, Namang dan Sungai Selan (Kabupaten Bangka Tengah), Toboali dan Pulau Besar (Kabupaten Bangka Selatan), Kota Pangkalpinang, Sungai Manggar Kecamatan Manggar, Sungai Mayang Kecamatan Kelapa Kampit, Jembatan Gantung (Kabupaten Belitung Timur), Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung), Sungai Liat, Puding Besar, Mendo Barat (Kabupaten Bangka);
- b) Kawasan rawan abrasi/erosi tersebar di Kecamatan Parit Tiga, Kecamatan Tempilang (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Koba, Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Pangkalan Baru (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Membalong, Kecamatan Badau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kecamatan Selat Nasik dan Kecamatan Sijuk (Kabupaten Belitung); Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Pesak, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Damar (Kabupaten Belitung Timur); Pantai Pasir Padi (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Lepar Pongok, Kecamatan Tukak Sadai, Kecamatan Simpang Rimba Permis, Kecamatan Toboali (Kabupaten Bangka Selatan); Kecamatan Sungailiat, Kecamatan Belinyu (Kabupaten Bangka); dan
- c) Kawasan rawan bencana longsor terdapat di Kecamatan Simpang Teritip (Kabupaten Bangka Barat).

b. Kawasan Budidaya

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, yang dimaksud kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk

dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Definisi kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sedangkan definisi hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

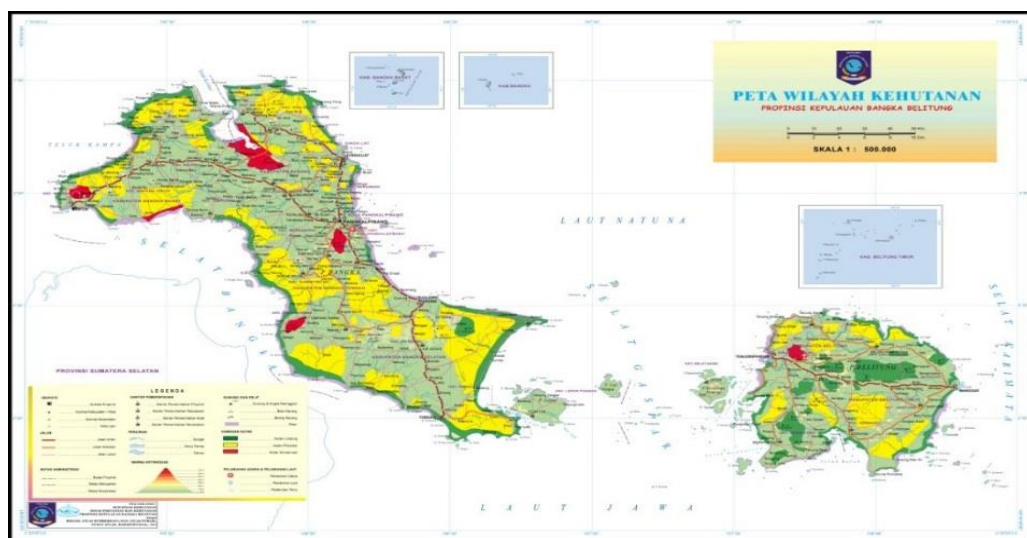
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.798/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas +19.131 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas +10.878 Hektar dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas +3.210 Hektar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan lampiran peta keputusan tersebut, kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 659.014,58 Hektar, berdasarkan fungsinya terdiri dari Hutan Konservasi 35.473,00 Ha, Hutan Lindung 189.965,00 Ha, Hutan Produksi 432.882,82 Ha, dan Hutan Produksi Konversi 692,58 Ha.

Rincian luas Hutan Produksi (HP dan HPK) di Kabupaten/Kota sebagai berikut: Kabupaten Bangka (HP 67.083,52ha; HPK 11,32 ha), Kota Pangkalpinang (HP 0,00 ha; HPK 0,00 ha) Kabupaten Bangka Selatan (HP 106.451,10 ha; HPK 0,00 ha), Kabupaten Bangka Tengah (HP 85.497,75 ha; HPK 0,00 ha), Kabupaten Bangka Barat (HP 78.368,92 ha; HPK 177,67 ha), Kabupaten Belitung (HP 43.595,77 ha; HPK 507,59 ha) dan Kabupaten Belitung Timur (HP 55.650,83 ha; HPK 0,00 ha).

Gambar II.10

Sebaran Hutan Produksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



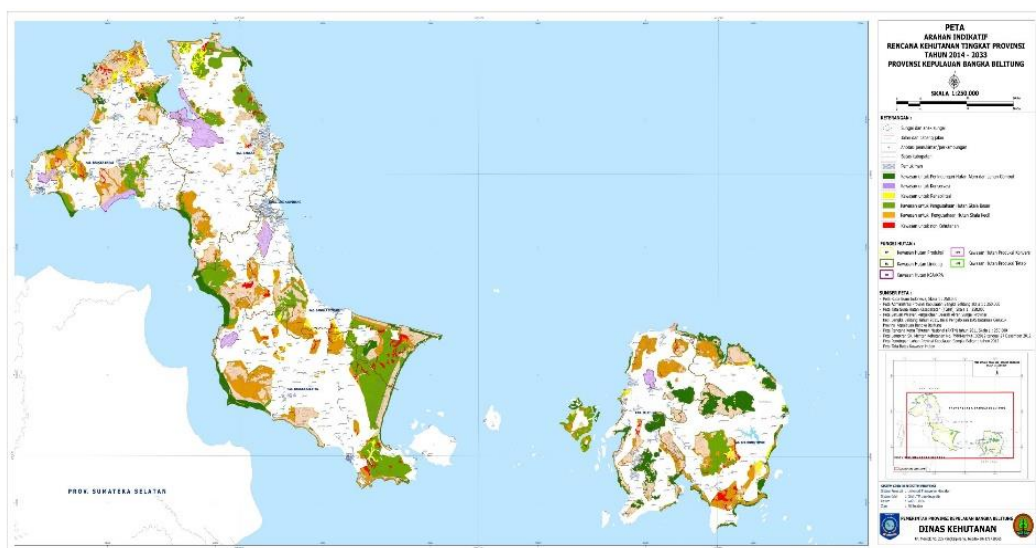
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2014-2034, Kawasan Hutan Produksi diarahkan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a) Kawasan untuk Rehabilitasi, kriteria Kawasan hutan dalam wilayah DAS kritis dan areal pertambangan.
- b) Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil, kriteria Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan berbasis masyarakat serta Hutan Produksi, Hutan Tanaman, Semak belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin, dengan luas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c) Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar, kriteria Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan serta Hutan Produksi dengan penutupan Hutan Sekunder, Hutan Tanaman, Semak Belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin.
- d) Kawasan untuk non Kehutanan, kriteria Hutan Produksi dengan penutupan hutan selain Hutan Primer, tidak bergambut lebih dari 2 meter, dengan menggunakan mekanisme izin pinjam pakai.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1940/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sampai dengan Tahun 2016, Kawasan Hutan seluas 657.378,26 ha, terdiri dari 35.750,84 ha Hutan Konservasi, 184.276,95 ha Hutan Lindung, 436.647,89 ha Hutan Produksi dan 692,58 ha Hutan Produksi Konversi.

Gambar II.11
Arahan Indikatif Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi dalam RKTP
Tahun 2014-2034



Sumber : RKTP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2034

Potensi Hasil Hutan Kepulauan Bangka Belitung, terdiri dari Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Hasil Hutan Kayu (HHK) terdiri dari jenis: meranti, ramin, membalong, mendaru, kerangas, kapuk, jelutung, pulai, mahang, manggeris, gelam, bakau, rotan, sengan, dan beberapa jenis dari kelompok rimba campuran lainnya. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) terdiri dari: gaharu, madu alam, jamur, rotan, getah karet, tanaman bahan obat (pasak bumi), tanaman penghasil buah, tanaman penghasil minyak atsiri. Selain hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, kawasan hutan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai wisata alam dan jasa lingkungan untuk mendukung

pariwisata. Bahkan telah ditetapkan 2 (dua) kawasan hutan yang dikelola melalui skema izin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Juru Seberang dan HKm Bukit Peramun di Kabupaten Belitung sebagai *Geopark* Nasional.

2) Kawasan Peruntukan Pertanian

Di wilayah kepulauan Bangka Belitung terdapat lebih kurang 903.450 ha kawasan pertanian dengan rincian kawasan pertanian tanaman pangan seluas (355.453 ha), pertanian hortikultura seluas (221.512 Ha), perkebunan seluas (316.383 Ha) dan kawasan peternakan seluas (10.102 Ha). Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis bagi masyarakat Bangka Belitung yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Bangka Belitung yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Fungsi strategis secara sosial, ekonomi dan religius bagi masyarakat agraris, terus berkurang dengan cepat karena kebutuhan terhadap lahan-lahan baru serta luas lahan yang terbatas serta laju pertumbuhan penduduk yang memerlukan lahan, alih fungsi lahan tidak dapat dihindari. Alih fungsi lahan bila tidak diantisipasi akan mengancam ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan petani dan masyarakat.

Tabel II.8

Luas Lahan (ha) menurut Penggunaan Lahan Per-Kabupaten
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

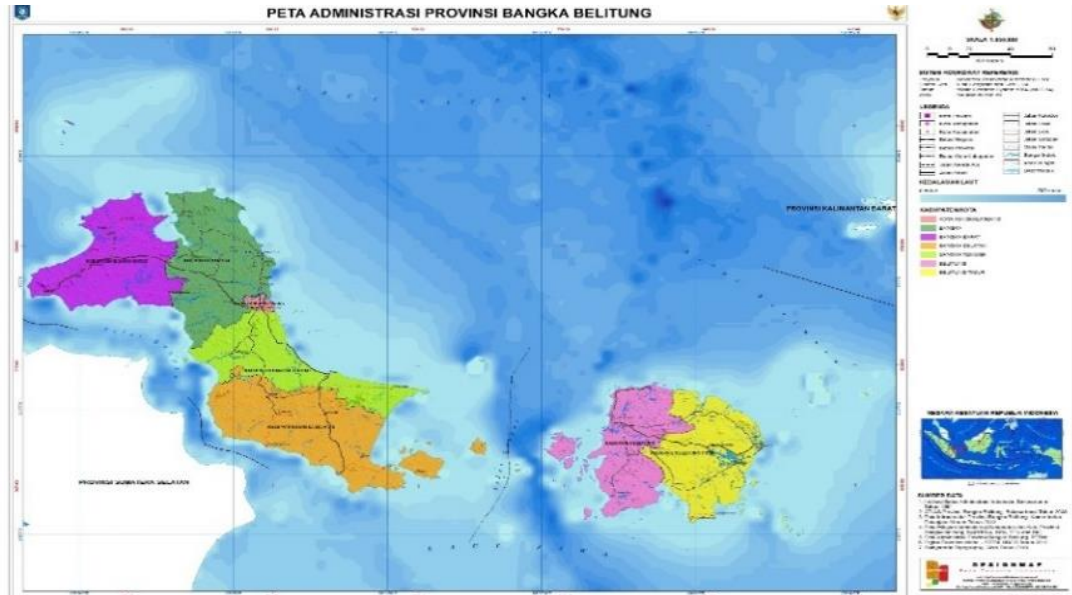
Penggunaan Lahan		Kabupaten							Luas Total (Ha)
		Bangka	Bangka Barat	Bangka Tengah	Bangka Selatan	Belitung	Belitung Timur	Pangkal Pinang	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	LAHAN PERTANIAN	236.227	195.684	168.131	231.830	195.777	143.655	2.108	1.173.412
	1.1 Lahan Sawah	3.645	2.542	306	14.789	1.159	2.832	-	25.053
	a. Irigasi	1.078	200	53	1.600	1.061	974	-	4.966
	b. Tadah hujan	943	2.342	253	11.687	98	1.858	-	17.181
	c. Pasang surut	390	-	-	-	-	-	-	390
	d. Lebak	1.054	-	-	1.502	-	-	-	2.556
		232.672	193.142	167.825	217.041	194.618	140.824	2.108	1.148.319
	a. Tegal	37.690	2.365	12.655	17.976	10.950	15.383	901	97.930
	b. Ladang	12.818	4.087	1.798	1.985	9.175	593	-	30.416
	c. Perkebunan	108.041	60.982	24.444	72.764	61.608	66.092	478	394.408
	d. Hutan rakyat	13.702	3.468	-	1.448	12.976	12.059	8	43.661
	e. Pengembalaan	-	1.049	-	557	417	1.208	1	3.232
	f. Sementara tidak diusahakan	27.544	15.820	-	5.590	2.502	7.309	410	59.174
	g. Lain-lain	32.697	105.371	128.918	116.689	96.990	38.180	311	519.497
II	LAHAN NON PERTANIAN	58.841	92.747	597.80	128.878	33.592	107.036	9.732	490.607
II.1	Jalan, Pemukiman, Perkantoran, Sungai, dll	58.841	92.747	59.780	128.878	33.592	107.036	9.732	490.607
	Jumlah	295.068	228.431	227.911	360.708	229.369	250.691	11.840	1.664.018

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2018

Sedangkan berdasarkan penggunaan lahan/*land use* atau *existing area* menurut data Statistik BPS tahun 2016 adalah luas lahan pertanian yang diusahakan 683.717 ha dari total luas lahan pertanian 1.186.652 ha. Berdasarkan data luasan areal baik RTRW

maupun penggunaan lahan dapat ditelaah bahwa potensi pembangunan pertanian masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan baik sebagai kawasan pertanian sub sektor tertentu maupun pertanian terpadu. Secara terperinci penggunaan lahan/*land use* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana gambar berikut,

Gambar II.12
Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2018

3) Kawasan peruntukan perikanan

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung dengan penyediaan pelabuhan ikan yang terdiri atas: Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN); PPN Sungailiat; PPN Tanjung Pandan; Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI); PPI Kurau; PPI Manggar; PPI Sungai Selan; PPI Sadai; PPI Selat Nasik; dan PPI Gantung.

Sebagai provinsi kepulauan pertama di Indonesia yang diapit oleh 2 (dua) pulau besar yaitu Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, wilayah laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kurang lebih 65,301.00 km² atau 79,80 persen yang memiliki potensi produksi (ton), baik perikanan tangkap maupun perikanan budi daya. Potensi perikanan tangkap sebesar 1.059.000 ton sedangkan perikanan budi daya memiliki potensi sebesar 1.316.000 ton. Meskipun demikian potensi besar untuk perikanan tangkap maupun perikanan budi daya masih belum optimal dalam pemanfaatannya. Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya: masih banyak Nelayan yang menggunakan Kapal *Trawl* yang penggunaannya sudah dilarang karena merusak lingkungan laut (terumbu karang) dan meresahkan nelayan lainnya; masih kurangnya pengawasan di laut karena luasnya perairan Bangka Belitung; kebutuhan benih untuk kegiatan budi daya sebagian besar masih didapatkan dari luar Bangka Belitung; dan pemanfaatan teknologi baru dalam kegiatan budi daya masih terbatas hal ini dikarenakan kurangnya SDM yang terlatih dan kurangnya permodalan untuk melakukan kegiatan usaha.

Selain dari pada itu terdapat potensi pada kawasan konservasi yang dikelola baru mencapai 447.785,25 ha meliputi wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

1. Tahun 2017; a). Kawasan Konservasi Perairan Gugusan Pulau-Pulau Momparang dan Perairan Sekitarnya Kabupaten Belitung Timur. Nomor SK 52/KEPMEN-KP/2017 Tanggal 22 Desember 2017, dengan status penetapan. b). Kawasan Pulau Panjang, Pulau Ketawai, Pulau Bebuar, Pulau Gusung Asam dan Pulau Semujur Kabupaten Bangka Tengah. 188.45/268/DKP /2007 Tanggal 17 Juli 2017, dengan status pencadangan.
2. Tahun 2018; Kawasan Konservasi Perairan Tuing Kabupaten Bangka 188.44/739/DKP/2018 Tanggal 27 September 2018 dengan status pencadangan.
3. Tahun 2019; Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Belitung 188.44/927/DKP/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 (Reviu Pencadangan). Status masih dalam proses penetapan.

4) Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan darat seluas +400.000 Ha di dalam WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota. Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan eksplorasi peningkatan status WIUP eksplorasi menjadi WIUP operasi produksi sesuai hasil kajian, memfasilitasi dan mengawasi kegiatan operasi produksi, identifikasi dan penetapan wilayah pertambangan rakyat, dan memfasilitasi dan mengawasi kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Penetapan kawasan peruntukan pertambangan kawasan darat seluas 357.746 Ha di wilayah WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota.

Gambar. II.13

Peta Kawasan Tambang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2019

Sementara itu, pada sektor pertambangan yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung, meskipun produksi pertambangan itu sendiri semakin berkurang saat ini, namun potensi yang dimiliki masih cukup besar. Potensi pertambangan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II.9
Potensi Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 (ton)

No	Jenis Bahan Galian	Tipe	Potensi Sumber Daya dan Cadangan					
			Timah	Bauksit	Monasit	Xenotim	Diabas	Titan Plaser
1	Logam	Sumber daya	2.564.388,929		181.735,62	20.734,223		515.188,8
		Cadangan	2.068.069,829	868.000	3.311	0,058		562
2	Biji	Sumber daya	9.970.982.968		6.384.384.512	970.843.849		6.869.184
		Cadangan	2.010.642.708,109	3.100.000	1.084	0,089		
			Titan Plaser	Besi Primer	Seng	Timbal	Perak	
1	Logam	Sumber daya	515.188,8	18.524.967,611	1.679.138	1.027.076	1.531,67	
		Cadangan	562	14,781				
2	Biji	Sumber daya	6.869.184	36.629.375,54	25.610.000	25.610.000	25.610.000	
		Cadangan		328.465,96				

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Potensi pertambangan lainnya terdapat di 6 (enam) wilayah kabupaten kecuali Kota Pangkalpinang di Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Dari 10 (sepuluh) potensi sumber daya alam, diketahui potensi sumber daya paling banyak adalah biji timah sebesar 9.970.982.967,54 ton, disusul biji monasit yaitu sebesar 6.384.384.512,00 ton. Sedangkan untuk logam perak merupakan potensi yang paling sedikit sebesar 1.531,67 ton. Sumber daya pasir kuarsa menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 690.424.868 ton, disusul granit sebesar 528.553.883 ton. Untuk data potensi bahan galian non logam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik potensi sumber daya maupun cadangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.10
Potensi Bahan Galian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 (ton)

No	Jenis Bahan Galian	Potensi Sumber Daya dan Cadangan	Potensi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kaolin	Sumber Daya	376.687.532
		Cadangan	5.990.630
2	Pasir kuarsa	Sumber Daya	690.424.868
		Cadangan	18.389.856
3	Diabas	Sumber Daya	
		Cadangan	
4	Granit	Sumber Daya	528.553.883
		Cadangan	

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

5) Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan pembangunan industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 7 (tujuh) kawasan dengan total luas kawasan sekitar 15.158 Ha yang tersebar di 7 kota/kabupaten. Ketujuh peruntukan kawasan tersebut adalah : (1) Ketapang Kota Pangkalpinang (2) Tanjung Ular dan Tanjung Kelian di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, (3) Sungailiat di Kabupaten Bangka, (4) Sadai di Kabupaten Bangka Selatan, (5) Suge di Kabupaten Belitung, (6) Air Kelik di Kabupaten Belitung Timur, dan (7) Tanjung Berikat di Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel II.11
Kawasan Peruntukan Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Nama Kawasan Industri	Dasar Hukum Pembentukan Kawasan	Luas Kawasan (Ha)	Bidang Kewenangan
1	2	3	4	5
1	Kawasan Peruntukan Industri Pangkalpinang (Ketapang)	Perda Kota Pangkalpinang No.1 Th 2012 ttg RTRW Kota Pangkalpinang 2011-2030	± 440	Pemkot Pangkalpinang
2	Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Bangka Barat (Tanjung Ular dan sekitar Tanjung Kalian)	Perda Kab. Bangka Barat No.1 Tahun 2014 ttg RTRW Kab. Bangka Barat 2014-2034	± 1.414	Pemkab Bangka Barat
3	Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Bangka (Jelitik, Sungailiat)	Perda Kab. Bangka No. 15 Tahun 2014 ttg RDTR Sungailiat 2014-2034	± 253	Pemkab Bangka
4	Kawasan peruntukan industri Kabupaten Bangka Selatan (Sadai)	Perda Kab. Bangka Selatan No.6 Tahun 2014 ttg RTRW Kab. Bangka Selatan 2014-2034	± 3.086	Pemkab Bangka Selatan
5	Kawasan peruntukan industri Kabupaten Belitung (Suge)	Perda Kab. Belitung No.3 Tahun 2014 ttg RTRW Kab. Belitung 2014-2034	± 1.414	Pemkab Belitung
6	Kawasan industri Kabupaten Belitung Timur (Air Kelik)	Perda Kab. Belitung Timur No.13 Tahun 2014 ttg RTRW Kab. Beltim 2014-2034	± 1.532	Pemkab Beltim
7	Kawasan peruntukan industri Kabupaten Bangka Tengah (Tanjung Berikat-Lubuk Besar)	Perda Kab. Bangka Tengah No.48 Tahun 2011 ttg RTRW Kab. Bangka Tengah 2011-2031	± 7.019	Pemkab Bangka Tengah
	Total Luas Kawasan		± 15.158	

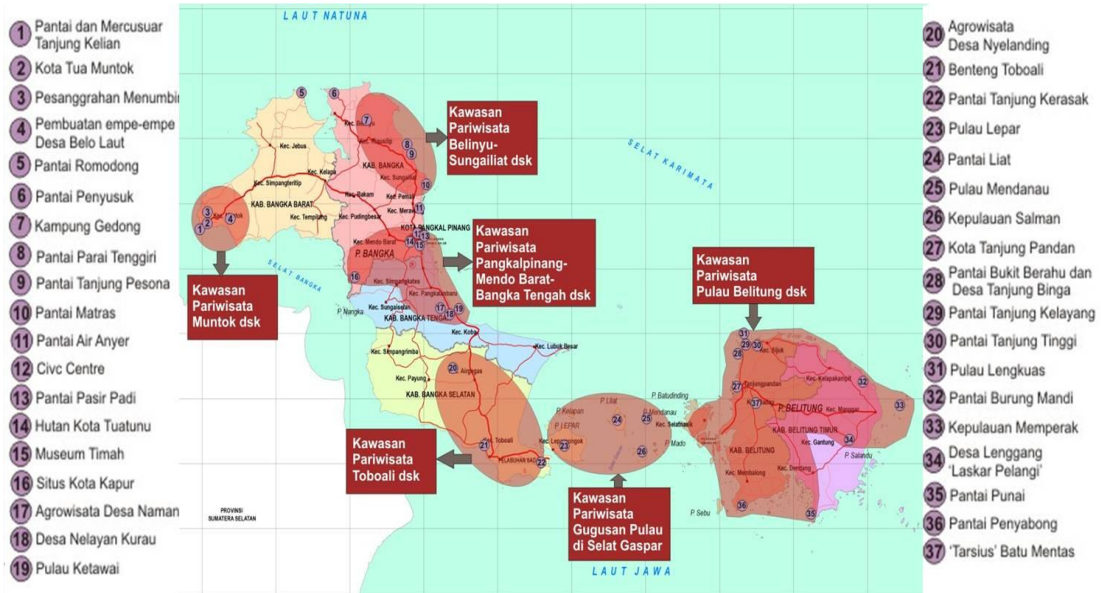
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

6) Kawasan peruntukan pariwisata

Dalam penataan ruang, kawasan pariwisata merupakan bagian dari kawasan budidaya. Kriteria yang digunakan untuk menetapkan kawasan peruntukan pariwisata adalah: memiliki daya tarik wisata; dan/atau mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan. Sebagai sektor yang ramah lingkungan, pariwisata juga diharapkan dapat menjadi penopang kehidupan masyarakat yang saat ini masih mengandalkan pada sektor pertambangan. Daya Tarik Wisata (DTW) tersebar disemua Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung, dimana Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung memiliki

81 DTW, Kabupaten Belitung Timur 120 DTW, Kabupaten Bangka Barat 47 DTW, Kabupaten Bangka Tengah 42 DTW, Kabupaten Bangka Selatan 66 DTW, dan Pangkal Pinang 25 DTW. Potensi Pengembangan Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana gambar di bawah ini,

Gambar II.14
Potensi Pengembangan Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Dalam RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah mengatur kawasan peruntukan pariwisata di wilayah provinsi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan wisata, terdiri dari:

- a) Wisata alam, meliputi:
 - a. Seluruh wilayah pesisir Pulau Bangka, Pulau Belitung dan pulau-pulau kecil;
 - b. Kawasan pariwisata bahari yang berupa kawasan pantai dan lautnya yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang ada di Kabupaten/Kota, serta kawasan Pariwisata pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Belitung Timur;
 - c. Kawasan pariwisata alam berupa kawasan wisata hutan;
 - d. Kawasan wisata alam berupa pemandian sumber air panas alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Selatan;
 - e. Taman wisata laut;
 - f. Kawasan Strategis Pariwisata Tanjung Kelayang; dan
 - g. Kawasan pariwisata alam unggulan lainnya di Kabupaten/Kota.
- b) Wisata budaya, meliputi:
 - a. Kawasan Kota Tua Mentok di Kabupaten Bangka Barat;

- b. Kawasan Situs Kota Kapur di Kabupaten Bangka;
 - c. Kawasan yang di dalamnya terdapat cagar budaya dan atau yang memiliki ciri-ciri cagar budaya di Kabupaten/Kota;
 - d. Kawasan wisata budaya yang memiliki daya tarik wisata budaya tangible maupun *intangible* yang ada di Kabupaten/Kota;
- c) Wisata buatan, meliputi:
- Kawasan wisata yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya, yang meliputi kawasan agro wisata, fasilitas rekreasi dan taman bertema dan resort serta fasilitas olahraga yang ada di Kabupaten/Kota.

7) Kawasan peruntukan permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki luas kurang lebih 25.012,7 Ha. Dibedakan menjadi kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan. Kawasan permukiman perkotaan dikembangkan pada pusat-pusat kegiatan/pelayanan seperti kawasan perkotaan Muntok, Sungailiat, Pangkalpinang, Koba, Toboali, Tanjung Pandan, dan Manggar. Sedangkan kawasan permukiman perdesaan dikembangkan pada wilayah belakang (*hinterland* dari pusat-pusat permukiman yang disebut di atas).

8) Kawasan peruntukan lainnya

Kawasan peruntukan lainnya untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa kawasan latihan militer di Kecamatan Belinyu, Sungailiat dan Kelapa Kampit. Pada kawasan ini selain terdapat instalasi militer juga merupakan kawasan latihan tempur yang mempunyai radius tempur udara (*air weapon range/AWR*), Kawasan peluncuran Rudal dan Kawasan Militer Angkatan Laut (LANAL). Kawasan ini menjadi sangat penting karena menjadi salah satu basis militer TNI dalam rangka menjaga keutuhan NKRI pada kawasan perbatasan, terutama perbatasan dengan Negara Singapura, Malaysia, Thailand dan China.

Gambar II.15
Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



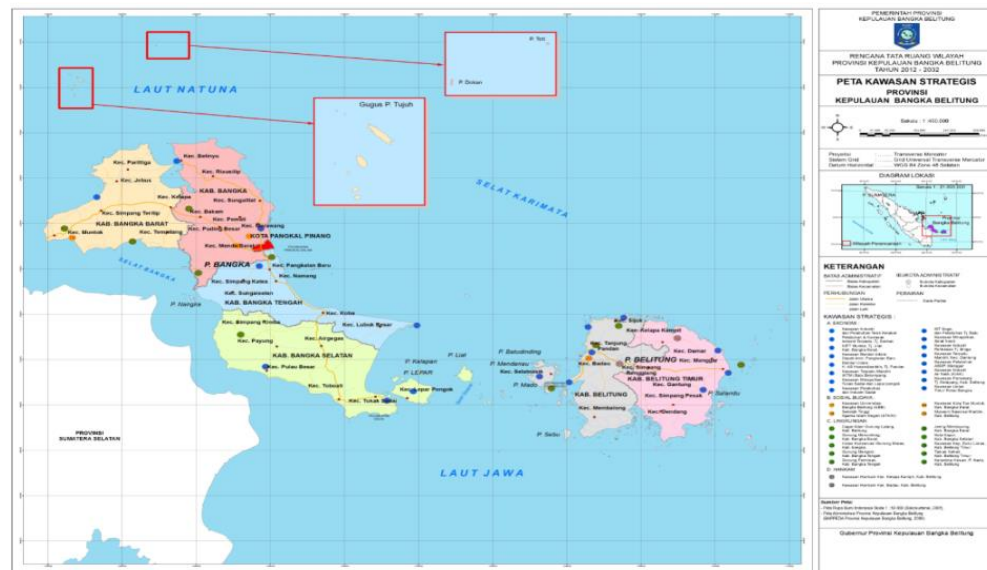
Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

c. Kawasan Strategis Provinsi

Dalam aspek keruangan, kawasan strategis merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya; Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Gambar II.16

Peta Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Penetapan kawasan strategis Provinsi terdiri atas:

- 1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
 - a) Kawasan industri dan pelabuhan Teluk Kelabat di Belinyu Kabupaten Bangka;
 - b) Kawasan pelabuhan dan industri terpadu Tanjung Berikat di Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
 - c) Kawasan industri dan pelabuhan terpadu (KIPT) Mentok di Kawasan Tanjung Ular Kabupaten Bangka Barat;
 - d) Kawasan Bandar Udara Depati Amir Pangkalan Baru dan Bandar Udara HAS Hanandjoeddin Tanjung Pandan;
 - e) Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Batu Betumpang di Kabupaten Bangka Selatan;
 - f) Kawasan minapolitan Tukak Sadai dan Lepar Pongok di Kabupaten Bangka Selatan;
 - g) Kawasan pelabuhan dan industri Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;
 - h) Kawasan industri terpadu Suge dan pelabuhan Tanjung Batu di Kecamatan Badau dan Membalong Kabupaten Belitung;

- i) Kawasan minapolitan Selat Nasik di Kabupaten Belitung;
 - j) Kawasan industri perikanan Tanjung Binga di Kabupaten Belitung;
 - k) Kawasan terpadu mandiri (Kecamatan Gantung) Kabupaten Belitung Timur;
 - l) Kawasan pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang, Kabupaten Belitung Timur;
 - m) Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK), Kabupaten Belitung Timur;
 - n) Kawasan pariwisata Tanjung Kelayang – Tanjung Tinggi, Kabupaten Belitung; dan
 - o) Kawasan lintas timur Pulau Bangka.
- 2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi: kawasan Universitas Bangka Belitung (UBB) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di Kabupaten Bangka, kawasan Kota Tua Mentok di Kabupaten Bangka Barat dan Museum Nasional Maritim di Kabupaten Belitung.
 - 3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi: Cagar Alam Gunung Lalang di Kabupaten Belitung, Gunung Menumbing di Kabupaten Bangka Barat, Hutan Konservasi Gunung Maras di Kabupaten Bangka, Gunung Mangkol di Kabupaten Bangka Tengah, Gunung Permisan di Kabupaten Bangka Selatan, Jering Menduyung di Kabupaten Bangka Barat, Kawasan Situs Kota Kapur di Kabupaten Bangka, Kawasan Kepulauan Buku Limau di Kabupaten Belitung Timur, Taman Kehati di Kabupaten Belitung dan Karantina Hewan di Pulau Nadu di Kabupaten Belitung.

C. Wilayah Rawan Bencana

Sejarah kebencanaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebabkan oleh bencana alam dan bencana sosial. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bencana alam lebih disebabkan oleh kondisi geografis seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, ancaman gelombang ekstrem dan abrasi laut yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa. Potensi rawan bencana alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti banjir, puting beliung, tanah longsor, Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Potensi bencana tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini,

Tabel II.12
Wilayah yang Berpotensi Rawan Bencana dan Jenis Bencana yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	Lokasi Bencana	Jenis Bencana
(1)	(2)	(3)
1	Bangka	Banjir, Puting Beliung, Karhutla
2	Bangka Tengah	Puting Beliung, Tanah Longsor, Karhutla
3	Bangka Selatan	Puting Beliung Dan Karhutla
4	Bangka Barat	Banjir, Puting Beliung, Karhutla
5	Belitung	Banjir, Puting Beliung, Karhutla
6	Belitung Timur	Banjir, Puting Beliung, Karhutla
7	Pangkalpinang	Banjir, Puting Beliung, Karhutla

Sumber: BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Kawasan rawan bencana alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi:

1. Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Gerunggang (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Puding, Riau Silip, Mendo Barat (Kabupaten Bangka); Kecamatan Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung); Kecamatan Parit Tiga (Kabupaten Bangka Barat); dan Kecamatan Gantung (Kabupaten Belitung Timur);
2. Kawasan rawan puting beliung terdapat di Kecamatan Taman Sari, Rangkui, Gabek, Gerunggang (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Bakam (Kabupaten Bangka); Kecamatan Sijuk (Kabupaten Belitung); Kecamatan Pangkalan Baru dan Simpang Katis (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Mentok, Jebus, Simpang Teritip, dan Parit Tiga (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Manggar (Kabupaten Belitung Timur); dan Kecamatan Toboali (Kabupaten Bangka Selatan); dan
3. Kawasan rawan karhutlah tersebar di Kecamatan Pangkal Balam, Bukit Intan, Gerunggang, Girimaya, Gabek (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Sungailiat, Pemali, Puding Besar, Belinyu, Mendo Barat, Merawang, Bakam (Kabupaten Bangka); Kecamatan Tanjung Pandan, Sijuk, Badau, Membalong (Kabupaten Belitung); Kecamatan Pangkalan Baru, Simpang katis, Koba, Namang, Lubuk Besar (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Mentok, Jebus, Kelapa, Parittiga, Tempilang, Simpang Teritip (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Manggar, Simpang Renggang, Damar, Gantung (Kabupaten Belitung Timur); Kecamatan Pulau Besar, Toboali dan Tukak Sadai (Kabupaten Bangka Selatan); dan
4. Kawasan rawan bencana longsor terdapat di Kecamatan Lubuk besar (Kabupaten Bangka Tengah).

Gambar II.17

Peta Rawan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Pada tahun 2020 kebencanaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 4 (empat) potensi bencana dengan kejadian sebanyak 29 kejadian yaitu 5 banjir, 12 angin puting beliung, 3 tanah longsor dan 9 kebakaran hutan & lahan (karhutla). Dengan korban meninggal dunia dan hilang akibat tanah longsor sebanyak 8 jiwa dan korban terdampak dan mengungsi akibat banjir sebanyak 95 jiwa, angin puting beliung sebanyak 77 jiwa sedangkan rumah terendam akibat banjir sebanyak 95 unit rumah, rusak berat akibat angin puting beliung 3 unit rumah, 23 unit rumah rusak sedang dan 51 unit rumah rusak ringan akibat angin puting beliung sedangkan

untuk fasilitas publik seperti fasilitas kesehatan, peribadatan dan pendidikan tidak ada mengalami kerusakan. data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini,

Tabel II.13
Data Bencana Alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Korban (jiwa)			Rumah (unit)				Fasilitas Publik (unit)		
		Meninggal Dunia & Hilang	Luka-luka	Terdampak & mengungsi	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Terdam	Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Peribadatan	Fasilitas Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Banjir	5	-	-	95	-	-	-	95	-	-	-
Angin Puting Beliung	12	-	-	77	3	23	51	-	-	-	-
Tanah Longsor	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kebakaran Hutan & lahan	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	29	8	3	172	3	23	51	95	-	-	-

Sumber: BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

D. Demografi

Kondisi Demografi Kepulauan Bangka Belitung secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, dan sebaran penduduk sebagaimana tabel di bawah ini,

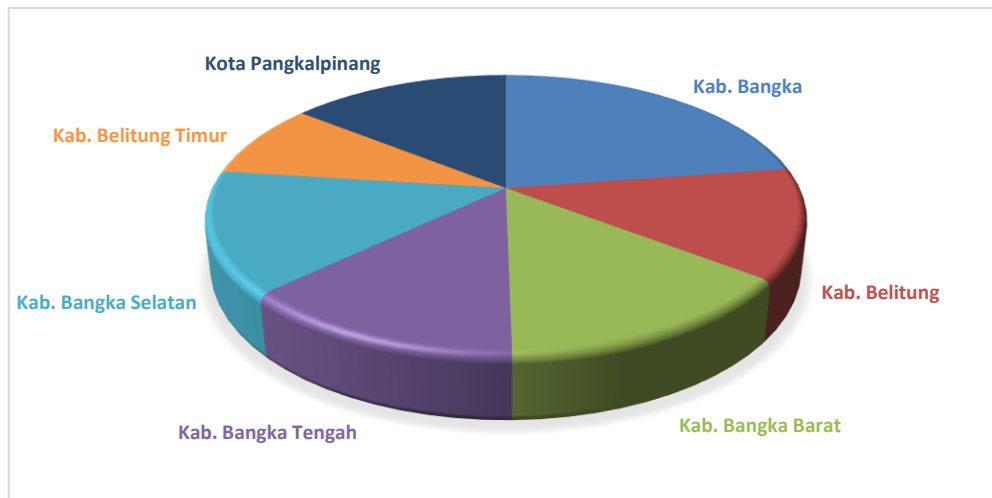
Tabel II.14
Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015-2019

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Jumlah Penduduk	jiwa	1.372.813	1.401.827	1.430.865	1.459.873	1.488.792
a. Laki-Laki	jiwa	713.223	728.580	743.931	759.255	774.523
b. Perempuan	jiwa	659.590	673.247	686.934	700.318	714.269
2. Laju Pertumbuhan Penduduk	persen	2,15	2,11	2,07	2,02	1,98
3. Kepadatan Penduduk	Jiwa/km ²	84	86	87	89	91
4. Rasio Jenis Kelamin	persen	108,13	108,22	108,30	108,37	108,40

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2019

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 mencapai 1.488.792 jiwa yang terdiri dari 774.523 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 714.269 penduduk berjenis kelamin perempuan, dengan rasio jenis kelamin 108,40. Rasio jenis kelamin di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 sebesar 108,40 yang menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan.

Grafik II.1
Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2019



Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2019

Jumlah penduduk dan tingkat kepadatan kabupaten/kota tergambar pada tabel di bawah ini. Tabel tersebut menunjukkan bahwa, penduduk terbanyak pada tahun 2019 berada di Kabupaten Bangka yaitu sebesar 337,3 ribu jiwa dan yang paling sedikit di Kabupaten Belitung Timur, sebanyak 129,6 ribu jiwa. Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, angka tertinggi berada di Kota Pangkalpinang yakni sebanyak 1.791 orang/km², dan terendah di Kabupaten Belitung Timur yakni sebanyak 52 orang/km².

Tabel II.15
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk
menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah		Penduduk (ribu)		Kepadatan Penduduk (org/km ²)
	Km ²	% luas Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah	% terhadap penduduk Kepulauan Bangka Belitung	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Bangka	2.950,69	17,97	337,3	22,66	114
Kabupaten Belitung	2.293,69	13,97%	189,8	12,75	83
Kota Pangkalpinang	118,80	0,72%	212,7	14,28	1.791
Kabupaten Bangka Barat	2.820,61	17,17%	213,2	14,31	76
Kabupaten Bangka Tengah	2.126,36	12,95%	196,2	13,18	92
Kabupaten Bangka Selatan	3.607,08	21,96%	210,0	14,10	58
Kabupaten Belitung Timur	2.507,0	15,26%	129,6	8,71	52
Luas Daratan	16.424,23	20,10%			
Luas Perairan	65.301,00	79,90%			
Bangka Belitung	81.725,23	-	1.488,8	100	91

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2020

Kepadatan penduduk juga menunjukkan peningkatan, dari 89 jiwa per km² pada tahun 2018 menjadi 91 jiwa per km². Pada tahun 2019 penduduk usia 0-14 tahun berjumlah 390.553, usia 15-64 tahun berjumlah 1.005.214 dan usia 65+ tahun berjumlah 64.106. Pada tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memasuki era bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari jumlah penduduk usia tidak bekerja. Agar bonus demografi dapat menjadi keuntungan bagi daerah, maka dibutuhkan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, pengendalian penduduk, hingga kebijakan ekonomi.

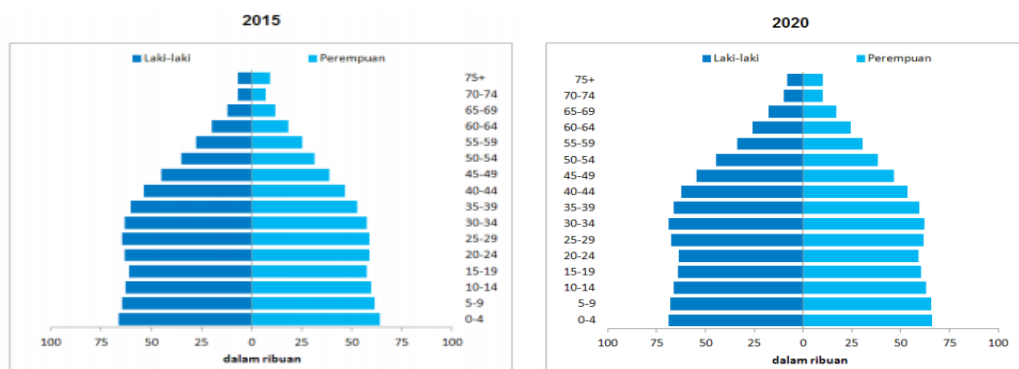
Tabel II.16
Jumlah Penduduk Kepulauan Bangka Belitung
menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	0-4	68.502	65.831	134.333
2	5-9	67.412	64.768	132.180
3	10-14	65.456	62.258	127.714
4	15-19	63.297	59.906	123.203
5	20-24	63.624	58.835	122.459
6	25-29	67.540	61.455	128.995
7	30-34	67.689	61.220	128.909
8	35-39	65.180	58.312	123.492
9	40-44	60.667	52.062	112.729
10	45-49	52.839	45.168	98.007
11	50-54	42.312	36.691	79.003
12	55-59	32.128	29.570	61.698
13	60-64	24.728	23.238	47.966
14	65-69	31.062	33.044	64.106
15	70-74	9.020	9.325	18.345
16	75+	7.641	9.935	17.576
JUMLAH		774.523	714.269	1.488.792

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2019

Di samping jumlah penduduk, juga diperlukan untuk mengetahui proyeksi parameter kependudukan, seperti struktur umur, angka kelahiran total, serta angka harapan hidup. Berdasarkan proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, yang disusun oleh Bappenas bekerja sama dengan BPS dan UNFPA (*United Nations Population Fund*), proyeksi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 menggambarkan Piramida Penduduk Muda (*Expansive*) sebagaimana grafik dibawah ini:

Grafik II.2
Piramida Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2015 dan Proyeksi pada Tahun 2020



Sumber: Bappenas, BPS & UNFPO, 2020

Berdasarkan grafik di atas bahwa sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Tipe ini memiliki kebiasaan tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi dan terdapat pada daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk cukup tinggi pula. Pertumbuhan ini disebabkan selisih antara tingkat kematian dan kelahiran yang cukup tinggi di mana penurunan tingkat kematian lebih cepat dibandingkan dengan tingkat kelahiran. Penduduk usia lanjut dan usia produktif termasuk usia angkatan kerja akan bertambah besar proporsinya. Sementara itu penduduk usia muda (bayi dan anak) jumlahnya meningkat.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan PDRB, laju inflasi provinsi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan *Williamson* (indeks ketimpangan regional), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan persentase penduduk diatas garis kemiskinan.

1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Gambaran perkembangan PDRB Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu 2015-2019 atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku.

Tabel II.17
PDRB Tahun 2015 –2019 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Miliar Rupiah)

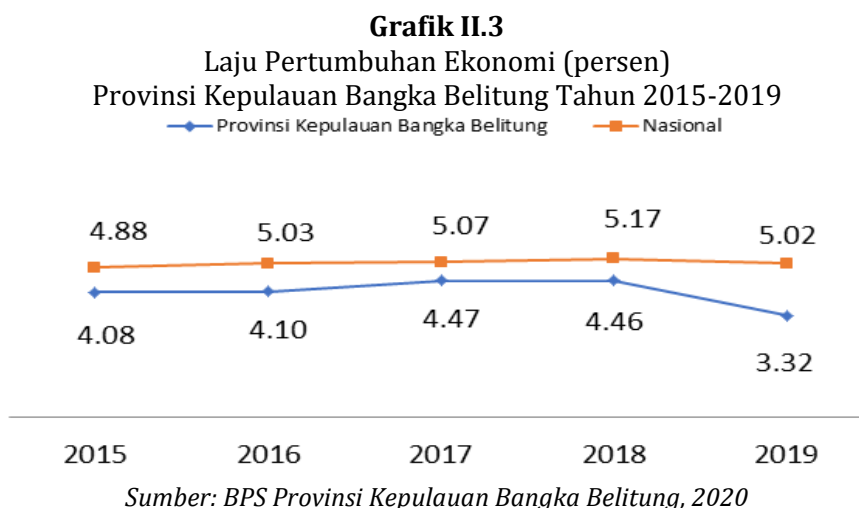
No.	PDRB	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	60.992,1	65.048,2	69.861,2	73.069	75.830
2.	Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	45.961,5	47.848,3	49.986,8	52.212	53.950

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019, diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDRB) atas harga berlaku (ADHB) mencapai Rp75.830 miliar dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2019 mencapai Rp53.950 miliar. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019 secara nominal nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) relatif lebih besar dibandingkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Sepanjang kurun waktu 2015–2019 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tren nasional bersifat fluktuatif yang dihitung berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2010. Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 tumbuh sebesar 3,32 persen, melambat dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 4,46 persen. Dari sisi produksi, sumber terbesar berasal dari lapangan usaha konstruksi. Sementara dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan terbesar berasal dari komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga. Secara umum sepanjang waktu lima tahun terakhir, maka dapat diketahui bahwa perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih rendah tingkat capaiannya jika dibandingkan nasional.

Pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung dari tahun 2015 sampai dengan 2019 sebagaimana diperlihatkan pada Grafik dibawah ini,



. Distribusi keempat kategori terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019 menjadi sangat dominan. Berdasarkan nilai PDRB ADHB tahun 2019, persentase distribusi keempat sektor terhadap PDRB mencapai sebesar 62,81 persen yakni industri pengolahan (19,59 persen), pertanian, kehutanan, dan perikanan (17,49 persen), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor (15,79 persen) serta pertambangan dan penggalian (9,49 persen). Tahun 2019 pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 13,78 persen, diikuti lapangan usaha jasa lainnya serta lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang masing-masing tumbuh sebesar 10,23 persen dan 10,19 persen. Meskipun seluruh lapangan usaha yang ada dalam perekonomian Kepulauan Bangka Belitung mengalami pertumbuhan positif di tahun 2019, namun pada lapangan usaha yang kontribusinya besar, pertumbuhannya tidak setinggi tahun 2018 yang lalu. Seperti pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang pada tahun 2018 yang tumbuh sebesar 5,45 persen, namun pada tahun 2019 tumbuh melambat sebesar 2,89 persen. Pada lapangan usaha perkebunan yang merupakan salah satu kontributor terbesar lapangan usaha ini, rendahnya harga komoditas strategis perkebunan Bangka Belitung seperti kelapa sawit, karet dan lada pada tahun 2019 membuat produktivitas menurun. Demikian juga dengan

lapangan usaha industri pengolahan yang pada tahun 2018 tumbuh sebesar 4 persen, namun pada 2019 tumbuh melambat sebesar 1,17 persen. Kendala aturan pemerintah membuat perusahaan smelter swasta yang ada di Kepulauan Bangka Belitung berhenti beroperasi karena tidak dapat melakukan ekspor logam timahnya. Pada tahun 2019, hanya beberapa perusahaan smelter swasta yang bisa memproduksi dan melakukan ekspor logam timah.

Tabel II.18
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2015 – 2019

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.93	4.34	-0.36	5.45	2,89
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	7.40	4.72	1.07	4.17	1,42
	a. Tanaman Pangan	4.12	7.22	0.38	4,18	8,65
	b. Tanaman Hortikultura	5.98	1.17	0.15	-1.58	0,48
	c. Tanaman Perkebunan	8.13	5.27	0.63	4.83	1,15
	d. Peternakan	5.90	6.54	6.89	9.24	1,97
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	6.49	2.14	3.20	5.71	0,31
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	8.04	2.14	-0.16	5.67	2,81
	3 Perikanan	3.02	3.72	-3.24	8.11	5,87
B	Pertambangan dan Penggalian	1.64	0.50	2.22	(1.08)	0,87
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	1.43	1.16	-1.23	(18.84)	1,57
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam	1.62	-0.04	2.90	(0.10)	-0,29
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1.74	1.95	1.17	0.68	4,15
C	Industri Pengolahan	1.27	2.69	6.22	4.04	1,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9.21	12.44	4.85	7.44	6,55
	1 Ketenagalistrikan	10.18	13.58	5.91	8.80	7,29
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	2.83	4.34	-3.26	(4.01)	-0,49
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.75	5.52	9.79	(5.60)	3,41
F	Konstruksi	5.85	6.95	5.64	5.76	7,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.28	5.08	7.81	2.65	1,76
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	1.58	6.72	4.83	5.09	-5,74
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	4.85	4.75	8.44	2.15	3,32
H	Transportasi dan Pergudangan	5.82	5.41	7.99	6.82	2,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.42	4.99	4.61	6.22	9,26
	1 Penyediaan Akomodasi	1.46	3.06	8.43	8.96	-2,54
	2 Penyediaan Makan Minum	3.54	5.10	4.40	6.06	9,95
J	Informasi dan Komunikasi	7.34	9.18	8.19	10.72	13,78
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.38	6.44	2.48	6.25	8,21

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
L	Real Estate	2.71	3.65	5.19	8.29	1,36
M,N	Jasa Perusahaan	4.02	0.06	5.85	6.69	1,26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.71	6.06	5.06	9.18	8,13
P	Jasa Pendidikan	9.75	7.58	3.86	9.00	7,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.65	4.79	8.18	4.56	10,19
R,S,T,U	Jasa lainnya	8.12	9.79	6.14	7.39	10,83
Produk Domestik Regional Bruto		4.08	4.10	4.47	4.46	3,32

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dilihat dari nilai PDRB ADHB, nilai tambah kategori industri pengolahan pada tahun 2019 mencapai sebesar Rp 14.582,1 miliar mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 15.064,4 miliar. Diikuti oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan meningkat dari Rp 13.607,7 miliar mengalami peningkatan tahun 2018 sebesar Rp 13.163,1 miliar. Sedangkan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan lapangan usaha pertambangan penggalian masing-masing menjadi Rp 11.970 Miliar dan Rp 7.199,6 Miliar di tahun 2019. Dari keempat pembentuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tersebut, perkembangan sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2019 sebesar Rp 7.199,6 miliar mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar Rp 7.754,4 miliar, sedangkan sektor-sektor lainnya mengalami peningkatan.

Tabel II.19
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2015–2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.060,4	13.117,2	13.143,2	13.163,1	13.607,7
Pertambangan dan Penggalian	7.735,4	7.743,3	8.182,1	7.754,4	7.199,6
Industri Pengolahan	12.888,4	13.074,1	14.229,6	15.064,4	14.582,1
Pengadaan Listrik dan Gas	51,1	66,6	79,4	86,8	94,7
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,0	13,2	15,0	14,8	15,4
Konstruksi	5.264,2	5.753,8	6.371,9	7.106,9	7.864,2
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.634,3	9.621,6	10.840,5	11.721,2	11.970,7
Transportasi dan Pergudangan	2.461,8	2.642,1	2.900,1	3.104,7	3.380,4
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1459,8	1.609,1	1.734,1	1.896,8	2.205,8
Informasi dan Komunikasi	941,7	1.034,0	1.135,4	1.254,8	1.433,4
Jasa Keuangan dan Asuransi	1095,3	1.198,1	1.280,6	1.415,2	1.509,7
Real Estate	1.964,7	2.104,5	2.281,2	2.517,5	2.625,6
Jasa Perusahaan	169,6	176,4	196,8	217,3	232,3
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.471,6	3.781,6	4.121,1	4.418,2	4.804,2
Jasa Pendidikan	1.639,7	1.859,6	1.960,4	2.128,7	2.324,2
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	710,7	759,8	845,3	905,8	1.023,1
Jasa lainnya	426,6	493,2	548,5	600,4	691,2
PDRB	60.987,3	65.048,2	69.865,2	73.121,0	75.829,3

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Selanjutnya, dilihat dari nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 nilai bruto lapangan usaha industri pengolahan mencapai sebesar Rp 10.400,6 miliar pada tahun 2015 dan meningkat menjadi sebesar Rp 11.929,8 miliar pada tahun 2019. Untuk nilai tambah bruto kategori pertanian, kehutanan dan perikanan pada periode yang sama sebesar Rp 8.743,5 miliar dan meningkat menjadi Rp 9.869,5 miliar. Nilai tambah bruto kategori pertambangan dan penggalan sebesar Rp 6.458,1 miliar dan meningkat menjadi sebesar Rp 6.627,3 miliar. Begitu juga untuk perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor nilai tambah bruto yang tercipta sebesar Rp 6.402,1 miliar meningkat menjadi Rp 7.576,2 Miliar dapat dilihat dalam tabel berikut,

Tabel II.20
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2015 – 2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.743,5	9.123,2	9.095,7	9.591,8	9.869,5
Pertambangan dan Penggalan	6.458,1	6.490,6	6.634,7	6.570,2	6.627,3
Industri Pengolahan	10.400,6	10.680,5	11.337,7	11.791,6	11.929,8
Pengadaan Listrik dan Gas	38,9	43,7	45,9	49,3	52,5
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,1	8,6	9,4	8,9	9,2
Konstruksi	3.760,1	4.021,6	4.248,5	4.493,1	4.811,1
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.402,1	6.727,7	7.253,3	7.445,1	7.576,2
Transportasi dan Pergudangan	1.662,1	1.752,3	1.892,2	2.021,3	2.066,5
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.034,8	1.086,5	1.136,5	1.207,2	1.318,9
Informasi dan Komunikasi	849,0	926,9	1.002,8	1.110,3	1.263,4
Jasa Keuangan dan Asuransi	807,9	860,0	881,3	941,1	987,8
Real Estate	1.442,0	1.494,6	1.572,2	1.702,5	1.725,7
Jasa Perusahaan	120,3	120,4	127,5	136,0	137,7
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.337,1	2.478,7	2.604,2	2.843,2	3.074,3
Jasa Pendidikan	1.059,0	1.139,3	1.183,2	1.289,8	1.381,4
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	533,9	559,4	605,2	632,8	697,3
Jasa lainnya	304,6	334,4	354,9	381,2	422,5
PDRB	45.962,3	47.848,4	49.985,2	52.512,4	53.951,1

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan, sebesar 0,61 persen pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 berasal dari pertumbuhan lapangan usaha konstruksi sebesar 0,61 persen, diikuti lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan serta lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib masing-masing sebesar 0,53 persen dan 0,44 persen. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kepulauan Bangka Belitung yang masih terus digencarkan ikut mendorong kinerja lapangan usaha konstruksi pada tahun 2019. Secara teoritis nilai PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

merupakan akumulasi dari nilai PDRB Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan PDRB ADHB sebagaimana diperlihatkan pada tabel dibawah ini yang menunjukkan bahwa sepanjang periode tahun 2015–2019 nilai PDRB Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bawah capaian nasional. Dari besaran PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut kurun waktu lima tahun terakhir, daerah yang memberikan kontribusi terbesar: 1) Kota Pangkalpinang; 2) Kabupaten Bangka Barat; 3) Kabupaten Bangka.

Tabel II.21

Perkembangan PDRB/PDB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional (miliar/triliun rupiah) Tahun 2015 – 2019

Kab/Kota/ Prov/Nasional	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	11.001,4	11.771,7	12.807,9	13.317,0	13.749,2
Belitung	7.328,1	8.001,0	8.739,9	9.318,3	9.869,7
Bangka Barat	11.473,0	12.249,4	13.221,4	13.822,8	14.168,1
Bangka Tengah	7.056,1	7.469,0	7.972,2	8.216,3	8.579,3
Bangka Selatan	6.947,7	7.541,5	8.165,2	8.460,6	8.676,3
Belitung Timur	6.125,9	6.604,2	7.151,8	7.408,8	7.728,2
Pangkalpinang	10.234,6	11.116,5	12.108,6	12.966,1	13.703,3
Bangka Belitung	60.987,3	65.048,2	69.865,2	73.121,0	75.829,3
Nasional (Triliun)	11.526.332,8	12.401.728,5	13.589.825,7	14.838.311,5	15.833.943,4

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Selanjutnya, dilihat berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2010 sebagaimana diperlihatkan pada tabel di bawah ini, juga menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015–2019 besaran perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif lebih kecil dibandingkan dengan besaran perekonomian nasional. Dari besaran PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut kurun waktu lima tahun terakhir, daerah yang memberikan kontribusi terbesar: 1) Kota Pangkalpinang; 2) Kabupaten Bangka Barat; 3) Kabupaten Bangka.

Tabel II.22

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional (miliar/triliun rupiah) Tahun 2015–2019

Kab/Kota/ Prov/Nasional	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	8.512,4	8.906,2	9.355,3	9.777,0	10.063,1
Belitung	5.400,9	5.669,1	5.969,7	6.290,4	6.505,3
Bangka Barat	8.769,6	9.190,2	9.673,7	10.176,2	10.901,9
Bangka Tengah	5.271,8	5.432,8	5.620,6	5.812,2	5.885,0
Bangka Selatan	5.284,6	5.511,8	5.763,9	6.024,3	6.181,4
Belitung Timur	4.675,2	4.873,9	5.110,3	5.325,5	5.504,0
Pangkalpinang	7.555,0	7.946,0	8.358,5	8.782,6	9.076,3
Bangka Belitung	45.962,3	47.848,4	49.985,2	52.215,4	53.951,1
Nasional (triliun)	8.982.517,1	9.434.613,4	9.912.928,1	10.425.397,3	10.949.243,7

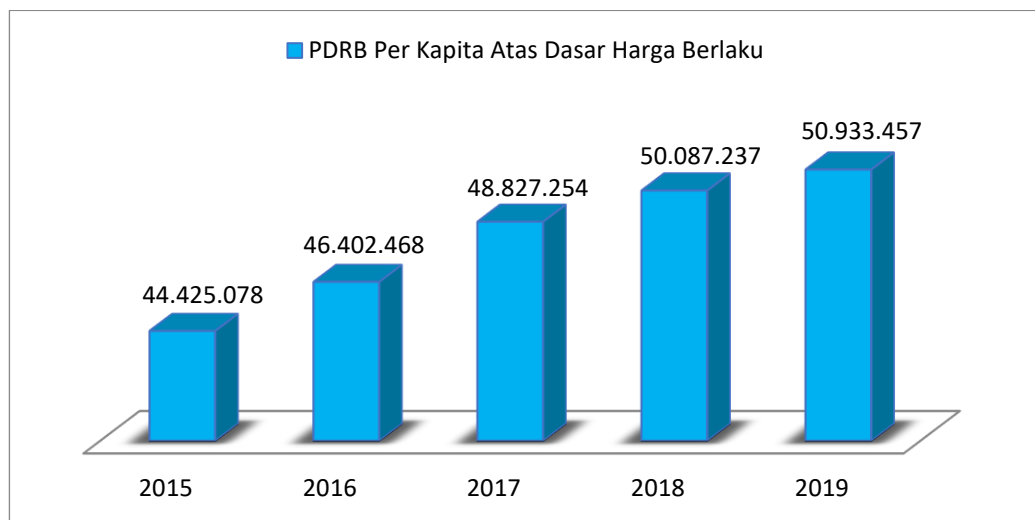
Sumber: BBDA BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2020)

2. PDRB Per Kapita

Nilai PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2015–2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, nilai PDRB per kapita tercatat sebesar Rp 44.425.078 dan mengalami peningkatan secara bertahap tiap tahunnya menjadi Rp 50.933.457. Hal ini disebabkan karena cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu tersebut. Gambaran mengenai perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015–2019, sebagaimana disajikan pada Grafik II.4.

Grafik II.4

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 – 2019



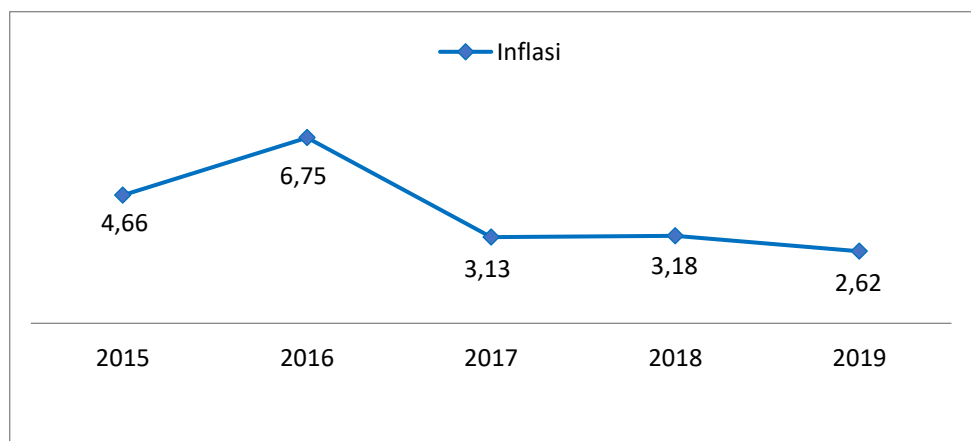
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Babel, 2020

3. Tingkat Inflasi

Sepanjang tahun 2015–2019 secara keseluruhan tingkat Inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung *tren* bersifat fluktuatif. Tingkat inflasi tahun 2019 sebesar 2,62 persen mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 3,18 persen, bisa dilihat dari Grafik II.5 di bawah ini:

Grafik II.5

Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Jika dicermati menurut kelompoknya, sepanjang periode tahun 2015–2019 hampir semua kelompok pengeluaran mengalami inflasi. Pada tahun 2019, kelompok pengeluaran yang memberi andil sumbangan didominasi oleh bahan makanan sebesar 1,12 persen, diikuti oleh makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,59 persen, dan pendidikan, rekreasi dan olahraga mengalami inflasi sebesar 0,25 persen. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

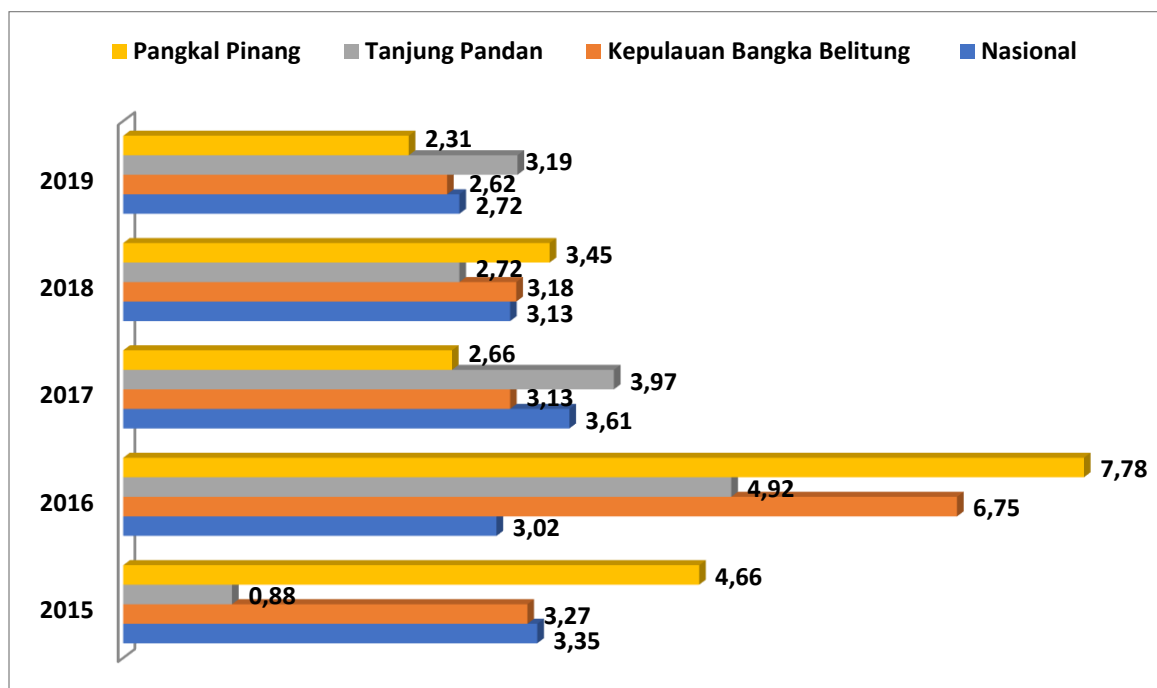
Tabel II.23
Kontribusi Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019

Kelompok Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umum	3,27	6,75	3,13	3,18	2,62
1. Bahan Makanan	2,25	11,45	1,66	0,87	1,12
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	6,77	6,64	2,90	0,67	0,59
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	3,45	2,57	5,63	0,62	0,19
4. Sandang	2,11	5,65	2,06	0,13	0,16
5. Kesehatan	4,92	3,60	3,61	0,11	0,07
6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	8,42	3,78	3,36	0,25	0,25
7. Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-1,13	7,27	2,09	0,53	0,24

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tahun 2019, inflasi Pangkalpinang (2,31 persen) dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2,62 persen) relatif kecil bila dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 2,72. Sementara itu berbeda dengan inflasi Kota Tanjung Pandan tahun 2019 sebesar 3,19 capaiannya lebih tinggi daripada nasional. Angka inflasi sebagaimana dimaksud dapat diamati pada Grafik II.6.

Grafik II.6
Perbandingan Inflasi Pangkalpinang, Tanjung Pandan,
Kepulauan Bangka Belitung, dan Nasional 2015 – 2019

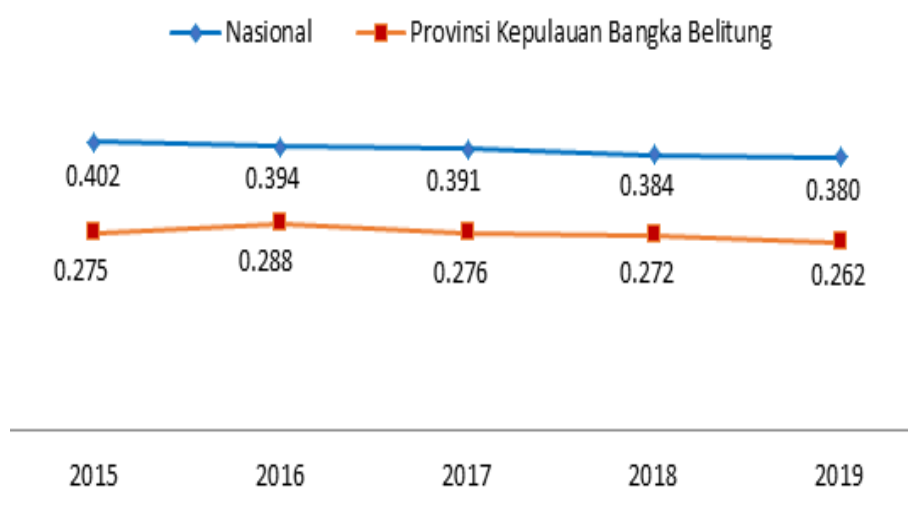


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

4. Indeks Gini

Berdasarkan Grafik II.7 terlihat bahwa nilai rasio gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung capaiannya lebih rendah daripada nasional. Selama periode 2015-2019 nilai rasio gini mengalami fluktuasi. Sedangkan berbeda dengan capaian nasional nilai rasio gini kurun waktu lima tahun terakhir cenderung menurun. Pada tahun 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kepulauan Bangka Belitung yang diukur dengan *Gini Ratio* adalah sebesar 0,262. Sementara itu jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* tahun 2018 turun sebesar 0,010 poin dari angka 0,272. Pada tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat memiliki nilai *Gini Ratio* terendah di Indonesia yaitu sebesar 0,262. Sedangkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki nilai *Gini Ratio* tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 0,428.

Grafik II.7
Indeks Gini Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2015-2019



Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020 (diolah)

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Adapun untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan indikator rata-rata besarnya pengeluaran per kapita atau PNB per kapita.

Selama 5 (lima) tahun terakhir capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung cukup fluktuatif. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 IPM Bangka Belitung selalu diatas nasional, namun pada tahun 2018 dan 2019 masih dibawah rata-rata nasional. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung sebagaimana tabel di bawah ini,

Tabel II.24

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung dan Nasional

Indeks Pembangunan Manusia	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka Belitung	69,05	69,99	70,67	71,30	71,30
Nasional	68,90	69,55	70,18	70,81	71,39

Sumber: BPS dan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020 (diolah)

Selama lima tahun terakhir indeks pembangunan manusia di Bangka Belitung mengalami peningkatan. Kondisi ini ditunjukkan oleh angka IPM tahun 2015 sebesar 69,05, dan terus meningkat dari tahun 2016-2019, yaitu : 69,55 (2016), 69,99 (2017), 70,67 (2018), dan 71,30 (2019). Ini menunjukkan upaya pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan pembangunan manusia cukup berhasil. Pembangunan manusia yang awalnya berstatus ‘sedang’ pada tahun 2017 berubah status menjadi ‘tinggi’. Pada tahun 2018 yang mengalami pertumbuhan sebesar 0,97 persen dan melebihi target nasional.

Tabel II.25

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Bangka Belitung

Indeks Pembangunan Manusia	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	70,03	70,43	71,09	71,80	72,39
Belitung	70,29	70,81	70,93	71,70	72,46
Bangka Barat	67,23	67,60	67,94	68,68	68,05
Bangka Tengah	68,66	68,76	68,99	69,62	70,33
Bangka Selatan	63,89	64,57	65,02	65,98	66,54
Belitung Timur	68,83	69,30	69,57	70,22	70,84
Pangkalpinang	76,61	76,73	76,86	77,43	77,97

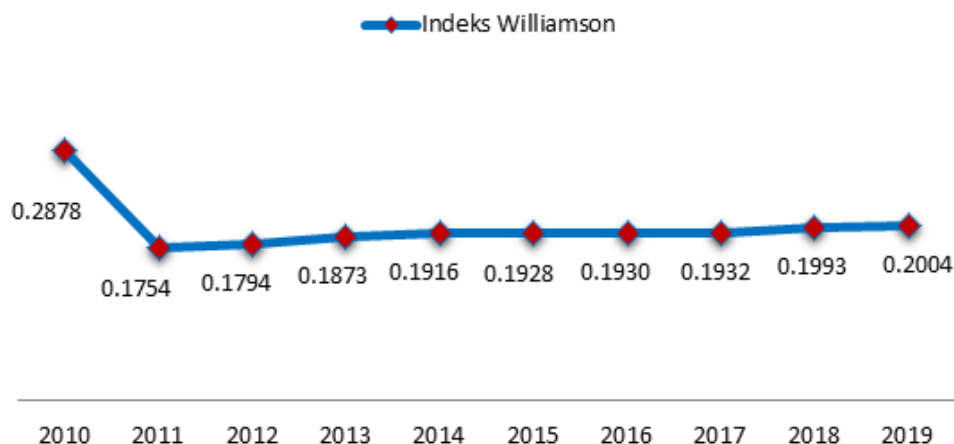
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan tabel di atas, IPM tertinggi tercatat di Kota Pangkalpinang sebesar 77,43, sebagaimana posisi tahun sebelumnya. Kota Pangkalpinang bersama Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Tengah, dan Belitung Timur merupakan daerah dengan IPM berkategori ‘tinggi’. Masih ada dua kabupaten dengan kategori IPM ‘rendah’ yaitu Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka Barat. Kabupaten Bangka Tengah yang semula mempunyai IPM berkategori ‘rendah’, mulai tahun 2019 berkategori ‘sedang’ dengan IPM sebesar 70,33.

6. Indeks Ketimpangan *Williamson*

Pada periode 2010-2011, Indeks ketimpangan *williamson* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung menurun. Namun berbeda sepanjang tahun 2011-2019 indeks ketimpangan *Williamson* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa tren mengalami peningkatan, yang menggambarkan pembangunan antarwilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif baik. Tahun 2019 capaiannya sebesar 0,2004, lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2018 sebesar 0,1993. Artinya secara keseluruhan pembangunan wilayah semakin mendekati merata tersaji pada Grafik II.8.

Grafik II.8
Indeks Ketimpangan *Williamson* Tahun 2010 – 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020 (diolah)

7. Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2015-2019 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2015 persentase penduduk miskin sebesar 5,40 persen, kemudian mengalami penurunan sampai dengan tahun 2017 menjadi sebesar 5,20 persen. Namun pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 5,25 persen dan pada 2019 menurun kembali menjadi 4,50 persen. Penurunan ini menunjukkan tingkat ketahanan ekonomi masyarakat di Bangka Belitung cukup baik.

Tabel II.26
Perkembangan Kemiskinan Tahun 2015-2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,40	5,22	5,20	5,25	4,50
2.	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	74,1	72,8	74,1	76,3	67,37
3.	Garis Kemiskinan (Rp)	488.701	534.229	587.530	631.467	677.716
4.	Indeks kedalaman Kemiskinan (P1)	0,67	0,67	0,49	0,69	0,51

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Memperhatikan tabel di bawah ini, sepanjang periode tahun 2015-2019 tingkat kemiskinan kota dan desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019 tingkat kemiskinan kota sebesar 2,85 persen dan naik dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya sebesar 2,78 persen. Sedangkan tingkat kemiskinan desa mengalami penurunan dari 7,16 persen (2018) menjadi 6,79 persen (2019). Menurunnya kemiskinan di perdesaan menunjukkan bahwa ketersediaan pangan yang cukup mempengaruhi menurunnya jumlah penduduk miskin hingga 0,26 persen.

Tabel II.27
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa Tahun 2014-2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tingkat Kemiskinan Kota (%)	2,77	2,67	3.00	2,78	2,85
2.	Tingkat Kemiskinan Desa (%)	6,83	7,57	7.92	7,16	6,79

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Sementara itu, berdasarkan tabel di bawah ini, dapat diketahui pada tahun 2018 persentase jumlah penduduk miskin yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Belitung sebesar 7,56 persen atau sebanyak 14,00 ribu jiwa. Di Kabupaten Belitung garis kemiskinan tahun 2018 sebesar Rp704.855 per kapita per bulan dan merupakan yang tertinggi diseluruh kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian persentase jumlah penduduk miskin cukup tinggi yaitu Kabupaten Belitung Timur sebesar 7,06 persen atau sebanyak 8,93 ribu jiwa. Sementara itu, angka kemiskinan terendah terdapat di Kabupaten Bangka Barat sebesar 3,05 persen atau sebanyak 6,35 ribu jiwa. Garis kemiskinan Kabupaten Bangka Barat kondisi tahun 2019 sebesar Rp520.462 per kapita perbulan, dimana indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 0,34. Angka ini menunjukkan rata-rata pengeluaran semakin baik di tahun 2018.

Tabel II.28
Data Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	5,20	5,63	5,52	5,10	5,47
Belitung	7,36	8,38	7.85	7,77	7,56
Bangka Barat	3,15	3,08	2,74	2,98	3,05
Bangka Tengah	3,27	5,67	5,64	6,07	5,81
Bangka Selatan	3,87	3,74	3,62	3,92	3,70
Belitung Timur	6,68	7,33	6,99	6,81	7,06
Kota Pangkalpinang	4,04	4,97	5,02	4,80	4,95
Provinsi Kep. Bangka Belitung	4,97	5,40	5,22	5,20	5,25

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

8. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dari kepala daerah dan menjadi salah satu sasaran ekonomi makro dari pemerintah daerah. Dari Tabel II.54, tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan tren fluktuatif selama 5 (lima) tahun terakhir. Untuk tahun 2019 terdapat 3 (tiga) kabupaten dan 1 (satu) kota yang memiliki TPT melebihi TPT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang tertinggi yaitu Kota Pangkalpinang sebesar 5,01 %, Kabupaten Bangka Tengah

sebesar 4,39%, Kabupaten Bangka 3,8% dan Kabupaten Bangka Selatan sebesar 3,87 %. Sedangkan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 3,62 % dan secara nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih rendah dari rata-rata nasional dimana rata-rata nasional sebesar 5,28 %.

Tabel II.29
Data Tingkat Pengangguran Tahun 2015 s.d. 2019 menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kab. Bangka	8,87	n/a	4,29	4,12	3,8
2.	Kab. Belitung	4,57	n/a	2,57	2,93	2,9
3.	Kab. Bangka Barat	5,92	n/a	4,23	3,11	2,85
4.	Kab. Bangka Tengah	6,58	n/a	3,38	3,93	4,39
5.	Kab. Bangka Selatan	2,01	n/a	2,74	4,35	3,87
6.	Kab. Belitung Timur	2,55	n/a	2,62	1,5	1,71
7.	Kota Pangkal Pinang	10,64	n/a	5,8	4,7	5,01
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		6,29	2,60	3,78	3,65	3,62

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan tabel di bawah ini, dapat dilihat jumlah pengangguran pada tahun 2019 terbesar di Kabupaten Bangka yaitu 6.076 orang dan terendah pada Kabupaten Belitung Timur sebanyak 1.197 orang, sedangkan secara kumulatif untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 26.871 orang, meningkat dari tahun 2018 yang hanya sebanyak 26.552 Orang. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja yang masih rendah dan tidak dapat menampung banyaknya angkatan kerja dan pencari kerja terutama mereka yang datang dari wilayah pedesaan yang masih beranggapan bahwa di wilayah perkotaan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan di bandingkan wilayah pedesaan.

Tabel II.30
Data Pengangguran Tahun 2015 s.d. 2019 menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kab. Bangka	12.805	n/a	6.693	6.410	6.076
2.	Kab. Belitung	4.015	n/a	2.429	2.887	2.853
3.	Kab. Bangka Barat	5.443	n/a	4.244	3.306	2.955
4.	Kab. Bangka Tengah	5.631	n/a	3.161	3.860	4.295
5.	Kab. Bangka Selatan	1.936	n/a	2.553	4.345	3.979
6.	Kab. Belitung Timur	1.550	n/a	1.667	1.035	1.197
7.	Kota Pangkal Pinang	10.513	n/a	5.652	4.709	5.516
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		41.893	18.343	26.399	26.552	26.871

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Pendidikan

a. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Sekolah (HLS) merupakan salah satu output yang dapat digunakan untuk memotret pemerataan pendidikan. HLS mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk dari usia tujuh tahun. Secara sederhana, HLS didefinisikan sebagai angka partisipasi sekolah menurut umur tunggal. HLS merupakan indikator yang menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka ini diperoleh dengan cara membagi banyaknya partisipasi sekolah penduduk pada usia a pada tahun t dengan jumlah penduduk yang bersekolah pada usia a dan tahun t . Angka Harapan Sekolah (HLS) bersama-sama dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan dua indikator penghitung IPM.

Berdasarkan metode perhitungan terbaru yang dipublikasikan oleh Biro Pusat Statistik tahun 2020, angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 se-nasional masih berada di posisi ke-33 sebagaimana halnya pada tahun 2019. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada di antara Provinsi Sumatera Selatan sebagai peringkat ke-32, dan Provinsi Papua sebagai peringkat ke-34. Meskipun memiliki capaian angka HLS di posisi dua terendah secara nasional, pertumbuhan HLS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi, yakni sebesar 0,92 persen. Capaian pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi keenam, diikuti oleh Sulawesi Utara sebagai peringkat ketujuh dengan pertumbuhan sebesar 0,94 persen dan Nusa Tenggara Barat sebagai tertinggi pertama dengan pertumbuhan sebesar 1,63 persen. Pada level nasional, pertumbuhan HLS di Indonesia tahun 2020 mencapai 0,23 persen, yakni 12,95 pada tahun 2019 menjadi 12,98 pada tahun 2020.

Tabel II.31

Angka Harapan Sekolah Tahun 2016 s.d. 2020
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (Tahun)					Selisih 2019- 2020	%
		2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bangka	12,37	12,58	12,68	12,76	12,77	0,01	0,08 %
2	Belitung	11,47	11,51	11,83	11,84	11,85	0,01	0,08 %
3	Bangka Barat	11,49	11,50	11,51	11,52	11,53	0,01	0,08 %
4.	Bangka Tengah	11,73	11,74	11,75	11,76	11,81	0,05	0,43 %
5.	Bangka Selatan	11,25	11,34	11,35	11,36	11,37	0,01	0,08 %
6.	Belitung Timur	11,46	11,48	11,49	11,51	11,52	0,01	0,08 %
7.	Pangkalpinang	12,77	12,78	12,83	12,99	13,15	0,16	1,23 %
Bangka Belitung		11,18	11,60	11,71	11,83	11,87	0,11	0,92 %

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Pada periode 2019-2020, angka pertumbuhan Harapan Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan sebesar 0,92 persen, yaitu 11,94 di tahun 2019 menjadi 12,05 di tahun 2020. Dari tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang mengalami angka pertumbuhan tertinggi pertama sebesar 1,23 persen, yakni 12,99 di tahun 2019 menjadi 13,15 di tahun 2020. Angka HLS Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 juga berada di atas angka HLS tingkat nasional, yakni 12,98 tahun. Selanjutnya,

angka HLS tertinggi kedua berada di Kabupaten Bangka dengan peningkatan angka pertumbuhan sebesar 0,08 persen, yakni 12,76 di tahun 2019 menjadi 12,77 di tahun 2020, namun angka HLS ini masih berada di bawah angka HLS tingkat nasional.

Kabupaten Bangka Tengah mengalami peningkatan angka pertumbuhan sebesar 0,43 persen, yakni 11,76 pada tahun 2019 menjadi 11,91 pada tahun 2020. Peningkatan angka pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi kedua setelah Kota Pangkalpinang. Meskipun angka HLS Kabupaten Bangka pada tahun 2020 sebesar 12,77 dan lebih tinggi dari angka HLS Kabupaten Bangka Tengah yang mencapai 11,81, pertumbuhan HLS di Kabupaten Bangka Tengah mengalami peningkatan sebesar 0,43 persen, dan pertumbuhan ini lebih tinggi dari Kabupaten Bangka dan keempat kabupaten lainnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,08 persen. Dalam periode lima tahun terakhir (2016-2020), Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat sebesar 2,90 persen, yaitu 11,71 pada tahun 2016 menjadi 12,05 pada tahun 2020. Ini menunjukkan anak-anak usia 7 tahun memiliki kesempatan untuk bersekolah selama 12,05 tahun atau lulus SMA/SMK/MA sederajat.

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah juga dapat memberikan gambaran terkait penyelenggaraan pendidikan dan indeks pembangunan manusia di suatu daerah. Angka rata-rata sekolah menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Secara nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada pada peringkat yang sama pada periode 2019-2020, yakni peringkat kedua puluh empat. Rata-rata lama sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan, yakni 7,98 pada tahun 2019 menjadi 8,06 pada tahun 2020.

Angka rata-rata lama sekolah ini masih berada di bawah angka rata-rata lama sekolah tingkat nasional, yaitu 8,48. Dari tujuh (7) kabupaten/kota, pertumbuhan tertinggi untuk rata-rata lama sekolah tahun 2020 dicapai oleh Kota Pangkalpinang sebesar 9,92. Angka ini menunjukkan bahwa Kota Pangkalpinang berada di atas rata-rata lama sekolah tingkat nasional. Kabupaten Belitung berada di peringkat kedua, sebesar 8,46, namun capaian angka ini masih berada di bawah angka rata-rata lama sekolah tingkat nasional. Dan sama halnya dengan tahun 2019, pada tahun 2020, angka rata-rata lama sekolah terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada di Kabupaten Bangka Selatan, sebesar 6,67.

Tabel II.32
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2015 s.d. 2020
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ kota	Rata - Rata Lama Sekolah Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bangka	7,94	7,96	8,19	8,20	8,23	8,24
2	Belitung	8,09	8,10	8,11	8,15	8,41	8,46
3	Bangka Barat	6,68	6,89	7,06	7,18	7,21	7,22
4	Bangka Tengah	6,70	6,71	6,79	6,80	7,13	7,19
5	Bangka Selatan	5,88	5,96	6,12	6,36	6,42	6,67
6	Belitung Timur	7,91	7,95	8,00	8,14	8,15	8,22
7	Pangkalpinang	9,75	9,76	9,77	9,78	9,80	9,92
Bangka Belitung		7,46	7,62	7,78	7,84	7,98	8,06

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020

Pada tahun 2020, angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami pertumbuhan sebesar 1 persen, yakni 7,98 pada tahun 2019 menjadi 8,06 pada tahun 2020. Ditinjau dari tingkat pertumbuhan, meskipun Kabupaten Bangka Selatan memiliki angka rata-rata lama sekolah terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu 6,42 pada tahun 2019 menjadi 6,67 pada tahun 2020, pertumbuhan rata-rata lama sekolah Kabupaten Bangka Selatan tahun 2020 merupakan yang tertinggi, yaitu sebesar 3,89 persen, melebihi kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kota Pangkalpinang sebagai peraih angka rata-rata lama sekolah tertinggi tumbuh sebesar 1,22 persen, diikuti Kabupaten Bangka Tengah dan Belitung sebesar 0,84 dan 0,59 persen. Kabupaten Bangka mencapai pertumbuhan rata-rata lama sekolah paling rendah, yaitu sebesar 0,12 persen.

Tabel II. 33
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2019-2020
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ kota	Rata - Rata Lama Sekolah Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun)			
		2019	2020	Selisih (poin)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bangka	8,23	8,24	0,01	0,12
2	Belitung	8,41	8,46	0,05	0,59
3	Bangka Barat	7,21	7,22	0,01	0,14
4	Bangka Tengah	7,13	7,19	0,06	0,84
5	Bangka Selatan	6,42	6,67	0,25	3,89
6	Belitung Timur	8,15	8,22	0,07	0,86
7	Pangkalpinang	9,80	9,92	0,12	1,22
Bangka Belitung		7,98	8,06	0,08	1,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020 (hasil analisis)

Meskipun rata-rata lama sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada di bawah rata-rata lama sekolah di tingkat nasional, dimana waktu lama belajar siswa usia 15 tahun ke atas pada tahun 2019 hanya mencapai kelas VII atau SMP kelas 1, maka pada tahun 2020, siswa usia 15 tahun ke atas bisa menempuh pendidikan hingga kelas VIII atau SMP kelas 2. Beberapa faktor pendukung peningkatan waktu rata-rata lama sekolah adalah adanya peningkatan akses dan mutu pendidikan menengah, peningkatan partisipasi sekolah jenjang pendidikan menengah yang bermutu, dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

2. Kesehatan

a. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 sebesar 70,50 tahun. UHH tertinggi selama 6 tahun berturut-turut berada di Kota Pangkalpinang yaitu 73,13 tahun. Sementara UHH terendah berada di Kabupaten Bangka Selatan yaitu 67,90 tahun. Dilihat dari perkembangan UHH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2014 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun peningkatan UHH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menjadi prioritas karena angka tersebut masih dibawah target UHH nasional yaitu sebesar 71,34.

Tabel II.34
Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi/Kabupaten /Kota	Usia Harapan Hidup (tahun)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bangka	70,47	70,48	70,52	70,58	70,73	70,99
Belitung	70,22	70,32	69,52	70,44	70,64	70,94
Bangka Barat	69,46	69,47	70,38	69,56	69,73	69,99
Bangka Tengah	69,98	70,28	66,99	70,49	70,78	71,16
Bangka Selatan	66,56	66,86	66,99	67,13	67,47	67,90
Belitung Timur	71,03	71,23	71,30	71,37	71,59	71,90
Pangkalpinang	72,31	72,51	72,57	72,64	72,86	73,17
Bangka Belitung	69,72	69,88	69,92	69,95	70,18	70,50

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

b. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup

Berikut ini pada tabel yang menggambarkan jumlah Angka Kematian Ibu dari tahun 2013 sampai dengan 2019, di mana untuk tahun 2019 AKI paling tinggi di Kabupaten Belitung Timur dengan jumlah kematian 9 orang, jumlah ini merupakan angka tertinggi di Kabupaten Belitung Timur selama 7 tahun terakhir. Sedangkan yang paling rendah di Kota Pangkalpinang dengan jumlah kematian 1 orang. Secara keseluruhan AKI di tingkat provinsi tahun 2019 sebanyak 36 orang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 44 orang.

Tabel II.35
Angka Kematian Ibu menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013 s.d. 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi/Kabupaten /Kota	Angka Kematian Ibu (AKI)						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bangka	8	7	12	6	4	9	7
Belitung	6	4	3	4	6	6	4
Bangka Barat	5	6	6	5	4	7	5
Bangka Tengah	3	4	2	2	0	6	6
Bangka Selatan	4	4	3	0	2	7	4
Belitung Timur	2	1	1	2	1	4	9
Pangkalpinang	5	2	4	5	4	5	1
Bangka Belitung	33	28	31	24	21	44	36

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

c. Angka Kematian Bayi dan Balita

Beberapa faktor kesehatan seperti angka kematian bayi dan balita, persentase gizi buruk, angka kematian ibu melahirkan, dan beberapa penyakit yang terjadi menjadi hal penting diperhatikan. Perkembangan angka kematian bayi balita diperlihatkan seperti tabel di bawah ini,

Tabel II.36
Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup
Tahun 2015-2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	2015		2016		2017		2018		2019	
		Bayi	Balita	Bayi	Balita	Bayi	Balita	Bayi	Balita	Bayi	Balita
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Bangka	7,54	9,58	7,43	8,23	6,27	7,12	3,77	4,56	5,24	6,04
2	Belitung	11,29	12,26	12,17	14,02	10,04	12,12	12,14	13,45	17,77	20,85
3	Bangka Tengah	6,46	7,86	6,46	6,46	6,52	8,35	4,76	6,62	6,30	6,57
4	Bangka Barat	7,37	8,38	6,63	7,14	5,11	6,01	6,04	7,76	3,09	3,37
5	Bangka Selatan	6,28	7,38	5,85	7,52	6,03	6,63	7,43	7,74	9,19	9,80
6	Belitung Timur	8,25	8,25	6,71	8,62	8,95	10,44	13,28	14,71	11,55	13,56
7	Pangkalpinang	3,38	3,38	6,33	6,33	3,11	3,59	3,25	3,72	3,21	3,21
Bangka Belitung		7,05	8,13	7,22	8,07	6,25	7,35	6,31	7,37	7,17	7,97

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan tabel di atas, angka kematian bayi dan balita pada tahun 2015–2019 di kabupaten/kota menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2017 angka kematian bayi dan balita mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan. Dari 5 (lima) tahun terakhir terlihat kematian bayi dan balita tertinggi terdapat di Kabupaten Belitung. Dengan angka kematian bayi untuk tahun 2019 sebesar 17,77 dan angka kematian balita 20,85. Pada tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung angka kematian bayi tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018 dimana angka kematian bayi tahun ini sebesar 7,17 dan angka kematian balita sebesar 7,97.

d. Persentase *Stunting*

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih pendek (kerdil) dari standar usianya. Persentase Bayi kurus dan *Stunting* Tahun 2018 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana grafik dibawah ini,

Grafik II.9
Persentase Bayi kurus dan *Stunting* Tahun 2018
menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Buku Saku Nasional PSG, 2019

Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan persentase balita kurus dan *stunting* untuk tahun 2018, dengan balita kurus paling tinggi di Kabupaten Bangka Barat dengan persentase sebesar 7,26 persen dan yang paling rendah di Kabupaten Belitung Timur dengan 0,79 persen. Begitu pula dengan balita *stunting* paling tinggi di Kabupaten Bangka Barat sebesar 18,37 persen dan terendah di Kabupaten Belitung Timur sebesar 2,59 persen. Perkembangan persentase balita *stunting* dari tahun 2015 sampai dengan 2019, di mana untuk tahun 2019 persentase balita *stunting* sebesar 8,61 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 12,05. Adapun persentase balita *stunting* paling banyak terdapat di Kabupaten Bangka Barat sebesar 16,96 sedangkan *stunting* paling sedikit di Kota Pangkalpinang dengan persentase sebesar 1,29.

Tabel II.37
Perkembangan Persentase Balita *Stunting* Tahun 2015 s.d. 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi/Kabupaten /Kota	Persentase Stunting Menurut Kabupaten/Kota				
	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	18,66	27,52	27,66	12,21	4,61
Belitung	23,32	18,87	27,66	13,82	10,76
Bangka Barat	23,21	23,21	25	18,37	16,96
Bangka Tengah	19,02	21,96	25,64	6,91	5,85
Bangka Selatan	16,02	25,48	30,03	16,20	9,47
Belitung Timur	9,69	14,72	29,30	2,59	8,02
Pangkalpinang	22,19	21,71	26,69	7,99	1,29
Bangka Belitung	18,93	21,91	27,30	12,05	8,61

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

3. Ketenagakerjaan

a. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Selama tiga tahun terakhir (2017-2019) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, rasio penduduk yang bekerja stagnan diangka 0,96. Meskipun demikian jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif meningkat selama periode 5 (lima) tahun (2015-2019) diiringi dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja. Di tahun 2016 terjadi peningkatan yang melonjak secara dramatis baik jumlah angkatan kerja maupun jumlah penduduk yang bekerja. Namun kembali mengalami penurunan satu poin di tahun 2017 dari 0,97 di tahun 2016 menjadi 0,96 dan terus bertahan sampai dengan tahun 2019.

Berdasarkan Tabel di bawah ini dapat dilihat perkembangan penduduk yang bekerja, angkatan kerja dan penduduk usia kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 5 (lima) tahun terakhir relatif meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, namun penduduk yang bekerja juga relatif terus meningkat selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel II.38
Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2015 s.d. 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penduduk Usia Kerja	998.120	1.022.955	1.047.683	1.073.861	1.097.261
2.	Angkatan Kerja	665.842	705.173	699.017	727.918	742.798
3.	Penduduk Yang Bekerja	623.949	686.830	672.618	701.366	715.927
4.	Rasio Penduduk Yang Bekerja	0,94	0,97	0,96	0,96	0,96

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Struktur penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan pola perubahan pada masing-masing sektornya. Di sektor primer terjadi pergeseran, di mana untuk lapangan pekerjaan di bidang pertanian tahun 2019 memberikan kontribusi terbesar penyerapan tenaga kerja sebesar 29,09%, meskipun mengalami penurunan dari tahun 2018. Sedangkan untuk lapangan pekerjaan pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi terbesar ke tiga pada tahun 2019 sebesar 14,14% meningkat dari tahun 2018 yang berada diangka 13,65%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja untuk sektor pertanian meningkat dan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih cenderung untuk bertani ketimbang untuk bekerja di bidang pertambangan. Di sektor tersier kontribusi penyerapan tenaga kerja terbesar ada pada lapangan pekerjaan perdagangan sebesar 17,37% merupakan penyerapan tenaga kerja kedua terbesar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019. Sektor sekunder mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja dari tahun 2018, di mana kontribusi terbesar ada pada lapangan pekerjaan industri pengolahan sebesar 7,6%.

Tabel II.39
Data Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Tahun 2015 s.d. 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Lapangan Pekerjaan Utama	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sektor Primer :					
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	36,63	32,13	32,56	30,99	29,09
2. Pertambangan dan Penggalian	10,47	10,81	13,59	13,65	14,14
Sektor Sekunder:					
3. Industri Pengolahan	5,75	8,17	6,56	7,05	7,6
4. Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,61	0,91	0,46	0,53	0,54
5. Bangunan	4,61	3,21	5,28	5,08	5,26
Sektor Tersier:					
6. Perdagangan	17,55	19,21	17,48	18,81	17,37
7. Transportasi dan Pergudangan	2,62	2,39	2,04	1,74	2,24
8. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,14	4,07	3,54	3,9	4,62
9. Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan	1,49	1,32	1,7	1,65	1,61

Asuransi, Real Estate					
10. Jasa Perusahaan	0,98	1,04	0,75	0,97	1,1
11.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,48	5,28	6,37	6,33	6,11
12. Jasa Pendidikan	4,26	5,01	3,75	3,96	4,48
13. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,64	1,18	1,91	1,54	1,89
14. Jasa Lainnya	2,99	4,6	4,01	3,82	3,95
Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional -Sakernas, 2020

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1. Kebudayaan

a. Jumlah Grup Kesenian

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu provinsi kepulauan yang menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan daerah. Dalam pengembangan kepariwisataan, selain mengandalkan wisata bahari sebagai daya tarik wisata, yang tak kalah menarik adalah keragaman seni dan budaya yang dimilikinya dan dikemas sebagai bagian dari atraksi budaya dalam mendukung pariwisata. Beberapa kebudayaan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain adalah Perang Ketupat, Rebo Kasan, Mandi Belimau, Antu Bubu Maras Taun, Beripat, dan sebagainya. Dalam rangka melestarikan nilai-nilai seni dan budaya, peran sanggar-sanggar kesenian dan budaya yang saat ini semakin tumbuh dan berkembang dengan baik.

Tabel II.40
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2016 s.d. 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	Selisih (poin)	(2016-2019) (%)	2020	Selisih (poin)	(2019-2020) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Jumlah grup kesenian	12,47	12,74	12,89	13,17	0,7	5,6	10,79	-2,38	-18,07
2.	Jumlah gedung kesenian	0,0081	0,0081	0,0081	0,0081	0	0	0,0066	-0,0015	-18,52

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2020, Rumus: jumlah grup/klub : jumlah penduduk * 10.000

Berdasarkan data perkembangan grup kesenian di atas, dalam kurun waktu 2016-2019, terjadi pertumbuhan kenaikan kesenian adalah sebesar 5,6 persen, di mana pada tahun 2016 jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk adalah 12,47 meningkat menjadi 13,17 pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020, angka pertumbuhan ini menurun sebesar 18,07 persen, yakni dari 13,17 di tahun 2019 turun menjadi 10,79 di tahun 2020. Untuk jumlah gedung kesenian dari periode 2016-2019, jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk masih sama. Pada tahun 2020, jumlah gedung kesenian ini mengalami penurunan sebesar 18,52 persen, yaitu dari 0,0081 di tahun 2019 turun menjadi 0,0066 di tahun 2020.

Tabel II.41
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2019-2020
menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Grup Kesenian		Jumlah Gedung Kesenian		Jumlah Grup Kesenian		Jumlah Gedung Kesenian	
		Per 10.000 penduduk				per 10.000 penduduk			
		2019	2020	2019	2020	Selisih	(%)	Selisih	(%)
1.	Kab. Bangka	11,98	10,01	0	0	-1,97	-16,44	0	0
2.	Kab. Belitung	13,98	11,42	0	0	-2,56	-18,31	0	0
3.	Kab. Bangka Barat	16,96	13,16	0	0	-3,8	-22,41	0	0
4.	Kab. Bangka Tengah	12,16	9,10	0	0	-3,06	-25,16	0	0
5.	Kab. Bangka Selatan	10,84	8,55	0	0	-2,29	-21,13	0	0
6.	Kab. Belitung Timur	18,60	15,52	0	0	-3,08	-16,56	0	0
7.	Kota Pangkal Pinang	11,39	10,19	0	0	-1,2	-10,54	0	0
Jumlah		95,91	77,95	0	0	-17,96	-18,73	0	0

Rumus: jumlah grup/klub : jumlah penduduk * 10.000, Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2020

Pada tahun 2020, jumlah grup kesenian di Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan. Kabupaten Bangka Tengah mengalami penurunan tertinggi di tahun 2020, yaitu sebesar 25,16 persen, dimana dari periode 2019-2020, kabupaten ini memiliki pertumbuhan jumlah grup kesenian tertinggi di Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sebesar 9,55 persen. Kabupaten yang mengalami penurunan jumlah kesenian tertinggi selanjutnya adalah Kabupaten Bangka Barat, sebesar 22,41 persen, dimana di tahun 2019 adalah 16,96 turun menjadi 13,16 dan Kabupaten Bangka Selatan, sebesar 21,13 persen, dimana di tahun 2019, jumlah grup kesenian sebesar 10,84 turun menjadi 8,55 di tahun 2020. Meskipun mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 16,56 di tahun 2020, Kabupaten Belitung Timur masih memiliki jumlah grup kesenian tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sebesar 15,52. Kabupaten Bangka Barat memiliki jumlah grup kesenian tertinggi kedua, yaitu 13,16 dan Kabupaten Belitung dengan grup kesenian tertinggi ketiga, yaitu 11,42. Jumlah grup kesenian terendah di tahun 2020 berada di Kabupaten Bangka Selatan.

2. Kepemudaan dan Olahraga

1) Jumlah Klub Olahraga

Data yang diperoleh dari Perangkat Daerah yang menangani pemuda dan olahraga, serta Organisasi Cabang Olahraga KONI Kabupaten dan Kota Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah perkumpulan olahraga pada tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 6 (enam) cabang olahraga, Atletik, Sepak Bola, Bola Voli, Bola Basket, Bulu Tangkis, Dan Pencak Silat, sebanyak 1.361 perkumpulan, terdapat 183 perkumpulan di Kabupaten Bangka, 246 perkumpulan di Kabupaten Belitung, 256 perkumpulan Kabupaten Bangka Barat, 137 perkumpulan di Kabupaten Bangka Tengah, 255 perkumpulan di Kabupaten Bangka Selatan, 194 perkumpulan di Kabupaten Belitung Timur, dan 132 perkumpulan di Kota Pangkalpinang. Perkumpulan olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling banyak terdapat pada cabang Sepak Bola (654 perkumpulan), kemudian Bola Voli (452 perkumpulan), Bulu Tangkis

(118 perkumpulan), Pencak Silat (95 perkumpulan), Bola Basket (63 perkumpulan), dan Atletik (21 perkumpulan).

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga Atletik pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2020, Kota Pangkalpinang memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga atletik terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 5 jumlah perkumpulan cabang olahraga atletik. Jumlah perkumpulan cabang olahraga atletik Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 21 jumlah perkumpulan cabang olahraga atletik.

Tabel II.42
Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Atletik dan Sepak Bola
Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	2016		2017		2018		2019		2020	
		Atl	Spb	Atl	Spb	Atl	Spb	Atl	Spb	Atl	Spb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Bangka	2	40	2	64	3	64	3	64	3	64
2.	Belitung	2	110	2	120	3	123	3	123	3	123
3.	Bangka Barat	2	120	2	120	3	120	3	125	3	130
4.	Bangka Tengah	2	56	2	56	2	56	2	56	2	58
5.	Bangka Selatan	2	135	2	135	3	135	3	139	3	142
6.	Belitung Timur	2	75	2	75	2	75	2	80	2	90
7.	Pangkal Pinang	3	32	3	40	5	40	5	45	5	47
Bangka Belitung		15	568	15	610	21	613	21	632	21	654

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Sedangkan jumlah perkumpulan cabang olahraga Sepak Bola pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, Kabupaten Bangka Selatan memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga Sepak Bola terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 142 jumlah perkumpulan cabang olahraga Sepak Bola mengalami kenaikan. Jumlah perkumpulan cabang olahraga Sepak Bola Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 654 jumlah perkumpulan cabang olahraga Sepak Bola dan mengalami kenaikan.

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Voli pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, bahwa pada tahun 2020, Kabupaten Belitung memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Voli terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 83 jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Voli. Sedangkan Kota Pangkalpinang memiliki jumlah terkecil yaitu 36 perkumpulan cabang olahraga Bola Voli. Jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Voli di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 sebanyak 451 perkumpulan dan tahun 2020 sebanyak 452 jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Voli (bertambah 1 perkumpulan di Kota Pangkalpinang).

Tabel II.43

Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Voli dan Bulu Tangkis
Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	2016		2017		2018		2019		2020	
		Volly	BB	Volly	BB	Volly	BB	Volly	BB	Volly	BB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Bangka	25	27	38	28	47	30	47	30	47	30
2.	Belitung	70	4	76	7	83	7	83	7	83	7
3.	Bangka Barat	64	4	75	4	80	4	80	4	80	4
4.	Bangka Tengah	52	7	48	7	43	7	43	7	43	7
5.	Bangka Selatan	76	3	78	3	82	3	82	3	82	3
6.	Belitung Timur	65	5	78	5	81	5	81	5	81	5
7.	Pangkal Pinang	47	10	40	9	35	7	36	7	36	7
Bangka Belitung		399	60	433	63	451	63	452	63	452	63

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Sedangkan menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Basket pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, Kabupaten Bangka memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Basket terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 30 jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Basket. Jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Basket Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 63 jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Basket.

Tabel II.44

Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Basket Tahun 2016 s.d. 2020
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	13	16	16	16	16
2.	Kab. Belitung	14	18	20	20	20
3.	Kab. Bangka Barat	20	20	21	21	21
4.	Kab. Bangka Tengah	8	16	18	18	18
5.	Kab. Bangka Selatan	10	12	15	15	15
6.	Kab. Belitung Timur	5	9	10	10	10
7.	Kota Pangkal Pinang	15	17	18	18	18
Bangka Belitung		85	108	118	118	118

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel di atas menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga Bulu Tangkis pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, Kabupaten Bangka Barat memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga Bulu Tangkis terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 21 jumlah perkumpulan cabang olahraga Bulu Tangkis. Jumlah perkumpulan cabang olahraga Bulu Tangkis Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 118 jumlah perkumpulan cabang olahraga Bulu Tangkis.

Tabel II.45

Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Pencak Silat

Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	19	23	23	23	23
2.	Kab. Belitung	10	10	10	10	10
3.	Kab. Bangka Barat	18	18	18	18	18
4.	Kab. Bangka Tengah	7	7	9	9	9
5.	Kab. Bangka Selatan	10	10	10	10	10
6.	Kab. Belitung Timur	6	6	6	6	6
7.	Kota Pangkal Pinang	19	19	19	19	19
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		89	93	95	95	95

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel di atas menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga Pencak Silat pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, Kabupaten Bangka memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga Pencak Silat terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 23 jumlah perkumpulan cabang olahraga Pencak Silat. Jumlah perkumpulan cabang olahraga Pencak Silat Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 95 jumlah perkumpulan cabang olahraga Pencak Silat.

2) Jumlah Gedung Olahraga

Olahraga merupakan bagian penting dalam mengembangkan sumber daya manusia sebagai bagian dari pelaku pembangunan, sehingga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2018 menempatkan bidang kepemudaan dan olahraga menjadi salah satu prioritas yang selanjutnya pada tahapan implementasi telah diwujudkan melalui dukungan program dan penganggaran. Salah satu wujud nyata dari upaya pengembangan bidang keolahragaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah telah disediakan lahan seluas ±50 ha untuk pembangunan *Sport Center*, saat ini di kawasan tersebut telah tersedia Gedung Olahraga (GOR) Sahabuddin namun perlu dikembangkan lagi sehingga seluruh *venue* cabang olahraga dapat dibangun di kawasan tersebut.

Tabel II.46

Perkembangan Sarana dan Prasarana Olahraga
Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Gedung Olahraga	10	12	14	14	14
2.	Jumlah Lapangan Olahraga	1730	1731	1732	1733	1733

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dari data perkembangan sarana dan prasarana olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu banyak, di mana pada tahun 2020, jumlah gedung olahraga sebanyak 14 buah dan lapangan olahraga sebanyak 1.733 buah.

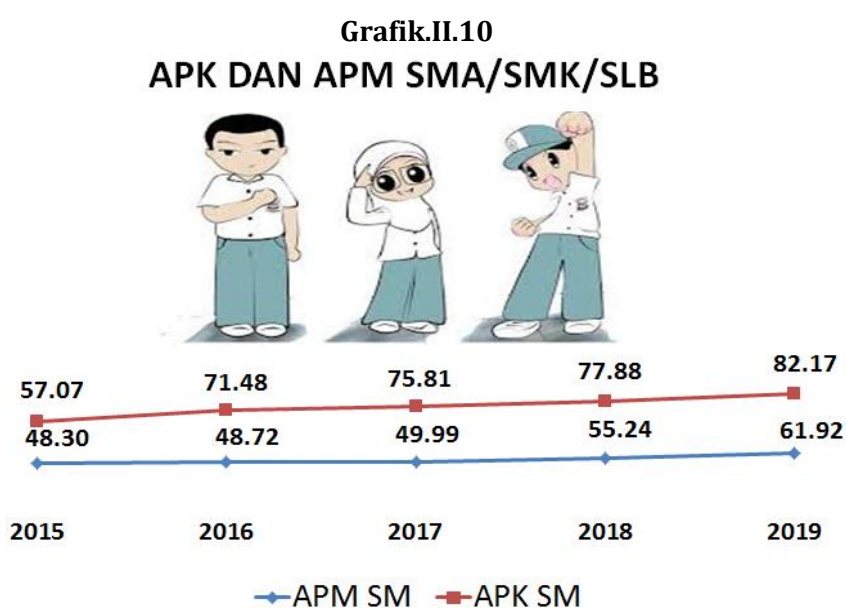
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Urusan pendidikan

a. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/SLB

Angka partisipasi kasar merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Sementara itu, angka partisipasi murni merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih sekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Baik APK maupun APM Sekolah Menengah termasuk SMK, SLB, dan sejak tahun 2007, pendidikan non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.



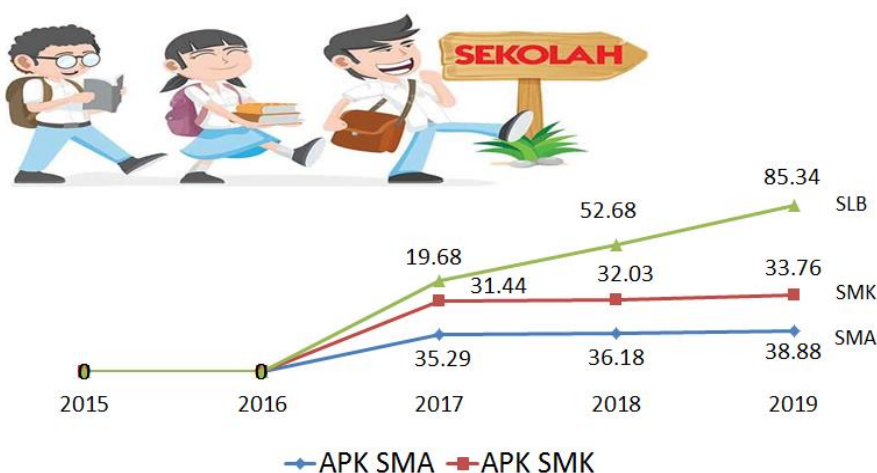
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan data diatas baik APK maupun APM Bangka Belitung dari tahun 2015-2019 mengalami peningkatan setiap tahun. APK Sekolah Menengah Bangka Belitung pada tahun 2015 hanya sebesar 57,07 persen, namun pada tahun 2016 meningkat menjadi 71,48 persen dan terus meningkat sebesar 75,81 persen (2017), 77,88 persen (2018) serta pada tahun 2019 mencapai 82,17 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 82,17 persen penduduk yang sekolah sudah mencukupi umur dan atau tidak melebihi umur yang seharusnya.

Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. APM Bangka Belitung juga mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Pada tahun 2015 APM Bangka Belitung sebesar 48,30 persen, kemudian meningkat sebesar 48,72 persen (2016), 49,99 persen (2017), 55,24 persen (2018), dan sampai dengan tahun 2019 mencapai 61,92 persen. Hal ini menunjukkan bahwa 61,92 persen penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung usia 16-18 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SMA/SMK/SLB/ sederajat. Secara rinci APK SMA, SMK, dan SLB termasuk pendidikan non formal sebagai berikut:

Grafik. II.11

APK SMA, SMK, DAN SLB



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Secara keseluruhan, capaian APK pada semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016. APK SMA pada tahun 2017 sebesar 35,29 sedangkan 2019 sebesar 38,88. APK SMK tahun 2017 sebesar 31,44 menjadi sebesar 33,76 (2019) begitupun APK SLB dari 19,68 (2017) menjadi sebesar 85,34 (2019). Kondisi ini memberikan gambaran keberhasilan pemerintah daerah untuk memperluas dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan.

b. Akreditasi Sekolah dan Mutu Pendidikan

Pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) dapat diukur melalui hasil akreditasi yang dinilai berdasarkan standar. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Akreditasi sekolah adalah sarana untuk melakukan upaya-upaya yang terus menerus dalam meningkatkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki sekolah serta memperbaiki kelemahan-kelemahan yang dimiliki. Secara umum berdasarkan neraca pendidikan akreditasi sekolah SMA dan SMK sebagaimana dibawah ini,

Grafik. II.12

SMA, SMK, SLB TERAKREDITASI A



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan tabel di atas dari tahun 2015-2019 akreditasi SMA, SMK, dan SLB selalu naik meskipun tidak signifikan. Pada tahun 2015 akreditasi SMA, SMK, dan SLB sebesar 30,30 persen kemudian tahun 2016 sebesar 33,30 persen, dan terus naik mencapai 43,38 persen (2019). Beberapa faktor penunjang akreditasi dilihat dari capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), seperti sarana prasarana pendidikan, jumlah dan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Capaian SNP SMA periode 2016-2019 meningkat, dimana pada tahun 2016 sebesar 4,81 dan meningkat menjadi 6,58 (2019). Begitupun dengan SNP SMK dari 4,48 (2016) menjadi 6.60 (2019).

2. Urusan Kesehatan

a. Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya

Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan sebagai salah satu sub sistem dari sistem kesehatan memberikan fokus penting pada pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan. Dimana salah satu indikator sasaran meningkatnya kualitas kesehatan adalah jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya. Berikut disajikan SDM Kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tabel di bawah ini,



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Pada tahun 2015-2017 pendataan SDM Kesehatan masih dilakukan secara manual sehingga jumlah SDM Kesehatan cenderung fluktuatif. Namun pada tahun 2018 Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Dukcapil untuk mendata SDM Kesehatan by NIK. Pada tahun 2018 jumlah SDM Kesehatan sebanyak 5.887 orang dan tahun 2019 sebanyak 7.184 orang. Peningkatan kompetensi SDM Kesehatan pada tahun 2018 sebanyak 1.718 orang dan 2019 sebanyak 2.049 orang atau meningkat sebanyak 331 orang.

b. Akreditasi Rumah Sakit

Sejak tahun 2015-2019 perkembangan Rumah Sakit (RS) cukup pesat. Pada tahun 2015 jumlah rumah sakit sebanyak 18 RS sedangkan 2019 mencapai 28 RS, yang terdiri dari rumah sakit pemerintah 11 (sebelas) RS, rumah sakit swasta 13 (tiga belas) RS dan rumah sakit khusus 4 (empat) RS, dengan klasifikasi kelas B sebanyak 2 RS (pemerintah dan khusus), klasifikasi C berjumlah 15 RS (7 pemerintah, 5 swasta, dan 1 khusus), klasifikasi D sebanyak 6 RS (2 pemerintah dan 4 swasta) dan klasifikasi kelas D Pratama 1 RS.

Grafik.II.14
Akreditasi Rumah Sakit



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan tabel diatas dalam upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, sampai dengan tahun 2019 Rumah Sakit (RS) terakreditasi sebanyak 18 RS (72%) yang terdiri dari 10 RS Pemerintah dan 8 RS Swasta. Cakupan RS Pemerintah yang telah terakreditasi mencapai 72 persen. Rumah Sakit terakreditasi Paripurna yaitu RS Jiwa, RS Depati Bahrin, RS Bhakti Timah. Yang terakreditasi Madya yaitu RS Jiwa, RS Dr. (HC) Ir. Soekarno, RS Depati Bahrin, RS Bhakti Timah, dan RS Dr. H. Marsidi Judono. Sedangkan yang terakreditasi Utama yaitu RS Siloam, RS Bhakti Wara, RS Alma. Yang terakreditasi madya, yaitu RS Depati Hamzah, Kabupaten Bangka Tengah, RS Medika Stania. Sedangkan yang terakreditasi Perdana yaitu Sejiran Setason, RS Belitung Timur, RS Bangka Selatan, RS Eko Maulana Ali, RS Arsani, RSBT Mentok, dan RSIA Muhaya.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

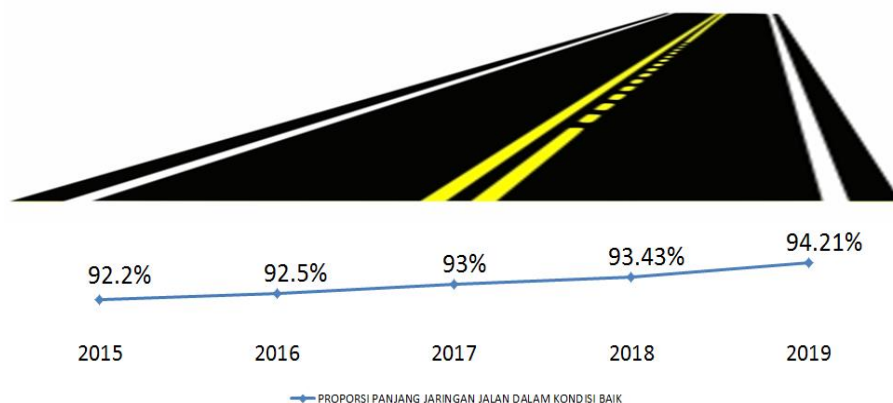
a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap

Kriteria jalan kondisi mantap adalah jalan yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 13 Tahun 2011 disebutkan kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang, kriteria kondisi jalan tidak mantap meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki jalan yang terbentang 600,42 km dengan status sebagai jalan nasional dan 850,99 km dengan status jalan provinsi. Berdasarkan kondisi jalan, pada tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar sudah memiliki jalan yang berkondisi baik. Hal ini terbukti dengan sudah banyak jalan aspal dari perkotaan hingga pelosok pedesaan di Kepulauan Bangka Belitung. Namun demikian, masih ada jalan yang memiliki kondisi rusak berat, yaitu sebesar 1,50 persen (21,75 km), dimana kondisi jalan yang mengalami kerusakan ada pada jalan dengan status jalan provinsi (21,51 km) yaitu jalan umum yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.

Selain jalan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi kepulauan dan memiliki banyak sungai sehingga memerlukan pembangunan jembatan yang kokoh dalam menghubungkan suatu daerah dengan daerah lain. Terdapat panjang jembatan sebesar 3.508,75 meter yang merupakan kewenangan provinsi dan 2.879,48 meter kewenangan Nasional, dimana

konstruksi jembatan tersebut didominasi beton bertulang dan rangka baja karena lebih kokoh dan tahan lama.

Grafik II.15
Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap



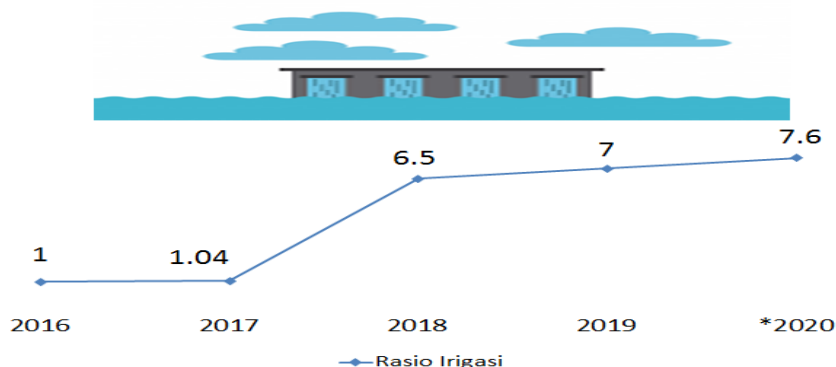
Sumber : Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Secara umum capaian kondisi jalan nasional di Bangka Belitung sudah mencapai 99,79 persen (2019). Sedangkan Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap Provinsi Bangka Belitung meningkat dari tahun 2015-2019. Dimana pada tahun 2015 sebesar 92,2 persen dan terus meningkat menjadi 92,5 persen (2016), 93 persen (2017), 93,43 persen (2018) dan 94,21% (2019). Hal ini menunjukkan bahwa jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kondisi baik dan mempunyai kemampuan dalam memikul beban kendaraan.

b. Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder kewenangan provinsi pada daerah irigasi yang luasnya 1000ha-3000 ha dan daerah irigasi lintas kabupaten/kota.

Grafik II.16
RASIO IRIGASI



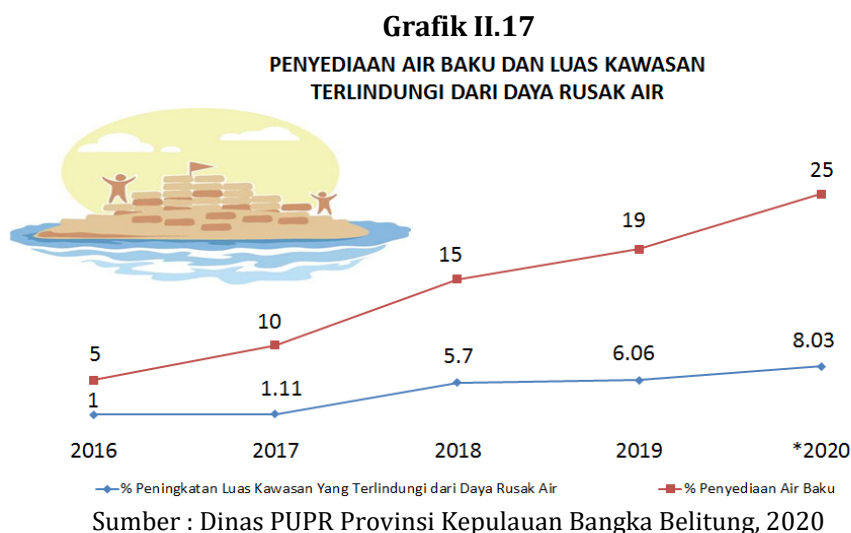
Sumber : Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Luas potensial jaringan irigasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 7.132 ha dan luas fungsional sebesar 2.849 ha dengan panjang jaringan irigasi 133.582.11 m. Jaringan irigasi dengan kondisi baik mencapai 46.305.41 meter (34,66%), kondisi sedang 27.680.2 meter (20,7%), dan kondisi rusak sepanjang 98.450.8 meter (73,7%). Jaringan Irigasi merupakan satu

kesatuan infrastruktur pendukung utama sektor pertanian khususnya untuk pertanian lahan basah. Pada tahun 2016 rasio irigasi hanya sebesar 1 persen yang tertangani atau hanya seluas 28.49 ha. Namun pada tahun 2017-2019 terjadi peningkatan hingga mencapai 7 persen atau seluas 199.43 ha. Daerah jaringan irigasi yang dalam kondisi baik saat yaitu Buleng (3.536.11m), Kimak (754,17 m), Sedang Pergam (3.581.07 m), dan Gadung Bikang Kepoh (38.434.06 m).

c. **Persentase Penyediaan Air Baku Peningkatan Luas Kawasan Yang Terlindungi Dari Daya Rusak Air**

Air baku merupakan air yang didistribusikan dalam penyediaan air bersih/ konsumsi yang harus memenuhi baku mutu tertentu sebagai bahan baku untuk air bersih/ konsumsi. Air baku dapat diperoleh dari beberapa sumber air seperti sumber air permukaan, cekungan air tanah dan air hujan. Ketersediaan infrastruktur sumber daya air sangat penting dan perlu dijaga dari daya rusak air. Pengendalian daya rusak air merupakan upaya pencegahan melalui perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya air. Salah satu daya rusak air adalah banjir. Luas kawasan banjir di Pulau Bangka mencapai 48.310.16 ha (Pulau Bangka 46.128.98 ha dan Pulau Belitung 2.181.18 ha).



Penyediaan air baku di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat dari tahun 2016-2019. Dimana pada tahun 2016 hanya 5 persen sedangkan tahun 2019 mencapai 19 persen. Penyediaan air baku di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memanfaatkan kolong bekas penambangan timah. Di Pulau Bangka terdapat 635 kolong dan di Pulau Belitung terdapat 66 kolong. Untuk menjaga mutu baku air maka perlindungan terhadap daya rusak air selalu ditingkatkan. Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air sampai dengan tahun 2019 sebesar 6,06 persen. Artinya dari luas kawasan banjir di Pulau Bangka 46.128.98 ha baru 2.793.62 ha yang tertangani ditahun 2019.

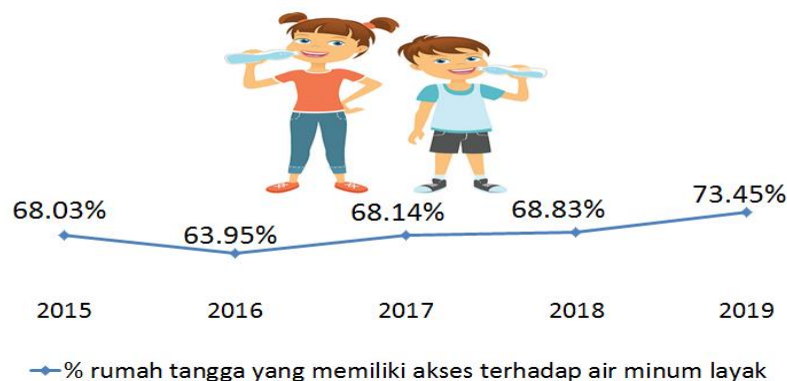
4. **Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

a. **Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak**

Air merupakan kebutuhan hidup yang sangat penting bagi manusia, terutama untuk kebutuhan minum dan memasak. Untuk keperluan air minum dibutuhkan air rata-rata sebanyak 5 liter/hari, sedangkan secara keseluruhan kebutuhan air suatu rumah tangga diperkirakan sebesar 60 liter/hari. Air Minum Layak adalah air ledeng eceran/meteran, air hujan, dan

pompa/sumur terlindung/mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja ≥ 10 m.

Grafik.II.18
RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES
TERHADAP AIR MINUM LAYAK



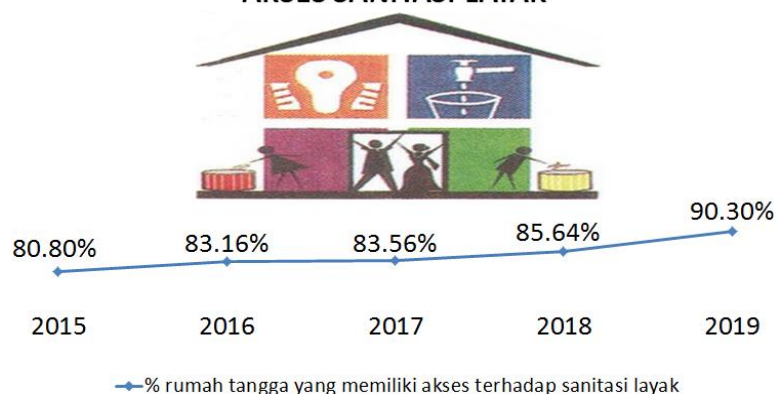
Sumber : BPS dan Dinas Perkim Prov. Kep. Bangka Belitung, 2020

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 sebesar 68,03 persen dan menurun ditahun 2016 menjadi sebesar 63,95 persen. Kemudian meningkat kembali menjadi sebesar 68,14 persen (2017), 68,83 persen (2018), dan 73,45 persen (2019). Kabupaten/kota yang memiliki nilai persentase rumah tangga pengguna air bersih tertinggi yaitu Kabupaten Bangka sebesar 98,50 persen dan yang terendah yaitu Kabupaten Bangka Selatan dengan capaian sebesar 73,93 persen.

b. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak

Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL/sistem terpusat).

Grafik.II.19
AKSES SANITASI LAYAK



Sumber : Dinas Perkim Prov. Kep. Bangka Belitung, 2020

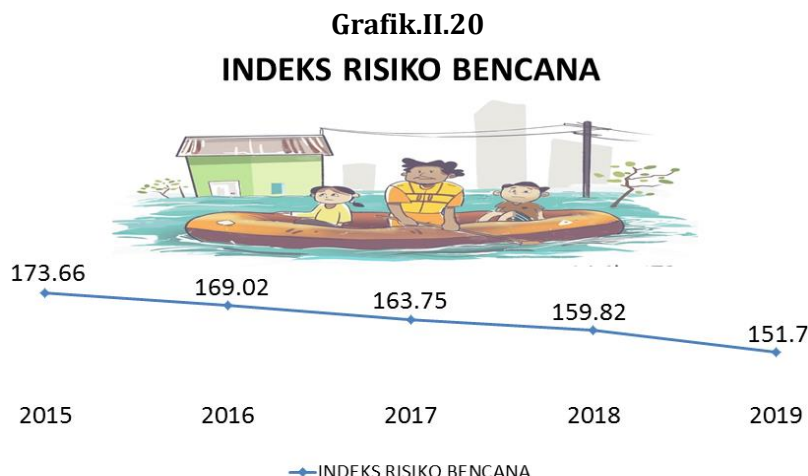
Capaian akses sanitasi layak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019 meningkat. Pada tahun 2015 rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak sebesar 80,80 persen dan terus meningkat sampai dengan tahun 2019 sebesar 90,30 persen. Artinya masih ada 9,70 persen rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi layak, diantaranya masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Peningkatan akses terhadap sanitasi layak tahun

2018-2019 mencapai 4,66 persen. Artinya untuk menuntaskan 9,70 persen yang belum memiliki akses layak, maka hanya perlu 2-3 tahun untuk menuntaskan yang belum memiliki akses layak.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Indeks Risiko Bencana (IRBI)

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan infrastruktur, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis. Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Parameter atau komponen yang digunakan dalam Indeks Risiko Bencana, diantaranya bahaya (*hazard*) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan magnitude dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Kemudian kerentanan (*vulnerability*) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Selanjutnya kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan.



Sumber : BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

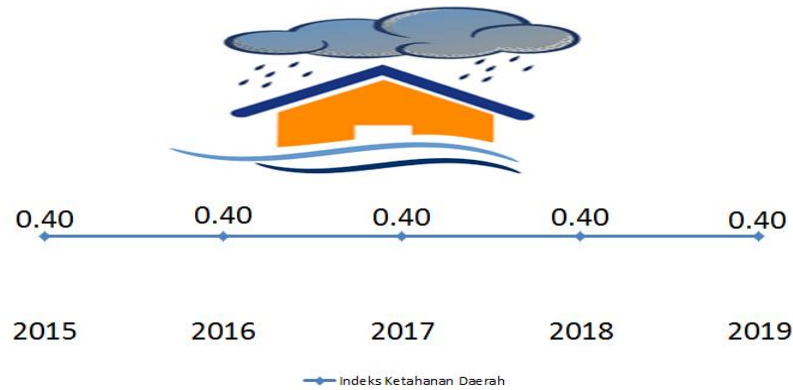
Berdasarkan data di atas, Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 sebesar 173,66, kemudian menurun menjadi 169,02 (2016), 163,75 (2017), 159,82 (2018), dan 151,7 (2019). Meskipun menunjukkan tren penurunan namun IRBI Bangka Belitung masih dalam kategori “tinggi”. Masih tingginya risiko bencana hidro meteorologi seperti banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Risiko tertinggi berada di Bangka Tengah (214,8) dan Bangka Selatan (214), sedangkan terendah pada Kabupaten Bangka Barat (95,2).

b. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

IKD adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan daerah tersebut kondisinya tetap dengan 3 hal, yaitu : indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman yang merupakan komponen penyusun IRBI. IKD dibagi dalam kedalam 3 (tiga) indeks, yaitu rendah (0 – 0,33), sedang (0,34 – 0,66) dan tinggi (0,67 – 1,00). Penghitungan IKD menggunakan aplikasi pusat dengan penilaian kapasitas daerah

yang terdiri dari 7 prioritas dan 71 indikator diantaranya untuk mengetahui jenis bencana dominan dan jiwa terpapar, penyusunan peta risiko bencana dan tren risiko bencana.

Grafik. II.21
INDEKS KETAHANAN DAERAH



Sumber : BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2015-2019 sebesar 0,40 atau dalam kategori “sedang”. Meskipun setiap tahun terdapat komponen yang berubah namun capaiannya hanya mencapai 0,40 (sedang). Artinya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup tangguh dalam menghadapi bencana. Tingkat kerentanan dari Potensi kerugian materiil dan lingkungan yang ditimbulkan masih dalam kategori sedang dan bencana yang ditimbulkan dominan dari gelombang ekstrim dan abrasi.

c. Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Yang Ditindaklanjuti

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kedudukan dan fungsi yang cukup penting sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintah daerah sebagaimana ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sampai dengan tahun 2018 jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 1.449 orang meningkat dari tahun 2017 (1.305 orang) dengan rasio jumlah Polisi Pamong Praja per-10.000 Penduduk mencapai 9,93 (2018).

Grafik. II.22
PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA YANG DITINDAKLANJUTI



Sumber : Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Pada tahun 2016 ditemukan 412 pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 412 pelanggaran ditindaklanjuti. Pada tahun 2017-2019 pelanggaran Perda dan Perkada menunjukkan tren penurunan dari 417 pelanggaran menjadi 169 pelanggaran. Semua pelanggaran Perda dan Perkada ditindaklanjuti atau dengan capaian 100 persen. Pelanggaran terhadap ketentuan Perda dan Perkada tersebut dikenakan tindakan preventif non-yustisial atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sampai proses pengadilan.

6. Urusan Sosial

a. Indeks Pembangunan Sosial (IPS)

Indeks Pembangunan Sosial merupakan suatu alat untuk menyediakan secara holistik, tujuan dan ukuran yang berbasis hasil kesejahteraan yang bebas dari indikator ekonomi. Pengukuran angka Indeks Pembangunan Sosial (IPS) Bangka Belitung tergabung dalam nilai-nilai komponen dan dimensi. Dimensi tersebut merupakan indikator dari Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA), Indeks Pembangunan Olahraga (IPO), dan Kesejahteraan Sosial. Sedangkan komponen pengukuran bobot diukur dari jumlah bayi lahir, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, jumlah pemuda, jumlah anak, jumlah penduduk usia >10 tahun, dan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Indeks Kesejahteraan Sosial Bangka Belitung disajikan dalam grafik sebagai berikut:



Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

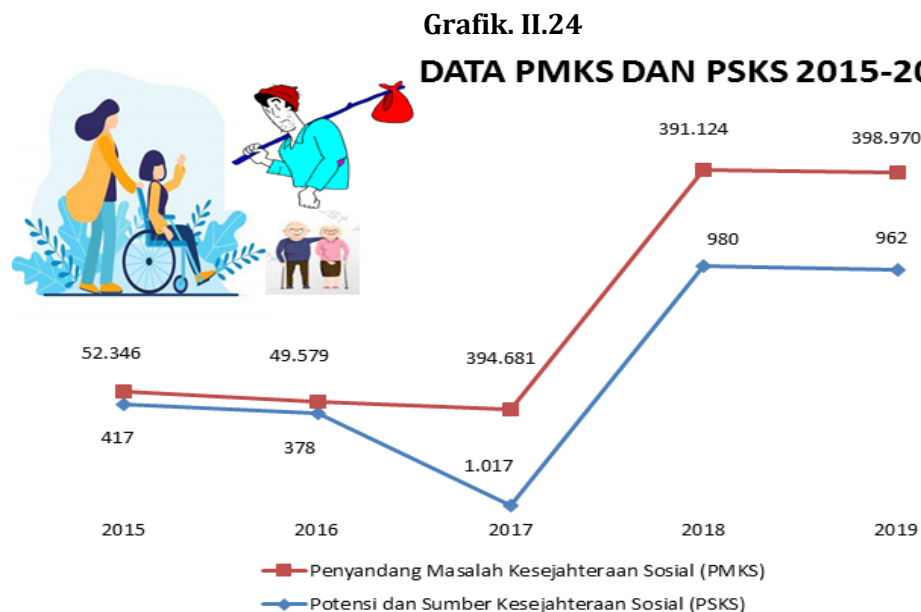
Berdasarkan data di atas pada tahun 2016 belum diukur Indeks Pembangunan Sosial (IPS), namun pada tahun 2017 nilai IPS Bangka Belitung mencapai 39,01. Angka ini meningkat ditahun 2018 menjadi 44,04 dan 44,12 (2018). Pada tahun 2020 target IPS Bangka Belitung sebesar 44.20. Rentang nilai IPS : 0-100. Semakin mendekati angka 100, artinya tingkat pembangunan sosial semakin baik. Nilai IPS Bangka Belitung < 65 artinya tingkat pembangunan sosial Bangka Belitung dalam kategori “rendah”.

b. Jumlah PMKS/PSKS Yang Terberdayakan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik

jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Dewasa ini masalah PMKS seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan perlu ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat, hal tersebut di mana pada tahun 2017 jumlah PMKS sebesar 48.521 orang, sedangkan tahun 2018 meningkat menjadi 391.124 orang, dan tahun 2019 menjadi sebesar 398.970 orang.



Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) setiap tahun selalu naik. Pada tahun 2017 PMKS Provinsi Bangka Belitung berjumlah 394,681 orang menjadi 398.970 orang ditahun 2019. Naiknya jumlah PMKS dikarenakan naiknya beberapa komponen PMKS seperti anak telantar, lanjut usia telantar, penyandang disabilitas, dan lain sebagainya. Namun hal ini berbanding terbalik dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mengalami penurunan yaitu dari tahun 2017 berjumlah 1.017 orang menjadi 962 orang. Hal ini dikarenakan berkurangnya beberapa komponen potensi dan sumber kesejahteraan sosial, seperti: pekerja sosial profesional, pekerja sosial kemasyarakatan, dan lembaga kesejahteraan sosial.

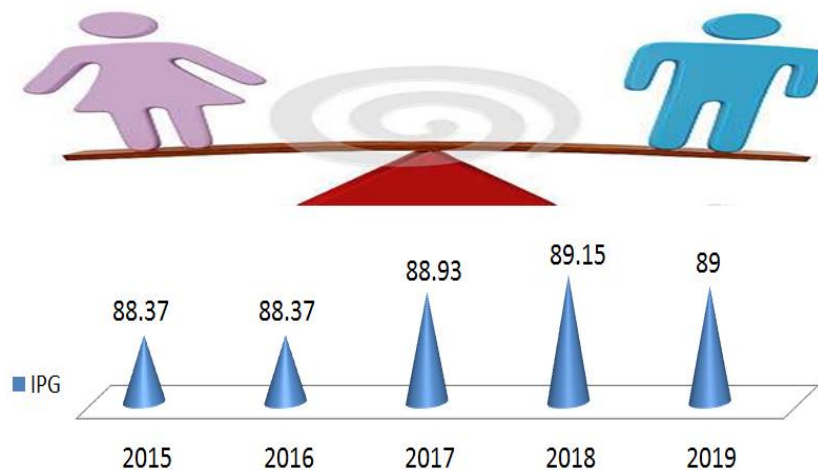
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah IPG diformulasikan sebagai rasio antara IPM Perempuan dan IPM Laki-laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Gambaran terhadap perkembangan pembangunan gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Grafik. II.25
INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)



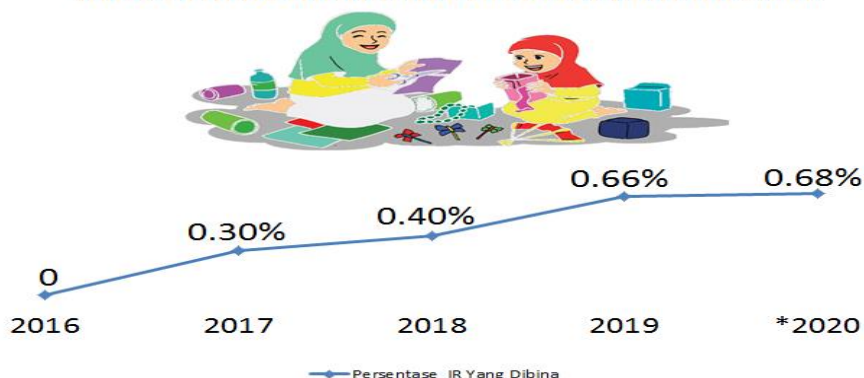
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Saat ini meskipun angka IPG menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya namun secara nasional angka IPG (89.15) masih di bawah angka nasional (90,99). Dengan nilai IPG yang berada di bawah 100, dapat disimpulkan bahwa secara global pembangunan laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan pembangunan perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan di Bangka Belitung masih di bawah rata-rata nasional, yang tercermin salah satunya dari jumlah keterwakilan perempuan di dalam keanggotaan di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dimana keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD mengalami penurunan. Pada periode 2009-2014 keterwakilan itu berjumlah 5 (lima) orang, dan turun menjadi hanya 2 (dua) orang periode 2014-2018.

b. Persentase Industri Rumah (IR) Yang Dibina

Industri Rumahan/IR (*Home Industry*) adalah suatu sistem produksi yang menghasilkan suatu produk melalui proses pembentukan nilai tambah dari bahan baku tertentu, yang dilakukan di lokasi rumah dan bukan di suatu lokasi khusus (seperti pabrik), dengan menggunakan alat-alat produksi yang sederhana. IR merupakan Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) yang dicanangkan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi.

Grafik. II.26
INDUSTRI RUMAH TANGGA BAGI PEREMPUAN



Sumber: DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Pengembangan Industri Rumah Tangga (IRT) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 hanya 0,30 persen IRT yang dibangun, namun pada tahun 2018 meningkat menjadi 0,40 persen dan tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 0,66 persen. Beberapa indikator atau ukuran keberhasilan pengembangan industri rumah tangga adalah sebagai berikut :

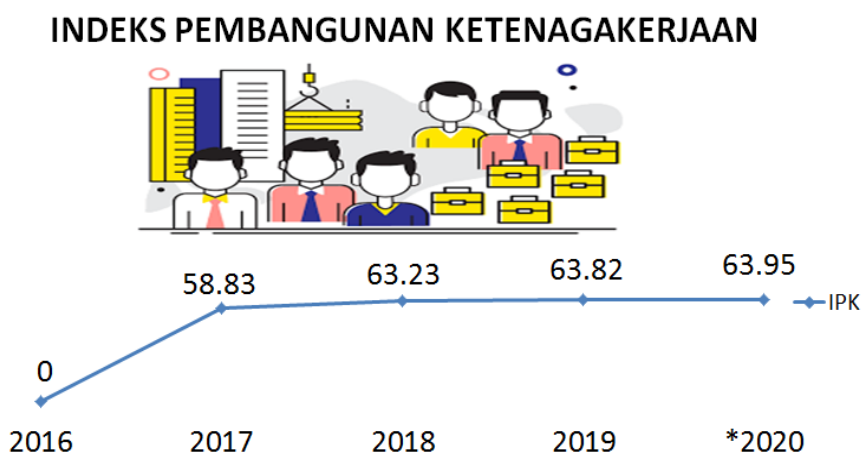
- 1). Meningkatnya kesejahteraan dari masyarakat (khususnya keluarga pelaku usaha mikro);
- 2). Adanya peningkatan pendapatan perempuan dan anggota keluarga dari hasil usahanya;
- 3). Terjadi hubungan keluarga yang baik antara suami dan istri, anak dan mungkin dengan keluarga dekat yang lain;
- 4). Meningkatnya kualitas gizi dalam keluarga dan biaya sekolah; dan
- 5). Adanya perubahan kategori IRT dari IRT Pemula ke IRT Berkembang. IRT Berkembang ke IRT Maju.

2. Urusan Tenaga Kerja

a. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) untuk mengukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan nasional maupun di setiap daerah provinsi. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang mencakup 9 (sembilan) indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar, yaitu: 1). perencanaan tenaga kerja; 2). penduduk dan tenaga kerja; 3). kesempatan kerja; 4). pelatihan kerja dan kompetensi kerja; 5). produktivitas tenaga kerja; 6). hubungan industrial; 7). kondisi lingkungan kerja; 8). pengupahan dan kesejahteraan pekerja; dan 9). jaminan sosial tenaga kerja.

Grafik. II.27



Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

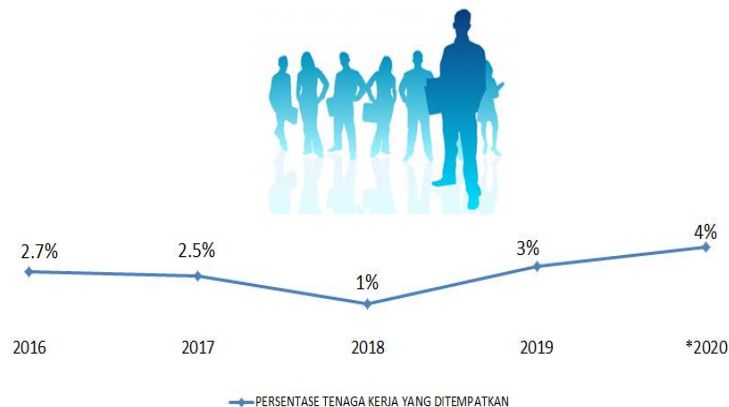
Capaian Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 sebesar 58.83 dan meningkat sampai dengan tahun 2019 sebesar 63,82. Meskipun IPK Bangka Belitung naik namun capaian ini masih berada < 65,99 dengan kategori “menengah ke bawah”. Mulai tahun 2017 pengukuran IPK menggunakan perspektif baru sehingga hasil pencapaian menengah kebawah diartikan bahwa Provinsi Bangka Belitung masih jauh dari target dan standar *Sustainable Development Goals* (SDGs).

b. Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi

Pelatihan berbasis kompetensi merupakan pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sesuai standar

yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja setiap tahun dilakukan berbagai jenis pelatihan kerja, baik yang berbasis kompetensi kerja, berbasis masyarakat, maupun pelatihan kewirausahaan, diantaranya adalah Pelatihan Otomotif, Las, Listrik, Menjahit, Teknologi Informatika Komputer (TIK) Elektro, Bangunan, Pariwisata, Elektronika/ HP dan Tata Rias.

Grafik. II.28
PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN



Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan data diatas persentase tenaga kerja yang ditempatkan berfluktuatif. Pada tahun 2016 tenaga kerja yang ditempatkan sebesar 2,7 persen. Artinya dari 15.593 orang pencari kerja hanya 424 orang yang ditempatkan. Kemudian pada tahun 2017 terjadi penurunan menjadi sebesar 2,5 persen. Pada tahun 2018 terjadi kembali penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 1 persen tenaga kerja yang ditempatkan. Hal ini sebagai dampak krisis moneter yang melanda dunia sehingga banyak tenaga kerja yang di PHK. Namun seiring dengan perbaikan ekonomi, pada tahun 2019 kembali meningkat yaitu sebesar 3 persen tenaga kerja yang ditempatkan atau sebanyak 5.225 pencari kerja sebanyak 155 tenaga kerja yang ditempatkan. Diharapkan pada tahun 2020 akan terjadi peningkatan menjadi sebesar 4 persen.

3. Urusan Pangan

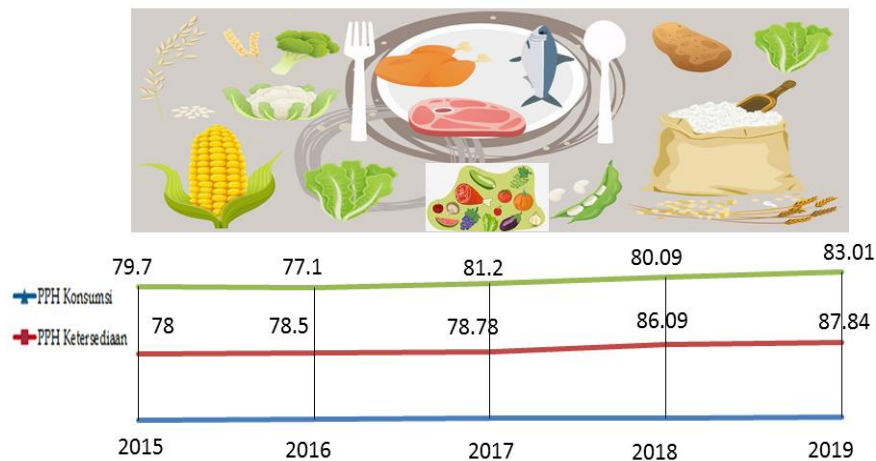
a. Capaian Skor PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencerminkan ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan. Skor PPH maksimal adalah 100.

Skor PPH Ketersediaan Bangka Belitung pada tahun 2015 sebesar 78, kemudian terus meningkat hingga tahun 2019 sebesar 87,84. Begitupun dengan skor PHH Konsumsi juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 sebesar 79,7 dan 2019 mencapai 83,01, sebagaimana grafik di bawah ini,

Grafik. II.29

SKOR PPH KETERSEDIAAN DAN PPH KONSUMSI



Sumber : Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

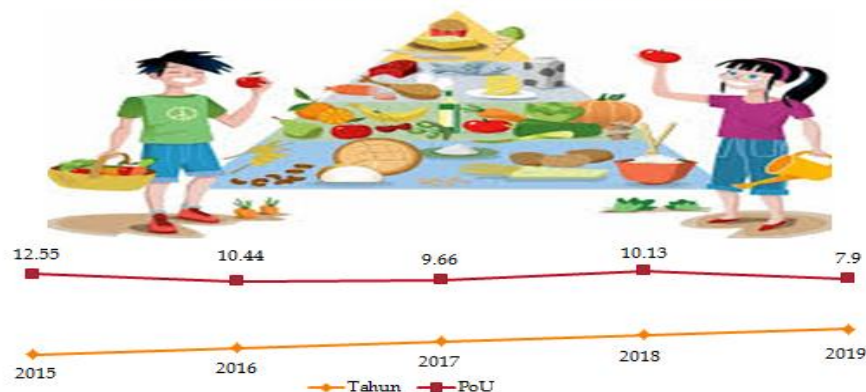
Berdasarkan grafik di atas skor PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami dan mempunyai kesadaran akan pentingnya kualitas konsumsi pangan untuk hidup sehat. Namun demikian perlu untuk lebih mengoptimalkan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui upaya meningkatkan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), maka perlu didorong melalui sosialisasi, promosi dan kegiatan yang dapat memberi wawasan dan pengetahuan untuk percepatan pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH).

b. Persentase Penduduk Rawan Pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu karena alasan ekonomi/kemiskinan (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien). Masih adanya penduduk rawan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat di lihat berdasarkan data *Prevalence of Undernourishment* (PoU) atau yang dikenal dengan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, yaitu jumlah penduduk yang konsumsi pangannya belum mencukupi standar kecukupan gizi.

Grafik. II.30

PREVALENCE of UNDERNOURISHMENT



Sumber : Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Prevalence of Undernourishment (PoU) Bangka Belitung sangat berfluktuatif, dimana pada tahun 2015 sebesar 12,55 persen, kemudian menurun sebesar 10,44 persen (2016) dan 9,66 persen (2017). Namun pada tahun 2018 mengalami sedikit kenaikan menjadi sebesar 10,13 persen dan kemudian menurun kembali di tahun 2019 menjadi sebesar 7,90 persen. Hal ini menunjukkan masih adanya prevalensi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan atau penduduk rawan pangan. Dengan PoU sebesar 7,90 persen maka dengan jumlah penduduk Bangka Belitung yang dihitung sebanyak 1.481.512 jiwa terdapat 117.039 jiwa penduduk yang rawan pangan.

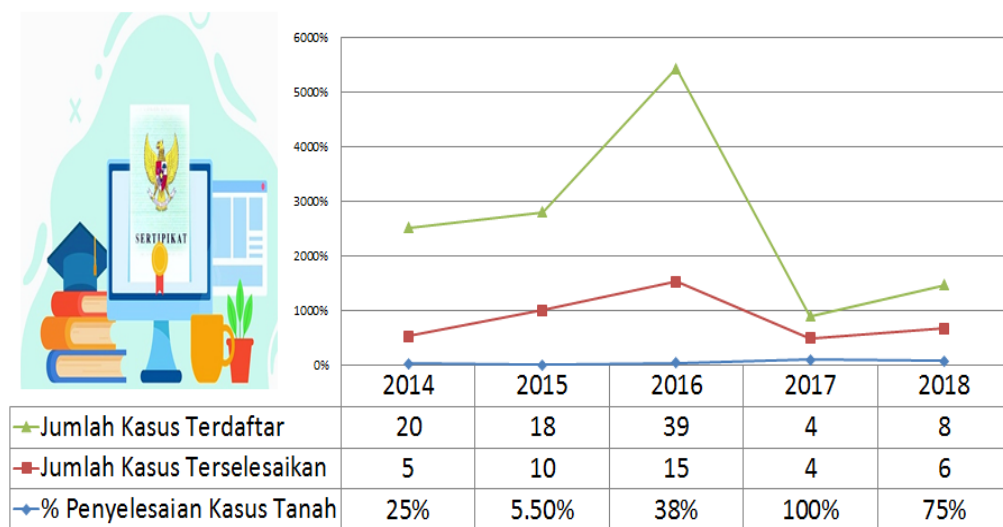
4. Urusan Pertanahan

a. Persentase Penyelesaian Kasus Tanah

Dengan ditetapkannya urusan pertanahan kedalam tata ruang menjadi satu kesatuan, maka ada peluang untuk dapat memperbaiki fragmentasi pelaksanaan penataan ruang yang terjadi selama ini khususnya dalam menyelesaikan kasus pertanahan. Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan disebutkan, sengketa tanah ialah: “Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.”

Grafik. II.31

PENYELESAIAN KASUS TANAH



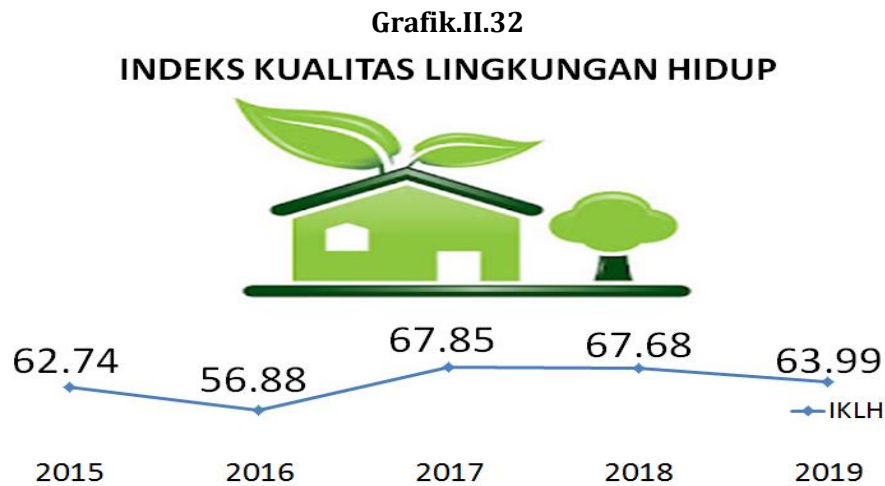
Sumber: BPN dan Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Kasus sengketa tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2014-2018 tercatat tahun 2016 mempunyai kasus terbanyak yaitu 39 kasus terdaftar dan hanya 15 kasus yang terselesaikan atau sebesar 38 persen kasus terselesaikan. Pada tahun 2017 tercatat jumlah kasus terdaftar sebanyak 4 kasus yaitu 2 kasus di Kabupaten Bangka dan 2 Kasus di Kota Pangkalpinang dan semua kasus terselesaikan atau sebesar 100 persen. Sedangkan tahun 2018 ada 8 kasus yang terdaftar yaitu 1 kasus di Kabupaten Bangka, 3 Kasus di Kabupaten Bangka Tengah, 1 Kasus di Kabupaten Bangka Selatan, dan 3 Kasus di Kota Pangkalpinang. Penyelesaian kasus pada tahun 2018 hanya sebesar 75 persen. Kasus ini di dominasi oleh kasus sengketa tanah desa dan kasus tumpang tindih kepemilikan lahan serta pemalsuan sertifikat.

5. Urusan Lingkungan Hidup

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan komponen penyusun berupa Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).



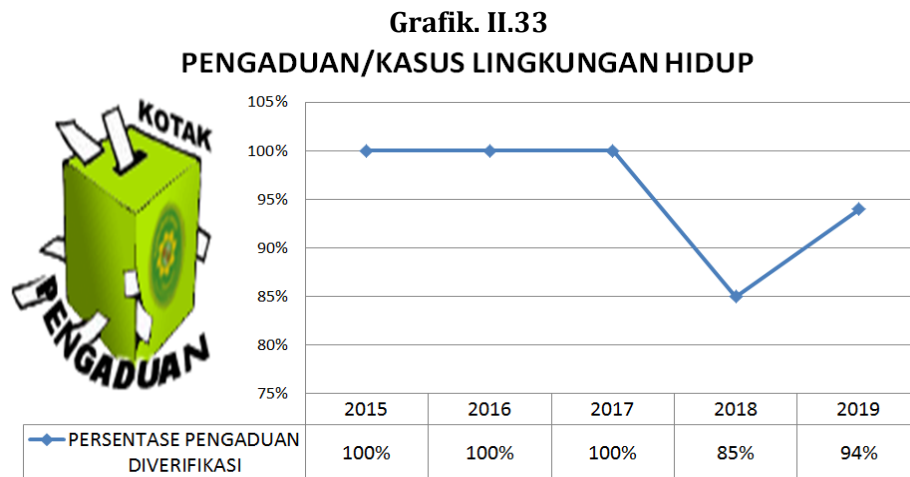
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan data di atas, IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif, pada tahun 2015 nilai IKLH sebesar 62,74 kemudian mengalami kenaikan di tahun 2018 sebesar 67,85 dan menurun di tahun 2019 sebesar 63,99. Capaian ini masih dibawah capaian nasional yaitu sebesar 66,5. IKA dan IKU Provinsi menurun dibandingkan tahun 2018. Peningkatan terdapat pada Nilai IKTL yaitu dari 40,78 menjadi 41,20, hal ini disebabkan adanya perubahan metode perhitungan dengan menyempurnakan metode perhitungan IKTL yang mengelaborasi beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial.

Masih dibutuhkan upaya yang optimal dari seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan IKLH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk indeks kualitas air dihitung untuk 11 sungai dan menggunakan avg NSF memasukkan unsur pencemar untuk 10 parameter+debit, sedangkan udara hanya dihitung 3 titik lokasi: industri, perumahan dan transportasi.

b. Persentase Aduan Masyarakat Yang Diverifikasi

Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengaduan kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan. Pengaduan dapat disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaduan secara langsung dilakukan dengan mendatangi dan menyampaikan pengaduan kepada petugas di sekretariat pengaduan. Pengaduan secara tidak langsung dapat disampaikan melalui media pengaduan berupa telepon, surat, surat elektronik, faksimile, pesan singkat, website, media sosial, aplikasi pengaduan dan media lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

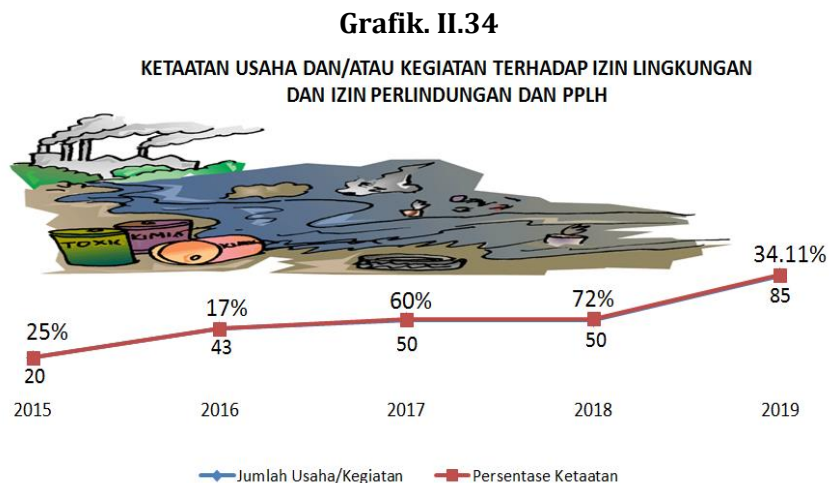


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Pengaduan Masyarakat ini bersumber baik dari hasil pengawasan, pengaduan langsung ke Dinas Lingkungan Hidup ataupun yang berasal dari Media massa baik yang izin lingkungannya dikeluarkan oleh Provinsi maupun oleh kabupaten/kota. Pada tahun 2015-2018 semua pengaduan/kasus yang masuk 100% diverifikasi. Sedangkan pada tahun 2018 pengaduan yang masuk sebanyak 20 kasus (85%), dan yang diverifikasi sebanyak 17 kasus. Pada tahun 2019, pengaduan yang masuk sebanyak 18 kasus dan yang diverifikasi sebanyak 17 kasus atau sebesar 94 persen karena terdapat satu pengaduan yang sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

- c. Persentase Peningkatan Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Salah satu instrumen penegak hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu pengawasan terhadap ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, ketaatan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah, limbah bahan berbahaya dan beracun (penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, penimbunan, pengangkutan) serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dokumen lingkungan, air, udara, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3).



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Ketaatan usaha/kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada tahun 2015-2018 meningkat dari 25 persen menjadi sebesar 72 persen atau dari 20 menjadi 50 usaha/kegiatan. Namun pada tahun 2019 ketaatan usaha/kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurun dari 72 persen di tahun 2018 menjadi 34,11 persen di tahun 2019. Meskipun jumlah usaha meningkat dari 50 menjadi 85 usaha/kegiatan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 dari 50 usaha/kegiatan sebanyak 36 usaha/kegiatan yang masuk dalam kategori “taat” sedangkan pada tahun 2019 dari 85 usaha/kegiatan hanya 29 usaha/kegiatan yang taat.

d. Jumlah Rekomendasi Izin Lingkungan Yang Diterbitkan

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

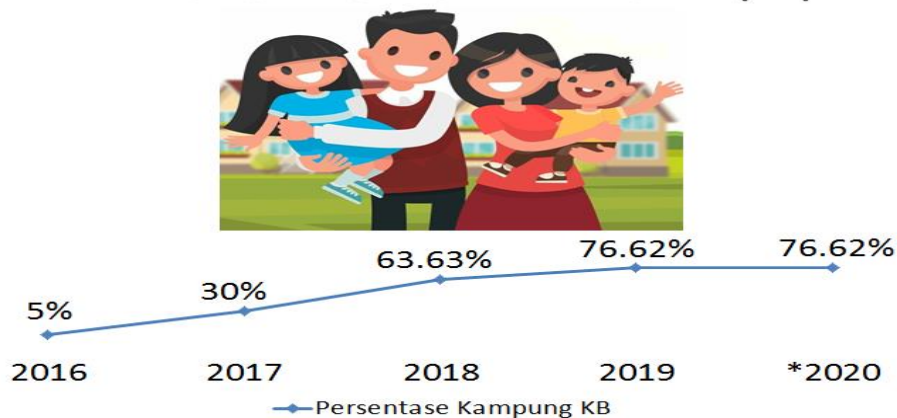
Berdasarkan data di atas izin lingkungan yang dikeluarkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 meningkat dari 92 usaha/ kegiatan (2015) menjadi sebanyak 146 usaha/kegiatan. Dimana pada tahun 2019 sebanyak 85 usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan serta 50 usaha/kegiatan yang menjadi peserta Proper. Proper merupakan program pengawasan terhadap industri yang bertujuan mendorong ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan hidup.

6. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Persentase Kampung KB

Kampung KB sebagai wahana pemberdayaan masyarakat adalah sebuah program untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Kampung KB ini diharapkan menjadi miniatur atau gambaran (potret) dari sebuah desa yang didalamnya terdapat keterpaduan dari program pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yang disinergikan dengan program pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

Grafik II.36
KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KB)



Sumber: DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

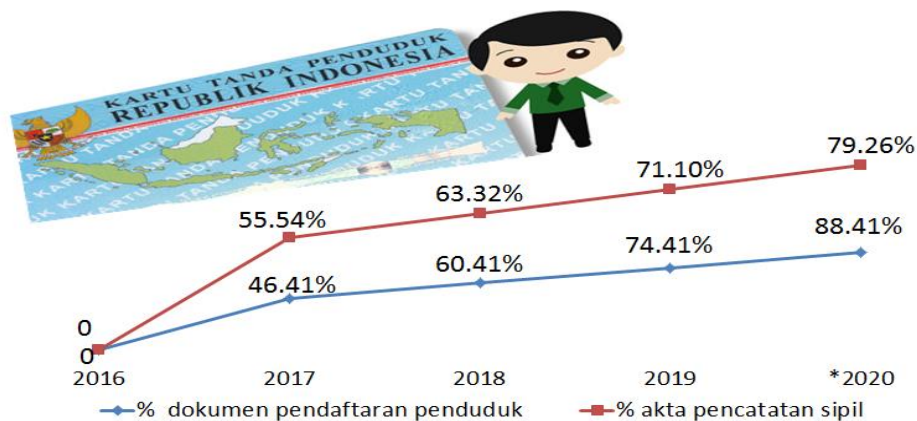
Capaian kampung KB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016-2019 mengalami peningkatan cukup tinggi. Pada tahun awal pembentukan Kampung KB hanya tercapai 5 persen atau hanya ada 7 Kampung KB yang terbentuk. Namun pada tahun 2017 mulai terjadi peningkatan pembentukan Kampung KB hingga mencapai 30 persen atau sebanyak 47 Kampung KB yang terbentuk. Pada tahun 2018 capaian mencapai 63,63 persen atau 98 sebanyak Kampung KB dan selanjutnya tahun 2019 mencapai 76,62 persen atau sebanyak 118 Kampung KB. Artinya semakin tinggi kesadaran masyarakat Bangka Belitung tentang pembangunan berwawasan kependudukan dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

7. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk dan akta pencatatan sipil

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Pendaftaran penduduk dapat melalui Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak, sedangkan pencatatan sipil melalui Akta Lahir, Akta Mati, dan Akta Perkawinan.

Grafik. II.37
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



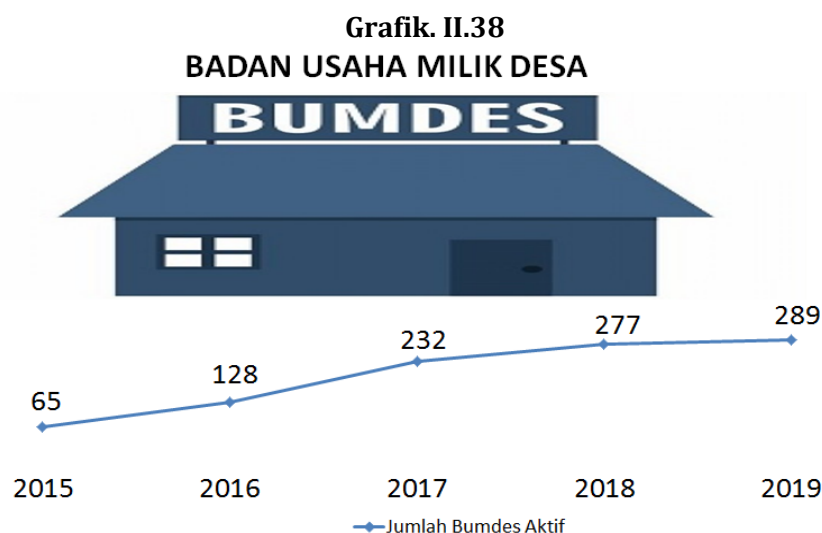
Sumber: DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk dan akta pencatatan sipil dari tahun 2016-2020 meningkat setiap tahunnya. Masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk tercatat pada tahun 2018 sebesar 60,41 persen menjadi 74,41 persen (2019). Hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah KK yang diterbitkan sebanyak 373.274 (2018) menjadi 396.352 (2019) atau terjadi peningkatan dari 85,54% menjadi 89% dari jumlah KK. Begitupun dengan KTP-Elektronik yang diterbitkan dari 922.235 (2018) menjadi 962.937 (2019) atau meningkat dari 95,69% menjadi 98,34% dari jumlah KTP. Untuk jumlah KIA yang diterbitkan tahun 2019 sebanyak 151.553 dan jumlah anak usia 0-17 tahun berjumlah 422.141. Begitupun dengan masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil pada tahun 2018 sebesar 63,32 persen meningkat menjadi 71,10 persen (2020), artinya kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan semakin baik.

8. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Terdapat beberapa data sektoral yang menjadi kewenangan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantaranya terkait dengan jumlah BUMDes yang aktif.



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dari tabel diatas menunjukkan LPM di Provinsi Kepulauan Bangka belitung cenderung meningkat, di mana jumlah BUMDes aktif tahun 2015 berjumlah 65 meningkat menjadi 289 di tahun 2019. Terdapat perbedaan status BUMDes tahun 2017 dengan tahun 2018 dikarenakan adanya pembaharuan status yang berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 tentang petunjuk teknis operasional dan tata cara pemberian bantuan keuangan khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui program peningkatan dan pendampingan kelembagaan BUMDes di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keterkaitan antara status BUMDes di tahun 2017 dengan tahun 2018 untuk lebih mengetahui BUMDes mana yang benar-benar aktif dan perlu didorong lebih aktif untuk dapat membantu BUMDes tersebut dalam segi keuangan, harapan yang akan didapatkan dengan keaktifan BUMDes adanya bantuan keuangan baik dari pusat, provinsi, kabupaten maupun dana CSR.

9. Urusan Perhubungan

a. Persentase ketersediaan Infrastruktur Perhubungan

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Provinsi pada Urusan Perhubungan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/Perhubungan Darat (pengelolaan terminal penumpang tipe B, penyediaan perlengkapan jalan dan manajemen rekayasa lalu lintas di jaringan jalan provinsi, penyediaan angkutan umum (orang dan/atau barang) antar kota dalam satu provinsi); Pelayaran/Perhubungan Laut (Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Regional). Sedangkan untuk Perhubungan Udara/Penerbangan dan Perkeretaapian, kewenangan Pemerintah Provinsi relatif sangat terbatas. Pengembangan pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara serta modernisasi moda transportasi untuk membuka akses antar pulau, antar provinsi dan negara termasuk mendukung peningkatan aksesibilitas ke destinasi pariwisata daerah serta peningkatan status Bandara Depati Amir di Pangkalan Baru, Bangka Tengah dan HAS. Hanandjoeddi di Tanjung Pandan, Belitung menjadi Bandara Internasional. Gambaran tentang ketersediaan infrastruktur perhubungan di Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana di bawah ini:



Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung, 2020

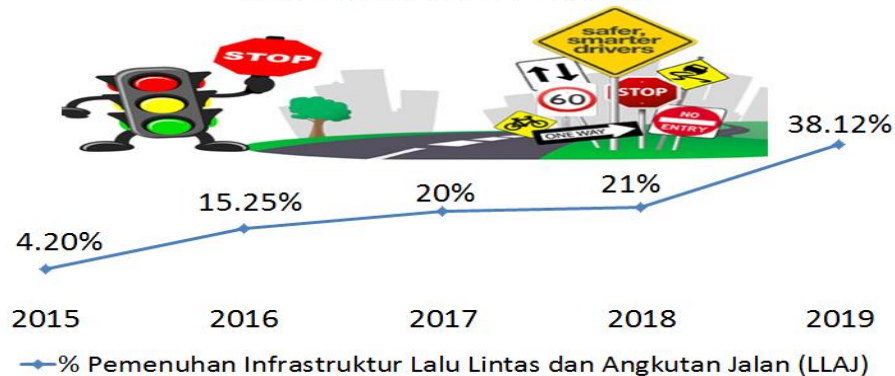
Infrastruktur perhubungan dapat dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu perhubungan darat, perhubungan laut, dan kebandarudaraan. Dari ketiga komponen tersebut, capaian Infrastruktur perhubungan terealisasi pada tahun 2015 hanya sebesar 27 persen dan tahun 2016 sebesar 30,25% dan pada tahun 2019 sebesar 34,53 %, atau hanya meningkat sebesar 4,28%.

b. Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Perlengkapan jalan berperan penting untuk mendukung ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Perlengkapan jalan raya inilah yang berfungsi untuk meningkatkan keselamatan jalan dan menyediakan pergerakan yang teratur terhadap pengguna jalan. Fasilitas perlengkapan jalan memberi informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan dan petunjuk yang diperlukan untuk mencapai arus lalu lintas yang selamat, seragam dan beroperasi dengan efisien. Jumlah fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terpasang berupa rambu-rambu lalu lintas sebanyak 2.327 Unit, yaitu Marka Jalan 103.911 M, Pagar Pengaman Jalan 3.858 M, *Warning Light* 21 Unit, *Traffic Light* 6 Lokasi, *Delineator* 3.805 Buah, 7 Paku Jalan 3.503 Buah, Pita Penggadu 426 Buah, Penerangan Jalan Umum 208 M.

Grafik. II.40

**PEMENUHAN INFRASTRUKTUR LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**



Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung, 2020

Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Bangka Belitung sejak tahun 2015-2019 meningkat. Pada tahun 2015 infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan baru terpenuhi sebesar 4,20 persen dan meningkat pada tahun 2019 sebesar 38,12 persen. Pada tahun 2019 pemenuhan infrastruktur lalu lintas terealisasi sebesar 15,25% persen dengan rincian *guard rail* sepanjang 920 m, paku jalan 100 buah, APILL 4 unit, *Warning Light* 10 unit, marka jalan 2640 m, rambu-rambu lalu lintas 200 unit, dan lampu penerangan jalan umum 310 unit.

10. Urusan Penanaman Modal

a. Nilai Investasi

Salah satu variabel penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Investasi dapat dipengaruhi oleh investasi asing dan domestik. Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain : Pertama faktor sumber daya alam, Kedua faktor sumber daya manusia, Ketiga faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha, Keempat faktor kebijakan pemerintah, Kelima faktor kemudahan dalam peizinan. Perkembangan Minat Investasi yang dipresentasikan dengan nilai izin prinsip dan nilai realisasi investasi ditunjukkan oleh tabel berikut :

Grafik. II.41
Nilai Investasi



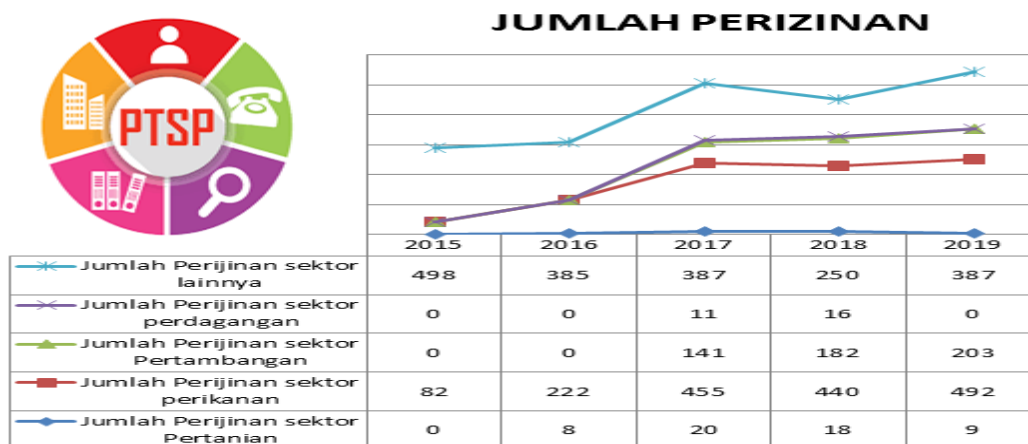
Sumber: DMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Capaian investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2015-2019 meningkat seiring dengan peningkatan jumlah investor. Nilai investasi dari sebesar 2.057 Triliun (2015) menjadi sebesar 4.246 Triliun (2019). Nilai investasi sebesar 4,2 Triliun dengan rincian 2,9 Triliun PMDN dan 1,3 Triliun PMA. Nilai investasi ini meliputi 427 proyek untuk PMDN dan 206 proyek untuk PMA, dengan sektor investasi meliputi telekomunikasi, transportasi, gudang, perkebunan, dan pertambangan. Dominan investasi di bidang perkebunan sedangkan pertambangan hanya 13 persen. Begitupun dengan jumlah investor di tahun 2018 sebanyak 266 yang mengalami peningkatan sebanyak 335 di tahun 2019. Untuk penanaman modal asing, investor terbanyak dari Malaysia 63 persen dan Tiongkok 23 persen.

b. Jumlah Data Perizinan Yang Update

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Pemerintah meluncurkan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission/OSS*) untuk mempermudah pengurusan perizinan investasi. Ini merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian.

Grafik II.42



Sumber: DMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Data perizinan dari tahun 2015-2019 cukup berfluktuatif. Perizinan didominasi oleh sektor perikanan, pertambangan, dan sektor lainnya. Capaian perizinan sektor perikanan meningkat dari tahun 2016-2019, dimana pada tahun 2016 sebanyak perizinan yang diterbitkan hingga tahun 2019 mencapai 492 perizinan yang diterbitkan. Perizinan sektor pertambangan mencapai 203 di tahun 2019. Sedangkan perizinan sektor lainnya didominasi oleh perizinan kesehatan, UMKM, dan lain sebagainya. Jumlah perizinan sektor lainnya mencapai 387 di tahun 2019. Sejak tahun 2018, Semua perizinan telah terlayani menggunakan sistem perizinan tunggal oleh sistem *Online Single Submission* (OSS). Dalam sistem OSS ini syarat pokok ada tiga yaitu izin lokasi, izin IMB, dan izin lingkungan yang wajib bagi pelaku usaha. Dengan OSS perizinan lebih mudah dan tanpa dipungut biaya.

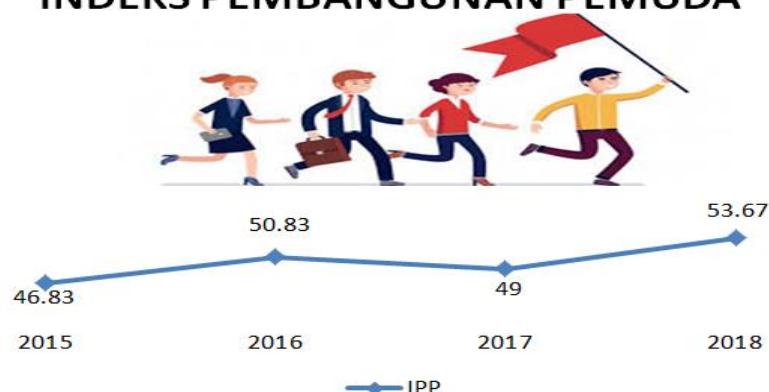
11. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Rumusan Indikator Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan formula pencapaian pembangunan kepemudaan berdasarkan rata-rata sederhana dari indeks setiap dimensi yang telah ditentukan dengan bobot tertentu pula untuk setiap indeksnya. Dimensi

tersebut meliputi domain pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan, Ketenagakerjaan dan Kesempatan, Partisipasi dan Kepemimpinan, dan Gender dan Diskriminasi.

Grafik II.43
INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA



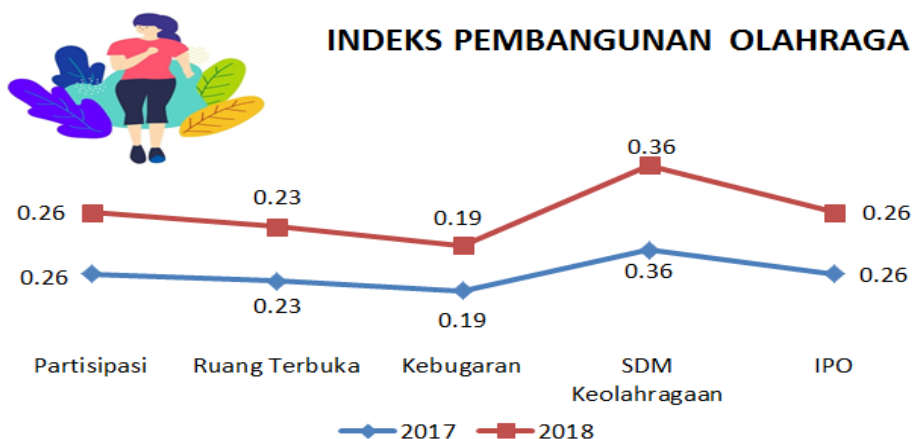
Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Hasil Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat kemajuan dalam beberapa tahun dengan kenaikan 6,84 poin dari indeks 46,83 di tahun 2015 menjadi 53,67 di tahun 2018. Ini merupakan hal yang positif dimana harapan pemerintah daerah untuk mewujudkan pengembangan potensi intelektual dan keterampilan pemuda dalam mengembangkan keberdayaan dan pembangunan masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan budaya dapat berjalan dengan baik. Untuk itu peningkatan kualitas pemuda harus tetap dilakukan dengan memberikan pengembangan potensi diri untuk memperkaya *hard skill* dan *soft skill* guna menyiapkan mereka menjadi generasi hebat penerus bangsa.

b. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)

Olahraga memiliki peran yang semakin penting dan strategis dalam kehidupan era global yang penuh perubahan, persaingan, dan kompleksitas. Indeks Pembangunan Olahraga diukur meliputi dimensi Partisipasi, Ruang Terbuka, Kebugaran dan SDM Keolahragaan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Grafik II.44
INDEKS PEMBANGUNAN OLAHRAGA



Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Hasil Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 menunjukkan bahwa (1) Indeks partisipasi 0,26, (2) Indeks ruang terbuka 0,23, (3) Indeks kebugaran 0,19 (4) Indeks SDM Keolahragaan 0,36 dan Indeks Pembangunan Olahraga

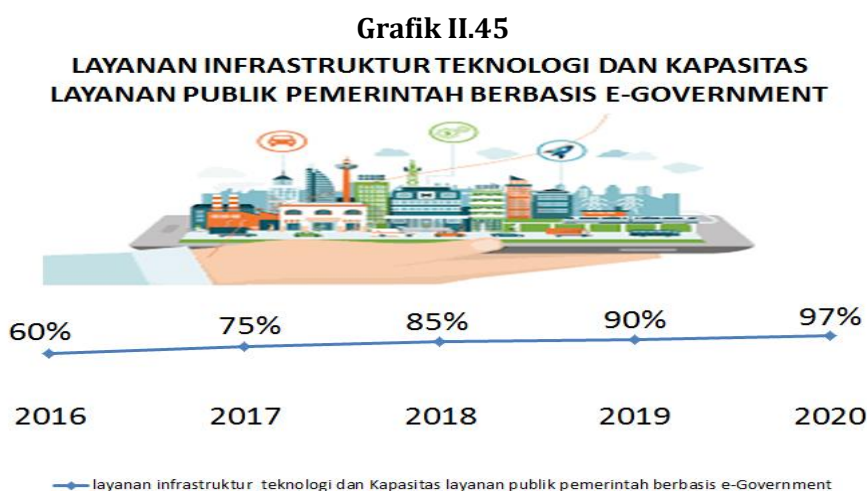
(IPO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 0,26. Kesimpulannya adalah Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada pada kategori kurang karena Indeks total IPO yang meliputi Partisipasi, Ruang Terbuka, Kebugaran dan SDM Keolahragaan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,26 berada direntang 0,24-0,49. Artinya bahwa pembangunan olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih perlu diperhatikan dan dibenahi oleh pemerintah dan semua lapisan masyarakat agar pembangunan olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bisa lebih baik.

12. Urusan Komunikasi dan Informasi

- a. Persentase Jumlah layanan infrastruktur teknologi dan Kapasitas layanan publik pemerintah berbasis *e-Government*.

Layanan Infrastruktur teknologi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Layanan akses internet yang diperuntukan pada instansi Pemerintah dan Instansi Pelayanan kepada Publik serta Infrastruktur Jaringan Komunikasi Data yang sudah terintegrasi pada Data Center Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyediaan Jaringan internet untuk kebutuhan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam *supporting* Akses Layanan Aplikasi di antaranya Aplikasi SiRUP, e-Monev, TEPR, Website seluruh perangkat daerah, email resmi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan layanan Interaksi tatap muka berbasis video interaktif, serta Layanan *Hotspot* kepada Publik yang diprioritaskan pada tempat-tempat wisata yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



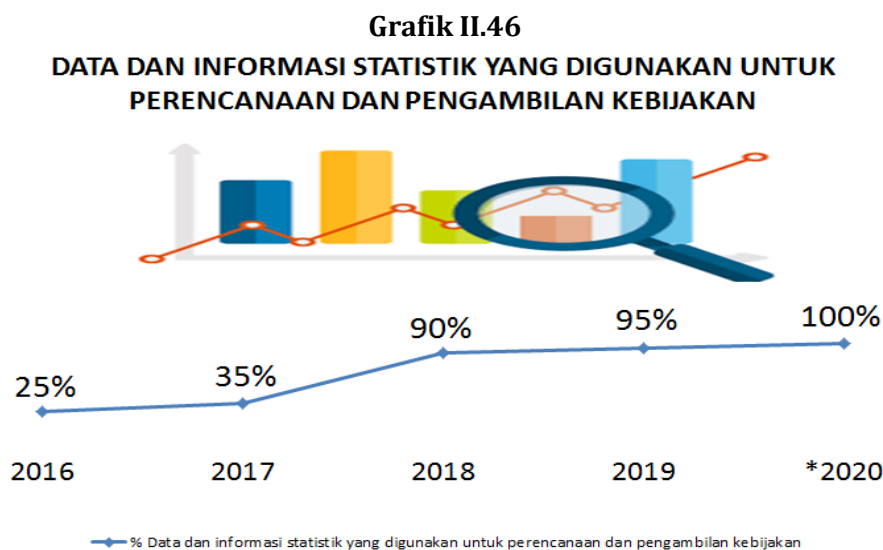
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Layanan Infrastruktur teknologi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 hanya sebesar 60%. Layanan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 sudah mencapai 75% dan tahun 2018 sebesar 85%. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 90%, dan pada tahun 2020 sebesar 97%. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyediakan Layanan infrastruktur jaringan data (Data Center) yang fasilitas Ruang Server dengan kapasitas 6 unit rack dengan 60 kVA, Untuk penempatan Server aplikasi Perangkat Daerah Provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Selain Data Center Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menyediakan Layanan IDC yang terletak pada Duren Tiga Jakarta yang berfungsi sebagai *Back Up* Data pada Data Center Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

13. Urusan Statistik

- a. Persentase Data dan informasi statistik yang digunakan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan

Pada urusan statistik, terutama statistik sektoral yang dikelola oleh pemerintah daerah, ketersediaan data serta *up-dating* data dan informasi yang akurat menjadi hal yang penting untuk diperkuat, terutama kaitannya sebagai dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, selain itu data tersebut dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional. Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing.



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Pemanfaatan data dan informasi statistik yang digunakan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan pada tahun 2016 hanya 25 persen. Namun pada tahun 2019 pemanfaatan data sudah mencapai 95 persen. Data sektoral sudah menjadi pusat data dengan menyajikan data dasar dan informasi terbaru diberbagai bidang dan sektor pembangunan Provinsi Bangka Belitung sehingga proses perencanaan dan pengendalian pembangunan menjadi semakin baik. Data dan informasi ini meliputi data di sektor ekonomi, sumber daya manusia, sarana prasarana masyarakat dan peran serta masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan secara terus menerus mengingat data dasar pembangunan merupakan data bergerak yang dapat berubah sewaktu waktu. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya seperti perpindahan penduduk, investasi yang terjadi, kebijakan pemerintah dan sebagainya.

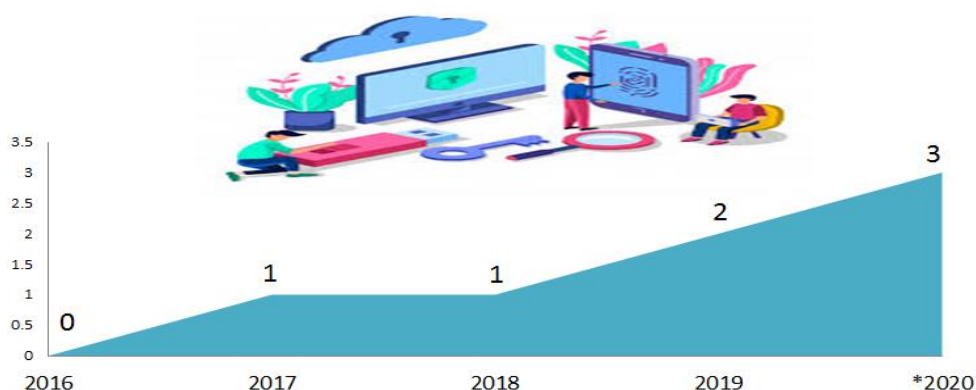
14. Urusan Persandian

- a. Indeks Kematangan Keamanan Informasi

Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI) merupakan agregate nilai pelaksanaan kontrol pengamanan informasi terhadap fungsi tata kelola keamanan informasi, pengelolaan risiko keamanan informasi, kerangka kerja keamanan informasi, pengelolaan aset informasi, teknologi dan keamanan informasi. Secara umum Indeks Kematangan Keamanan Informasi memiliki 5 (lima) level I-V. Level V merupakan level kematangan paling tinggi sebagai level paling ideal.

Grafik II.47

■ INDEKS KEMATANGAN KEAMANAN INFORMASI (IKKI)



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan data diatas Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015-2017 belum terhitung atau masih nol. Sedangkan pada tahun 2018 Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI) yaitu 1 atau berada pada level I (sangat kurang/*nonexistent*/kondisi awal) serta tahun 2018 dan 2019 meningkat yaitu 2 atau berada pada level II, dimana level ini masih berada pada kondisi awal penerapan keamanan informasi dan kondisi penerapan kerangka kerja dasar penerapan keamanan informasi.

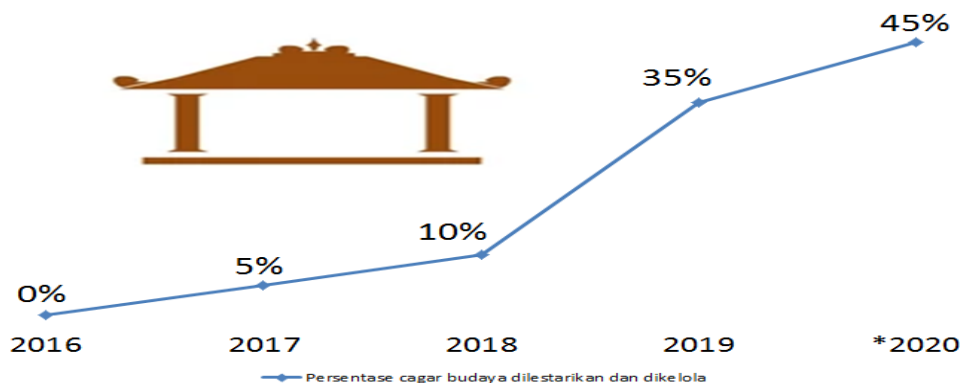
15. Urusan Kebudayaan

a. Persentase Cagar Budaya Dilestarikan dan Dikelola

Aspek kebudayaan antara lain meliputi pelayanan berkaitan dengan kesenian dan kepurbakalaan, melindungi keberadaan bangunan cagar budaya, pelestarian seni budaya tradisional, dan memberdayakan kebudayaan tradisional melalui regulasi kegiatan secara berkala. Provinsi Bangka Belitung kaya dengan potensi cagar budaya yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Terdata pada tahun 2019 sebanyak 309 potensi objek cagar budaya, diantaranya telah ditetapkan sebagai cagar budaya sebanyak 33 objek dengan rincian dua objek merupakan cagar budaya peringkat Nasional, dan 31 objek merupakan cagar budaya peringkat Kabupaten.

Grafik II.48

PERSENTASE CAGAR BUDAYA DILESTARIKAN DAN DIKELOLA



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan data diatas cagar budaya Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2017 hanya sebesar 5 persen yang dikelola dan dilestarikan. Namun pada tahun 2018 meningkat sebesar 10

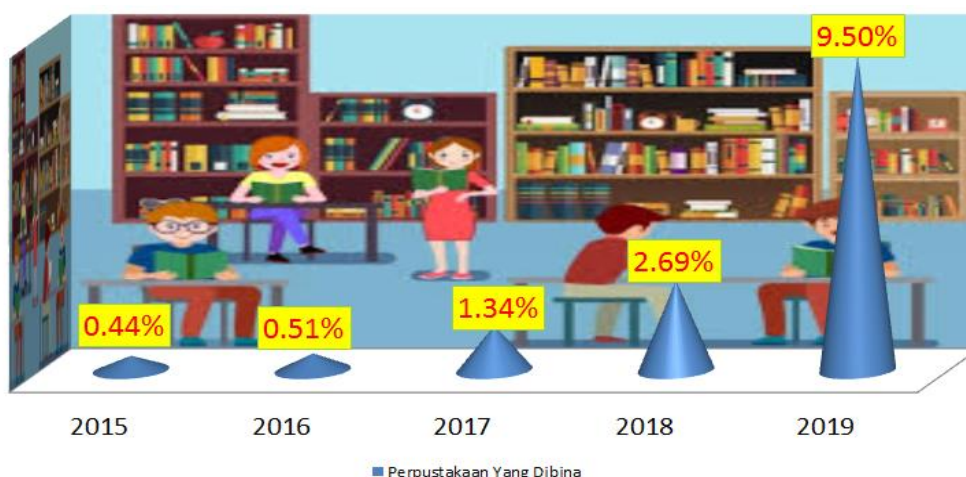
persen dan di tahun 2019 sebesar 35 persen. Keseriusan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengelola cagar budaya dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Cagar Budaya sehingga diharapkan pada tahun 2020 terdapat peningkatan dalam pengelolaan cagar budaya menjadi sebesar 45 persen.

16. Urusan Perpustakaan

a. Persentase Perpustakaan Yang Dibina

Perpustakaan merupakan sarana dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa. Pentingnya keberadaan lembaga perpustakaan sebagai media belajar bagi masyarakat sehingga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena memiliki wawasan yang luas dan pemikiran yang maju untuk mendukung pembangunan daerah.

Grafik II.49
PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG DIBINA



Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan pada tabel di atas menjelaskan bahwa dari tahun 2015-2019 persentase perpustakaan yang dibina meningkat dari 0.44 persen (2015) menjadi 9,50 persen (2019) dari 1.560 perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuan dilakukan pembinaan perpustakaan adalah memperkuat peran perpustakaan provinsi dalam peningkatan kemampuan literasi dan pengembangan perpustakaan ditingkat kabupaten/kota dan desa. Dengan adanya pembinaan perpustakaan maka kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) perpustakaan, pengelolaan perpustakaan serta sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai, dapat meningkat dengan baik. Maka dari itu pembinaan perpustakaan sangat penting dan perlu didukung oleh semua pihak.

b. Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan

Salah satu bentuk pelayanan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustakanya tercermin dalam koleksi bahan pustaka lengkap yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan kebutuhan pemustaka. Jika kebutuhan informasi tinggi, maka tingkat ketersediaan koleksi pun harus tinggi dan selaras dengan kebutuhan informasi tersebut. Kelengkapan koleksi itulah yang menjadi daya tarik pemustaka untuk kemudian kembali berkunjung dan memanfaatkan informasi yang tersedia secara terus menerus.

Grafik II.50
KOLEKSI BUKU DI PERPUSTAKAAN



Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2016 berjumlah 21.137, di tahun 2017 koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah meningkat menjadi 23.055 dan pada tahun 2018 terjadi penyusutan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sehingga berjumlah 22.379. Pada tahun 2019 koleksi buku kembali meningkat berjumlah 24.429 dan 2020 juga meningkat dengan jumlah 26.600.

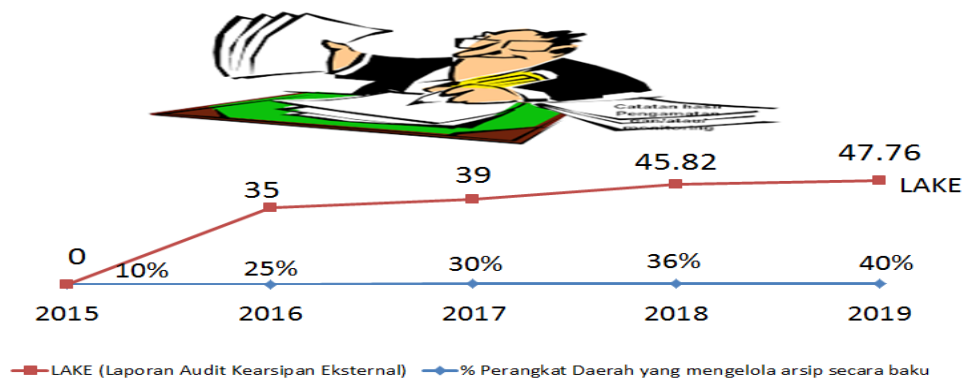
17. Urusan Kearsipan

- a. Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Dengan Standard Baku Kearsipan

Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) adalah laporan yang disusun berdasarkan laporan hasil audit penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan daerah. Untuk meningkatkan nilai LAKE banyak aspek/sub aspek yang menjadi penilaian di antaranya:

1. Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan (tata naskah dinas; klasifikasi arsip; sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; jadwal retensi arsip; pedoman pengolahan arsip inaktif; pedoman penyusutan arsip);
2. Pedoman pengelolaan arsip vital (Program Kearsipan, Pengolahan Arsip Inaktif dengan Retensi sekurang-kurangnya 10 tahun, Penyusutan Arsip, Pengelolaan Arsip Statis, SDM Kearsipan, Kelembagaan, Prasarana dan Sarana Kearsipan).

Grafik II.51
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN SESUAI STANDAR BAKU



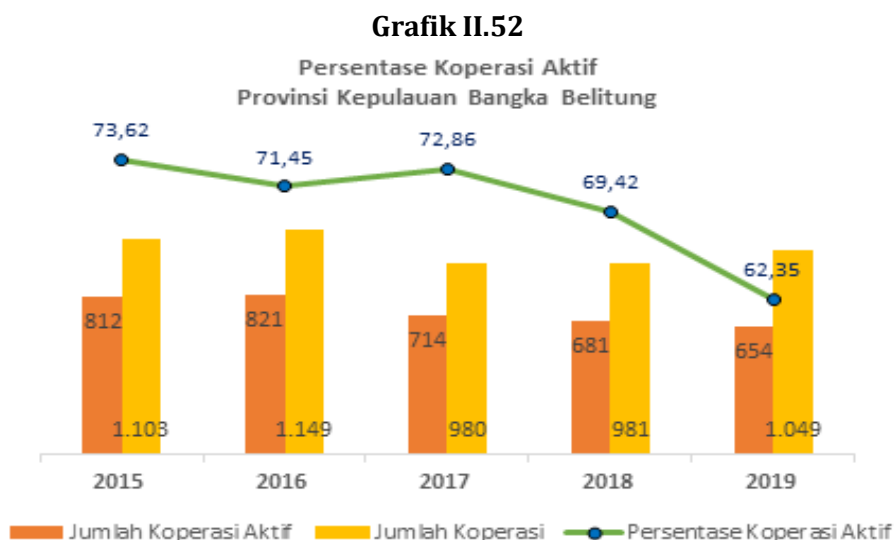
Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel di atas dapat menjelaskan nilai LAKE (Laporan Audit Kearsipan Eksternal) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 belum ada penilaian LAKE. Namun mulai tahun 2016 LAKE (Laporan Kearsipan Eksternal) sudah dinilai dengan angka 35. Pada tahun 2017 nilai LAKE meningkat sebesar 38 dan terus meningkat menjadi sebesar 45,82 (2018). Sampai dengan tahun 2019 nilai LAKE Bangka Belitung sebesar 47,76 (berpredikat “buruk”).

18. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi, usaha kecil dan menengah memiliki peranan penting terhadap pencapaian target sasaran kinerja pembangunan, terutama dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat. Beberapa hal yang masih menjadi permasalahan mendasar pada urusan ini antara lain masih lemahnya pengawasan terhadap koperasi, kapasitas SDM Koperasi yang masih belum mantap, rendahnya akses anggota koperasi dan UMKM terhadap akses permodalan yang ada, belum optimalnya sarana pemasaran yang salah satunya melalui pasar tradisional, pemberdayaan kepada koperasi dan UMKM yang juga masih belum optimal, serta pengembangan skala usaha yang masih cenderung mengalami stagnan.



Persentase koperasi yang aktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan semenjak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, akan tetapi kembali meningkat di tahun 2019 dengan total jumlah koperasi sebanyak 1.049 koperasi. Akan tetapi tren jumlah koperasi yang aktif selama periode 5 tahun mengalami penurunan. Terhitung dari tahun 2015 tercatat 812 koperasi yang aktif, yakni sekitar 73,62% dari jumlah koperasi yang ada. Sampai dengan tahun 2018 kembali menurun menjadi 681 koperasi yang aktif, yakni sekitar 69,42% dari jumlah koperasi yang ada. Dan terakhir di tahun 2019 terjadi penurunan jumlah koperasi aktif menjadi 654 koperasi, dengan persentase 62,35% dari jumlah koperasi yang ada.

b. Jumlah UMKM Yang Diberdayakan

Di samping perannya bagi perekonomian daerah, UMKM juga terbukti merupakan pelaku usaha yang cukup mandiri, kukuh, fleksibel yang sudah cukup teruji terutama di saat krisis berlangsung, selain juga menjadi jantung ekonomi rakyat dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jumlah UMKM meningkat setiap tahunnya, sebagaimana dibawah ini:

Grafik II. 53
JUMLAH UMKM YANG DIBERDAYAKAN



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

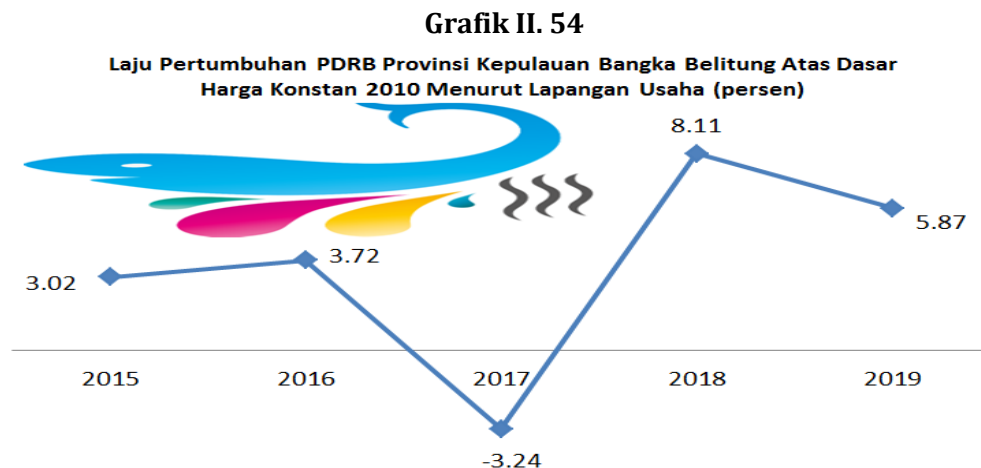
Dari tabel di atas, jumlah UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode 2017 sampai dengan 2019 yang relatif mengalami peningkatan, yakni masing-masing sebesar 150.870 UMKM (2017), 150.948 UMKM (2018) dan 161.186 UMKM (2019). Sedangkan pada periode 2016-2017, jumlah UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat menurun yang dikarenakan proses perbaikan dan pembaharuan kualitas data UKM yang dicatat. Pada tahun 2018 jumlah UMKM yang diberdayakan sebanyak 3.500 UMKM atau sebesar 7% dari jumlah koperasi, sedangkan tahun 2019 sebanyak 4.300 UMKM yang diberdayakan.

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan

Sektor perikanan merupakan suatu kegiatan yang memanfaatkan hasil sumberdaya perikanan baik untuk perikanan laut maupun perikanan darat, sehingga dapat memberikan nilai tambah yang tinggi. Walaupun kontribusi sektor perikanan masih kecil kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Bangka Belitung, tetapi diharapkan terus meningkat bahkan peningkatan termasuk tertinggi diantara sektor yang lain, maka dibutuhkan suatu upaya untuk meningkatkan peran yang lebih besar terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan sebagaimana dibawah ini:



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan tabel diatas laju pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan cukup fluktuatif. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan 3,20 persen, 2016 sebesar 3,72 persen dan pada tahun 2016 laju pertumbuhannya minus 3,24 persen. Namun pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 8,11 persen, meskipun di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 5,87 persen. Penurunan tersebut bukan karena tidak berkembangnya sub sektor perikanan, namun tingkat perkembangannya kalah cepat dengan perkembangan sektor-sektor ekonomi lain.

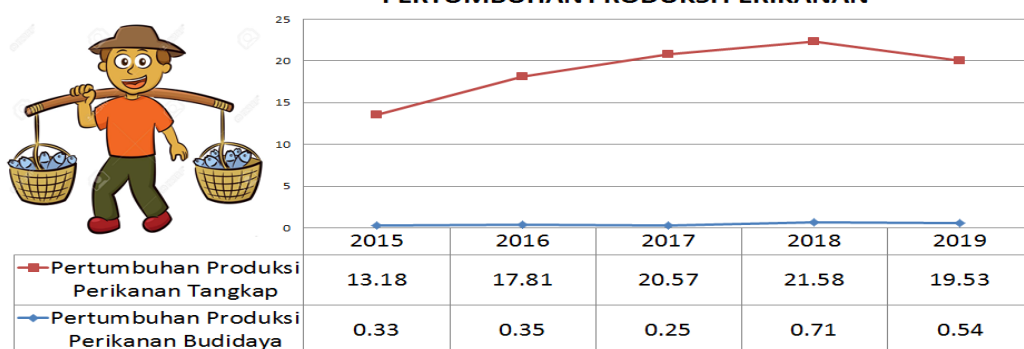
b. Pertumbuhan Produksi Perikanan

Perkembangan produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2019 produksi perikanan budidaya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebesar 7.150,663 ton, mengalami penurunan dari produksi tahun 2018 yang lalu sebesar 9.340,93 ton. Demikian pula dengan produksi perikanan tangkap yang mengalami penurunan tahun 2018 sebesar 228.980,33 ton turun menjadi sebesar 223.680,33 ton.

Sedangkan produksi perikanan budidaya dalam kurun waktu lima tahun terakhir secara kuantitas mengalami peningkatan setiap tahunnya. Produksi yang meningkat secara signifikan berasal dari komoditas udang vaname untuk budidaya air payau, komoditas lele untuk budidaya air tawar dan kerang darah (kekerangan) untuk kegiatan budidaya laut. Peningkatan jumlah Perusahaan pada beberapa kabupaten dan perluasan lahan budidaya vaname berpengaruh terhadap angka produksi yang dihasilkan.

Grafik II. 55

PERTUMBUHAN PRODUKSI PERIKANAN



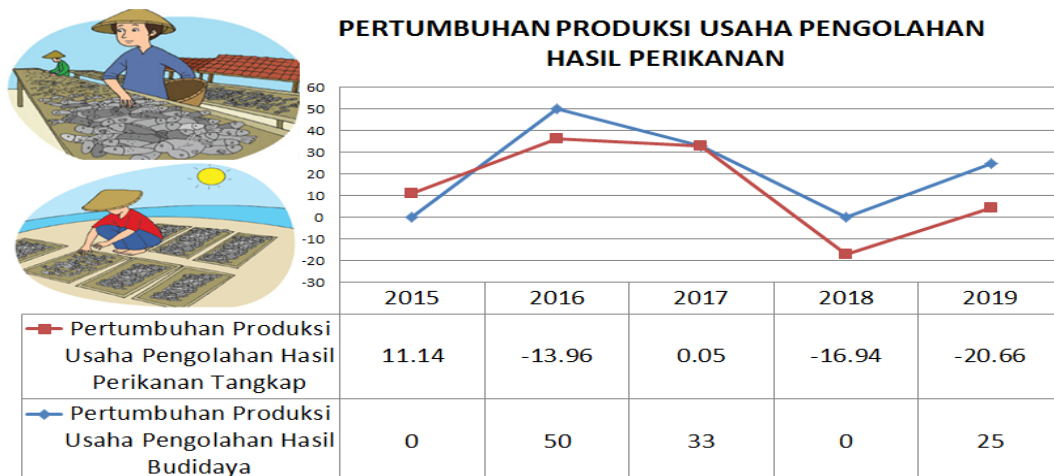
Sumber: Statistik Perikanan Tangkap dan Budidaya DKP Prov. Kep. Babel Tahun 2020

Berdasarkan grafik di atas pada tahun 2019 produksi yang dihasilkan untuk perikanan tangkap hanya 19,53 persen dari total potensi produksi. Sementara itu, untuk perikanan budidaya, hanya 0,54 persen dari total potensi. Artinya, masih sangat terbuka peluang untuk dilakukan peningkatan produksi baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dalam rangka mensejahterakan masyarakat terutama pembudidaya dan nelayan.

c. Pertumbuhan Produksi Usaha Hasil Pengolahan

Produksi pengolahan hasil perikanan merupakan kegiatan yang mentransformasikan bahan-bahan hasil perikanan sebagai input menjadi produk yang memiliki nilai tambah atau nilai ekonomi lebih tinggi sebagai outputnya. Sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran tersebar di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota baik yang berupa Unit Pengolah Ikan (UPI), *cold storage*, pabrik es dan rumah kemasan yang secara umum dikelola langsung oleh masyarakat ataupun koperasi.

Grafik II.56



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Pertumbuhan produksi usaha pengolahan hasil perikanan tangkap cukup mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015 pertumbuhan produksi mencapai 11,14 persen. Namun ditahun 2016 menjadi -13,96 persen sampai dengan tahun 2019 menjadi -20,66 persen. Sedangkan pertumbuhan produksi usaha pengolahan hasil budidaya pada tahun 2016 mencapai 50% dan di tahun 2019 sebesar 25 persen. Penurunan produksi usaha pengolahan ikan disebabkan belum optimalnya pengolahan ikan dan pemasaran hasil produksi ikan.

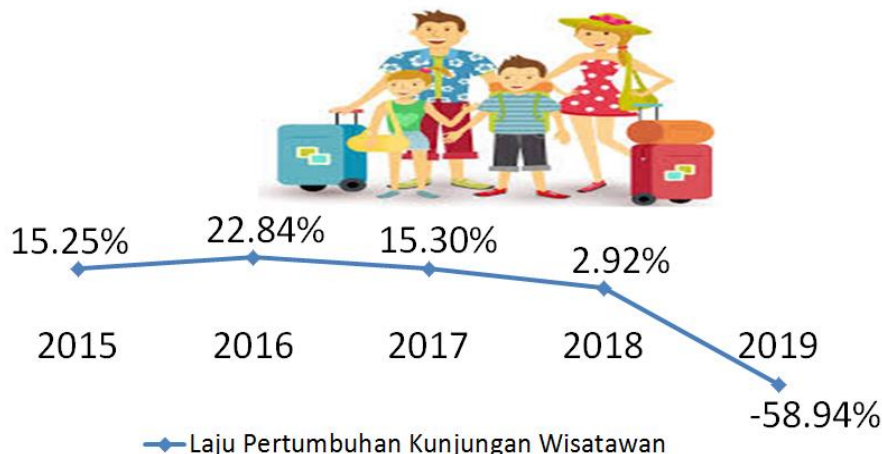
2. Urusan Pariwisata

a. Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan

Wisatawan adalah orang yang melakukan kunjungan wisata ke suatu tempat. Definisi wisatawan mancanegara sesuai dengan rekomendasi *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi. Sedangkan wisatawan domestik yaitu pengunjung yang berasal dari dalam negeri, namun bukan berasal dari daerah yang dikunjungi.

Grafik. II. 57

LAJU PERTUMBUHAN KUNJUNGAN WISATAWAN

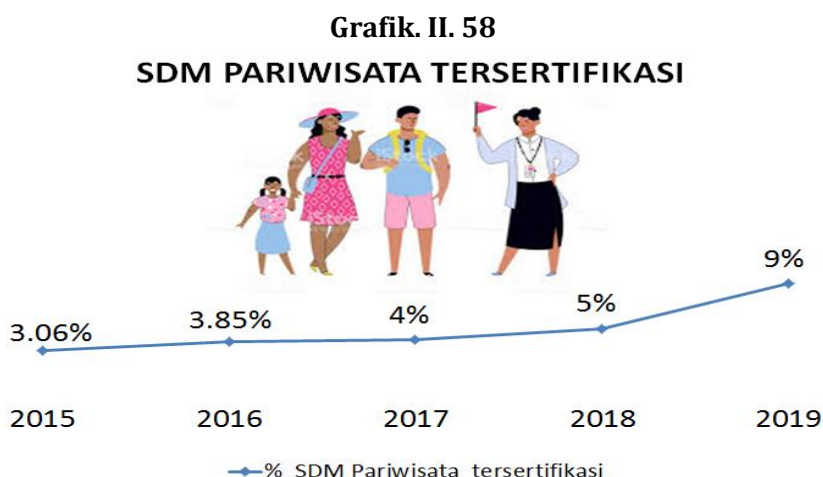


Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan dari tahun 2015-2019 cukup berfluktuatif. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan sebesar 15,25 persen (260.930 wisatawan), kemudian naik ditahun 2016 sebesar 22,84 persen (300.725 wisatawan) dan menurun ditahun 2017 menjadi 15,30 persen (369.422 wisatawan), dan di tahun 2018 sebesar 2,92 persen (425.942 wisatawan). Namun pada tahun 2019 kembali menurun di angka minus 58,94 persen (438.373 wisatawan). Meskipun jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara dari tahun ke tahun meningkat namun peningkatan tersebut tidak signifikan sehingga pertumbuhan kunjungan wisatawan pun menjadi kecil.

b. Persentase Tenaga Pariwisata yang Tersertifikasi

Peningkatan SDM tenaga kerja pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan merupakan bagian penting, baik melalui jalur pendidikan formal seperti sekolah tinggi vokasi maupun jalur pelatihan seperti kursus-kursus, lembaga pelatihan kerja (BLK) dan pemagangan di tempat kerja. Jenis usaha kepariwisataan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 meliputi 13 jenis usaha yaitu : 1) daya tarik wisata, 2) kawasan pariwisata, 3) jasa transportasi wisata, 4) jasa perjalanan wisata, 5) jasa makanan dan minuman, 6) penyediaan akomodasi, 7) penyelenggaraan pertemuan, 8) penyediaan akomodasi, 9) penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, 10) perjalanan insentif, konferensi dan pameran, 11) jasa informasi pariwisata, 12) jasa konsultan pariwisata, dan 13) jasa pramuwisata, Wisata Tirta, dan SPA.



Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

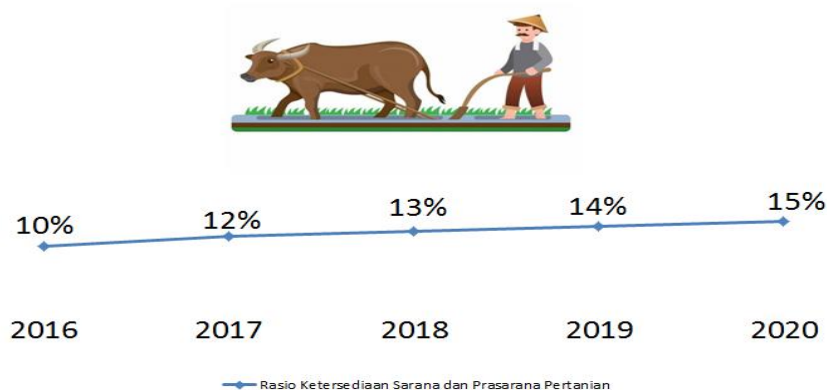
Persentase tenaga kerja sektor pariwisata yang tersertifikasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah tenaga pariwisata. Tenaga kerja sektor pariwisata yang tersertifikasi pada tahun 2016 sebesar 3,06 persen dan 2017 sebesar 3,85 persen. Pada tahun 2017 tenaga pariwisata tersertifikasi sebesar 4 persen atau sebanyak 120 orang dari 2.977 SDM Pariwisata. Kemudian meningkat ditahun 2018 sebesar 5 persen atau sebanyak 154 dari 3.211 SDM Pariwisata dan tahun 2019 sebesar 9 persen atau sebanyak 337 dari 3.642 SDM Pariwisata.

3. Urusan Pertanian

a. Rasio Sarana dan Prasarana Pertanian

Sarana dan prasarana pertanian berdampak pada peningkatan produksi pertanian. Dukungan prasarana dan sarana pertanian bertujuan untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP), meningkatkan produktivitas dan produksi melalui upaya memperluas lahan pertanian pada kawasan tanaman pangan untuk mengimbangi alih fungsi lahan.

Grafik. II. 59
RASIO KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN



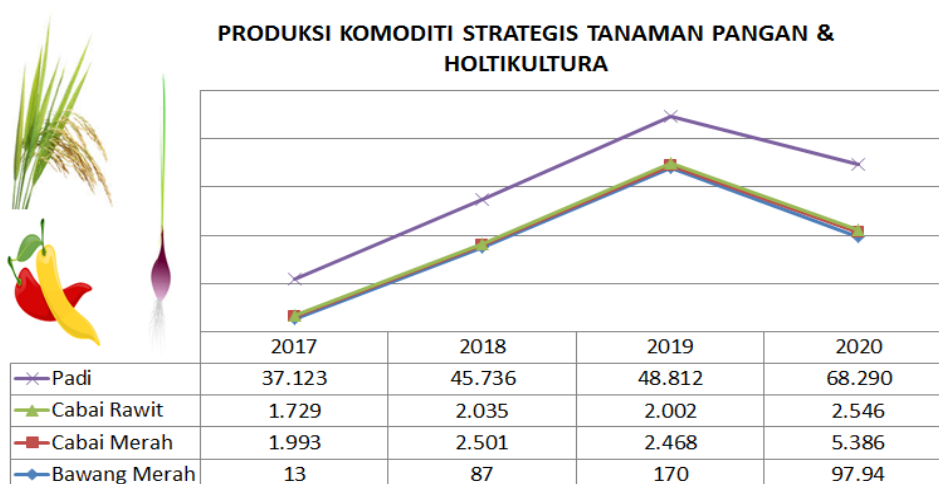
Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan tabel di atas, rasio ketersediaan sarana dan prasarana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 rasio ketersediaan sarana dan prasarana sebesar 10 persen dan terus meningkat menjadi 14 persen di tahun 2018. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pertanian dipengaruhi oleh besarnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah seperti bantuan Saprodi berupa benih unggul dan pupuk kepada setiap Kelompok Tani (Poktan) dan Gapoktan CPCL serta penambahan luas panen. Angka Tetap Produksi padi Tahun 2018 mencapai 45.736 Ton, Tahun 2019 sebesar 48.812 Ton dan berdasarkan Angka Sementara Tahun 2020 produksi padi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 68.290.

b. Produksi Komoditi Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tanaman pangan merupakan jumlah produksi padi, sedangkan hortikultura merupakan produksi bawang merah, cabai besar dan cabai rawit. Ketersediaan benih sumber padi, benih pertanian mampu memproduksi sebesar 2 ton pada tahun 2018, 4 ton pada tahun 2019 dan 6 ton pada tahun 2020. Pada tahun 2018 jumlah benih tanaman perkebunan yang bersertifikat dan berlabel sebanyak 1.050.000 polibag, tahun 2019 sebanyak 1.310.000 polibag dan tahun 2020 sebanyak 1.570.000 polibag. Jumlah benih tanaman pangan yang bersertifikat dan berlabel pada tahun 2018 sebesar 125 ton, tahun 2019 sebanyak 150 ton dan tahun 2020 sebanyak 175 ton.

Grafik. II. 60
PRODUKSI KOMODITI STRATEGIS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA



Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

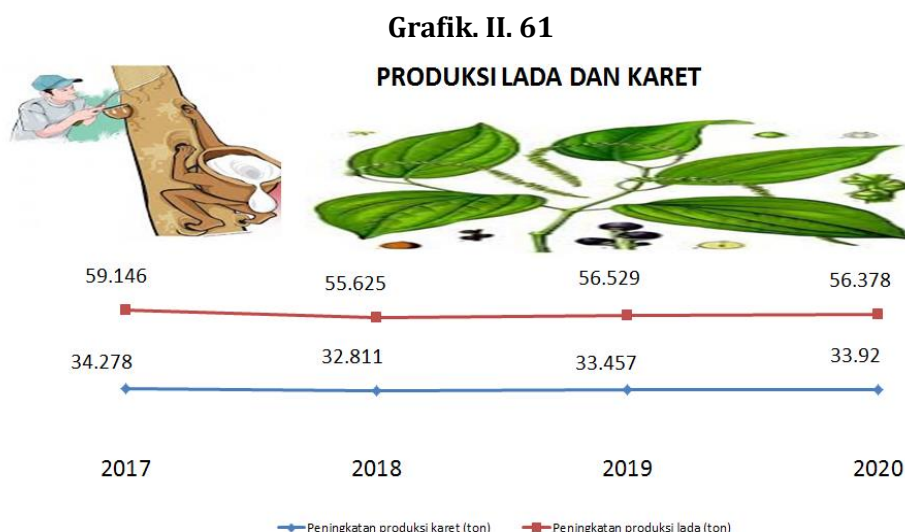
Untuk jumlah benih tanaman hortikultura yang bersertifikat dan berlabel, balai pengawasan dan sertifikasi mutu benih mampu mensertifikasi dan melabeli sebanyak 1.250 polibag pada Tahun 2018, 1.500 polibag pada Tahun 2019 dan 1.750 polibag pada Tahun 2020. Sedangkan Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor Tanaman Pangan mencapai 92.67 (2017) dan meningkat sebesar 93.09 (2019), sedangkan NTP subsektor Hortikultura menurun dari 99.98 (2017) menjadi 98.82 (2019).

Pada tanaman pangan berdasarkan angka tetap, produksi padi Bangka Belitung tahun 2018 mencapai 45.736 ton, tahun 2019 sebesar 48.812 ton dan berdasarkan angka sementara meningkat di tahun 2020 mencapai sebesar 68.290. Sedangkan pada tanaman hortikultura penurunan produksi cabai besar dan cabai rawit pada tahun 2018 dan 2019 disebabkan adanya gagal panen dikarenakan bencana banjir dan serangan hama penyakit. Kenaikan produksi kembali meningkat di tahun 2019-2020.

Angka produksi cabai merah meningkat dari 2.468 ton (2018) menjadi sebesar 5.386 ton (2020 angka sementara). Begitupun dengan Produksi cabai rawit sebesar 2.002 ton (2019) meningkat menjadi sebesar 2.546 ton (2020 angka sementara). Angka produksi pada bawang merah tahun 2018 mencapai 87 ton, tahun 2019 sebesar 170 ton dan berdasarkan angka sementara tahun 2020 produksi bawang merah sebesar 97,94 ton. Bawang merah merupakan kegiatan bantuan pemerintah berupa benih dan pupuk, masyarakat sama sekali tidak mengeluarkan biaya, sehingga tinggi atau rendahnya produksi sangat tergantung dengan banyaknya bantuan dari pemerintah.

c. Produksi Lada dan Karet

Pada sektor perkebunan, ketersediaan bibit lada pada tahun 2018 di balai benih pertanian sebesar 25.000 polibag, tahun 2019 sebesar 50.000 polibag dan tahun 2020 sebesar 75.000 polibag. ketersediaan bibit karet di balai benih pertanian pada tahun 2018 sebesar 40.000 polibag, tahun 2019 sebesar 40.000 polibag dan tahun 2020 sebesar 40.000 polibag. Kawasan lada dan karet rata-rata mencapai 1 ton. Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor Perkebunan sebesar 93.82 (2017) dan menurun di tahun 2019 sebesar 69.58 (2019).



Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

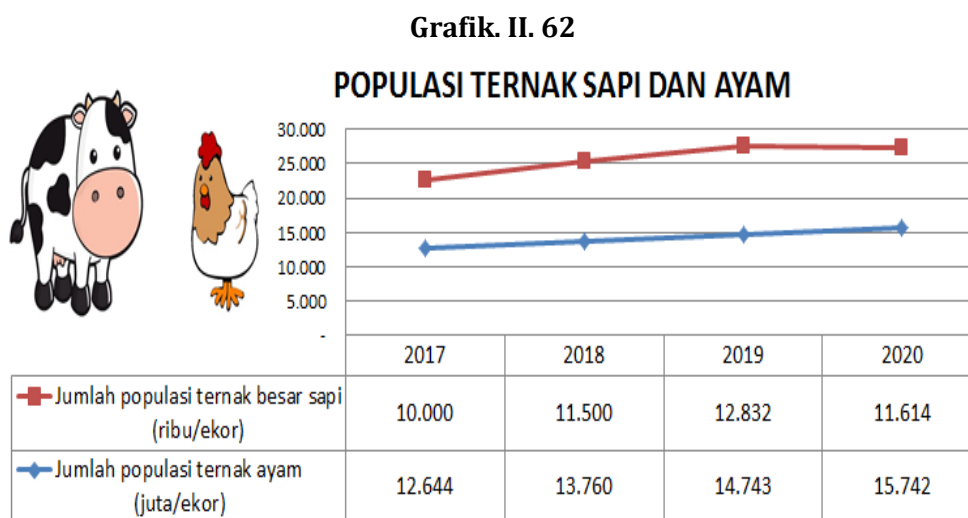
Produksi lada dan karet Bangka Belitung cukup fluktuatif dimana pada tahun 2017 produksi lada sebesar 59.146 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 mencapai sebesar 55.625 ton. Kemudian sedikit meningkat di tahun 2019 menjadi sebesar 56.529 ton dan 56.378

ton (2020 angka sementara). Tidak tercapainya target pada komoditas lada disebabkan karena banyak tanaman baru ditanam atau masa panen pertama sehingga produktivitas belum maksimal walaupun pada dasarnya produksi naik namun produktivitas memang sedikit turun. Harga lada yang cenderung turun mengakibatkan ketertarikan masyarakat untuk berkebun lada menurun jauh.

Begitupun dengan produksi karet tahun 2018 mencapai 32.811 ton, tahun 2019 sebesar 33.457 ton dan berdasarkan angka sementara tahun 2020 sebesar 33.921 Ton. Tidak tercapainya target pada komoditas karet dikarenakan produksi karet turun karena mengalami "gugur daun" sehingga mempengaruhi produksi. Selain itu harga karet yang sempat turun pada 2018-2019 juga turut berpengaruh terhadap produksi karet, namun pada tahun 2020 harga karet telah naik dari tahun sebelumnya.

d. Produksi Sapi dan Ayam

Pada tahun 2018 ketersediaan bibit ayam sebanyak 5.000 ekor, tahun 2019 sebanyak 6.000 ekor dan tahun 2020 sebanyak 8.000 ekor. untuk ketersediaan anakan sapi tahun 2018 tersedia anakan sapi sebanyak 15 ekor, tahun 2019 sebanyak 20 ekor dan tahun 2020 sebanyak 25 ekor.



Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan data di atas angka populasi Sapi meningkat periode 2017-2019, dimana pada tahun 2017 berjumlah 10.000 ekor dan tahun 2019 mencapai 12.832 ekor sapi. Namun populasi ternak sapi mengalami penurunan ditahun 2020 berjumlah 11.614 ekor sapi. Meningkatnya capaian populasi ternak sapi dikarenakan ada peningkatan kelahiran dan banyak pemasukan sapi dari luar provinsi, sehingga populasi kian meningkat. Ditambah dengan kegiatan Sapi Wajib Bunting (Siwab), petani yang berhasil membuat sapi bunting dan melahirkan dibayar, serta jika mengalami kematian dibayar ganti rugi oleh dinas.

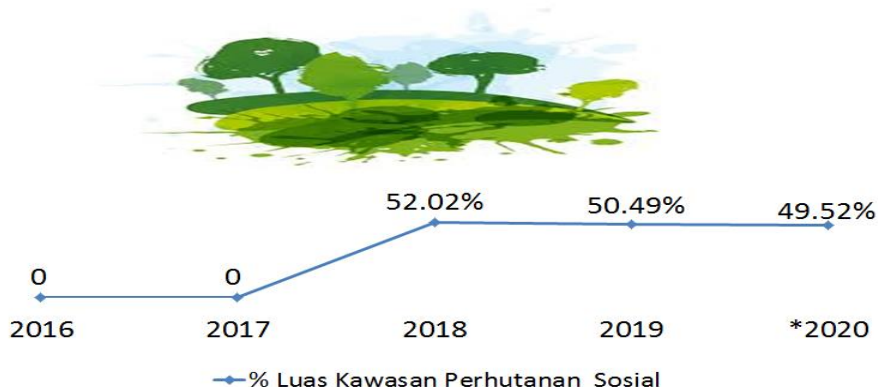
Sementara itu jumlah populasi ayam meningkat dari tahun ke tahun. Angka tetap populasi ayam tahun 2018 mencapai 13.760 ekor, tahun 2019 sebesar 14.743 ekor dan berdasarkan angka sementara tahun 2020 populasi ayam sebesar 15.742 ekor. Populasi ayam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat dipengaruhi dari data pemasukan ayam ke provinsi. Oleh karena itu, faktor harga ayam menjadi faktor penentu banyak tidaknya permintaan konsumen untuk kebutuhan ayam setiap tahunnya yang pada akhirnya berpengaruh terhadap populasi ayam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Urusan Kehutanan

a. Persentase Luas Kawasan Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai *pelaku utama* untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Perhutanan Sosial dengan memberikan legalitas dan akses masyarakat sekitar hutan guna pemanfaatan kawasan hutan. Pemanfaatan hutan dilaksanakan melalui skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan sistem kemitraan yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 10/2016 tentang Perhutanan Sosial dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

Grafik. II. 63
KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL



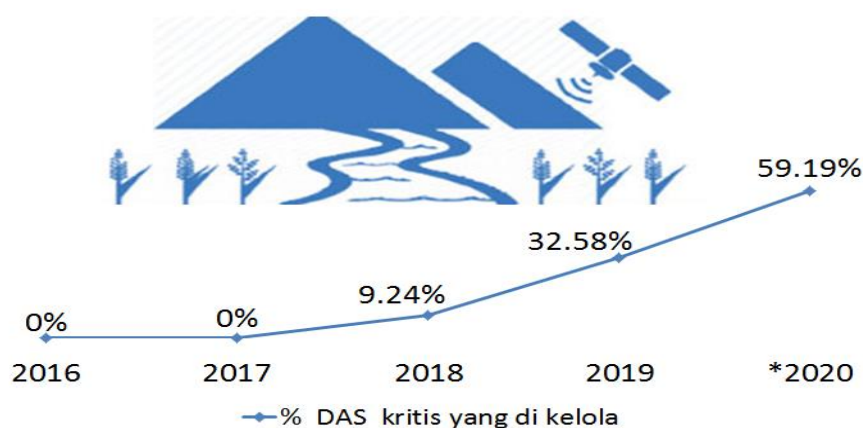
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Luas kawasan perhutanan sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 143.503.32 ha. Pada tahun 2018-2019 persentase luas kawasan perhutanan sosial menurun dari 52,02 persen menjadi 50,49 persen. Realisasi Perhutanan Sosial (PS) yang aksesnya diberikan kepada masyarakat sudah mencapai luas 38.051 ha dan jumlah 102 KK dengan total unit 348 Surat Keputusan (SK) izin/hak yang telah diserahkan ke masyarakat.

b. Persentase Daerah Aliran Sungai Yang Dikelola

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, dengan batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pengelolaan DAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat 433 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdiri dari 357 DAS bernama dan 76 DAS belum bernama. Kelembagaan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS (Forum DAS) Kabupaten/Kota baru terbentuk 3 Forum DAS dari 7 kabupaten dan kota.

Grafik. II. 64
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KRITIS



Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

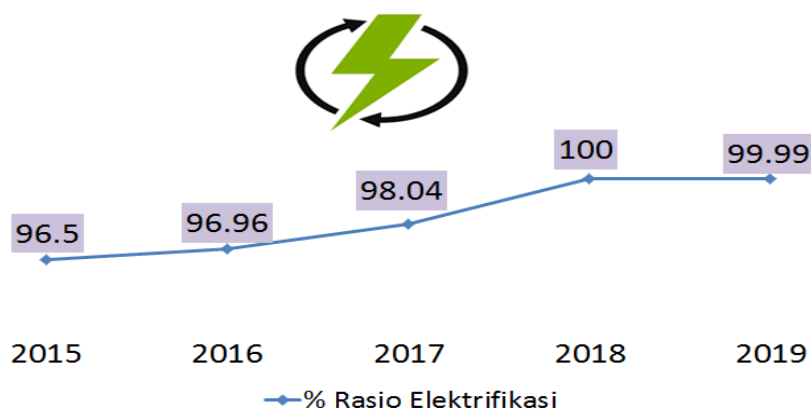
Capaian daerah aliran sungai kritis yang dikelola pada tahun 2018 sebesar 9,24 persen atau capaian pengelolaan DAS kritis seluas 202,70 ha. Sedangkan tahun 2019 daerah aliran sungai kritis yang dikelola meningkat menjadi sebesar 32,58 persen atau mencapai 715,11 ha. Data sementara pada tahun 2020 target capaian sebesar 59,19 persen atau dengan capaian seluas 1.299,11 ha. Pada tahun 2019 DAS kritis berjumlah 159 DAS. Maraknya aktivitas pertambangan pasir timah menyebabkan sungai tidak mampu menahan debit air sehingga terjadi pendangkalan karena sedimentasi tambang.

5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Rasio Elektrifikasi

Ketersediaan energi listrik menjadi pendongkrak perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat, karena dengan adanya fasilitas listrik untuk penerangan, pemanfaatan waktu belajar anak di rumah bisa lebih lama dan aktivitas ekonomi di rumah tangga yang mengusahakan aktivitas ekonomi di rumah dapat lebih berlangsung sampai malam hari. Pengukuran ketersediaan pasokan listrik salah satunya dapat diketahui melalui nilai Rasio Elektrifikasi (RE). Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang sudah terlistrik dengan total rumah tangga.

Grafik. II. 65
RASIO ELEKTRIFIKASI



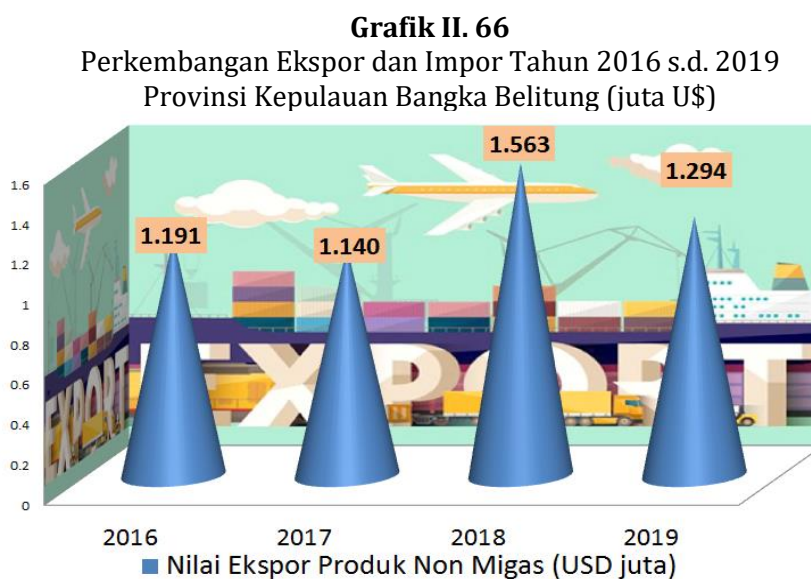
Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Rasio elektrifikasi tahun 2018 mencapai 100 persen. Dengan kondisi semua rumah tangga dan desa sudah dialiri listrik PLN. Jumlah pelanggan listrik PLN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 berjumlah 472.186 pelanggan, dengan daya terpasang sebesar 352.917 KWH dan jumlah produksi listrik sebesar 1.218.892.656 KWH (Babel Dalam Angka 2020).

Pada tahun 2018 rasio elektrifikasi sebesar 100 persen namun pada 2019 rasio elektrifikasi Bangka Belitung sebesar 99,99 persen. Menurunnya rasio elektrifikasi ini dikarenakan adanya pelanggan yang baru mendaftar. Tingginya rasio elektrifikasi artinya seluruh masyarakat di berbagai daerah bisa menikmati pasokan listrik untuk kehidupan sehari-hari dan kebutuhan usaha.

6. Urusan Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu sektor yang diharapkan oleh Kepulauan Bangka Belitung dalam menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Neraca perdagangan luar negeri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung surplus 1,63 miliar dolar AS pada tahun 2018. Setiap bulan, ekspor Bangka Belitung lebih besar daripada impor. Komoditas ekspor Kepulauan Bangka Belitung dikirim melalui pelabuhan laut dan bandar udara. Untuk daerah Bangka di ekspor melalui pelabuhan laut Muntok, dan Pangkal Balam, serta Bandara Depati Amir. Sementara untuk wilayah Pulau Belitung di ekspor melalui pelabuhan laut Tanjung Pandan dan Manggar. Kondisi perkembangan ekspor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada grafik di bawah ini,



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Ekspor di Kepulauan Bangka Belitung masih sangat didominasi oleh ekspor logam timah. Pada tahun 2016, ekspor Kepulauan Bangka Belitung mencapai 1.191 juta USD atau 360,09 juta ton, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 1.140 juta USD atau 306,53 juta ton. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan cukup signifikan sampai dengan 1.563 juta USD, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 1.294 juta USD atau 465,1 juta ton. Selama Januari-Agustus 2019, Singapura menyerap 53,74 persen (419,5 juta dolar AS) ekspor timah, sedangkan Australia menyerap 19,46 persen (36,4 juta dolar AS) ekspor nontimah. Nilai ekspor bahan bakar mineral (HS 27) pada Januari-Agustus 2019 mendominasi sebesar 79,2 juta dolar AS atau 42,30 persen dari jumlah ekspor non timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

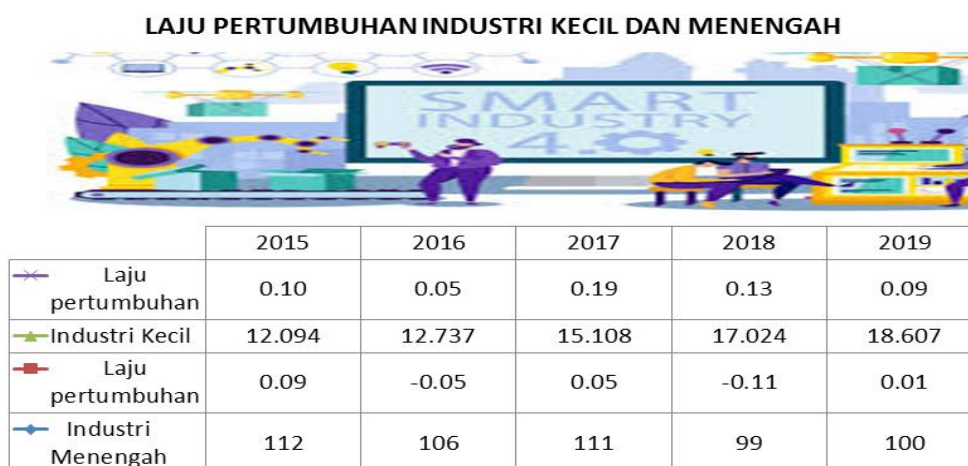
7. Urusan Perindustrian

a. Persentase Laju Pertumbuhan Industri

Rencana pembangunan industri nasional ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yang dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Nasional dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019, yang keduanya menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan industri provinsi dan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.

Rencana pembangunan industri provinsi atau rencana pembangunan industri kabupaten/kota berdasarkan delegasi peraturan perundang-undangan tersebut diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) masing-masing. Jadi untuk menjadi sebuah acuan daerah masing-masing baik provinsi maupun kabupaten/kota harus menetapkan peraturan daerah pada wilayahnya.

Grafik. II.67



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan tabel di atas, laju pertumbuhan industri kecil selama periode 5 tahun terakhir cenderung meningkat. Laju pertumbuhan Industri kecil tahun 2015 sebesar 0,10 persen dan secara konsisten naik sebesar 0,05 persen di tahun 2016, tahun 2017 naik sebesar 0,19 persen, tahun 2018 naik sebesar 0,13 persen dan tahun 2019 kembali naik sebesar 0,09 persen.

Sementara itu pada kegiatan industri menengah selama rentang waktu 2015 sampai dengan 2019, laju pertumbuhan industri menengah tercatat cenderung fluktuatif. Tahun 2015 tercatat 0,09 persen dan menunjukkan penurunan jumlah di tahun 2016 menjadi -0,56 persen, kembali mengalami perbaikan di tahun 2018 ke angka 0,05 persen, akan tetapi tahun 2018 kembali menurun ke angka -0,11 persen dan di tahun 2019 kembali menunjukkan angka positif ke 0,01 persen.

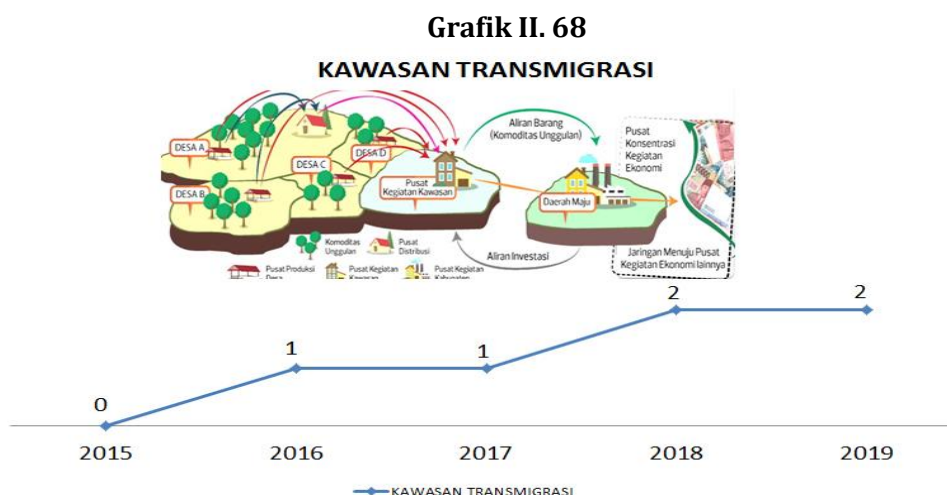
8. Urusan Transmigrasi

a. Jumlah Satuan Kawasan Transmigrasi

Pembangunan Transmigrasi pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan di daerah tertinggal dan pemerataan penduduk. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan transmigrasi, Provinsi Bangka Belitung mengembangkan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan-kawasan

transmigrasi salah satunya kawasan Batu Betumpang. Kawasan terpadu mandiri Batu Betumpang yang juga merupakan salah satu Kawasan Strategi Provinsi dengan luas 41.100,3 ha.

Kawasan Kota Terpadu Mandiri harus memperhatikan ketentuan/kriteria yakni kawasan tersebut tidak berada di kawasan hutan. Berdasarkan SK Penunjukkan Kawasan Hutan di Kabupaten Bangka Selatan (SK Menhut Nomor 357/Menhut-II Tahun 2004) dapat dilihat bahwa di dalam kawasan tidak memiliki status kawasan hutan. Berdasarkan SK tersebut pada kawasan ini berada dalam area penggunaan lain (APL). Perkembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dibawah ini,



Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Kawasan transmigrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru terdapat 2 kawasan atau sebesar 0,20%. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Luas kawasan Batu Betumpang yaitu 180.278.28 ha dengan jumlah KK sebanyak 8.323 KK. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2018 menetapkan kawasan Jebus sebagai kawasan transmigrasi seluas 74.015.27 dengan jumlah KK sebanyak 3.600 KK.

2.1.4 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Umum

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018 mencapai angka 73,43. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 80,11. Capaian kinerja demokrasi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 turun dari kategori “baik” menjadi kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks >80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

a. Nilai Kebebasan Sipil

Nilai kebebasan sipil dihitung melalui 4 aspek yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, serta kebebasan dari diskriminasi. hal ini mengindikasi adanya ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan dalam berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan menjalankan ibadah/ajaran agama, serta kebebasan dari diskriminatif dalam hal gender, etnis, dan kelompok.

Grafik II.69
NILAI KEBEBASAN SIPIL



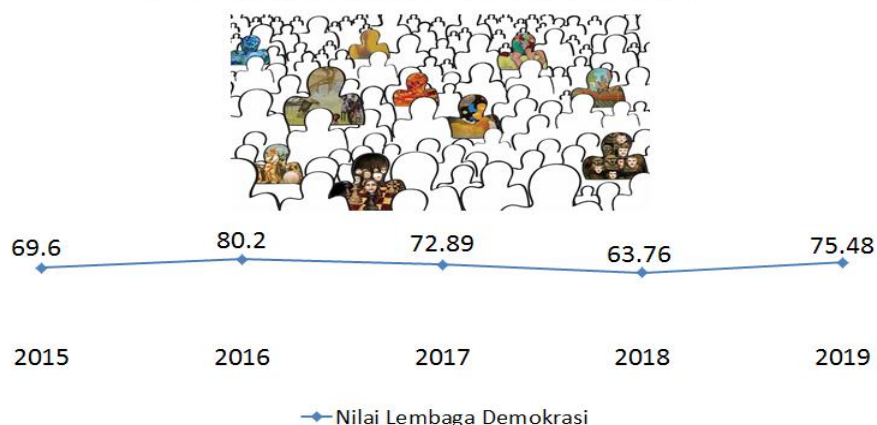
Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Nilai kebebasan sipil Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2015 sebesar 81,25. Kemudian pada tahun 2016-2017 Kebebasan Sipil turun 4,58 poin (dari 87,65 menjadi 83,07). Sedangkan pada tahun 2018-2019 kebebasan sipil naik 3,17 poin (dari 80,95 menjadi 84,12) dan masuk dalam kategori “sedang”. Artinya meningkatnya nilai kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi atau berkurangnya ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat dan ancaman atau penggunaan kekerasan dari kelompok masyarakat terkait ajaran agama.

b. Nilai Kelembagaan Demokrasi

Nilai Kelembagaan Demokrasi dilihat dari 2 aspek yaitu Pemilu yang Bebas dan Adil (Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu, Kecurangan dalam penghitungan suara), dan Peran DPRD (Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan, Perda yang merupakan inisiatif DPRD, Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif).

Grafik II. 70
NILAI LEMBAGA DEMOKRASI



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

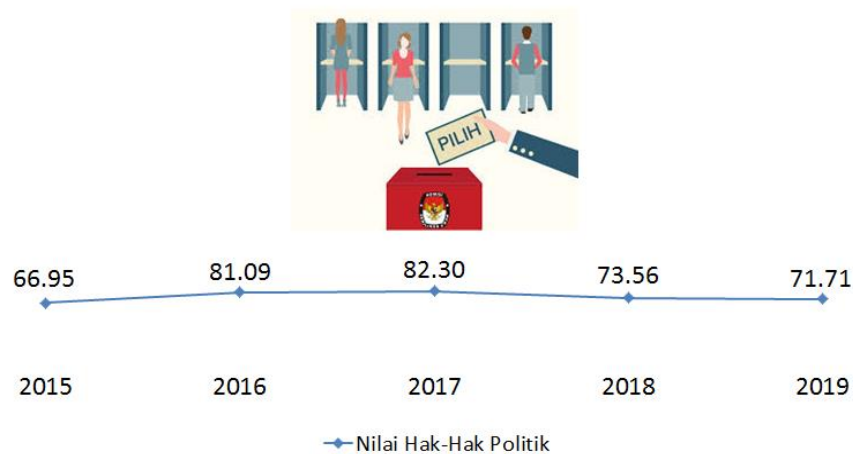
Nilai kelembagaan demokrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 sebesar 69,6 persen. pada tahun 2016-2017 turun 7,31 poin (dari 80,20 menjadi 72,89). Sedangkan pada

tahun 2018-2019 lembaga-lembaga demokrasi naik 11,72 poin (dari 63,76 menjadi 75,48) atau dalam kategori “buruk”. Artinya menurunnya netralitas penyelenggaraan Pemilu, menurunkan rekomendasi DPRD kepada eksekutif, meningkatnya kecurangan dalam perhitungan suara dan menurunkan kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu.

c. Nilai Hak-Hak Politik

Nilai hak-hak politik dihitung melalui 2 aspek yaitu: pertama, Hak Memilih dan Dipilih (hak memilih atau dipilih terhambat, kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih, kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT), *Voters Turnout*, dan persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi. Sedangkan yang kedua adalah Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan (demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan, pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah).

Grafik II. 71
NILAI HAK-HAK POLITIK



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

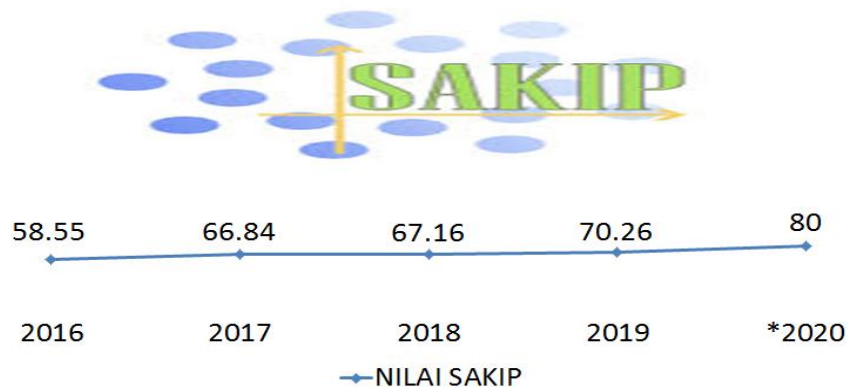
Nilai hak-hak politik Provinsi Bangka Belitung di tahun 2015 hanya sebesar 66,95. Pada tahun 2016-2017 hak-hak politik naik 1,21 poin (dari 81,09 menjadi 82,30), dan pada tahun 2018-2019 turun 1,85 poin (dari 73,56 menjadi 71,71) dan masuk dalam kategori “buruk”. Artinya rendahnya terhambatnya hak pilih masyarakat dan rendahnya perempuan terpilih dalam anggota DPRD. Pada tahun 2019 perempuan terpilih dalam DPRD Provinsi hanya berjumlah 2 orang.

2.1.3.4 Fokus Layanan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

a. Nilai SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi 7 kategori. yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100.

Grafik II. 72
NILAI SAKIP



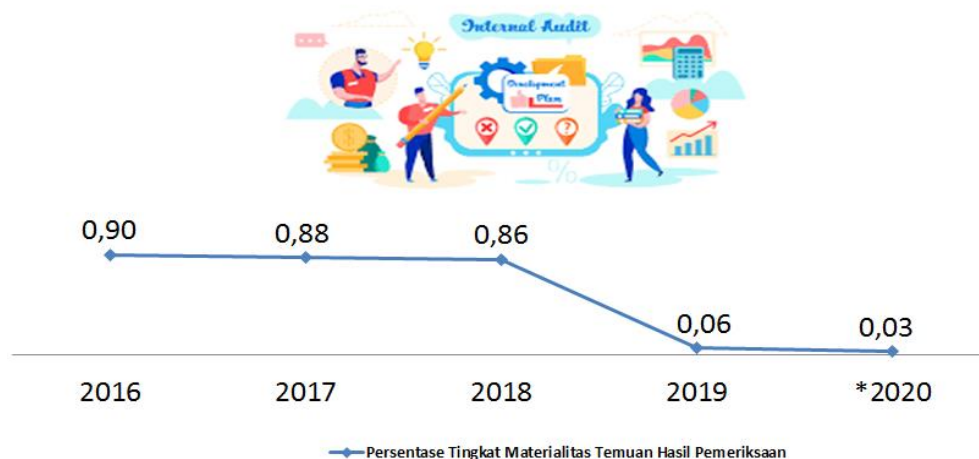
Sumber : Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Nilai Sakip Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016-2019 menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2016 nilai Sakip Bangka Belitung sebesar 58,55 atau CC. Namun pada tahun 2019 nilai Sakip Bangka Belitung mencapai 70,29 atau dengan kategori BB. Dengan semakin baiknya Laporan SAKIP ini, kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat akan semakin optimal, efisien, dan fokus kepada kegiatan yang telah direncanakan, di evaluasi, serta di dukung dengan aplikasi yang terintegrasi, sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

b. Persentase Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan

Materialitas dalam kaitannya dengan akuntansi dan pelaporan audit adalah suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan atas salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan. Laporan keuangan mengandung salah saji material apabila laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang dampaknya, secara individual atau keseluruhan, cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Grafik II. 73
TINGKAT MATERIALITAS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN



Sumber : Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

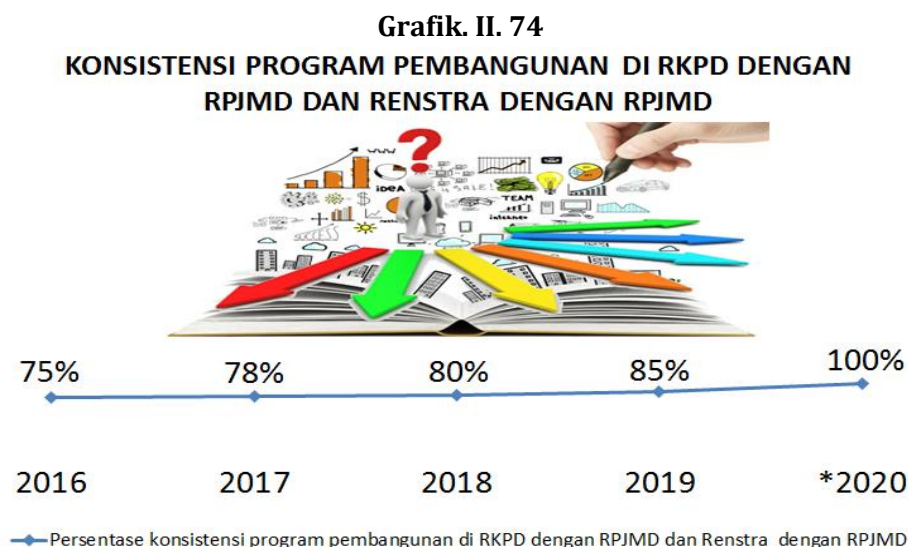
Berdasarkan data diatas tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin menurun. Pada tahun 2016 tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan mencapai 0,90 persen, tahun 2017 sebesar 0,88 persen, tahun 2018 sebesar 0,86 persen dan tahun 2019 sebesar 0,06 persen. Capaian kinerja pada indikator ini sangat tinggi yaitu dibawah satu persen (<1%). Artinya laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan secara wajar dalam semua material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

2.1.3.5 Fokus Layanan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Unsur Perencanaan

- a. Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mengamanatkan disusunnya dokumen perencanaan yang terintegrasi mulai dari Pemerintah Pusat hingga ke daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Kesesuaian antara dokumen RPJMD dengan RKPD dan Renstra sangat penting. Hal ini diharapkan akan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan publik sehingga akan berdampak pada tujuan pembangunan daerah.



Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

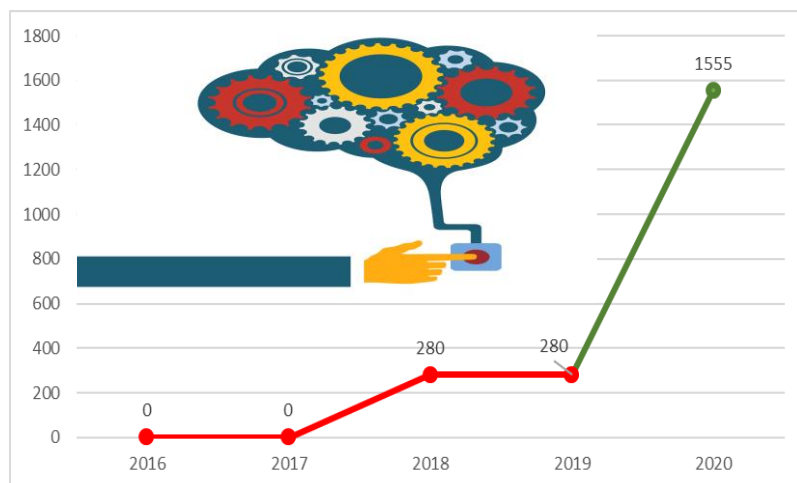
Tingkat konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2016 tingkat konsistensi hanya mencapai 75 persen, kemudian meningkat di tahun 2017 sebesar 78% dan 2018 sebesar 80 persen. Pada tahun 2019 tingkat konsistensi mencapai 85 persen dan diharapkan pada tahun 2020 tingkat konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD mencapai 100 persen sehingga semua program dalam Renstra dan RKPD konsisten dengan program yang tertuang dalam RPJMD.

2. Unsur Penelitian dan Pengembangan

a. Indeks Inovasi Daerah

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2020 mengikuti Innovative Government Award (IGA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan memasukan 13 (tiga belas) inovasi yang telah dikembangkan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Grafik II.75
Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020



Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Pada Tahun 2020 hasil Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan tajam dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, baik dalam jumlah skor dan kategori inovasi. Indeks Inovasi Daerah dari 280 (2019) menjadi 1.555 (2020). Hal tersebut sangat dipengaruhi jumlah inovasi yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-4672 Tahun 2020 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masuk dalam kategori "*Provinsi Sangat Inovatif*".

3. Unsur Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

b. Nilai Indeks Profesionalitas ASN

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Beberapa indikator dalam mengukur profesional ASN antara lain kompetensi, kompensasi, disiplin dan kinerja pegawai. Adapun premis indikator dari profesional ASN adalah (individu) pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin baik dan pegawainya semakin bersih. Umumnya problem profesionalisme ASN dapat dilihat dari kurangnya integritas, rendahnya kompetensi, lambatnya kinerja, dan banyaknya pelanggaran disiplin. Oleh karena itu, peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu di dorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal.

Grafik. II. 76
INDEKS PROFESIONALITAS ASN



Sumber : BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

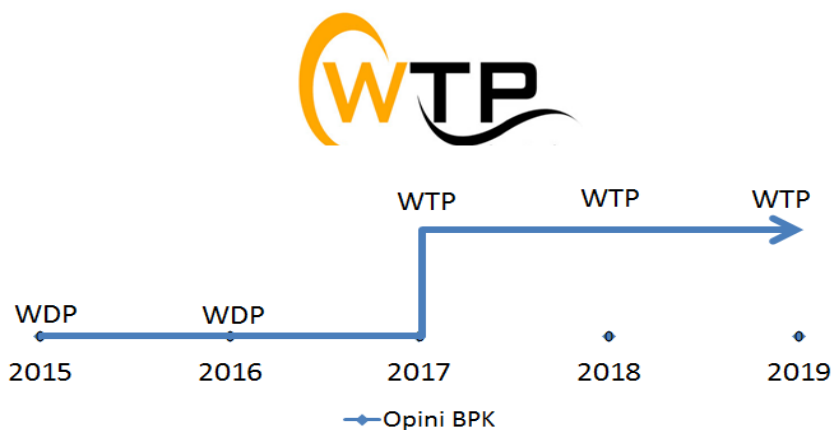
Nilai Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2016 hanya sebesar 58. Namun pada tahun 2019 sudah mencapai sebesar 80,6. Artinya semakin meningkatnya pegawai ASN yang sesuai kompetensi baik dari segi penempatan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan yang sudah sesuai dengan jabatan. Selain dari pada itu kompensasi sudah mengarah ke kinerja, tingkat disiplin yang meningkat, serta kinerja yang juga semakin meningkat.

4. Unsur Keuangan

a. Opini BPK

Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah: Opini Wajar Tanpa Pengecualian/WTP (*Unqualified Opinion*), Opini Wajar Dengan Pengecualian/WDP (*Qualified Opinion*), Opini Tidak Wajar (*Adversed Opinion*), dan Pernyataan menolak memberikan opini (*Disclaimer of Opinion*).

Grafik II. 77
OPINI BPK



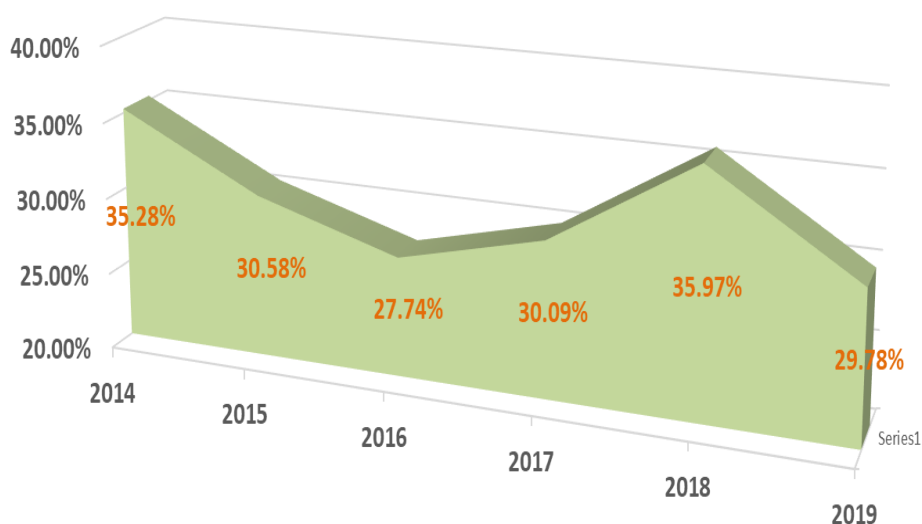
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Capaian opini BPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015-2016 yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Namun pada tahun 2017-2019 capaian opini BPK atas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), artinya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyajikan laporan keuangannya secara wajar, semua informasi keuangan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan atau dapat disimpulkan tata kelola keuangan Pemerintah secara umum telah baik.

b. Persentase Peningkatan pertumbuhan PAD

Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan potensi dari sumber-sumber PAD selalu menunjukkan performa yang semakin membaik. Hal ini dapat dilihat dari kemajuan pertumbuhan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam 6 (enam) tahun terakhir. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bergerak fluktuatif, sejak tahun 2014 angka kontribusi menunjukkan kinerja yang naik turun dengan rata-rata capaian 31.57%.

Grafik II. 78
PERSENTASE KONTRIBUSI PAD TERHADAP APBD



Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

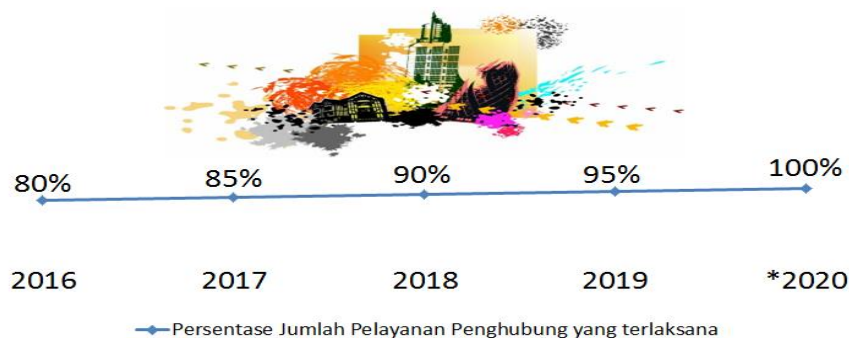
Dalam kurun waktu 2014-2019 kontribusi PAD terhadap APBD mencapai performa tertinggi pada tahun 2018 yang mencapai angka 35.97 %, sedangkan capaian terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 27.74%. Dalam kurun 2014-2019, dengan kenaikan rata-rata sebesar 54 milyar dari tahun 2014, PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebesar 826.70 milyar pada tahun 2019 atau tumbuh rata-rata sebesar 7,30%.

5. Unsur Penghubung

a. Persentase Jumlah Pelayanan Penghubung yang terlaksana

Pelayanan Penghubung adalah melayani penyiapan hal-hal yang diperlukan dalam membantu untuk mempermudah komunikasi serta administrasi antara daerah dan pusat, baik penyelenggaraan kegiatan hubungan antar lembaga, pembinaan masyarakat daerah di Jakarta, promosi dan pengelolaan Anjungan Daerah di TMII, serta pelayanan kepada pejabat daerah dan pengelolaan Mess Pemerintah Provinsi di Jakarta.

Grafik II. 79
PERSENTASE JUMLAH PELAYANAN
PENGHUBUNG YANG TERLAKSANA



Sumber : Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Capaian kinerja pelayanan penghubung yang terlaksana meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 pelayanan penghubung sebesar 80 persen, kemudian tahun 2017 sebesar 85%, 2018 sebesar 90 persen, serta 2019 sebesar 95 persen. Pada tahun 2020 diharapkan pelayanan penghubung sudah paripurna mencapai 100 persen. Salah satu komponen yang paling penting dalam ketatalaksanaan pemerintah adalah pelayanan yang salah satunya meliputi pelayanan dan fasilitasi pejabat daerah di Jakarta. Kegiatan pelayanan dilakukan dalam satu kesatuan. Pelayanan Instansi pemerintah adalah pemerintah daerah/pejabat, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, sekretariat lembaga negara, lembaga setingkat menteri dan lembaga lain, lembaga non struktural, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

2.1.3.6 Fokus Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

7. Urusan Kesekretariatan Daerah

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (Rb) secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat melalui peningkatan profesionalisme pegawai dan komitmen untuk mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*). Ada 8 area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: Mental Aparatur, Organisasi, Tata Laksana, Peraturan Perundang-Undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas Dan Pelayanan Publik.

Grafik II. 80
INDEKS REFORMASI BIROKRASI



Sumber : Biro Organisasi SETDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (Rb) Provinsi Bangka Belitung dari tahun 2015-2019 secara umum meningkat. Pada tahun 2015 nilai Rb hanya sebesar 28,59, namun pada tahun 2019 mencapai 66,84. Nilai pengungkit/proses dari 8 area perubahan sebesar 34,96, sedangkan nilai hasil implementasi (kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kualitas pelayanan publik) sebesar 31,88, sehingga nilai Rb tahun 2019 mencapai 66,84 dengan predikat “B” (Baik). Artinya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik.

6. Urusan Kesekretariatan DPRD

a. Persentase Meningkatnya Fungsi Lembaga DPRD

Lembaga DPRD biasa disebut sebagai lembaga legislatif. Fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang, membentuk Peraturan Daerah bersama-sama kepala daerah, membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh kepala daerah. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.



Sumber Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Persentase meningkatnya fungsi Lembaga DPRD dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2018 peningkatan fungsi Lembaga DPRD hanya sebesar 78 persen dan meningkat di tahun 2017 sebesar 79 persen. Hal ini semakin terjadi peningkatan di tahun 2018 menjadi sebesar 80 persen dan 2019 sebesar 81 persen. Artinya semakin meningkatnya inisiasi terhadap rancangan peraturan daerah dan semakin meningkatnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

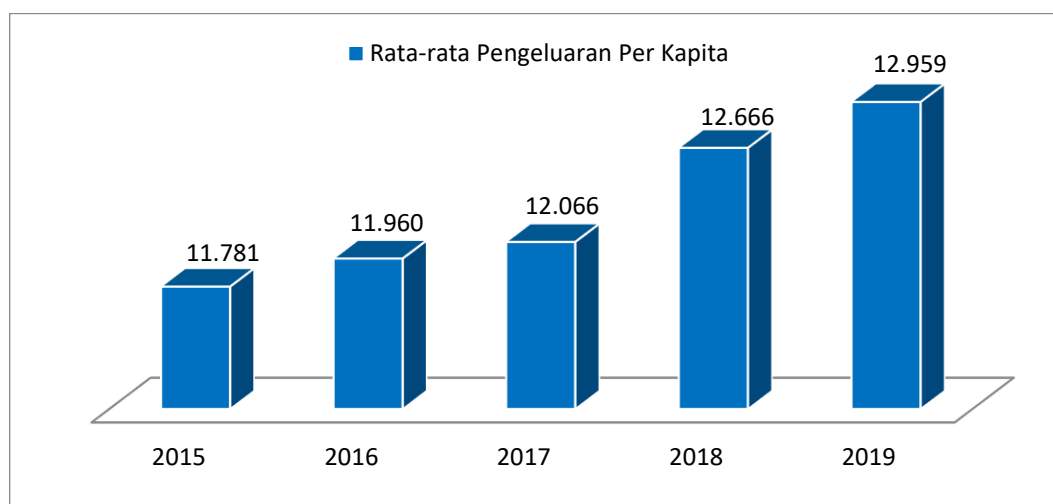
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita menggambarkan jumlah pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengeluaran konsumsi perkapita juga

dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemampuan ekonomi rumah tangga melalui cara penggunaan pendapatan yang dibelanjakan/pengeluaran untuk kebutuhannya, maka rata-rata pengeluaran per kapita pengeluaran konsumsi rumah tangga cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Grafik II.82
Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Hingga pada tahun 2019, rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disesuaikan mencapai Rp12.959.000 per tahun meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp293.000 per tahun dan menempati peringkat ke lima tertinggi di Indonesia.

2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) memberikan gambaran tentang kemampuan petani dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran kebutuhannya. NTP juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan petani. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

Tabel II. 47
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2015 s.d. 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Yang Diterima Petani (It)	121,95	120,77	116,43	106,13	103,96
2	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	116,47	119,09	122,09	125,73	129,05
3	Rasio	1,05	1,01	0,96	0,84	0,80

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan tabel di atas maka diperoleh kondisi NTP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperlihatkan perkembangan yang belum menggembirakan. Sepanjang tahun tahun

2015-2016, menunjukkan indeks yang diterima petani lebih besar daripada indeks yang dibayar petani. Selanjutnya pada tahun 2019, rasio NTP mencapai level terendah selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 0,80. Hal ini disebabkan indeks yang diterima petani lebih rendah dari indeks yang dibayar petani, sehingga kondisi ini mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT untuk Non Pangan)

Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan) menjelaskan berapa besar konsumsi rumah tangga non pangan perkeluarga per tahun. Sebagaimana diperlihatkan pada dibawah ini dapat dijelaskan bahwa konsumsi rumah tangga non pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tahun 2018 yaitu sebesar Rp709.094 dan tahun 2019 menjadi sebesar Rp758.333. Selain itu, dilihat dari rasio perbandingan antara total pengeluaran dan total pengeluaran konsumsi RT Non-Pangan sepanjang kurun waktu 2015-2017 adalah menurun. Namun mulai tahun 2018-2019 kembali mengalami peningkatan.

Tabel II. 48
Persentase Konsumsi RT Non-Pangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Total Pengeluaran Konsumsi RT Non-Pangan	539.290	615.498	639.949	709.094	758.333
2	Total pengeluaran	1.118.101	1.211.879	1.360.994	1.419.495	1.509.974
3	Rasio	0,482	0,508	0,470	0,500	0,502

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Selanjutnya sebagaimana diperlihatkan pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa besaran total pengeluaran non pangan pada setiap kabupaten/kota di lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 menunjukkan kondisi dengan angka relatif sangat bervariasi. Nilai total tersebut menggambarkan pola pikir atau kebiasaan penduduk setempat terkait perilaku pengeluarannya.

Tabel II.49
Indikator Pengeluaran Non Pangan Perkapita Tahun 2019 menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Total Pengeluaran Konsumsi RT Non-Pangan	Total pengeluaran	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Bangka	674.074	1.441.834	0,468
2	Kabupaten Bangka Barat	630.236	1.315.113	0,479
3	Kabupaten Bangka Selatan	584.929	1.302.257	0,449
4	Kabupaten Bangka Tengah	716.195	1.425.107	0,503
5	Kabupaten Belitung	887.524	1.667.213	0,532
6	Kabupaten Belitung Timur	855.459	1.678.367	0,510

No	Kabupaten/Kota	Total Pengeluaran Konsumsi RT Non-Pangan	Total pengeluaran	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Kota Pangkalpinang	1.055.919	1.884.819	0,560
	Provinsi	758.333	1.509.974	0,502

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Apabila suatu penduduk dalam suatu wilayah/daerah nilai pengeluaran pangannya lebih besar dari pada nilai pengeluaran non pangan, maka daerah tersebut dapat dikatakan secara relatif sebagai daerah berkembang, tetapi apabila pengeluaran pangan lebih kecil dari pada nilai pengeluaran non pangan maka daerah tersebut dapat dikatakan relatif maju. Total pengeluaran konsumsi RT pangan dan total pengeluaran serta rasio tertinggi di Kota Pangkalpinang dan terendah di Kabupaten Bangka Selatan.

4. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Pertumbuhan investasi merupakan hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja yang sekaligus akan mengurangi pengangguran. Adapun gambaran serapan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan PMA/PMDN, jumlah PMA/PMDN, dan daya serap kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 2015-2019 kecenderungan bersifat fluktuatif. Pada tahun 2016 merupakan jumlah tenaga kerja yang paling banyak bekerja sebanyak 16.264 dan jumlah PMA/PMDN sebanyak 156. Sementara itu, berbeda dengan potret tahun 2019 jumlah PMA/PMDN yang paling banyak, namun jumlah tenaga kerja yang diserap hanya sebanyak 5.499 dengan rasio sebesar 8,68 sebagaimana disajikan pada tabel berikut,

Tabel II.50
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	8.255	16.264	3.543	4.512	5.499
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	104	156	235	411	633
3	Rasio daya serap tenaga kerja	79,37	104,26	15,07	10,97	8,68

Sumber: DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas wilayah atau infrastruktur yang menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor antara lain dapat diketahui dari beberapa indikator antara lain jumlah orang yang terangkut angkutan umum baik laut maupun udara, Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, penataan wilayah, fasilitas Perbankan, Hotel berbintang/non bintang, terminal, bandara, dan pelabuhan.

1. Jumlah Penumpang Angkutan

Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain baik darat, laut dan udara. Penggunaan moda tersebut dapat dilihat dari jumlah penumpang terangkut dalam angkutan sebagaimana tabel di bawah ini,

Tabel II.51
Jumlah Penumpang Angkutan (Jiwa/Orang)

Uraian	Jumlah Penumpang (Orang)				
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Angkutan Udara					
b. Embarkasi	1.006.821	1.013.252	1.146.811	1.413.677	1.098.425
b. Debarkasi	995.114	1.004.390	1.117.717	1.411.973	1.101.019
2. Angkutan Laut					
a. Embarkasi	118.266	262.875	136.985	132.326	331.670
b. Debarkasi	108.150	323.337	135.298	141.005	291.830

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan data di atas baik keberangkatan maupun kedatangan angkutan udara cukup berfluktuatif dan mengalami penurunan di tahun 2017. Hal ini menandakan adanya penurunan jumlah permintaan jasa penerbangan yang diukur dari pertumbuhan penumpang udara melalui indikasi jumlah penumpang yang terus mengalami penurunan dalam setiap tahunnya. Sedangkan angkutan laut pada tahun 2017 mengalami kenaikan baik embarkasi maupun debarkasi, hal ini semakin perlunya penyediaan sarana angkutan laut yang handal dan memadai.

2. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan (km) terhadap jumlah kendaraan (unit). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk, dan sepeda motor.

Tabel II.52
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Panjang Jalan Provinsi	899,33	899,33	850,99	850,99	850,99
2	Jumlah Kendaraan	875.527	934.354	998.080	1.039.803	1.048.188
3	Rasio	0,0034	0,0016	0,0037	0,0038	0,0039

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan data di atas dari tahun 2019-2020 rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan sebesar 0,0038 dan meningkat di tahun 2020 menjadi sebesar 0,0039. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah kendaraan pada tahun 2019 sebanyak 1.039.803 menjadi 1.048.188 atau naik sebanyak 8.385 kendaraan.

3. Penataan Wilayah

Penataan Wilayah dilihat dari Luas wilayah produktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggambarkan ketersediaan lahan yang produktif untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka peningkatan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan. Persentase seluas wilayah produktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada tabel berikut,

Tabel II.53
Rasio luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Bangka	233.977 ha	295.068 ha	0,79
2	Kabupaten Bangka Barat	218.878 ha	282.061 ha	0,78
3	Kabupaten Bangka Selatan	231.828 ha	360.707 ha	0,64
4	Kabupaten Bangka Tengah	164.227 ha	212.677 ha	0,77
5	Kabupaten Belitung	195.776 ha	229.369 ha	0,85
6	Kabupaten Belitung Timur	139.850 ha	250.691 ha	0,56
7	Kota Pangkalpinang	2.203 ha	11.840 ha	0,19
Jumlah		1.186.652 ha	1.542.414 ha	0,73

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Berdasarkan data diatas Rasio luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Kabupaten Belitung dengan rasio sebesar 0,85. Tingginya nilai rasio menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah produktif dikelola dan dikembangkan dalam upaya mendukung aktivitas ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

4. Infrastruktur dan Fasilitas Penunjang

Pengembangan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan pembangunan. Pengembangan infrastruktur dapat dilihat dari jumlah pelabuhan laut, udara, terminal, jumlah perbankan, jumlah hotel berbintang/non bintang dalam mendukung aktivitas ekonomi yang berdaya saing.

Tabel II. 54
Infrastruktur dan Fasilitas Penunjang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Infrastruktur	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah pelabuhan udara	2	2	2	2	2
2.	Jumlah Pelabuhan Laut	10	12	13	17	17
3.	Jumlah Terminal	7	10	13	13	13
4.	Jumlah Perbankan	197	202	257	281	287
5.	Jumlah Hotel Berbintang/Non Bintang	91	105	170	220	257

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

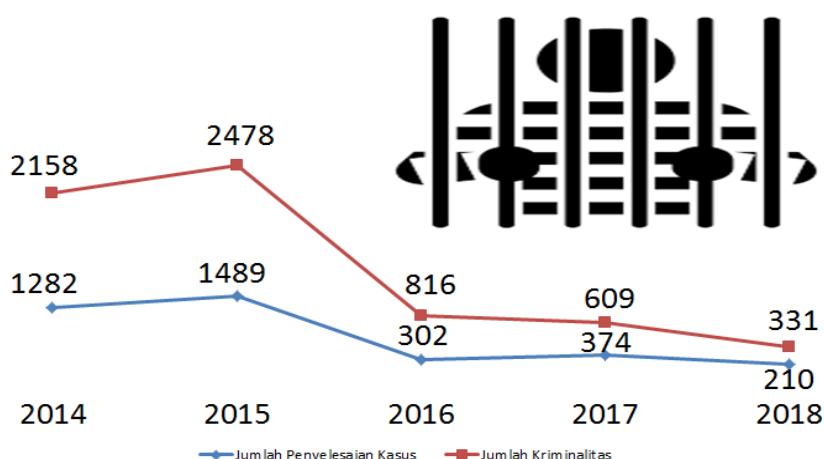
Berdasarkan data di atas jumlah pelabuhan udara masih terdapat 2 (dua) bandara yaitu Bandara Depati Amir di Pangkalpinang dan Bandara Hanandjoedin di Belitung. Sedangkan jumlah pelabuhan laut berjumlah 17 pelabuhan dan terdapat 13 terminal. Jumlah Perbankan mengalami kenaikan dari 281 (2018) menjadi 290 (2020). Begitupun dengan jumlah hotel berbintang/non bintang dari 220 (2018) menjadi 257 (2019). Semakin meningkatnya ketersediaan infrastruktur dan fasilitas penunjangnya maka akan meningkatkan aktivitas ekonomi yang berdaya saing.

2.14.3 Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku serta norma-norma sosial dan agama. Angka kriminalitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kejadian kriminalitas yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu. Tindakan kriminal umumnya berkaitan dengan yang bertentangan dengan norma hukum, norma sosial dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Ada banyak faktor penyebab yang bisa melatarbelakangi seseorang melakukan tindakan kriminal, diantaranya yaitu: pertentangan dan persaingan kebudayaan, perbedaan ideologi politik, kepadatan dan komposisi penduduk, perbedaan distribusi kebudayaan, perbedaan kekayaan dan pendapatan, mentalitas yang labil, serta faktor dasar seperti faktor biologis, psikologis dan emosional.

Grafik. 83
ANGKA KRIMINALITAS

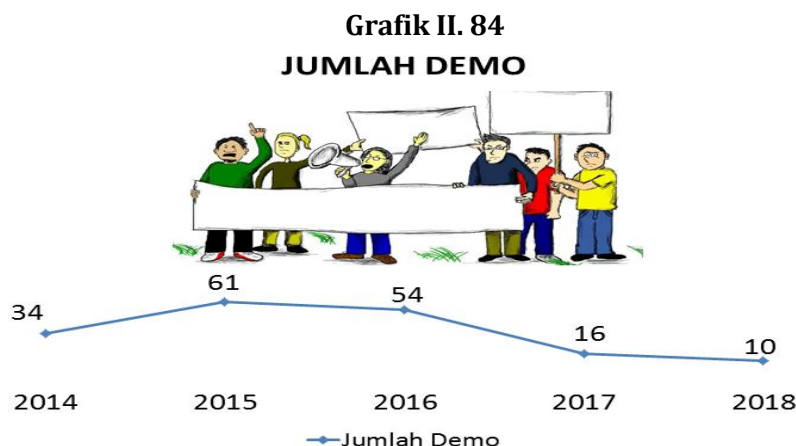


Sumber: Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Angka Kriminalitas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2014-2018 menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2016 dari 816 kasus menurun menjadi 609 kasus pada 2017. Pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 45,65 persen atau 331 kasus. Sedangkan data registrasi Polisi Daerah Kepulauan Bangka Belitung mengungkapkan bahwa kejadian kejahatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode tahun 2014-2018 cenderung berfluktuatif. Demikian pula penyelesaian tindak pidana, secara umum masih berkisar antara 50 sampai 60 persen tindak pidana yang dapat diselesaikan.

2. Jumlah Demo

Demonstrasi merupakan salah satu cara kelompok tertentu menyuarakan idenya dan tidak heran aksi ini kerap menimbulkan kerugian meskipun tujuannya bisa dibilang cukup baik, “agar suara di dengar”. Faktor penyebab demonstrasi kegiatan aksi unjuk rasa tidak terjadi begitu saja, ada banyak faktor yang melatarbelakanginya. Mengacu pada pengertian demonstrasi, adapun beberapa faktor penyebab terjadinya demonstrasi adalah sebagai berikut: ketidakadilan sosial, ketidaksesuaian pendapat, dan aspirasi masyarakat yang belum terpenuhi.



Sumber: Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Jumlah demonstrasi yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif sedikit daripada provinsi lain. Demonstrasi di Bangka Belitung di dominasi oleh isu lingkungan dan pertambangan. Jumlah demonstrasi dari tahun 2015-2018 mengalami penurunan dari 60 kasus menjadi 10 kasus. Hal ini menggambarkan bahwa kecenderungan stabilitas keamanan bermasyarakat di Bangka Belitung relatif lebih aman.

3. Jumlah Perda yang mendukung Iklim Usaha

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui Perda dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif suatu kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim investasi dibatasi yaitu Perda terkait dengan perizinan, Perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta Perda terkait dengan ketenagakerjaan.

Tabel II. 55
Jumlah Peraturan Daerah yang mendukung Iklim Investasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Nomor	Peraturan Daerah
1	18 Tahun 2008	Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera
2	11 Tahun 2008	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Perkreditan
3	12 Tahun 2008	Penambahan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Bank Sumsel
4	1 Tahun 2010	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Sumsel Bangka Belitung
5	3 Tahun 2010	Pembentukan BUMD PT. Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Nomor	Peraturan Daerah
6	7 Tahun 2011	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Pembangunan Sumsel Bangka Belitung
7	7 Tahun 2013	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada BUMD Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung
8	3 Tahun 2014	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Pembangunan Daerah
9	15 Tahun 2016	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangk Belitung pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
10	5 Tahun 2017	Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi

Sumber: Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Sebagaimana diperlihatkan pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa sepanjang kurun waktu 2008-2017 jumlah Perda yang sahkan untuk mendukung iklim investasi sebanyak 10 Perda, mulai dari Perda pembentukan BUMD sampai dengan Perda penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah serta pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi.

4. Kemudahan Perizinan

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang prima menjadi hal mutlak yang harus segera diwujudkan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dalam satu pintu dengan prinsip kepastian waktu, biaya, cepat, mudah, efisien dan transparan guna mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Perpres RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, kini para pelaku usaha PMA-PMDN, baik mikro-kecil, perseorangan maupun non perorangan (Badan Usaha – PT, CV, Firma, Persekutuan Perdata, Koperasi, Yayasan, dan lain-lain) kini bisa langsung mendaftarkan usahanya secara online melalui OSS (*Online Single Submission*).

Sebanyak 108 jenis perizinan dan non perizinan dari 15 sektor didelegasikan Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2017 pasal 9, baik di sektor penanaman modal, komunikasi dan informatika, koperasi dan UKM, sektor kehutanan, perhubungan, kelautan dan perikanan serta sektor perindustrian dan perdagangan. Ini merupakan kebijakan pemerintah provinsi dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam berinvestasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. Pengenaan Pajak Daerah

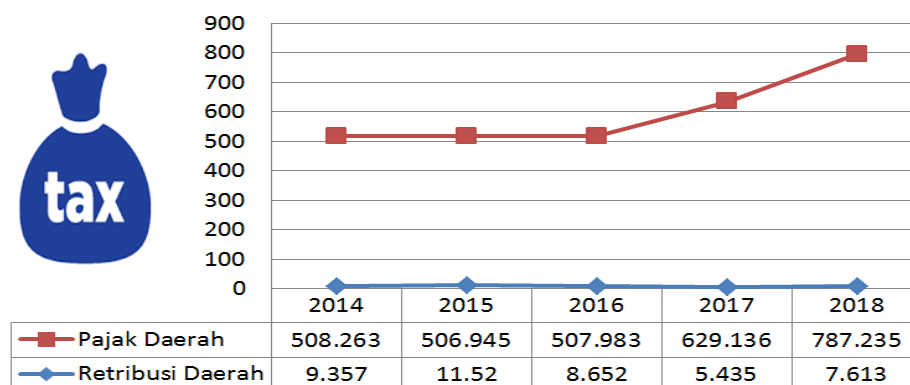
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Selama kurun waktu 2014-2018 pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan asli daerah yang paling dominan diikuti oleh pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan pajak rokok dan pajak air permukaan kontribusinya masih relatif rendah dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap pungutan yang membebani masyarakat baik berupa pajak atau retribusi harus diatur dengan Undang-Undang Dasar hukum pengenaan pajak

daerah dan retribusi daerah antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; dan
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Grafik II. 85

REALISASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Dari data realisasi pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di atas menunjukkan peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah, dimana pada tahun 2017 jumlah Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp629.136 (dalam juta) meningkat signifikan di tahun 2018 menjadi sebesar Rp787.235 (dalam juta) atau mengalami kenaikan sebesar 25,12 persen, sedangkan untuk Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di tahun 2017 jumlah yang diperoleh sebesar Rp5.435 (dalam juta) meningkat signifikan di tahun 2018 sebesar 40,09 persen menjadi Rp7.613 (dalam juta).

2.14.4 Fokus Sumber Daya Manusia

1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga kerja di suatu daerah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu daerah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Perhitungan kualitas tenaga kerja adalah perbandingan antara banyaknya lulusan perguruan tinggi yang dimiliki daerah yang bersangkutan atau lulusan S1/S2/S3 dengan jumlah penduduk usia kerja.

Tabel II.56

Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2013 s.d 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	62.519	93.524	72.763	70.792	66.678
2.	Jumlah penduduk	1.315.123	1.343.881	1.372.813	1.401.827	1.430.865

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Rasio lulusan S1/S2/S3	475,39	695,92	530,03	504,99	465,99

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Kualitas tenaga kerja/rasio lulusan S1/S2/S3 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 5 (lima) tahun terakhir cenderung berfluktuasi dimana tahun 2013 sebesar 475,39 per 10.000 penduduk. Namun meningkat menjadi 695,92 pada tahun 2014 dan mengalami penurunan kembali secara bertahap ditahun 2017 menjadi 465,99 per 10.000 penduduk. Penurunan ini menunjukkan bahwa daya serap tenaga kerja dengan latar pendidikan sarjana/ perguruan tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurun, walaupun sempat pada tahun 2014 rasio ini meningkat sebesar 695,92 per 10.000 penduduk. Diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing dengan kompetensi dan latar pendidikan yang sesuai dengan keinginan pengguna tenaga kerja agar dapat terserap dalam perusahaan-perusahaan, dan secara otomatis dapat meningkatkan rasio kelulusan S1/S2/S3.

2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk usia < 15 tahun dan > 64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun karena umumnya sudah melewati masa pensiun.

Grafik. II.86
Rasio Ketergantungan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Pada tahun 2018, angka *dependency ratio* untuk Bangka Belitung sebesar 45,23 yang artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 43-44 orang penduduk usia non produktif. Dari tahun ke tahun, angka *dependency ratio* cukup fluktuatif, namun mengalami kenaikan pada tahun 2019 yaitu menjadi sebesar 49,70 yang berarti bahwa semakin tingginya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

2.1.5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan indikator dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di pusat maupun daerah. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan pemetaan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut pemetaan pencapaian indikator TPB 2014-2018 dengan RPJMD.

Tabel II.57
Pemetaan Capaian Indikator Pembangunan terhadap Target/Indikator TPB
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	satuan	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*				
				2014	2015	2016	2017	2018
1.2.	1.2.1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Persentase Angka Kemiskinan (Maks 7-8%)	Persen	-	5,40	5,51	5,61	5,72
1.3.	1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Persentase kepesertaan JKN (Min 95%)	Persen	-	-	73,25	74,80	76,36
	1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Persentase kepesertaan JKN Ketenaga kerjaan (62,4 jt formal, 3,5 jt nonformal)	Persen	-	-	73,25	74,80	76,36
	1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan	2,8 juta	Orang	-	-	-	40	252
1.4.	1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya difasilitasi kesehatan	70%	Persen	-	60	60,67	61,33	62
	1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	63%	Persen	55,62	56,08	56,54	57,01	57,47
	1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	65%	Persen	56,11	56,67	57,22	57,78	58,33

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak (100%)	Persen	-	60	62,67	68,15	68,52
	1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	100%	Persen	-	-	-	83,56	83,59
	1.4.1.(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Persentase Rumah layak huni (0%)	Persen	-	5	4,67	4,33	4
	1.4.1.(g) Angka Partisi pasi Murni (APM) SD/ MI/ sederajat	94,78%	Persen	96,49	96,82	96,33	96,07	97,71
	1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/sederajat	82,20%	Persen	71,83	69,28	68,57	70,3	73,96
	1.4.1.(i) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ MA/sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C (91,63)	Persen	56,9	44,32	48,63	53,47	57,86
	1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran (77,4%)	Persen	77,4	77,4	77,4	77,4	77,4
	1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	100%	Persen	100	100	100	100	100
1.5.	1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Tidak Ada Target	Orang					
	1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	39 Daerah	Lokasi					
2.1.	2.1.1* Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence</i>)	Tidak Ada Target						

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	of Under nourishment)							
	2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (<i>under weight</i>) pada anak balita	Prevalensi Kurang Gizi anak balita (17%)	Persen	17	17	17	17	17
	2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Tidak Ada Target	Persen					
	2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kal/ kapita/ hari	8,50%	Persen	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
2.2.	2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita (tidak ada target)	Persen					
	2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Prevalensi Stunting pada anak Balita (28%)	Persen	28	28	28	28	28
	2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun (Tidak Ada Target)	Persen					
	2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil	Prevalensi anemia pada ibu hamil (28%)	Persen	28	28	28	28	28
	2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (50%)	Persen	-	20	22	24	26
2.3.	2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) (Tidak Ada Target)	Persen (Rupiah per Tenaga Kerja)	106,84	93,72	109,93	103,37	92,82
3.1.	3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin	Proporsi perempuan pernah kawin	Persen	95	95	95	95	95

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	puan pernah ka win umur 15-49 tahun yang proses mela hirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	umur 15-49 tahun yang proses mela hirkan terakhir nya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (95%)						
	3.1.2.(a)* Persentase perem puan per nah kawin umur 15-49 tahun yang proses me lahirkan terak hirnya di fasilitas kesehatan	Persentase perem puan pernah kawin umur 15-49 ta hun yang pro ses melahirkan terakhirnya di fasilitas kese hatan (85%)	Persen	85	85	85	85	85
3.2.	3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup (Tidak Ada Target)	Persen					
	3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	Angka Kema tian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahir an hidup (Tidak Ada Target)	Persen					
	3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Angka Kemat ian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hi dup (24 bayi)	Persen	24	24	24	24	24
	3.2.2.(b) Persentase kab/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Persentase kab/kota yang mencapai 80% imunisasi da sar lengkap pa da bayi (95%)	Persen	95	95	95	95	95
3.3.	3.3.3* Kejadian Malaria per 1.000 orang	Kejadian Malaria per 1.000 orang (Tidak Ada Target)						
	3.3.3.(a) Jumlah kab/ kota yang mencapai eliminasi malaria	Jumlah kab/kota yang mencapai eliminasi malaria (300)						
	3.3.4.(a) Persentase kab/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Persentase kab/ kota yang melaku kan deteksi dini untuk infeksi He patitis B (Tidak Ada Target)	Persen					
	3.3.5. Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Jumlah orang yang memer lukan inter vensi terhadap penyakit tropis yang terabai kan (Filariasis dan Kusta) (Tidak Ada Target)	Persen					

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	3.3.5.(a) Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta	Jumlah Kab/kota dengan eliminasi Kusta (7)	kabupaten/kota	7	7	7	7	7
	3.3.5.(b) Jumlah kab/ kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian trans misi tahap I).	Jumlah kab/ kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian trans misi tahap I) (35)	Kab/Kota					
3.4.	3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun (5,40%)		-	20	19,03	18,05	17,08
	3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi	Prevalensi tekanan darah tinggi (24,30%)	Persen	-	35	34,27	33,54	32,81
	3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun (15,40%)	Persen	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
	3.4.2* Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri (Tidak Ada Target)	Persen					
	3.4.2.(a) Jumlah kab/ kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa (280)	Kab./ Kota					
	3.5.1(a) Jumlah penyalahgunaan narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Tidak Ada Target	Orang					
3.5.	3.5.1(b) Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Tidak Ada Target	Orang					
	3.5.1(c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	210	Orang	-	-	30	42,86	55,71
	3.5.1(d)	85	Lembaga	-	-	10	15,36	20,71

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu							
	3.5.1(e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Tidak Ada Target	Persen					
3.7.	3.7.1. Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern (Min 4 jenis 85%)	Persen	85	85	85	85	85
	3.7.1(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin (66%)	Persen	66	66	66	66	66
	3.7.1(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern (23,50%)	Persen	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
	3.7.2. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR) (38)		38	38	38	38	38
	3.7.2(a) Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR) (2,28)		2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
3.8.	3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan	Unmet need pelayanan kesehatan (9,91%)	Persen	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91
	3.8.2. Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk (Tidak Ada Target)	Persen (Jiwa/1000)					

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	3.8.2(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Min 95%)	Persen	-	-	-	60	62,69
3.a.	3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun (Tidak Ada Target)	Persen					
3.b.	3.b.1.(a) Persentase keterse- diaan obat dan vak- sin di Puskesmas	Tidak Ada Target	Persen					
3.c.	3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (Tidak Ada Target)						
	4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B (84,20%)	Persen					69
	4.1.1.(b) Persentase SMP/ MTs berakreditasi minimal B.	Persentase SMP/ MTs berakreditasi minimal B (81%)	Persen					48
	4.1.1.(c) Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Persentase SMA/ MA berakreditasi minimal B/84,60%	Persen					47,7
	4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ sederajat (114,09%)	Persen	113,22	111,07	111,75	110,58	111,15
	4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat (106,94)	Persen	85,52	87,6	84,38	84,53	85,93
	4.1.1.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/se- derajat (91,63%)	Persen	75,51	76,41	79,1	82,88	82,21
	4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	(8,8 tahun)	Tahun	7,76	7,79	7,62	7,78	8,24
4.2.	4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Angka Partisipasi Kasar pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (77,20%)	Persen	-	28,51	29,13	30,25	39,44
4.3.	4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/ sederaja- t (91,63%)	Persen	75,51	76,41	79,1	82,88	82,21

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	4.3.1.(b) Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) (36,73%)	Persen	-	20	21,12	22,23	23,35
4.4.	4.4.1. Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan pilan teknologi informasi dan komunikasi	Tidak Ada Target	Persen		49,14	55,88	64,4	
4.5.	4.5.1* Rasio angka partisipasi Murni perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/ MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar perempuan/ laki-laki di (4) Perguruan Tinggi							
	Rasio APM Dan Rasio APK SD/MI		Persen		100,53	100,9	100,92	
	Rasio APM Dan Rasio APK SMP/ MTS		Persen		104,28	107,59	99,56	
	Rasio APM Dan Rasio APK SMA/MA		Persen		104,02	108,12	105,74	
	Rasio APM Dan Rasio APK PT		Persen		173,03	245,05	134,4	
4.6.	4.6.1(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun (96,10%)	Persen	96,1	97,63	97,66	97,79	
	4.6.1(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun							
	Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15-24 Tahun	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun	Persen		99,88	99,79	99,8	
	Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15-59 Tahun	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59 tahun	Persen		97,98	98,75	98,77	
4.c.	4.c.1* Persentase guru SMA yang bersertifikat pendidik	Persentase guru SMA yang bersertifikat pendidik (Tidak Ada Target)	Persen		93	93,4	95,1	96,9
5.1.	5.1.1*	16		-	-	1	2	3

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.							
5.2.	5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan (menurun tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan))		20,48	20,48	20,48	20,48	20,48
	5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif (70%)	Persen	70	70	70	70	70
5.3.	5.3.1* Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun (Tidak Ada Target)	Persen					
	5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun (21)	Tahun	21	21	21	21	21
	5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>) (38)		38	38	38	38	38
	5.3.1.(c) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat (91,63%)	Persen	75,51	76,41	79,1	82,88	82,21
5.5.	5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial (Tidak Ada Target)	Persen					
	5.6.1(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) (9,90%)	Persen	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
	5.6.1(b)	Pengetahuan dan	Persen	85	85	85	85	85

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern (85)						
5.b.	5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam (Tidak Ada Target)	Persen					
6.1.	6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (100%)	Persen	64,44	66,67	68,89	87,24	86,88
	6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau (118,6 m3/dtk; 60 pulau	m3/detik	118,6	118,6	118,6	118,6	118,6
6.2.	6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air (Tidak Ada Target)	Persen					
	6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (100%)	persen	76,47	77,94	79,41	84,21	87,11
	6.2.1.(c) Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (45.000)	Desa/Kelurahan					
	6.2.1.(d) Jumlah desa/ kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Jumlah desa/ kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) (Tidak Ada Target)	Desa/Kelurahan					
6.4.	6.4.1.(a) Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah (Tidak Ada Target)						
6.5.	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana	RPDAST	1	1	1	1	1

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)						
	6.5.1.(e) Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	Ha	8.744	8.743	8.744	1.574	4.164
7.1.	7.1.1* Rasio Elektrifikasi	Rasio elektrifikasi (96,60%)	Persen	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6
	7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita	Konsumsi listrik per kapita (1.200 KWh)		-	650	686,67	723,33	760
	7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga	Rasio penggunaan gas rumah tangga (Tidak Ada Target)						
8.1.	8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita	Laju pertumbuhan PDB per kapita (> 50 juta)		8,22	10,83	13,44	16,06	18,67
	8.1.1.(a) PDB per kapita	PDB per kapita (Tidak Ada Target)						
8.3.	8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin	Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin (Tidak Ada Target)						
	8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal	Persentase tenaga kerja formal (51%)	Persen	15	15	15	15	15
	8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian (Tidak Ada Target)	Persen					
8.5.	8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja	Upah rata-rata per jam pekerja (Tidak Ada Target)	persen					
	8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (Tidak Ada Target)	Persen					
	8.5.2.(a) Persentase setengah pengangguran	Persentase setengah pengangguran	Persen					
8.6.	8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak seko	Persen					

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	lah bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) (Tidak Ada Target)						
8.9.	8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara	20 juta	Orang	2.297	3.078	5.037	7.183	8.124
	8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantar	Tidak Ada Target	Orang	256.393	254.530	295.688	362.992	417.818
8.10.	8.10.1* a. Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa	Tidak Ada Target						
	8.10.1* b. Jumlah kantor Bank per 100.000 penduduk dewasa	Tidak Ada Target						
9.1.	9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan	Jumlah dermaga penyeberangan	Unit	4	4	3	3	3
9.2.	9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan perkapita.	Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan perkapita (Tidak Ada Target)	Persen					
	9.4.1.(a) Persentase Perubahan Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	Mendekati 26%	Persen	21,14	21,86	22,18	23,32	24,10
	9.c.1.(a) Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam	(Tidak Ada Target)	Persen					
	9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan Internet	(Tidak Ada Target)	Persen					
10.1.	10.1.1* Koefisien Gini	0,36		0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
	10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	7-8%	Persen	8	8	8	8	8
10.3.	10.3.1.(a) Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia	87	Point	-	81	81,4	81,8	82,2
10.4.	10.4.1.(b)	(62,4 jt pekerja	Jiwa					

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	formal, 3,5 jt perkerja informal)						
11.1.	11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	(18,6 juta)	Persen	-	-	-	89,81	90,16
11.2.	11.2.1.(a). Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Load Factor	Persen	48	36	36	32	24
11.4.	11.4.1.(a). Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metro politan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	(Tidak Ada Target)	kota					
	11.5.1.(a). Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	-30%	Indeks Risiko	-30	-30	-30	-30	-30
	11.5.1.(c). Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	(Tidak Ada Target)	EWS (titik)					
11.6.	11.6.1.(a). Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persentase sampah perkotaan yang tertangani (80%)	Persen	—	—	—	21,15	34,62
12.4	12.4.1.(a) Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru	(Tidak Ada Target)	Perusahaan	27	31	33	37	41
	12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	(150 juta ton)	Ton	-	---	-	---	24.928
12.5.	12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang di daur ulang	(Tidak Ada Target)	Ton	-	-	-	4.899,83	7.705,15
	13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	(Tidak Ada Target)	Orang					

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
14.2.	14.2.1 (a) Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional	(Tidak Ada Target)	Perda					
	14.2.1 (b) Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan	(Tidak Ada Target)	WPP	1	1	1	1	1
14.5.	14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan	(20 juta ha)	Ha	800.000,00	2.000.000,00	3.200.000,00	4.400.000,00	5.600.000,00
14.6.	14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha.	87%	UMKM	87	87	87	87	87
15.1.	15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Persen tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Persen	15,45	14,2	13,99	13,5	13,28
	15.2.1.(d) Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Unit	13	13	13	13	13
15.3.	15.3.1.(a). Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	(5,5 jt Ha)	Persen	8744	8743	8744	1574	4164
16.1.	16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	(Tidak Ada Target)	Persen					
	16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	(Tidak Ada Target)	Persen					
	16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	(Tidak Ada Target)	persen					
	16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	(Kementerian/ Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten: 60%, Kota: 65%)	Persen	85	85	85	85	85
	16.6.1.(b) Persentase peningkatan		Skor	55,08	60,69	61	63,65	67,17

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	tan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kab/Kota)							
	16.6.1.(a) Persentase data dan informasi pengadaan barang/jasa yang dikelola dan dipublikasikan berbasis IT	PL baru tahun 2018 (90%)	Persen	—	—	—	90	90
	16.6.1.(b) Persentase RPP siap lelang yang selesai ditangani ULP	PL baru tahun 2018 (90%)	Persen	—	—	—	90	90
	16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan barang.	PL baru tahun 2018 (90%)	Persen				90	90
	16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Persen	8,89	6,67	6,67	4,44	6,67
	17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	(di atas 12%)	Persen	4,89	5,33	5,78	6,22	6,67
	17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	(Tidak Ada Target)	Persen					
17.8.	17.8.1* Proporsi individu yang menggunakan internet	(Tidak Ada Target)	persen					
	17.8.1.(a) Persentase kab 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet	(Tidak Ada Target)	Persen					
17.18.	17.18.1.(a) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	(Tidak Ada Target)	Persen					

2.1.6 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut, diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Dalam penerapan SPM juga harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pelayanan dasar dalam SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Sosial. Penerapan dan pencapaian SPM dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 secara rinci sebagai berikut:

A. Urusan Pendidikan

SPM Urusan Pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun jenis pelayanan dasar untuk Urusan Pendidikan antara lain:

- Pendidikan menengah dengan indikator pencapaian yaitu jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah;
- Pendidikan khusus dengan indikator pencapaian jumlah warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus.

Sedangkan realisasi pencapaian SPM untuk Urusan Pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel II. 58
SPM Urusan Pendidikan

N o.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi		
			2018	2019	2020
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	-	37.154 orang/ 62,5%	57.427 Orang/ 81,68%

2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	-	1.089 orang/ 85,34%	2.239 Orang/ 58,24%
3.	Pendidikan Kejuruan	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi	-	0	57.427 Orang/ 81,68%

B. Urusan Kesehatan

SPM Urusan Kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun jenis pelayanan dasar untuk urusan kesehatan antara lain:

- Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan.
- Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi dengan indikator jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan.

Sedangkan realisasi pencapaian SPM untuk Urusan Kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel II. 59
SPM Urusan Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi		
			2018	2019	2020
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan	-	47 orang/ 100%	13.930 Orang/ 100%
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	-	863 orang/ 100%	330 Orang/ 100%

C. Urusan Pekerjaan Umum

SPM Urusan Pekerjaan Umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk Urusan Pekerjaan Umum antara lain:

- a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota;
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Sedangkan realisasi pencapaian SPM untuk Urusan Pekerjaan Umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel II. 60
SPM Urusan Pekerjaan Umum

N o.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi		
			2018	2019	2020
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	0	0	88,33%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaen/Kota	0	0	89,10%

Realisasi capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih belum ada capaian dikarenakan belum adanya SPAM regional dan SPALD regional yang terbangun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga sulit untuk direalisasikan.

D. Urusan Perumahan Rakyat

SPM Urusan Perumahan Rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk Urusan Perumahan Rakyat antara lain:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sedangkan realisasi pencapaian SPM untuk Urusan Perumahan Rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel II. 61
SPM Urusan Perumahan Rakyat

N o.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi		
			2018	2019	2020
1.	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	90,16%	-	-
		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	0	-	-
2	Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	0	-	-
3.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	0	276 Unit/ 100%	0
4.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Rumah yang Layak Huni Bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	-	0	730 Unit/ 100%

Pada tahun 2018 masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sehingga jenis layanan dasar adalah Rumah Layak Huni dan Terjangkau dan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tercantum dalam lampirannya, bahwa ketersediaan rumah layak huni bukan menjadi kewenangan Provinsi. Sedangkan ruang lingkup pelaksanaan terkait ketersediaan rumah layak huni yang dilaksanakan oleh Provinsi hanya terbatas pada lokasi permukiman kumuh dengan luasan 10 – 15 ha dan pada Kawasan Strategis Provinsi (KSP).

Sedangkan pada tahun 2019 sudah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang lebih lanjut penerapan Standar Pelayanan Minimal diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pada tahun 2019 dan 2020 menggunakan layanan dasar Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

E. **Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan Perkada di provinsi.

Sedangkan realisasi pencapaian SPM untuk Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel II. 62
SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

N o.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi		
			2018	2019	2020
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	-	0	-
2.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	-	-	0
3	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	-	-	22.635 Perda/ 100%

F. **Urusan Sosial**

SPM Urusan Sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan sosial antara lain:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti sosial dengan indikator capaian jumlah warga negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti sosial dengan indikator pencapaian jumlah warga negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;

- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti sosial dengan indikator pencapaian jumlah warga negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti sosial dengan indikator pencapaian jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Sedangkan realisasi pencapaian SPM untuk Urusan Sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel II. 63
SPM Urusan Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi		
			2018	2019	2020
1.	Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala provinsi	Persentase PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	90,26 %	-	-
2.	Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti sosial skala provinsi	Persentase Panti Sosial skala provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial	95,12 %	-	-
3.	Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala provinsi	Persentase panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	99,89 %	-	-
4.	Penyediaan sarana prasarana luar panti skala provinsi	Persentase organisasi sosial/yayasan/LSM yang menyediakan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti	100 %	-	-
5.	Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi	Persentase kabupaten/ kota yang memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi	89,35 %	-	-
6.	Evaluasi korban bencana skala provinsi	Persentase kabupaten/ kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi	99,00%	-	-
7.	Penyelenggaraan jaminan sosial skala provinsi	Persentase kabupaten/ kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	82,36 %	-	-

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi		
			2018	2019	2020
8.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapat kan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	-	15 Orang/ 75%	18 Orang/ 90%
9.	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial;	Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapat kan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	-	16 Orang/ 106.675	27 Orang/ 112,5%
10.	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	-	4 Orang/ 80%	6 Orang/ 100%
11.	Rehabilitasi Sosial tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial; dan	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabili tasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	-	0	0
12.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.		Bencana Alam 292 Orang/ 87,43% Bencana sosial 9 Orang/ 100%	18 Orang/100%

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kemampuan keuangan di suatu daerah adalah kunci utama dalam merealisasikan perencanaan dan pembangunan, dalam tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk, besaran dana perimbangan yang diterima, serta keikutsertaan investor dan dunia usaha sebagai sumber dana perimbangan program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk didalamnya kinerja keuangan pada periode sebelumnya dan kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Hasil analisis juga digunakan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi lima tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah itu sendiri.

3.1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014-2018

Kemampuan keuangan di suatu daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Terkait dengan peraturan yang ada, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi antara belanja daerah serta pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Secara umum kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014-2018 menunjukkan peran APBD sebagai stimulus kinerja pembangunan daerah telah berkontribusi dalam mendukung pencapaian target-target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Arah Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang tepat menjadi kunci kinerja pelaksanaan APBD yang optimal.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

3.1.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam periode 2014–2018, pendapatan daerah secara keseluruhan meningkat dari Rp 1.719.774.423.456,42 pada tahun 2014 menjadi Rp2.556.977.711.924,35 pada tahun 2018. Berdasarkan pencapaian realisasi pendapatan daerah terhadap target pendapatan daerah, maka selama kurun waktu 5 tahun, rata-rata realisasi pendapatan daerah 98,41%, sebagaimana disajikan pada Tabel III.1.

Tabel III.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Provinsi Bangka Belitung Tahun 2014-2018

Uraian	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	1.722.417.070.217,83	1.719.774.423.456,42	99,85%
2015	1.918.085.118.953,54	1.886.998.635.504,14	98,38 %
2016	2.017.171.126.824,26	1.949.866.524.266,77	96,66%
2017	2.386.297.015.485,16	2.251.024.652.420,48	94,33%
2018	2.487.065.640.565,87	2.556.977.711.924,35	102,81%
Rata-rata	2.106.207.194.409,00	2.072.928.389.514,00	98,42 %

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Persentase pencapaian pendapatan daerah menurun dari tahun 2014-2017. Sedangkan pada tahun 2018 persentase pencapaian pendapatan daerah meningkat daripada tahun 2017. Walaupun secara keseluruhan realisasi pendapatan terus mengalami peningkatan dari tahun 2014-2018.

Kontribusi Pendapatan Daerah ada 3 (tiga) komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Gambaran perkembangan angka-angka capaiannya dari ketiga komponen sumber pendapatan daerah tersebut dari tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.2
Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2014-2018

Uraian	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Pencapaian	Kontribusi Terhadap Pendapatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan Asli Daerah				
2014	556.742.867.297,83	563.108.840.861,42	101,14%	32,74%
2015	558.971.218.953,54	571.802.890.055,14	102,30%	30,30%
2016	581.397.810.824,26	574.258.443.819,77	98,77%	29,45%

Uraian	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Pencapaian	Kontribusi Terhadap Pendapatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2017	737.192.092.935,16	709.832.181.818,48	96,29%	31,53%
2018	789.629.819.565,87	850.441.774.831,35	107,70%	33,26%
Rata-rata	644.786.761.915	653.888.826.277	101,41 %	31,54 %
Dana Perimbangan				
2014	1.034.374.722.920,00	1.025.142.797.595,00	99,11%	59,61%
2015	1.179.487.500.000,00	1.130.400.495.449,00	95,84%	59,90%
2016	1.430.773.316.000,00	1.126.284.913.345,00	78,72%	57,76%
2017	1.619.104.922.550,00	1.539.960.002.502,00	95,11%	68,41%
2018	1.685.118.643.150,00	1.694.218.759.243,00	100,54%	66,26%
Rata-rata	1.389.771.820.924,00	1.303.201.393.627,00	93,77 %	62,80%
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah				
2014	131.299.480.000,00	131.522.785.000,00	100,17%	7,65%
2015	179.626.400.000,00	184.795.250.000,00	102,88%	9,79%
2016	5.000.000.000,00	249.323.167.102,00	4986,46%	12,79%
2017	30.000.000.000,00	1.232.468.100,00	4,11%	0,05%
2018	12.317.177.850,00	12.317.177.850,00	100,00%	0,48%
Rata-rata	71.648.611.570,00	115.838.169.610,00	161,67 %	5,58%

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Jika dilihat dari sumber dananya dalam 5 tahun terakhir, Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah rata-rata sebesar 31,54 %, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk kategori sedang. Kemudian dana perimbangan memberikan sumbangan rata-rata sebesar 62,80 %, hal ini berarti ketergantungan pendanaan dari pemerintah pusat masih relatif besar, sehingga daerah masih tetap besar ketergantungannya atas peningkatan fiskal nasional.

Kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan, dapat dilihat dari rasio PAD terhadap realisasi belanja. PAD mampu membiayai rata-rata 31,47% dari kebutuhan belanja. Sedangkan dana perimbangan berkontribusi rata-rata sebesar 59,43%. Namun demikian, selama periode 2014-2018, trend kontribusi PAD terhadap APBD dari tahun 2014 ke tahun 2018 berfluktuatif. Peran terbesar adalah di tahun 2018, sebesar 33,26%. Artinya peningkatan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan harus ditingkatkan.

Tabel III.3
Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pembiayaan Pembangunan
Tahun Anggaran 2014-2018

Uraian	Realisasi	Realisasi	Kemampuan (%)
	Pendapatan	Belanja	
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Asli Daerah			
2014	556.742.867.297,83	563.108.840.861,42	101,14%
2015	558.971.218.953,54	571.802.890.055,14	102,30%
2016	581.397.810.824,26	574.258.443.819,77	98,77%
2017	737.192.092.935,16	709.832.181.818,48	96,29%
2018	789.629.819.565,87	850.441.774.831,35	107,70%
Rata-Rata			31,47
Dana Perimbangan			
2014	1.034.374.722.920,00	1.025.142.797.595,00	99,11%
2015	1.179.487.500.000,00	1.130.400.495.449,00	95,84%
2016	1.430.773.316.000,00	1.126.284.913.345,00	78,72%
2017	1.619.104.922.550,00	1.539.960.002.502,00	95,11%
2018	1.685.118.643.150,00	1.694.218.759.243,00	100,54%
Rata-Rata			59,43
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah			
2014	131.299.480.000,00	131.522.785.000,00	100,17%
2015	179.626.400.000,00	184.795.250.000,00	102,88%
2016	5.000.000.000,00	249.323.167.102,00	4986,46%
2017	30.000.000.000,00	1.232.468.100,00	4,11%
2018	12.317.177.850,00	12.317.177.850,00	100,00%
Rata-Rata			9,46

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Dari data diatas terlihat bahwa kemampuan pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja untuk pegawai, program pembangunan dan kegiatan masih kecil, yaitu rata-rata 31,47% selama 2014-2018.

(1.) Pendapatan Asli Daerah

Selama Periode 2014-2018 angka tersebut realisasi PAD mengalami peningkatan. Hal ini diperoleh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Realisasi PAD sampai dengan tahun 2018 menurut jenis PAD dapat dilihat pada Tabel III.4.

Tabel III.4
Realisasi PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
sampai dengan 2018 menurut jenis PAD

No.	Sumber Pendapatan	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4:3)	(6=4-3)
1	Pajak daerah	669.996.399.762,00	787.235.420.038,83	117,5	117.239.020.276,83
2	Retribusi Daerah	16.438.195.604,87	7.613.352.047,00	46,32	(8.824.843.557,87)
3	Hasil PMD & Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.500.000.000,00	5.114.092.291,88	6,17	(3.385.907.708,12)
4	Lain-lain PAD yang Sah	94.695.224.199,00	50.478.910.453,64	53,31	(44.216.313.745,36)
	Jumlah	789.629.819.565,87	850.441.774.831,35	107,70	60.811.955.265,48

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

a. Pajak Daerah

Secara umum realisasi Pajak Daerah Tahun 2014-2018 tergambar pada Tabel III.5. Perkembangan hasil pajak daerah dari tahun 2014 sampai tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.5
Target dan Realisasi Pajak Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4=3:2)
2014	499.202.994.535,74	508.262.616.895,88	101,81
2015	500.844.014.371,82	506.944.936.060,22	101,22
2016	509.130.376.289,67	507.983.460.531,72	99,77
2017	578.237.062.209,57	629.136.457.212,39	108,80
2018	669.996.399.762,00	787.235.420.038,83	117,50
Jumlah	2.757.410.847.168,80	2.939.562.890.739,04	106,61

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan data pada tabel III.5 di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2014, 2015, 2017 dan 2018 persentase pajak daerah memenuhi target dan realisasi pada tahun tersebut meningkat daripada target yang telah ditetapkan. Kenaikan ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam pemutihan pajak kendaraan bermotor baik roda 2 maupun 4. Pada tahun 2016, realisasi pajak daerah lebih kecil daripada target yang telah ditetapkan tetapi persentase sudah 99,77 %.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada kepentingan pribadi atau badan, baik yang bersifat pelayanan umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Retribusi daerah mempunyai potensi untuk dikembangkan, karena kinerjanya bersifat pemenuhan atas permintaan berbagai jenis pelayanan yang diberikan Pemerintah Provinsi kepada masyarakat. Perkembangan realisasi Retribusi Daerah 2014-2018, dapat dilihat pada Tabel III.6.

Tabel III.6
Target dan Realisasi Retribusi Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4=3:2)
2014	5.901.678.950,00	9.357.405.765,00	158,55
2015	8.445.970.286,00	11.520.365.059,00	136,40
2016	8.886.514.493,56	8.651.866.891,72	97,36
2017	19.409.736.914,87	5.434.540.818,00	28,00
2018	16.438.195.604,87	7.613.352.047,00	46,32
JUMLAH	59.082.096.249,30	42.577.530.580,72	72,07

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Pada komponen retribusi daerah, selama periode 2014–2017 persentase retribusi daerah mengalami penurunan dari 158,55 % menjadi 28 %. Penurunan realisasi ini terjadi karena pada tahun 2017, RS Jiwa dan Propinsi menjadi BLUD dan tidak menjadi objek pajak seperti pada realisasi tahun 2016. Pada tahun 2018, persentase realisasi retribusi daerah mengalami peningkatan daripada pada tahun 2017 yaitu dari 28 % menjadi 46,32 %. Selain itu, realisasi pada tahun 2018 mengalami kenaikan daripada tahun 2018 walaupun tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Kenaikan ini disebabkan oleh perubahan perda retribusi dengan mencantumkan objek pajak baru.

c. Hasil PMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, diperoleh dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada perusahaan swasta. Realisasi penerimaan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah selama periode 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel III.7.

Tabel III.7
Realisasi Hasil PMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4=3:2)
2014	7.500.000.000,00	1.205.926.846,39	16,08
2015	7.500.000.000,00	5.243.416.236,78	69,91

2016	5.613.342.583,77	5.613.342.582,77	100,00
2017	8.500.000.000,00	5.306.417.427,05	62,43
2018	8.500.000.000,00	5.114.092.291,88	60,17
JUMLAH	37.613.342.583,77	22.483.195.384,87	59,77

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Selama kurun waktu 2014-2018 Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah rata-rata 59,77%. Ditahun 2016 pernah mencapai 100%. Artinya upaya peningkatan harus senantiasa dilakukan agar realisasi hasil PMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat mencapai target. Penurunan realisasi hasil PMD dan pengelolaan kekayaan pada tahun 2018 disebabkan oleh adanya pemutihan pajak kendaraan baik motor maupun mobil.

d. Lain-lain PAD yang sah

Penerimaan Lain-lain PAD merupakan komponen penerimaan yang tidak termasuk pada pajak daerah, retribusi daerah dan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Penerimaan lain-lain PAD utamanya bersumber dari Penerimaan Jasa Giro, Rekening Deposito pada bank dan Rupa-rupa Pendapatan. Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD 2014-2018, secara rata-rata melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 71,61%, penurunan realisasi terjadi mulai tahun 2016 dari sebelumnya di tahun 2015 sebesar 114,02% menjadi 90,03% dan pada tahun 2018 realiasi lain-lain PAD mencapai 53,31%, realisasi sebagaimana tersebut masih berada dibawah target sehingga masih perlu dilakukan upaya peningkatan lebih lanjut. Adapun realiasasi lain-lain PAD adalah sebagaimana tertera pada Tabel III.8.

Tabel III.8
Realisasi Lain-lain PAD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2016

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4=3:2)</i>
2014	44.138.193.812,09	44.282.891.354,15	100,33
2015	42.181.234.295,72	48.094.172.699,14	114,02
2016	57.767.577.457,26	52.009.773.813,56	90,03
2017	131.045.293.810,72	69.954.766.361,04	53,38
2018	94.695.224.199,00	50.478.910.453,64	53,31
Jumlah	369.827.523.574,79	264.820.514.681,53	71,61

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

(2.) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan kepada Daerah untuk pendanaan penyelenggaraan desentralisasi. Dana Perimbangan ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah. Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2014-2017 masih dibawah target, sedangkan Tahun 2018 sudah mencapai target sebesar 100,54 % dengan rincian sebagaimana yang dapat dilihat pada Table III.9. Peningkatan ini disebabkan oleh pemerintah pusat melakukan pembayaran kurang bayar DBA sumber daya alam tahun anggaran 2017.

Tabel III.9
Realisasi Dana Perimbangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4=3:2)	(5=3-2)
2014	1.034.374.722.920,00	1.025.142.797.595,00	99,11	(9.231.925.325,00)
2015	1.179.487.500.000,00	1.130.400.495.449,00	95,84	(49.087.004.551,00)
2016	1.430.773.316.000,00	1.126.284.913.345,00	78,72	(304.488.402.655,00)
2017	1.619.104.922.550,00	1.537.241.446.289,00	94,94	(81.863.476.261,00)
2018	1.684.392.043.000,00	1.694.218.759.243,00	100,58	9.826.716.243,00
JUMLAH	6.948.859.104.620,00	6.516.006.968.134,00	93,77	(434.844.092.549,00)

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Dana perimbangan ini terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi Hasil Pajak merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi, sedangkan Bagi Hasil Bukan Pajak merupakan komponen pendapatan daerah yang meliputi Bagi Hasil dari Sumber Daya Hutan dan Bagi Hasil dari Pertambangan. Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2014-2018, dapat dilihat pada Tabel III.10.

Tabel III.10
Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2014	184.182.116.920,00	174.950.191.595,00	94,99
2015	226.155.287.000,00	188.157.236.449,00	83,20
2016	130.875.389.000,00	142.860.016.345,00	109,16
2017	175.828.126.000,00	120.836.218.678,00	68,72
2018	188.486.286.150,00	215.555.879.603,00	114,36
JUMLAH	905.527.205.070,00	842.359.542.670,00	93,02

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Berdasarkan tabel 3.10 di atas dapat terlihat bahwa secara rata-rata realisasi pada komponen Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 93,02 persen, dengan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 114,36 persen dari target. Peningkatan ini disebabkan oleh pembayaran kurang bayar oleh pemerintah pusat terhadap DBH sumber daya alam tahun anggaran 2017.

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun realisasi DAU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2014-2018 adalah sebagaimana yang terlihat pada Tabel III.11.

Tabel III.11

Dana Alokasi Umum / Penyeimbang DAU
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2014	806.820.146.000,00	806.820.146.000,00	100,00
2015	897.887.443.000,00	897.887.443.000,00	100,00
2016	905.526.208.000,00	905.526.208.000,00	100,00
2017	987.556.919.550,00	980.297.314.000,00	99,26
2018	1.018.673.218.000,00	1.018.435.174.809,00	99,98
Jumlah	4.616.463.934.550,00	4.608.966.285.809,00	99,83

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan tabel III.11, dapat dijelaskan bahwa DAU selama tahun 2014-2018 secara rata-rata sebesar 99.83 persen. Upaya peningkatan DAU secara terus menerus dilakukan, antara lain secara bersama-sama dengan provinsi yang tergabung dalam Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk memasukkan luas wilayah laut sebagai dasar perhitungan alokasi DAU ke daerah, disamping pemberian dana khusus kemahalan membangun di daerah kepulauan.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Realisasi DAK dari Tahun 2014-2018 sebesar 74,61 persen, menurun pada Tahun 2015 sebesar 80 persen dan Tahun 2016 realisasi hanya mencapai 19,75 persen. Hal ini bukan disebabkan karena kurangnya alokasi yang diberikan Pemerintah Pusat, namun karena adanya beberapa kegiatan yang telah direncanakan dan mendapat alokasi DAK tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, kenaikan realisasi DAK mengalami peningkatan kembali pada tahun 2017 dan 2018, sehingga rata-rata realisasi

DAK dari tahun 2014 s.d 2018 sebesar 74,61 persen. Secara periodik, realisasi DAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2014-2018 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel III.12.

Tabel III.12
Realisasi Pos Dana Alokasi Khusus
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2014	43.372.460.000,00	43.372.460.000,00	100,00
2015	55.444.770.000,00	44.355.816.000,00	80,00
2016	394.371.719.000,00	77.898.689.000,00	19,75
2017	455.719.877.000,00	438.826.469.824,00	96,29
2018	477.959.139.000,00	460.227.704.831,00	96,29
Jumlah	1.426.867.965.000,00	1.064.681.139.655,00	74,61

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

(3.) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID), Bidang Infrastruktur Jalan, Dana Penyesuaian Percepatan Infrastruktur Daerah (PPID), dan Sumbangan Pihak Ketiga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2014-2018 mengalami peningkatan. Kenaikan yang sangat signifikan pada Tahun 2016 sebesar 4.974,33 persen yang bersumber dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Adapun Lain-lain Pendapatan Yang Sah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2014-2018 adalah sebagaimana tergambar pada Tabel III.13.

Tabel III.13
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
1	2	3	4 = 3 : 2	5 = 3 - 2
2014	131.299.480.000,00	131.522.785.000,00	100,17	223.305.000,00
2015	179.626.400.000,00	184.795.250.000,00	102,88	5.168.850.000,00
2016	5.000.000.000,00	249.323.167.102,00	4986,46	244.323.167.102,00
2017	30.000.000.000,00	1.232.468.100,00	4,11	(28.767.531.900,00)
2018	12.317.177.850,00	12.317.177.850,00	100,00	0
Jumlah	358.243.057.850,00	579.190.848.052,00	161,67	220.947.790.202,00

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah selama kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel III.14.

Tabel III.14
Target dan Realisasi
Pendapatan Daerah Tahun 2014 s/d Tahun 2018

No	Uraian	2014		2015		2016		2017		2018	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2		3		4		5		6		7
1	PENDAPATAN	1.722.417.070.217,83	1.719.774.423.456,42	1.918.085.118.953,54	1.886.998.635.504,14	2.017.171.126.824,26	1.949.866.524.266,77	2.386.297.015.485,16	2.251.024.652.420,48	2.487.065.640.565,87	2.556.977.711.924,35
1.1	Pendapatan Asli Daerah	556.742.867.297,83	563.108.840.861,42	558.971.218.953,54	571.802.890.055,14	581.397.810.824,26	574.258.443.819,77	737.192.092.935,16	709.832.181.818,48	789.629.819.565,87	850.441.774.831,35
1.1.1	Pajak Daerah	499.202.994.535,74	508.262.616.895,88	500.844.014.371,82	506.944.936.060,22	509.130.376.289,67	507.983.460.531,72	578.237.062.209,57	629.136.457.212,39	669.996.399.762,00	787.235.420.038,83
1.1.2	Retribusi Daerah	5.901.678.950,00	9.357.405.765,00	8.445.970.286,00	11.520.365.059,00	8.886.514.493,56	8.651.866.891,72	19.409.736.914,87	5.434.540.818,00	16.438.195.604,87	7.613.352.047,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	7.500.000.000,00	1.205.926.846,39	7.500.000.000,00	5.243.416.236,78	5.613.342.583,77	5.613.342.582,77	8.500.000.000,00	5.306.417.427,05	8.500.000.000,00	5.114.092.291,88
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	44.138.193.812,09	44.282.891.354,15	42.181.234.295,72	48.094.172.699,14	57.767.577.457,26	52.009.773.813,56	131.045.293.810,72	69.954.766.361,04	94.695.224.199,00	50.478.910.453,64
1.2	Dana Perimbangan	1.034.374.722.920,00	1.025.142.797.595,00	1.179.487.500.000,00	1.130.400.495.449,00	1.430.773.316.000,00	1.126.284.913.345,00	1.619.104.922.550,00	1.537.241.446.289,00	1.684.392.043.000,00	1.694.218.759.243,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	184.182.116.920,00	174.950.191.595,00	226.155.287.000,00	188.157.236.449,00	130.875.389.000,00	142.860.016.345,00	175.828.126.000,00	120.836.218.678,00	188.486.286.150,00	215.555.879.603,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	806.820.146.000,00	806.820.146.000,00	897.887.443.000,00	897.887.443.000,00	905.526.208.000,00	905.526.208.000,00	987.556.919.550,00	980.297.314.000,00	1.018.673.218.000,00	1.018.435.174.809,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	43.372.460.000,00	43.372.460.000,00	55.444.770.000,00	44.355.816.000,00	394.371.719.000,00	77.898.689.000,00	455.719.877.000,00	438.826.489.824,00	477.959.139.000,00	460.227.704.831,00
01.03	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	131.299.480.000,00	131.522.785.000,00	179.626.400.000,00	184.795.250.000,00	5.000.000.000,00	249.323.167.102,00	30.000.000.000,00	1.232.468.100,00	12.317.177.850,00	12.317.177.850,00

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Dari data tabel III.14 menunjukkan bahwa pendapatan daerah dan realisasi meningkat dalam kurun waktu dari tahun 2014-2018. Pada tahun 2018, terjadi peningkatan realisasi pendapatan daripada target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari sektor pajak kendaraan. Selain itu, realisasi retribusi daerah tidak mencapai target yang ditetapkan karena ada perubahan pada objek pajak dan perubahan perda tentang objek retribusi pajak baru.

3.1.1.2. Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah pada periode 2014–2018 dipergunakan untuk upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, baik fisik maupun non fisik yang dijabarkan dalam periode perencanaan pembangunan setiap tahun (RKPD) atas dasar RPJMD 2012-2017 yang telah disusun sebelumnya. Pemahaman terhadap tantangan pembangunan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dituangkan dalam visi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yaitu: ***“Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”***. Mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan kondisi daerah, maka misi pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2017–2022 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;
2. Mewujudkan Infrastruktur Dan Konektivitas Daerah Yang Berkualitas;
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Handal;
4. Peningkatan Kesehatan Masyarakat;
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Serta Pembangunan Demokrasi; dan
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup

Untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah tersebut telah dilakukan upaya-upaya antara lain dengan mengintensifkan segala sektor pendapatan yang dapat dijadikan sumber daya untuk membiayai pembangunan tersebut.

Kinerja Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu 2014-2018 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel III.15.

Tabel III.15
Target dan Realisasi Belanja Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Sisa
1	2	3	4 = 3 : 2	5 = 2 - 3
2014	1.924.383.150.881,78	1.596.086.858.479,20	82,94	328.296.292.402,58
2015	2.226.354.387.053,48	1.869.958.486.295,70	83,99	356.395.900.757,78

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Sisa
1	2	3	4 = 3 : 2	5 = 2 - 3
2016	2.354.864.921.673,87	2.069.868.292.386,32	87,90	284.996.629.287,55
2017	2.598.989.042.215,22	2.359.078.163.818,47	90,77	239.910.878.396,75
2018	2.596.704.155.898,11	2.364.345.563.586,80	91,05	232.358.592.311,31
Jumlah	11.701.295.657.722,50	10.259.337.364.566,50	87,67	1.441.958.293.155,97

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan tabel III.15, dapat dijelaskan bahwa pada periode 2014-2018 jumlah anggaran yang dialokasikan dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan berjumlah Rp11.701.295.657.722,50 dengan realisasi sebesar Rp10.259.337.364.566,50 atau 87,67 persen. Kemampuan membelanjakan anggaran yang tersedia rata-rata baru 87,67%. Artinya masih besar jumlah anggaran yang tersisa setiap tahunnya.

(1.) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2014-2018 sebesar Rp6.437.458.376.321,03 dengan realisasi sebesar Rp5.836.262.998.556,47 atau 90,66 persen, sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.16.

Tabel III.16
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Sisa
1	2	3	4 = 3 : 2	5 = 2 - 3
2014	1.016.409.393.479,78	855.780.981.423,84	84,20	160.628.412.055,94
2015	1.228.793.606.173,98	1.080.851.837.395,72	87,96	147.941.768.778,26
2016	1.311.959.122.367,45	1.209.394.930.768,63	92,18	102.564.191.598,82
2017	1.419.103.316.979,96	1.330.059.029.641,26	93,73	89.044.287.338,70
2018	1.461.192.937.319,86	1.360.176.219.327,02	93,09	101.016.717.992,84
Jumlah	6.437.458.376.321,03	5.836.262.998.556,47	90,66	601.195.377.764,56

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2014-2018 sebesar Rp2.453.614.832.741,73 dengan realisasi sebesar Rp 2.263.500.122.984,53 atau 92,25 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.17.

Tabel III.17
Realisasi Belanja Pegawai
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2014	303.779.760.640,61	274.339.635.936,42	90,31
2015	347.016.633.146,16	312.375.890.443,08	90,02
2016	429.926.074.527,94	396.188.131.149,20	92,15
2017	667.619.827.029,36	620.836.142.868,21	92,99
2018	705.272.537.397,66	659.760.322.587,62	93,55
Jumlah	2.453.614.832.741,73	2.263.500.122.984,53	92,25

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

b. Belanja Bunga

Belanja Bunga dalam APBD selama tahun 2014-2018 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasinya.

c. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2014-2018 hanya dianggarkan pada Tahun 2016 sebesar Rp1.000.000.000,- dan tahun 2018 sebesar Rp812.500.000,- namun tidak terealisasi sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.18.

Tabel III.18
Realisasi Belanja Subsidi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2014	-	-	-
2015	-	-	-
2016	1.000.000.000,00	-	-
2017	-	-	-
2018	812.500.000,00	-	-
Jumlah	1.812.500.000,00	-	0,00

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

d. Belanja Hibah

Belanja Hibah dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun 2014-2018 sebesar Rp1.443.657.679.636,20 dengan realisasi sebesar Rp1.350.778.103.674 atau 93,56 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.19.

Tabel III.19
Realisasi Belanja Hibah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2014	203.224.437.112,00	167.022.782.500,00	82,19
2015	289.428.845.000,00	257.790.335.224,00	89,07
2016	407.111.744.574,00	403.743.237.430,00	99,17
2017	262.214.900.000,00	254.263.301.000,00	96,97
2018	281.677.752.950,20	267.958.447.520,00	95,13
Jumlah	1.443.657.679.636,20	1.350.778.103.674,00	93,56

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2014-2018 sebesar Rp4.920.410.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.308.335.000,00 atau 67,23 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.20.

Tabel III.20
Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2014	1.030.000.000,00	745.500.000,00	72,38
2015	1.228.500.000,00	666.700.000,00	54,27
2016	1.000.000.000,00	717.060.000,00	71,71
2017	943.000.000,00	700.000.000,00	74,23
2018	718.910.000,00	479.075.000,00	66,64
Jumlah	4.920.410.000,00	3.308.335.000,00	67,23

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2014-2018 sebesar Rp1.363.432.322.141,92 dengan realisasi sebesar Rp1.284.426.197.709,73 atau 94,20 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.21.

Tabel III.21
Realisasi Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2014	233.243.093.633,99	212.859.716.663,42	91,26
2015	332.323.833.855,82	303.413.474.847,19	91,30
2016	157.738.163.425,51	156.076.110.183,43	98,95
2017	362.199.953.426,60	351.012.561.851,05	96,91
2018	277.927.277.800,00	261.064.334.164,64	93,93
Jumlah	1.363.432.322.141,92	1.284.426.197.709,73	94,20

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

g. Belanja Bantuan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa

Belanja Bantuan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2014-2018 sebesar Rp1.142.903.775.642,00 dengan realisasi sebesar Rp932.605.492.319,76 atau 81,59 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.22.

Tabel III.22
Realisasi Belanja Bantuan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2014	265.398.559.934,00	200.796.461.884,00	75,66
2015	256.078.694.172,00	206.510.260.515,00	80,64
2016	312.183.139.840,00	251.916.010.142,00	80,69
2017	116.755.422.524,00	102.528.477.024,00	87,81
2018	192.487.959.172,00	170.854.282.754,76	88,76
Jumlah	1.142.903.775.642,00	932.605.492.319,76	81,59

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

h. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2014-2018 sebesar Rp27.116.856.159,18 dengan realisasi sebesar Rp1.644.746.868,45 atau 6,06 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.23.

Tabel III.23
Realisasi Belanja Tidak Terduga
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = 3 : 2</i>
2014	9.733.542.159,18	16.884.440,00	0,17
2015	2.717.100.000,00	95.176.366,45	3,50
2016	3.000.000.000,00	754.381.864,00	25,15
2017	9.370.214.000,00	718.546.898,00	7,67
2018	2.296.000.000,00	59.757.300,00	2,60
Jumlah	27.116.856.159,18	1.644.746.868,45	6,06

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

(2.) Belanja Langsung

Belanja Langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014-2018 yang digunakan sebagai belanja pembangunan dianggarkan sebesar Rp5.263.837.281.401,43 dengan realisasi sebesar Rp4.423.074.366.010,02 atau 84,02 persen, sebagaimana yang dapat terlihat pada Tabel III.24.

Tabel III.24
Realisasi Belanja Langsung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = 3 : 2</i>
2014	907.973.757.402,00	740.305.877.055,36	81,53
2015	997.560.780.879,50	789.106.648.899,98	79,10
2016	1.042.905.799.306,42	860.473.361.617,69	82,51
2017	1.179.885.725.235,26	1.029.019.134.177,21	87,21
2018	1.135.511.218.578,25	1.004.169.344.259,78	88,43
Jumlah	5.263.837.281.401,43	4.423.074.366.010,02	84,02

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2014-2018 sebesar Rp471.215.989.010,00 dengan realisasi sebesar Rp 432.048.966.710,94 atau 91,68 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.25.

Tabel III.25
Realisasi Belanja Pegawai
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = 3 : 2</i>
2014	78.574.583.300,00	70.712.733.013,01	89,99
2015	92.273.195.330,00	81.446.272.543,00	88,27
2016	105.050.534.080,00	99.601.380.686,93	94,81
2017	152.558.482.700,00	143.373.444.944,00	93,98
2018	42.759.193.600,00	36.915.135.524,00	86,33
Jumlah	471.215.989.010,00	432.048.966.710,94	91,68

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun 2014-2018 sebesar Rp3.013.318.701.641,37 dengan realisasi sebesar Rp2.538.369.310.562,24 atau 84,23 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.26.

Tabel III.26
Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = 3 : 2</i>
2014	447.315.828.222,00	364.039.655.088,00	81,38
2015	599.476.960.259,50	473.942.522.699,00	79,06
2016	605.139.780.708,62	531.095.000.241,86	87,76
2017	613.769.474.270,00	517.435.756.892,24	84,30
2018	747.616.658.181,25	651.856.375.641,14	87,19
Jumlah	3.013.318.701.641,37	2.538.369.310.562,24	84,23

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

c. Belanja Modal

Belanja Modal dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2014-2018 sebesar Rp1.779.302.590.750,06 dengan realisasi sebesar Rp1.452.656.088.736,84 atau 81,64 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.27.

Tabel III.27
Realisasi Belanja Modal
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2014	382.083.345.880,00	305.553.488.954,35	79,97
2015	305.810.625.290,00	233.717.853.657,98	76,43
2016	332.715.484.517,80	229.776.980.688,90	69,06
2017	413.557.768.265,26	368.209.932.340,97	89,03
2018	345.135.366.797,00	315.397.833.094,64	91,38
Jumlah	1.779.302.590.750,06	1.452.656.088.736,84	81,64

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Adapun proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat dirinci seperti pada Tabel III.28.

Tabel III.28
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	URAIAN	2016	2017	2018
		(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5
A	Belanja Tidak Langsung	92,23	93,73	93,09
1	Belanja Pegawai	92,15	92,99	93,55
2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	99,17	96,97	95,13
5	Belanja Bantuan Sosial	71,71	74,23	66,64
6	Belanja Bagi Hasil	98,95	96,91	93,93
7	Belanja Bantuan Keuangan	80,69	87,81	88,76
8	Belanja Tidak Terduga	46,81	7,67	2,60
B	Belanja Langsung	82,51	87,21	88,43
1	Belanja Pegawai	94,82	93,98	86,33
2	Belanja Barang dan Jasa	87,76	84,30	87,19
3	Belanja Modal	69,06	89,03	91,38

Sumber: Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Dari tabel 3.28 di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran terhadap anggaran belanja dari tahun semakin meningkat akan tetapi masih terjadi fluktuasi kenaikan dan penurunan realisasi belanja pada beberapa komponen belanja, hal ini menunjukkan bahwa kinerja belanja daerah cukup baik dengan tingkat penyerapan anggaran yang cukup tinggi.

3.1.1.3. Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari pembiayaan penerimaan, pembiayaan pengeluaran dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Pembiayaan Daerah dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014-2018 dianggarkan sebesar Rp1.182.644.063.217,03 dengan realisasi sebesar Rp1.187.644.063.216,86 atau 100,42 persen dengan uraian sebagaimana Tabel III.29.

Tabel III.29
Realisasi Pembiayaan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2014	201.966.080.663,95	201.966.080.663,95	100
2015	320.653.645.641,17	320.653.645.641,17	100
2016	337.693.794.849,61	337.693.794.849,61	100
2017	212.692.026.730,06	217.692.026.730,06	102,35
2018	109.638.515.332,24	109.638.515.332,07	100
Jumlah	1.182.644.063.217,03	1.187.644.063.216,86	100,42

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

(1.) Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan penerimaan mencakup komponen: 1) SILPA tahun anggaran sebelumnya; 2) pencairan dana cadangan; 3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) penerimaan pinjaman; dan 5) penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pembiayaan Penerimaan dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018 dianggarkan sebesar Rp1.192.644.063.217,03 dengan realisasi sebesar Rp 1.192.644.063.216,86 atau 100,00 persen sebagaimana yang terlihat pada Tabel III.30.

Tabel III.30
Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2014	201.966.080.663,95	201.966.080.663,95	100,00
2015	325.653.645.641,17	325.653.645.641,17	100,00
2016	337.693.794.849,61	337.693.794.849,61	100,00
2017	217.692.026.730,06	217.692.026.730,06	100,00
2018	109.638.515.332,24	109.638.515.332,07	100,00
Jumlah	1.192.644.063.217,03	1.192.644.063.216,86	100

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

(2.) Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan pengeluaran mencakup komponen: 1) pembentukan dana cadangan; 2) penyertaan modal pemerintah daerah; 3) pembayaran pokok utang; dan 4) pemberian pinjaman. Adapun pembiayaan pengeluaran dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014-2018 dianggarkan sebesar Rp17.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp17.500.000.000 atau terealisasi sebesar 100 persen sebagaimana yang tergambar dalam Tabel III.31.

Tabel III.31
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2014	-	-	
2015	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
2016	-	-	0,00
2017	5.000.000.000,00	-	0,00
2018	-	-	0,00
Jumlah	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00	100,00

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

3.1.2 Neraca Daerah

3.1.2.1 Pertumbuhan Neraca Daerah

Neraca merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, sebagai informasi neraca menyediakan gambaran mengenai aset, kewajiban dan ekuitas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai tingkat rincian obyek.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara ekonomis, efektif dan efisien atau memenuhi unsur *value for money*. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu 2014-2018 seperti terlihat pada Tabel III.32 dan dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut:

- a. Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai

akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Selama kurun waktu 2014-2018, pertumbuhan rata-rata jumlah aset daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 0,35% yang berarti bahwa jumlah aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat sebesar 0,35% dalam lima tahun terakhir. Aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi dan aset tetap. Aset lancar berupa kas, piutang, persediaan. Investasi berupa investasi jangka panjang. Sementara Aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan serta sarana mobilitas dan peralatan kantor yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan.

- b. Pertumbuhan rata-rata aset lancar mencapai 17%, hal ini disebabkan karena komponen aset lancar, yaitu kas, piutang dan persediaan, mengalami pertumbuhan sebesar 23,61 %, 19,18% dan 94,78%. Melihat komposisi selama periode 2014-2018, pertumbuhan aset lancar menunjukkan bahwa kondisi aset lancar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada kondisi cukup sehat karena aset lancar. Selain itu aset lancar memiliki karakteristik yang likuid, maka dengan sendirinya akan berfluktuasi sesuai dengan penggunaannya. Bentuk investasi yang dilakukan berupa aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya) dengan rata-rata pertumbuhan 0,03%.
- c. Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2014-2018 dengan rata-rata sebesar 85,39%, yang berarti bahwa kewajiban kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah dari tahun 2014 sampai dengan 2018 menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu tersebut selalu dapat melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek yang baik secara tepat waktu.
- d. Kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2014-2018, merupakan kewajiban jangka pendek (atau kewajiban lancar) berupa utang perhitungan pihak ketiga dan utang jangka pendek (atau kewajiban lancar) berupa utang perhitungan pihak ketiga dan utang jangka pendek lainnya yang meningkat sebesar 0,78 %. Kewajiban jangka pendek ini masih ditutupi dengan aset lancar yang dimiliki dan dalam kurun waktu 2014-2018, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki kewajiban jangka panjang.
- e. Ekuitas dana yang meliputi dana lancar dan dana investasi merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu 2014-2018 mengalami pertumbuhan sebesar 2,7 % yang berarti ekuitas dana cukup sehat.

Perkembangan Neraca Daerah dari Tahun 2014-2018 dapat dilihat tabel III.32.

Tabel III.32

Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ASET						
1.1.	ASET LANCAR	336.581.522.153,71	354.821.504.563,62	235.487.309.498,46	161.279.900.542,67	367.282.600.406,23	17,00
1.1.1.	Kas	325.665.761.941,17	337.693.977.136,14	217.350.414.204,06	110.649.986.772,00	304.799.410.235,25	23,61
1.1.2.	Piutang	4.196.087.830,70	4.904.541.665,22	5.200.699.808,70	2.469.698.963,19	5.095.138.651,38	19,18
1.1.3.	Persediaan	6.719.672.381,84	12.222.985.762,26	12.936.195.485,70	48.160.214.807,48	57.362.054.213,60	94,78
1.1.4.	Biaya Dibayar Di Muka (Uang Muka Proyek)	-	-	-	-	25.997.306,00	
1.2.	INVESTASI	80.192.603.080,41	80.369.021.802,92	82.237.317.816,27	77.625.597.367,77	77.800.341.510,06	(0,71)
1.3.	ASET TETAP	3.934.635.477.255,26	2.921.949.259.971,30	3.400.008.327.539,19	3.610.675.201.291,90	3.729.241.652.344,41	0,03
1.3.1.	Tanah	730.335.823.971,00	355.192.113.597,00	372.119.606.315,00	651.804.492.713,00	654.759.377.563,00	7,25
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	401.001.644.557,38	408.649.937.762,00	529.400.666.385,41	747.579.419.837,29	822.098.441.502,51	20,66
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	810.085.813.261,36	700.080.821.527,97	885.491.468.775,92	1.159.714.109.736,30	1.227.543.841.556,73	12,43
1.3.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.517.825.546.201,34	1.716.568.302.414,82	2.258.185.675.506,80	2.546.022.960.677,54	2.712.482.234.293,29	15,98
1.3.5.	Aset tetap lainnya	24.925.514.239,00	18.317.369.165,00	24.893.432.457,06	38.316.449.219,00	47.538.848.491,00	21,85
1.3.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	450.461.135.025,18	433.597.800.152,58	32.191.566.715,00	53.659.895.692,77	69.930.518.677,88	0,17

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	-	-710.457.084.648,07	-802.274.088.616,00	(1.586.422.126.584,00)	(1.805.111.609.740,00)	41,48
1.4.	ASET LAINNYA	7.277.422.525,47	34.310.278.567,19	38.898.122.400,31	144.139.121.561,70	80.228.121.406,67	152,76
1.4.1.	Tagihan penjualan angsuran	39.966.800,00	9.446.900,00	-	-	-	
1.4.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	-	-	-	-	-	
1.4.3.	kemitraan dengan pihak kedua	-	-	-	-	-	
1.4.4.	Aset tak berwujud	29.140.000,00	519.255.400,00	622.604.400,00	1.365.519.411,00	3.277.233.188,83	490,29
1.4.5.	Aset Lain-lain	7.208.315.725,47	33.781.576.267,19	38.275.518.000,31	142.773.602.150,70	76.950.888.217,84	152,22
	JUMLAH ASET DAERAH	4.358.687.025.014,85	3.391.450.064.905,03	3.756.631.077.254,23	3.993.719.820.764,04	4.254.552.715.667,37	0,35
2.	KEWAJIBAN	91.260.272.553,28	35.312.623.656,24	115.183.779.404,41	71.075.327.807,10	223.874.892.226,72	85,39
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	91.260.272.553,28	35.312.623.656,24	115.183.779.404,41	71.075.327.807,10	223.874.892.226,72	85,39
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	12.096.827,00	136.363,00	23.928.474,00	87.699.171,00	93.532.330,00	44,054
2.1.2.	Utang Bunga	-	-	-	-	-	
2.1.3.	Utang Pajak	-	-	-	-	-	

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.4.	Bagian lancar utang jangka panjang dalam negeri	-	-	-	-	-	
2.1.5.	Pendapatan Diterima dimuka	-	-	-	26.700.000,00	26.700.000,00	-
	Utang Beban				608.968.626,00	21.546.912.381,42	34,38
2.17.	Utang jangka pendek lainnya	91.248.175.726,28	35.312.487.293,24	115.159.850.930,41	70.351.960.010,10	202.207.747.515,30	0,78
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	
2.2.1.	Utang dalam negeri	-	-	-	-	-	
2.2.2.	Utang Luar Negeri	-	-	-	-	-	
2.2.3.	Utang jangka panjang lainnya	-	-	-	-	-	
3.	EKUITAS DANA	4.267.426.752.461,57	3.356.137.441.248,79	3.641.447.297.849,82	3.922.644.492.956,92	4.030.677.823.451,65	(2,70)

Sumber: Diolah dari Buku Laporan Keuangan Daerah Tahun 2014-2018

* % ; Rata-rata Pertumbuhan

3.1.2.2 Rasio Neraca

(1.) Rasio Likuiditas

Ratio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dalam penghitungan rasio likuiditas yang sering digunakan adalah rasio lancar dan quick rasio. Nilai rasio lancar dan quick rasio pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tabel III.33 berada pada 3,69-10,05 pada tahun 2014-2018. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 mempunyai kemampuan baik dalam melunasi kewajibannya. Rasio likuiditas lebih dari 1 menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mampu melunasi kewajibannya sedangkan nilai rasio kurang dari 1 menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Bangka Belitung melunasi hutang sangat rendah Data rasio likuiditas selama 5 (lima) tahun terakhir 2014-2018 sebagaimana tabel III.33.

Tabel III.33
Rasio Likuiditas Neraca Daerah
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018

Rasio Likuiditas	Rumus	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rasio Lancar	Aset Lancar/Kewajiban Jangka Pendek	3,69	10,05	2,04	2,27	1,64
Quick Rasio	(Aset Lancar-Persediaan) / Kewajiban Jangka Pendek	3,61	9,70	1,93	1,59	1,38
Rasio total hutang terhadap total aset	Total Hutang/Total Aset	0,02	0,01	0,03	0,02	0,05
Rasio Utang terhadap Modal	Total Hutang/Total Ekuitas	0,02	0,01	0,03	0,02	0,02

Sumber: Diolah dari Buku Laporan Keuangan Daerah Tahun 2014-2018

(2.) Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Pengukuran rasio solvabilitas ini menggunakan 2 pendekatan yaitu rasio kewajiban terhadap total aset yang mengukur kemampuan daerah dalam penjaminan hutang dengan jumlah aktiva yang dimilikinya dan rasio kewajiban terhadap ekuitas yang mengukur seberapa besar daerah dibiayai oleh pihak kreditur dibandingkan dengan ekuitas. Tabel III.34 menunjukkan bahwa rasio solvabilitas pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014-2018 antara 0,01-0,05. Nilai rasio ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mampu dalam membayar kewajiban jangka panjangnya dimana nilai maksimal dari rasio ini adalah 200 %. Berikut Rasio Solvabilitas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun terakhir tahun 2014-2018 sebagaimana pada Tabel III.34.

Tabel III.34
Rasio Solvabilitas Neraca Daerah
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018

Rasio Likuiditas	Rumus	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rasio Kewajiban terhadap Total Aset	Kewajiban/Total Aset	0,02	0,01	0,03	0,02	0,05
Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas	Kewajiban/Total Ekuitas	0,02	0,01	0,03	0,02	0,02

Sumber: Diolah dari Buku Laporan Keuangan Daerah Tahun 2014-2018

3.1.3 Prediksi Kemampuan Keuangan Daerah

Dari analisis kemampuan keuangan daerah sejak 2014-2018, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, ternyata terjadi defisit anggaran setiap tahunnya. Artinya kemampuan pendapatan masih lebih kecil dari belanja yang ditetapkan. Untuk periode 2017-2022, telah ditetapkan RPJMD yang juga memuat indikasi anggaran yang dibutuhkan selama 5 tahun tersebut.

Oleh karena itu untuk meyakinkan terselenggaranya seluruh program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD, maka harus dilakukan perubahan rancangan kemampuan keuangan daerah pada sisa tahun kedepan, terutama total pendapatan, baik dari pendapatan asli daerah maupun sumber dana perimbangan serta pendapatan lain-lain yang sah. Prediksi 5 tahun mulai dari tahun 2017-2022. Namun dikarenakan indikasi anggaran yang dibutuhkan selama 5 tahun, sebagaimana tertuang dalam Bab III, ternyata lebih besar dari kemampuan anggaran yang diprediksi, maka selain sumber PAD dan Dana Perimbangan, maka dibutuhkan dana APBN yang dilaksanakan di daerah, serta dana investasi serta kerjasama usaha, disamping dukungan dana APBD kabupaten/kota yang ada. Artinya pelaksanaan seluruh program yang telah ditetapkan di RPJMD, akan didanai tidak hanya dari APBD Provinsi, tetapi juga APBN yang dilaksanakan di daerah, Dana investasi dan kerja sama badan usaha, serta dana APBD kabupaten/kota.

Kemampuan pendapatan daerah yang sudah direalisasikan dan direncanakan kembali seperti tabel berikut ini.

Tabel III.35

Prediksi Kemampuan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

No	Sumber Pendapatan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendapatan asli daerah	709.832.181.818,48	850.441.774.831,35	884.562.215.880,37	963.634.368.637,38	950.410.204.161,90	985.775.080.753,05
	-Pajak daerah	629.136.457.212,39	787.235.420.038,83	790.139.435.584,04	850.307.137.560,93	841.315.435.249,12	868.153.397.633,57
	-Retribusi daerah	5.434.540.818,00	7.613.352.047,00	9.315.527.150,00	16.194.191.546,00	13.621.384.587,96	16.470.978.243,76
	-Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.306.417.427,05	5.114.092.291,88	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00
	-Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	69.954.766.361,04	50.478.910.453,64	79.607.253.146,33	91.633.039.530,45	89.973.384.324,82	95.650.704.875,72
2	Dana Perimbangan	1.539.960.002.502	1.694.218.759.243	1.766.282.638.000	1.193.285.213.000	1.766.282.638.000	1.766.282.638.000
	-Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	120.836.218.678,00	215.555.879.603,00	228.805.440.000,00	140.907.497.000,00	228.805.440.000,00	228.805.440.000,00
	-Dana alokasi umum	980.297.314.000,00	1.018.435.174.809,00	1.046.862.622.000,00	1.052.377.716.000,00	1.046.862.622.000,00	1.046.862.622.000,00
	-Dana alokasi khusus	438.826.469.824,00	460.227.704.831,00	490.614.576.000,00	490.614.576.000,00	490.614.576.000,00	490.614.576.000,00
3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	1.232.468.100,00	12.317.177.850,00	111.588.302.000,00	144.418.347.120	111.588.302.000,00	111.588.302.000,00
	TOTAL	2.251.024.652.420,48	2.556.977.711.924,35	2.762.433.155.880,37	2.301.337.928.757,38	2.842.178.644.161,90	2.877.543.520.753,04

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014-2018

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Selama periode tahun 2014-2018, rata-rata realisasi belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memenuhi kebutuhan belanja langsung dan tidak langsung adalah 84,94 persen, Sedangkan rata-rata penganggaran untuk belanja pegawai selama periode 2014-2018 sebesar 16,17 persen. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan pegawai relatif lebih kecil persentasenya apabila dibandingkan dengan belanja untuk masyarakat (belanja publik).

Dengan demikian, kebijakan pengelolaan keuangan daerah difokuskan untuk pembiayaan pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat, sedangkan pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur lebih pada fungsi-fungsi pemerintah yaitu sebagai fasilitator pembangunan. Secara rinci proporsi penggunaan anggaran dapat dilihat pada Tabel III.36.

Tabel III.36
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018

Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja +pembiayaan pengeluaran) (Rp)	Persentase belanja pegawai terhadap pengeluaran
1	2	3	4
2014	274.339.635.936,42	1.596.086.858.479,20	17,19%
2015	312.375.890.443,08	1.886.998.635.504,14	16,55%
2016	396.188.131.149,20	2.069.868.292.386,32	19,14%
2017	620.836.142.868,21	2.359.078.163.818,47	26,32%
2018	659.760.322.587,62	2.556.977.711.924,35	25,80%
Jumlah	2.263.500.122.984,53	10.469.009.662.112,50	21,62%

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014-2018

3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari pembiayaan penerimaan, pembiayaan pengeluaran dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Kondisi pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun tahun 2014-2018 sebesar 92-95% yang dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran, sedangkan sisanya untuk melakukan investasi. Defisit riil anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat diuraikan pada Tabel III.37.

Tabel III.37
Surplus/(Defisit) Riil Anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

N O	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.719.774.423.456,42	1.886.998.635.504,14	1.950.153.950.302,77	2.251.024.652.420,48	2.556.977.711.924,35
	Dikurangi Realisasi:					
2	Belanja Daerah	1.596.086.858.479,20	1.869.958.486.295,70	2.070.521.259.422,32	2.359.078.163.818,47	2.364.345.563.586,80
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	5.000.000.000,00	-	-	-
	Surplus/ (Defisit) Riil	123.687.564.977,22	12.040.149.208,44	(120.367.309.199,55)	(108.053.511.397,99)	192.632.148.337,55

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat pada Tahun 2016 dan 2017 terjadi defisit anggaran dikarenakan komposisi pendapatan lebih kecil dari belanja, untuk menutupi defisit anggaran tersebut terdapat komposisi penutup anggaran seperti pada Tabel III.38.

Tabel III.38
Komposisi Penutup Defisit Anggaran
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	Uraian	Proporsi dari total Surplus/(defisit) riil				
		2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	61,24	3,7	(35,64)	(49,64)	175,7
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Dilihat dari tabel di atas defisit riil anggaran pada tahun 2014-2018 dapat ditutupi dengan menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, adapun realisasi sisa lebih perhitungan anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel III.39.

Tabel III.39
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah SiLPA	325.653.645.641,17	337.693.794.849,61	217.692.026.730,06	109.638.515.332,07	302.270.663.669,62
2	Pelampauan Penerimaan PAD	6.365.973.563,59	12.831.671.101,60	(7.139.367.004,49)	(27.359.911.116,68)	60.811.955.265,48
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	(9.231.925.325,00)	(49.087.004.551,00)	(304.488.402.655,00)	(79.144.920.048,00)	9.100.116.093,00
4	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	223.305.000,00	5.168.850.000,00	244.323.167.102,00	(28.767.531.900,00)	69.912.071.358,48
5	Sisa Penghematan belanja atau akibat lainnya	328.296.292.402,58	356.395.900.757,78	284.996.629.287,55	239.910.878.396,75	232.358.592.311,31
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum diselesaikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kegiatan lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Diolah dari Buku Laporan Keuangan Daerah Tahun 2014-2018

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan Daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan Daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Sejumlah permasalahan pembangunan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini diidentifikasi sebagai faktor yang perhatian untuk pembangunan di masa mendatang.

4.1.1. Permasalahan Daerah

Permasalahan daerah mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, sehingga menjadi fokus. Permasalahan daerah adalah masalah utama daerah yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan. Beberapa permasalahan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya PDRB sub sektor pertanian;

Kontribusi PDRB sub sektor pertanian pada tahun 2017 sebesar 12,07% dan menurun pada tahun 2018 sebesar 12,05%. Hal ini disebabkan pertumbuhan sub tanaman Hortikultura tumbuh sebesar -1,58 dimana terjadi penurunan produksi untuk tanaman komoditas Hortikultura tahun 2017 sebesar 22.546 ton sedangkan 2018 sebesar 22.325 ton.

2. Masih rendahnya PDRB sub sektor perikanan;

Kontribusi PDRB sub sektor perikanan tahun 2017 sebesar 5,80% sedangkan tahun 2018 sebesar 6%. Sedangkan laju pertumbuhan produksi sektor perikanan mencapai 8,11%. Produksi perikanan tangkap 2018 mencapai 228.980,328 ton, sedangkan tahun 2019 mencapai 237.796,07 ton. Meskipun mengalami kenaikan namun belum optimal. Sebagai sektor unggulan, bidang kelautan dan perikanan harusnya mampu memberikan kontribusi setidaknya 30% dalam PDRB Provinsi Bangka Belitung secara keseluruhan, namun PDRB perikanan hanya memberikan kontribusi sebesar 6 % dari total PDRB Bangka Belitung.

3. Masih rendahnya laju pertumbuhan kunjungan wisatawan;

Rendahnya laju pertumbuhan kunjungan wisatawan disebabkan oleh jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik yang masih rendah sehingga mempengaruhi salah satu kategori lapangan usaha PDRB yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum. Jumlah kunjungan wisatawan tidak signifikan naik dari tahun ke

tahun. Pada tahun 2017, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 7.143 wisatawan dan domestik 362.279 wisatawan, pada tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 8.124 wisatawan dan domestik sebanyak 417.818 wisatawan. Sedangkan pada tahun 2019 wisatawan mancanegara sebanyak 9.183 dan domestik 429.190 wisatawan. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada laju pertumbuhan kunjungan wisatawan. Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan tahun 2018 sebesar 15,30% sedangkan pada tahun 2019 sebesar hanya 2,92%. Kecilnya pertumbuhan ini dikarenakan *event-event* pariwisata masih sangat terbatas dan kurangnya promosi pariwisata.

4. Masih rendahnya PDRB sub sektor pertambangan dan energi;

Rendahnya PDRB Sub Sektor Pertambangan dan Energi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain masih rendahnya nilai tambah sektor pertambangan dan penggalian. Menurunnya laju pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2018 dimana laju pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan penggalian berada di angka -1,08%, sedangkan ditahun sebelumnya berada di angka 2,22% (menurun 3,3%). Penurunan ini dikarenakan menurunnya pertumbuhan sub sektor pertambangan minyak, gas, dan panas bumi dari -1,23% (2017) menjadi -18,84% (2018). Selain daripada itu terjadi penurunan pertumbuhan sub sektor pertambangan biji logam dari 2,90% (2017) menjadi -0,10% (2018). Begitupun dengan laju pertumbuhan ekspor timah mengalami penurunan dari 44,31% (2017) menjadi -2,14 (2018). Hal ini sebagai dampak dari penurunan harga timah di pasaran dunia.

5. Masih rendahnya PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan;

a. Kontribusi sektor industri pengolahan mengalami penurunan dari 22,70% (2017) menjadi 22,61% (2018). Kontribusi ini menurun sebagai dampak dari penurunan kontribusi sub sektor industri logam dasar dari 13,38% (2017) menjadi 12,78% (2018). Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan 2017 sebesar 6,22 % dan 4,04% ditahun 2018. Hal ini dikarenakan sub sektor industri logam dasar laju pertumbuhan mengalami penurunan 7.82% (2017) menjadi -0,25% (2018). Penurunan ini disebabkan sektor industri pengolahan Bangka Belitung didominasi oleh industri pengolahan timah (*smelter*) dan perkebunan, dimana produksinya menurun, akibat industri *smelter* banyak tidak beroperasi. Untuk sektor industri perkebunan, komoditi Bangka Belitung juga mengalami tekanan yang berakibat pada menurunnya nilai ekspor Bangka Belitung di sektor ini, sehingga secara *aggregate* terjadi penurunan yang semula 4.00 pada tahun 2018 menurun menjadi 1.17 pada tahun 2019.

b. Kontribusi sektor perdagangan mengalami penurunan dari 14,51% (2017) menjadi 14,26% (2018). Hal ini dipengaruhi oleh penurunan kontribusi di sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil, dan sepeda motor dari 12,07% (2017) menjadi 11,80% (2018). Laju pertumbuhan sektor perdagangan mengalami penurunan dari 7,81% (2017) menjadi 2,65% (2018). Hal ini dipengaruhi oleh penurunan laju pertumbuhan pada sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil, dan sepeda motor dari 8,44% (2017) menjadi 2,15% (2018). Masih rendahnya peningkatan nilai tambah sektor perdagangan yang di bawah target nasional disebabkan oleh imbas keluarnya Surat Edaran Bersama (SEB) antara Indonesia *Commodity and Derivatives Exchange* (ICDX) dan

Indonesia Clearing House (ICH) pada tahun 2018 dan persyaratan *competen* persen Indonesia dalam verifikasi rencana kegiatan anggaran belanja perusahaan timah terjadi penurunan sehingga pada tahun 2019 hanya sebesar 1.76.

6. Masih adanya masyarakat yang menganggur;

Tingkat pengangguran Bangka Belitung per Agustus 2017 sebesar 3,78% sedikit lebih rendah dibandingkan per Agustus 2018 sebesar 3,65% dan 2019 sebesar 3,62%. Meskipun tingkat pengangguran menurun namun jumlah pengangguran di Bangka Belitung dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dimana pada tahun 2017 sebanyak 26.399 orang dan naik di tahun 2018 sebanyak 26.552 orang dan 2019 sebanyak 26.871 orang. Peningkatan jumlah pengangguran ini salah satunya disebabkan oleh peningkatan angkatan kerja setiap tahun yang meningkat rata-rata 4% (2018) dan 2% (2019).

7. Masih lambatnya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja;

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Bangka Belitung tahun 2017 sebesar 58,83 kemudian meningkat sebesar 63,23 (2017) dan 63,82 (2018). Capaian IPK Bangka Belitung masuk dalam kategori menengah ke bawah <65,99. Hal ini menunjukkan banyaknya kesempatan kerja yang masih bersifat informal sehingga menambah jumlah setengah penganggur, belum sigap dan siapnya unit usaha baru dan lama dalam menyiapkan sarana hubungan industrial di perusahaan serta mengikuti dan memenuhi pelaksanaan norma ketenagakerjaan yang berlaku, dan tidak memadainya jumlah tenaga kerja pengawas ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

8. Masih lambatnya penurunan tingkat kemiskinan;

Jumlah penduduk miskin di Bangka Belitung data Maret 2019 sebesar sebanyak 68.380 orang (4,62%) sedangkan pada periode yang sama tahun 2020 sebanyak 68.390 orang (4,53). Naiknya jumlah penduduk miskin disebabkan oleh kenaikan dari garis kemiskinan dimana pada Maret tahun 2019 garis kemiskinan sebesar Rp677.716 sedangkan Maret 2020 sebesar Rp721.455, terjadi kenaikan sebesar 6,45%. Penduduk miskin yang berada pada kerak-kerak kemiskinan cenderung sulit untuk diangkat dari kemiskinan karena hampir tidak mempunyai keahlian dan sulit menjangkau sumber-sumber ekonomi yang ada. Penduduk yang berada pada kerak kemiskinan sulit untuk dilatih dan diberi pekerjaan.

9. Masih rendahnya kesejahteraan masyarakat desa;

Tingkat kesejahteraan masyarakat desa secara rata-rata mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan mengalami peningkatan dimana data pada Maret 2019 sebesar 0,735 sedangkan Maret 2020 menjadi sebesar 0,790. Indeks kedalaman kemiskinan ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran masyarakat pedesaan jauh dibawah garis kemiskinan sebesar 0,735. Sedangkan indeks kedalaman kemiskinan perkotaan pada Maret 2019 sebesar 0,335 meningkat menjadi 0,445 pada Maret 2020. Rendahnya kesejahteraan masyarakat desa disebabkan oleh rendahnya pendapatan perkapita masyarakat desa sebesar Rp671.054 kapita/orang dibandingkan dengan pendapatan masyarakat perkotaan sebesar Rp685.433 kapita/orang.

10. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum;

Rasio ketersediaan Infrastruktur baik jalan dan jembatan, irigasi, bangunan pengaman pantai dan sungai, serta bangunan penampung air baku sebesar 14% (2018) dan 25% (2019) dan belum mencukupi target sebesar 18% (2018) dan 24,75%. Salah satunya disebabkan oleh bencana banjir tahun 2017 hingga 2019 yang mempercepat penurunan kualitas jalan dan jembatan kewenangan provinsi dimana tingkat kemantapan jalan dari 93,43% (2017) menjadi 83,66% (2018) atau menurun sebesar 9,77%. Selain daripada itu terjadinya pendangkalan di beberapa titik sungai yang memerlukan penanganan mendesak sehingga terjadi perubahan prioritas pembangunan serta perubahan alokasi anggaran.

11. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur dasar;

Pembagian kewenangan antara Provinsi dan kabupaten/kota masih belum dilaksanakan secara maksimal sehingga pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh provinsi terkait pemenuhan infrastruktur dasar hanya dilaksanakan pada kawasan kumuh kewenangan provinsi yang memiliki luasan 10-15 ha pada Kawasan Strategis Provinsi (KSP) serta pemenuhan prasarana sarana utilitas permukiman. Pada tahun 2018 persentase luasan kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani mencapai 0,12% sedangkan pada tahun 2019 mencapai 15,44%.

12. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur perhubungan;

Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur perhubungan. Infrastruktur perhubungan dapat dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu perhubungan darat, perhubungan laut, dan kebandarudaraan. Dari ketiga komponen tersebut, capaian Infrastruktur perhubungan terealisasi pada tahun 2018 sebesar 30,25% dan pada tahun 2019 sebesar 34,53 %, atau hanya meningkat sebesar 4,28%. Dari ketiga sektor tersebut, sektor perhubungan darat yang belum optimal dalam pencapaiannya. Pemenuhan infrastruktur sektor perhubungan darat hanya mencapai 4,2% (2018) dan 15,25% (2019) dari target 20%. Rendahnya capaian sektor perhubungan darat disebabkan tidak terpenuhinya infrastruktur perhubungan darat, diantaranya lampu penerangan jalan dari 310 unit hanya terealisasi sebanyak 105 unit (2018-2019).

13. Masih rendahnya akses pendidikan masyarakat;

Rendahnya kesempatan pendidikan masyarakat terlihat dari masih belum optimalnya Angka Harapan Lama Sekolah masyarakat (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan). Pada Tahun 2018 angka harapan lama sekolah baru mencapai 11,87 (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki 11,70, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan 12,05) dan pada tahun 2019 menjadi 11,94 (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki 11,78, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan 12,11). Meskipun angka harapan lama sekolah mengalami kenaikan akan tetapi angka harapan lama sekolah ini belum mencapai angka 12,00. Hal ini berarti bahwa masyarakat di Bangka Belitung belum seratus persen menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

14. Masih rendahnya kualitas pendidikan masyarakat;

Rendahnya kualitas pendidikan masyarakat disebabkan masih banyak satuan pendidikan yang belum terakreditasi A. Pada tahun 2018 persentase sekolah SMA,

SMK, dan SLB Negeri dan Swasta baru mencapai 40,15% dan pada tahun 2019 persentase sekolah SMA, SMK, dan SLB Negeri dan Swasta beranjak naik mencapai 43,38% akan tetapi persentase sekolah yang terakreditasi A masih dibawah 50%.

15. Masih rendahnya kesejahteraan anak;

Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2018 mencapai 109 kasus dan meningkat ditahun 2019 sebanyak 110 kasus, dimana dari 110 kasus tersebut sebanyak 107 merupakan kasus anak yang bermasalah dengan hukum, baik anak sebagai korban atau pun pelaku. Selain itu permasalahan yang dihadapi anak adalah masih terjadinya pengabaian akan hak mereka terutama bagi anak perempuan di bidang pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan rata-rata lama sekolah antara laki-laki dengan perempuan masih terjadi kesenjangan, pada tahun 2019 rata-rata lama sekolah anak laki-laki yaitu sebesar 8,38 sementara perempuan 7,54. Selain daripada itu masih tingginya perkawinan anak di Bangka Belitung. Angka pernikahan dini di Bangka Belitung masuk dalam tiga besar tertinggi se-Indonesia. Secara nasional angka pernikahan di bawah umur mencapai 25 persen sedangkan Bangka Belitung mencapai 37 persen. Pada tahun 2018 tercatat ada 1.545 kasus perkawinan anak yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung tersebar di semua wilayah kabupaten/kota.

16. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk;

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Bangka Belitung sebesar 2,02% (2018) dan 1,98% (2019). Jumlah penduduk Bangka Belitung tahun 2019 sebanyak 1.488.792 jiwa atau meningkat dari tahun 2018 yang sebanyak 1.459.873 jiwa. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan Angka Kelahiran Total (TFR), dimana pada tahun 2018 sebesar 2,25% dan 2019 sebesar 2,30% (naik sebesar 0,05%). Kenaikan ini disebabkan angka kelahiran remaja wanita menikah diusia 15-19 tahun masih tinggi yaitu 36,7% (2018) dibandingkan usia lainnya.

17. Masih rendahnya pembangunan yang responsif gender;

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Bangka Belitung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2017 sebesar 88,93 sedangkan tahun 2018 sebesar 89,15. Angka ini masih berada di bawah nasional, dimana IPG nasional tahun 2018 sebesar 90,99. Rendahnya indeks pembangunan gender ini disebabkan berbagai faktor diantaranya kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan serta kesempatan kerja bagi perempuan merupakan hal sangat diskriminatif yang masih dirasakan. Dari data jumlah keseluruhan perempuan di 2018 sebanyak 672.070 orang hanya 298.764 orang yang bekerja. Selain daripada itu rata-rata lama sekolah antara laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan yaitu sebesar 0,84 persen.

18. Masih rendahnya kualitas pemuda;

Pada tahun 2015 IPP Bangka Belitung sebesar 46,83%, 50,83% (2016) dan 2017 sebesar 49%. Sedangkan tahun 2018 angka IPP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 53,67%. Meskipun mengalami kenaikan namun belum optimal. Capaian domain pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masih tertinggal dari capaian nasional. Angka kehamilan remaja meningkat secara signifikan dari 8,44% (2015) menjadi 18,88% (2018). Angka usia perkawinan anak yang masih tinggi (14,22%) dan melebihi angka nasional 11,21% serta proporsi pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah ke atas 33,63% yang masih kecil dan dibawah angka

nasional 38,67%. Rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan menempati peringkat keenam terendah nasional 9,73 tahun. Bahkan APK perguruan tinggi merupakan yang terendah (13,20%) dan jauh lebih rendah dari angka nasional 30,19%. Partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan juga masih rendah (76,40%) dan berada dibawah nasional (81,36%).

19. Masih belum optimalnya pembangunan olah raga;

Masih belum optimalnya capaian yang diperoleh oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penilaian Indeks Pembangunan Olahraga (IPO), dimana pada tahun 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada kategori “kurang” yaitu 0,26%. Hal ini disebabkan rendahnya capaian untuk masing-masing dimensi dimana partisipasi hanya sebesar 0,26 %, artinya rendahnya gerakan masyarakat dalam berolahraga baik dilingkungan kerja maupun sekolah. Pada dimensi ruang terbuka juga kecil hanya sebesar 0,23%, artinya sarana prasarana olahraga tidak representatif. Sedangkan dimensi kebugaran 0,19%, artinya rendahnya aktivitas kebugaran khususnya anak-anak. Pada dimensi SDM keolahragaan sebesar 0,36% atau minimnya pelatih/instruktur atau guru olahraga di Bangka Belitung.

20. Masih rendahnya kesejahteraan sosial;

Rendahnya kesejahteraan sosial dapat di lihat dari capaian Indeks Pembangunan Sosial (IPS). Pada tahun 2017 IPS Bangka Belitung sebesar 39,01 dan meningkat di tahun 2018 dan 2019 yaitu sebesar 44,04 dan 44,12. Nilai IPS Bangka Belitung <65 yang artinya tingkat pembangunan sosial di Bangka Belitung masih dalam kategori “rendah”. Rendahnya capaian IPS disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya dari meningkat jumlah PMKS di Bangka Belitung dari 391.124 orang (2018) menjadi sebesar 398.970 orang (2019).

21. Belum optimalnya peningkatan derajat kesehatan;

Masih lambatnya pencapaian angka kesehatan masyarakat menyebabkan belum optimalnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dimana pada tahun 2018 angka kesehatan masyarakat sebesar 88,35% dan pada tahun 2019 angka kesehatan masyarakat 88,48%, atau hanya mengalami kenaikan sebesar 0, 13%.

Hal ini salah satunya disebabkan oleh masih tingginya angka kematian bayi dan Balita per 1000 kelahiran hidup, dimana angka kematian bayi sebesar 4,21 (2017) dan Balita sebesar 5,03 (2018). Sedangkan angka kematian Balita sebesar 5,44 (2017) dan 6,50 (2018).

22. Belum optimalnya penatakelolaan pemerintah;

Penatakelolaan pemerintah dilihat dari belum optimalnya capaian indeks reformasi birokrasi dimana pada tahun 2018 sebesar 65,39 dan tahun 2019 sebesar 66,84, dengan kategori “B”. Terdapat beberapa komponen penilaian yang mengalami penurunan, yaitu penataan sistem manajemen SDM dari 12,19 (2018) menjadi 11,32 (2019), penguatan akuntabilitas dari 3,27 (2018) menjadi 3,56 (2019). Hal ini belum dinilai baik karena masih harus diperbaiki terutama sistem pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang saat ini masih dalam bentuk dokumentasi dan penugasan dan belum diikuti upaya nyata yang dapat mencapai sasaran Reformasi Birokrasi.

23. Masih rendahnya kebebasan sipil masyarakat;

Rendahnya kebebasan sipil masyarakat dilihat dari aspek kebebasan sipil dimana pada tahun 2019 sebesar 84,12 naik 3,17 poin dibanding 2018. Namun demikian data kebebasan sipil turun 2,12 poin dari 83,07 pada tahun 2017 menjadi 80,95 pada tahun 2018, sedangkan pada tingkat nasional nilai kebebasan sipil juga turun 0,29 poin dari 78,75 pada tahun 2017 menjadi 78,46 pada tahun 2018. Menurunnya kebebasan sipil disebabkan menurunnya partisipasi masyarakat untuk memberikan kritik dan masukan kepada penyelenggara negara maupun pemerintahan.

24. Masih rendahnya partisipasi politik masyarakat;

Rendahnya partisipasi politik masyarakat dilihat dari Aspek Hak-hak Politik, dimana pada tahun 2018 sebesar 73,56 turun 1,85 poin dibandingkan tahun 2019 sebesar 71,71 dan masuk kategori sedang. Penurunan Aspek Hak-Hak Politik terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah demonstrasi yang bersifat kekerasan, diantara terkait pengusiran KIP dan PIP oleh nelayan serta persoalan lahan perkebunan.

25. Masih rendahnya peran lembaga demokrasi masyarakat;

Rendahnya peran lembaga demokrasi masyarakat di lihat dari nilai Lembaga Demokrasi yang turun 9,13 poin dari 72,89 pada tahun 2017 menjadi 63,76 pada tahun 2018 sedangkan pada tingkat nasional nilai lembaga demokrasi mengalami kenaikan sebesar 2,76 poin dari 72,49 pada tahun 2017 menjadi 75,25 pada tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah masih sangat rendah dibawah 70%. Pada pemilihan Gubernur tahun 2017 hanya sebesar 65% dan pada pemilihan Bupati tahun 2018 hanya sebesar 62,22% (pemilihan Bupati Bangka).

26. Masih rendahnya kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana;

Masih tingginya daerah rawan bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 sebesar 173,66 dan kemudian terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2019 menjadi sebesar 151,7. Meskipun Nilai IRBI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan namun nilai IRBI tahun 2019 masih dalam kategori "Tinggi". Bencana hidrometeorologi seperti banjir dari semua tingkatan masih dalam kategori tinggi. Risiko tertinggi berada di Bangka Tengah (214,8) dan Bangka Selatan (214).

27. Masih belum optimalnya pengendalian terhadap lingkungan hidup.

Nilai IKLH merupakan perhitungan dari nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Capaian IKLH tahun 2019 adalah 63,99, lebih rendah jika dibandingkan dengan IKLH Nasional sebesar 66,55. Sejak tahun 2017 hingga 2019 terjadi penurunan angka IKLH walaupun masih dalam kategori "cukup baik". Angka IKLH tahun 2017 berada pada angka 67,85 dan pada tahun 2018 IKLH berada pada angka 67,68. Untuk mencapai level "baik", angka IKLH minimal pada angka 70,00. Untuk mencapai hal tersebut, perlu kerja keras dari semua pihak untuk meningkatkan nilai IKLH, khususnya nilai indeks kualitas tutupan lahan. Untuk IKA dan IKU perlu mempertahankan capaian yang sudah diraih dalam tahun sebelumnya.

4.1.2 Permasalahan Daerah Berdasarkan Urusan

Permasalahan Daerah berdasarkan urusan adalah masalah yang terkait langsung atau pun tidak langsung dengan masalah utama Daerah, yaitu sebagai berikut:

A. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Bidang Pendidikan

Permasalahan di Bidang Pendidikan, sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pencapaian APK Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus; Hal ini dilihat dari pencapaian tahun 2018 APK Pendidikan Menengah yaitu 82,21 dan pada tahun 2019 APK Pendidikan Menengah baru mencapai 82,45. Sedangkan untuk APK Pendidikan Khusus pada tahun 2018 yaitu 52,68 dan pada tahun 2019 meskipun naik akan tetapi baru mencapai 85,34. Belum optimalnya pencapaian APK ini disebabkan masih banyak siswa yang putus sekolah. Jumlah siswa SMA putus sekolah pada tahun 2018 sebanyak 210 orang dan pada tahun 2019 sebanyak 39 orang. Untuk siswa SMK jumlah siswa yang putus sekolah pada tahun 2018 sebanyak 487 orang dan pada tahun 2019 sebanyak 86 orang. Masih banyak siswa yang putus sekolah disebabkan karena motivasi siswa untuk bersekolah rendah, masyarakat kesulitan untuk mengakses layanan pendidikan yang letaknya jauh dari pemukiman juga karena faktor ekonomi. Selain daripada itu terbatasnya Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB) dan banyaknya siswa tidak mampu/siswa miskin untuk bersekolah.
- b. Masih banyak satuan pendidikan yang belum terakreditasi A; Hal ini dilihat dari pencapaian tahun 2018 sebesar 40,15 persen dan 2019 sebesar 43,38 persen. Rendahnya mutu satuan pendidikan ini terutama disebabkan oleh faktor kurangnya sarana prasarana pendidikan serta jumlah dan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Dilihat dari Neraca Pendidikan Daerah skor Peta Mutu Pendidikan (PMP) SMA untuk sarana prasarana SMA sebesar 4,65 (2018) dan PTK sebesar 3,69 (2019) dan skor Peta Mutu Pendidikan (PMP) SMK untuk sarana prasarana SMK sebesar 3,15 (2018) dan PTK sebesar 3,51 (2019).

2. Urusan Bidang Kesehatan

Permasalahan di Bidang Kesehatan, sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi; Tenaga kesehatan harus memiliki kompetensi yang disyaratkan agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dimana pada tahun 2018 tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi sebanyak 1.718 orang dari 5.887. sedangkan pada tahun 2019 jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi sebanyak 2.049 orang dari 7.184 orang. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran untuk peningkatan kompetensi SDM kesehatan baik melalui pendidikan maupun pelatihan;
- b. Masih rendahnya persentase kualitas kesehatan masyarakat; Hal ini dapat dilihat dari penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masih diatas target provinsi. Jumlah kematian Ibu pada tahun 2019 sebanyak 36 orang, angka tersebut sudah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 44 orang. Namun angka tersebut masih diatas target provinsi yaitu

22 orang. Hal ini disebabkan karena masih tingginya kasus pre-eklamsi (perdarahan), dan hipertensi dalam kehamilan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- c. Masih rendahnya persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; yaitu pada tahun 2019 sebesar 57,14%. Angka ini masih dibawah target provinsi tahun 2019 yaitu sebesar 80%. Hal ini disebabkan masih kurangnya dukungan dari *stakeholder* terkait di kabupaten/kota.

3. Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Permasalahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya tingkat kemantapan jalan; Pada tahun 2018 tingkat kemantapan jalan provinsi ditargetkan sebesar 93,43%, namun hanya tercapai 83,66%. Pada tahun 2019 tercapai 92,23% dari target sebesar 94,21% atau menurun sebesar 9,77%. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu bencana banjir tahun 2017 hingga 2019 yang mempercepat penurunan kualitas jalan dan jembatan, adanya beberapa ruas jalan yang umurnya lebih pendek dari pada yang diperkirakan, sehingga terdapat penambahan jumlah jalan yang harus dilakukan pemeliharaan. Selain daripada itu jembatan rusak pada jalur strategis yang perlu segera ditangani dan membutuhkan dana yang cukup besar, serta terdapat beberapa jalan yang belum memenuhi standar.
- b. Masih banyaknya pelanggaran rencana tata ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang akan mengakibatkan berbagai masalah, baik dari segi lingkungan maupun sosial. Tingkat ketaatan terhadap tata ruang pada tahun 2019 sebesar 40%. Banyaknya kasus penambangan liar menjadi salah satu rintangan utama dalam mencapai target pada akhir periode Renstra Dinas PUPR sebesar 100%;
- c. Kurangnya tenaga ahli konstruksi; Seiring dengan maraknya pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kebutuhan akan tenaga ahli konstruksi yang bersertifikat pun meningkat pesat. Kurangnya tenaga ahli konstruksi yang bersertifikat di provinsi ini menjadi salah satu masalah dalam kegiatan penyediaan infrastruktur pekerjaan umum. Pengambilan tenaga ahli dari luar daerah menyebabkan meningkatnya biaya yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2018 dan 2019, bidang jasa konstruksi telah berhasil menyelenggarakan pelatihan tenaga ahli konstruksi sebanyak lebih dari 150 orang lebih setiap tahunnya, namun tetap saja belum memenuhi kebutuhan tenaga ahli konstruksi bersertifikat yang sangat tinggi;
- d. Masih banyaknya daerah atau areal persawahan di daerah selatan yang belum dapat dialiri air pada musim kering dikarenakan tidak adanya embung atau waduk sebagai tempat untuk menampung air yang mampu dialirkan ke sawah.
- e. Ketersediaan infrastruktur sumber daya air masih sangat rendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2019 persentase kawasan yang terlindungi dari daya rusak air baru mencapai 6,06%. Masalah erosi pantai, penanganan banjir, serta kekeringan menjadi fokus utama bidang sumber daya air. Pada musim penghujan, banjir besar yang melanda di beberapa daerah di provinsi

ini menyebabkan rusaknya sumber daya air dan abrasi pantai yang perlu segera ditangani. Sedangkan pada musim kemarau, beberapa daerah di provinsi ini mengalami kekeringan. Untuk itu perlu upaya penyediaan air baku seperti konservasi sumber air, pembangunan embung dan prasarannya perlu ditingkatkan. Capaian penyediaan air baku pada tahun 2019 hanya 19%. Padahal saat musim kemarau Disamping itu, sektor irigasi juga memerlukan perhatian untuk menghidupkan sektor pertanian. Rasio jaringan irigasi baru mencapai 7% atau baru 35% yang tertangani, sedangkan kondisi jaringan irigasi yang rusak mencapai 73,7%. maka jaringan irigasi pun perlu dioptimalkan pemanfaatannya.

4. Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan di Bidang Perumahan Rakyat, sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya akses terhadap tempat tinggal/hunian layak yang dilengkapi sarana dan prasarana dan utilitas yang memadai bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin serta masyarakat korban bencana. Pada tahun 2018 capaian kinerja rumah layak huni 90,16 %, dan pada tahun 2019 capaian kinerja 87,62 %. Sedangkan PSU perumahan capaian kinerja pada tahun 2019 baru 49,84%. Hal ini salah satunya disebabkan belum adanya Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga belum adanya pedoman dalam sistem perencanaan pembangunan dan rencana tata ruang daerah yang mengatur secara khusus ruang perumahan dan kawasan permukiman.

Permasalahan di Bidang Kawasan Permukiman, sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur dasar. Kurangnya ketersediaan infrastruktur dasar disebabkan oleh kurangnya penganggaran terhadap pemenuhan infrastruktur dasar. Pembagian wewenang antara provinsi dan kabupaten/kota masih belum dilaksanakan secara maksimal. Sehingga pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak provinsi terkait pemenuhan infrastruktur dasar hanya dilaksanakan pada kawasan kumuh kewenangan provinsi yang memiliki luasan 10-15 ha, pada kawasan strategis provinsi serta pemenuhan sarana prasarana utilitas permukiman. Pada tahun 2018 persentase luasan kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani mencapai 0,12% sedangkan pada tahun 2019 mencapai 15,44%. Belum optimalnya penataan kawasan permukiman dikarenakan belum optimalnya tata kelola penataan kawasan permukiman serta belum menyeluruhnya cakupan layanan akses pengolahan persampahan serta belum adanya TPA regional. Hal ini dikarenakan belum adanya kepastian lokasi lahan TPA regional.

Masyarakat di lintas kabupaten/kota belum mendapatkan akses air minum yang layak dan berkelanjutan. Pada tahun 2018 pemenuhan kebutuhan air minum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 86,13% sedangkan nasional mencapai 88%. Pada tahun 2019 pemenuhan kebutuhan air minum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru mencapai 88,33%.

5. Urusan Bidang Ketentraman, ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan di Bidang Kebencanaan, sebagai berikut:

- a. Rendahnya kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana dikarenakan rendahnya capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD), dimana capaian IKD dibagi menjadi capaian rendah (0 s.d 0,40), sedang (0,41 s.d. 0,80) dan tinggi (lebih besar atau sama dengan 0,81). Indeks kapasitas bencana Bangka Belitung 0,39 (rendah). Rendahnya IKD yang menggambarkan rendahnya kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana dikarenakan masih kurangnya penguatan kebijakan dan kelembagaan, dengan Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigas Bencana, Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Permasalahan di Bidang Satuan Pamong Praja, sebagai berikut:

- a. Terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diketahui sepanjang tahun 2017 sebanyak 3.584 orang/pelanggar, tahun 2018 sebanyak 2.353 orang/pelanggar dan tahun 2019 sebanyak 975 orang/pelanggar;
- b. Meningkatnya tindak kriminal; Kasus tindak kriminal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 sebanyak 1.828 kasus dan tahun 2017 sebanyak 1.490 kasus. Sedangkan tahun 2018 sebanyak 1.447 kasus dan tahun 2019 sebanyak 1.453 kasus. Meningkatnya jumlah tindak kriminal ini menggambarkan kurang amannya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Belum optimalnya pelatihan bagi Satlinmas; Belum semua anggota Satlinmas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan pelatihan dalam rangka membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta membantu penanganan bencana dan kebakaran. Data per 31 Desember 2019 jumlah anggota Satlinmas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 3.997 orang, namun baru 1.030 orang anggota Satlinmas yang telah mendapatkan pelatihan;
- d. Tingginya kasus bencana kebakaran; Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk daerah yang sering mengalami bencana kebakaran. Sampai dengan tahun 2019 telah terjadi 1.565 kasus kebakaran. Saat ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki peta khusus daerah rawan kebakaran. Tidak hanya itu, kecuali anggota Satlinmas, masyarakat/relawan pemadam kebakaran belum diberikan pemahaman metode pemadam kebakaran melalui pendidikan dan pelatihan.

6. Urusan Bidang Sosial

Permasalahan di Bidang Sosial, sebagai berikut:

- a. Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dimana pada tahun 2017 sebanyak 394,681 orang menjadi 391,124 orang ditahun 2018 serta 398,670 ditahun 2019. Meningkatnya PMKS di Bangka Belitung disebabkan naiknya beberapa komponen PMKS diantaranya anak terlantar dari 54,357 orang

(2018) menjadi 63,168 orang (2019), lanjut usia terlantar sebanyak 38,728 orang (2018) menjadi 42,964 orang (2019), pemulung dari 156 orang (2018) menjadi 225 (orang), Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) dari 240 orang (2018) menjadi 551 orang;

- b. Kecenderungan jumlah pekerja migran bermasalah dan yang harus dipulangkan ke tempat asalnya semakin bertambah setiap tahunnya yang mengharuskan pemerintah daerah untuk memperhatikan semua hal yang berkaitan dengan perlindungan sosial mereka. Pada tahun 2019 terdapat 1 (satu) orang WNI asal Pangkalpinang yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari Timor Leste yang telah dipulangkan melalui KBRI Dili. Upaya perlindungan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah mencakup perlindungan dalam bentuk bantuan, pemulihan psikologis, perawatan kesehatan dan pemulangan ke daerah asal.
- c. Menurunnya jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Dimana jumlah PSKS sebanyak 752 lembaga dan 1.017 orang (2017), 689 lembaga dan 980 orang (2018), dan 700 lembaga dan 962 orang (2019). Menurunnya jumlah PSKS disebabkan oleh menurunnya pekerja sosial profesional dari 159 (2018) menjadi 143 (2019), pekerja sosial masyarakat dari 415 orang (2018) menjadi 413 orang (2019), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dari 117 orang (2018) menjadi 109 orang (2019).

B. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan di Bidang Tenaga Kerja, sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penempatan tenaga kerja; Berdasarkan data tahun 2016 jumlah pencari kerja di Bangka Belitung yang terdaftar sebanyak 15.593 orang dengan penempatan hanya sebanyak 424 orang atau sebesar 2,7% sedangkan pada tahun 2019 sebesar 4 persen atau sebanyak 5.225 pencari kerja sebanyak 155 tenaga kerja yang ditempatkan. Hal ini disebabkan adanya ketidaksesuaian antara tingkat kualitas tenaga kerja dan kebutuhan dunia kerja, juga kurang diminatinya lowongan kerja yang ditawarkan perusahaan kepada para pencari kerja.

2. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pemberdayaan peningkatan kualitas keluarga; Salah satu faktor meningkatnya kualitas keluarga adalah sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi salah satu yang menjadi objek pembinaan adalah Industri Rumahan (IR) yang dikelola oleh perempuan. Dari data tahun 2018 IR yang dikelola oleh perempuan hanya 1.941 atau 0,40 % dibandingkan dengan perempuan yang produktif. Pada tahun 2019 walaupun ada peningkatan tetapi masih jauh perbandingan antara perempuan yang mandiri melalui IR yaitu sebesar 3.129 dengan perempuan produktif 472.545 yaitu sebesar 0,66% tentu dirasakan masih sangat kurang. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah belum optimalnya penganggaran kegiatan yang berbasis

gender dari data pada tahun 2019. Perangkat Daerah yang sudah menerapkan kegiatan yang berbasis gender sebanyak 22 PD dari 32 PD yang ada di provinsi, begitu juga ketersediaan data pilah masih belum optimal data tahun 2019 menunjukkan bahwa dari 32 PD hanya 22 PD yang telah memiliki data pilah.

- b. Belum memadainya SDM perlindungan anak, perempuan dan pemenuhan hak anak; Dari data 2019 SDM perlindungan perempuan yang terdata sebanyak 177 orang jika dibandingkan dengan jumlah perempuan yang harus dilindungi sebanyak 471.329 atau sebesar 0,037% sehingga dapat dikatakan angka tersebut sangat tidak proporsional. Begitu juga SDM perlindungan anak yang terdata sebanyak 790 dengan jumlah anak yang harus dilindungi sebanyak 436.486 atau sebesar 0,18% dan juga dalam pemenuhan hak anak, jumlah SDM yang terdata sebanyak 800 dengan perbandingan 436.486 orang anak atau sebesar 0,183%.

3. Urusan Bidang Pangan

Permasalahan di Bidang Pangan, sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya Nilai Skor PPH Ketersediaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2015 Nilai Skor PPH Ketersediaan sebesar 78, kemudian sedikit meningkat di tahun 2016 sebesar 78,5 dan 78,78 ditahun 2017. Sedangkan tahun 2018 dan 2019 sebesar 86,09 dan 87,84. Meskipun skor PPH Ketersediaan meningkat namun Nilai Skor ini masih rendah dibawah nasional yaitu sebesar 96. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ketahanan pangan wilayah dari aspek ketersediaan energi telah tercapai, namun masih diperlukan upaya peningkatan keragaman pangan sumber energi.
- b. Belum optimalnya Nilai Skor PPH Konsumsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nilai Skor PPH Konsumsi di Bangka Belitung sangat fluktuatif. Pada tahun 2015 Nilai Skor PPH Konsumsi sebesar 79,7, kemudian menurun di tahun 2016 sebesar 77,1 dan meningkat kembali ditahun 2017 sebesar 81,2. Di tahun 2018 kembali menurun sebesar 80,09 dan naik di tahun 2019 sebesar 83,01. Sedangkan tahun 2018 dan 2019 sebesar 86,09 dan 87,84. Meskipun skor PPH Ketersediaan meningkat namun Nilai Skor ini masih rendah dibawah nasional yaitu sebesar 96. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ketahanan pangan wilayah dari aspek ketersediaan energi telah tercapai, namun masih diperlukan upaya peningkatan keragaman pangan sumber energi.
- c. Masih adanya penduduk rawan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dimanadalam rentang tahun 2015-2019, *Prevalence of Undernourishment* (PoU) meskipun cukup fluktuatif namun secara keseluruhan angka PoU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan. Pada tahun 2015 PoU sebesar 12,55 persen, kemudian menurun menjadi sebesar 10,44 persen (2016) dan 9,66 persen (2017). Namun pada tahun 2018 mengalami sedikit kenaikan sebesar 10,13 persen dan kemudian menurun kembali di tahun 2019 yaitu sebesar 7,90 persen. Hal ini menunjukkan masih adanya prevalensi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan atau penduduk rawan pangan. Dengan jumlah penduduk saat penghitungan sebanyak 1.481.512 jiwa maka penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan sebanyak 117.039 jiwa.

4. Urusan Bidang Pertanahan

Permasalahan di Bidang Pertanahan, sebagai berikut:

a. Masih banyaknya kasus sengketa tanah

Masih banyak lahan yang merupakan lahan sengketa, sehingga menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur dan penataan ruang. Penyelesaian kasus sangat fluktuatif. Pada tahun 2016 penyelesaian kasus hanya mencapai 38 persen dari 39 kasus hanya 15 kasus yang terselesaikan. Sedangkan pada tahun 2019 dari 8 kasus terdapat 2 kasus yang tidak terselesaikan. Kemudian masih banyak juga lahan pemerintah yang belum terinventarisir maupun teridentifikasi sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk dapat memanfaatkannya. Hingga tahun 2019 anggaran untuk bidang pertanahan masih sangat sedikit. Akibatnya masalah-masalah diatas sulit untuk diselesaikan. Bahkan kewajiban daerah untuk menyelesaikan ganti rugi sengketa tanah pembangunan jalan provinsi pun menjadi terhambat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam hal penyediaan lahan untuk pembangunan infrastuktur pun masih cukup rendah, dampaknya antara lain adalah biaya pembebasan lahan yang cukup tinggi untuk pelebaran jalan dikarenakan masyarakat menginginkan ganti rugi yang cukup tinggi atas lahan mereka.

5. Urusan Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan urusan Bidang Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

- a. Belum adanya dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup; Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup adalah sebagai instrumen pengendalian, pencegahan kerusakan lingkungan di awal sehingga perlu dokumen perencanaan lingkungan hidup yang mengatur pengelolaan, pemanfaatan, pengendalian serta pengawasan sehingga meminimalkan kerusakan lingkungan. Jika dokumen perencanaan ini tidak tersusun maka akan menyulitkan dalam melakukan pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan.
- b. Perlunya meningkatkan parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi; Sampling merupakan bentuk pelayanan laboratorium dalam pengambilan parameter kualitas lingkungan (air, udara & tanah). Sampling kualitas lingkungan udara merupakan salah satu persyaratan laboratorium yang telah teregistrasi oleh KLHK selain K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja.). Tahun 2019, jumlah parameter yang terakreditasi sebanyak 34 parameter dari target 32 parameter.
- c. Masih rendahnya persentase Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); Pada tahun 2019 ketaatan usaha/kegiatan yang masuk katagori “taat” hanya 34,11% dari 85 usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan atau hanya sebanyak 29 usaha/kegiatan. Sementara dalam tahun 2018 dari target 50 usaha/kegiatan yang diawasi, yang masuk kategori taat sebanyak 36 usaha/kegiatan atau 72%.
- d. Masih banyaknya pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup; Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup masih belum dijalankan sebagaimana mestinya. Pengaduan Masyarakat ini bersumber baik dari hasil pengawasan, pengaduan langsung ke Dinas Lingkungan Hidup ataupun yang

berasal dari Media massa baik yang ijin lingkungannya dikeluarkan oleh Provinsi maupun oleh Kabupaten/Kota. Dalam tahun 2018, target pengaduan masyarakat adalah 14 pengaduan. Pengaduan yang masuk sebanyak 20 kasus (85%), dan yang diverifikasi sebanyak 17 kasus. Pada tahun 2019, target pengaduan masyarakat sebanyak 14 pengaduan, pengaduan yang masuk sebanyak 18 kasus (94%) dan yang diverifikasi sebanyak 17 kasus.

- e. Perlunya menindaklanjuti kewenangan dari pemerintah provinsi dalam menindaklanjuti usulan dari 7 kabupaten/Kota dalam penilaian pemberian penghargaan tingkat provinsi; Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup berkewajiban menjadi Tim Penilai berdasarkan peraturan yang telah ditentukan dan hasilnya dikirim ke pusat untuk dilakukan verifikasi hasil final, seperti penerima penghargaan Kalpataru, Adipura, Adiwiyata tingkat provinsi untuk diusulkan menjadi calon penerima penghargaan. Pada tahun 2019 penerimaan adipura 5 kabupaten kota, 5 penghargaan bidang lingkungan, 1 Kalpataru dan Adiwiyata tingkat provinsi sebanyak 13 sekolah dari 14 yang ditargetkan (92,85%), dan 1 sekolah mendapatkan penghargaan tingkat nasional.
- f. Belum adanya TPA Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Pada saat ini, TPA Regional sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menampung sampah dari Kota Pangkalpinang dan sekitar Kabupaten Bangka Tengah dan untuk implementasi dari Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan dan pengurangan timbulan sampah yang masuk ke TPA di 7 (tujuh) kabupaten/kota. Verifikasi hasil calon lokasi TPA Regional berada di Pulau Bangka (belum final verifikasi lokasi) dan 1 di Pulau Belitung (telah final verifikasi lokasi dan perlu ditindaklanjuti).

6. Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan; Berdasarkan data pada tahun 2018 baru 6 dinas/instansi atau sektor lain yang memanfaatkan data kependudukan, sedangkan di tahun 2019 dinas/instansi atau sektor lain yang memanfaatkan data kependudukan hanya 8. Permasalahan lain masih rendahnya cakupan kepemilikan akta, baik akta nikah, kelahiran dan kematian. Pada tahun 2018 masyarakat yang telah memiliki akta pencatatan sipil sebanyak 63,32% sementara pada tahun 2019 yaitu sebesar 71,10%. Begitu juga cakupan dokumen pendaftaran penduduk yaitu KK, KTP dan KIA belum maksimal. Data tahun 2018 masyarakat Bangka Belitung yang sudah mengurus dokumen kependudukan sebesar 60,41% dan 2019 sebesar 74,41%.

7. Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut:

- a. Belum maksimalnya pengelolaan lembaga kemasyarakatan; Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif di Bangka Belitung tahun 2015-2019 dari 65 BUMDes menjadi 289 BUMDes yang tersebar di seluruh desa di Bangka Belitung. Meskipun jumlah BUMDes aktif naik setiap tahunnya namun kenaikan ini belum

maksimal. Sebanyak 77 Desa dari 309 desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang belum memiliki BUMDes. Padahal unit usaha ini hal yang wajib dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum terbentuknya BUMDes, diantaranya faktor modal, belum adanya kesiapan BPD dan Peraturan Desa.

8. Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Angka Kelahiran Total (TFR); Perbandingan antara tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,03 % yaitudari 2,27 menjadi 2,30. Hal ini salah satu penyebabnya adalah masih kurang optimalnya pembinaan kepada kabupaten/kota tentang keluarga berencana. Data 2018 menyebutkan hanya 5 dari 7 kabupaten/kota yang intensif menjadi binaan provinsi. Kemudian untuk pembinaan diperbaharui lagi di 2019 dengan mengupayakan pembinaan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung.
- b. Masih belum seluruh kabupaten/kota yang memiliki dokumen pengendalian penduduk; Data 2019 menyebutkan bahwa dari 7 kabupaten/kota di Bangka Belitung hanya 4 kabupaten/kota yang telah memiliki dokumen kependudukan (*Grand Design* Kependudukan). Hal ini tentunya akan mempersulit untuk pelaksanaan pemetaan dalam rangka pengendalian penduduk.
- c. Belum optimalnya pembentukan Kampung KB; Meskipun dari tahun 2016-2019 pembentukan Kampung KB meningkat namun Data tahun 2019 Kampung KB yang terbentuk 118 Kampung KB dari target 131 kampung KB yang terbentuk pada akhir masa RPJMD.

9. Urusan Bidang Perhubungan

Permasalahan urusan Bidang Perhubungan, sebagai berikut:

- a. Belum memadainya infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); Meskipun pemenuhan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan dari tahun 2016-2019 terus meningkat namun peningkatan tersebut belum optimal. Pemenuhan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan baru mencapai 38,12 persen di tahun 2019. Pemenuhan infrastruktur lalu lintas baru terealisasi sebesar 15,25% (1 unit APILL, 1200 m Marka jalan dan 36 unit rambu lalu lintas) atau capaian sampai dengan tahun 2019 sebesar 15,25%. Sedangkan untuk pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) untuk jalan provinsi kawasan perkotaan, dimana kebutuhan perkotaan sebanyak 1.120 unit, sampai dengan tahun 2019 baru dapat terealisasi sebanyak 80 unit.

10. Urusan Bidang Komunikasi dan Informasi

Permasalahan urusan Bidang Komunikasi dan Informasi, sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya layanan publik dan pemerintah berbasis *e-government*; meskipun pada tahun 2019 capaian kinerja sudah mencapai 90 persen namun layanan publik dan pemerintah berbasis *e-government* belum optimal dikarenakan

belum terintegrasinya data antar instansi dan terbatasnya belum adanya payung hukum yang mengatur terkait dengan pemanfaatan satu data.

11. Urusan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan urusan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, sebagai berikut:

- a. Menurunnya jumlah koperasi di Bangka Belitung; Jumlah koperasi di Bangka Belitung pada tahun 2016 berjumlah 1.149 dan menurun menjadi 1.049 koperasi di 2019. Hal ini dikarenakan adanya pembubaran koperasi dan koperasi yang tidak aktif. Setidaknya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terdapat 100 pembubaran koperasi. Sedangkan koperasi tidak aktif bertambah dari 328 menjadi 395 di tahun 2019.
- b. Belum optimalnya pemberdayaan UMKM; Pada tahun 2016 jumlah UMKM tercatat sebanyak 293.985 UMKM sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 150.948 UMKM dan 2019 sebanyak 161.186 UMKM. Jumlah ini menurun dikarenakan terdapat pembaharuan data UMKM di Bangka Belitung. Sedangkan jumlah UMKM yang diberdayakan tercatat pada tahun 2018 sebanyak 3.500 UMKM dan 4.300 UMKM di tahun 2019. Belum optimalnya pemberdayaan UMKM dikarenakan beberapa faktor, seperti : Minimnya modal, kurang inovatif, belum maksimalnya pemasaran secara online, dan sebagainya.

12. Urusan Bidang Penanaman Modal

Permasalahan urusan Bidang Penanaman Modal, sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya persentase capaian realisasi investasi. Pada tahun 2018 nilai sebesar 3,7 triliun dengan realisasi 3,1 triliun PMDN dan 620 miliar untuk PMA. Sedangkan tahun 2019 realisasi investasi sebesar 4,2 triliun dengan rincian 2,9 triliun PMDN dan 1,3 triliun PMA. Nilai ini jauh dari target nasional 6,85 triliun (2019). Beberapa hambatan dan kendala investor dalam berinvestasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni, belum adanya pelabuhan yang representatif, masih banyak investor yang belum memahami proses mendapatkan NIB pada sistem perizinan melalui OSS (*Online Single Submission*) sehingga ada beberapa pelaku usaha mengisi rencana investasinya pada OSS tidak sesuai dengan nilai rencana investasi yang akan diinvestasikan.

13. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya kualitas pemuda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dipengaruhi oleh tingkat persaingan yang semakin tinggi sehingga menuntut kualitas dan kinerja manusianya untuk lebih ditingkatkan dimana pada tahun 2019 jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi sebanyak 184 orang dan tahun 2018 sebanyak 199 orang. Hal ini masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah seluruh pemuda yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Masih belum optimalnya pembinaan cabang olah raga dimana pada tahun 2019 terdapat 8 cabang yang diikuti sertakan dalam 13 cabang pada pertandingan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) dan pada tahun 2018 Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung menempati urutan ke 6 dari 7 provinsi yang ikut serta dalam pertandingan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah I.

14. Urusan Bidang Statistik

Permasalahan urusan Bidang Statistik, sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya pemanfaatan data statistik sektoral; Meskipun pemanfaatan data sudah mencapai 95 persen di tahun 2019, namun capaian ini belum optimal mengingat kurangnya pemahaman Perangkat Daerah dalam memanfaatkan data statistik dalam perencanaan dan belum adanya regulasi daerah didalam mengatur penggunaan data tersebut dalam perencanaan dan pengambil kebijakan.

15. Urusan Bidang Persandian

Permasalahan urusan Bidang Persandian, sebagai berikut:

- a. Rendahnya capaian indeks kematangan keamanan informasi; Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 dan 2018 Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI) yaitu 1 atau berada pada level I (sangat kurang/non existent/kondisi awal) dan tahun 2018 meningkat yaitu 2 atau berada pada level II, dimana level ini masih berada pada kondisi awal penerapan keamanan informasi dan kondisi penerapan kerangka kerja dasar penerapan keamanan informasi. Hal ini menunjukkan tingkat sistem elektronik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dapat dikatakan matang dan sesuai dengan standar ISO 27001:2013 karena belum mencapai level III+ dimana penerapan keamanan informasi telah terdefinisi dan konsisten.

16. Urusan Bidang Perpustakaan

Permasalahan di urusan Bidang Perpustakaan, sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya tingkat pembinaan perpustakaan.

Sampai dengan tahun 2019 jumlah perpustakaan yang sudah dibina masih sangat sedikit yaitu sebanyak 149 perpustakaan atau sebesar 9,50% dari 1560 perpustakaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuan dilakukan pembinaan perpustakaan adalah memperkuat peran perpustakaan provinsi dalam peningkatan kemampuan literasi dan pengembangan perpustakaan ditingkat kabupaten/kota dan desa. Dengan adanya pembinaan perpustakaan maka kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) perpustakaan, pengelolaan perpustakaan serta sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai, dapat meningkat dengan baik. Maka dari itu pembinaan perpustakaan sangat penting dan perlu didukung oleh semua pihak.

- b. Masih rendahnya koleksi buku dan naskah kuno di perpustakaan;

Sampai tahun 2020 koleksi buku yang dimiliki perpustakaan daerah masih sangat sedikit yaitu sebanyak 26.600 koleksi buku, sedangkan untuk naskah kuno sangat minim sekali. Sesuai aturan koleksi buku yang harus di miliki perpustakaan sekurang-kurangnya 0,015 per kapita masyarakat dan subjeknya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, jumlah koleksi buku di perpustakaan sekurang-kurangnya mencapai minimal 50.000 judul. Keterbatasan koleksi buku ini sebagai salah satu

implikasi menurunnya jumlah pengunjung perpustakaan dari 6.253 menjadi 4.700 pengunjung.

17. Urusan Bidang Kebudayaan

Permasalahan di urusan Bidang Kebudayaan, sebagai berikut:

- a Kurangnya dukungan SDM yang mengerti dan mampu dalam bidang ini sehingga tumbuh kembangnya masih tertinggal dengan daerah lainnya. Permasalahan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya seperti program pelestarian cagar budaya dan permuseuman yaitu belum adanya museum provinsi, program pembinaan kesenian dan perfilman yaitu belum adanya taman budaya dan pasar seni, masih terbatasnya produksi film yang mengangkat tema pendidikan dan budaya, pembangunan karakter bangsa dan penguatan kearifan lokal serta masih terbatasnya ruang pertunjukkan film.

18. Urusan Bidang Kearsipan

Permasalahan di urusan Bidang Kearsipan, sebagai berikut:

- b Masih rendahnya penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan standar baku kearsipan;

Tantangan terberat adalah penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan standar baku kearsipan, di mana berdasarkan hasil Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) Tahun 2019 yang dilakukan oleh pihak ANRI, belum menunjukkan angka yang baik. Penyebab kegagalan tersebut antara lain disebabkan adanya permasalahan pengelolaan arsip yang belum maksimal dan belum adanya tempat penyimpanan yang memadai terutama Depo Arsip Daerah Provinsi.

- c Masih rendahnya arsip yang dilindungi dan diselamatkan sesuai dengan ketentuan kearsipan yang berlaku;

Perlindungan dan penyelamatan arsip oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum menunjukkan keseriusan dalam pelaksanaannya, karena belum diimbangi dengan ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia kearsipan yang memadai, disamping anggaran yang tersedia minim.

Disamping itu, kendala yang dihadapi adalah sebagian besar PD Lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum pernah menyerahkan arsip inaktifnya ke Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah melakukan berbagai upaya dalam menyelamatkan dan mempromosikan pentingnya arsip untuk diselamatkan.

- d Belum adanya layanan perizinan penggunaan arsip yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Program layanan perizinan penggunaan arsip di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dilaksanakan, hal ini disebabkan belum ada aturan yang mengatur tentang pedoman keterbukaan arsip statis untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta penyelidikan dan penyidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Peraturan Gubernur.

C. Urusan Pilihan

1. Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan

Permasalahan urusan di Bidang Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut:

- a. Masih belum optimalnya pemanfaatan luasan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang termanfaatkan; Sampai tahun 2019 luasan yang dicadangkan untuk kawasan konservasi baru 595.182,01ha dengan 2 lokasi yakni kawasan konservasi perairan gugusan pulau-pulau momparang dan perairan sekitarnya di Kabupaten Belitung Timur dan kawasan konservasi perairan Kabupaten Belitung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Akibat baru ditetapkannya Raperda RZWP3K di awal tahun 2020 sehingga pelaksanaan rekomendasi pemanfaatan ruang laut baru bisa dilakukan setelah Perda RZWP3K ditetapkan.
- b. Masih rendahnya persentase pelaku usaha yang taat aturan; Sampai tahun 2019 baru 75% pelaku usaha yang taat aturan. Terkendala dengan minimnya hari operasi kapal pengawas yang dalam setahun hanya memiliki 46 hari operasi pada tahun 2019, jumlah hari operasi yang optimal minimal 100 hari operasi dalam setahun, dan harus memiliki minimal 2 tim patroli, sedangkan saat ini hanya memiliki 1 tim patrol (1 kapten kapal patroli PNS).
- c. Menurunnya produksi perikanan tangkap; Pertumbuhan produksi perikanan tangkap secara umum meningkat dilihat dari target yang hanya 215.300 ton dengan realisasi sebesar 223.680,33 ton, tetapi jika dengan dibandingkan dengan produksi tahun 2018 sebesar 228.980,33 ton maka produksi 2019 mengalami penurunan. Berbagai faktor yang menyebabkan penurun produksi perikanan antara lain belum optimalnya pelayanan kepada pelaku usaha penangkapan ikan di pelabuhan perikanan yang ada, serta kurang memadainya infrastruktur yang ada disentra-sentra nelayan yakni sarana bongkar muat berupa tambat labu/jetty.
- d. Pertumbuhan produksi perikanan budidaya masih sangat rendah; Sampai tahun 2019, produksi perikanan budidaya hanya 7.150,66 ton masih sangat jauh dari target produksi tahun 2019 mencapai 12.120 ton, penurunan produksi ini bila dibandingkan produksi 2018 yang mencapai 9.341,9 ton akibat menurunnya produksi udang di PT. Merdeka sebagai penyumbang terbesar produksi budidaya. Diharapkan pada dua tahun kedepan produksi perikanan budidaya dari jenis budidaya udang vaname akan meningkat dengan maraknya investasi pembukaan tambak baru di wilayah Bangka Belitung.
- e. Jumlah produksi benih ikan yang unggul dari balai pemuliaan milik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum optimal; Sarana dan prasarana yg harus dibanahi baik balai benih air laut dimana kondisi bangsal benih dan pendederan harus segera di rehab karena termakan usia Untuk balai benih air payau, karakteristik instalasinya untuk udang windu sedangkan saat ini balai beralih ke jenis udang vaname sehingga perlu dilakukan rehabilitasi guna pengoptuimalan produksi benih di kedua balai benih. Pada tahun 2019, produksi benih air laut hanya berproduksi sebanyak 0,023 juta ekor sedangkan benih air payau hanya berproduksi sebanyak 437 ribu ekor.

- f. Belum optimalnya pembudidaya yang dibantu vaksinasi dan dibina tentang pengelolaan kesehatan lingkungan budidaya; Sampai dengan tahun 2019 baru 10% pembudidaya yang memperoleh fasilitasi vaksinasi dan pembinaan kesehatan lingkungan karena keterbatasan personil dan anggaran di bidang budidaya.
- g. Pertumbuhan produksi usaha pengolahan hasil perikanan masih cukup rendah; Sampai dengan tahun 2019 produksi baru mencapai 39.697,74 ton potensi industri pengolahan masih cukup besar, apalagi produk yang diekspor masih berupa produk beku dan segar, belum mengalami pengolahan berupa pengalengan maupun pengasapan. Ini merupakan tantangan bagi industri pengolahan perikanan di Bangka Belitung.

2. Urusan Bidang Pertanian

Permasalahan urusan di Bidang Pertanian, sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya rasio sarana dan prasarana pertanian; Meskipun capaian rasio sarana dan prasarana meningkat setiap tahun namun belum optimal. Meningkatnya rasio sarana dan prasarana pertanian tidak diikuti dengan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). NTP subsektor Hortikultura menurun dari 99.98 (2017) menjadi 98.82 (2019). Begitupun dengan Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor Perkebunan sebesar 93.82 (2017) dan menurun di tahun 2019 sebesar 69.58 (2019). Hal ini disebabkan menurunnya harga lada dan karet yang menyebabkan menurunnya ketertarikan petani untuk berkebun lada dan karet sehingga terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke pertambangan dan perkebunan sawit yang dianggap lebih menguntungkan.

3. Urusan Bidang Pariwisata

Permasalahan urusan di Bidang Pariwisata, sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya sumber daya pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi. Hal ini terlihat dari realisasi tenaga kerja sektor pariwisata yang tersertifikasi sampai dengan tahun 2019 hanya sebesar 9 persen atau sebanyak 337 dari 3.642 SDM Pariwisata. Meningkatnya tenaga pariwisata belum diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya pariwisata. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran dalam memberikan pelatihan bagi sumber daya pariwisata.

4. Urusan Bidang Kehutanan

Permasalahan urusan di Bidang Kehutanan, sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya pengelolaan hutan yang disebabkan karena:
 - kelembagaan pengelola kawasan hutan tingkat tapak, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebanyak 13 (tiga belas) unit yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, baru 8 (delapan) unit yang ditetapkan sebagai UPTD KPH sebagai pelaksana kewenangan urusan kehutanan tingkat provinsi; perlunya peningkatan kapasitas SDM di KPH;
 - luas lahan kritis berdasarkan data Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Baturusa Cerucuk tahun 2013, luas lahan kritis dan sangat kritis tahun 2013 mencapai 216.109 hektar; capaian penanaman tahun 2016 sampai dengan

tahun 2019 seluas 18.973 hektar (LPPD Dinas Kehutanan tahun 2019); masih tingginya kerusakan hutan dan lahan, perlu peningkatan upaya penegakan hukum melalui koordinasi yang sinergis dengan berbagai unsur; kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 kebakaran hutan seluas 1.423 ha (LPPD Dinas Kehutanan tahun 2019).

- b. Masih rendahnya penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; Hal ini disebabkan oleh belum terbentuk dan ditetapkannya kawasan ekosistem essensial/kawasan yang memiliki nilai ekosistem penting dan lembaga pengelolanya termasuk pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi; belum dimiliki data tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi yang menjadi kewenangan provinsi;
- c. Masih rendahnya Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan; hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kapasitas penyuluh kehutanan yang berdampak rendahnya kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH). Jumlah KTH tahun 2020 dari 180 KTH, terdiri dari kelas pemula berjumlah 168 KTH, kelas madya berjumlah 15 KTH, kelas utama berjumlah 0 KTH;
- d. Belum optimalnya program perhutanan sosial; Hingga tahun 2019 tercatat sebanyak 172 izin dengan luas 38.051 ha, namun baru 52 izin yang sudah menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan sesuai jenis usahanya. Rendahnya usulan masyarakat untuk mengusulkan pengelolaan hutan sosial menjadi salah satu belum optimalnya pemanfaatan perhutanan social. Untuk tahun 2020, terdapat 7 usulan (± 334 ha) yang sedang berproses untuk pengajuan usulan ke Kementerian.
- e. Masih rendahnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS); Dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pengelolaan DAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat 433 DAS yang terdiri dari 357 DAS bernama dan 76 DAS belum bernama; sejumlah 162 DAS harus dipulihkan daya dukungnya dan 271 DAS yang dipertahankan daya dukungnya; capaian hingga tahun 2019 sejumlah 4 DAS telah diupayakan dipulihkan daya dukungnya dan 2 DAS yang dipertahankan daya dukungnya; kelembagaan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS (Forum DAS) Kabupaten/Kota baru terbentuk 3 Forum DAS dari 7 kabupaten dan kota.

5. Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan urusan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai berikut:

- a. Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif berfluktuatif; capaian rasio elektrifikasi tidak akan statis mengingat kebutuhan untuk memiliki rumah dan berkembangnya dunia usaha semakin bertambah tentunya kebutuhan akan listrik juga semakin meningkat.

6. Urusan Bidang Perdagangan

Permasalahan urusan di Bidang Perdagangan, sebagai berikut:

- a. Menurunnya ekspor di Kepulauan Bangka Belitung; ekspor Bangka Belitung masih sangat didominasi oleh ekspor logam timah. pada tahun 2019 ekspor mengalami

penurunan menjadi 1.294 juta USD atau 465,1 juta ton. Hal tersebut disebabkan karena adanya syarat CPI (*competent person of Indonesia*) dalam pengajuan RKAB (Rencana Kegiatan Anggaran Belanja) dan hanya ada empat perusahaan yang memenuhi persyaratan tersebut.

- b. Masih rendahnya Indeks Keberdayaan Konsumen dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya sosialisasi tentang undang-undang perlindungan konsumen, hak advokasi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen serta rendahnya perilaku komplain atau mengungkapkan keluhan dikalangan konsumen agar produsen dapat memberikan pelayanan produk yang sesuai aturan.

7. Urusan Bidang Perindustrian

Permasalahan urusan di Bidang Perindustrian, sebagai berikut:

- a. Rendahnya pertumbuhan jumlah industri; Sektor industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami tren penurunan baik industri besar, sedang, dan kecil. Pertumbuhan jumlah industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat 18,36% (2018), 12,40% (2019), dan 9,20 (2020). Menurunnya pertumbuhan industri di Bangka Belitung, salah satunya disebabkan oleh menurunnya jumlah industri sedang dari 106 unit (2018) menjadi 100 unit (2020). Hal ini membuat persentase pertumbuhan jumlah industri mengalami perlambatan kenaikan sebesar 2%.
- b. Kepatuhan perusahaan industri dalam penyampaian data dan informasi industri masih rendah; Industri yang sesuai izin usaha industri (IUI) memenuhi 3 aspek, yang salah satunya merupakan penyampaian data dan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019, untuk penyampaian tersebut perusahaan industri terlebih dahulu harus memiliki akun SIINas, kondisi saat ini baru 30% perusahaan industri yang memiliki akun SIINas sehingga tingkat kepatuhan perusahaan industri masih rendah terhadap penyampaian data.

8. Transmigrasi

Permasalahan urusan di Bidang Transmigrasi, sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pengembangan kawasan transmigrasi; Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang, Kabupaten Bangka Selatan dijadikan sebagai kawasan transmigrasi oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu pada tahun 2016 dengan luas 180.278.28 ha. Kemudian pada tahun 2018 ditetapkan 1 kawasan lagi yaitu kawasan Jebus dengan 74.015.27. Meskipun sudah ada 2 kawasan transmigrasi yang ditetapkan akan tetapi pelaksanaan dilapangan belum begitu optimal dalam pengembangan wilayah, terutama menjadikan wilayah yang strategis secara ekonomi dan menjadi pusat perkotaan baru. Pembangunan kota mandiri terpadu perlu mendapat dukungan dari semua sektor agar dapat berkembang dengan baik.

D. Urusan Pendukung Urusan Pemerintah

1. Sekretariat Daerah.

Permasalahan urusan Sekretariat Daerah, sebagai berikut.

- a. Belum optimalnya Nilai Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah; Hal ini disebabkan kemampuan menyediakan data masih rendah. Data yang disajikan hanya mencapai 60% atau 0-50% data IKK LPPD. Sekitar 30% lainnya sudah cukup baik, mampu menyediakan 50-75% data IKK. Rendahnya nilai LPPD berimplikasi pada Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) menjadi rendah, *good governance* tidak berjalan. Bila hal ini terjadi tiga tahun berturut-turut, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), pemerintah akan melakukan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD).

2. Sekretariat DPRD

Permasalahan urusan Sekretariat DPRD, sebagai berikut:

- a. Pencapaian target jumlah produk hukum yang dihasilkan/ditetapkan dalam 1 tahun masih sulit dilakukan. Biasanya target yang ditetapkan dalam 1 tahun ditentukan berdasarkan program legislasi daerah yang telah disepakati bersama antara legislatif dan eksekutif. Sulitnya pencapaian target tersebut dikarenakan waktu yang diperlukan untuk membahas dan menuntaskan satu produk hukum sulit diprediksi. Satu produk hukum bisa saja dituntaskan dalam waktu yang sebentar namun bisa juga dituntaskan dalam waktu panjang tergantung perkembangan yang terjadi pada saat pembahasan rancangan produk hukum tersebut. Sebagai contoh, untuk tahun 2019 target jumlah produk hukum yang dibahas adalah 23 produk hukum. Namun sampai dengan semester pertama tahun 2019, jumlah produk hukum yang dibahas masih di bawah 10. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa rancangan peraturan daerah yang pembahasannya cukup panjang hingga memakan waktu beberapa bulan. Sehingga Sekretariat DPRD melakukan penyesuaian target yang semula 23 menjadi 10 target saja. Selain itu, pembahasan rancangan perda yang berasal dari eksekutif baru bisa dibahas setelah rancangan perdanya disampaikan oleh eksekutif kepada legislatif. Bisa saja penyampaian rancangan Peraturan Daerahnya mundur dari jadwal semula. Hal ini juga berpengaruh terhadap pembahasan rancangan Peraturan Daerah tersebut.

E. Urusan Penunjang Urusan Pemerintah

Permasalahan Urusan Penunjang Pemerintah antara lain:

1. Unsur Perencanaan

Permasalahan unsur Perencanaan, sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya Program/indikator dalam RPJMD dengan Renstra PD. Hal ini disebabkan belum terintegrasinya sistem pembangunan daerah satu data

secara elektronik, baik perencanaan data dan informasi, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Hal ini akan berdampak pada belum optimalnya peningkatan nilai akuntabilitas kinerja provinsi untuk komponen perencanaan kinerja dalam upaya peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan pada tahun 2018 sebesar 23,27 dan tahun 2019 sebesar 23,50 dari bobot maksimal 30.

- b. Belum optimalnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah. Hal ini dilihat dari belum optimalnya hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada komponen capaian kinerja pada tahun 2018 dan tahun 2019 hanya sebesar 12,40 dari bobot maksimal 20.

2. Unsur Keuangan

Permasalahan unsur Keuangan, sebagai berikut:

- a. Rendahnya rata-rata ratio kemandirian keuangan daerah; capaian rasio kemandirian daerah yang mencapai 46,16% sejak tahun 2014, Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih rendah (> 50%), hanya pada tahun 2018 saja angka kemandirian keuangan diatas 50% yaitu 50,20%. Hal ini disebabkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bergerak fluktuatif, sejak tahun 2014 angka kontribusi menunjukkan kinerja yang naik turun dengan rata-rata capaian 31.57%. Dalam kurun waktu 2014-2019 kontribusi PAD terhadap APBD mencapai performa tertinggi pada tahun 2018 yang mencapai angka 35.97 %, sedangkan capaian terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 27.74%.

3. Unsur Kepegawaian

Permasalahan Unsur Kepegawaian, sebagai berikut:

- a. Masih belum optimalnya Pemenuhan Pegawai ASN yang sesuai dengan kebutuhan dan formasi. Hal ini terlihat pada realisasi tahun 2018 sejumlah 94,10 % dari target 83%; tahun 2019 realisasi 26,66 % dari target 87%, sehingga pencapaian target pemenuhan pegawai ASN dari tahun 2018-2019 baru tercapai 314 orang dari target 480 orang.
- b. Masih belum maksimalnya ASN yang memiliki disiplin dan kinerja minimal baik. Hal ini terlihat pada realisasi tahun 2018 sejumlah 75,42% dari target 56%; tahun 2019 realisasi sejumlah 99,89% dari target 99,71%, sehingga pencapaian target penyelesaian kasus disiplin dari tahun 2018-2019 hanya dapat diselesaikan 26 kasus dari total kasus yang masuk sebanyak 53 kasus.

4. Unsur Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan Unsur Pendidikan dan Pelatihan, sebagai berikut:

- a. Masih belum maksimalnya ASN yang meningkat kompetensinya. Hal ini terlihat pada realisasi tahun 2018 sejumlah 88,61% dari target 52%; tahun 2019 realisasi sejumlah 84,90% dari target 59%, sehingga pencapaian target ASN yang meningkat kompetensinya dari tahun 2018-2019 sebanyak 1.412 orang dari target 10.798 orang.

5. Unsur Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan Unsur Penelitian dan Pengembangan, sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah masih rendah. Pada tahun 2018 dan tahun 2019 hasil penelitian yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan hanya sebesar 75 %.
- b. Hasil inovasi daerah yang dikembangkan masih sangat rendah. Pada tahun 2019 Laporan Indeks Inovasi Daerah untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kurang inovatif dengan skor nilai 280.

6. Unsur Penghubung

Permasalahan Unsur Penghubung, sebagai berikut:

- a. Belum maksimalnya pelayanan Badan Penghubung, dimana Nilai Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung pada tahun 2018 sebesar 82,34 % dan 2019 sebesar 100 %. Selain itu dilihat dari capaian data dan informasi Nilai Sakip Badan Penghubung Mencapai nilai di tahun 2018 (70) dan 2019 (71,18), walaupun mengalami peningkatan namun masih terbatas pada kepuasan pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya mencerminkan kepuasan hasil dari pelayanan Badan Penghubung.

F. Unsur Pengawasan Pemerintahan

Permasalahan Unsur Pengawasan, sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan. Tujuan yang akan dicapai adalah nilai materialitas temuan hasil pemeriksaan sebesar <5% dari total APBD tahun anggaran berjalan. Data pada tahun anggaran 2018 menunjukkan nilai materialitas temuan hasil pemeriksaan sebesar 0,86% dan pada tahun anggaran 2019 sebesar 0,06%.
- b. Belum optimalnya nilai level capaian maturitas SPIP. Hal ini terlihat dari data tahun 2018 masih level 2+ dan tahun 2019 level 3 (dengan catatan).
- c. Belum optimalnya Indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan. Hal ini terlihat pada realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan tahun 2018 memperoleh Nilai 5,66 dan tahun 2019 mendapatkan Nilai 5,74 dari total Nilai Bobot sebesar 12. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya instrumen pengawasan lainnya seperti benturan kepentingan, dan pengelolaan pengaduan masyarakat. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah upaya pembangunan zona integritas yang lebih intensif di unit-unit kerja guna mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM) dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 serta mendorong tumbuhnya inovasi-inovasi yang akan menjawab keluhan mengenai pelayanan publik yang selama ini dirasakan masyarakat.

4.1.3. Permasalahan Prioritas Pembangunan Daerah

Permasalahan prioritas pembangunan daerah adalah masalah utama daerah dan masalah daerah berdasarkan urusan yang terkait langsung dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Misi 1 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah

1. Masih rendahnya nilai tambah sektor sektor pertanian yang dipengaruhi oleh :
 - a. Masih kurangnya sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan;
 - b. Masih belum optimalnya pengelolaan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - c. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - d. Masih belum optimalnya peran KUKM dalam meningkatkan nilai tambah hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;
 - e. Masih kurangnya promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan produksi dan nilai tambah hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - f. Lambatnya perkembangan pembangunan kawasan berbasis pertanian, perkebunan dan peternakan.
2. Masih rendahnya nilai tambah sektor perikanan yang dipengaruhi oleh :
 - a. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 - b. Masih belum optimalnya pengelolaan hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 - c. Masih kurangnya sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 - d. Masih belum optimalnya peran KUKM dalam meningkatkan nilai tambah hasil Produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 - e. Masih kurangnya promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan produksi dan nilai tambah hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 - f. Belum berkembangnya kawasan sentra Kelautan dan Perikanan.
3. Masih rendahnya laju pertumbuhan kunjungan wisatawan,yang dipengaruhi oleh:
 - a. Masih rendahnya peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. Masih kurangnya insfrastruktur, sarana dan prasarana pendukung destinasi pariwisata;
 - c. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pariwisata;

- d. Masih belum optimalnya peran serta kebudayaan dalam pengembangan pariwisata;
 - e. Masih belum optimalnya peran KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan;
 - f. Masih kurangnya promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam pengembangan pariwisata;
 - g. Masih lambatnya pengembangan kawasan pendukung pariwisata;
 - h. Masih lambatnya pengembangan kawasan peruntukan pariwisata Tanjung Gunung;
 - i. Masih lambatnya pengembangan kawasan peruntukan pariwisata lintas timur Pulau Bangka;
 - j. Masih lambatnya pengembangan kawasan peruntukan pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang;
 - k. Belum berkembangnya pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan peruntukan pariwisata;
 - l. Masih lambatnya pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil pendukung pariwisata.
4. Masih rendahnya nilai tambah sektor pertambangan dan penggalan yang dipengaruhi oleh:
- a. Masih belum optimalnya tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan;
 - b. Masih kurangnya promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam pengembangan nilai tambah sumber daya mineral.
5. Masih rendahnya nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan yang dipengaruhi oleh :
- a. Belum optimalnya pengembangan kawasan industri dan kawasan peruntukkan industri;
 - b. Pengembangan kawasan industri sadai masih dalam proses pembangunan;
 - c. Masih belum optimalnya tata kelola industri pengolahan;
 - d. Masih rendahnya pengembangan produk potensial ekspor;
 - e. Belum maksimalnya pemetaan potensi ekspor.
6. Masih rendahnya nilai tambah sektor ketenagalistrikan yang dipengaruhi oleh :
- a. Masih kurangnya produksi dan pasokan energi listrik;
 - b. Masih kurangnya ketersediaan energi listrik masyarakat;
 - c. Masih kurangnya Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan pemenuhan energi listrik daerah.
7. Masih lambatnya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja yang dipengaruhi oleh:

- a. Masih adanya angkatan kerja yang belum bekerja;
 - b. Masih belum optimalnya hubungan industrial tenaga kerja;
 - c. Masih rendahnya keikutsertaan tenaga kerja terhadap jaminan tenaga kerja.
8. Masih adanya masyarakat yang menganggur yang dipengaruhi oleh :
- a. Masih kurangnya kuantitas angkatan kerja;
 - b. Masih kurangnya lapangan pekerjaan.
9. Masih lambatnya penurunan tingkat kemiskinan yang dipengaruhi oleh :
- a. Masih tingginya beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - b. Masih rendahnya pendapatan masyarakat miskin;
10. Masih rendahnya pendapatan masyarakat desa yang dipengaruhi oleh:
- a. Masih rendah kualitas SDM dalam pengelolaan pembangunan desa;
 - b. Masih rendahnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam desa;
 - c. Masih kurangnya pemberdayaan masyarakat desa.

Misi 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan konektivitas

1. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur Pekerjaan Umum yang dipengaruhi oleh:
 - a. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur binamarga;
 - b. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur sumber daya air;
 - c. Masih adanya ketidak sesuaian antar pembangunan infrastruktur dan tata ruang;
 - d. Masih kurang kualitas SDM pembangunan infrastruktur.
2. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur dasar yang dipengaruhi oleh:
 - a. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur perumahan dan permukiman;
 - b. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur keciptakarya.
3. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur perhubungan yang di pengaruhi oleh:
 - a. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur perhubungan darat;
 - b. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur perhubungan laut;
 - c. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur perhubungan udara.

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

1. Masih rendahnya angka harapan lama sekolah yang dipengaruhi oleh :
 - a. Masih banyak siswa yang putus sekolah;
 - b. Motivasi belajar rendah;
 - c. masyarakat kesulitan untuk mengakses layanan pendidikan yang letaknya jauh dari pemukiman;

- d. Faktor Kemiskinan.
- 2. Masih rendahnya kualitas pendidikan masyarakat yang dipengaruhi oleh :
 - a. Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana pendidikan;
 - b. Masih rendahnya jumlah dan kualitas guru dan tenaga kependidikan.
- 3. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh :
 - a. Masih belum optimalnya pengendalian tingkat kelahiran penduduk;
 - b. Masih belum optimalnya penataan administrasi kependudukan.
- 4. Masih rendahnya kesejahteraan anak yang dipengaruhi oleh :
 - a. Masih kurangnya pemberian hak-hak kepada anak;
 - b. Masih adanya kekerasan terhadap anak.
- 5. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan perempuan yang dipengaruhi oleh:
 - a. Masih rendahnya pendapatan perempuan;
 - b. Masih adanya kesenjangan gender dalam pembangunan;
 - c. Masih adanya kekerasan terhadap perempuan.
- 6. Masih rendahnya kualitas pemuda yang dipengaruhi oleh :
 - a. Masih sedikitnya pemuda berwirausaha;
 - b. Masih sedikitnya pemuda yang aktif dalam organisasi.
- 7. Masih belum optimalnya pengembangan olah raga yang dipengaruhi oleh :
 - a. Masih rendah partisipasi masyarakat berolahraga;
 - b. Masih kurangnya akses untuk berolahraga.
- 8. Masih rendahnya kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dipengaruhi oleh :
 - a. Masih belum optimalnya pelayanan sosial terhadap PMKS;
 - b. Masih belum optimalnya rehabilitasi sosial terhadap PMKS;
 - c. Masih belum optimalnya pemberdayaan terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Misi 4 : Meningkatkan Pembangunan Kesehatan

- 1. Masih rendahnya tingkat kesehatan masyarakat yang dipengaruhi oleh:
 - a. Belum optimalnya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;
 - b. Belum optimalnya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - c. Masih rendahnya pengendalian terhadap penyalahgunaan Napza.

Misi 5 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi

- 1. Belum optimalnya penatakelolaan pemerintah yang dipengaruhi oleh :

- a. Masih belum optimalnya pengelolaan aset dan laporan keuangan daerah;
 - b. Masih belum optimalnya tata kelola manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran;
 - c. Masih belum optimalnya pengendalian internal Pemerintah Daerah;
 - d. Masih belum maksimalnya peningkatan kualitas manajemen pemerintah daerah berbasis kinerja hal ini terlihat dari belum optimalnya peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan;
 - e. Masih belum maksimalnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa hal ini terlihat dari masih belum optimalnya kualitas pengadaan, akses data dan informasi layanan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik;
 - f. Masih belum optimalnya peningkatan kualitas pengawasan daerah hal ini terlihat dari masih belum optimalnya tata kelola pengawasan;
 - g. Masih belum optimalnya terhadap penataan peraturan perundang-undangan hal ini terlihat dari masih belum optimalnya tata kelola terhadap penataan peraturan perundang-undangan;
 - h. Masih belum optimalnya peningkatan kompetensi dan profesional aparatur hal ini terlihat dari masih belum optimalnya tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah;
 - i. Masih belum optimalnya kualitas implementasi pemerintahan berbasis elektronik hal ini terlihat dari masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik;
 - j. Masih rendahnya kualitas pelayanan publik.
2. Belum optimalnya pelaksanaan demokrasi yang dipengaruhi oleh :
- a. Masih belum optimalnya kebebasan berdemokrasi hal ini terlihat dari masih rendahnya peran serta masyarakat dalam berdemokrasi serta masih belum optimalnya peningkatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta Perlindungan Masyarakat (Linmas);
 - b. Belum optimalnya pemberian hak-hak politik kepada masyarakat yang dipengaruhi oleh masih rendahnya partisipasi politik masyarakat hal ini terlihat dari kurangnya pelayanan terhadap hak-hak politik masyarakat;
 - c. Belum optimalnya peran kelembagaan demokrasi masyarakat yang dipengaruhi oleh masih rendahnya kualitas pengembangan lembaga demokrasi hal ini terlihat dari masih kurangnya pemberdayaan terhadap lembaga-lembaga demokrasi.

Misi 6 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

1. Masih rendahnya kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana yang dipengaruhi oleh:
 - a. Masih belum optimalnya kemampuan terhadap pencegahan dan penanggulangan bencana hal ini terlihat dari masih belum maksimalnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. Masih kurangnya kawasan berbasis penanggulangan bencana hal ini terlihat dari masih kurangnya pengelolaan terhadap kawasan rawan bencana alam serta Belum tertatanya hilir dan hulu daerah rawan bencana Teluk Bayur.
2. Masih belum optimalnya pengendalian terhadap lingkungan hidup yang dipengaruhi oleh:
 - a. Masih rendahnya kualitas air hal ini terlihat dari masih kurangnya pengendalian terhadap kualitas air sungai;
 - b. Masih rendahnya kualitas udara hal ini terlihat dari masih kurangnya pengendalian terhadap kualitas udara;
 - c. Masih kurangnya cakupan tutupan hutan hal ini terlihat dari masih kurangnya pengendalian dan pengawasan terhadap kawasan hutan;
 - d. Masih rendahnya pengendalian terhadap Emisi Gas Rumah Kaca, hal ini terlihat dari masih kurangnya terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu strategis dalam jangka menengah daerah sekurang-kurangnya memenuhi kriteria, sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
3. Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani;

6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan;
7. Kesesuaian dengan RPJPD-P.

Berdasarkan identifikasi dan analisa yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi dasar dalam perumusan visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi melambat dan cenderung stagnan

Pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera tahun 2018 mencapai 4,54 persen, meningkat dibanding tahun 2017 yang tumbuh sebesar 4,29 persen. Total PDRB ADHB Pulau Sumatera pada tahun 2018 mencapai Rp3.233,25 triliun atau sekitar 21,58 persen dari total PDRB 34 provinsi di Indonesia. Sementara PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya memberikan kontribusi sebesar 2,26 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera dan 0,49 persen terhadap total PDRB 34 provinsi di Indonesia. Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp73,07 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp52,21 triliun. Sementara itu PDRB per Kapita Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 mencapai Rp50,05 juta.

a. Melambatnya pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi

Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 tumbuh 4,45 persen, melambat dibandingkan tahun 2017 yang tumbuh sebesar 4,47 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali lapangan usaha pertambangan dan Penggalan serta Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang mengalami kontraksi masing-masing sebesar 1,08 persen dan 5,60 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,72 persen; diikuti Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta Jasa Pendidikan yang masing-masing tumbuh sebesar 9,18 persen dan 9,00 persen.

Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp73,07 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp52,21 triliun. Sementara itu PDRB per Kapita Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 mencapai Rp50,05 juta. Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 tumbuh sebesar 4,45 persen, melambat dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 4,47 persen. Dari sisi produksi, sumber pertumbuhan terbesar berasal dari Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan ini dipengaruhi oleh kontraksi yang terjadi pada beberapa lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Struktur perekonomian Kepulauan Bangka Belitung menurut lapangan usaha tahun 2018 didominasi oleh lima lapangan usaha utama yakni Industri Pengolahan (20,64 persen), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (18,01 persen), Perdagangan

Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan 3 Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Sepeda Motor (15,70 persen), Pertambangan dan Penggalian (10,59 persen) serta Konstruksi (9,73 persen). Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang merupakan penyumbang terbesar keempat bagi perekonomian Kepulauan Bangka Belitung mengalami pertumbuhan negatif (terkontraksi). Perlambatan kinerja perekonomian di tahun 2018 juga dipengaruhi oleh Industri Pengolahan yang mengalami perlambatan pertumbuhan. Hal ini merupakan salah satu dampak dari adanya surat edaran ICDX (*Indonesia Commodity and Derivatives Exchange*) pada bulan Oktober 2018 yang menolak surat keterangan asal bijih timah yang dikeluarkan oleh Surveyor Indonesia. Sementara sebagian besar perusahaan smelter timah yang ada di Kepulauan Bangka Belitung menggunakan jasa Surveyor Indonesia. Dengan ditolaknya surat keterangan asal bijih timah yang dikeluarkan oleh Surveyor Indonesia, sebagian besar perusahaan *smelter* timah berhenti berproduksi pada akhir tahun 2018.

Dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan, sebesar 1,00 persen pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 berasal dari pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, diikuti Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 0,92 persen serta Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 0,49 persen. Peningkatan volume produksi dibanding tahun sebelumnya pada beberapa komoditas strategis seperti komoditas perikanan, perkebunan, dan *Crude Palm Oil* (CPO) menjadi sumber pertumbuhan perekonomian Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2018.

Pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera tahun 2018 mencapai 4,54 persen, meningkat dibanding tahun 2017 yang tumbuh sebesar 4,29 persen. Total PDRB ADHB Pulau Sumatera pada tahun 2018 mencapai Rp3.233,25 triliun atau sekitar 21,58 persen dari total PDRB 34 provinsi di Indonesia. Sementara PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya memberikan kontribusi sebesar 2,26 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera dan 0,49 persen terhadap total PDRB 34 provinsi di Indonesia.

b. Melambatnya pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran

Dari sisi Pengeluaran, Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung secara kumulatif tumbuh melambat sebesar 4,45 persen. Komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) yang tumbuh sebesar 8,22 persen. Komponen yang tumbuh tertinggi kedua adalah pembentukan modal tetap bruto dengan laju sebesar 6,02 persen, dilanjutkan dengan komponen pengeluaran rumah tangga dengan pertumbuhan kumulatif sebesar 5,68 persen.

Komponen pengeluaran konsumsi LNPRT tumbuh cukup tinggi pada tahun ini didukung oleh adanya kegiatan lembaga dan organisasi untuk meramaikan berbagai even seperti acara hari besar agama, even budaya dan olahraga baik nasional maupun internasional, adanya pemilu serentak dan persiapan pemilihan presiden dan calon legislatif di tahun 2019 baik dalam rangka kampanye maupun pengkaderan. Terjadinya beberapa bencana di wilayah Indonesia seperti Palu

dan Lombok membuat kegiatan lembaga kemanusiaan juga lebih menggeliat dan menyumbang pertumbuhan pada komponen ini.

Kinerja Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 ini mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini didorong komponen ekspor yang menjadi salah satu tumpuan perekonomian Kepulauan Bangka Belitung memiliki kinerja yang kurang baik pada Tahun 2018. Laju pertumbuhan ekspor total Bangka Belitung tercatat turun sebesar 1,45 persen. Hal ini didorong oleh turunnya kinerja ekspor luar negeri yang mencapai -2,23 persen. Penurunan ini didorong oleh turunnya seluruh komoditas ekspor mulai dari industri pembekuan ikan, logam timah, karet dan CPO. Sementara itu, komponen pengurang PDRB yakni impor barang dan jasa mengalami penurunan lebih rendah dibandingkan komponen ekspor yaitu -1,44 persen. Hal ini didukung oleh komponen impor luar negeri dengan pertumbuhan mencapai 42 persen. Tumbuhnya impor luar negeri disumbang oleh impor komoditas barang modal, bahan baku dan kebutuhan rumah tangga.

Struktur ekonomi Kepulauan Bangka Belitung menurut pengeluaran secara kumulatif pada tahun 2018 didominasi oleh komponen pengeluaran rumah tangga dengan kontribusi sebesar 60,45 persen. Komponen ekspor secara total mencakup ekspor luar negeri dan ekspor antar daerah menyumbang porsi sebesar 48,05 persen namun sumbangan dari komponen pengurang ekspor yakni impor luar negeri dan impor antar daerah mengambil porsi lebih besar pada perekonomian Bangka Belitung sebesar 48,95 persen. Komponen pembentukan modal tetap bruto dan pengeluaran konsumsi pemerintah memberikan sumbangan pada perekonomian dengan kontribusi masing-masing sebesar 27,78 persen dan 11,18 persen.

Sumber pertumbuhan ekonomi utama masih dipegang oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan 2,99 persen. Meskipun laju pertumbuhannya sendiri mengalami perlambatan tetapi porsinya yang besar masih mampu mendukung perekonomian Kepulauan Bangka Belitung. Pertumbuhan komponen ini secara kumulatif didorong oleh stabilnya harga komoditas kebutuhan masyarakat dan dibangunnya dua pabrik tapioka baru mendorong meningkatnya pendapatan masyarakat. Sumber pertumbuhan tertinggi kedua dipegang oleh komponen pembentukan modal tetap bruto dengan nilai sebesar 1,34 persen, disusul oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dengan sumbangan 0,18 persen.

2. Masih lambatnya peningkatan usia harapan hidup masyarakat

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan indikator angka harapan hidup saat lahir (AHH).Angka Harapan Hidup menggambarkan aspek kesehatan, yaitu perkiraan lama hidup rata-rata penduduk (dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas).Semakin tinggi capaian indikator AHH maka semakin tinggi kemampuan manusia di suatu wilayah untuk hidup lebih lama. Indikator umur harapan hidup penduduk Kepulauan Bangka Belitung pada saat lahir (Eo) tercatat meningkat dari 69,15 tahun pada tahun 2010 menjadi 69,95 tahun pada tahun 2017. Angka sebesar 69,95 tahun ini menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh

seorang bayi yang dilahirkan hidup di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 hingga akhir hayatnya.

Secara nasional, angka harapan hidup penduduk Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 menempati peringkat 14, sementara dalam tingkat regional Sumatera menempati peringkat 4 di bawah Provinsi Riau, Jambi dan Lampung. Umur harapan hidup masyarakat Kepulauan Bangka Belitung memang menunjukkan peningkatan, namun capaian tersebut masih di bawah angka nasional yang pada tahun 2017 mencapai 71,06 tahun. Secara umum, peningkatan angka harapan hidup penduduk pada saat lahir di suatu wilayah menggambarkan kualitas kesehatan penduduk yang semakin membaik.

Terlebih pada kelompok bayi dan anak berusia di Bawah Lima Tahun (Balita) serta kelompok wanita berusia produktif. Fenomena peningkatan kualitas kesehatan penduduk ini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam menjamin dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar melalui penyediaan infrastruktur dan sarana kesehatan maupun tenaga kesehatan.

Di samping penyediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan, upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar dan layanan persalinan secara adil dan merata bagi semua penduduk yang tinggal di wilayah Kepulauan Bangka Belitung juga turut mendorong peningkatan usia harapan hidup penduduk. Faktor lain yang turut berpengaruh terhadap tingginya angka harapan hidup di Kepulauan Bangka Belitung adalah gaya hidup masyarakat yang saat ini semakin peduli dengan kesehatan, terutama kesehatan wanita hamil.

Selama periode 2010-2017, jumlah infrastruktur rumah sakit baik swasta maupun pemerintah mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 hanya ada 7 rumah sakit pemerintah dan 4 rumah sakit swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun pada tahun 2017, sudah ada 10 rumah sakit pemerintah, 9 rumah sakit swasta dan 2 rumah bersalin di Kepulauan Bangka Belitung. Peningkatan jumlah rumah sakit juga diiringi oleh peningkatan kapasitas tempat tidur dari 1.001 unit di tahun 2010 menjadi 1.729 unit di tahun 2017 atau meningkat sebesar 72,73 persen selama kurun waktu tujuh tahun terakhir.

Tidak semua penduduk yang mengalami keluhan atau gangguan kesehatan bisa dan mampu mendapatkan pelayanan kesehatan dari rumah sakit, karena ketersediaan sarana yang belum sebanding dengan pertumbuhan penduduk yang mengalami keluhan/gangguan kesehatan. Untuk mengantisipasinya, pemerintah mengembangkan sistem pelayanan kesehatan yang berbasis wilayah kecamatan yang dekat dengan tempat tinggal penduduk serta berbiaya murah dengan sistem berjenjang yang dikenal dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Untuk menjangkau daerah sulit dan terpencil, pemerintah mengaktifkan puskesmas pembantu dan puskesmas keliling serta mengaktifkan peran posyandu pada level desa/kelurahan untuk melayani pemeriksaan kesehatan bagi balita, ibu hamil, dan penduduk lansia.

Sampai dengan tahun 2017, terdapat 63 unit puskesmas di Kepulauan Bangka Belitung, yang artinya di masing-masing kecamatan di Kepulauan Bangka Belitung sudah tersedia Puskesmas sebagai sarana penunjang kesehatan. Selain itu, jumlah puskesmas pembantu tercatat sebanyak 170 unit dan posyandu sebanyak 1.171 unit. Selain

fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan juga diperlukan untuk mempermudah jangkauan pelayanan kesehatan. Pada tahun 2017, tercatat jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 5.715 orang yang terdiri dari 703 tenaga medis, 2.678 perawat, 1.195 bidan, 380 tenaga farmasi, 135 ahli gizi, 214 tenaga kesehatan masyarakat, 230 teknisi medis dan 114 tenaga sanitasi dan 66 tenaga terapi fisik.

Ketersediaan infrastruktur kesehatan dan tenaga kesehatan yang representatif diyakini menjadi syarat yang diperlukan untuk menjamin kesehatan masyarakat. Namun, hal tersebut belum menjadi syarat kecukupan. Artinya, masih ada aspek yang harus dipenuhi terutama berkaitan dengan daya beli atau kemampuan masyarakat dalam membayar jasa layanan kesehatan yang diaksesnya maupun kemampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan gizi hariannya. Pada tahun 2017, tercatat masih ada 71 bayi yang mengalami gizi buruk dan 1.037 bayi dengan berat badan lahir rendah. Hal ini yang masih akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk segera diatasi agar pembangunan manusia di Kepulauan Bangka Belitung semakin meningkat dari tahun ke tahun.

3. **Masih rendahnya rata-rata lama sekolah masyarakat**

- a. Dimensi pengetahuan diukur dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Indikator tersebut merupakan indikator yang digunakan untuk menggantikan indikator Angka Melek Huruf (AMH) yang dipandang tidak lagi sesuai dengan kondisi sekarang. Harapan lama sekolah dihitung dari jumlah penduduk usia 7 tahun ke atas. Indikator harapan lama sekolah penduduk Kepulauan Bangka Belitung tercatat memiliki pola yang semakin meningkat selama periode 2010-2017. Pada tahun 2017, angka harapan lama sekolah mencapai 11,83 tahun, meningkat dibanding tahun 2010 yang sebesar 10,48 tahun. Angka 11,83 tahun ini menggambarkan angka perkiraan lama tahun sekolah yang akan dijalani oleh penduduk berusia 7 tahun ke atas.
- b. Sementara, indikator rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas meningkat dari 7,07 tahun di tahun 2010 menjadi 7,78 tahun di tahun 2017. Angka sebesar 7,78 tahun ini menggambarkan rata-rata jumlah atau lamanya tahun pendidikan yang telah dijalani oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Angka ini setara dengan tamat pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Secara umum, perkembangan kedua indikator pendidikan tersebut merepresentasikan stok modal manusia (human capital) di Kepulauan Bangka Belitung yang semakin meningkat. Meskipun terjadi peningkatan, namun angka tersebut menunjukkan bahwa program wajib belajar 12 tahun belum berhasil diterapkan di Kepulauan Bangka Belitung, mengingat rata-rata lama sekolah penduduk Kepulauan Bangka Belitung baru mencapai level SD.
- c. Pendidikan merupakan sebuah kegiatan investasi yang hasilnya tidak dapat dirasakan atau dinikmati secara instan dalam jangka yang pendek. Output kegiatan pendidikan berupa peningkatan kualitas modal manusia akan dirasakan pada masa mendatang. Pencapaian kedua indikator pendidikan baik harapan lama sekolah maupun rata-rata lama sekolah menggambarkan tolok ukur sejauh mana keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang telah dilaksanakan pada masa sekarang dan masa lampau.

- d. Secara nasional, angka harapan lama sekolah penduduk Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 berada di peringkat 2 terendah, dan dalam tingkat regional Sumatera menempati peringkat terbawah. Sementara angka rata-rata lama sekolah penduduk Kepulauan Bangka Belitung secara nasional berada pada peringkat 10 terbawah, dan dalam tingkat regional Sumatera menempati peringkat terbawah. Meskipun capaian indikator pengetahuan Kepulauan Bangka Belitung meningkat dari tahun ke tahun, namun apabila dilihat dari peringkatnya, Kepulauan Bangka Belitung masih tertinggal dari provinsi lainnya.
- e. Rendahnya capaian indikator pengetahuan di Kepulauan Bangka Belitung menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Pola pikir masyarakat yang masih kurang mementingkan pendidikan menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah penduduk Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu pemerataan infrastruktur pendidikan, ketersediaan tenaga pendidik, peningkatan alokasi anggaran pendidikan dan juga edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan terutama bagi anak-anak yang masih dalam usia sekolah sangat diperlukan guna meningkatkan capaian indikator ini.

4. Masih Rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 telah mencapai nilai "B" (65,39) dan untuk kabupaten/kota tahun 2018 kabupaten Bangka Tengah sudah mencapai nilai "B" sedangkan kabupaten/kota yang lain masih "C" dan "CC" bahkan ada 2 kabupaten yang belum melakukan PMPRB. Data menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap tahun mengalami peningkatan pada komponen pengungkit reformasi birokrasi dengan daftar nilai sebagaimana ditunjukkan tabel berikut :

Tabel IV.1
8 (Delapan) Area Perubahan

No	Komponen Pengungkit	Bobot	Nilai			
			2015	2016	2017	2018
A.	KOMPONEN PENGUNGKIT					
1.	Manajemen Perubahan	5,00	2,11	1,88	3,04	2,98
2.	Peraturan Perundang-undangan	5,00	1,46	1,46	2,09	2,09
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,49	2,84	2,84	2,84
4.	Penataan Tatalaksana	5,00	2,67	2,54	2,75	2,66
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	11,17	11,03	12,32	12,18
6.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,65	2,65	3,14	3,27
7.	Penguatan Pengawasan	12,00	2,88	4,50	6,46	5,66

No	Komponen Pengungkit	Bobot	Nilai			
			2015	2016	2017	2018
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,16	3,07	3,98	3,80
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	28,59	29,97	36,62	35,48
B.	KOMPONEN HASIL					
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	-	8,53	8,65	8,91
2.	Survei Internal Organisasi	6,00	-	4,18	4,37	3,97
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	-	5,74	5,97	5,88
4.	Opini Objek	3,00	-	2,00	2,00	3,00
5.	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	-	8,13	7,88	8,15
	Total Komponen (B)	40,00	-	28,58	28,87	29,91
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	57,18	58,55	65,49	65,39
	Tingkat Reformasi Birokrasi		-	CC	B	B

- Implementasi RB belum dilakukan secara terintegrasi pada seluruh Perangkat Daerah, melainkan masih berfokus pada masing-masing Kelompok Kerja (Pokja) atau Tim Reformasi Birokrasi (RB) yang dibentuk;
- Peran agen perubahan belum terlihat dalam upaya membawa perubahan yang nyata guna mendukung pencapaian RB;
- Sebagian besar unit organisasi belum memiliki peta proses bisnis, sehingga belum menggambarkan efektifitas dan efisiensi hubungan kerja antar unit organisasi
- Hasil Pengukuran Kinerja Individu belum dijadikan salah satu dasar dalam pemberian *reward and punishment* dan pengembangan karir dan kompetensi pegawai; dan Efektivitas sistem pengawasan internal belum dilakukan secara optimal, khususnya terhadap mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengawasan, seperti; penanganan gratifikasi, *Whistle Blowing System* (WBS), dan zona integritas.
- Melakukan reuiu atas *Road Map* Reformasi Birokrasi dengan menetapkan prioritas perbaikan yang perlu dilakukan baik di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Selanjutnya menyusun langkah kerja yang terpadu untuk mencapai sasaran perubahan yang ditetapkan. *Road Map* ini sebaiknya terintegritas dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, serta selaras dengan *Road Map* RB Nasional 2020-2024 yang akan ditetapkan oleh Kementerian PANRB;
- Melakukan internalisasi arah perubahan kepada seluruh pegawai di seluruh satuan kerja agar mereka memahami arah perubahan dan dilibatkan dalam proses perubahan;

- g. Memperkuat peran agen perubahan dalam mendorong perubahan khususnya di setiap unit kerja dengan membuat perencanaan berupa target-target yang akan diwujudkan yang diikuti dengan evaluasi pelaksanaan secara berkala guna identifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar tujuan perbuatan pola pikir dan budaya kerja aparatur dapat terwujud;
- h. Menetapkan peta proses bisnis untuk setiap unit organisasi yang selaras dengan tugas dan fungsi sesuai dengan kinerja yang diharapkan dicapai;
- i. Melakukan penyelarasan kinerja organisasi dengan kinerja individu, serta penetapan ukuran kinerja individu. Selanjutnya, hasil pengukuran kinerja individu yang dilakukan secara berkala dijadikan salah satu dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment* dan pengembangan karir pegawai;
- j. Meningkatkan efektifitas fungsi pengawasan melalui implementasi kebijakan penanganan gratifikasi, *Whistle Blowing System* (WBS), dan benturan kepentingan, serta pembangunan Zona Integritas sebagai unit kerja miniatur RB dengan mengacu pada Permen PANRB nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- k. Menindaklanjuti hasil survei integritas terhadap jabatan dan organisasi sehingga dapat meningkatkan pemahaman setiap pegawai kinerja yang akan dicapai; dan
- l. Memaklumkan semua standar pelayanan yang ada, diikuti dengan implementasi budaya pelayanan prima di seluruh unit kerja, peningkatan inovasi pelayanan publik, pemberian *reward/punishment* terhadap pemberi layanan, serta evaluasi atas efektifitas pengelolaan pengaduan masyarakat dan survei kepuasan masyarakat.

5. Menurunnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 mencapai 80,11 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan IDI 2016 yang capaiannya sebesar 83,00. Capaian kinerja demokrasi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 masih berada pada kategori “baik”. Capaian IDI dari tahun 2009 hingga 2017 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI Kepulauan Bangka Belitung hanya sebesar 67,01. Angka ini terus mengalami perubahan. Titik terendahnya berada pada tahun 2010 sebesar 65,94 dan titik tertingginya pada tahun 2016 sebesar 83,00. Pada 2017 angka IDI kembali mengalami penurunan menjadi 80,11. Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Indonesia. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (*evidence-based*) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Angka IDI Kepulauan Bangka Belitung 2017 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 83,07; aspek Hak-Hak Politik yang bernilai 82,30; dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 72,89. Pada periode 2009-2017 Aspek Hak-Hak Politik menunjukkan kecenderungan trend yang semakin meningkat. Sementara itu, aspek Kebebasan Sipil dan Lembaga Demokrasi cenderung berfluktuasi. Capaian aspek Kebebasan Sipil masih menjadi yang tertinggi dibandingkan dua aspek lainnya.

Dalam tiga aspek demokrasi yang diukur pada tahun 2017, aspek Kebebasan Sipil dan aspek Lembaga Demokrasi mengalami penurunan, sedangkan aspek Hak-Hak Politik mengalami peningkatan. Indeks aspek Hak-Hak Politik mengalami kenaikan sebesar 1,21 poin. Sedangkan indeks aspek Kebebasan Sipil dan Lembaga Demokrasi masing-masing mengalami penurunan sebesar 4,58 poin dan 7,31 poin. Berbeda dengan tahun 2016 dimana seluruh indeks aspek sudah berada pada kategori “baik”, indeks aspek Lembaga Demokrasi pada 2017 kembali mengalami perubahan kategori menjadi kategori “sedang”. Sedangkan aspek Kebebasan Sipil dan aspek Hak-Hak Politik masih bertahan pada kategori “baik”.

Pada tahun 2017 terdapat empat variabel yang mengalami penurunan indeks dan dua variabel yang mengalami peningkatan. Dari empat variabel yang mengalami penurunan, satu di antaranya menurun cukup tajam. Variabel Peran Peradilan yang Independen menurun paling tajam yaitu sebesar 75,00 poin, dari 100,00 pada 2016 menjadi 25,00 pada 2017. Penurunan terbesar kedua terjadi pada variabel kebebasan berpendapat yang turun 27,11 poin, dari 100,00 pada 2016 menjadi 72,89 pada 2017. Di sisi lain, variabel Peran DPRD meningkat cukup tinggi sebesar 49,34 poin, dari 44,33 pada 2016 menjadi 93,67 pada 2017. Peningkatan nilai indeks ini mengubah posisi variabel Peran DPRD dari kategori “buruk” menjadi kategori “baik”. Variabel lain yang juga meningkat adalah Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan. Variabel ini meningkat sebesar 2,42 poin dari 88,88 pada 2016 menjadi 91,30 pada 2017.

6. Degradasi kualitas lingkungan hidup

a. Penurunan Tutupan Hutan

Secara umum indeks kualitas tutupan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2014 – 2018 selalu di bawah rata-rata nasional. Tahun 2018, nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah 46,91 sedangkan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan Nasional adalah 46,91.

Kondisi ini disebabkan karena kondisi tutupan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang semakin menurun. Kegiatan penambangan timah dan konversi lahan hutan menjadi perkebunan monokultur seperti kelapa sawit, lada dan karet oleh masyarakat dan perusahaan adalah salah satu faktor utama menurunnya tutupan dan kualitas lahan. Selain kondisi tutupan lahan yang sudah banyak rusak tersebut, disebutkan bahwa potensi lahan kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 794.718,497 ha atau 47,6% dari total luasan darat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BPDASHL Baturusa Cerucuk, 2018).

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terhitung dari keseluruhan luas lahan 1.669.419 ha dengan luas tanpa data sebesar 503 ha, didapatkan seluas 20.428 ha merupakan lahan kritis, 260 ha berkategori sangat kritis, seluas 392.437 ha berkategori agak kritis. Lahan berpotensi kritis seluas 794.718 ha, lahan tidak kritis sebesar 461.576 ha. Luasan terbesar berupa kondisi lahan yang potensial kritis mencapai persentase 47,60%, kemudian diikuti oleh lahan tidak kritis sebesar 27,65%, lahan agak kritis sebesar 23,51%, lahan kritis 1,22% dan lahan sangat kritis memiliki persentase luasan yang sangat kecil sebesar 0,02%.

b. **Penanganan Sampah Belum Optimal**

Tahun 2017 terdapat sebesar 368.512 ton timbulan sampah di Kepulauan Bangka Belitung, akan tetapi yang mampu ditangani oleh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah hanya sebesar 248.234,17 ton atau sebesar 67% dari timbulan yang ada. Ini mengindikasikan sebesar 33% sisanya belum mampu dikelola oleh TPA yang tersedia di semua kabupaten/kota. Pada semua Kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung, jumlah sampah yang masuk ke TPA jauh lebih rendah dibandingkan timbulan sampah.

Kota Pangkalpinang merupakan Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menanggung tekanan jumlah sampah yang besar setiap tahunnya dengan timbulan sampah mencapai 53,63% dari total timbulan sampah di Kepulauan Bangka Belitung. Jika tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan permasalahan yang besar di masa yang akan datang berupa sebaran sampah yang tidak pada tempat semestinya yang telah disiapkan. Dampak terbesar adalah pencemaran lingkungan sekitar oleh keberadaan sampah yang tidak mampu ditangani oleh TPA. Sisa makanan mendominasi komposisi sampah dan cenderung meningkat persentasenya dari tahun ke tahun, diikuti oleh sampah plastik, jenis sampah lainnya dengan persentase cukup besar berupa kertas/karton, diikuti oleh sampah taman, nappies, kain dan Produk tekstil, kayu, gelas dan dengan persentase terkecil berupa logam. Cukup banyak keterdapatannya sampah yang tidak mampu diuraikan secara alami (sampah anorganik), akumulasinya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia terutama jika berupa logam berat. Oleh karena itu diperlukan sistem manajemen pengelolaan sampah yang bersifat terpadu, dengan mengkombinasikan prinsip daur ulang dan pemakaian kembali produk hasil daur ulang sampah berupa produk tertentu.

4.3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam penyusunan RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, wajib dilakukan kajian lingkungan hidup strategis. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 dilakukan dengan mengkaji materi kebijakan, rencana, dan/atau program yang terdapat dalam RPJMD 2017-2022. Kajian dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari perumusan isu pembangunan berkelanjutan, isu pembangunan berkelanjutan paling strategis, isu pembangunan berkelanjutan paling prioritas, identifikasi dan analisis materi kebijakan, rencana, dan/atau program di dalam RPJMD terhadap isu prioritas, analisis pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup, perumusan mitigasi, alternatif perbaikan, hingga perumusan rekomendasi perbaikan materi kebijakan, rencana, dan/atau program.

Rekomendasi disusun berdasarkan hasil perumusan mitigasi dan/atau alternatif dan juga hasil keseluruhan proses KLHS. Berdasarkan hasil keseluruhan proses KLHS, maka telah dirumuskan beberapa rekomendasi KLHS yang harus diintegrasikan ke dalam kebijakan, rencana, dan/atau program RPJMD 2017-2022, sebagai berikut.

1. Merevisi beberapa indikator kinerja program pada beberapa kebijakan umum, antara lain:
 - a) Pengembangan kawasan strategis industri perikanan terpadu di Teluk Kelabat Belinyu, pengembangan kawasan strategis minapolitan Lepar Pongok, Pengembangan Kawasan Strategis Etalase Perikanan Selat Nasik, pengembangan kawasan strategis minapolitan Lepar Pongok tidak perlu adanya kegiatan pembangunan pemecah gelombang. Sebagai kompensasinya, pemecah gelombang alami berupa hutan mangrove yang masih ada perlu dipertahankan dan ditambah ketebalannya.
 - b) Pengembangan kawasan mandiri terpadu (KTM Batu Betumpangan dan KTM Gantung) perlu memasukkan indikator tingkat produktivitas pertanian dan tingkat kesejahteraan petani (transmigran).
 - c) Pada kebijakan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dan industri pengolahan sektor kelautan dan perikanan; peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dan industri pengolahan produk pertanian khususnya komoditas Karet, Lada dan Sapi; serta peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dan industri pengolahan kepariwisataan; indikatornya perlu dibuat lebih rinci dan perlu disebutkan lokasi kegiatan.
 - d) Judul kebijakan umum peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dan industri pengolahan kepariwisataan perlu diganti menjadi kebijakan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dan industri kepariwisataan.
 - e) Pada kebijakan umum peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dan industri pengolahan sumber daya alam pertambangan khususnya sumberdaya alam pertambangan timah, untuk indikator kinerja pertumbuhan industri pengolahan pertambangan timah diubah menjadi pertumbuhan industri pengolahan pertambangan timah dan mineral ikutannya.
2. Memasukkan program pencegahan dan mitigasi bencana di Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Gantung.
3. Mengintegrasikan rumusan mitigasi dan/atau alternatif kedalam bentuk program-program disertai dengan indikator-indikator, waktu pelaksanaan dan pembiayaannya. Untuk lebih jelasnya dapat melihat hasil perumusan mitigasi dan/atau alternatif.
4. Setiap rencana pengembangan kawasan strategis perlu didahului dengan penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) dan dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebelum dilakukan pembangunan fisik.
5. Untuk beberapa kebijakan yang berlokasi di area yang di dalamnya terdapat kawasan lindung, seperti: 1) Pengembangan kawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga, 2) Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera, 3) Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat, dan 4) Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung Gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka, perlu memilih lokasi yang sesuai dengan peruntukannya dengan tidak mengganggu area kawasan lindung yang ada di dalamnya.

6. Pemerintah provinsi harus segera menerbitkan peraturan daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai pedoman penggunaan ruang pesisir dan laut untuk mendukung sejumlah kebijakan pengembangan kawasan strategis yang berada di wilayah pesisir dan laut.
7. Dalam pengembangan kawasan peruntukan pariwisata perlu memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, mengingat sebagian besar lokasi pengembangan sudah dikelola oleh masyarakat melalui BUMDes maupun karang taruna.
8. Pemerintah provinsi perlu memetakan dan menetapkan kawasan produksi pangan provinsi agar kebijakan/program pemantapan ketahanan pangan lebih fokus pada kawasan tertentu dan mencegah terjadinya perubahan peruntukan kawasan pertanian untuk kepentingan non pertanian.
9. Pemerintah provinsi perlu segera mengidentifikasi dan menginventarisasi kawasan lindung yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mencegah terjadinya okupasi oleh masyarakat dan perubahan fungsi lindung. Selanjutnya hasil identifikasi dan inventarisasi tersebut dikukuhkan dalam bentuk Peraturan Gubernur tentang Penetapan Kawasan Lindung di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Untuk mengurangi eksploitasi air tanah yang berlebihan di masa datang, pemerintah perlu memfasilitasi dan mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk membangun instalasi pengolahan air bersih beserta jaringan penyalurannya dengan air baku berasal dari air permukaan seperti air kolong dan air sungai terdekat.

Kemudian rekomendasi integrasi KLHS dengan RPJMD ini terbagi menjadi rekomendasi berdasarkan pada daya tampung dan daya dukung daerah yang terdiri dari rekomendasi dengan upaya tambahan maupun tanpa upaya tambahan. Berikut rekomendasi dengan upaya tambahan dan tanpa upaya tambahan,

- A. Rekomendasi daya tampung dan daya dukung daerah dengan upaya tambahan
 1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan dengan rekomendasi yaitu peningkatan layanan sumber air minum dengan memanfaatkan sumber daya air yang ada (sumber-sumber air baku yang ada), mengkonservasi ekosistem yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air dan penyedia sumber air baku untuk air minum, rehabilitasi sarana dan prasarana untuk penyediaan air minum layak yang telah ada, pemantauan kualitas air minum secara berkala agar sesuai dengan standar yang berlaku, kondisi dan kerusakan lahan mempengaruhi kualitas air yang tersedia, sehingga perlu pengolahan air lebih lanjut agar dapat dimanfaatkan sebagai air minum layak dan meningkatkan alokasi anggaran untuk program kegiatan yang berkaitan. Indikator ini mempunyai isu strategis tentang ketersediaan air bersih yang terbatas, kerusakan lahan, perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum konsisten.
 2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan dengan rekomendasi menerapkan program peningkatan infrastruktur pemukiman di daerah yang akses terhadap sanitasinya masih rendah, menyusun program penyuluhan kesadaran pentingnya sanitasi pemukiman. menjaga daya dukung jasa penyediaan air agar tidak terlampaui dengan tetap menjaga area konservasi yang berperan penting dalam penyerapan

air, serta pengelolaan sampah dan limbah secara terpadu, Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah, melaksanakan program minimasi sampah dengan prinsip 3R, pembangunan dan optimalisasi saluran drainase, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan persampahan, dan meningkatkan alokasi anggaran untuk program kegiatan yang berkaitan. Indikator ini mempunyai isu strategis tentang ketersediaan air bersih yang terbatas, pengelolaan sampah dan limbah yang masih kurang optimal, banjir, kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah, perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum konsisten.

3. Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) dengan rekomendasi meningkatkan Pola Pangan Harapan (PPH), menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), menyelenggarakan penyuluhan pertanian secara berkala, mencegah dan mengurangi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, membuat kerjasama dengan provinsi yang menjadi lumbung pangan nasional (*government to government*) dalam rangka mencukupi kekurangan pasokan pangan, melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pertanian, meningkatkan ketersediaan pangan lokal dengan mengoptimalkan lahan-lahan yang tersedia seperti sawah hasil pencetakan, lahan-lahan perkebunan karet dan kelapa sawit, dan lahan bekas tambang, dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung jasa penyediaan pangan yang tersedia, Meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan, meningkatkan produksi hasil perikanan, dan meningkatkan alokasi anggaran untuk program kegiatan yang berkaitan. Indikator ini mempunyai isu strategis tentang kemandirian pangan rendah, dan kerusakan lahan.
4. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan dengan rekomendasi Meningkatkan Pola Pangan Harapan (PPH), Menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Mencegah dan mengurangi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, meningkatkan sarana dan prasarana transportasi untuk distribusi pangan, melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pertanian, meningkatkan ketersediaan pangan lokal dengan mengoptimalkan lahan-lahan yang tersedia seperti sawah hasil pencetakan, lahan-lahan perkebunan karet dan kelapa sawit, dan lahan bekas tambang, dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung jasa penyediaan pangan yang tersedia, meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan, meningkatkan produksi hasil perikanan, dan Meningkatkan alokasi anggaran untuk program kegiatan yang berkaitan. Indikator ini mempunyai isu strategis tentang kemandirian pangan rendah, dan kerusakan lahan.
5. Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air dengan rekomendasi mengkampanyekan pola hidup bersih kepada masyarakat seperti kebiasaan mencuci tangan sebelum makan, membangun fasilitas-fasilitas sanitasi terpadu di wilayah pedesaan atau di sekolah-sekolah dan tempat-tempat umum, dan peningkatan kerja sama dengan pihak swasta untuk penyediaan fasilitas dan sosialisasi untuk sanitasi dan cuci tangan. indikator ini mempunyai

isu strategis tentang ketersediaan air bersih yang terbatas, dan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah.

6. Jumlah desa/kelurahan yang *Open Defecation Free* (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dengan rekomendasi mengkampanyekan untuk pola hidup bersih kepada masyarakat seperti kebiasaan tidak buang air sembarangan, dan kebiasaan mencuci tangan, membangun fasilitas-fasilitas sanitasi terpadu di wilayah pedesaan atau tempat-tempat umum yang tidak memiliki fasilitas sanitasi, dan meningkatkan kerja sama dengan mitra-mitra pemerintah terkait untuk kegiatan penyuluhan ke masyarakat desa dan penyediaan fasilitas buang air besar di desa-desa yang belum ditetapkan sebagai desa ODF.

B. Rekomendasi daya tampung dan daya dukung daerah dengan tanpa daya tambahan

1. Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita dengan rekomendasi Mempertahankan dan meningkatkan program-program yang mendukung penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita, Meningkatkan lagi monitoring terhadap kesehatan balita terutama di wilayah dengan frekuensi kasus kekurangan gizi pada balita yang tinggi, dan melaksanakan penyuluhan secara berkala tentang kebutuhan gizi pada balita untuk mempertahankan capaian yang telah ada. Indikator ini mempunyai isu strategis tentang ketersediaan air bersih terbatas, kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, tingkat pendidikan SDM masih rendah, dan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah.
2. Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kal/kapita/hari dengan rekomendasi mempertahankan dan meningkatkan program-program yang mendukung kecukupan pangan di seluruh wilayah provinsi, dan meningkatkan program bantuan subsidi pangan kepada masyarakat tidak mampu. Indikator ini mempunyai isu strategis tentang kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, tingkat pendidikan SDM masih rendah, dan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah.
3. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan rekomendasi. Mengkampanyekan untuk pola hidup bersih kepada masyarakat seperti tidak buang air sembarangan, dan kebiasaan mencuci tangan, membangun fasilitas-fasilitas sanitasi terpadu di wilayah pedesaan atau tempat-tempat umum yang belum memiliki fasilitas sanitasi dan peningkatan kerja sama dengan mitra-mitra pemerintah untuk penyediaan fasilitas dan sosialisasi untuk sanitasi dan cuci tangan. Indikator ini mempunyai isu strategis tentang ketersediaan air bersih yang terbatas, kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, pengelolaan sampah dan limbah yang masih kurang optimal, dan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah.
4. Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan rekomendasi pembuatan regulasi tentang kewajiban lembaga penyusun RTRW untuk melibatkan lembaga pengelola DAS/*stakeholder* dalam penyusunan RTRW dan pembuatan rasio/persentase jumlah RPDAST yang harus diinternalisasi ke

dalam RTRW, melakukan pengkajian tentang kondisi DAS yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan pemantauan secara rutin dan memperhatikan DAS yang status DDDT-nya terlampaui hampir 50% dari total luas DAS-nya. Indikator ini mempunyai isu strategis ketersediaan air bersih yang terbatas, kerusakan lahan, rawan bencana (banjir), lingkungan banyak yang rusak, dan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum konsisten.

C. Rekomendasi dengan upaya tambahan, untuk indikator yang belum mencapai target RPJMN serta indikator yang belum memiliki data, sebagai berikut:

1. Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan dengan rekomendasi Peningkatan jumlah fasilitas/layanan kesehatan dan tenaga medis yang berkerja sama dengan jaminan asuransi kesehatan, Sosialisasi tentang pentingnya jaminan kesehatan, Pemberian bantuan jaminan kesehatan oleh daerah bagi masyarakat yang kurang mampu, peningkatan pelayanan, fasilitas, dan pegawai yang melayani jaminan kesehatan. indikator ini mempunyai isu strategis yaitu kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, mutu pelayanan kesehatan masih terbatas, kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah, dan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah.
2. Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan dengan rekomendasi. Meningkatkan peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan dengan berkoordinasi dengan pihak yang berkepentingan, Sosialisasi secara rutin kepada perusahaan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas, dan Tingkat pendidikan SDM masih rendah.

Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap dengan rekomendasi. Menggiatkan imunisasi dasar lengkap di posyandu, dan fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya (Puskesmas, Rumah Sakit, dan Klinik Kesehatan), meningkatkan kegiatan kampanye tentang imunisasi pada masyarakat, dan memberikan edukasi khusus kepada orang tua atau kelompok masyarakat yang menolak imunisasi. indikator ini mempunyai isu strategis yaitu kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, mutu pelayanan kesehatan masih terbatas, dan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah.

3. Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin dengan rekomendasi Peningkatan kapasitas kompetensi petugas kesehatan (penyuluh KB dan Bidan), Subsidi pemasangan alat kontrasepsi di tenaga-tenaga kesehatan (bidan), Sosialisasi tentang jenis-jenis dan penggunaan alat-alat kontrasepsi, peningkatan promosi program KB melalui kerjasama dengan media informasi (media cetak, media elektronik). Indikator ini mempunyai isu strategis kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas, dan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah.

4. Persentase rumah tangga kumuh perkotaan dengan rekomendasi fasilitasi upaya penurunan luas kawasan kumuh di perkotaan, dan Penyediaan fasilitas sanitasi, persampahan, pengolahan limbah rumah tangga yang layak dan berkelanjutan. Indikator ini mempunyai isu strategis ketersediaan air bersih yang terbatas, pengelolaan sampah dan limbah yang masih kurang optimal, kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, rawan bencana (banjir), kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang belum konsisten.
5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat dengan rekomendasi Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak kepada masyarakat, Subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu oleh daerah untuk bersekolah, Peningkatan kualitas dan kuantitas dari fasilitas dan tenaga pendidik. Indikator ini mempunyai isu strategis kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, tingkat pendidikan SDM masih rendah.
6. Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang dan Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah dengan rekomendasi mengidentifikasi lokasi yang memiliki risiko bencana dan membuat program dalam penguatan lokasi untuk mengurangi risiko bencana, menyusun program mitigasi bencana untuk mengurangi dampak/risiko yang timbul akibat bencana. Mengidentifikasi lokasi yang memiliki risiko bencana dan membuat program dalam penguatan lokasi untuk mengurangi resiko bencana. Indikator ini mempunyai isu strategis rawan bencana banjir.
7. Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita dan prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe dengan rekomendasi menggiatkan imunisasi dasar lengkap di posyandu, menggiatkan program anak sehat dan bergizi, meningkatkan pendidikan orang tua, dan mengurangi jumlah pernikahan dini, meningkatkan ketersediaan tanaman pangan sehat, menerapkan kebiasaan gemar makan ikan. Indikator ini mempunyai isu strategis Ketersediaan air bersih, kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, mutu pelayanan kesehatan masih terbatas, Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah, kemandirian pangan rendah dan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah
8. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif dengan rekomendasi Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI bagi bayi, mendorong dan meningkatkan program pemberian ASI eksklusif bagi bayi, menyediakan ruang Laktasi di setiap Perangkat Daerah. Indikator ini mempunyai isu strategis ketersediaan air bersih, kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah.
9. Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). Dengan rekomendasi mendorong penciptaan dan pengembangan lapangan kerja informal, Mengembangkan kewirausahaan berbasis ekonomi lokal, mengadakan pelatihan/kursus sesuai dengan kegiatan yang diperlukan seperti keterampilan tertentu, peningkatan daya jual produk pertanian. Indikator ini mempunyai isu strategis kemandirian pangan masih

rendah, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah.

10. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup dengan rekomendasi Menggiatkan imunisasi dasar lengkap di posyandu, dan fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya (Puskesmas, Rumah Sakit, dan Klinik Kesehatan), pencegahan pernikahan usia dini, Meningkatkan fasilitas kesehatan dan kapasitas SDM tenaga medis. Indikator ini mempunyai isu strategis ketersediaan air bersih, kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, mutu pelayanan kesehatan masih terbatas, kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat rendah.
11. Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup dengan rekomendasi Memberikan sosialisasi tentang pentingnya menjaga gizi ibu hamil untuk kesehatan bayi, Menggiatkan program-program yang meningkatkan kesehatan ibu hamil; Menggiatkan pemeriksaan kesehatan ibu hamil, Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pemeriksaan ibu hamil kepada petugas medis (dokter kandungan atau bidan). Indikator ini mempunyai isu strategis Ketersediaan air bersih, kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, mutu pelayanan kesehatan masih terbatas, kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat rendah.
12. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup dengan rekomendasi Menggiatkan imunisasi dasar lengkap di posyandu, dan fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya (Puskesmas, Rumah Sakit, dan Klinik Kesehatan), Memberikan sosialisasi tentang pentingnya menjaga gizi ibu hamil untuk kesehatan bayi, Menggiatkan program-program yang meningkatkan kesehatan ibu hamil, Menggiatkan pemeriksaan kesehatan ibu hamil, Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pemeriksaan ibu hamil kepada petugas medis (dokter kandungan atau bidan). Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu ketersediaan air bersih, kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, mutu pelayanan kesehatan masih terbatas, kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat rendah.
13. Kejadian Malaria per 1.000 orang dengan rekomendasi Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah malaria seperti sosialisasi tentang menjaga kebersihan, penggunaan kelambu, peningkatan jumlah dan mutu dari fasilitas dan tenaga medis. subsidi jaminan kesehatan oleh daerah bagi masyarakat yang kurang mampu, mengurangi luasan kawasan kumuh. indikator ini mempunyai isu strategis yaitu ketersediaan air bersih, kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, mutu pelayanan kesehatan masih terbatas, kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat rendah.
14. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria dengan rekomendasi Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah malaria seperti sosialisasi tentang menjaga kebersihan, penggunaan kelambu, dll; Sosialisasi tentang pola hidup bersih untuk mencegah serangan penyakit malaria, Peningkatan jumlah dan mutu dari fasilitas dan tenaga medis, Subsidi jaminan kesehatan oleh daerah bagi masyarakat yang kurang mampu, Mengurangi luasan kawasan kumuh.

Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu ketersediaan air bersih, kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah.

15. Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B dengan rekomendasi Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan penularan hepatitis B, Sosialisasi tentang pola hidup bersih untuk mencegah serangan penyakit hepatitis, Peningkatan jumlah dan mutu dari fasilitas dan tenaga medis, Pemberian vaksin/imunisasi pada ibu hamil, Subsidi jaminan kesehatan oleh daerah bagi masyarakat yang kurang mampu. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Ketersediaan air bersih, Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah.
16. Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) dengan rekomendasi Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan penyebaran penyakit tropis, Sosialisasi tentang pola hidup sehat dan bersih, Peningkatan jumlah dan mutu dari fasilitas dan tenaga medis. Pemberian obat-obatan sebagai pencegah penyakit, Mengurangi luasan kawasan kumuh. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat dan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah.
17. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) dengan rekomendasi Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan penyebaran penyakit tropis, Sosialisasi tentang pola hidup bersih dan sehat, Peningkatan jumlah dan mutu dari fasilitas dan tenaga medis. Pemberian obat-obatan sebagai pencegah penyakit, Mengurangi luasan kawasan kumuh. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat dan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah.
18. Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun dengan rekomendasi Pendidikan tentang kesehatan sejak dini dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA tentang bahaya merokok, menggiatkan kampanye tentang bahaya merokok, memperbanyak jumlah kawasan tanpa rokok. Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah.
19. Prevalensi tekanan darah tinggi dengan rekomendasi sosialisasi tentang pola hidup sehat seperti olahraga, makanan sehat, gaya hidup dan lain-lain (GERMAS), Meningkatkan pelayanan kesehatan terkait POSBINDU. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah, mutu pelayanan kesehatan masih terbatas.
20. Jumlah penyalahgunaan narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis dan jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi yang dengan rekomendasi Peningkatan kapasitas dan

kompetensi petugas, serta fasilitas rehabilitasi kecanduan narkoba dan alkohol, Sosialisasi tentang caramengakses layanan rehabilitasi. Subsidi bagi masyarakat kurang mampu untuk mengakses layanan rehabilitasi. Menggiatkan pendidikan tentang bahaya narkoba sejak dini. Pencegahan peredaran narkoba dengan peningkatan kualitas dan kuantitas dari aparat penegak hukum (BNN dan Polisi). Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah, Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas.

21. Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan dengan rekomendasi Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas, serta fasilitas rehabilitasi kecanduan narkoba dan alkohol; Sosialisasi tentang cara mengakses layanan rehabilitasi. Subsidi bagi masyarakat kurang mampu untuk mengakses layanan rehabilitasi. Menggiatkan pendidikan tentang bahaya narkoba sejak dini. Pencegahan peredaran narkoba dengan peningkatan kualitas dan kuantitas dari aparat penegak hukum (BNN dan Polisi). Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah, mutu pelayanan kesehatan masih terbatas.
22. Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu dengan rekomendasi Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas, serta fasilitas rehabilitasi kecanduan narkoba dan alkohol; Sosialisasi tentang cara mengakses layanan rehabilitasi. Subsidi bagi masyarakat kurang mampu untuk mengakses layanan rehabilitasi. Menggiatkan pendidikan tentang bahaya narkoba sejak dini. Pencegahan peredaran narkoba dengan peningkatan kualitas dan kuantitas dari aparat penegak hukum (BNN dan Polisi). Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah, mutu pelayanan kesehatan masih terbatas.
23. Prevalensi penyalahgunaan narkoba dengan rekomendasi peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas, serta fasilitas rehabilitasi kecanduan narkoba dan alkohol, sosialisasi tentang cara mengakses layanan rehabilitasi. Subsidi bagi masyarakat kurang mampu untuk mengakses layanan rehabilitasi. Menggiatkan pendidikan tentang bahaya narkoba sejak dini. Pencegahan peredaran narkoba dengan peningkatan kualitas dan kuantitas dari aparat penegak hukum (BNN dan Polisi). Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah, mutu pelayanan kesehatan masih terbatas.
24. Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern dengan rekomendasi Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas kesehatan (penyuluh KB dan Bidan); Subsidi pemasangan alat kontrasepsi di tenaga-tenaga kesehatan (bidan); Sosialisasi tentang jenis-jenis dan penggunaan alat-alat kontrasepsi. Indikator ini mempunyai isu strategis

yaitu Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah, mutu pelayanan kesehatan masih terbatas.

25. Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk dengan rekomendasi Peningkatan jumlah fasilitas/layanan kesehatan dan tenaga medis yang berkerjasama dengan jaminan asuransi kesehatan, Sosialisasi tentang pentingnya jaminan kesehatan. Mewajibkan seluruh pegawai pemerintahan untuk ikut dalam asuransi jaminan kesehatan. Pemberian bantuan jaminan kesehatan oleh daerah bagi masyarakat yang kurang mampu. Peningkatan pelayanan, fasilitas, dan SDM yang melayani jaminan kesehatan. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah, Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas.
26. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan rekomendasi Peningkatan jumlah fasilitas/layanan kesehatan dan tenaga medis yang berkerjasama dengan jaminan asuransi kesehatan; Sosialisasi tentang pentingnya jaminan kesehatan. Mewajibkan seluruh pegawai pemerintahan untuk ikut dalam asuransi jaminan kesehatan. Pemberian bantuan jaminan kesehatan oleh daerah bagi masyarakat yang kurang mampu. Peningkatan pelayanan, fasilitas, dan pegawai yang melayani jaminan kesehatan. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah, Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas.
27. Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun dengan rekomendasi Pendidikan tentang kesehatan sejak dini dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA tentang bahaya merokok; Pembuatan regulasi tentang batasan umur yang dapat membeli rokok. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah, Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas.
28. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan dengan rekomendasi Pengaturan rasio antara tenaga medis dengan jumlah pasien yang harus dilayani dalam satu daerah. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas.
29. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat dengan rekomendasi Subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu oleh daerah untuk bersekolah, dan Peningkatan kualitas dan kuantitas dari fasilitas dan tenaga pendidik. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, Tingkat pendidikan SDM masih rendah. Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak kepada masyarakat.
30. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), indikator ini mempunyai isu strategis Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, Tingkat pendidikan SDM masih rendah.

31. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat dengan rekomendasi Subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu oleh daerah untuk bersekolah, Peningkatan kualitas dan kuantitas dari fasilitas dan tenaga pendidik. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, Tingkat pendidikan SDM masih rendah. Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak kepada masyarakat.
32. Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) dengan rekomendasi menggiatkan pendidikan-pendidikan non-formal yang bergerak di bidang TIK, dan Memberikan subsidi kepada lembaga formal dan non-formal yang bergerak di bidang TIK. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, Tingkat pendidikan SDM masih rendah.
33. Rasio angka partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi dengan rekomendasi Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak kepada masyarakat, Subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu oleh daerah untuk bersekolah, dan Peningkatan kualitas dan kuantitas dari fasilitas dan tenaga pendidik. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, Tingkat pendidikan SDM masih rendah.
34. Persentase guru SMA yang bersertifikat pendidik dengan rekomendasi Pemberian subsidi bagi tenaga pendidik yang mengambil sertifikat tenaga pendidik, dan Pemberian insentif bagi guru SMA yang bersertifikat pendidik. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, dan Tingkat pendidikan SDM masih rendah.
35. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan dengan rekomendasi kerja sama dengan lembaga-lembaga non pemerintahan atau LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan perguruan tinggi untuk memberi masukan dan kajian bagi pembuatan regulasi tentang pemberdayaan perempuan. Pembuatan regulasi tentang pemberdayaan perempuan. Menggiatkan peran aktif lembaga pemerintah seperti PKK dalam pemberdayaan perempuan. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, tingkat pendidikan SDM masih rendah, reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal, Kondusivitas demokrasi belum stabil.
36. Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun dengan rekomendasi kampanye tentang bahayanya menikah di usia muda, pembuatan regulasi tentang batasan usia pernikahan. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu pengguna narkoba dan penderita HIV AIDS meningkat, kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, tingkat pendidikan SDM masih rendah.

37. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat dengan rekomendasi Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak kepada masyarakat; Subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu oleh daerah untuk bersekolah. Peningkatan kualitas dan kuantitas dari fasilitas dan tenaga pendidik. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, Tingkat pendidikan SDM masih rendah.
38. Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial dengan rekomendasi Pembuatan regulasi tentang presentase jumlah tenaga kerja perempuan di setiap perusahaan Mengkampanyekan kesetaraan gender dalam pekerjaan. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, dan Tingkat pendidikan SDM masih rendah.
39. Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern dengan rekomendasi Peningkatan jumlah dan mutu dari petugas kesehatan (penyuluh KB dan Bidan) Subsidi pemasangan alat kontrasepsi di tenaga-tenaga kesehatan (bidan) Sosialisasi tentang jenis-jenis dan penggunaan alat-alat kontrasepsi. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Pengguna narkoba dan penderita HIV AIDS meningkat, Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, Tingkat pendidikan SDM masih rendah
40. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam dengan rekomendasi Memberikan pendidikan/pelatihan/sosialisasi terhadap penggunaan telepon genggam untuk kegiatan-kegiatan yang produktif atau kegiatan-kegiatan usaha. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informatika.
41. Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau dengan rekomendasi Intervensi teknologi yang hemat air untuk daerah-daerah yang presentase luas daerah dengan kelas jasa ekosistem sangat rendah dari pada daerah yang lain seperti Kabupaten Belitung, Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang, Peningkatan kapasitas air baku, Mempertahankan hutan rawa dan rawa yang ada sebagai kawasan tangkapan air agar tidak berubah peruntukannya sebagai kawasan terbangun, penghitungan sumber daya air permukaan yang layak untuk dimanfaatkan sebagai sumber air baku, perhitungan detail tentang penggunaan air untuk kegiatan industri, dan
42. Mengkampanyekan untuk menjaga kelestarian wilayah-wilayah tangkapan air seperti rawa, hutan rawa dan tubuh air kepada masyarakat. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Potensi sumber daya di kawasan strategis belum terbangun dengan baik, Kualitas infrastruktur dan konektivitas masih terbatas, Konektivitas antar pulau sebagian besar sulit dijangkau, Lingkungan hidup banyak yang rusak. Pemanfaatan sumber daya air permukaan yang ada dengan bijak pada daerah-daerah yang belum terlampaui daya dukung dan daya tampungnya.
43. Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dengan rekomendasi Membangun fasilitas-fasilitas sanitasi

terpadu di wilayah pedesaan atau yang tidak memiliki fasilitas sanitasi, Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta untuk penyediaan fasilitas dan sosialisasi untuk sanitasi dan cuci tangan. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah, mengkampanyekan untuk pola hidup bersih kepada masyarakat seperti tidak buang air sembarangan, dan mencuci tangan.

44. Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah dengan rekomendasi Pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah untuk industri, rumah tangga, dan lembaga pemerintahan, Pemetaan potensi air tanah di wilayah Bangka Belitung, Pemberian insentif bagi masyarakat, industri dan lembaga pemerintahan yang bijak dalam memanfaatkan air tanah (minim menggunakan air tanah), Pembangunan instalasi pengolahan air permukaan sebagai air baku. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu ketersediaan air bersih yang terbatas, kerusakan lahan, lingkungan hidup banyak yang rusak.
45. Luas pengembangan hutan serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS dengan rekomendasi Memberikan insentif bagi masyarakat yang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dan yang melaporkan penebangan hutan ilegal, Pembuatan regulasi untuk penebangan kayu di kawasan DAS, pembuatan kajian dan regulasi tentang rasio luas hutan minimal untuk setiap kawasan DAS. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu lingkungan hidup banyak yang rusak, kerusakan lahan, banyaknya lahan tidak produktif.
46. Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi dengan rekomendasi memaksimalkan rehabilitasi lahan dalam KPH, Pemberian izin usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan tata ruang yang berlaku sehingga meminimalkan terjadinya tumpang tindih lahan. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu kerusakan lahan konflik sengketa lahan dan pemanfaatan ruang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum konsisten.
47. Konsumsi listrik per kapita dengan rekomendasi pemberian subsidi bagi masyarakat kurang mampu untuk instalasi listrik oleh daerah, mempermudah jalur birokrasi dalam pendaftaran instalasi baru, menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai sumber tenaga listrik. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kebutuhan akan energi tidak seimbang dengan pertumbuhan penyediaan sumber energi.
48. Rasio penggunaan gas rumah kaca Kebutuhan akan energi tidak seimbang dengan pertumbuhan penyediaan sumber energi. Melakukan monitoring terhadap jumlah gas rumah kaca pada suatu wilayah permukiman seperti pendirian stasiun pemantauan kualitas udara. Mulai memanfaatkan energi baru dan terbarukan dalam kegiatan rumah tangga. Pembuatan regulasi yang mengatur ambang batas dari gas rumah kaca di wilayah permukiman.
49. Laju pertumbuhan PDB per kapita dengan rekomendasi meningkatkan kegiatan ekonomi berbasis potensi wilayah, membuat program yang dapat menciptakan iklim usaha kecil menengah, memfasilitasi kemudahan dalam legalitas badan usaha kecil menengah, dan peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu pertumbuhan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, dan tingginya laju pertumbuhan penduduk.

50. PDB per kapita dengan rekomendasi Meningkatkan kegiatan ekonomi berbasis potensi wilayah, membuat program yang dapat menciptakan iklim usaha kecil menengah, memfasilitasi kemudahan dalam legalitas badan usaha kecil menengah, dan peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah tingginya laju pertumbuhan penduduk.
51. Proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin dengan rekomendasi Mendorong penciptaan lapangan kerja, Mengembangkan kewirausahaan berbasis ekonomi lokal, Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi keterampilan, dan Mengadakan pelatihan bagi para pencari kerja sebelum terjun ke lapangan kerja. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah tingginya laju pertumbuhan penduduk tingkat pengangguran lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi belum optimalnya pengembangan potensi unggulan daerah sektor pariwisata, perkebunan, perikanan dan pertambangan yang berkelanjutan tingkat pendidikan SDM masih rendah.
52. Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian Mendorong penciptaan dan pengembangan lapangan kerja informal; Mengembangkan kewirausahaan berbasis ekonomi lokal; mengadakan pelatihan/kursus sesuai dengan kegiatan yang diperlukan seperti keterampilan tertentu, peningkatan daya jual produk pertanian. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, tingginya laju pertumbuhan penduduk, tingkat pengangguran lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi, belum optimalnya pengembangan potensi unggulan daerah sektor pariwisata, perkebunan, perikanan dan pertambangan yang berkelanjutan dan tingkat pendidikan SDM masih rendah.
53. Upah rata-rata per jam pekerja penetapan standar minimum upah yang sesuai dengan kebutuhan dengan rekomendasi Mengembangkan kualitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu tingginya laju pertumbuhan penduduk, tingkat pengangguran lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi, belum optimalnya pengembangan potensi unggulan daerah sektor pariwisata, perkebunan, perikanan dan pertambangan yang berkelanjutan tingkat pendidikan SDM masih rendah, dan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah.
54. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur serta Persentase setengah pengangguran dengan rekomendasi Mendorong penciptaan lapangan kerja, mengembangkan kewirausahaan berbasis ekonomi lokal, meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi keterampilan, mengadakan pelatihan bagi para pencari kerja sebelum terjun ke lapangan kerja. indikator ini mempunyai isu strategis yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, tingginya laju pertumbuhan penduduk, tingkat pengangguran lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi,

tingkat pendidikan SDM masih rendah dan Belum optimalnya pengembangan potensi unggulan daerah sektor pariwisata, perkebunan, perikanan dan pertambangan yang berkelanjutan.

55. Persentase usia muda (15-24) yang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan dengan rekomendasi mendorong penciptaan dan pengembangan lapangan kerja informal, mengembangkan kewirausahaan berbasis ekonomi lokal, mengadakan pelatihan/ kursus sesuai dengan kegiatan yang diperlukan seperti keterampilan tertentu, peningkatan daya jual produk pertanian. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, tingginya laju pertumbuhan penduduk, tingkat pengangguran lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi, Belum optimalnya pengembangan potensi unggulan daerah sektor pariwisata, perkebunan, perikanan dan pertambangan yang berkelanjutan, tingkat pendidikan SDM masih rendah.
56. Jumlah wisatawan mancanegara dengan rekomendasi mengembangkan infrastruktur dan sarpras destinasi wisata yang telah ada dan baru; meningkatkan promosi wisata yang telah ada dan baru; menjaga kebersihan lingkungan destinasi; mempertahankan budaya lokal yang dapat meningkatkan daya tarik wisata. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu belum optimalnya pengembangan potensi unggulan daerah sektor pariwisata, perkebunan, perikanan dan pertambangan yang berkelanjutan, potensi sumber daya di kawasan strategis belum terbangun dengan baik, dan Kualitas infrastruktur dan konektivitas masih terbatas.
57. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dengan rekomendasi Mengembangkan infrastruktur dan sarpras destinasi wisata yang telah ada dan baru, meningkatkan promosi wisata yang telah ada dan baru, menjaga kebersihan lingkungan destinasi, mempertahankan budaya lokal yang dapat meningkatkan daya tarik wisata. indikator ini mempunyai isu strategis yaitu belum optimalnya pengembangan potensi unggulan daerah sektor pariwisata, perkebunan, perikanan dan pertambangan yang berkelanjutan, potensi sumber daya di kawasan strategis belum terbangun dengan baik, Kualitas infrastruktur dan konektivitas masih terbatas, dan Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informatika.
58. Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa dengan rekomendasi meningkatkan jumlah fasilitas ATM di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa dengan rekomendasi Meningkatkan jumlah fasilitas kantor bank di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah.
59. Jumlah dermaga penyeberangan dengan isu strategis yaitu konektivitas antar pulau sebagian besar sulit dijangkau, kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah masih tinggi, Potensi sumber daya di kawasan strategis belum

terbangun dengan baik dan Kualitas infrastruktur dan konektivitas masih terbatas.

60. Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan perkapita. dengan rekomendasi Hilirisasi sumber daya mineral masih rendah peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya mineral belum optimal mengembangkan industri sektor non migas (pariwisata, perkebunan, pertanian, UKM, dan lain-lain.) yang berwawasan lingkungan, Meningkatkan *skill* dan kompetensi tenaga kerja terkait, Pengembangan produk hilirasi pertanian/perkebunan dan pertambangan di Kepulauan Bangka Belitung, dengan berbasis potensi unggulan daerah. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu tingkat investasi rendah nilai tambah dan daya saing produk UKM yang masih rendah. tingginya tingkat inflasi belum optimalnya pengembangan potensi unggulan daerah sektor pariwisata, perkebunan, perikanan dan pertambangan yang berkelanjutan.
61. Persentase Perubahan Emisi CO₂/Emisi Gas Rumah Kaca dengan rekomendasi Menyusun dan Melaksanakan RAD GRK, Melakukan Upaya aksi mitigasi dan adaptasi GRK, Meningkatkan tutupan lahan berupa vegetasi seperti RTH pada kawasan industri, taman kota dan lain-lain. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kerusakan lahan, Pengelolaan sampah dan limbah yang masih kurang optimal.
62. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam dengan rekomendasi Mempeluas jangkauan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk pulau-pulau kecil berpenghuni dan daerah terpencil dan tertinggal. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informatika.
63. Proporsi individu yang menggunakan internet dengan rekomendasi Mempeluas jangkauan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk pulau-pulau kecil berpenghuni dan daerah terpencil dan tertinggal. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informatika.
64. Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan dengan rekomendasi meningkatkan peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan dengan berkoordinasi dengan pihak yang berkepentingan. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat investasi rendah dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah.
65. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau dengan rekomendasi Meningkatkan capaian rumah layak huni bagi semua masyarakat (hingga tahun 2017 mencapai 98,47%; yang harus dicapai hingga 2019 sebesar 1,53%). Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, dan Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk.

66. Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan dengan rekomendasi Menggalakkan program penggunaan fasilitas transportasi umum terutama untuk anak-anak sekolah (jika memungkinkan gratis); Meningkatkan kenyamanan fasilitas transportasi umum. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kualitas infrastruktur dan konektivitas masih terbatas, Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal.
67. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dengan rekomendasi Mengidentifikasi wilayah atau lokasi yang memiliki potensi rawan bencana dan perubahan cuaca ekstrim di Bangka Belitung; Jika diperlukan membangun stasiun pada wilayah berpotensi atau rawan bencana atau perubahan iklim; Menambah jumlah alat pendeteksi dini bencana atau perubahan cuaca dan iklim pada stasiun yang telah ada. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Lingkungan hidup banyak yang rusak, rawan bencana, banjir, kerusakan lahan.
68. Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan dengan rekomendasi Mengidentifikasi wilayah atau lokasi yang memiliki potensi rawan bencana dan perubahan cuaca ekstrim di Bangka Belitung, Jika diperlukan membangun stasiun pada wilayah berpotensi atau rawanbencana atau perubahan iklim, dan menambah jumlah alat pendeteksi dini bencana atau perubahan cuaca dan iklim pada stasiun yang telah ada. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu rawan bencana, reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informatika.
69. Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) dengan rekomendasi Meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 pada kawasan industri; mengembangkan kawasan industri yang berwawasan lingkungan. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu lingkungan hidup banyak yang rusak, pengelolaan sampah dan limbah yang masih kurang optimal.
70. Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang dengan rekomendasi Sosialisasi dan menggalakkan program daur ulang sampah; Meningkatkan keterampilan masyarakat tentang pemanfaatan sampah yang dapat didaur ulang terutama di sekitar TPS 3R; Menambah sarana TPS 3R Pengelolaan sampah dan limbah yang masih kurang optimal. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu lingkungan hidup banyak yang rusak.
71. Dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah dengan rekomendasi Melakukan kajian yang mendalam terkait isu patahan di Selat Nasik, Meningkatkan Dokumen Perencanaan terkait PRB, implementasi pelaksanaan dan evaluasi, Melengkapi data PRB, Membuat program dan alokasi anggaran untuk mencapai target indikator. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Rawan bencana, Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal, Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informatika.
72. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang dengan rekomendasi Menetapkan target Provinsi, melengkapi data,

membuat program dan alokasi anggaran untuk mencapai target indikator. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu rawan bencana.

73. Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional mengingat sering terjadinya konflik di wilayah laut sehingga perlu segera ditetapkan perda terkait zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; perlu adanya terkait terkait pengelolaan kawasan konservasi. indikator ini mempunyai isu strategis yaitu kerusakan laut dan pesisir konflik sengketa lahan dan pemanfaatan ruang.
74. Persentase kepatuhan pelaku usaha pendataan seluruh pelaku usaha sarana prasarana produksi perikanan, garam, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta melakukan pengklasifikasian; sosialisasi terkait pentingnya kepatuhan pelaku usaha terkait; membuat program dan mengalokasikan anggaran. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu kerusakan laut dan pesisir konflik sengketa lahan dan pemanfaatan ruang.
75. Jumlah nelayan yang terlindungi dengan rekomendasi mengingat terdapat program asuransi nelayan dari pemerintah pusat sehingga pendataan penggunaan asuransi nelayan di seluruh kabupaten kota, dan kemudahan dalam mengakses segala bentuk program pemerintah terkait perlindungan nelayan dan keluarganya. indikator ini mempunyai isu strategis yaitu kerusakan laut dan pesisir konflik sengketa lahan dan pemanfaatan ruang.
76. Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan dengan rekomendasi menetapkan target provinsi; membuat program dan alokasi anggaran untuk mencapai target indikator. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu kerusakan lahan, konflik sengketa lahan dan pemanfaatan ruang, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum konsisten.
77. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya dengan rekomendasi Perlu melakukan kajian terkait degradasi lingkungan di kawasan konservasi dengan melibatkan berbagai stakeholder termasuk perguruan tinggi; menyusun program dan alokasi anggaran untuk mencapai target indikator. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu kerusakan lahan, konflik sengketa lahan dan pemanfaatan ruang, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum konsisten.
78. Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dengan rekomendasi instansi terkait melakukan pendataan; Menyusun program dan alokasi anggaran untuk mencapai target indikator. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu kerusakan lahan, konflik sengketa lahan dan pemanfaatan ruang, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum konsisten.
79. Jumlah kesatuan pengelolaan hutan dengan rekomendasi meningkatkan kapasitas SDM setiap KPH; mempertahankan program dan kinerja; melakukan evaluasi untuk mencapai titik optimum penggunaan anggaran. indikator ini mempunyai isu strategis yaitu kerusakan lahan, konflik sengketa lahan dan pemanfaatan ruang, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum konsisten.

80. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan, kerusakan lahan, konflik sengketa lahan dan pemanfaatan ruang dengan rekomendasi menetapkan target provinsi, dan membuat program dan alokasi anggaran untuk mencapai target indikator. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum konsisten.
81. Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir dengan rekomendasi menetapkan target provinsi, membuat program dan alokasi anggaran untuk melakukan pencegahan, perlindungan dan monitoring terkait kejahatan pembunuhan. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, tingkat pendidikan SDM masih rendah.
82. Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir dengan rekomendasi Menetapkan target provinsi, Membuat program dan alokasi anggaran untuk mencapai target indikator. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, tingkat pendidikan SDM masih rendah.
83. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya menetapkan target provinsi, pendataan dan membuat program dan alokasi anggaran untuk mencapai target indikator. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, tingkat pendidikan SDM masih rendah.
84. Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (provinsi/ kabupaten/kota) dengan rekomendasi Meningkatkan jumlah Kabupaten Kota yang WTP, Mempertahankan program dan kinerja di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Melakukan evaluasi untuk mencapai titik optimum penggunaan anggaran. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal.
85. Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Dengan rekomendasi Meningkatkan pemahaman terhadap SAKIP di Seluruh Perangkat Daerah baik di pemerintah provinsi dan di kabupaten kota, mempertahankan program dan kinerja dan melakukan evaluasi untuk mencapai titik optimum penggunaan anggaran. indikator ini mempunyai isu strategis yaitu reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal.
86. Persentase penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan barang Mempertahankan program dan kinerja dan Melakukan evaluasi untuk mencapai titik optimum penggunaan anggaran. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal.
87. Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan rekomendasi Melengkapi data dan Membuat program dan alokasi anggaran untuk mencapai target indikator. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kondusivitas demokrasi belum stabil.

88. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB dengan rekomendasi pendataan, dan membuat program dan alokasi anggaran untuk mencapai target indikator. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu tingkat investasi rendah dan menetapkan target provinsi.
 89. Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik dengan rekomendasi pendataan, membuat program dan alokasi anggaran untuk mencapai target indikator tingkat investasi rendah. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah masih tinggi dan menetapkan target provinsi.
 90. Proporsi individu yang menggunakan internet meningkatkan jumlah individu menggunakan internet; melengkapi data; melaksanakan program pendataan berbasis internet, membuat program dan alokasi anggaran untuk mencapai target indikator. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu tingkat pendidikan SDM masih rendah kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informatika.
 91. Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet dengan rekomendasi Membuat program dan alokasi anggaran untuk mencapai target indikator dan mempunyai isu strategis yaitu keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informatika dan melengkapi data.
- D. Rekomendasi tanpa upaya tambahan, untuk indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target RPJMN, sebagai berikut:
1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur dengan rekomendasi Mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata berbasis masyarakat; Meningkatkan bantuan jaminan sosial terutama bagi masyarakat miskin; Memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin agar dapat berwirausaha.
 2. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ program keluarga harapan dengan rekomendasi mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata berbasis masyarakat; memberikan pelatihan untuk mendapatkan keterampilan bagi masyarakat miskin agar dapat berwirausaha.
 3. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dengan rekomendasi meningkatkan fasilitas, layanan, dan jangkauan akses melahirkan terutama di desa-desa dan daerah terpencil.
 4. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat dengan rekomendasi Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak kepada masyarakat; Subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu oleh daerah untuk bersekolah. Peningkatan kualitas dan kuantitas dari fasilitas dan tenaga pendidik.
 5. Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran dengan rekomendasi meningkatkan layanan dan fasilitas dalam pembuatan akte kelahiran.

6. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN dengan rekomendasi memberikan subsidi penerangan bagi masyarakat rentan dan miskin. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
7. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta dengan rekomendasi Menggiatkan imunisasi dasar lengkap di posyandu; menggiatkan program anak sehat dan bergizi.
8. Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe dengan rekomendasi Menggiatkan imunisasi dasar lengkap di Posyandu; Menggiatkan program anak sehat dan bergizi.
9. Prevalensi anemia pada ibu hamil Sosialisasi tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala pada ibu hamil dengan rekomendasi menggiatkan program kesehatan bagi ibu hamil.
10. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dengan rekomendasi meningkatkan pelayanan dan jumlah fasilitas kesehatan di setiap desa, kecamatan, dan kabupaten, mempertahankan dan meningkatkan program-program terdahulu dan mutu pelayanan kesehatan disetiap tingkat (desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi) dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan disetiap tingkat pemerintahan.
11. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan meningkatkan pelayanan dan jumlah fasilitas kesehatan di setiap desa, kecamatan, dan kabupaten dengan rekomendasi mempertahankan dan meningkatkan program-program terdahulu dan mutu pelayanan kesehatan disetiap tingkat (desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi), dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan disetiap tingkat pemerintahan.
12. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi, dengan rekomendasi Menggiatkan imunisasi dasar lengkap di posyandu, dan fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya (Puskesmas, Rumah Sakit, dan Klinik Kesehatan).
13. Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta dengan rekomendasi Sosialisasi tentang pola hidup bersih untuk mencegah serangan penyakit-penyakit kusta Peningkatan jumlah dan mutu dari fasilitas dan tenaga medis. Pemberian obat-obatan sebagai pencegah penyakit. Subsidi jaminan kesehatan oleh daerah bagi masyarakat yang kurang mampu.
14. Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun dengan rekomendasi Sosialisasi tentang pola hidup sehat seperti olahraga, makanan sehat, gaya hidup dan lain-lain.
15. Angka kematian (*insiden rate*) akibat bunuh diri dengan rekomendasi Peningkatan pendidikan kerohanian untuk menjaga mental masyarakat.

16. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dengan rekomendasi Peningkatan tenaga kesehatan kejiwaan dan fasilitas kejiwaan pada level Kecamatan (Puskesmas) dan Kabupaten (Rumah Sakit Umum Daerah).
17. Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin Peningkatan jumlah dan mutu dari petugas kesehatan (penyuluh KB dan Bidan) dengan rekomendasi Subsidi pemasangan alat kontrasepsi di tenaga-tenaga kesehatan (bidan); Sosialisasi tentang jenis-jenis dan penggunaan alat-alat kontrasepsi. Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern. Peningkatan jumlah dan mutu dari petugas kesehatan (penyuluh KB dan Bidan); Subsidi pemasangan alat kontrasepsi di tenaga-tenaga kesehatan (bidan); Sosialisasi tentang jenis-jenis dan penggunaan alat-alat kontrasepsi.
18. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*) dengan rekomendasi Sosialisasi tentang bahaya pernikahan muda; Sosialisasi untuk menjaga kesuburan bagi perempuan.
19. *Total Fertility Rate* (TFR) Sosialisasi tentang bahaya pernikahan muda dengan rekomendasi Sosialisasi untuk menjaga kesuburan bagi perempuan.
20. Unmet need pelayanan kesehatan dengan rekomendasi Peningkatan jumlah fasilitas/layanan kesehatan dan tenaga medis yang berkerjasama dengan jaminan asuransi kesehatan; Sosialisasi tentang pentingnya jaminan kesehatan. Mewajibkan seluruh pegawai pemerintahan untuk ikut dalam asuransi jaminan kesehatan. Pemberian bantuan jaminan kesehatan oleh daerah bagi masyarakat yang kurang mampu. Peningkatan pelayanan, fasilitas, dan pegawai yang melayani jaminan kesehatan.
21. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas Subsidi vaksin dengan rekomendasi Pengawasan distribusi obat ke Puskesmas-Puskesmas, Pembagian jatah vaksin untuk Puskesmas-Puskesmas yang ada.
22. Persentase SD/MI berakreditasi minimal dengan rekomendasi Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak kepada masyarakat dan Subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu oleh daerah untuk bersekolah. Peningkatan kualitas dan kuantitas dari fasilitas dan tenaga pendidik.
23. Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B dengan rekomendasi Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak kepada masyarakat; Subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu oleh daerah untuk bersekolah. Peningkatan kualitas dan kuantitas dari fasilitas dan tenaga pendidik.
24. Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B dengan rekomendasi Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak kepada masyarakat; Subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu oleh daerah untuk bersekolah. Peningkatan kualitas dan kuantitas dari fasilitas dan tenaga pendidik.
25. Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun dengan rekomendasi Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak kepada masyarakat;

Subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu oleh daerah untuk bersekolah. Peningkatan kualitas dan kuantitas dari fasilitas dan tenaga pendidik.

26. Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan dengan pembuatan regulasi yang melindungi anak dari kekerasan mengkampanyekan tentang bahaya kekerasan terhadap anak perempuan peningkatan jumlah fasilitas dan pegawai yang melayani aduan tentang kekerasan anak terhadap perempuan.
27. Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. dengan rekomendasi pembuatan regulasi yang melindungi anak dari kekerasan mengkampanyekan tentang bahaya kekerasan terhadap anak perempuan peningkatan jumlah fasilitas dan pegawai yang melayani aduan tentang kekerasan anak terhadap perempuan.
28. Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun Kampanye tentang bahayanya menikah diusia muda dengan rekomendasi pembuatan regulasi tentang batasan usia pernikahan.
29. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*) kampanye tentang bahayanya menikah diusia muda dengan rekomendasi pembuatan regulasi tentang batasan usia pernikahan.
30. *Unmet need* KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) dengan rekomendasi Peningkatan jumlah dan mutu dari petugas kesehatan (penyuluh KB dan Bidan) dan Subsidi pemasangan alat kontrasepsi di tenaga-tenaga kesehatan (bidan) Sosialisasi tentang jenis-jenis dan penggunaan alat-alat kontrasepsi.
31. Kualitas air sungai sebagai sumber air baku dengan rekomendasi Meningkatkan capaian nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dengan secara rutin melaksanakan pemantauan kualitas sungai dan meningkatkan kegiatan pencegahan pencemaran air serta pemeliharaan kualitas sungai secara berkelanjutan.
32. Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan rekomendasi Pembuatan regulasi tentang kewajiban lembaga penyusun RTRW untuk melibatkan lembaga pengelola DAS/stakeholder dalam penyusunan RTRW dan pembuatan rasio/persentase jumlah RPDAST yang harus diinternalisasi ke dalam RTRW, dan Melakukan pengkajian tentang kondisi DAS yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Memperhatikan DAS yang status DDDT-nya yang terlampaui hampir 50% dari total luas DAS-nya seperti DAS Par dan DAS Tuing.
33. Rasio elektrifikasi dengan rekomendasi mempertahankan program dan kinerja, dan melakukan evaluasi untuk mencapai titik optimum penggunaan anggaran.
34. Persentase tenaga kerja formal dengan rekomendasi mendorong penciptaan lapangan kerja, mengembangkan kualitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi keterampilan dan Mengadakan pelatihan bagi para pencari kerja sebelum terjun ke lapangan kerja.

35. Koefisien gini dengan rekomendasi mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata berbasis masyarakat; meningkatkan kreatifitas dan inovatif pada UKM.
36. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur dengan rekomendasi Mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata berbasis masyarakat; Meningkatkan kreatifitas dan inovatif pada UKM dan meningkatkan bantuan jaminan sosial terutama bagi masyarakat miskin.
37. Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil dengan rekomendasi mengembangkan dan meningkatkan fasilitas kota pusaka Muntok di Bangka Barat menjadi wisata sejarah.
38. Persentase sampah perkotaan yang tertangani dengan rekomendasi Meningkatkan layanan persampahan di perkotaan, Mengembangkan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, Mulai menerapkan pengurangan penggunaan bahan-bahan yang menimbulkan sampah non-organik seperti penggunaan kantong plastik belanja, contoh sosialisasi di masyarakat (berbelanja membawa keranjang atau tas dari rumah) dan inisiasi di pusat perbelanjaan untuk pengurangan penggunaan kantong plastik.
39. Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU dengan rekomendasi Mempertahankan capaian dan berusaha meningkatkan ketaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan sehingga dapat meningkat ke peringkat yang lebih tinggi (hijau atau emas). Meningkatkan sosialisasi dan pengawasan dalam rangka pembinaan perusahaan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan.
40. Dokumen pelaporan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan rekomendasi Tetap melaksanakan penyusunan dokumen pelaporan penurunan emisi GRK secara rutin. Melaksanakan upaya pengendalian sumber-sumber pencemaran untuk menurunkan emisi GRK.
41. Jumlah luas kawasan konservasi perairan dengan rekomendasi Mempertahankan dan tetap menjaga kawasan konservasi sesuai dengan peruntukannya, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
42. Jumlah kesatuan pengelolaan hutanmeningkatkan kapasitas SDM setiap KPH dengan rekomendasi Mempertahankan program dan kinerja; melakukan evaluasi untuk mencapai titik optimum penggunaan anggaran.
43. Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) dengan rekomendasi Meningkatkan jumlah Kabupaten Kota yang WTP; Mempertahankan program dan kinerja di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitungmelakukan evaluasi untuk mencapai titik optimum penggunaan anggaran.
44. Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (provinsi/ kabupaten/kota) dengan rekomendasi Meningkatkan pemahaman terhadap SAKIP di seluruh

Perangkat Daerah baik di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; mempertahankan program dan kinerja; melakukan evaluasi untuk mencapai titik optimum penggunaan anggaran.

45. Persentase penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan barang dengan rekomendasi mempertahankan program dan kinerja; melakukan evaluasi untuk mencapai titik optimum penggunaan anggaran.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah desain pembangunan yang dirancang sebagai bagian dari pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Penyusunan rencana pembangunan tersebut disusun berdasarkan beberapa dokumen penting sebagai pedoman dan pertimbangan analisis konteks yang berkembang. Untuk kepentingan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022, beberapa dokumen penting menjadi acuan, antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005–2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015–2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, Rencana Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2034 dan visi-misi dan program kepala daerah terpilih, serta RPJMD Provinsi tetangga yang berbatasan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah bagian dari tahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Adapun visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah *“Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Maju, Sejahtera Dan Berwawasan Lingkungan 2025”*, yang ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu:

1. mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari;
2. meningkatkan kualitas dan daya saing SDM;
3. mewujudkan pemerintahan yang amanah;
4. mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan;
5. mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Fokus pembangunan pada tahap ketiga RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 adalah pada upaya menjaga dan meningkatkan perekonomian daerah serta upaya pemenuhan kapasitas dan kualitas SDM. Pada tahapan ini, peningkatan perekonomian daerah, perlu diberikan perhatian pada upaya memberikan nilai tambah hasil produk unggulan provinsi. Keterkaitan industri ke depan dan ke belakang menjadi perhatian utama dalam mengembangkan nilai tambah produk unggulan daerah ini. Sebagai contoh: hasil pertanian ubi, komoditas ini dapat dikembangkan menjadi produk-produk makanan yang berbahan baku utama ubi, dari kelapa sawit selain menghasilkan CPO juga bisa menghasilkan biogas. Demikian juga dengan hasil perikanan laut dapat dikembangkan menjadi produk-produk makanan berbasis hasil produksi tersebut, selain itu dapat diupayakan pengembangan industri-industri pengalengan ikan yang memiliki daya saing ekspor.

Sementara itu, pengembangan kualitas SDM (dalam semua aspek) menjadi perhatian sejalan dengan upaya untuk semakin memantapkan pembangunan ekonomi daerah. Dukungan SDM yang berkualitas, profesional, berwawasan IPTEK dan berbekal IMTAK yang kuat menjadi satu kesatuan dengan upaya untuk mempersiapkan Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan kualitas SDM ini menjadi sangat penting untuk diprioritaskan dalam upaya menjadikan masyarakat Bangka Belitung sebagai "pemain/subjek" dan bukan "penonton/objek" dari pesatnya pelaksanaan pembangunan di provinsi ini. Pada periode ini, diyakini perkembangan teknologi (terutama teknologi informasi) dan ilmu pengetahuan sudah sangat maju dan karenanya pengembangan SDM di sini adalah SDM yang mampu mengambil manfaat dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sesuai untuk mengelola data mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki.

Pada akhir tahap ketiga ini, kondisi perekonomian daerah diharapkan dapat terus meningkat, pertumbuhan PDRB sebagai indikator dari kondisi perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditargetkan dapat tumbuh sebesar 4-5,25 sementara itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan meningkat menjadi 71,50.

Guna mencapai target dari sasaran pokok pembangunan tersebut, maka:

- a. Dalam meningkatkan perekonomian daerah, arah kebijakan prioritas yang dilaksanakan adalah:
 1. peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja;
 2. penempatan tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja pada semua sektor pembangunan;
 3. mendorong pengembangan standarisasi SDM, produk dan jasa KUKM untuk meningkatkan daya saing;
 4. peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing produk daerah;
 5. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dan industri pengolahan sumber daya alam;
 6. pemenuhan energi listrik dan peningkatan rasio elektrifikasi;
 7. peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;
 8. pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;
 9. pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan;
 10. peningkatan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing global;
 11. pemantapan ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, keamanan dan mutu pangan;
 12. penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan;

13. peningkatan sarana dan prasarana, produksi dan nilai tambah produk serta peningkatan fungsi kelembagaan pertanian;
 14. peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, kebudayaan, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata;
 15. peningkatan sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.
- b. Sedangkan untuk tercapainya sasaran pokok terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM, arah kebijakan yang dilaksanakan adalah:
1. peningkatan akses pelayanan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan serta peningkatan relevansi dan daya saing;
 2. peningkatan kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat;
 3. peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan;
 4. pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan.

Sementara itu, visi RPJMN untuk periode 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** dengan 9 (sembilan) misi, yaitu :

1. peningkatan kualitas manusia indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan;

5.1. Visi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi yang telah dirumuskan, yang diambil dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, periode 2017-2022 adalah:

“Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

Pernyataan visi ini mengandung lima makna yaitu :

1. *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung* adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani oleh Pemerintah Daerah.

2. *Sejahtera* menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat pendapatan perkapita masyarakat yang tinggi, kesenjangan pendapatan antar masyarakat relatif kecil, tingkat kesehatan dan pendidikan serta sosial yang tinggi.
3. *Maju* adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju dalam penyediaan infrastruktur dan konektivitas, pengendalian terhadap lingkungan hidup serta pengendalian terhadap potensi kejadian bencana.
4. *Unggul* dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui inovasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah yang salah satunya unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan dukungan semua sektor.
5. *Efisien dan Cepat berbasis teknologi* dimaknai dengan penerapan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat berbasis teknologi serta berdemokrasi untuk mendorong percepatan pencapaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang maju dan unggul serta masyarakatnya sejahtera.

Pokok-pokok visi yang dijabarkan dari makna pernyataan visi sebagai dasar penyusunan tujuan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung* adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani oleh Pemerintah Daerah, memiliki pokok-pokok visi yaitu :
 - a. Seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - b. Seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. *Sejahtera* menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat pendapatan perkapita masyarakat yang tinggi, kesenjangan pendapatan antar masyarakat relatif kecil, tingkat kesehatan dan pendidikan serta sosial yang tinggi, memiliki pokok-pokok visi yaitu :
 - a. Pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat
 - b. Pendidikan masyarakat
 - c. Sosial masyarakat
 - d. Kesehatan masyarakat
3. *Maju* adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju dalam penyediaan infrastruktur dan konektivitas, pengendalian terhadap lingkungan hidup serta pengendalian terhadap potensi kejadian bencana, memiliki pokok-pokok visi yaitu :
 - a. Infrastruktur
 - b. Konektivitas

- c. Bencana
 - d. Lingkungan hidup
4. *Unggul* dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui inovasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah yang salah satunya unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan dukungan semua sektor, memiliki pokok-pokok visi yaitu :
- a. Pertumbuhan Ekonomi
5. *Efisien dan Cepat berbasis teknologi* dimaknai dengan penerapan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat berbasis teknologi serta berdemokrasi untuk mendorong percepatan pencapaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang maju dan unggul serta masyarakatnya sejahtera, memiliki pokok-pokok visi yaitu :
- a. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
 - b. Berdemokrasi

5.2. Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017 – 2022, yaitu:

1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;
Pernyataan misi ini mengandung makna:
 - a. *Pembangunan ekonomi* adalah pembangunan bidang ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, kesejahteraan masyarakat desa dan pengentasan masyarakat miskin.
 - b. *Berbasis potensi daerah* adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diprioritaskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan, serta industri pengolahan dan perdagangan sesuai dengan potensi daerah.
2. Mewujudkan Infrastruktur Dan Konektivitas Daerah Yang Berkualitas;
Pernyataan misi ini mengandung makna:
 - a. *Infrastruktur* adalah pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

- b. *Konektivitas daerah* adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga mobilisasi penduduk, barang dan jasa semakin cepat, efisien dan berkualitas.
- 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Handal;
Pernyataan misi ini mengandung makna :
 - a. *Sumber daya manusia* adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - b. *Unggul dan handal* adalah mempunyai tingkat pendidikan kompetensi dan daya saing yang baik yang diukur dari rata-rata lama sekolah dan kemampuan bersaing ditengah-tengah pembangunan.
- 4. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat ;
Pernyataan misi ini mengandung makna :
 - a. *Kesehataan Masyarakat* adalah tingkat kesehatan seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibangun agar mempunyai derajat kesehatan yang tinggi yang diukur dari angka usia harapan hidup.
- 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pembangunan Demokrasi;
Pernyataan misi ini mengandung makna :
 - a. *Tata Kelola Pemerintahan yang baik* adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
 - b. *Pembangunan demokrasi* adalah pembangunan yang menitikberatkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.
- 6. Meningkatkan Pengendalian Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup;
Pernyataan misi ini mengandung makna :
 - a. *Pengendalian bencana* adalah kemampuan dan kecepatan mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana.
 - b. *Kualitas lingkungan hidup* adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-

sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian visi dan masing-masing misi.

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dengan memperhatikan RPJPD 2005–2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; RPJM Nasional 2015–2019; RPJM Nasional 2020–2024, Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih; RPJMD Provinsi tetangga yang berbatasan dan terdekat. Permasalahan yang ada, isu-isu strategis, serta capaian kinerja urusan pemerintahan 5 tahun yang lalu (2012–2017), maka dalam Perubahan RPJMD 2017–2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan tujuan sebagai berikut, untuk tujuan lama berjumlah 9 tujuan dengan 10 indikator dan untuk tujuan baru berubah menjadi 10 tujuan dengan 10 indikator, dengan rincian terlihat pada tabel V.1:

Tabel V.1

Perubahan Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan
RPJMD 2017–2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

VISI : “Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

TUJUAN LAMA	TUJUAN BARU	INDIKATOR KINERJA TUJUAN LAMA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN BARU
1	2	3	4
Pokok Visi : Pertumbuhan Ekonomi			
1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1. Persentase Pertumbuhan PDRB	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi
Pokok Visi : Pendapatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat			
2. Meningkatnya Pendapatan Pemerintah Dan Masyarakat	2 Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	1 Pengeluaran Pemerintah Perkapita, (Dalam Ribuan)	1 Indeks Gini
		2 Pendapatan Perkapita, (Dalam Ribuan)	
Pokok Visi : Infrastruktur dan Konektivitas			
3 Meningkatnya Infrastruktur Dan Konektivitas Daerah Yang Berkualitas	3 Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur	1 Pertumbuhan Sub Sektor Jasa Konstruksi	1 Indeks Ketersediaan Infrastruktur
Pokok Visi : Pendidikan Dan Sosial Masyarakat			
4 Meningkatnya Lama Sekolah Masyarakat	4 Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	1 Rata-Rata Lama Sekolah, (Rata-Rata Lama Sekolah Laki-Laki, Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan)	1 Rata-Rata Lama Sekolah, (Rata-Rata Lama Sekolah Laki-Laki, Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan)
	5 Meningkatnya		1 Indeks Pembangunan

TUJUAN LAMA	TUJUAN BARU	INDIKATOR KINERJA TUJUAN LAMA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN BARU
	Pembangunan Sosial Masyarakat		Sosial
Pokok Visi : Kesehatan Masyarakat			
5 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	6 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1 Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-Laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)	1 Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-Laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)
Pokok Visi : Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			
6 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Berkualitas	7 Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang berkualitas	1 Indeks Reformasi Birokrasi	1 Indeks Reformasi Birokrasi
Pokok Visi : Pembangunan Demokrasi			
7 Terwujudnya Pembangunan Demokrasi	8 Meningkatnya Demokrasi	1 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	1 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi
Pokok Visi : Bencana			
8 Meningkatnya Tata Kelola Kebencanaan	9 Menurunnya Resiko Bencana	1 Indeks Resiko Bencana	1 Indeks Resiko Bencana
Pokok Visi : Lingkungan Hidup			
9 Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	10 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Untuk mencapai tujuan ini, maka dalam Perubahan RPJMD 2012-2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sasaran sebagai berikut, sasaran lama berjumlah 22 sasaran dengan 37 indikator sedangkan untuk sasaran baru berjumlah 27 dengan 27 indikator, terlihat pada tabel V.2 berikut:

Tabel V.2
Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
RPJMD 2017 – 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

SASARAN LAMA	SASARAN BARU	INDIKATOR KINERJA SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN BARU
1 2	3	4	5
Misi 1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah			
1 Meningkatnya Produksi Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan Dan Jasa Pertanian	1 Meningkatkan PDRB Sub Sektor Pertanian	1. Persentase Pertumbuhan Produksi Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Dan Jasa Perkebunan	1 Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian
2 Meningkatnya	2 Meningkatkan	1 Persentase	1 Laju Pertumbuhan

SASARAN LAMA		SASARAN BARU	INDIKATOR KINERJA SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN BARU
1	2	3	4	5
	Produksi Sub Sektor Perikanan	PDRB Sub Sektor Perikanan	Pertumbuhan Produksi Sub Sektor Perikanan	PDRB Sub Sektor Perikanan
3	Meningkatnya Pengembangan Pembangunan Pariwisata	3 Meningkatkan Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan	1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	1 Laju Pertumbuhan kunjungan wisatawan
4	Meningkatnya Produksi Sektor Pertambangan	4 Meningkatkan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi	1 Persentase Pertumbuhan Produksi Sektor Pertambangan Dan Penggalan	1 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi
5	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Industri	5 Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan	1 Persentase Pertumbuhan Produksi Sektor Industri Pengolahan	1 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan
6	Terwujudnya Kemandirian Energi		1 Persentase Pertumbuhan Produksi Sub Sektor Ketenagalistrikan	
7	Meningkatnya Belanja Pemerintah Daerah		1 Persentase Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Daerah	
8	Menurunnya Angka Pengangguran		1 Persentase Angka Pengangguran	
		7 Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja		1 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
9	Menurunnya Angka Kemiskinan	8 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	1 Persentase Angka Kemiskinan	1 Persentase Angka Kemiskinan
10	Menurunnya Angka Inflasi		1 Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
11	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk		1 Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	
		9 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa		1 Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa

SASARAN LAMA		SASARAN BARU	INDIKATOR KINERJA SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN BARU		
1	2	3	4	5		
Misi 2. Mewujudkan Infrastruktur Dan Konektivitas Daerah Yang Berkualitas						
12	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Pengembangan Potensi Daerah	10	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	1	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	
			2	Ketersediaan Air Baku (M3)		
13	Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat	11	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar	1	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Dasar	
			2	Persentase Bangunan Yang Tertata		
		12	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	3	Persentase Desa Yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi	
				1	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	
14	Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah		1	Persentase Kunjungan Kapal Di Pelabuhan Laut		
			2	Persentase Armada Pengangkutan		
			3	Persentase Jalan Kondisi Mantap		
Misi 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Handal						
15	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Bagi Masyarakat	13	Meningkatkan Akses Pendidikan Masyarakat	1	Angka Harapan Lama Sekolah (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan)	
		14	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	1	Persentase Sekolah Terakreditasi A	
		15	Meningkatkan Kesejahteraan Anak		1	Indeks Perlindungan Anak (IPA)
		16	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk		1	Laju Pertumbuhan Penduduk

SASARAN LAMA		SASARAN BARU	INDIKATOR KINERJA SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN BARU
1	2	3	4	5
		17 Meningkatkan Pembangunan Resposif Gender		1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)
		18 Meningkatkan Kualitas Pemuda		1 Indeks Pembangunan Pemuda
		19 Meningkatkan Pembangunan Olah Raga		1 Indeks Pembangunan Olah Raga
		20 Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		1 Persentase PMKS Sejahtera
Misi 4. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat				
16 Peningkatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat		21 Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	1 Angka Kesehatan Masyarakat	1 Angka Kesehatan Masyarakat
Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pembangunan Demokrasi				
17 Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel		22 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	1 Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan 2 Tingkat Kematangan Maturitas SPIP	1 Indeks Reformasi Birokrasi
			3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat	
			4 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Meningkat	
18 Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif Dan Efisien			1 Nilai Rata-Rata Delapan Area Perubahan 2 Indeks Profesionalitas ASN	
19 Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas			1 Unit Kerjaberpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM)	
			2 Rata-Rata Tingkat Kepuasan Masyarakat	
20 Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak Politik Dan Lembaga Demokrasi Masyarakat		23 Meningkatkan Kebebasan Sipil	1 Skor Aspek Kebebasan Sipil	1 Nilai Kebebasan Sipil

SASARAN LAMA		SASARAN BARU	INDIKATOR KINERJA SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN BARU
1	2	3	4	5
		24 Meningkatkan Hak-Hak Politik	1 Skor Aspek Hak-Hak Politik	1 Nilai Hak-Hak Politik
		25 Meningkatkan Peran Lembaga Demokrasi	1 Skor Aspek Lembaga Demokrasi	1 Nilai Kelembagaan Demokrasi
Misi 6. Meningkatkan Pengendalian Bencana Dan Kualitas Lingkungan Hidup				
21 Meningkatkan Kapasitas Terhadap Penanggulangan Bencana		26 Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana	1 Indeks Kapasitas Bencana Daerah	1 Indeks Ketahanan Daerah
22 Peningkatan Pengendalian Lingkungan Hidup		27 Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	1 Indeks kualitas air sungai	1 Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)
			2 Indeks kualitas udara	
			3 Indeks tutupan lahan	
			4 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	

Baik tujuan maupun sasaran, semuanya ditetapkan indikatornya, disertai target-target capaian selama 5 tahun (2017-2022), sehingga bisa diukur keberhasilan pencapaiannya, dan ditetapkan dalam RPJMD ini menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Keterkaitan dan konsistensi perubahan tujuan, indikator kinerja tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran digambarkan seperti pada Tabel V.3 berikut ini.

Tabel V.3

Keterkaitan Perubahan Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja Sasaran
Perubahan RPJMD Tahun 2017 – 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

TUJUAN LAMA	TUJUAN BARU	INDIKATOR KINERJA TUJUAN LAMA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN BARU	SASARAN LAMA	SASARAN BARU	INDIKATOR KINERJA SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN BARU
1	2	3	4	5	6	7	8
Visi “Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”							
Pokok Visi : Pertumbuhan Ekonomi				Misi 1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah			
1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1. Persentase Pertumbuhan PDRB	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	1 Meningkatnya Produksi Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan Dan Jasa Pertanian	1 Meningkatkan PDRB Sub Sektor Pertanian	1. Persentase Pertumbuhan Produksi Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Dan Jasa Perkebunan	1 Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian
				2 Meningkatnya Produksi Sub Sektor Perikanan	2 Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	1 Persentase Pertumbuhan Produksi Sub Sektor Perikanan	1 Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan
				3 Meningkatnya Pengembangan Pembangunan Pariwisata	3 Meningkatkan Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	1 Laju Pertumbuhan kunjungan wisatawan
				4 Meningkatnya Produksi Sektor Pertambangan	4 Meningkatkan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi	1 Persentase Pertumbuhan Produksi Sektor Pertambangan Dan Penggalian	1 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi

TUJUAN LAMA	TUJUAN BARU	INDIKATOR KINERJA TUJUAN LAMA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN BARU	SASARAN LAMA	SASARAN BARU	INDIKATOR KINERJA SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN BARU
1	2	3	4	5	6	7	8
				5 Meningkatkan Pembangunan Berbasis Industri	5 Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan	1 Persentase Pertumbuhan Produksi Sektor Industri Pengolahan	1 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan
				6 Terwujudnya Kemandirian Energi		1 Persentase Pertumbuhan Produksi Sub Sektor Ketenagalistrikan	
Pokok Visi : Pendapatan Dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat				Misi 1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah			
2. Meningkatkan Pendapatan Pemerintah Dan Masyarakat	2 Meningkatkan Pemerataan Pendapatan	1 Pengeluaran Pemerintah Perkapita,(Dalam Ribuan)	1 Indeks Gini	7 Meningkatkan Belanja Pemerintah Daerah		1 Persentase Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Daerah	
		2 Pendapatan Perkapita,(Dalam Ribuan)		8 Menurunnya Angka Pengangguran	6 Menurunkan Tingkat Pengangguran	1 Persentase Angka Pengangguran	1 Tingkat Pengangguran Terbuka
					7 Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja		2 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
				9 Menurunnya Angka Kemiskinan	8 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	1 Persentase Angka Kemiskinan	1 Persentase Angka Kemiskinan
				10 Menurunnya Angka Inflasi		1 Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	

TUJUAN LAMA	TUJUAN BARU	INDIKATOR KINERJA TUJUAN LAMA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN BARU	SASARAN LAMA	SASARAN BARU	INDIKATOR KINERJA SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN BARU
1	2	3	4	5	6	7	8
				11 Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk		1 Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	
					9 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa		1 Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa
Pokok Visi : Infrastruktur Dan Konektivitas				Misi 2. Mewujudkan Infrastruktur Dan Konektivitas Daerah Yang Berkualitas			
3 Meningkatnya Infrastruktur Dan Konektivitas Daerah Yang Berkualitas	3 Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur	1 Pertumbuhan Subsektor Jasa Konstruksi	1 Indeks Ketersediaan Infrastruktur	12 Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Pengembangan Potensi Daerah	10 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	1. Terbangunnya Daerah Irigasi (Ha)	1 Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
				13 Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat	11 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar	2 Ketersediaan Air Baku (M3) 1 Persentase Lingkungan Yang Tertata 2 Persentase Bangunan Yang Tertata	1 Persentase Ketersediaan Infrastruktur Dasar
						3 Persentase Desa Yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi	
					12 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan		1 Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan

TUJUAN LAMA	TUJUAN BARU	INDIKATOR KINERJA TUJUAN LAMA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN BARU	SASARAN LAMA	SASARAN BARU	INDIKATOR KINERJA SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN BARU
1	2	3	4	5	6	7	8
Pokok Visi : Pendidikan Dan Sosial Masyarakat				Misi 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Handal			
4 Meningkatnya Lama Sekolah Masyarakat	5 Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	1 Rata-Rata Lama Sekolah, (Rata-Rata Lama Sekolah Laki-Laki, Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan)	1 Rata-Rata Lama Sekolah, (Rata-Rata Lama Sekolah Laki-Laki, Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan)	15 Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Bagi Masyarakat	13 Meningkatkan Akses Pendidikan masyarakat	1 Angka Harapan Lama Sekolah , (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan)	1 Angka Harapan Lama Sekolah , (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan)
					14 Meningkatkan Kualitas Pendidikan		1 Persentase Sekolah Terakreditasi A
	6 Meningkatnya Pembangunan Sosial Masyarakat		1 Indeks Pembangunan Sosial		15 Meningkatkan Kesejahteraan Anak		1 Indeks Perlindungan Anak(IPA)
					16 Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk		1 Laju Pertumbuhan Penduduk
					17 Meningkatkan Pembangunan Responsif Gender		1 Indeks Pembangunan Gender(IPG)
					18 Meningkatkan Kualitas Pemuda		1 Indeks Pembangunan Pemuda
					19 Meningkatkan Pembangunan Olahraga		1 Indeks Pembangunan Olah Raga
					20 Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		1 Persentase PMKS Sejahtera

TUJUAN LAMA	TUJUAN BARU	INDIKATOR KINERJA TUJUAN LAMA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN BARU	SASARAN LAMA	SASARAN BARU	INDIKATOR KINERJA SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN BARU
1	2	3	4	5	6	7	8
Pokok Visi : Kesehatan Masyarakat				Misi 4. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat			
5 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	7 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1 Angka Usia Harapan Hidup (Angka Usia Harapan Hidup Laki-Laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)	1 Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-Laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)	16 Peningkatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat	21 Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	1 Angka Kesehatan Masyarakat	1 Angka Kesehatan Masyarakat
Pokok Visi : Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pembangunan Demokrasi			
6 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Berkualitas	8 Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang berkualitas	1 Indeks Reformasi Birokrasi	1 Indeks Reformasi Birokrasi	17 Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel	22 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	1 Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan	1 Indeks Reformasi Birokrasi
						2 Tingkat Kematangan Maturitas SPIP	
						3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat	
						4 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Meningkat	

TUJUAN LAMA	TUJUAN BARU	INDIKATOR KINERJA TUJUAN LAMA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN BARU	SASARAN LAMA	SASARAN BARU	INDIKATOR KINERJA SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN BARU
1	2	3	4	5	6	7	8
				18 Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif Dan Efisien		1 Nilai Rata-Rata Delapan Area Perubahan	
						2 Indeks Profesionalitas ASN	
				19 Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas		1 Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) 2 Rata-Rata Tingkat Kepuasan Masyarakat	
Pokok Visi : Berdemokrasi				Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pembangunan Demokrasi			
7 Terwujudnya Pembangunan Demokrasi	9 Meningkatnya Demokrasi	1 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	1 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	20 Meningkatkan Kebebasan Sipil, Hak Politik Dan Lembaga Demokrasi Masyarakat	25 Meningkatkan Kebebasan Sipil	1 Skor Aspek Kebebasan Sipil	1 Nilai Kebebasan Sipil
					26 Meningkatkan Hak-Hak Politik	1 Skor Aspek Hak-Hak Politik	1 Nilai Hak-Hak Politik
					27 Meningkatkan Peran Lembaga Demokrasi	1 Skor Aspek Lembaga Demokrasi	1 Nilai Lembaga Demokrasi

TUJUAN LAMA	TUJUAN BARU	INDIKATOR KINERJA TUJUAN LAMA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN BARU	SASARAN LAMA	SASARAN BARU	INDIKATOR KINERJA SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN BARU
1	2	3	4	5	6	7	8
Pokok Visi : Bencana				Misi 6. Meningkatkan Pengendalian Bencana Dan Kualitas Lingkungan Hidup			
8 Meningkatnya Tata Kelola Kebencanaan	10 Menurunnya Resiko Bencana	1 Indeks Resiko Bencana	1 Indeks Resiko Bencana	21 Meningkatkan Kapasitas Terhadap Penanggulangan Bencana	28 Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana	1 Indeks Kapasitas Bencana Daerah	1 Indeks Ketahanan Daerah
Pokok Visi : Lingkungan Hidup				Misi 6. Meningkatkan Pengendalian Bencana Dan Kualitas Lingkungan Hidup			
9 Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	11 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	22 Peningkatan Pengendalian Lingkungan Hidup	29 Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	1 Indeks Kualitas Air Sungai 2 Indeks Kualitas Udara	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
						3 Indeks Tutupan Lahan	
						4 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	

Dari perubahan tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran maka ditetapkan keselarasan antara tujuan dan sasaran serta indikator tujuan dan indikator sasaran dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Misi I : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan indikator kinerja tujuan yaitu laju pertumbuhan ekonomi yang diintervensi dengan sasaran :
 - a. Meningkatkan PDRB sub sektor pertanian, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian;
 - b. Meningkatkan PDRB sub sektor perikanan, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan;
 - c. Meningkatkan laju pertumbuhan kunjungan wisatawan, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator laju pertumbuhan kunjungan wisatawan;
 - d. Meningkatkan PDRB sektor pertambangan dan energi, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan energi;
 - e. Meningkatkan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan.
2. Meningkatnya pemerataan pendapatan yang diukur dengan indikator kinerja tujuan indeks gini yang diintervensi dengan sasaran :
 - a. Menurunkan tingkat pengangguran, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator tingkat pengangguran terbuka;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator indeks pembangunan ketenagakerjaan;
 - c. Menurunkan tingkat kemiskinan, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator persentase angka kemiskinan;
 - d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator pendapatan perkapita masyarakat desa.

Misi II : Mewujudkan Infrastruktur Dan Konektivitas, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dengan indikator kinerja tujuan Indeks ketersediaan Infrastruktur yang diintervensi dengan sasaran:

- a. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur Pekerjaan Umum, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator persentase ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum;
- b. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator persentase ketersediaan infrastruktur dasar;
- c. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perhubungan, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator persentase ketersediaan infrastruktur perhubungan.

Misi III : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Handal, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pendidikan masyarakat dengan indikator tujuan rata-rata lama sekolah (rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan), yang diintervensi dengan sasaran:
 - a. Meningkatkan akses pendidikan masyarakat, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator kinerja sasaran angka harapan lama sekolah (angka harapan lama sekolah laki-laki, angka harapan lama sekolah perempuan);
 - b. Meningkatkan kualitas pendidikan, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator kinerja sasaran persentase sekolah terakreditasi A.
2. Meningkatnya pembangunan sosial masyarakat dengan indikator kinerja tujuan indeks pembangunan sosial yang diintervensi dengan sasaran:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan anak, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator kinerja sasaran Indeks Perlindungan Anak (IPA);
 - b. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator kinerja sasaran laju pertumbuhan penduduk;
 - c. Meningkatkan pembangunan responsif gender, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator kinerja sasaran Indeks Pembangunan Gender (IPG);
 - d. Meningkatkan kualitas pemuda, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator kinerja sasaran indeks pembangunan pemuda;
 - e. Meningkatkan pembangunan olahraga, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator kinerja sasaran indeks pembangunan olah raga;
 - f. Meningkatkan kesejahteraan sosial, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator kinerja sasaran persentase PMKS sejahtera.

Misi IV : Meningkatkan Kesehatan Masyarakat, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator tujuan angka usia harapan hidup, (angka usia harapan hidup laki-laki, angka usia harapan hidup perempuan), yang diintervensi dengan sasaran:
 - a. Meningkatkan kesehatan masyarakat, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator kinerja sasaran angka kesehatan masyarakat.

Misi V : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pembangunan Demokrasi, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas dengan indikator kinerja tujuan Indeks Reformasi Birokrasi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator kinerja sasaran indeks reformasi birokrasi;
2. Meningkatnya Demokrasi dengan indikator kinerja tujuan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi, yang diintervensi dengan sasaran:
 - a. Meningkatkan kebebasan sipil, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator kinerja sasaran nilai kebebasan sipil;
 - b. Meningkatkan hak-hak politik, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator kinerja sasaran nilai hak-hak politik;
 - c. Meningkatkan peran lembaga demokrasi, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator kinerja sasaran Nilai Lembaga Demokrasi .

Misi VI : Meningkatkan Pengendalian Bencana Dan Kualitas Lingkungan Hidup, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menurunnya Resiko Bencana dengan indikator kinerja tujuan Indeks Resiko Bencana (IRB), yang diintervensi dengan sasaran meningkatkan kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator kinerja sasaran indeks ketahanan daerah.
2. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup dengan indikator tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup [IKLH], yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pengendalian lingkungan hidup, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator kinerja sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup [IKLH];

Keselarasan antara tujuan dan sasaran serta indikator tujuan dan indikator sasaran dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017–2022 terlihat pada tabel V.4 berikut.

Tabel V.4

Visi, Misi, Tujuan, Indikator Kerja Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
Perubahan RPJMD 2017 – 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

TUJUAN BARU	INDIKATOR KINERJA TUJUAN BARU	SASARAN BARU	INDIKATOR KINERJA SASARAN BARU
1	2	3	4
Visi “Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”			
Pokok Visi : Pertumbuhan Ekonomi		Misi 1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah	
1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	1 Meningkatkan PDRB Sub Sektor Pertanian	1 Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian
		2 Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	1 Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan
		3 Meningkatkan laju pertumbuhan kunjungan wisatawan	1 Laju Pertumbuhan kunjungan wisatawan
		4 Meningkatkan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi	1 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi
		5 Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan	1 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan
2 Meningkatkan pemerataan pendapatan	1 Indeks Gini		
		6 Menurunkan Tingkat Pengangguran	1 Tingkat Pengangguran Terbuka
		7 Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
		8 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	1 Persentase Angka Kemiskinan

TUJUAN BARU	INDIKATOR KINERJA TUJUAN BARU	SASARAN BARU	INDIKATOR KINERJA SASARAN BARU
1	2	3	4
		9 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa	1 Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa
Pokok Visi : Infrastruktur Dan Konektivitas		Misi 2. Mewujudkan Infrastruktur Dan Konektivitas Daerah Yang Berkualitas	
3 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	1 Indeks Ketersediaan Infrastruktur	10 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	1 Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
		11 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar	1 Persentase Ketersediaan Infrastruktur Dasar
		12 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	1 Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan
Pokok Visi : Pendidikan Dan Sosial Masyarakat		Misi 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Handal	
5 Meningkatnya Pendidikan masyarakat	1 Rata-Rata Lama Sekolah, (Rata-Rata Lama Sekolah Laki-Laki, Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan)	13 Meningkatkan Akses Pendidikan Masyarakat	1 Angka Harapan Lama Sekolah, (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan)
		14 Meningkatkan Kualitas Pendidikan	1 Persentase sekolah terakreditasi A
6 Meningkatnya pembangunan sosial masyarakat	1 Indeks Pembangunan Sosial	15 Meningkatkan Kesejahteraan Anak	1 Indeks Perlindungan Anak (IPA)
		16 Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	1 Laju Pertumbuhan Penduduk
		17 Meningkatkan Pembangunan Responsif Gender	1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)
		18 Meningkatkan Kualitas Pemuda	1 Indeks Pembangunan Pemuda

TUJUAN BARU	INDIKATOR KINERJA TUJUAN BARU	SASARAN BARU	INDIKATOR KINERJA SASARAN BARU
1	2	3	4
		19 Meningkatkan Pembangunan Olahraga	1 Indeks Pembangunan Olahraga
		20 Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	1 Persentase PMKS Sejahtera
Pokok Visi : Kesehatan Masyarakat		Misi 4. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	
7 Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	1 Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)	21 Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	1 Angka Kesehatan Masyarakat
Pokok Visi: Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pembangunan Demokrasi	
8 Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang berkualitas	1 Indeks Reformasi Birokrasi	22 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	1 Indeks Reformasi Birokrasi
Pokok Visi : Berdemokrasi		Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pembangunan Demokrasi	
9 Meningkatnya Demokrasi	1 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	23 Meningkatkan Kebebasan Sipil	1 Nilai Kebebasan Sipil
		24 Meningkatkan Hak-Hak Politik	1 Nilai Hak-Hak Politik
		25 Meningkatkan Peran Lembaga Demokrasi	1 Nilai Lembaga Demokrasi
Pokok Visi : Bencana		Misi 6. Meningkatkan Pengendalian Bencana Dan Kualitas Lingkungan	
10 Menurunnya Resiko Bencana	1 Indeks Resiko Bencana	26 Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana	1 Indeks Ketahanan Daerah
Pokok Visi : Lingkungan Hidup		Misi 6. Meningkatkan Pengendalian Bencana Dan Kualitas Lingkungan	
11 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	27 Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

5.4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pada tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2015-2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) 2000-2015. SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. SDGs berisi 17 tujuan, salah satu tujuan SDGs adalah mengatur tata cara dan prosedur masyarakat yang damai tanpa kekerasan, nondiskriminasi, partisipasi, tata pemerintahan yang terbuka serta kerjasama kemitraan multi pihak. Berikut 17 indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs):

1. Tanpa kemiskinan. Tujuan dari indikator ini adalah tidak ada lagi kelaparan dalam bentuk apapun di seluruh dunia;
2. Tanpa kelaparan. Tujuan dari Indikator ini adalah tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan;
3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Tujuan dari indikator ini adalah menjamin kehidupan sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur;
4. Pendidikan berkualitas. Tujuan dari indikator ini adalah menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang;
5. Kesetaraan gender. Tujuan dari indikator ini adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan;
6. Air bersih dan sanitasi. Tujuan indikator ini adalah menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang;
7. Energi bersih dan terjangkau. Tujuan dari indikator ini adalah menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpecaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang;
8. Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak. Tujuan dari indikator ini adalah mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang;
9. Industri, inovasi dan infrastruktur. Tujuan dari indikator ini adalah membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan. Tujuan dari indikator ini adalah mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia;
11. Keberlanjutan kota dan komunitas. Tujuan dari indikator ini adalah membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan;
12. Konsumsi dan produksi bertanggung jawab. Tujuan dari indikator ini adalah menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi;
13. Aksi terhadap iklim. Tujuan dari indikator ini adalah bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;

14. Kehidupan bawah laut. Tujuan dari indikator adalah melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan;
15. Kehidupan di darat. Tujuan dari indikator ini adalah melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah;
16. Institusi peradilan yang kuat dan kedamaian. Tujuan dari indikator ini adalah meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggungjawab untuk seluruh kalangan;
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Tujuan dari indikator ini adalah memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel V.5
Target Indikator Kinerja Tujuan Perubahan RPJMD 2017 – 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	TUJUAN LAMA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN LAMA	TUJUAN (PERUBAHAN)	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (PERUBAHAN)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET DAN REALISASI						KONDISI AKHIR RPJMD
						2018		2019	2020	2021	2022	
						Target	Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB			4,47	4,3	4,45	4,4	4,5			
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,47	4,3	4,45	3,32	1,65	3,25	4,00	4,00
2	Meningkatnya Pengeluaran Pemerintah Dan Pendapatan Masyarakat	Pengeluaran Pemerintah Perkapita, (Dalam Ribuan)			1.864	1.890	n/a	1.940	1.980	2.020	2.060	2.060
		Pendapatan Perkapita Masyarakat, (Dalam Ribuan)			46.457	50.732	n/a	53.015	55.401	57.894	60.499	60.499
			Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	Indeks Gini	0,276	0,276	0,272	0,262	0,260	0,258	0,255	0,255
3	Meningkatnya Infrastruktur Dan Konektivitas Mendukung Pengembangan Potensi Daerah	Pertumbuhan SubSektor Jasa Konstruksi			5,64	6,95	5,76	7,0	7,1			
			Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur	Indeks Ketersediaan Infrastruktur	9%	13%	14%	20%	25%	42%	67%	70%

NO	TUJUAN LAMA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN LAMA	TUJUAN (PERUBAHAN)	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (PERUBAHAN)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET DAN REALISASI						KONDISI AKHIR RPJMD
						2018		2019	2020	2021	2022	
						Target	Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Meningkatnya Lama Sekolah Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah, (Rata-Rata Lama Sekolah Laki-Laki, Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan)			7,68	7,76	7,84	7,83	8,10			
					L=8,90	L = 7,90	L = 68,32	L= 7,94	L=8,20			
					P=7,76	P=6,76	P = 72,11	P = 6,98	L= 8,00			
			Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah, (Rata-Rata Lama Sekolah Laki-Laki, Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan)	7,78	7,76	7,84	7,98	8,06	8,20	8,30	8,30
					L=8,10	L = 7,90	L=8,17	L=8,38	L=8,12	L= 8,30	L= 8,40	L= 8,40
					P=7,48	P=6,76	P=7,51	P=7,54	L= 8,00	P = 8,10	P = 8,20	P = 8,20
			Meningkatnya Pembangunan Sosial Masyarakat	Indeks Pembangunan Sosial	44,04		44,12	44,20	44,25	44,28	44,36	44,36
5	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-Laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)			69,97	69,98	70,18	70,16	70,23			
					L=68,17	L = 68,24		L = 68,37	L = 68,40			
					P=71,96	P = 72,00		P = 72,12	P = 72,23			
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-Laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)	69,95		70,18	70,50	70,64	70,36	70,48	70,48
										L = 68,50	L = 68,60	L = 68,60
										P = 72,30	P = 72,45	P = 72,45
6	Mewujudnya Reformasi Birokrasi Yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi			63,15	64,08	67,17	65,39	67,41			

NO	TUJUAN LAMA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN LAMA	TUJUAN (PERUBAHAN)	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (PERUBAHAN)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET DAN REALISASI						KONDISI AKHIR RPJMD
						2018		2019	2020	2021	2022	
						Target	Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	65,49		65,39	66,84		68,43	68,43	69,50
7	Terwujudnya Pembangunan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi			80,11	74,77	73,43	75,24	75,65			
			Meningkatnya Demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	80,11		73,43	75,24	75,65	75,83	76,00	76,00
8	Meningkatnya Tata Kelola Kebencanaan	Indeks Resiko Bencana			163,75	159	159,82	151,7	151			
			Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	163,75		159,82	151,7	151	150	147	147
9	Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			58,59	58,76	63,07	59,32	59,81			
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,85		67,68	63,99		75,74	75,99	75,99

Tabel V.6

Target Indikator Kinerja Sasaran Perubahan RPJMD 2017 – 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN (LAMA)	SASARAN (BARU)	INDIKATOR KINERJA SASARAN (BARU)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET							KONDISI AKHIR RPJMD
						2018		2019		2020	2021	2022	
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Produksi Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan Dan Jasa Pertanian	1	Persentase Pertumbuhan Produksi Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Dan Jasa Perkebunan			-0,36	4,8	5,49	4,9	5,50	5,60		
			1 Meningkatkan PDRB Sub Sektor Pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	1,17		4,17		1,42	3,9	5,97	5,98	5,98
2	Meningkatnya Produksi Sub Sektor Perikanan	2	Persentase Pertumbuhan Produksi Sub Sektor Perikanan			-3,24	3,8	8,11	3,85	5,87	3,90		
			2 Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	-3,74		8,11		5,87	3,90	4,42	4,59	4,59
3	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	3	Tingkat Kunjungan Wisatawan			15,30%		2,92%		-58,94%	2,0%		
			3 Meningkatkan laju pertumbuhan kunjungan wisatawan	Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan	15,30%		2,92%		-58,94%	2,15%	2,20%	2,25%	2,25%

NO	SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN (LAMA)		SASARAN (BARU)	INDIKATOR KINERJA SASARAN (BARU)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET							KONDISI AKHIR RPJMD	
							2018		2019		2020	2021	2022		
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Meningkatnya Produksi Sektor Pertambangan	5	Persentase Pertumbuhan Produksi Sektor Pertambangan Dan Penggalian			2,22	0,53	-1,08	0,57	N.A	0,63				
				4	Meningkatkan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi	2,22		-1,08		0,87	1,50	1,74	1,76	1,76
5	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Industri	6	Persentase Pertumbuhan Produksi Sektor In dustri Pengolahan			6,22	2,63	4,04	2,65	N.A	2,67				
				5	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan	7,02		5,36		1,47	2,00	2,70	2,75	2,75
6	Terwujudnya Kemandirian Energi	7	Persentase Pertumbuhan Pro duksi Sub Sektor Ketenagalistrikan			5,91	12,8	8,80	12,83	7,29	12,86				
7	Meningkatnya Pendapatan Pemerintah Daerah	8	Persentase Per- tumbuhan Penda- patan Pemerintah Daerah			0,250	0,251	0252	0,253	0,255	0,257				
8	Menurunnya Angka Pengangguran	9	Persentase Angka Pengangguran			3,7	5,7	3,65	5,6	3,62	5,5				

NO	SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN (LAMA)		SASARAN (BARU)	INDIKATOR KINERJA SASARAN (BARU)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD	
							2018		2019		2020	2021		2022
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target		Target
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				6 Menurunkan Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,78		3,65		3,62	5,42	5,50	5,40	5,40
				7 Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	58,83		63,23		63,82	63,95	64,00	64,80	64,80
9	Menurunnya Angka Kemiskinan	10	Persentase Angka Kemiskinan			5,30	5,22	4,77	5,15	4,62	5,10			
				8 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	5,30	5,22	4,77		4,50	5,77	5,50	5,00	5,00
				9 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa	Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa	1.120.353		1.214.930		1.271.837	1.334.870	1.409.026	1.479.389	1.479.389
10	Menurunnya Angka Inflasi	11	Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			6,75	6,42		6,31	N,A	06,24			
11	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	12	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk			2,11	2,09	2,03	2,09	2,05	2,08			
12	Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Pengembangan Potensi Daerah	13	Terbangunnya Daerah Irigasi (Ha)			1.034	1.084	N.A	1.135	N,A	1.187			
		14	Ketersediaan Air Baku (M3)			N.A	N.A	N.A	N,A	N,A	90.000			

NO	SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN (LAMA)		SASARAN (BARU)	INDIKATOR KINERJA SASARAN (BARU)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET							KONDISI AKHIR RPJMD
							2018		2019		2020	2021	2022	
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				10 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	10		35		45	75	86	100	100
13	Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat	15	Persentase Lingkungan Yang Tertata			10%	14%	15%	34%	40\$	54%			
		16	Persentase Bangunan Yang Tertata			12%	16%	17%	38%	48%	56%			
		17	Persentase Desa Yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi			6%	10%	15%	20%	30%	30%			
				11 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar	Indeks Ketersediaan Infrastruktur Dasar	8		10		15	20	25	54	54
14	Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah	18	Persentase Kunjungan Kapal Di Pelabuhan Laut			0.10%	0.17%	0,17%	0.18%	0,18%	0.19%	0.20%	0.21%	0.21%
		19	Persentase Armada Pengangkutan			0,30%	0.33%	0,33%	0.34%	0,34%	0.35%	0.36%	0.37%	0.37%
		20	Persentase Jalan Kondisi Mantap			93%	93.50%	93,43%	94.50%	94,21%	95.5%	96%	96.5%	96.5%
				12 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	Indeks Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan.	30,25		34,53		39	60	69,45	71,84	71,84

NO	SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN (LAMA)		SASARAN (BARU)	INDIKATOR KINERJA SASARAN (BARU)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET							KONDISI AKHIR RPJMD	
							2018		2019		2020	2021	2022		
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
15	Meningkatnya Pendidikan Bagi Masyarakat	21	Angka Harapan Lama Sekolah , (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan)			11,71	11.83	11,87	11.89	11.94	11.96				
						L=11,35	L=11.58	L=11.70	L=11.72	L=11.78	L=11.80				
						P=12,07	P=12.08	P=12.05	P=12,07	P= 12.11	P= 12.13				
				13	Meningkatkan Akses pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah, (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, AngkaHarapan Lama Sekolah Perempuan)	11,71	11.83	11,83	11.89	11.94	11.96	12.5	13.00	13.00
						L=11,35	L=11.58	L=11.70	L=11.72	L=11.78	L=11.80	L=12.5	L=13	L=13	
						P=12,07	P=12.08	P=12.05	P=12,07	P= 12.11	P= 12.13	P=12.5	P=13	P=13	
				14	Meningkatkan Kualitas Pendidikain	Persentase sekolah terakreditasi A	35,66%	40,15%		43,38%	44%	44,30%	60%	60%	
				15	Meningkatkan Kesejahteraan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	60	63,05		65,55	67,85	68,1	68,5	68,5	
				16	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,07	2,02	2,02	1,98	1,98	2,00	2,08	2,08	2,08

NO	SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN (LAMA)		SASARAN (BARU)	INDIKATOR KINERJA SASARAN (BARU)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET							KONDISI AKHIR RPJMD
							2018		2019		2020	2021	2022	
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				17 Meningkatkan Pembangunan Resposif Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,93		89,15		89	89,01	89,02	89,05	89,05
				18 Meningkatkan Kualitas Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	49		53,67		54,50	55,50	56,50	57,50	57,50
				19 Meningkatkan Pembangunan Olahraga	Indeks Pembangunan Olah Raga	0,25		0,26		0,30	0,35	0,40	0,45	0,50
				20 Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS Sejahtera	44%		62%		63%	64,00%	65,92%	67%	67 %
16	MeningkatnyaKesehatan Masyarakat	22	Angka Kesehatan Masyarakat			76,94	71,6	88,35	77,58	88,48	82,97			
				21 Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	Angka Kesehatan Masyarakat	76,94	71,6	88,35	77,58	88,48	82,97	83,21	86,22	86,22
17	Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel	23	Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP			
				22 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	65,49		65,39		66,84	66,97	67	67,50	67,50
		24	Tingkat Kematangan Maturitas SPIP			2	2	2	3	3	3			
		25	Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat			61	65	67,16	70	70,26	72			
		26	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)			2,00	2,75	2,80	2,78	2,90	2,80			

NO	SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN (LAMA)	SASARAN (BARU)	INDIKATOR KINERJA SASARAN (BARU)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET							KONDISI AKHIR RPJMD
						2018		2019		2020	2021	2022	
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Meningkat										
18	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif Dan Efisien	27	Nilai Rata-Rata Delapan Area Perubahan		36,62	30	35,48	35	35,48	34,96			
		28	Indeks Profesionalitas ASN		60	63	65	68	70,18	71,27			
19	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas	29	Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)		1	1	3	5	4	5			
		30	Rata-Rata Tingkat Kepuasan Masyarakat		B	B	B	B	B	B			
20	Meningkatnya Kebebasan sipil, hak politik dan lembaga demokrasi masyarakat	31	Skor aspek kebebasan sipil		81,7	87,75	80,95	87,76	84,12	87,79			
		32	Skor aspek hak-hak politik		80,25	81,72	73,56	81,76	71,71	81,79			
		33	Skor aspek lembaga demokrasi		80,1	80,3	63,76	80,33	75,48	80,36			
			23 Meningkatkan Kebebasan Sipil	Nilai Kebebasan	83,07		80,95		84,12	85,02	87,79	87,82	87,82

NO	SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN (LAMA)		SASARAN (BARU)	INDIKATOR KINERJA SASARAN (BARU)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD	
							2018		2019		2020	2021		2022
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target		Target
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Masyarakat	Sipil									
				24 Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat	Nilai Hak-Hak Politik	82,30		73,56		71,71	75,80	81,79	81,85	81,85
				25 Meningkatkan Peran Lembaga Demokrasi Masyarakat	Nilai Kelembagaan Demokrasi	72,89		63,76		75,48	78,50	80,36	80,54	80,54
21	Meningkatnya Kapasitas Terhadap Penanggulangan Bencana	34	Indeks Kapasitas Bencana Daerah			0,10	0,15		0,20		0,25			
				26 Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,10	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41
22	Meningkatnya Pengendalian Lingkungan Hidup	35	Indeks Kualitas Air Sungai			64,56	65,85		67,8		67,16			
		36	Indeks kualitas Udara			82,81	85,3		87,86		90,49			
		37	Indeks Tutupan Lahan			37,51	37,88		38,26		38,64			
		38	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)			N.A	7.745,58		7.280,85		6.843,99			
				27 Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,85		67,68		63,99	75,51	75,74	75,99	75,99

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab V, maka dirumuskan dan ditetapkan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah. Program pembangunan Daerah haruslah tepat mewujudkan sasaran, sehingga sasaran yang dicapai juga dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian maka Misi dapat dicapai, yang akan berujung pada terwujudnya visi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan juga haruslah tepat dan konsisten dengan sasaran, tujuan, misi dan visi.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, perekonomian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditargetkan dapat tumbuh sebesar 5,25% sementara itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengindikasikan tingkat kualitas SDM diharapkan meningkat menjadi 71,50.

Guna mencapai target sasaran pokok meningkatnya perekonomian daerah, arah kebijakan prioritas dalam RPJPD yang dilaksanakan adalah:

1. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja;
2. Penempatan tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja pada semua sektor pembangunan;
3. Mendorong pengembangan standarisasi SDM, produk dan jasa KUKM untuk meningkatkan daya saing;
4. Peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing produk daerah;
5. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dan industri pengolahan sumber daya alam;
6. Pemenuhan energi listrik dan peningkatan rasio elektrifikasi;
7. Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;
8. Pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;
9. Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan;
10. Peningkatan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing global;
11. Pemantapan ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, keamanan dan mutu pangan;
12. Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan;
13. Peningkatan sarana dan prasarana, produksi dan nilai tambah produk serta peningkatan fungsi kelembagaan pertanian;

14. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, kebudayaan, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata;

Sedangkan untuk tercapainya sasaran pokok terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM, arah kebijakan yang dilaksanakan adalah:

1. Peningkatan akses pelayanan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan serta peningkatan relevansi dan daya saing;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat;
3. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan;
4. Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan.

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi adalah langkah-langkah atau cara dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan yang telah dituangkan dalam tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah merupakan aturan hukum kaidah-kaidah, norma yang menjamin agar pencapaian tujuan dan sasaran tercapai dengan baik.

Strategi pembangunan dalam RPJMD ini telah didahului oleh analisis yang cermat atas kondisi makro ekonomi yang ada di daerah dan nasional serta kondisi mikro di daerah. Sebelum masuk pada strategi pembangunan, telah diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan menggunakan analisis, akhirnya ditetapkan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai setiap sasaran pembangunan lengkap dengan indikator kinerja sasaran sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Strategi dan arah kebijakan yang digunakan dalam mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

6.1.1. Strategi pencapaian sasaran

Strategi yang dirumuskan dan ditetapkan untuk mencapai sasaran dengan strategi lama terdiri 46 (empat puluh enam) strategi lama sedangkan pada Perubahan RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi 70 (tujuh puluh) strategi baru yaitu :

Tabel VI.1

Perbandingan Strategi Pembangunan

No	Strategi Lama	Strategi Baru
1	2	3
1	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah pertanian berkelanjutan dengan arah kebijakan penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan	1 Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan
2	Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan	2 Peningkatan produksi dan pengelolaan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan

No	Strategi Lama	Strategi Baru
1	2	3
		3 Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian, perkebunan dan peternakan
		4 Pengembangan kawasan Agropolitan dan Teknopark Lada Air Gegas
3	Mengembangkan kawasan sentra kelautan dan perikanan	
4	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	5 Peningkatan kualitas sumber daya manusia perikanan tangkap dan perikanan budidaya
5	Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya	6 Peningkatan produksi dan pengelolaan hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya
6	Mengembangkan kawasan sentra kelautan dan perikanan	7 Peningkatan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya
		8 Peningkatan promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan produksi dan nilai tambah hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya
7	Meningkatkan sinergisitas pembangunan lintas sektor dalam mengembangkan pembangunan pariwisata	9 Peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif
8	Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata	10 Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana destinasi pariwisata
9	Mengembangkan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan	11 Peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata
		12 Peningkatan peran serta kepemudaan dan olahraga serta kebudayaan dalam pengembangan pariwisata
		13 Pengembangan <i>hinterland</i> dan kawasan peruntukan pariwisata Tanjung Gunung
		14 Pengembangan <i>hinterland</i> dan kawasan peruntukan pariwisata lintas timur Pulau Bangka
		15 Pengembangan <i>hinterland</i> dan kawasan peruntukan pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang
		16 Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata Pulau Punai
		17 Pengembangan pintu masuk wisatawan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera
		18 Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil pendukung pariwisata

No	Strategi Lama	Strategi Baru
1	2	3
10	Meningkatkan hasil produksi pertambangan dan nilai tambah yang berwawasan lingkungan	19 Peningkatan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan
		20 Peningkatan ketersediaan energi listrik masyarakat
11	Mengembangkan Kawasan industri berbasis potensi daerah	21 Pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular
		22 Pengembangan Kawasan Strategis Industri (KSI) Sadai
		23 Peningkatan tata kelola industri
		24 Peningkatan tata kelola perdagangan
12	Meningkatkan produksi dan pasokan energi listrik di daerah	
13	Meningkatkan pendapatan asli daerah	
14	Meningkatkan pembangunan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan	25 Peningkatan kesempatan kerja
		26 Peningkatkan peran KUKM dalam meningkatkan kesempatan kerja
		27 Peningkatan promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan lapangan pekerjaan
		28 Peningkatan kompetensi, hubungan industrial dan keselamatan tenaga kerja
15	Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan	29 Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
		30 Peningkatan pendapatan masyarakat miskin
		31 Peningkatan pendapatan masyarakat desa
16	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap komoditas penyumbang inflasi	

No	Strategi Lama	Strategi Baru
1	2	3
17	Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk	
18	Meningkatkan ketersediaan dan berfungsinya infrastruktur pertanian	32 Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum
19	Meningkatkan ketersediaan dan berfungsinya infrastruktur air baku	33 Peningkatan kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan rencana tata ruang
		34 Peningkatan ketersediaan dan kapasitas SDM Konstruksi
20	Meningkatkan ketersediaan jalan lingkungan yang layak bagi masyarakat	35 Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman
21	Meningkatkan penataan kawasan permukiman	
22	Meningkatkan ketersediaan pelayanan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	
23	Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan laut	36 Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana perhubungan
24	Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan darat	
25	Meningkatkan aksesibilitas	
26	Meningkatkan partisipasi sekolah untuk masyarakat	37 Peningkatan akses pelayanan pendidikan
27	Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat	38 Peningkatan mutu layanan pendidikan
		39 Peningkatan pelayanan terhadap pemberian hak-hak anak
		40 Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang
		41 Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
		42 Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender
		43 Peningkatan insan pemuda yang berprestasi

No	Strategi Lama		Strategi Baru	
1	2		3	
			44	Peningkatan prestasi dan peran serta masyarakat dalam berolahraga
			45	Peningkatan rehabilitasi, jaminan dan perlindungan sosial
28	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat		46	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
			47	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
29	Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah		48	Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah
30	Meningkatkan tata kelola pengawasan		49	Meningkatkan tata kelola pengawasan
31	Meningkatkan kualitas manajemen pemerintah daerah berbasis kinerja		50	Peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan
			51	Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah
			52	Pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB)
32	Meningkatkan tata kelola penataan peraturan perundang-undangan		53	Peningkatan penataan peraturan perundangan dan kebijakan daerah
33	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa		54	Peningkatan transparansi pengadaan barang dan jasa
34	Meningkatkan faktor pengungkit dan faktor hasil pencapaian reformasi birokrasi		55	Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
35	Meningkatkan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah			
36	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik		56	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi
			57	Peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN
37	Meningkatkan pelayanan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien			

No	Strategi Lama		Strategi Baru	
1	2		3	
38	Menciptakan iklim berdemokrasi yang kondusif		58	Peningkatan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi
39	Meningkatkan masyarakat	partisipasi politik	59	Peningkatan pelayanan terhadap hak-hak politik masyarakat
			60	Peningkatan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah serta Perlindungan Masyarakat (Linmas)
40	Meningkatkan pengembangan lembaga demokrasi		61	Peningkatan pengembangan lembaga-lembaga demokrasi
41	Meningkatkan kemampuan pencegahan dan penanggulangan bencana melalui penambahan sarana, SDM dan pelatihan		62	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana
42	Mengembangkan kawasan berbasis penanggulangan bencana		63	Peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana alam
			64	Peningkatan penataan hilir dan hulu daerah rawan bencana Teluk Bayur
43	Meningkatkan kualitas air		65	Peningkatan pengendalian terhadap kualitas air sungai
44	Meningkatkan kualitas Udara		66	Peningkatan pengendalian terhadap kualitas udara
45	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan hutan		67	Peningkatan pengendalian dan pengawasan hutan
			68	Peningkatan tata kelola kehutanan
			69	Peningkatan pemanfaatan kawasan hutan
46	Meningkatkan pengendalian terhadap lingkungan		70	Peningkatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan

Untuk melihat lebih jelas keterkaitan dan konsistensi antara strategi dengan sasaran, tujuan, misi dan visi dapat dilihat pada tabel VI.2 berikut ini:

Tabel VI.2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi

Visi : “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”

TUJUAN		TUJUAN BARU		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU	
1		2		3		4		5		6		7	
Misi I. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah													
1	Meningkat-nya pertumbuhan ekonomi	1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan	1	Meningkatkan PDRB sub sektor pertanian	1	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah pertanianberkelanjutan	1	Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan
										2	Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan Kehutanan	2	Peningkatan produksi dan pengelolaan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan
												3	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian, perkebunan dan peternakan
										3	Mengembangkan kawasan berbasis pertanian, perkebunan dan peternakan		

TUJUAN		TUJUAN BARU		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU	
1		2		3		4		5		6		7	
												4	Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Teknopark Lada Air Gegas
				2	PEMBANGUNAN BAHARI	2	Meningkatnya produksi sub sektor perikanan	2	Meningkatkan PDRB sub sektor perikanan	4	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	5	Peningkatan kualitas sumber daya manusia perikanan tangkap dan perikanan budidaya
										5	Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya	6	Peningkatan produksi dan pengelolaan hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya
												7	Peningkatan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya
												8	Peningkatan promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan produksi dan nilai tambah hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya
										6	Mengembangkan kawasan sentra		

TUJUAN		TUJUAN BARU		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU	
1		2		3		4		5		6		7	
											Kelautan dan Perikanan		
				3	PENGEMBANGAN PARIWISATA	3	Meningkatnya kunjungan wisatawan	3	Meningkatkan laju pertumbuhan kunjungan wisatawan	7	Meningkatkan sinergisitas pembangunan lintas sektor dalam mengembangkan pembangunan pariwisata	9	Peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif
										8	Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata	10	Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana destinasi pariwisata
												11	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata
												12	Peningkatan peran serta kepemudaan dan olahraga serta kebudayaan dalam pengembangan pariwisata
												13	Pengembangan <i>hinterland</i> dan kawasan peruntukan pariwisata Tanjung Gunung
												14	Pengembangan <i>hinterland</i> dan kawasan peruntukan pariwisata lintas timur Pulau Bangka

TUJUAN		TUJUAN BARU		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU	
1		2		3		4		5		6		7	
												15	Pengembangan <i>hinterland</i> dan kawasan peruntukan pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang
												16	Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata Pulau Punai
												17	Pengembangan pintu masuk wisatawan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera
										9	Mengembangkan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan	18	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil pen-dukung pariwisata
				4	PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN	4	Meningkatnya produksi sektor per-tambangan	4	Meningkatkan PDRB sektor pertambangan dan energi	10	Meningkatkan hasil produksi pertambangan dan nilai tambah pertambangan yang berwawasan lingkungan	19	Meningkatkan produksi dan nilai tambah sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan
												20	Peningkatan

TUJUAN		TUJUAN BARU		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU	
1		2		3		4		5		6		7	
													ketersediaan energi listrik masyarakat
						5	Meningkatnya pembangunan berbasis industri	5	Meningkatkan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan	11	Mengembangkan Kawasan industri berbasis potensi daerah	21	Pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular
												22	Pengembangan Kawasan Strategis Industri (KSI) Sadai
												23	Peningkatan tata kelola industri
												24	Peningkatan tata kelola perdagangan
						6	Terwujudnya kemandirian energi			12	Meningkatkan produksi dan pasokan energi listrik di daerah		
2	Meningkatnya Pengeluaran Pemerintah dan pendapatan masyarakat	2	Meningkatnya pemerataan pendapatan	5	PENINGKATAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH	7	Meningkatnya pendapatan pemerintah daerah			13	Meningkatkan pendapatan asli daerah		
				6	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	8	Menurunnya angka pengangguran	6	Menurunkan tingkat pengangguran	14	Meningkatkan pembangunan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan	25	Peningkatan kesempatan kerja
												26	Peningkatkan peran KUKM dalam meningkatkan kesempatan kerja

TUJUAN		TUJUAN BARU		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU	
1		2		3		4		5		6		7	
												27	Peningkatan promosi, koordinasi, kerjasama dan investasi dalam peningkatan lapangan pekerjaan
								7	Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja			28	Peningkatan kompetensi, hubungan industrial dan keselamatan tenaga kerja
						9	Menurunnya angka kemiskinan	8	Menurunkan tingkat kemiskinan	15	Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non dis-	29	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin

TUJUAN		TUJUAN BARU		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU	
1		2		3		4		5		6		7	
											kriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan.		
												30	Peningkatkan pendapatan masyarakat miskin
								9	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa			31	Peningkatan pendapatan masyarakat desa
						10	Menurunnya angka inflasi			16	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap komoditas penyumbang inflasi		
						11	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk			17	Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk		
Misi II. Mewujudkan Infrastruktur Dan Konektivitas Daerah Yang Berkualitas													
3	Meningkatnya infrastruktur	3	Meningkatnya ketersediaan	7	PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS	12	Meningkatnya pembangunan	10	Meningkatkan ketersediaan	18	Meningkatkan ketersediaan dan	32	Peningkatan, pemeliharaan dan

TUJUAN		TUJUAN BARU		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU	
1		2		3		4		5		6		7	
	dan konektivitas daerah yang berkualitas		infrastruktur		DAN INFRASTRUKTUR		infrastruktur pengembangan potensi daerah		infrastruktur pekerjaan umum		berfungsinya infrastruktur pertanian		pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum
										19	Meningkatkan ketersediaan dan berfungsinya infrastruktur air baku	33	Peningkatan kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan tata ruang
												34	Peningkatan ketersediaan dan kapasitas SDM Konstruksi
						13	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	11	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar	20	Meningkatkan ketersediaan jalan lingkungan yang layak bagi masyarakat	35	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman
										21	Meningkatkan penataan kawasan permukiman		
										22	Meningkatkan ketersediaan pelayanan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat		
						14	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	12	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perhubungan	23	Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan laut	36	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana perhubungan
										24	Meningkatkan dan mengembangkan		

TUJUAN		TUJUAN BARU		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU	
1		2		3		4		5		6		7	
											konektivitas perhubungan darat		
										25	Meningkatkan aksesibilitas		
Misi III. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Handal													
4	Meningkatnya lama sekolah masyarakat	4	Meningkatnya pendidikan masyarakat	8	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	15	Meningkatnya pendidikan bagi masyarakat	13	Meningkatkan akses pendidikan masyarakat	26	Meningkatkan partisipasi sekolah untuk masyarakat	37	Peningkatan akses pelayanan pendidikan
								14	Meningkatkan kualitas pendidikan	27	Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat	38	Peningkatan mutu layanan pendidikan
		5	Meningkatnya pembangunan sosial masyarakat					15	Meningkatnya kesejahteraan anak			39	Peningkatan pelayanan terhadap pemberian hak-hak anak
								16	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk			40	Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang
								17	Meningkatkan Pembangunan Resposif Gender (PRG)			41	Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
												42	Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender
								18	Meningkatkan kualitas pemuda			43	Peningkatan Insan pemuda yang mandiri

TUJUAN		TUJUAN BARU		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU	
1		2		3		4		5		6		7	
													dan berprestasi
								19	Meningkatkan pembangunan olahraga			44	Peningkatan prestasi dan peran serta masyarakat dalam berolahraga
								20	Meningkatkan kesejahteraan sosial			45	Peningkatan rehabilitasi, jaminan dan perlindungan sosial
Misi IV. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat													
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	9	PEMBANGUNAN KESEHATAN	16	Meningkatnya kesehatan masyarakat	21	Meningkatkan kesehatan masyarakat	28	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	46	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
												47	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
Misi V. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pembangunan Demokrasi													
6	Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	6	Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	10	PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PELAYANAAN PUBLIK	17	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	22	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	29	Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah	48	Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah
										30	Meningkatkan tata kelola pengawasan	49	Meningkatkan Tata kelola pengawasan
										31	Meningkatkan kualitas manajemen pemerintah daerah	50	Peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan

TUJUAN		TUJUAN BARU		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU	
1		2		3		4		5		6		7	
											berbasis kinerja		penganggaran dan pelaporan
												51	Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah
												52	Pengembangan Daerah Otonomi Baru(DOB)
										32	Meningkatkan tata kelola penataan peraturan perundang-undanga	53	Peningkatan penataan peraturan perundangan dan kebijakan daerah
										33	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa	54	Peningkatan transparansi Pengadaan barang dan jasa
						18	Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien			34	Meningkatkan faktor pengungkit dan faktor hasil pencapaian reformasi birokrasi	55	Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
												56	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi
										35	Meningkatkan tata kelola manajemen SDM aparatur	57	Peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN

TUJUAN		TUJUAN BARU		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU	
1		2		3		4		5		6		7	
											pemerintah daerah		
						19	Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas			36	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik		
										37	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik		
7	Terwujudnya pembangunan demokrasi	7	Meningkatnya demokrasi Indonesia	11	PEMBANGUNAN BERDEMOKRASI	20	Meningkatnya kebebasan sipil, hak politik dan lembaga demokrasi masyarakat	23	Meningkatkan kebebasan sipil	38	Menciptakan iklim berdemokrasi yang kondusif	58	Peningkatan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi
								24	Meningkatkan partisipasi politik masyarakat	39	Meningkatkan partisipasi politik masyarakat	59	Peningkatan pelayanan terhadap hak-hak politik masyarakat
												60	Peningkatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegaka Peraturan Daerah serta perlindungan masyarakat (Linmas)
								25	Meningkatkan peran Lembaga Demokrasi	40	Meningkatkan pengembangan lembaga demokrasi	61	Peningkatan pengembangan Lembaga-Lembaga

TUJUAN		TUJUAN BARU		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU	
1		2		3		4		5		6		7	
									Masyarakat				Demokrasi
Misi VI . Meningkatkan Pengendalian Bencana Dan Kualitas Lingkungan Hidup													
8	Meningkatnya tata kelola kebencanaan	8	Menurunnya Risiko Bencana	12	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN	21	Meningkatnya kapasitas terhadap penanggulangan bencana	26	Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana	41	Meningkatkan kemampuan pencegahan dan penanggulangan bencana melalui penambahan sarana, SDM dan Pelatihan	62	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana
										42	Mengembangkan kawasan berbasis penanggulangan bencana	63	Peningkatan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam
												64	Peningkatan penataan hilir dan hulu daerah rawan bencana Teluk Bayur
9.	Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup	9	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	13	PENEGNDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	22	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	27	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	43	Meningkatkan kualitas air	65	Peningkatan pengendalian terhadap kualitas air sungai
										44	Meningkatkan kualitas udara	66	Peningkatan pengendalian terhadap kualitas udara
										45	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan hutan	67	Peningkatan pengendalian dan pengawasan hutan

TUJUAN		TUJUAN BARU		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU	
1		2		3		4		5		6		7	
												68	Peningkatan tata kelola kehutanan
												69	Peningkatan pemanfaatan kawasan hutan
										46	Meningkatkan pengendalian terhadap lingkungan	70	Peningkatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan

6.1.2. Arah Kebijakan

Strategi yang telah dirumuskan dan ditetapkan keberhasilannya dalam implementasi haruslah didukung oleh arah kebijakan yang tepat dan memadai, agar pencapaian sasaran melalui strategi yang telah ditetapkan, dapat terjamin realisasinya.

Oleh karena itu setiap strategi yang ada harus dikuatkan dan didukung oleh arah kebijakan yang tepat serta memadai. Dari hasil evaluasi terkait pencapaian sasaran pembangunan pada tahun 2018-2020 pada RPJMD 2017-2022 yang lama maka telah dirumuskan dan ditetapkan arah kebijakan yang baru sebanyak 70 (tujuh puluh) arah kebijakan berubah yang semula sebanyak 102 arah kebijakan dan terekam di dalam Perubahan RPJMD 2017-2022 dan akan dilaksanakan untuk tahun 2021-2022.

Keterkaitan dan konsistensi antara arah kebijakan dengan strategi, sasaran, tujuan, misi dan visi diuraikan dalam tabel VI.3

Tabel VI.3

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

Visi : “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU			
														2021	2022		
1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Misi I. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah																	
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi		Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan	1	MeningkatkanPDRB Sub Sektor Pertanian	1	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah pertanian berkelanjutan	1	Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan	1	Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan	1	Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan	1	Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan
								2	Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan Kehutanan	2	Peningkatan produksi dan pengelolaan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	2	Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan Kehutanan	2	Peningkatan Produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	2	Peningkatan Produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
										3	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian, perkebunan dan peternakan	3	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian	3	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	3	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
										4	Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Teknopark Lada Air Gegas			4	Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Teknopark Lada Air Gegas		Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Teknopark Lada Air Gegas
												7	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian				

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU		
1		2		3		4		5		6		7		8		9
								3	Mengembangkan kawasan berbasis pertanian, perkebunan dan peternakan			8	Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang			
												9	Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung			
												10	Pengembangan kawasan budidaya pertanian dan peternakan			
												11	Pengembangan kawasan Agropolitan dan Teknopark Pertanian Lada Air Gegas			
					Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	2	Meningkatkan PDRB Sub sektor perikanan	4	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	5	Peningkatan kualitas sumber daya manusia perikanan tangkap dan perikanan budidaya	12	Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan	5	Peningkatan kualitas sumber daya manusia perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Peningkatan kualitas sumber daya manusia perikanan tangkap dan perikanan budidaya
								5	Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya	6	Peningkatan produksi dan pengelolaan hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	13	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor Kelautan dan Perikanan	6	Peningkatan produksi dan pengelolaan hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Peningkatan produksi dan pengelolaan hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU	
1		2		3		4		5		6		7		2021	2022
										7	Peningkatan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	14	Peningkatan produksi, kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan	7	Peningkatan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya
										8	Peningkatan promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan produksi dan nilai tambah hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	16	Peningkatan standarisasi produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan	8	Peningkatan promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan produksi dan nilai tambah hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya
												17	Pengembangan produksi kelautan dan perikanan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanan		
												18	Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok		
												19	Pengembangan		

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU		
1		2		3		4		5		6		7		8		9
													Kawasan Strategis etalase Perikanan Sela Nasik			
								6	Mengembang-kan kawasan sentra Kelautan dan Perikanan			20	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga			
												21	Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar			
					Meningkatnya kunjungan wisatawan	3	Meningkatkan laju pertumbuhan kunjungan wisatawan	7	Meningkatkan sinergitas pembangunan lintas sektor dalam mengembang-kan pembangunan pariwisata	9	Peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata serta Pengembangan ekonomi kreatif	22	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	9	Peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata serta Pengembangan ekonomi kreatif	Peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata serta Pengembangan ekonomi kreatif
										10	Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana destinasi pariwisata	23	Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata	10	Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana destinasi pariwisata	Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana destinasi pariwisata
										11	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata	24	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah	11	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata
										12	Peningkatan Peran serta kepemudaan dan olahraga serta kebudayaan dalam pengembangan pariwisata	25	Kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olahraga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunan kepariwisataan	12	Peningkatan peran serta kepemudaan dan olahraga serta kebudayaan dalam pengembangan pariwisata	Peningkatan peran serta kepemudaan dan olahraga serta kebudayaan dalam pengembangan pariwisata

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU	
1		2		3		4		5		6		7		2021	2022
										13	Pengembangan hinterland dan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung Gunung	28	Pengembangan pariwisata daerah, ser koordinasi, sinkronisasi keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata	13	Pengembangan <i>hinterland</i> dan kawasan peruntukan pariwisata Tanjung Gunung
										14	Pengembangan <i>hinterland</i> dan kawasan peruntukan pariwisata lintas timur Pulau Bangka	29	Pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian	14	Pengembangan <i>hinterland</i> dan kawasan peruntukan pariwisata lintas timur Pulau Bangka
										15	Pengembangan <i>hinterland</i> dan kawasan peruntukan pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang	30	Pengembangan kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang	15	Pengembangan <i>hinterland</i> dan kawasan peruntukan pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang
								8	Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata	16	Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata Pulau Punai	31	Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata Tanjung Gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	16	Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata Pulau Punai

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU		
1		2		3		4		5		6		7		8		9
										17	Pengembangan pintu masuk wisatawan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	32	Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang	17	Pengembangan pintu masuk wisatawan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	Pengembangan pintu masuk wisatawan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera
										18	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil pendukung pariwisata	33	Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok	18	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil pendukung pariwisata	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil pendukung pariwisata
												34	Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba			
												35	Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung			
												36	Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata Gunung Menumbing			
								9	Mengembang-kan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan			37	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera			

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU		
1		2		3		4		5		6		7		8		9
												38	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil			
					Meningkatnya Produksi sektor pertambangan	4	MeningkatkanP DRB sektor pertambangan dan energi	10	Meningkatkan hasil produksi pertambangan dan nilai tambah pertambangan yang berwawasan lingkungan	19	Meningkatkan produksi dan nilai tambah sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan	39	Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral	19	Meningkatkan produksi dan nilai tambah sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan produksi dan nilai tambah sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan
										20	Peningkatan ketersediaan energi listrik masyarakat	41	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor sumber daya mineral	20	Peningkatan ketersediaan energi listrik masyarakat	Peningkatan ketersediaan energi listrik masyarakat
												42	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor sumber daya mineral			
												43	Pengembangan produksi sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral			
					Meningkatnya pembangunan	5	MeningkatkanP DRB	11	Mengembang-kan kawasan industri	21	Pengembangan Kawasan Industri	44	Kawasan Industri dan Pelabuhan	21	Pengembangan Kawasan Industri	Pengembangan Kawasan Industri

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU	
1		2		3		4		5		6		7		2021	2022
				berbasis industri		sektor industri pengolahan dan perdagangan		berbasis potensi daerah		dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular		Terpadu (KIPT) Tanjung Ular		dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular
									22	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai	45	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)	22	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai
									23	Peningkatan tata kelola industri	46	Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	23	Peningkatan tata kelola industri	Peningkatan tata kelola industri
									24	Peningkatan tata kelola perdagangan	47	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai	24	Peningkatan tata kelola perdagangan	Peningkatan tata kelola perdagangan
											48	Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu			
											49	Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri			
				Terwujudnya kemandirian energi				12	Meningkatkan produksi dan pasokan energi listrik di daerah		50	Pemenuhan Energi listrik untuk mendorong pengembangan industri berbasis potensi daerah serta peningkatan rasio elektrifikasi;			
2	Meningkatnya Pengeluaran Pemerintah dan pendapatan masyarakat			Meningkatnya Pendapatan Pemerintah Daerah				13	Meningkatkan pendapatan asli daerah		51	Peningkatan potensi penggalan sumber-sumber Pendapatan asli daerah untuk pemanfaatan sebesar besarnya bagi kemakmuran masyarakat			

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU	
1		2		3		4		5		6		7		2021	2022
		2	Meningkatnya pemerataan pendapatan		Menurunnya angka Pengangguran	6	Menurunkan tingkat pengangguran	14	Meningkatkan pembangunan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan	25	Peningkatan kesempatan kerja	52	Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja	25	Peningkatan kesempatan kerja
										26	Peningkatkan peran KUKM dalam meningkatkan kesempatan kerja			26	Peningkatkan per KUKM dalam meningkatkan kesempatan kerja
										27	Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan lapangan pekerjaan			27	Peningkatan promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan lapangan pekerjaan
						7	Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja			28	Peningkatan Kompetensi, hubungan industrial dan keselamatan tenaga kerja	53	Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan	28	Peningkatan kompetensi, hubungan industrial dan keselamatan tenaga kerja
					Menurunnya angka kemiskinan	8	Menurunkan tingkat kemiskinan	15	Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin serta bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas	29	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	54	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	29	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU	
1		2		3		4		5		6		7		2021	2022
									tas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan						
										30	Peningkatkan pendapatan masyarakat miskin	55	Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	30	Peningkatkan pendapatan masyarakat miskin
						9	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa			31	Peningkatan pendapatan masyarakat desa			31	Peningkatan pendapatan masyarakat desa
					Menurunnya angka Inflasi			16	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap komoditas penyumbang inflasi			56	Pengendalian tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi		
												57	Mengurangi ketergantungan pasok dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi		
					Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk			17	Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk			58	Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang		
Misi II. Mewujudkan Infrastruktur Dan Konektifitas Daerah Yang Berkualitas															
3	Meningkatnya infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah	3	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur		Meningkatnya pembangunan infrastruktur pengembangan potensi daerah	10	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur Pekerjaan Umum	18	Meningkatkan ketersediaan dan berfungsinya infrastruktur pertanian	32	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum	59	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern	32	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU		
1		2		3		4		5		6		7		2021		2022
								19	Meningkatkan ketersediaan dan berfungsinya infrastruktur air baku	33	Peningkatan kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan tata ruang	60	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku	33	Peningkatan kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan tata ruang	Peningkatan kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan tata ruang
										34	Peningkatan ketersediaan dan kapasitas SDM Konstruksi			34	Peningkatan ketersediaan dan kapasitas SDM Konstruksi	Peningkatan ketersediaan dan kapasitas SDM Konstruksi
					Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	11	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar	20	Meningkatkan ketersediaan jalan lingkungan yang layak bagi masyarakat	35	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman	61	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat	35	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman
								21	Meningkatkan penataan kawasan permukiman			62	Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi			
								22	Meningkatkan ketersediaan pelayanan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat			63	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat			
					Meningkatnya konektivitas antar wilayah	12	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perhubungan	23	Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan laut	36	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana perhubungan	64	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan	36	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana perhubungan	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana perhubungan
								24	Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan darat			65	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal			

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU	
1		2		3		4		5		6		7		8	
								25	Meningkatkan aksesibilitas			66	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan		
Misi III. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Handal															
4	Meningkatnya Lama sekolah masyarakat	4	Meningkatnya Pendidikan masyarakat		Meningkatnya pendidikan bagi masyarakat	13	Meningkatkan akses pendidikan masyarakat	26	Meningkatkan partisipasi sekolah untuk masyarakat	37	Peningkatan akses pelayanan pendidikan	67	peningkatan akses pelayanan pendidikan	37	Peningkatan akses pelayanan pendidikan
						14	Meningkatkan kualitas pendidikan	27	Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat	38	Peningkatan mutu layanan pendidikan	68	peningkatan mutu layanan pendidikan	38	Peningkatan mutu layanan pendidikan
												69	Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal		
		5	Meningkatnya pembangunan sosial masyarakat			15	Meningkatkan Kesejahteraan Anak			39	Peningkatan pelayanan terhadap pemberian hak-hak anak	70	Peningkatan Pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral	39	Peningkatan pelayanan terhadap pemberian hak-hak anak
						16	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk			40	Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbul seimbang			40	Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbul seimbang
						17	Meningkatkan Pembangunan Responsif Gender			41	Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak			41	Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU	
1		2		3		4		5		6		7		2021	2022
										42	Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender			42	Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender
						18	Meningkatkan Kualitas Pemuda			43	Peningkatan Insan pemuda yang mandiri dan berprestasi			43	Peningkatan Insan pemuda yang mandiri dan berprestasi
						19	Meningkatkan Pembangunan Olahraga			44	Peningkatan prestasi dan peran serta masyarakat dalam berolahraga			44	Peningkatan prestasi dan peran serta masyarakat dalam berolahraga
						20	Meningkatkan kesejahteraan sosial			45	Peningkatan rehabilitasi, jaminan dan perlindungan sosial			45	Peningkatan rehabilitasi, jaminan dan perlindungan sosial
Misi IV. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat															
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	6	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat		Meningkatnya kesehatan masyarakat	21	Meningkatkan kesehatan masyarakat	28	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	46	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	71	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	46	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
										47	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	72	peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	47	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
												73	Meningkatkan Pengendalian Penyalahgunaan Napza		
Misi V. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pembangunan Demokrasi															
6	Mewujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	7	Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas		Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	22	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	29	Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah	48	Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah	74	Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran	48	Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU		
1		2		3		4		5		6		7		8		9
								30	Meningkatkan tata kelola pengawasan	49	Peningkatan tata kelola pengawasan	75	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel	49	Peningkatan tata kelola pengawasan	Peningkatan tata kelola pengawasan
								31	Meningkatkan kualitas manajemen pemerintah daerah berbasis kinerja	50	Peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	76	Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	50	Peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan
										51	Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah	77	Peningkatan efektivitas pelaksanaan urusan	51	Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah	Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah
										52	Pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB)			52	Pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB)	Pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB)
								32	Meningkatkan tata kelola penataan peraturan perundang-undangan	53	Peningkatan penataan peraturan perundangan dan kebijakan daerah	78	Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan	53	Peningkatan penataan peraturan perundangan dan kebijakan daerah	Peningkatan penataan peraturan perundangan dan kebijakan daerah
								33	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa	54	Peningkatan transparansi Pengadaan barang dan jasa	79	Peningkatan akses data dan informasi layanan pengadaan barang dan jasa	54	Peningkatan transparansi Pengadaan barang dan jasa	Peningkatan transparansi Pengadaan barang dan jasa
					Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien			34	Meningkatkan faktor pengungkit dan faktor hasil pencapaian reformasi birokrasi	55	Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	80	Peningkatan penguatan sistem manajemen pemerintahan	55	Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU	
1		2		3		4		5		6		7		2021	2022
										56	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi			56	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi
								35	Meningkatkan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah	57	Peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN	81	Peningkatan penguatan sistem manajemen SDM Aparatur	57	Peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN
												82	Peningkatan kompetensi dan profesional aparaturnya		
					Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas			36	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik			83	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat		
								37	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik			84	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien		
												85	Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan		

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU		
1		2		3		4		5		6		7		8		9
													peningkatan kapasitas aparatatur desa			
												86	Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,			
												87	Sistem pemberdayaan perlindungan dan jaminan sosial disusun ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik			
												88	Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak			
												89	Menjamin hak anak dalam pembangunan			
7	Terwujudnya pembangunan demokrasi	8	Meningkatnya demokrasi Indonesia		Meningkatnya kebebasan sipil, hak politik dan lembaga demokrasi masyarakat	23	Meningkatkan Kebebasan sipil	38	Menciptakan iklim berdemokrasi yang kondusif	58	Peningkatan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi	90	Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat	58	Peningkatan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi	Peningkatan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi
												91	Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah serta Perlindungan Masyarakat (Linmas)			

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU	
1		2		3		4		5		6		7		8	
						24	Meningkatkan partisipasi politik masyarakat	39	Meningkatkan partisipasi politik masyarakat	59	Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat	92	Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat	59	Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat
										60	Peningkatan Penyelenggara n ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)			60	Peningkatan Penyelenggara n ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)
						25	Meningkatkan Peran lembaga demokrasi masyarakat	40	Meningkatkan pengembangan lembaga demokrasi	61	Peningkatan pengembangan Lembaga-Lembaga Demokrasi	93	Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi	61	Peningkatan pengembangan Lembaga-Lembaga Demokrasi

Misi VI . Meningkatkan Pengendalian Bencana Dan Kualitas Lingkungan Hidup

8	Meningkatnya tata kelola kebencanaan	9	Menurunnya Resiko Bencana		Meningkanya kapasitas terhadap penanggulangan bencana	26	Meningkatkan kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana	41	Meningkatkan kemampuan pencegahan dan penanggulangan bencana melalui penambahan sarana, SDM dan pelatihan	62	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	94	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	62	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana
								42	Mengembangkan kawasan berbasis penanggulangan bencana	63	Peningkatan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	95	Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	63	Peningkatan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam
										64	Peningkatan penataan hilir dan hulu daerah rawa bencana Teluk Bayur	96	Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana Teluk Bayur	64	Peningkatan penataan hilir dan hulu daerah rawan bencana Teluk Bayur

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU	
1		2		3		4		5		6		7		2021	2022
9	Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup	10	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Meningkatnya Kualitas Lingkungan	27	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	43	Meningkatkan kualitas air	65	Peningkatan pengendalian terhadap kualitas air sungai	97	Pengendalian kualitas air	65	Peningkatan pengendalian terhadap kualitas air sungai
								44	Meningkatkan kualitas udara	66	Peningkatan pengendalian terhadap kualitas udara	98	pengendalian kualitas udara	66	Peningkatan pengendalian terhadap kualitas udara
								45	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan hutan	67	Peningkatan pengendalian dan pengawasan hutan	99	Peningkatan tutupan lahan	67	Peningkatan pengendalian dan pengawasan hutan
										68	Peningkatan tata kelola kehutanan			68	Peningkatan tata kelola kehutanan
										69	Peningkatan pemanfaatan kawasan hutan			69	Peningkatan pemanfaatan kawasan hutan
								46	meningkatkan pengendalian terhadap lingkungan	70	Peningkatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	100	Pengembangan perhutanan sosial	70	Peningkatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
												101	Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan		
												102	Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan		

6.2 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah telah dirumuskan dan ditetapkan. Selain sebagai solusi penyelesaian masalah dan isu strategis, maka yang utama adalah untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dengan dukungan strategi dan arah kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya.

Dengan memperhatikan tujuan, sasaran, permasalahan dan isu-isu strategis, berkaitan dengan tujuan, sasaran, program kementerian/lembaga sebagai penjabaran RPJMN 2015-2019, RPJMN 2020-2024; serta dengan mencermati program-program berkaitan dengan Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat, serta hasil analisis SWOT, maka dirumuskan dan ditetapkan 53 (lima puluh tiga) Program Pembangunan Daerah, yang dikembangkan dari 12 program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

6.2.1. Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, terdapat Prioritas Pembangunan Daerah yang dirumuskan dan ditetapkan menjadi unggulan pembangunan daerah, setelah dicermati, dianalisis, serta memperhatikan kaidah-kaidah teknokratik dan aturan penyusunan RPJMD. Program Unggulan Pembangunan Daerah tersebut ada 12 (dua belas) yaitu sebagai berikut:

1. PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN

Fokus kegiatan memperluas lahan produksi lada di Bangka Belitung dalam rangka mengembalikan ladasebagai produk agrobisnis andalan Bangka Belitung sehingga kejayaan Bangka Belitung sebagai Provinsi Lada bisa dicapai kembali; Membangun pusatpenelitiandan pengembangan rekayasa lada maupun produk perkebunan lainnya seperti karet dan sawit di Provinsi Bangka Belitung;Memberikan pelatihan agrobisnis profesional kepada petani-petani di Bangka Belitung sehingga petani mampu memproduksi produk pertanian (khususnya lada) dengan kualitas unggul;Memberikan bantuan bibit dan sarana pendukung pengembangan agrobisnis lainnya agar petani memperoleh hasil optimal.

2. PEMBANGUNAN BAHARI

Fokus kegiatan memberikan dukungan berupa pemberian alat-alat yang modern dan pendampingan proses hilir hasil perikanan terhadap nelayan-nelayan Bangka Belitung, demi peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk;Mendukung pelaku usaha sektor bahari untuk mengembangkan sektor usaha yang ramah lingkungan.

3. PENGEMBANGAN PARIWISATA

Fokus kegiatan menjadikan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional melalui *event-event* seni-budaya atau olahraga bernuansa bahari level nasional/internasional seperti, Festival Budaya Melayu, Festival Kuliner Bangka-Belitung, Karnaval Budaya Serumpun Sebalai, Triathlon, Maraton, dan lain-lain;*Rebranding* pantai-pantai di Bangka Belitung melalui desain PR yang menarik seperti cerita atau sejarah keunggulan pantai tersebut dibanding lainnya;Memberikan insentif kepada investor pariwisata untuk membangun bisnis pariwisatanya di Bangka

Belitung melalui pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, air, internet, dan lain-lain) secara memadai demi pengembangan konsep *waterfront city*.

4. PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN

Fokus kegiatan zonasi atau wilayah khusus pengelolaan yang dibagi secara proporsional dan berkelanjutan. Menimbang tambang konvensional dan tambang rakyat menjadi pemasukan utama bagi Bangka Belitung. Maka zonasi bagi Wilayah Penambangan Rakyat (WPR) perlu diwujudkan dan diawasi secara cermat; pembayaran dan pengelolaan CSR Timah secara terpadu dan berkeadilan bagi seluruh perusahaan timah yang beroperasi sehingga pemanfaatannya lebih jelas terutama untuk rehabilitasi lahan yang rusak dan dana tanggap bencana.

5. PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT

Fokus kegiatan mengembangkan bisnis UMKM di Bangka Belitung agar tetap kompetitif di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui Bantuan Promosi (Gelar Pameran UMKM), temu investor atau *buyer (Business Gathering)*, dan pendampingan pelatihan kapasitas UMKM (*Training*); Memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengakses kredit pengembangan usaha; Melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional di Bangka Belitung menjadi pasar yang bersih sehingga bisa bersaing dengan pasar swalayan modern; Pendirian dan Optimalisasi peran koperasi untuk membantu para petani dan pedagang kecil untuk mencegah penghisapan para tengkulak dan rentenir.

6. PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN

Fokus kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara rutin, jalan penghubung antar kabupaten yang menjadi tanggung jawab Gubernur harus dibangun dengan kondisi baik sehingga arus barang, jasa dan manusia bisa optimal; Pembangunan Pelabuhan Batu Beriga dan jembatan penghubung antara pulau Bangka-Belitung untuk menyeimbangkan sektor pariwisata kedua daerah; Pembangunan Masjid Terapung sebagai ikon baru Bangka Belitung sekaligus implementasi masyarakat melayu religius dan pengembangan sektor wisata unggulan; Pembangunan Museum GMT di Bangka dan Belitung untuk mendokumentasikan peristiwa alam tersebut secara lengkap sekaligus menguatkan *brand* Babel sebagai tempat GMT paling bersejarah; Meningkatkan status bandara Depati Amir (Bangka Tengah) dan HAS Hanandjoedin (Belitung) sebagai bandara udara internasional dalam rangka mendukung Provinsi Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata level Internasional; Melakukan inisiasi koordinatif yang intensif antara Provinsi Babel, kementerian ESDM, PLN dan investor swasta dalam membangun PLTU sehingga PLTU di Bangka Belitung bisa segera direalisasikan untuk membangun kemandirian Energi;

7. PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Fokus kegiatan membangun kultur masyarakat Bangka Belitung yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bermoral melalui kegiatan keagamaan bernuansa religius seperti Bangka Belitung mengaji, sajadah fajar, ruahan, dan lain-lain secara rutin; Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar-menengah di seluruh wilayah Bangka Belitung (SD-SMP-SMA); Meningkatkan kualitas Universitas Bangka Belitung (UBB) sebagai salah satu Universitas Unggul Nasional dengan mendatangkan Profesor bertaraf internasional secara periodik sebagai dosen tamu; Program beasiswa (S2-S3) dan pelatihan untuk para tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan kualitas

pendidikan dan kapasitas guru maupun dosen; Menarik praktisi pendidikan kepariwisataan untuk membangun Sekolah Tinggi Pariwisata dan Bangka Belitung dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM/*entrepreneur* bidang pariwisata di Bangka Belitung.

8. PEMBANGUNAN KESEHATAN

Fokus kegiatan peningkatan kualitas dan modernisasi fasilitas alat-alat kesehatan di Rumah Sakit; Kemudahan layanan kesehatan hingga biaya gratis bagi warga tidak mampu; Program ambulan keliling 24 jam untuk mencegah resiko kematian ibu dan bayi; penguatan kapasitas para tenaga kesehatan melalui *training*, beasiswa (S2-S3), hingga rekrutmen tenaga-tenaga kesehatan baik dengan insentif khusus untuk menunjang kinerja; Program Bangka Belitung sehat melalui pembinaan jasmani dan rohani secara terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bangka Belitung.

9. PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PELAYANAAN PUBLIK

Fokus kegiatan Nongkrong bareng ("Nobar") program rutin bersama Perangkat Daerah, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi yang sebelumnya tidak terjalin dengan baik. Melalui kumpul di dunia nyata (Kantor, Restoran, warung, dan sebagainya) dan dunia maya (*WhatsApps Groups* atau *BBM Groups*); Bangka Belitung sebagai provinsi dengan integrasi pelayanan publik yang memberi kemudahan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi (*smart city*); Mengutamakan sistem pelayanan publik yang mudah dan cepat, sehingga waktu pengurusan izin dan administrasi kependudukan menjadi lebih ringkas; Mempermudah pelayanan dengan berbagi perangkat teknologi yang terintegrasi seperti email, website, sosial media, aplikasi dan lainnya; Reformasi birokrasi berbasis kompetensi (meritokrasi) yaitu dengan proses promosi jabatan di Pemerintah Provinsi melalui *fit and proper test* dengan lelang jabatan.

10. PEMBANGUNAN BERDEMOKRASI

Fokus kegiatan mengoptimalkan pembuatan Peraturan Daerah (Perda) inisiatif dewan; mendorong keterwakilan perempuan dalam lembaga politik; meningkatkan kebebasan sipil masyarakat; meningkatkan hak politik masyarakat; meningkatkan pembinaan lembaga demokrasi.

11. PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN

Fokus kegiatan pengalokasian anggaran tanggap bencana utamanya kebakaran hutan dan banjir, agar pemerintah provinsi lebih baik dan bertanggung jawab dalam merespon dan menanggulangnya. Baik pada saat sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana.

12. PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Fokus kegiatan pengendalian terhadap kualitas air, udara serta tutupan lahan; pengendalian terhadap efek Gas Rumah Kaca

6.2.2. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, disusun berdasarkan Visi, Misi, dan Unggulan Program Pembangunan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022 agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020–2024 serta dengan mempertimbangkan isu-isu internasional, isu-isu nasional dan isu-isu daerah.

Pendekatan perencanaan yang digunakan dalam menyusun RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah pendekatan perencanaan pembangunan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pendekatan THIS pada dasarnya adalah pendekatan yang memberi penekanan pada keterpaduan, bukan pendekatan yang berangkat dari sektor atau tugas dan fungsi semata tetapi tugas dan fungsi mendukung keterpaduan. Karena penekanannya pada keterpaduan, perencanaan ini, berangkat dari tema pembangunan yang menjadi dasar atau *starting point*nya dalam lingkup daerah, tema bisa bersumber dari isu-isu strategis dan/atau prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh kepala daerah. Inilah titik pusat (*core*) dari perencanaan berbasis pendekatan THIS.

Tema pembangunan berdasarkan prioritas Kepala Daerah biasanya tema makro kemudian diturunkan dengan tema-tema yang lebih kecil. Dalam konteks penyusunan RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tema besarnya adalah Visi yang diturunkan ke tema-tema yang lebih kecil dan saling berhirarki ke Misi, Tujuan, Indikator tujuan, sasaran, indikator Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan. Hirarki dari visi sampai ke Arah kebijakan ini dinamakan tema, sedangkan arah kebijakan sendiri merupakan tema yang paling kecil, yang akan membagikan Perangkat Daerah mana saja yang akan terlibat dalam membangun tema kecil tersebut. Dalam hal ini perangkat daerah yang terlibat tersebut kita namakan integratif. Kemudian program-program dan kegiatan yang ada pada setiap Perangkat Daerah yang terlibat untuk membangun suatu tema kecil itu dinamakan Holistik. Kemudian spasial digunakan untuk mendukung pembangunan tematik besarnya yang akan menjadi tema kecil yang diintervensi oleh banyak Perangkat Daerah yang juga dinamakan integratif dan masing-masing perangkat daerah mengintervensi dengan program dan kegiatan yang dinamakan juga holistik.

Atas dasar inilah arah kebijakan merupakan tema kecil, berasal dari turunan tema besar yang merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai, yang membagi perangkat daerah serta program dan kegiatannya dalam mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut. Dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif Dan Spasial (THIS) tersebut, telah dirumuskan dan ditetapkan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Program Pembangunan Daerah, yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Atas dasar ke 47 program ini diperinci lebih lanjut oleh Perangkat Daerah ke dalam program perangkat daerah dan program perangkat daerah ke dalam kegiatan. Sehingga terdapat 204 program perangkat daerah yang telah habis terbagi kepada setiap perangkat daerah yang ada pada lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Renstra Perangkat Daerah telah mencantumkan ke 197 program perangkat daerah tersebut ke dalam 1410 kegiatan. Semua ini didasarkan pada ke 47 Program Pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Tabel VI.4

Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
(Sebelum Perubahan)

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH	
							2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Misi I. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah												
Meningkatnya Laju pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Pertanian	1	Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan	Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan luas tanam Tanaman Pangan				Pertanian	DISTAN
						Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengawasan Dan Sertifikasi Mutu Benih	Persentase Pertambahan Jumlah benih lada yang bersertifikat dan berlabel				Pertanian	DISTAN
						Program Peningkatan Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman	Persentase penurunan areal tanam yang terserang OPT				Pertanian	DISTAN
						Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Pertanian	Pertambahan Ketersediaan bibit lada				Pertanian	DISTAN
							Pertambahan Ketersediaan bibit karet				Pertanian	DISTAN
							Pertambahan Ketersediaan benih sumber padi				Pertanian	DISTAN
							Pertambahan Ketersediaan bibit ayam				Pertanian	DISTAN
							Pertambahan Ketersediaan anakan sapi				Pertanian	DISTAN
						Program Peningkatan Tata Kelola Hutan	Persentase izin usaha hasil hutan kayu (%)				Kehutanan	Dishut
							Persentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan (%)				Kehutanan	Dishut
			2	Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunan,	Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan,	Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	persentase pertambahan jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan holtikultura				Pertanian	DISTAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			peternakan dan Kehutanan	peternakan dan Kehutanan							
					Program Pengembangan Perkebunan	persentase pertambahan jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing dan nilai tambah hasil perkebunan				Pertanian	DISTAN
					Program Pengembangan Peternakan Dan Kesehatan Hewan	persentase pertumbuhan jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing dan nilai tambah hasil peternakan				Pertanian	DISTAN
				Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan tentang pertanian yang berkompetensi				Tenaga Kerja	DISNAKER
					Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja pertanian yang bersertifikasi				Tenaga Kerja	DISNAKER
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian				Tenaga Kerja	DISNAKER
					Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase Jumlah SMK dengan program keahlian pertanian, perkebunan dan peternakan yang memiliki akreditasi A				Pendidikan	DINDIK
						Persentase SMK Pertanian dan Peternakan yang mengeluarkan Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)				Pendidikan	DINDIK
					Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi	persentase peningkatan volume usaha koperasi pertanian				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Persentase SDM Koperasi sektor pertanian terlatih				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM
						persentase SDM Usaha Kecil sektor pertanian terlatih				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembinaan hubungan industri sektor pertanian	Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hub. Industrial Dan Jaminan Sosial	Persentase perusahaan pertanian yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan				Tenaga Kerja	DISNAKER
				Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian	Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi	Persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif sektor pertanian				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM
						persentase koperasi sektor pertanian berkualitas sesuai standar				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM
					Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Persentase produk Usaha kecil sektor pertanian yang tersertifikasi				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM
						Persentase peningkatan produk usaha kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang dikembangkan dengan bantuan peralatan tepat guna				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM
					Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitas Dan Akses Industri	Presentase Tenaga Kerja Industri pada sektor pertanian				Perindustrian	DISPERINDAG
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi Dan Pengendalian Mutu Produk	Persentase komoditi unggulan daerah diuji yang memenuhi standar pengujian				Perindustrian	DISPERINDAG
				Pengembangan produk pertanian, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase pertambahan kebijakan sumber daya alam yang diimplementasikan					BIRO PEREKONOMIAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				mendukung peluang berusaha dan investasi sektor pertanian di dae							
					Program Peningkatan Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah profil investasi Sektor Pertanian yang digunakan untuk promosi investasi daerah di sektor pertanian				Penanaman Modal	DPMPPTSP
					Program Peningkatan Promosi Penanaman Moda Pertanian	Pertambahan Jumlah investor Sektor Pertanian				Penanaman Modal	DPMPPTSP
					Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Sistem Informasi	Presentase perusahaan sektor pertanian yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi				Penanaman Modal	DPMPPTSP
					Program Peingkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Pertambahan jumlah pelaku usaha kecil sektor pertanian yang menanda-tangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha dalam daerah				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM
						persentase pelaku usaha kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha luar daerah				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM
				Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian	Program Pengembangan Pendayagunaan Sda, Teknologi Tepat Guna Dan Pelatihan Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat yang mendayagunakan Teknologi Tepat Guna (TTG) di sektor pertanian				Pemberdayaan Masyarakat	Pemdes
					Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan hortikultura				Pertanian	DISTAN
					Program Pengembangan Perkebunan	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil perkebunan				Pertanian	DISTAN
					Program Pengembangan Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil peternakan				Pertanian	DISTAN
		3	Mengembangkan kawasan berbasis pertanian, perkebunan dan	Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Tersedianya Kawasan budiaya komoditas padi di KTM Batu Betumpang				Pertanian	DISTAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			peternakan								
						Tersedianya Kawasan budiya komoditas cabai di KTM Batu Betumpang				Pertanian	DISTAN
						Tersedianya Kawasan budiaya bawang merah di KTM Batu Betumpang				Pertanian	DISTAN
					Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase penyediaan volume air baku di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi	Tingkat kesejahteraan petani masyarakat transmigrasi di kawasan KTM Batu Betumpang				Transmigrasi	DISNAKER
				Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung	Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kota Terpadu Mandiri Gantung				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
						Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas yang di implementasikan				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan Kota terpadu mandiri Gantung				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
						Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan Kota terpadu mandiri Gantung				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Tersedianya Kawasan budidaya komoditas padi di kawasan kota terpadu mandiri Gantung				Pertanian	DISTAN
						Tersedianya Kawasan Budidaya komoditas cabai di Kawasan kota Terpadu mandiri Gantung				Pertanian	DISTAN
						Tersedianya Kawasan Budidaya bawang merah di Kawasan Kota Terpadu Mandiri				Pertanian	DISTAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Gantung					
						Tingkat produktifitas petani dikawasan KTM Gantung				Pertanian	DISTAN
					Program Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi	Tingkat kesejahteraan petani masyarakat transmigrasi di kawasan KTM Gantung				Transmigrasi	DISNAKER
				Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian dan peternakan	Program Pengembangan Perkebunan	Tersedianya kawasan Pengembangan budidaya lada				Pertanian	DISTAN
					Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas yang di implementasikan				Pertanian	DISTAN
				Pengembangan kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas	Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Tersedianya Kawasan budidaya komoditas padi				Pertanian	DISTAN
						Tersedianya Kawasan budidaya komoditi cabai				Pertanian	DISTAN
						Tersedianya Kawasan budidaya bawang merah				Pertanian	DISTAN
					Program Pengembangan Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Tersedianya Kawasan pengembangan ternak sapi				Pertanian	DISTAN
					Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Agropolitan Berbasis Demonstration Farming Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digunakan dalam perencanaan kawasan				Lingkungan Hidup	DLH
		Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	4	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan	Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Laut	Luas Kawasan Konservasi yang dicadangkan (Ha)			Kelautan dan Perikanan	DKP

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				perikanan							
						Persentase sarana dan prasarana yang terbangun di Desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)				Kelautan dan Perikanan	DKP
					Program Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)				Kelautan dan Perikanan	DKP
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase Pelabuhan Khusus (Pelsus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang memiliki izin				Kelautan dan Perikanan	DISHUB
			Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor Kelautan dan Perikanan	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan tentang Kelautan dan perikanan yang berkompentensi				Tenaga Kerja	DISNAKER
					Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja kelautan dan perikanan bersertifikat kompetensi				Tenaga Kerja	DISNAKER
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja sektor Perikanan				Tenaga Kerja	DISNAKER
					Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase Jumlah SMK dengan program keahlian perikanan yang memiliki akreditasi A				Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
						Persentase Jumlah SMK Program Keahlian Kelautan dan Perikanan yang mengeluarkan Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)				Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
				Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanan	Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi	persentase peningkatan volume usaha sektor kelautan dan perikanan				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM
					Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha	persentase pelaku usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang menandatangani				Koperasi dan Usaha Kecil	DINAS KUKM

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kecil	keseepakatan kemitraan dengan dunia usaha luar daerah				Menengah	
						persentase Usaha Kecil sektor kelautan dan perikanan yang mendapatkan Izin Usaha				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Persentase SDM Koperasi sektor perikanan terlatih				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM
						persentase SDM Usaha Kecil sektor perikanan terlatih				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM
					Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di Industri Kelautan dan Perikanan				Perindustrian	DISPERINDAG
					Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Volume Produksi Perikanan Budidaya (Ton)				Kelautan dan Perikanan	DKP
						Angka Konsumsi Ikan (Kg/Org/Tahun)				Kelautan dan Perikanan	DKP
						Volume Produksi Olahan (ton)				Kelautan dan Perikanan	DKP
					Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Volume Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)				Kelautan dan Perikanan	DKP
						Nilai Tukar Nelayan (Indeks)				Kelautan dan Perikanan	DKP
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau	Pertambahan Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)				Kelautan dan Perikanan	UPTD BALAI BENIH IKAN AIR PAYAU (BBIAP)
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Laut	Pertambahan Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)				Kelautan dan Perikanan	UPTD BALAI BENIH IKAN LAUT (BBIL)
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air	Pertambahan Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)				Kelautan dan Perikanan	UPTD BALAI BENIH IKAN SENTRAL (BBIS)

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Tawar						
					Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hub. Industrial Dan Jaminan Sosial	persentase perusahaan kelautan perikanan yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan				Tenaga Kerja	DISNAKER
			Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan		Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi	Persentase jumlah koperasi bidang Kelautan dan Perikanan yang berkualitas sesuai standar				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
						Persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif sektor kelautan dan perikanan				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Pengujian Dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	Persentase Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan				Kelautan dan Perikanan	UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN
			Pengembangan produk Kelautan dan perikanan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanan.		Program Peningkatan Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah profil investasi Sektor perikanan dan kelautan yang digunakan untuk promosi investasi di sektor perikanan dan Kelautan				Penanaman Modal	DMPTSP

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pertambahan Jumlah UKM Sektor kelautan dan perikanan yang bermitra dengan investor				Penanaman Modal	DMPTSP
					Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah Investor sektor kelautan dan perikanan				Penanaman Modal	DMPTSP
					Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Sistem Informasi	Presentase perusahaan sektor kelautan dan perikanan yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi				Penanaman Modal	DMPTSP
					Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Peningkatan produk Usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang tersertifikasi				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
				Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok				Kelautan dan Perikanan	DKP
					Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok				Kelautan dan Perikanan	DKP
					Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis minapolitan Lepar Pongok				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
					Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	persentase Usaha Kecil dikawasan Minapolitan Lepar Pongok yang mendapatkan Izin Usaha				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
					Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Jumlah Industri perikanan dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok				Perindustrian	DISPERINDAG
					Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Minapolitan Lepar Pongok yang digunakan untuk perencanaan kawasan				Lingkungan Hidup	DLH
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok				Perhubungan	DISHUB

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Minapolitan Lepar Pongok yang di implementasikan				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
			Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik		Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya dikawasan Strategis etalase perikanan selat nasik				Kelautan dan Perikanan	DKP
					Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Etalase Perikanan Selat Nasik				Kelautan dan Perikanan	DKP
					Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis etalase perikanan selat nasik				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
					Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	persentase Usaha Kecil dikawasan strategis etalase perikanan selat nasik yang mendapatkan Izin Uaha				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
						persentase Usaha Kecil dikawasan Sentra Selat Nasik yang mendapatkan mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
					Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Jumlah Industri perikanan dikawasan Strategis Etalase Perikanan Selat Nasik				Perindustrian	DISPERINDAG
					Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Etalase Perikanan Selat Nasik yang digunakan dalam perencanaan kawasan				Lingkungan Hidup	DLH
					Program Pengembangan Dan Pembangunan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung perhubungan laut kawasan				Perhubungan	DISHUB

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Perhubungan Laut	strategis etalase perikanan Selat Nasik					
			6 Mengembangkan kawasan sentra Kelautan dan Perikanan	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
					Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	persentase Usaha Kecil dikawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga yang mendapatkan Izin Usaha				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
						persentase Usaha Kecil dikawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
					Program Pengembangan Sumber Daya Air	Pertumbuhan panjang bangunan pemecah gelombang atau penahan abrasi di kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga				Kelautan dan Perikanan	DKP
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung perhubungan laut kawasan strategis Industri Perikanan Tanjung Binga				Perhubungan	DISHUB
				Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap di Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar				Kelautan dan Perikanan	DKP
					Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi	Persentase koperasi aktif di Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung perhubungan laut Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar				Perhubungan	DISHUB

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Meningkatkan laju pertumbuhan kunjungan wisatawan	7 Meningkatkan sinergisitas pembangunan lintas sektor dalam mengembangkan pembangunan pariwisata	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif Dan Kelembagaan Kepariwisata	Persentase sumber daya pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi				Pariwisata	DISBUDPAR
						Presentase pelaku ekonomi kreatif yang terlatih				Pariwisata	DISBUDPAR
						Pertumbuhan kelembagaan pariwisata				Pariwisata	DISBUDPAR
					Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi	Pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif pendukung pariwisata				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	KUMKM
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Persentase SDM Koperasi sektor pariwisata terlatih				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	KUMKM
						persentase SDM Usaha Kecil sektor pariwisata terlatih				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	KUMKM
					Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang menggunakan Aplikasi Mobile Platform (Lalaper)				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	KUMKM
						persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan Izin Usaha				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	KUMKM
					Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase SMK pariwisata Terkreditasi A				Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
				Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Presentase objek wisata yang terkelola				Pariwisata	DISBUDPAR

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				pariwisata.							
					Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase tingkat kunjungan wisatawan				Pariwisata	DISBUDPAR
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut di lokasi wisata				Perhubungan	DISHUB
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan darat dalam menunjang Daerah Tujuan Wisata				Perhubungan	DISHUB
					Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di daerah pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Peningkatan Pusat Pelayanan Usaha Terpadu KUKM	Pertumbuhan produk parekras				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
					Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan pemasaran pariwisata yang dapat diakses masyarakat				Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO
				Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah	Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja pariwisata bersertifikat kompetensi				Tenaga Kerja	DISNAKER
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	Persentase pencari kerja pariwisata yang mendapat pelatihan				Tenaga Kerja	UPD BLKI
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja bidang pariwisata				Tenaga Kerja	UPTD BALAI PRODUKTIFITAS
					Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase Jumlah SMK Program Keahlian Pariwisata yang mengeluarkan sertifikat Profesi pihak 1 (LSP-P1)				Pendidikan	DINDIK

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi	persentase peningkatan volume usaha koperasi disektor pariwisata				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	KUMKM
			kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olahraga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunan kepariwisataan		Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Pemuda Lintas Negara				Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
					Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olahraga	Pertumbuhan Jumlah peserta yang mengikuti Babel <i>sport tourism</i>				Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
					Program Pengembangan Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga	Presentase jumlah sarana dan prasaran olahraga yang terbangun dalam mendukung event olahraga regional dan nasional				Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
					Program Pelestarian Budaya	Persentase budaya lokal yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina				Kebudayaan	DISBUDPAR
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Industri Dan Kelembagaan Kepariwisata	Rasio Penyelenggaraan event penunjang kepariwisataan dengan priode waktu satu tahun				Pariwisata	DISBUDPAR
				Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata	Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hub. Industrial Dan Jaminan Sosial	persentase Jumlah perusahaan dibidang pariwisata yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan				Tenaga Kerja	DISNAKER
			Peningkatan standarisasi Produk		Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha	Peningkatan produk Usaha kecil sektor pariwisata yang tersertifikasi				Koperasi, Usaha Kecil	DINAS KUMKM

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan	Kecil					dan Menengah	
					Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitas Dan Akses Industri	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di industri pariwisata				Perindustrian	DISPERINDAG
					Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Persentase industri yang memenuhi standar				Perindustrian	DISPERINDAG
			Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.		Program Peningkatan Koordinasi BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata Dan Budaya	Prosentase Jumlah Kebijakan BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya yang di implementasikan				Urusan Pemerintahan	BIRO EKONOMI
					Program Peningkatan Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah Profil Investasi Pariwisata yang digunakan untuk promosi investasi di sektor pariwisata				Penanaman Modal	DMPTSP
					Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah Investor Pariwisata				Penanaman Modal	DMPTSP
					Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Sistem Informasi	Presentase perusahaan yang sesuai realisasi investasi disektor pariwisata dengan rencana investasi				Penanaman Modal	DMPTSP
				Pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan	Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Pelabuhan Tanjung Kalian				Perhubungan	DISHUB

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Tanjung Kalian							
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan sarana parasarana perhubungan di Kawasan Strategis Tanjung Kalian				Perhubungan	DISHUB
				Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang	Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) ASDP Manggar-Ketapang yang diimplementasikan				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan strategis ASDP Manggar dan Ketapang				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi ASDP - Manggar yang digunakan dalam perencanaan Kawasan				Lingkungan Hidup	DLH
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Pelabuhan ASDP Manggar - Ketapang				Perhubungan	DISHUB
		8 Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata		Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	persentase sarana dan prasarana Pariwisata di kawasan pariwisata Tanjung Gunung yang terbangun dan terkelola				Pariwisata	DISBUDPAR
						Persentase sarana dan prasarana pariwisata di kawasan Lintas Timur Pulau Bangka yang terbangun dan terkelola				Pariwisata	DISBUDPAR
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Jalan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung Gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka				Perhubungan	DISHUB
					Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Pariwisata Tanjung Gunung dan Lintas Timur Pulau Bangka yang				Pekerjaan Umum dan Penataan	DINAS PUPR

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						diimplementasikan				Ruang	
				Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang	Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Jalan di dan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang				Perhubungan	DISHUB
					Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
						Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
					Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Nasional (KSN) Pariwisata Tanjung Kelayang yang diimplementasikan				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang				Perhubungan	DISHUB
					Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Pariwisata Tanjung Kelayang yang digunakan dalam perencanaan kawasan				Lingkungan Hidup	DLH
				Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di kawasan Kota Tua Muntok				Pariwisata	DISBUDPAR
					Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Kota Tua Mentok				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
					Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Kota Tua Mentok yang				Urusan Pekerjaan Umum dan	PUPR

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						diimplementasikan				Penataan Ruang	
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Kota Tua Muntok				Urusan Perhubungan	DISHUB
					Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Kota Tua Mentok yang digunakan dalam perencanaan kawasan				Urusan Lingkungan Hidup	DLH
				Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba	Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba yang diimplementasikan				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
					Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba				Urusan Pariwisata	DISBUDPAR
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di kawasan pariwisata gunung Permisan Simpang Rimba				Urusan Perhubungan	DISHUB
					Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS di Kawasan pariwisata gunung Permisan Simpang Rimba yang digunakan dalam perencanaan kawasan				Urusan Lingkungan Hidup	DLH
					Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan pariwisata gunung Permisan Simpang Rimba				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
				Pengembangan Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung	Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung yang diimplementasikan				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
					Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung				Urusan Pariwisata	DISBUDPAR
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung				Urusan Perhubungan	DISHUB

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung yang digunakan dalam perencanaan kawasan				Lingkungan Hidup	DLH
					Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
				Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing	Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing yang di implementasikan				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
					Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing				Pariwisata	DISBUDPAR
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing				Perhubungan	DISHUB
					Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing yang digunakan dalam perencanaan kawasan				Lingkungan Hidup	DLH
					Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
		9 Mengembangkan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan		Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera	Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
					Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasaan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
					Program Pengelolaan Ruang Laut	Persentase Usulan Pemanfaatan Ruang Laut yang terekomendasi sesuai dengan peruntukannya pada kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera				Kelautan dan Perikanan	DKP
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Presentase sarana dan prasarana perhubungan laut kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera				Perhubungan	DISHUB

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera yang digunakan untuk perencanaan kawasan				Lingkungan Hidup	DLH
					Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase tersedianya lahan bersertifikat untuk kepentingan umum di kawasan konektivitas pulau bangka dan pulau sumatera				Urusan Pertanahan	DINAS PUPR
				Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasaan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Persentase pulau-pulau berpenduduk yang terkoneksi kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil				Perhubungan	DISHUB
						Jumlah armada pengangkutan				Perhubungan	DISHUB
	Meningkatkan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi	10	Meningkatkan hasil produksi pertambangan dan nilai tambah pertambangan yang berwawasan lingkungan	Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;	Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan	Persentase Perusahaan pertambangan non logam yang menerapkan good mining practices				Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
					Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam	Persentase Perusahaan pertambangan logam yang menerapkan good mining practices				Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
					Program Peningkatan Pengelolaan Geologi Dan Air Tanah	Persentase cadangan Mineral bukan logam dan batuan yang potensial				Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
					Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan	Prosentase jumlah Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan				Fungsi Penunjang	BIRO EKONOMI

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Perekonomian						
					Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitas Dan Akses Industri	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di bidang industri turunan sumber daya mineral;				Perindustrian	DISPERINDAG
						pertumbuhan industri turunan Potensi Sumber Daya Mineral yang dikembangkan				Perindustrian	DISPERINDAG
					Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Persentase industri yang memenuhi standar				Perindustrian	DISPERINDAG
				Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing Produk Sumber daya mineral	Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja sektor sumber daya mineral bersertifikat kompetensi				Tenaga Kerja	DISNAKER
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	Persentase tenaga kerja bidang sumber daya mineral yang mendapat pelatihan pertambangan berkelanjutan				Tenaga Kerja	UPD BLKI
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja sektor sumber daya mineral				Tenaga Kerja	UPTD BALAI PRODUKTIFITAS
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, UMKM	Persentase SDM Koperasi sektor sumber daya mineral terlatih				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, UMKM
					Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	persentase Usaha Kecil sektor pertambangan yang mendapatkan Izin Usaha				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS UMKM
				Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor sumber daya mineral	Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hub. Industrial Dan Jaminan Sosial	Persentase perusahaan sumber daya mineral yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan				Tenaga Kerja	DISNAKER

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor sumber daya mineral	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi Dan Pengendalian Mutu Produk	Persentase produk sumber daya mineral yang disertifikasi				Perindustrian	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU
				Pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, duni usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase Jumlah Kebijakan pembangunan Sumber Daya Mineral yang diimplementasikan				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO EKONOMI
					Program Peningkatan Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah profil investasi sumber daya mineral yang digunakan untuk promosi investasi disektor sumber daya mineral				Urusan Penanaman Modal	DMPTSP
					Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Pertambahan jumlah investor sumber daya mineral				Urusan Penanaman Modal	DMPTSP
					Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Sistem Informasi	Presentase perusahaan sumber daya mineral yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi				Urusan Penanaman Modal	DMPTSP
					Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	Presentase ketepatan waktu penerbitan perizinan sumber daya mineral				Penanaman Modal	DMPTSP
	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan	11 Meningkatkan Kawasan industri berbasis potensi daerah	Mengembangkan Kawasan industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Tersedianya Lahan bersertifikat untuk kepentingan di kawasan industri dan pelabuhan terpadu Tanjung Ular				Pertanahan	DINAS PUPR

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Program Kebinarmargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan industri dan pelabuhan Tanjung ular				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan ndustri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan Industri Terpadu (KIPT) Tanjung Ular				Perindustrian	DISPERINDAG
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase sarana dan prasana perhubungan laut Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular yang terbangun serta digunakan				Perhubungan	DISHUB
				Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)	Program Kebinarmargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan strategis industri terpadu air kelik				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan strategis industri terpadu air kelik				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Air Kelik yang digunakan untuk perencanaan kawasan				Lingkungan Hidup	DLH
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik				Perhubungan	DISHUB
				Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	Program Kebinarmargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan strategis Ekonomi khusus Tanjung Berikat				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Peningkatan Tata Kelola Hutan	Presentase luas areal kawasan hutan yang dikelola didi Kawasan strategis Ekonomi khusus Tanjung Berikat				Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN
					Program Peningkatan	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan				Lingkungan	DLH

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Tata Kelola Lingkungan Hidup	Strategis Provinsi Kawasan Industri dan pelabuhan Terpadu Tanjung Berikat yang digunakan dalam perencanaan kawasan				Hidup	
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat				Perhubungan	DISHUB
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Darat menuju Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat				Perhubungan	DISHUB
					Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Industri dan pelabuhan Terpadu Tanjung Berikat yang diimplementasikan				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
				Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai	Program Kebinamargaan	Presentase panjang jalan dalam kondisi mantap di kawasan strategis industri sadai				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan Strategis Industri Sadai				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan laut Kawasan Strategis Industri Sadai				Perhubungan	DISHUB
					Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) KIPT Sadai				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan strategis Industri Sadai				Perindustrian	DISPERINDAG
					Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi KIPT Sadai yang digunakan untuk perencanaan kawasan				Lingkungan Hidup	DLH
				Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu				Perhubungan	DISHUB

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Program Kebinamargaan	Persentase Panjang jalan provinsi menuju dan dikawasan Strategis Industri Perikanan Terpadu Teluk Klabat Belinyu dalam kondisi mantap				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Pertumbuhan Volume Produksi Olahan dikawasan Strategis Industri Perikanan Terpadu Teluk Klabat (Ton)				Kelautan dan Perikanan	DKP
					Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Industri Perikanan Terpadu Teluk Klabat				Kelautan dan Perikanan	DKP
					Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Penawasan Koperasi	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis Teluk Kelabat Belinyu				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
					Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	persentase Usaha Kecil dikawasan Sentra Teluk Kelabat Belinyu yang mendapatkan Izin Usaha				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
					Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan strategis Industri Perikanan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu				Perindustrian	DISPERINDAG
					Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pelabuhan dan Industri Teluk Kelabat				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi pelabuhan dan Industri Teluk Kelabat yang digunakan untuk perencanaan kawasan				Lingkungan Hidup	DLH
				Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri	Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Industri/Sentra/Kawasan Industri				Perindustrian	DISPERINDAG
		12 Meningkatkan produksi dan pasokan energi listrik di daerah		Pemenuhan Energi listrik untuk mendorong pengembangan industri berbasis	Program Pengembangan Sumber Daya Energi	Persentase penggunaan EBT				Energi dan Sumber Daya Mineral	ESDM

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				potensi daerah serta peningkatan rasio elektrifikasi;							
					Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase Jumlah Kebijakan Sumber daya energi yang diimplementasikan				Fungsi Penunjang	BIRO EKONOMI
Meningkatnya 2 pemerataan pendapatan	Indeks Gini	Meningkatnya Pendapatan Pemerintah Daerah	Meningkatkan 13 pendapatan asli daerah	Peningkatan potensi penggalan sumber-sumber Pedapatan asli daerah untuk pemanfaatan sebesar besarnya bagi kemakmuran masyarakat	Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah	Prosentase kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BAKUDA
					Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Retribusi Daerah Dan Pendapatan Lain Lain Yang Sah	Prosentase kontribusi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain terhadap pendapatan asli daerah				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BAKUDA
					Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tenaga kerja Asing				Tenaga Kerja	DISNAKER
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari Lab lingkungan				Lingkungan Hidup	DLH
					Program Pelayanan Teknis Laboratoruim Kesehatan	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari Lab Kesehatan				Kesehatan	DINKES
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN	Persentase kontribusi penyelenggaraan diklat terhadap Retribusi Daerah				Fungsi Penunjang	BKPSDM
					Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
					Program Pengawasan Dan Peralatan	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari Lab Pengujian Bina Marga				Urusan Pekerjaan Umum dan	UPTD PENGAWASAN DAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Penataan Ruang	PERALATAN BELITUNG
					Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam	Pertambahan Jumlah DBH (Dana Bagi Hasil) SDA (Sumber Daya Alam) Mineral Logam				Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
					Program Pengembangan Sumber Daya Energi	Pertambahan Jumlah lifting MIGAS Babel				Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
					Program Peningkatan Pengelolaan Geologi Dan Air Tanah	Persentase pertumbuhan pendapatan Daerah dari retribusi penggantian biaya cetak peta				Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
					Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertambahan pendapatan asli daerah dari layanan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (Juta Rupiah)				Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau	Pertambahan Jumlah pendapatan dari layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Juta Rupiah)				Urusan Kelautan dan Perikanan	UPTD BALAI BENIH IKAN AIR PAYAU (BBIAP)
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Laut	Pertambahan Jumlah pendapatan dari layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Juta Rupiah)				Urusan Kelautan dan Perikanan	UPTD BALAI BENIH IKAN LAUT (BBIL)
					Program Peningkatan Pengendalian, Operasional Dan Kebandarudaraan	Prosentase pertambahan pendapatan dari pengelolaan perhubungan udara				Urusan Perhubungan	DISHUB
Meningkatnya 2 pemerataan pendapatan	Indeks Gini	Menurunkan Tingkat Pengangguran	14 Meningkatkan pembangunan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan	Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja	Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan				Tenaga Kerja	DISNAKER
					Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Persentase Tenaga Kerja Industri terhadap total tenaga kerja (%)				Perindustrian	DISPERINDAG
					Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	Persentase pemuda yang bekerja				Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan tangkap				Kelautan dan Perikanan	DISKEPORA
					Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan budidaya dan Usaha Pengolahan & Pemasaran				Kelautan dan Perikanan	DKP
					Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase jumlah informasi berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang diakses oleh pencari kerja				Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO
					Program Kebinamargaan	Persentase panjang jalan dan jembatan yang dapat dilewati dengan lancar dikerjakan dengan pendekatan padat karya				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase panjang jaringan irigasi yang dapat dilalui air dengan lancar dilakukan dengan pendekatan padat karya				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Persentase wirausaha				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
					Program Pengembangan Pendayagunaan SDA, Teknologi Tepat Guna Dan Pelatihan Masyarakat	Pertambahan Jumlah Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINAS PMD
						Persentase KPM yang aktif				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINAS PMD
				Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase perempuan yang bekerja				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3ACSKB
		Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Penanggulangan kemiskinan di-arahkan pada penghormatan, perlindungan dan	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Program Penanganan Farkir Miskin	Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Beras Sejahtera				Sosial	DINSOS

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan								
					Program Pembangunan Perumahan	Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin				PERKIM	DINAS PRKP
					Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	Persentase Siswa SMA miskin yang mendapatkan beasiswa miskin				Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
					Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase siswa SMK miskin yang mendapatkan beasiswa miskin				Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
					Program Pelayanan Kesehatan	Persentase kepesertaan JKN				Kesehatan	DINAS KESEHATAN
					Program Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat bantuan Pangan dan Gizi				Kesehatan	DINAS KESEHATAN
			Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin		Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Kepala Keluarga perempuan miskin yang diberdayakan				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3ACKB
					Program Penanganan Farkir Miskin	Persentase PMKS (farkir miskin) yang mendapatkan Bantuan Usaha				Sosial	DINSOS
					Program Pengembangan Perdagangan	Persentase rumah tangga miskin yang bekerja disektor perdagangan				Perdagangan	DISPERINDAG
					Program Pengembangan	NTP subsektor Tanaman Pangan				Pertanian	DINAS

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Tanaman Pangan Dan Holtikultura						PERTANIAN
					Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan Kemiskinan yang dapat diakses oleh masyarakat				Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO
					Program Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial	Pertumbuhan kenaikan upah tenaga kerja				Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
						persentase penyelesaian kasus tenaga kerja				Tenaga Kerja	DISNAKER
						persentase penurunan kecelakaan kerja				Tenaga Kerja	DISNAKER
			16 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap komoditas penyumbang inflasi	Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi	Program Perlindungan Konsumen Dan Kemetrolagian	Persentase jumlah Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga yang diawasi sesuai standar (112 barang SNI wajib; 140 pelaku usaha Tertib Niaga)				Perindustrian	DISPERINDAG
						Indeks Keberdayaan Konsumen (0 - 20 = Tahu; 21 - 40 = Paham)				Perindustrian	DISPERINDAG
						Persentase jumlah Standarisasi Lab. Kemetrolagian yang memenuhi standar				Perindustrian	DISPERINDAG
					Program Pengembangan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan jumlah volume ekspor (ton)				Perdagangan	DISPERINDAG
						Persentase jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan pokok) yang tersedia setiap waktu				Perdagangan	DISPERINDAG
						Persentase peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun dan termanfaatka				Perdagangan	DISPERINDAG
						Persentase Pertumbuhan nilai omzet yang memanfaatkan resi gudang				Perdagangan	DISPERINDAG
					Program Peningkatan	Persentase rekomendasi komoditas				Fungsi	BIRO EKONOMI

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Koordinasi Kebijakan Perekonomian	penyumbang inflasi yang paling tinggi dengan intervensi program/kebijakan				Penunjang	
					Program Pengembangan Perhubungan Laut	Prosentase infrastruktur perhubungan laut dalam kondisi baik terhadap kondisi optimal				Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
					Program Kebinamargaan	Persentase Panjang jalan dan jembatan yang dapat dilewati dengan lancar yang menuju pusat-pusat distribusi komoditas penyumbang inflasi				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
				Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi	Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Pertambahan jumlah volume produksi komoditas cabai besar				Pertanian	DINAS PERTANIAN
						Pertambahan jumlah volume produksi komoditas cabai rawit				Pertanian	DINAS PERTANIAN
						Pertambahan jumlah volume produksi komoditas bawang merah				Pertanian	DINAS PERTANIAN
					Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase kontribusi komoditas ikan dalam menyumbang inflasi				Kelautan dan Perikanan	DINAS KELAUTAN PERIKANAN
					Program Pengembangan Distribusi, Stabilitas, Dan Cadangan Pangan	Koefisien varian harga pangan strategis di tingkat produsen dan konsumen				Pangan	DINAS PANGAN
	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	17 Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk		Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang	Program Pengadministrasian Kependudukan Dan Catatan Sipil	Persentase jumlah masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai KTP				Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DP3ACSKB
						Persentase jumlah masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah meninggal yang memiliki akte kematian				Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DP3ACSKB
					Program Peningkatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase unmet need				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DP3ACSKB

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Program Peningkatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase grand design kependudukan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DP3ACSKB
						presentase KB MKJP				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DP3ACSKB
Misi II. Mewujudkan Infrastruktur Dan Konektifitas Daerah Yang Berkualitas											
Meningkatnya Indeks 3 ketersediaan infrastruktur	Indeks Ketersediaan Infrastruktur	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatkan ketersediaan dan 18 berfungsinya infrastruktur pertanian	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase luas jaringan irigasi yang berfungsi				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase kesesuaian lokasi cetak sawah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
			Meningkatkan ketersediaan dan 19 berfungsinya infrastruktur air baku	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Pertumbuhan volume air baku				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
		Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar	Meningkatkan ketersediaan 20 jalan lingkungan yang layak bagi masyarakat	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat	Program Keciaptakaryaan Dan Permukiman	Persentase peningkatan aksesibilitas Kawasan permukiman				Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PRKP
						Persentase peningkatan aksesibilitas di Kawasan permukiman kumuh Provinsi				Urusan PERKIM	DINAS PRKP
			Meningkatkan 21 penataan kawasan	Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis	Program Keciaptakaryaan Dan Permukiman	Prosentase peningkatan kualitas pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan				Urusan PERKIM	DINAS PRKP

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			permukiman	Provinsi							
			22 Meningkatkan ketersediaan pelayanan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi	Persentase dana pendamping desa yang terlayani jaringan Internet				Urusan Komunikasi dan Informatika	KOMINFO
		Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	23 Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan laut	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan	Program Pengembangan Perhubungan Laut	Persentase Jumlah pulau yang memiliki pelabuhan/dermaga yang layak				Urusan Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
			24 Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan darat	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal	Program Pengembangan Perhubungan Darat	Persentase desa yang terlayani oleh angkutan perintis lintas kabupaten dalam provinsi				Urusan Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
					Program Peningkatan Pengendalian, Operasional Dan Kebandarudaraan	Persentase sarana dan prasarana fasilitas bandara kewenangan provinsi yang tersedia dan beroperasi				Urusan Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
			25 Meningkatkan aksesibilitas	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan	Program Kebinamargaan	Persentase jalan provinsi diluar kawasan Strategis Provinsi dan Prioritas Propinsi dalam kondisi mantap				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
						Persentase Jembatan Provinsi diluar kawasan Strategis Provinsi dan Prioritas Propinsi dalam kondisi mantap				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
Misi III. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Handal											
4 Meningkatnya Rata-rata lama	Meningkatkan	26 Meningkatkan	peningkatan akses	Program Peningkatan Dan	APK SMA					Urusan	DINAS

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pendidikan masyarakat	sekolah, (Rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan)	Akses Pendidikan Masyarakat	partisipasi sekolah untuk masyarakat	pelayanan pendidikan	Pegembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas					Pendidikan	PENDIDIKAN
					Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	APK SMK				Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
					Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus	APK SLB				Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat	peningkatan mutu layanan pendidikan.	Program Peningkatan Dan Pengembangan Kuantitas Dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4				Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
						Persentase Guru Bersertifikat Pendidik				Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
						Persentase guru dengan nilai rata-rata uji kompetensi diatas 50				Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
					Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	Persentase SMA terakreditasi A				Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
						Rata-rata nilai UN SMA				Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
					Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase SMK terakreditasi A				Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
						Rata-rata nilai UN SMK				Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
					Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus	Persentase SLB terakreditasi A				Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
					Program Peningkatan	Persentase Atlet pelajar Berprestasi yang				Urusan	DISKEPORA

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olah raga	dibina ditingkat provinsi yang memperoleh medali				Pemuda dan olahraga	
					Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase Insan Olahraga yang berprestasi				Urusan Pemuda dan olahraga	DISKEPORA
					Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	Persentase Pemuda Berprestasi				Urusan Pemuda dan olahraga	DISKEPORA
					Program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan	presentase perpustakaan terakreditasi;				Urusan Perpustakaan	DKPUS
					Program Pengembangan Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga	Presentase jumlah sarana dan prasaran kepemudaan yang terbangun yang difungsikan				Urusan Pemuda dan olahraga	DISKEPORA
					Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	Persentase Insan Kepemudaan yang berprestasi dan berdedikasi yang dibantu				Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
						Persentase Peran Masyarakat Dalam Menjaga Nilai-Nilai Kepemudaan				Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Rasio Jumlah Bus sekolah dengan Jumlah Murid				Urusan Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
						Persentase sekolah di ruas jalan Provinsi yang dilengkapi dengan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)				Urusan Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
					Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan pendidikan yang dapat akses oleh masyarakat				Urusan Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO
					Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi	Persentase SMA dan SMK yang telah berbasis IT				Urusan Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, Dan Pemuda	Prosentase jumlah kebijakan pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata yang diimplementasikan				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO KESRA
					Program Pengelolaan Bantuan Oprasional Sekolah (Bos) (Dak Non Fisik)	Persentase Sekolah penerima BOS				Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
				Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase SMK yang memiliki sertifikasi profesi				Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
					Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase SMK Kejuruan yang mendukung pengembangan pekonomi berbasis potensi lokal				Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
				Peningkatan Pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral	Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan	APK sekolah keagamaan				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO KESRA
Misi IV. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat											
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)	Meningkatkan kesehatan masyarakat	28	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Program Kesehatan Masyarakat	Persentase status kesehatan masyarakat		Urusan Kesehatan	DINKES
					Proram Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular				Urusan Penunjang administrasi	BIRO KESRA
					Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, Pemuda	Persentase Sekolah yang mengikuti lomba UKS				Urusan PERKIM	DINAS PRKP

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Dan Pariwisata						
					Program Keciaptakaryaan Dan Permukiman	Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan strategis provinsi				Urusan PERKIM	DINAS PRKP
						Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan permukiman kumuh Provinsi				Urusan PERKIM	DINAS PRKP
						Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan strategis Provinsi				Urusan PERKIM	DINAS PRKP
						Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan kumuh Provinsi					
						Persentase pengurangan titik genangan air di Kawasan Strategis Provinsi					
					Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Prosentase Jumlah kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi yang diimplementasikan				Fungsi Penunjang	BIRO KESRA
					Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi tentang kesehatan masyarakat				Urusan Komunikasi dan Informatika	KOMINFO
					Program Peningkatan Konsumsi Dan Keamanan Pangan	Peningkatan Skor PPH konsumsi jadi 92,50				Urusan Pangan	DINAS PANGAN
						persentase pangan yang aman dikonsumsi				Urusan Pangan	DINAS PANGAN
					Program Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan	Kenaikan Skor PPH Ketersediaan				Urusan Pangan	DINAS PANGAN
						Persentase jumlah penduduk rawan pangan yang keluar dari katagori penduduk rawan pangan				Urusan Pangan	DINAS PANGAN
					Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Persentase kandungan nutrisi industri olahan pangan.				Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Hygienis Perusahaan Dan Kesehatan Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja				Urusan Tenaga kerja	UPTD HYPERKES
					Program Peningkatan Pembudayaan Dan	Persentase peserta yang mengikuti olahraga rekreasi dan tradisional				Urusan Kepemudaan	DISKEPORA

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Peningkatan Prestasi Olahraga					dan Olahraga	
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase penurunan korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas				Urusan Perhubungan	DISHUB
		peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat			Program Pelayanan Kesehatan	Persentase standarisasi pelayanan kesehatan				Urusan Kesehatan	DINKES
					Program Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan	Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar				Urusan Kesehatan	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Dan Penunjang Medis	Persentase Ketersediaan pelayanan di Rumah Sakit				Urusan Kesehatan	RSUP
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Keperawatan	LOS (Length of Stay)				Urusan Kesehatan	RSUP
					Program Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit Umum	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSUP				Urusan Kesehatan	RSUP
					Program Badan Layanan Umum Daerah RSUP	Persentase dana BLUD RSUP yang digunakan untuk pelayanan langsung kemasyarakat				Urusan Kesehatan	RSUP
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan Dan Napza	Persentase Penduduk yang mengalami gangguan jiwa dan mendapatkan pelayanan kesehatan				Urusan Kesehatan	RSJ
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa Dan Napza	Rata-rata Lama Rawat/ Average Length of Stay (ALOS)				Urusan Kesehatan	RSJ
					Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSJ				Urusan Kesehatan	RSJ
						Persentase peralatan kesehatan dan peralatan lainnya sesuai klasifikasi rumah sakit jiwa kelas A				Urusan Kesehatan	RSJ
					Program Badan Layanan Umum Daerah RSJ	Persentase dana BLUD RSJ yang digunakan untuk pelayanan langsung kemasyarakat				Urusan Kesehatan	RSJ

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH	
							2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang dapat diakses masyarakat				Urusan Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO	
				Meningkatkan Pengendalian Penyalahgunaan Napza	Program Pengendalian Penyakit Menular Dan Tidak Menular	Persentase Puskesmas/Rumah sakit yang melayani Institusi Pelayanan Wajib Lapor (IPWL) Napza				Urusan Kesehatan	DINKES	
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan Dan Napza	Persentase penyalahgunaan Napza yang mendapatkan pelayanan medis rehabilitasi				Urusan Kesehatan	RSJ	
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa Dan Napza	Persentase penyalahgunaan Napza yang mendapatkan pelayanan keperawatan rehabilitasi				Urusan Kesehatan	RSJ	
					Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama Dan Kemasyarakatan	Pertumbuhan masyarakat yang mendapatkan pemahaman penyalahgunaan napza				Urusan Trantibun linmas	KESBANGPOL	
					Program Rehabilitasi Sosial	Persentase korban nazpza				Urusan Sosial	DINAS SOSIAL	
Misi V. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pembangunan Demokrasi												
Mewujudnya reformasi 6 birokrasi yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	29	Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah	Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran	Program Peningkatan Pelayanan Verifikasi Dan Perbendaharaan	prosentase bendahara perangkat daerah yang berkompeten				Fungsi Penunjang	BAKUDA
						Program Peningkatan Pelayanan Akutansi Dan Pelaporan	persentase laporan keuangan PD yang sesuai dengan SAP				Fungsi Penunjang	BAKUDA
						Program Peningkatan Tata Kelola Aset Daerah	Nilai aset daerah yang dapat diyakini kewajarannya				Fungsi Penunjang	BAKUDA
							Peningkatan persentase kontribusi kemanfaatan aset daerah terhadap PAD				Fungsi Penunjang	BAKUDA
						Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase debitur yang membayar tunggakan kredit usaha peningkatan ekonomi masyarakat yang disetorkan ke Kas daerah				Urusan Sosial	DINAS SOSIAL

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Meningkatkan 30 tata kelola pengawasan	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel	Program Pengawasan Dan Pembinaan Pemerintahan Dan Aparatur	Peningkatan Nilai Penguatan Pengawasan pada komponen proses IRB				Fungsi Penunjang	INSPEKTORAT
					Program Pengawasan Dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah	Prosentase jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti				Fungsi Penunjang	INSPEKTORAT
						Prosentase jumlah pengembalian uang yang disetorkan ke kas daerah.				Fungsi Penunjang	INSPEKTORAT
						Prosentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat				Fungsi Penunjang	INSPEKTORAT
					Program Pengawasan Dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi Dan Budaya	Tingkat capaian Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)				Fungsi Penunjang	INSPEKTORAT
						Peningkatan capaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)				Fungsi Penunjang	INSPEKTORAT
			Meningkatkan 31 kualitas manajemen pemerintah daerah berbasis kinerja	Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	Program Peningkatan Dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah pegawai yang menyampaikan LHKPN				Fungsi Penunjang	BIRO ORGANISASI
						Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah				Fungsi Penunjang	BIRO ORGANISASI
					Program Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD, KUA-PPAS)				Fungsi Penunjang	BAPPEDA
						Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan kaidah peraturan yang berlaku				Fungsi Penunjang	BAPPEDA
						Persentase kesesuaian antara dokumen perencanaan (RPJMD dengan RKPD)				Fungsi Penunjang	BAPPEDA
						Tingkat kesesuaian jadwal penetapan APBD dan Perubahan APBD				Fungsi Penunjang	BAPPEDA

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Persentase Kesesuaian antar Renja PD mitra kerja bidang perekonomian dan sumberdaya alam dengan RKPD				Fungsi Penunjang	BAPPEDA
					Program Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Kewilayahan	Persentase Kesesuaian antar Renja PD mitra kerja bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan RKPD				Fungsi Penunjang	BAPPEDA
					Program Perencanaan Sosial,Budaya Dan Pemerintahan	Persentase Kesesuaian antar RenjaPD mitra kerja bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dengan RKPD				Fungsi Penunjang	BAPPEDA
					Program Penelitian Dan Pengembangan	persentase rekomendasi kajian yang digunakan dalam perencanaan dan pangambil kebijakan				Fungsi Penunjang	BAPPEDA
					Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam APBD				Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3ACSKB
					Program Penganggaran Pembangunan Daerah	Tingkat kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan dan jadwal penetapan APBD dan Perubahan APBD (Ket: 3 = sesuai, 2 = kurang sesuai, 1 = tidak sesuai)				Fungsi Penunjang	BAKUDA
						Prosentase kesesuaian antara RAPBD dengan dokumen KUA-PPAS				Fungsi Penunjang	BAKUDA
					Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan program kegiatan sesuai dengan perencanaan.				Fungsi Penunjang	BIRO PEMBANGUNAN
					Program Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan APBD	Prosentase PD Provinsi dan Kab/Kota yang realisasi fisiknya 100% pelaksanaan sumber dana APBD				Fungsi Penunjang	BIRO PEMBANGUNAN
					Program Perencanaan SETDA	Nilai Lakip Setda Provinsi				Fungsi Penunjang	BIRO PEMBANGUNAN
			Peningkatan efektivitas pelaksanaan urusan		Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik Dan Persandian	Kualitas layanan persandian yang dimanfaatkan untuk pengamanan informasi berklasifikasi dan strategis milik pemerintah daerah di ling pemprov Babel sesuai standar persandian				Urusan Persandian	DISKOMINFO

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Persentase data dan informasi yang digunakan untuk mengambil kebijakan dan perencanaan				Urusan Statistik	DISKOMINFO
			Meningkatkan tata kelola penataan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan	Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Produk hukum daerah yang tidak tumpang tindih				Fungsi Penunjang	BIRO HUKUM
					Program Peningkatan Pelayanan Hukum Pemerintah Daerah	Persentase jumlah masyarakat yang mendapat Pelayanan bantuan Hukum				Fungsi Penunjang	BIRO HUKUM
					Program Pengembangan Dokumentasi Hukum Dan Informasi Hukum	Persentase produk hukum daerah yang dapat di akses oleh masyarakat				Fungsi Penunjang	BIRO HUKUM
					Program Pengembangan Risalah Rapat Dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan	Presentase peningkatan fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya				Fungsi Penunjang	SETWAN
		Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa	Peningkatan akses data dan informasi layanan pengadaan barang dan jasa		Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan	Persentase data dan informasi pengadaan barang/jasa yang dikelola dan dipublikasikan berbasis IT yang dapat di akses masyarakat				Fungsi Penunjang	BIRO LAYANAN PENGADAAN
					Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Persentase RPP siap lelang yang selesai ditangani ULP yang berhasil dilelangkan sesuai peraturan				Fungsi Penunjang	BIRO LAYANAN PENGADAAN
					Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Penggunaan e-Procurement terhadap belanja pengadaan yang dapat diakses masyarakat				Fungsi Penunjang	BIRO LAYANAN PENGADAAN
		Meningkatkan faktor pengungkit dan faktor hasil pencapaian reformasi birokrasi	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan		Program Peningkatan Dan Pengembangan Kelembagaan Serta Analisis Jabatan	Persentase jumlah Organisasi perangkat daerah yang sesuai antar beban kerja organisasi dengan ukuran kelembagaannya				Fungsi Penunjang	BIRO ORGANISASI
						Persentase Jumlah Pejabat Struktural ASN yang memiliki kinerja yang baik				Fungsi Penunjang	BIRO ORGANISASI

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Persentase Jumlah ASN yang sesuai antara beban kerja dengan kompetensi dan jabatannya				Fungsi Penunjang	BIRO ORGANISASI
					Program Peningkatan Dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Peningkatan kepuasan masyarakat				Fungsi Penunjang	BIRO ORGANISASI
					Program Peningkatan Dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan pengembangan kinerja ASN dan Pemerintah Daerah				Fungsi Penunjang	BIRO ORGANISASI
		35	Meningkatkan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan Dan Penyaringan Informasi	Persentase kesesuaian antar informasi yang dikelola dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah				Fungsi Penunjang	BIRO HUMAS
					Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi Media Dan IT	Persentase kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah				Fungsi Penunjang	BIRO HUMAS
					Program Peningkatan Pelayanan Protokol	Persentase kesesuaian antar agenda kepala daerah yang layani dengan arah kebijakan pembangunan daerah				Fungsi Penunjang	BIRO HUMAS
					Program Peningkatan Promosi, Informasi Dan Pelayanan Serta Hubungan Antar Lembaga	Persentase kesesuaian antara Promosi dan Informasi dengan arah kebijakan pembangunan daerah				Fungsi Penunjang	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
						Persentase kesesuaian antar agenda kepala daerah di Jakarta yang layani dengan arah kebijakan pembangunan daerah				Fungsi Penunjang	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
						Persentase kesesuaian antara Peningkatan Hubungan Antar Lembaga dengan arah kebijakan pembangunan daerah				Fungsi Penunjang	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
					Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan, Kehumasan Dan Protokol Dewan	Persentase kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dan layanan keprotokol dewan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah				Fungsi Penunjang	SETWAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Peningkatan kompetensi dan profesional aparatur	Program Pengadaan Pegawai, Mutasi, Promosi, Dan Kepangkatan	Persentase Pemenuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan formasi				Fungsi Penunjang	BKPSDM
						Persentase pegawai ASN Naik Pangkat dan Pensiun Tepat Waktu				Fungsi Penunjang	BKPSDM
						Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi				Fungsi Penunjang	BKPSDM
					Program Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi Dan Kesejahteraan ASN	Persentase ASN yang menerima penghargaan				Fungsi Penunjang	BKPSDM
						Persentase kasus pelanggaran disiplin minimal sedang				Fungsi Penunjang	BKPSDM
						Persentase ASN yang SKP nya dinilai tepat waktu				Fungsi Penunjang	BKPSDM
						Persentase akurasi data dan informasi kepegawaian				Fungsi Penunjang	BKPSDM
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN	Persentase Pegawai ASN yang meningkat kompetensi teknis dan fungsional				Fungsi Penunjang	BKPSDM
						Persentase Pegawai ASN yang meningkat pendidikan formalnya;				Fungsi Penunjang	BKPSDM
						Persentase Pegawai ASN yang memenuhi kompetensi dasar dan manajerial				Fungsi Penunjang	BKPSDM
						Nilai akreditasi Diklat				Fungsi Penunjang	BKPSDM
					Program Penilaian Dan Pemetaan Kompetensi ASN	Persentase Pegawai ASN yang mempunyai Profil Kompetensi sesuai dengan standar penilaian				Fungsi Penunjang	BKPSDM
		Meningkatkan kepuasan masyarakat 36 dalam penyelenggaraan pelayanan publik		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat	Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah				Fungsi Penunjang	BAKUDA

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Program Peningkatan Dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Persentase instansi pelayanan publik Provinsi yang bersertifikat ISO				Fungsi Penunjang	BIRO ORGANISASI
					Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan PTSP				Urusan Penanaman Modal	DMPTSP
					Program Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang Dan Bangka	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Pangkalpinang dan Bangka				Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
					Program Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Barat				Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
					Program Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Barat				Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
					Program Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah Dan Bangka Selatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan				Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
					Program Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung Dan Belitung Timur	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Belitung dan Belitung Timur				Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
					Program Peningkatan Pelayanan Pusat Layanan Usaha Terpadu Plut Kumkm	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT KUMKM				Urusan Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Dan Penunjang Medis	Nilai Tingkat kelulusan Akreditasi RSUP yang memenuhi standar akreditasi				Urusan Kesehatan	RSUP
					Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Umum Provinsi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap sarana dan prasarana pelayanan Rumah Sakit				Urusan Kesehatan	RSUP

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa Dan Napza	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pelayanan Teknis Medik Kejiwaan				Urusan Kesehatan	RSJ
					Program Pelayanan Teknis Laboratoruim Kesehatan	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan labkes				Urusan Kesehatan	UPTD DINKES
			Meningkatkan kepuasan 37 masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik efektif dan efisien	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang	Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengembangan data informasi layanan pengadaan				Fungsi Penunjang	BIRO LAYANAN PENGADAAN
					Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan Barang dan Jasa				Fungsi Penunjang	BIRO LAYANAN PENGADAAN
					Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan secara elektronik				Fungsi Penunjang	BIRO LAYANAN PENGADAAN
					Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan	Presentase jumlah administrasi kewilayahan yang terselesaikan				Fungsi Penunjang	BIRO PEMERINTAHAN
						Persentase luas Bidang Tanah Pemerintah Provinsi Yang bersertifikat				Fungsi Penunjang	BIRO PEMERINTAHAN
						Persentase jumlah kasus sengketa batas wilayah administrasi yang diselesaikan				Fungsi Penunjang	BIRO PEMERINTAHAN
					Program Pengembangan Otonomi Daerah	Presentase jumlah kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah yang diimplementasikan				Fungsi Penunjang	BIRO PEMERINTAHAN
					Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah	Persentase jumlah kerjasama pemerintah daerah/swasta/luar negeri yang diimplementasikan				Fungsi Penunjang	BIRO PEMERINTAHAN
					Program Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Kearsipan	Persentase kelembagaan kearsipan yang melaksanakan tertib arsip				Urusan Kearsipan	DKPUS
					Program Peningkatan Pengelolaan Dan Pelestarian Arsip	Pertambahan jumlah arsip yang dikelola sesuai standar (Dinamis dan Statis)				Urusan Kearsipan	DKPUS
					Program Pengembangan Bahan Pustaka Dan Layanan Perpustakaan	Pertambahan jumlah koleksi buku perpustakaan				Urusan Perpustakaan	DKPUS

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Program Peningkatan Pemberdayaan Tik, Statistik Dan Persandian	Persentase masyarakat yang memanfaatkan layanan interaktif				Urusan Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO
					Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi	Persentase sistem informasi pemerintah daerah yang aman				Urusan Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO
					Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi	Persentase peningkatan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi untuk birokrasi				Urusan Komunikasi dan Informatika	KOMINFO
					Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	persentase Informasi dan berita terkait sektoral yang dipublikasikan				Urusan Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO
					Program Pengadministrasian Kependudukan Dan Catatan Sipil	Persentase Jumlah data base kependudukan tingkat provnsi yang akurat				Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DP3ACSKB
					Program Pengadministrasian Kependudukan Dan Catatan Sipil	Persentase Jumlah data base kependudukan tingkat provnsi yang akurat				Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DP3ACSKB
					Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase jumlah tenaga konstruksi yang bersertifikasi profesi				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
						Persentase jumlah kelembagaan jasa konstruksi yang berkompetensi				Urusan Pekerjaan	DINAS PUPR

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Umum dan Penataan Ruang	
						Persentase Jumlah layanan informasi jasa konstruksi				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
			Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa		Program Peningkatan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase sarana prasarana penunjang peningkatan pemberdayaan masyarakat desa				Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD
						Persentase Posyandu aktif				Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD
						Persentase PKK aktif				Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD
						Program Pengembangan Kawasan Perdesaan	Persentase kawasan perdesaan yang terbangun			Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD
						Program Pembinaan Pemerintah Desa	Persentase aparatur desa dan BPD yang meningkat kompetensinya			Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD
						Jumlah Profil Desa dan Kelurahan yang tersusun dan terbina				Urusan Pemberdayaan Masyarakat	DPMD

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										dan Desa	
					Program Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi	Persentase desa di kawasan transmigrasi yang diberdayakan				Urusan Transmigrasi	DISNAKER
			Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial				Urusan Sosial	DINSOS
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Panti Sosial	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Pelayanan Teknis Panti Sosial				Urusan Sosial	UPTD PANTI SOSIAL
					Program Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Penguatan Penyelenggaraan pelayanan Panti Sosial				Urusan Sosial	UPTD PANTI SOSIAL
					Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase lansia yang aktif yang mengikuti pelayanan olahraga khusus lansia				Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
						Persentase Pelajar Penyandang Disabilitas yang berprestasi di bidang keolahragaan				Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
					Program Kesehatan Masyarakat	Persentase lansia yang dilayani sesuai standar kesehatan				Urusan Kesehatan	DINKES
					Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan	Persentase lansia yang berkompetensi keagamaan				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO KESRA
						Prosentase jumlah masyarakat yang kompeten di bidang keagamaan				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO KESRA
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kompetensi				Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase lansia potensial yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan				Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
						Persentase Exs korban Napza yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan				Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
						Persentase wanita Tunasosial yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan				Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
						Persentase penyandang disabilitas yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan				Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
				Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial				Urusan Sosial	DINSOS
					Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan pemberdayaan sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial				Urusan Sosial	DINSOS
						Persentase PSKS yang mendapatkan pelayanan pemberdayaan sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial				Urusan Sosial	DINSOS
				Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Menurunkan Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 Tahun keatas di tingkat daerah provinsi				Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
						Menurunkan Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 Tahun tingkat daerah Provinsi				Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH	
							2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7 Meningkatkan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	Meningkatkan Kebebasan Sipil	Menciptakan iklim berdemokrasi yang kondusif	Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial				Urusan Sosial	DINAS SOSIAL	
					Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat di akses oleh masyarakat				Urusan Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO	
					Menjamin hak anak dalam pembangunan	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Persentase Kab/Kota Layak Anak				Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
						Program Pengadministrasian Kependudukan Dan Catatan Sipil	Persentase anak yang memiliki akte kelahiran dalam mendukung hak anak untuk mendapat hak identitas				Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
						Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak yang mendapatkan hak dalam pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial				Urusan Sosial	DINAS SOSIAL
						Program Kesehatan Masyarakat	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita dalam mendukung hak anak untuk mendapatkan hak kesehatan				Urusan Kesehatan	DINAS KESEHATAN
						Jumlah kasus Konflik Sara Yang Dapat Diantisipasi				Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL	
					Program Penguatan Kewaspadaan Nasional	Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/kota				Urusan Ketentraman,	KESBANGPOL	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
					Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama Dan Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan				Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL
						Persentase Jumlah sanggar/paguyuban yang melestarikan seni budaya dalam mendukung ketahanan budaya				Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL
			Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)		Program Peningkatan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Prosentase jumlah pelanggaran Tibumtranmas yang ditindak sesuai dengan aturan				Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP
					Program Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah linmas yang berkompeten dalam penyelenggaraan kanrantibmas				Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP
					Program Pembinaan Dan Pengembangan Personil Satpol PP	Prosentase jumlah personil Satpol PP yang melaksanakan penyelenggaraan kanrantibmas				Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Program Penegakan Perda Dan Perkada	Cakupan penegakan perda				Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP
		Meningkatkan Hak-Hak Politik	Meningkatkan 39 partisipasi politik masyarakat	Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase jumlah perempuan yang berkompentensi dilembaga politik				Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
						Persentase Jumlah organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender				Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		Meningkatkan Peran Lembaga Demokrasi			Program Pembinaan Politik Dalam Negeri	Pertumbuhan Cakupan Pembinaan Politik Daerah				Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL
			Meningkatkan 40 pengembangan lembaga demokrasi	Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi	Program Pembinaan Politik Dalam Negeri	persentase rekomendasi pengembangan berdemokrasi yg ditindak lanjuti				Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL
Misi VI . Meningkatkan Pengendalian Bencana Dan Kualitas Lingkungan Hidup											
Menurunnya 8 Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	Meningkanya kapasitas terhadap penanggulangan	Meningkatkan 41 kemampuan pencegahan dan penanggulangan	Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana				Urusan Sosial	BPBD

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		bencana	bencana melalui penambahan sarana, SDM dan Pelatihan								
					Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial				Urusan Sosial	DINSOS
					Program Pengembangan Distribusi, Stabilitas, Dan Cadangan Pangan	Persentase Cadangan Pangan				Urusan Pangan	DINAS PANGAN
					Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan bencana yang dapat di akses oleh masyarakat				Urusan Komunikasi dan Informatika	KOMINFO
					Proram Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase Kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon				Urusan Kesehatan	DINKES
					Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Persentase peningkatan kualitas linmas dalam penanganan bencana dan kebakaran				Urusan Trantibun linmas	SATPOL PP
					Program Kedaruratan Dan Logistik Penanggulangan Bencana	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Penanggulangan Bencana				Urusan Sosial	BPBD
					Proram Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan yang mendapat pelayanan kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana dalam satu provinsi				Urusan Kesehatan	DINKES
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Dan Penunjang Medis	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan rujukan				Urusan Kesehatan	RSUP
					Program Pengembangan Sumber Daya Air	persentase Panjang Talud yang direhabilitasi dan direkonstruksi yang berfungsi dengan baik untuk menahan tanah				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
						Persentase Panjang Sungai /saluran yang dinormalisasi dan befungsi memperlancar aliran air sungai akibat bencana				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Program Perumahan Rakyat	Persentase rekonstruksi dan rehabilitasi rumah akibat bencana				Urusan PERKIM	PRKP
					Program Kebinamargaan	Persentase Panjang jalan yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
						Persentase panjang jembatan yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
					Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana				Urusan Sosial	BPBD
					Proram Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase penduduk pada kondisi kejadian luarbiasa (KLB) yang mendapat pelayanan kesehatan dalam satu Provinsi				Urusan Kesehatan	DINKES
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan Dan Napza	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa				Urusan Kesehatan	RSJ
		42 Mengembangkan kawasan berbasis penanggulangan bencana	Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam		Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase Panjang Penahan Abrasi Pantai				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
						Panjang sungai yang dinormalisasi pada daerah rawan bencana				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
						panjang penahan tanah akibat erosi				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Peningkatan Pengelolaan Das Dan Pemberdayaan	Persentase DAS kritis yang di kelola				Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH		
							2018	2019	2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Masyarakat													
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Dishut	Persentase kegiatan pengelolaan hutan oleh UPTD KPH (%)				Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN		
				Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase Panjang Talud penahan banjir kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR		
						Persentase Panjang pengerukan Normalisasi sungai dan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR		
					Program Perumahan Rakyat	Persentase relokasi kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur				Urusan PERKIM	PRKP		
						Program Kebinamargaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR	
						Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase luas lahan yang bersertifikat untuk kepentingan di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR	
9	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	43	Meningkatkan kualitas air	Pengendalian kualitas air	Program Peningkatan Pengendalian Dan Penaatan Lingkungan Hidup	Persentase BOD, COD dan TSS				Urusan Lingkungan Hidup	DLH	
						Program Peningkatan Perlindungan Dan Konservasi SDA Dan Ekosistem	Persentase Kawasan ekosistem essensial (%)				Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN	
				44	Meningkatkan kualitas udara	pengendalian kualitas udara	Program Peningkatan Pengendalian Dan Penataan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan Konsentrasi SO2 dan NO2 yang melebihi Nilai Ambang Batas				Urusan Lingkungan Hidup	DLH

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Program Peningkatan Perlindungan Dan Konservasi SDA Dan Ekosistem	Persentase penurunan Kawasan Hutan yang terbakar				Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN
			45	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan hutan	Peningkatan tutupan lahan	Program Peningkatan Perlindungan Dan Konservasi SDA Dan Ekosistem	Persentase luas kawasan hutan yang bervegetasi (%)			Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN
					Program Peningkatan Pengelolaan Das Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase luas kawasan Perhutanan Sosial (%)				Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN
					Program Peningkatan Tata Kelola Hutan	Persentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan				Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN
			46	meningkatkan pengendalian terhadap lingkungan	Pengembangan Perhutanan Sosial	Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Persentase jumlah kebijakan berkaitan pengelolaan lingkungan berkelanjutan yang diimplementasikan			Urusan Lingkungan Hidup	DLH
					Program Peningkatan Pengendalian Dan Penataan Lingkungan Hidup	persentase perusahaan yang mengimplementasikan kajian lingkungan hidup				Urusan Lingkungan Hidup	DLH
					Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Pertumbuhan volume pengolahan sampah yang ramah lingkungan				Urusan Lingkungan Hidup	DLH
					Program Peningkatan Pengelolaan Das Dan Pemberdayaan Masyarakat	persentase penanganan tindak pidana kehutanan				Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan	Persentase Parameter Kualitas Lingkungan yang terakreditasi				Urusan Lingkungan Hidup	UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN
					Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam	Persentase lahan kritis di arel IUP yang di reklamasi,				Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
						Nilai jaminan reklamasi				Urusan Energi	DINAS ESDM

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										dan Sumber Daya Mineral	
					Program Peningkatan Pengelolaan Geologi Dan Air Tanah	Persentase cadangan air tanah yang potensial yang dapat dimanfaatkan				Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
						Persentase pemenuhan Air Tanah dilokasi yang rawan air				Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
						Jumlah obyek geologi yang diusulkan menjadi kawasan cagar alam geologi				Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
					Program Peningkatan Pelayan Teknis Tata Kelola Dishut	Jumlah Kawasan Hutan yang dikelola				Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Prosentase Penurunan Emisi dari Sektor Transportasi				urusan perhubungan	DISHUB
		Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan			Program Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Pertumbuhan volume pengolahan sampah yang ramah lingkungan pada TPA Regional				Urusan Lingkungan Hidup	DLH
					Program Kecipta Karya Dan Permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik/aliran air tidak tersumbat di KPengembangan TPA Regional				Urusan PERKIM	PRKP
						Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik di Pengembangan TPA Regional				Urusan PERKIM	PRKP
					Program Kebinamargaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di TPA Regional				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
					Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase luas lahan yang bersertifikat untuk kepentingan di TPA Regional				Urusan Pertanahan	PUPR

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Program Pengembangan SDA	Persentase penyediaan volume air baku untuk pengembangan TPA Regional				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR

Tabel VI.5
Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
(Setelah Perubahan)

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Misi I. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah										

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1 Meningkatnya PDRB Sub sektor pertanian	1 Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan			1 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan luas tanam Tanaman Pangan			Pertanian	DINAS PERTANIAN
						Persentase peningkatan luas tanam Hortikultura			Pertanian	DINAS PERTANIAN
						Persentase Pertambahan Angka Kelahiran Ternak			Pertanian	DINAS PERTANIAN
						Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular			Pertanian	DINAS PERTANIAN
						Peningkatan unit usaha yang bersertifikasi NKV (Nomor Kontrol Veteriner)			Pertanian	DINAS PERTANIAN
						Jumlah ketersediaan pakan ternak (Ha)			Pertanian	DINAS PERTANIAN
						Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian			Pertanian	DINAS PERTANIAN
						Persentase Ketersediaan benih/bibit pertanian tingkat lapang (daerah)			Pertanian	DINAS PERTANIAN
						Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian			Pertanian	DINAS PERTANIAN
						Persentase benih/bibit pertanian berlabel dan bersertifikat			Pertanian	DINAS PERTANIAN
						Persentase peredaran benih/bibit pertanian yang tidak bersertifikat			Pertanian	DINAS PERTANIAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan pengolahan dan pemasaran pertanian			Pertanian	DINAS PERTANIAN
						Persentase Prasarana pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang tersedia			Pertanian	DINAS PERTANIAN
						Jumlah Angka kelahiran Ternak			Pertanian	DINAS PERTANIAN
						Rasio Ketersediaan Sarana Pertanian			Pertanian	DINAS PERTANIAN
						Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian di UPTD Balai Benih Pertanian			Pertanian	DINAS PERTANIAN
						Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian untuk UPTD Balai Proteksi Pertanian			Pertanian	DINAS PERTANIAN
	2 Peningkatan Produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan				1 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kasus Penyakit Hewan menular			Pertanian	DINAS PERTANIAN
					2 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dokumen Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			Pertanian	DINAS PERTANIAN
						Persentase penurunan intensitas serangan/gangguan Organisme pengganggu tanaman			Pertanian	DINAS PERTANIAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani madya			Pertanian	DINAS PERTANIAN
					4 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Pangan Pokok			Pangan	DINAS PANGAN
					5 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan a) Kelompok Pangan Padi-Padian b) Kelompok Pangan Kacang-kacangan 3) Klompok pangan buah dan syuran			Pangan	DINAS PANGAN
						Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan a) Kelompok Pangan Padi-Padian b) Kelompok Pangan Kacang-kacangan 3) Klompok pangan buah dan syuran			Pangan	DINAS PANGAN
						Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam pada kelompok Pangan a) Umbi-umbian, b) Kacang-kacangan c) nuah dan sayur			Pangan	DINAS PANGAN
					6 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah orang Tertanganinya masyarakat rawan pangan			Pangan	DINAS PANGAN
		3 Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Pertanian, Perkebunan dan Peternakan			1 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani madya			Pertanian	DINAS PERTANIAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4 Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Teknopark Lada Air Gegas			1 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan luas tanam perkebunan			Pertanian	DINAS PERTANIAN
	2 Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan	5 Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya			1 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai Tukar Nelayan (Indeks)			Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
		6 Peningkatan produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya			1 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (%)			Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
					2 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya (%)			Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
					3 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luasan ruang laut, pesisir dan pulau pulau kecil yang termanfaatkan (Ha)			Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
					4 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)			Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
					5 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Pertumbuhan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (%)			Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7 Peningkatan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya			1 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase sarana dan prasarana perikanan tangkap dalam kondisi baik			Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
					2 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase sarana dan prasarana perikanan budidaya dalam kondisi baik			Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
		8 Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan produksi dan nilai Tambah hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya			1 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Pertumbuhan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (%)			Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
	3 Meningkatkan Laju pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	9 Peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata serta Pengembangan ekonomi kreatif			1 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase unit usaha kreatif untuk pengembangan usaha			Urusan Pariwisata	DISBUDPAR
						Persentase kabupaten/kota yang teridentifikasi untuk pengembangan kabupaten/kota kreatif, ruang kreasi dan jaringan orang kreatif			Urusan Pariwisata	DISBUDPAR

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Kemitraan Pariwisata yang terbentuk			Urusan Pariwisata	DISBUDPAR
						Persentase Lembaga LSP P1 yang terbentuk			Urusan Pariwisata	DISBUDPAR
					3 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM bidang pariwisata yang diberdayakan			Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	KUMKM
		10 Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana destinasi pariwisata			1 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Derstinasi Pariwisata yang Memenuhi Standar			Urusan Pariwisata	DISBUDPAR
		11 Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia pariwisata			1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif terlatih dan terserfikasi			Urusan Pariwisata	DISBUDPAR
					2 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase SDM UMKM bidang pariwisata yang terlatih			Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	KUMKM
					3 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi bidang pariwisata yang terlatih			Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	KUMKM

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12 Peningkatan Peran serta kepemudaan dan olahraga serta kebudayaan dalam pengembangan pariwisata			1 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pertumbuhan komunitas olahraga			Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
		13 Pengembangan hinterland dan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung			1 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang Memenuhi Standar			Urusan Pariwisata	DISBUDPAR
		14 Pengembangan hinterland dan Kawasan Peruntukan Pariwisata lintas timur Pulau Bangka			1 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang Memenuhi Standar			Urusan Pariwisata	DISBUDPAR
		15 Pengembangan hinterland dan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang			1 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang Memenuhi Standar			Urusan Pariwisata	DISBUDPAR
		16 Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata Pulau Punai			1 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang Memenuhi Standar			Urusan Pariwisata	DISBUDPAR

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		17 Pengembangan pintu masuk wisatawan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera			1 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang Memenuhi Standar			Urusan Pariwisata	DISBUDPAR
		18 Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil pendukung pariwisata			1 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang Memenuhi Standar			Urusan Pariwisata	DISBUDPAR
	4 Meningkatnya PDRB Sektor Pertambangan dan Energi	19 Meningkatkan produksi dan nilai tambah sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan			1 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.			Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
					2 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan jumlah industri			Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
		20 Peningkatan ketersediaan energi listrik masyarakat			1 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi.			Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
	5 Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan	21 Pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular			1 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan jumlah industri			Urusan Perindustrian	DISPERINDAG

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		22 Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai			1 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan jumlah industri			Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
		23 Peningkatan tata kelola industri			1 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap di SIINAS			Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
					2 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Verifikasi Teknis			Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
		24 Peningkatan tata kelola perdagangan			1 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam tertib Niaga			Urusan Perdagangan	DISPERINDAG
					2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah DED			Urusan Perdagangan	DISPERINDAG
						Jumlah Sarana Perdagangan			Urusan Perdagangan	DISPERINDAG
					3 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tersedianya Bapokting			Urusan Perdagangan	DISPERINDAG
						Terkendalinya harga Bapokting			Urusan Perdagangan	DISPERINDAG
					4 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Volume Ekspor			Urusan Perdagangan	DISPERINDAG

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 Meningkatkan Pemerataan Pendapatan	6 Menurunkan Tingkat Pengangguran	25 Peningkatan kesempatan kerja			1 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen perencanaan yang terlaksana			Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
					2 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang tersertifikasi			Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
					3 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Kompetitif dan Berdaya Saing			Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
					4 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase kepatuhan perusahaan yang melaksanakan norma ketenagakerjaan			Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
		26 Peningkatkan peran KUKM dalam meningkatkan kesempatan kerja			1 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase rekomendasi izin Usaha Simpan Pinjam yang dikeluarkan			Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM
					2 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif			Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM
					3 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang terlatih				
					4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diberdayakan				
						Persentase Koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan				

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					5 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang diberdayakan				
						Persentase Peningkatan Omset UMKM				
					6 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang dikembangkan				
						Persentase SDM UMKM yang terlatih				
						Persentase Peningkatan Pembiayaan UMKM				
		Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan lapangan pekerjaan			1 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Investor Yang Berinvestasi			Penanaman Modal	DPMPTSP
					2 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kebijakan Investasi yang Terimplementasikan			Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM
					3 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP				
					4 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Investor Yang Patuh Melaksanakan Regulasi				

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					5 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP				
	7 Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	28 Peningkatan Kompetensi, hubungan industrial dan keselamatan tenaga kerja			1 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	persentase penurunan tingkat perselisihan hubungan industrial			Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
					2 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase kepatuhan perusahaan yang melaksanakan norma ketenagakerjaan			Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
	8 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	29 Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin			1 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang terlindungi dan terjamin kesejahteraan sosialnya			Urusan Sosial	DINSOS
					2 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang terehabilitasi kesejahteraan sosialnya			Urusan Sosial	DINSOS
					3 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang terfasilitasi penanganan sosialnya			Urusan Sosial	DINSOS
		30 Peningkatan pendapatan masyarakat miskin			1 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS/PSKS yang terberdayakan			Urusan Sosial	DINSOS
	9 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa	31 Peningkatan pendapatan masyarakat desa			1 PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAH DESA	Persentase aparaturnya desa dan BPD yang meningkat kompetensinya			Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINAS PMD
					2 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase kerjasama desa yang terimplementasikan			Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINAS PMD

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah kawasan trasnmigrasi yang dibina			Urusan Transmigrasi	DINAS TENAGA KERJA
MISI II. MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS DAERAH YANG BERKUALITAS										
3 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	10 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	32 Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum			1 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Penyediaan Air Baku Rasio layanan Irigasi persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak			Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PEKIM
					4 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak			Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PERKIM
					7 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara			Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PERKIM

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Luas Kawasan yang Tertata			Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PERKIM
		33 Peningkatan kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan tata ruang			1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
		34 Peningkatan ketersediaan dan kapasitas SDM Konstruksi			1 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI	Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
11	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar	35 Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman			1 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah akibat bencana yang tertangani			Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PRKP
					2 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan permukiman dalam kondisi baik			Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PERKIM
12	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	36 Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana perhubungan			1 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Perhubungan Darat			Urusan Perhubungan	DISHUB

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Perhubungan Laut			Urusan Perhubungan	DISHUB
					3 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Prosentase Pemenuhan Prasarana Kebandarudaraan			Urusan Perhubungan	DISHUB
MISI III. MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL DAN HANDAL										
4 Meningkatnya Pendidikan masyarakat	13 Meningkatkan Akses Pendidikan Masyarakat	37 Peningkatan akses pelayanan pendidikan			1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
						APK SMK			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
						APK PENDIDIKAN KHUSUS			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
						jumlah siswa SMA berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
						jumlah siswa SMK berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
						jumlah siswa PK berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah siswa jenjang SD dan SMP berprestasi di Tingkat nasional/internasional			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						jumlah siswa/mahasiswa yang menerima beasiswa			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
						Nilai rata-rata UK GTK			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
						Persentase GTK Bersertifikasi			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah GTK yang berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
						APK Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Cabdin			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
						rata-rata nilai ujian akhir, UK GTK SMA, SMK, SLB di CABDIN			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah siswa SMA/SMK/PK dan GTK yang berprestasi di Tingkat Provinsi			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
						Persentase Sekolah penerima BOS			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
					2	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah kebijakan perizinan pendidikan yang dihasilkan		Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
14	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	38	Peningkatan mutu layanan pendidikan		1	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kebijakan Kurikulum Muatan Lokal yang dihasilkan		Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
					2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Jumlah kebijakan GTK yang dihasilkan		Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Meningkatnya Pembangunan Sosial Masyarakat	15 Meningkatkan Kesejahteraan Anak	39 Peningkatan pelayanan terhadap pemberian hak-hak anak		1 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rasio ketersediaan SDM Perlindungan Anak			Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PENDIDIKAN
		16 Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	40 Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang		1 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA)			Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		17 Meningkatkan Pembangunan Responsif Gender	41 Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak		1 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penurunan kekerasan terhadap perempuan			Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			42 Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender		1 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rasio ketersediaan SDM Perlindungan Perempuan			Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					2 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kegiatan yang responsif gender			Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Meningkatkan Kualitas Pemuda	Peningkatan Insan pemuda yang mandiri dan berprestasi			1 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang Memiliki Keterampilan			Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
						Persentase Pemuda Yang Berprestasi			Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
						Persentase Organisasi Pemuda yang memiliki Standarisasi			Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
						Persentase Sarana dan Prasarana Pemuda yang termanfaatkan			Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
19	Meningkatkan Pembangunan Olahraga	Peningkatan prestasi dan peran serta masyarakat dalam berolahraga			1 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet pelajar yang berprestasi			Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
						Persentase pertumbuhan komunitas olahraga			Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
						Persentase Standarisasi Tenaga Keolahragaan			Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
						Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang termanfaatkan			Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	45 Peningkatan rehabilitasi, jaminan dan perlindungan sosial			1 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang terehabilitasi kesejahteraan sosialnya			Urusan Sosial	DINSOS
					2 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang terfasilitasi penanganan sosialnya			Urusan Sosial	DINSOS
					3 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang terlindungi dan terjamin kesejahteraan sosialnya			Urusan Sosial	DINSOS
MISI IV. MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT										
6	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	21 Meningkatkan kesehatan masyarakat	46	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	1 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat			Urusan Kesehatan	DINKES
						Persentase fasilitas kesehatan yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang dipersyaratkan			Urusan Kesehatan	DINKES
					2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensi			Urusan Kesehatan	DINKES
					3 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sediaan farmasi, alata kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat			Urusan Kesehatan	DINKES

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					4 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Aktif			Urusan Kesehatan	DINKES
		47 Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat			1 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan dan alat kesehatan yang memenuhi syarat			Urusan Kesehatan	DINKES
					2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana dan Prasarana yang Tersedia di Rumah Sakit			Urusan Kesehatan	RSUP
					3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			Urusan Kesehatan	RSUP
					4 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD RSUP	Persentase dana BLUD yang digunakan untuk kegiatan operasional dan pelayanan kepada masyarakat			Urusan Kesehatan	RSUP
					5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana dan Prasarana yang Tersedia di Rumah Sakit Jiwa			Urusan Kesehatan	RSJ
					6 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			Urusan Kesehatan	RSJ

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					7 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD RS	Persentase dana BLUD yang digunakan untuk kegiatan operasional dan pelayanan kepada masyarakat			Urusan Kesehatan	RSJ
MISI V. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI										
7	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Berkualitas	22 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	48	Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah		1 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	persentase Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah		Urusan Keuangan	BAKUDA
					2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	persentase tindak lanjut temuan BPK terhadap nilai aset daerah yang dianggap belum diyakini kewajarannya/tidak memadai		Urusan Keuangan	BAKUDA
					3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peersentase Peningkatan pertumbuhan PAD		Urusan Keuangan	BAKUDA
		49	Peningkatan tata kelola pengawasan		1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		Urusan Pengawasan	INSPEKTORAT
					2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Perangkat Daerah yang tingkat maturitas SPIP-nya level 3		Urusan Pengawasan	INSPEKTORAT
		50	Peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan		1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD		Urusan Perencanaan	BAPPEDA

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2 PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam			Urusan Perencanaan	BAPPEDA
					3 PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaanbidang infrastruktur dan kewilayahan			Urusan Perencanaan	BAPPEDA
					4 PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusiia			Urusan Perencanaan	BAPPEDA
					5 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan			Urusan Penelitian dan Pengembangan	BAPPEDA
		51 Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah			1 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	Jumlah perangkat daerah yang ditata			Urusan Sekretariat Daerah	BIRO ORGANISASI
					2 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	program pengelolaan arsip			Urusan Kearsipan	DKPUS
					3 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	program perlindungan dan penyelamatan arsip			Urusan Kearsipan	DKPUS
					4 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	program perizinan penggunaan arsip			Urusan Kearsipan	DKPUS
					5 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengelolaan Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan			Urusan Sekretariat Daerah	BIRO PERECONOMIAN
					6 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Evaluasi Administrasi Pembangunan			Urusan Sekretariat Daerah	BIRO PEMBANGUNAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					7 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	Persentase kebijakan yang diterbitkan dalam rangka harmonisasi dan efektifnya pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan			Urusan Sekretariat Daerah	BIRO UMUM
					8 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pimpinan			Urusan Sekretariat Daerah	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
					9 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat			Urusan Sekretariat Daerah	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
					10 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung			Urusan Penghubung	BADAN PENGHUBUNG
		52 Pengembangan daerah otonomi baru (DOB)			1 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah			Urusan Sekretariat Daerah	BIRO PEMERINTAHAN
		53 Peningkatan penataan peraturan perundangan dan kebijakan daerah			1 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Produk hukum daerah yang tidak tumpang tindih			Urusan Sekretariat Daerah	BIRO HUKUM
					2 PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Persentase Peningkatan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD dan Alat Kelengkapan Lainnya			Urusan Sekretariat Dewan	SETWAN
					3 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Kesesuaian antar Informasi yang dipublikasikan dan layanan keprotokoler dewan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah			Urusan Sekretariat Dewan	SETWAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		54 Peningkatan transparansi Pengadaan barang dan jasa			1 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengadaan Barang dan Jasa			Urusan Sekretariat Daerah	BIRO LAYANAN PENGADAAN
		55 Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik			1 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyebarluasan informasi dan komunikasi pemerintahan yang terpublikasi			Urusan Komunikasi dan Informatika	DINAS KOMINFO
					2 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	jumlah aplikasi informatika yang terkelola			Urusan Komunikasi dan Informatika	DINAS KOMINFO
					3 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terbentuknya Forum Data Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Urusan Komunikasi dan Informatika	DINAS KOMINFO
					4 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				Urusan Komunikasi dan Informatika	DINAS KOMINFO
		56 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi			1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan pertumbuhan PAD			Urusan Keuangan	BAKUDA
					2 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP			Urusan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap sarana dan prasarana pelayanan Rumah Sakit Umum			Urusan Kesehatan	RSUP
					4 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap sarana dan prasarana pelayanan Rumah Sakit Jiwa			Urusan Kesehatan	RSJ
					5 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	persentase penambahan pengunjung perpustakaan			Urusan Perpustakaan	DKPUS
					6 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	penambahan koleksi perpustakaan			Urusan Perpustakaan	DKPUS
		57 Peningkatan kompetensi dan profesional ASN			1 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pegawai ASN yang sesuai dengan formasi			Urusan Kepegawaian	BKPSDM
					2 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang tersertifikasi			Urusan Kepegawaian	BKPSDM
8 Meningkatnya Demokrasi Indonesia	23 Meningkatkan Kebebasan Sipil	58 Peningkatan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi			1 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.	Indeks Kinerja Ormas			Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat	59 Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat			1 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN.	Jumlah Kasus Penistaan terhadap simbol - simbol Negara.			Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL
		60 Peningkatan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta Perlindungan Masyarakat (Linmas)			1 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran tibumtranmas yang ditindak			Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP
						Persentase penegakkan pelanggar Perda			Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP
						Persentase Satlinmas yang terlatih dalam penyelenggaraan kantrantibmas dan membantu penanganan bencana dan kebakaran			Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP
					2 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah Angka Kriminalitas Menurun			Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.	Persentase Ketidakhadiran Masyarakat dalam Pemilu/Pemilu Kada			Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL
	25 Meningkatkan Peran lembaga demokrasi masyarakat	61 Peningkatan pengembangan Lembaga-Lembaga Demokrasi			1 PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Cakupan relawan pemadam kebakaran di kabupaten dan kota			Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP
MISI VI . MENINGKATKAN PENGENDALIAN BENCANA DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP										
9 Menurunnya Risiko Bencana	26 Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana	62 Peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana			1 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pelayanan Kebencanaan di 7 Kabupaten/Kota yang diintervensi Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana (PB)			Urusan Sosial	BPBD
						Persentase Pelayanan Kebencanaan di 7 Kabupaten/Kota yang diintervensi Dalam Kedaruratan Penanggulangan Bencana (PB)			Urusan Sosial	BPBD

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase Pelayanan Kebencanaan di 7 Kabupaten/Kota Yang di Rehabilitasi Dan di Rekonstruksi			Urusan Sosial	BPBD
					2 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang terfasilitasi penanganan sosialnya			Urusan Sosial	DINSOS
					3 PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Cakupan relawan pemadam kebakaran di kabupaten dan kota			Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP
		63 Peningkatan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam			1 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				Urusan Sosial	BPBD
		64 Peningkatan penataan hilir dan hulu daerah rawan bencana Teluk Bayur			1 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di kawasan hilir daerah rawan bencana Teluk Bayur			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
10 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	27 Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	65 Peningkatan pengendalian terhadap kualitas air sungai			1 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen lingkungan hidup yang digunakan dalam perencanaan kawasan			Urusan Lingkungan Hidup	DLH
					2 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase BOD, COD dan TSS			Urusan Lingkungan Hidup	DLH

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase SDM bidang lingkungan hidup yang terlatih			Urusan Lingkungan Hidup	DLH
					4 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup yang ditangani			Urusan Kehutanan	DLH
		66 Peningkatan pengendalian terhadap kualitas udara			1 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase penurunan Konsentrasi SO2 dan NO2 yang melebihi Nilai Ambang Batas			Urusan Lingkungan Hidup	DLH
					2 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase lembaga pembedayaan masyarakat kehutanan yang terbina			Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN
		67 Peningkatan pengendalian dan pengawasan hutan			1 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase penurunan luas kerusakan hutan			Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN
		68 Peningkatan tata kelola kehutanan			1 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase kawasan hutan yang terkelola			Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN
					2 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase penurunan luas kerusakan hutan			Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		69 Peningkatan pemanfaatan kawasan hutan			1 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase lembaga pembedayaan masyarakat kehutanan yang terbina			Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN
		70 Peningkatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan			1 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pertumbuhan volume pengolahan sampah yang ramah lingkungan			Urusan Lingkungan Hidup	DLH
					2 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase luas Perhutanan Sosial			Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN
					3 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK GEOLOGI	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi.			Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
						Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi.			Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
					4 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun.			Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM

6.2.3. Tema Prioritas Pembangunan Daerah

Tema prioritas pembangunan daerah selama 5 tahun dalam Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022 mengusung tema sebagai berikut:

1. Tahun 2018, Tema Prioritas Pembangunan “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”.
2. Tahun 2019, Tema Prioritas Pembangunan “Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pembangunan Infrastruktur Dan Konektivitas”.
3. Tahun 2020, Tema Prioritas Pembangunan “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dan Pendidikan Masyarakat”.
4. Tahun 2021, Tema Prioritas Pembangunan “Percepatan Pemulihan Ekonomi Melalui Pengembangan Potensi Daerah Berbasis Masyarakat Dan Peningkatan Pelayanan Dasar”.
5. Tahun 2022, Tema Prioritas Pembangunan “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat menuju Sumber Daya Manusia yang Unggul”.

6.2.4. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah telah ditetapkan dan dirumuskan sejumlah 197 Program. Ke 197 program ini telah diuraikan oleh perangkat daerah ke dalam 1210 kegiatan. Program dan kegiatan ini telah dirumuskan, disusun dan ditetapkan dalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah. Ke 197 program ini, bersama-sama dengan seluruh perangkat daerah telah disusun indikatif besaran anggaran pelaksanaannya selama 5 (lima) tahun (2018-2022). Besaran total dana beryurut-turut 2018 sebesar Rp. 1.472.388.414.348,-; Tahun 2019 sebesar Rp. 2.484.684.550.885,-; Tahun 2020 sebesar Rp. 3.322.861.079.194,-; Tahun 2021 sebesar Rp. 4.316.315.130.399,- dan Tahun 2022 sebesar Rp. 3.770.981.525.567,-.

Dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, Program Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang semula sebelum perubahan berjumlah 197 program berubah menjadi 177 Program Perangkat daerah yang tersebar di 34 Perangkat Daerah. Adapun jumlah pagu indikatif yang semula pada tahun 2021 sebesar Rp. 4.316.315.130.399,- berubah menjadi Rp. 2.883.443.678.214,87 dan tahun 2022 semula sebesar Rp. 3.770.981.525.567,- berubah menjadi Rp. 2.892.240.376.817,39,-.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan kegiatan Perangkat Daerah dapat digambarkan pada table VI.6 berikut ini :

Tabel VI.6
Arah Kebijakan dan Sasaran Kegiatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
Misi I. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah				
Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi				
1 Meningkatkan PDRB Sub sektor pertanian	1 Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan	1 Meningkatnya rasio jumlah prasarana dan sarana pertanian dengan luas lahan pertanian	Urusan Pertanian	DINAS PERTANIAN
		2 Meningkatnya rasio jumlah prasarana dan sarana pertanian dengan luas lahan pertanian	Urusan Pertanian	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
		3 Meningkatnya benih tanaman pangan yang bersertifikat dan berlabel	Urusan Pertanian	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
		4 Meningkatnya benih tanaman hortikultura yang bersertifikat dan berlabel	Urusan Pertanian	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
		5 Meningkatnya Pengawasan peredaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Urusan Pertanian	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
		6 Menurunnya areal tanam yang terserang OPT dan DPI	Urusan Pertanian	UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN PERTANIAN
		7 Meningkatnya Ketersediaan bibit ayam yang baik untuk berternak	Urusan Pertanian	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
		8 Meningkatnya Ketersediaan bibit lada yang siap tanam	Urusan Pertanian	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
		9 Meningkatnya Ketersediaan anakan sapi siap ternak	Urusan Pertanian	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
		10 Meningkatnya Ketersediaan bibit karet siap tanam	Urusan Pertanian	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
		11 Meningkatnya Ketersediaan benih sumber padi siap tanam	Urusan Pertanian	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
		12 Meningkatnya Ketersediaan sarana prasarana pembibitan	Urusan Pertanian	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
		13 Meningkatnya Luas Jaringan Irigasi pertanian yang beroperasi	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
	2 Peningkatan Produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	1 Meningkatkan produksi lada	Urusan Pertanian	DINAS PERTANIAN
		2 Meningkatkan produksi Karet	Urusan Pertanian	DINAS PERTANIAN
		3 Meningkatkan produksi Komoditas Perkebunan lainnya	Urusan Pertanian	DINAS PERTANIAN
		4 Meningkatkan produksi komoditi strategis tanaman pangan (padi)	Urusan Pertanian	DINAS PERTANIAN
		5 Meningkatkan produksi komoditi strategis Hortikultura (Bawang Merah)	Urusan Pertanian	DINAS PERTANIAN
		6 Meningkatkan produksi komoditi strategis Hortikultura (Cabai Rawit)	Urusan Pertanian	DINAS PERTANIAN
		7 Meningkatkan Populasi ternak besar sapi	Urusan Pertanian	DINAS PERTANIAN
		8 Meningkatkan Populasi ternak besar sapi	Urusan Pertanian	DINAS PERTANIAN
		9 Meningkatkan Persentase kelompok masyarakat yang mendayagunakan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk pengolahan hasil pertanian	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINAS PEMDES
	3 Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	1 Meningkatkan Persentase masyarakat petani yang mendapat pelatihan pertanian	Urusan Tenaga Kerja	UPTD BLKI

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
		2 Meningkatkan produktifitas tenaga kerja sektor Peritanian	Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
		3 Meningkatkan Persentase tenaga kerja pertanian bersertifikat kompetensi	Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
		4 Meningkatnya Persentase Siswa SMK Program Keahlian Pertanian memiliki Sertifikasi Profesi	Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
		5 Meningkatkan kelompok masyarakat ternak yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil peternakan	Urusan Pertanian	DINAS PERTANIAN
		6 Meningkatkan kelompok masyarakat perkebunan yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil perkebunan	Urusan Pertanian	DINAS PERTANIAN
		7 Meningkatkan kelompok masyarakat tanaman pangan dan hortikultura yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan hortikultur	Urusan Pertanian	DINAS PERTANIAN
		8 Meningkatkan persentase SDM koperasi pertanian terlatih	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
		9 Meningkatkan persentase SDM usaha kecil pengolah hasil pertanian terlatih	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	4 Peningkatkan peran KUKM dalam meningkatkan nilai tambah hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	1 Meningkatkan volume usaha koperasi pertanian	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
		2 Meningkatkan produk usaha kecil pengolahan hasil pertanian yang dikembangkan	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
	5 Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan produksi dan nilai Tambah hasil produksi Pertanian, perkebunan dan Peternakan	1 Meningkatnya investasi disektor pertanian	Urusan Penanaman Modal	DINAS PMPTSP
		2 Meningkatnya informasi ke masyarakat terkait produksi pertanian	Urusan Penanaman Modal	DINAS PMPTSP
		3 Meningkatnya rekomendasi kebijakan bidang pertanian yang di implementasikan	Urusan Penanaman Modal	DINAS PMPTSP
	6 Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Teknopark Lada Air Gegas	1 Meningkatkan kawasan lada yang dikelola	Urusan Pertanian	DINAS PERTANIAN
2 Meningkatkan PDRB Sub sektor perikanan	7 Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	1 Meningkatkan Persentase masyarakat nelayan yang mendapat pelatihan produksi dan pengolaha hasil perikanan	Urusan Tenaga Kerja	UPTD BLKI
		2 Meningkatkan produktifitas tenaga kerja terkait produksi dan pengolahan hasil perikanan	Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
		3 Meningkatkan persentase tenaga kerja perikanan bersertifikat kompetensi	Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
		4 Meningkatnya persentase Siswa SMK Program Keahlian Perikanan memiliki Sertifikasi Profesi	Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
		5 Meningkatkan persentase SDM koperasi perikanan terlatih	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
		6 Meningkatkan persentase SDM usaha kecil pengolahan hasil perikanan terlatih	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	8 Peningkatan produksi dan pengelolaan hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	1 Meningkatkan volume produksi perikanan budidaya	Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
		2 Meningkatkan Volume Produksi Olahan ikan	Urusan Kelautan dan	DKP

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
			Perikanan	
		3 Meningkatkan Volume Produksi Perikanan Tangkap	Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
		4 Meningkatkan Persentase kelompok masyarakat yang mendayagunakan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk pengolahan hasil pertanian	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINAS PEMDES
	9 Peningkatan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	1 Meningkatkan Persentase Pelaku Usaha perikanan yang Taat Aturan	Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
		2 Meningkatkan panjang pengerukan dan pengendalian air dikawasan perikanan	Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
		3 Meningkatkan produksi benih ikan air laut yang unggul	Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
		4 Meningkatkan Persentase Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang memenuhi standar mutu	Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
		5 Meningkatkan produksi benih ikan air payau yang unggul	Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
	10 Peningkatkan peran KUKM dalam meningkatkan nilai tambah hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	1 Meningkatkan volume usaha koperasi perikanan	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
		2 Meningkatkan produk usaha kecil pengolahan hasil perikanan yang dikembangkan	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
	11 Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan produksi dan nilai Tambah hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	1 Meningkatnya investasi disektor perikanan	Urusan Penanaman Modal	DINAS PMPTSP
		2 Meningkatnya informasi ke masyarakat terkait cara meningkatkan produksi perikanan	Urusan Penanaman Modal	DINAS PMPTSP
		3 Meningkatnya rekomendasi kebijakan bidang perikanan yang di implementasikan	Urusan Penanaman Modal	DINAS PMPTSP

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
3 Meningkatkan Laju Pertumbuhan Kunjungan Pariwisata	12 Peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif	1 Meningkatkan pelaku ekonomi kreatif yang terlatih	Urusan Pariwisata	DISBUDPAR
		2 Meningkatkan kelembagaan pariwisata yang berkualitas	Urusan Pariwisata	DISBUDPAR
		3 Meningkatkan pengelolaan kawasan desa wisata	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINAS PEMDES
	13 Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana destinasi pariwisata	1 Meningkatkan sarana prasarana di daya tarik wisata yang terbangun dan memenuhi standar	Urusan Pariwisata	DISBUDPAR
		2 Meningkatkan Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi dalam Kondisi mantap menuju destinasi wisata	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
		3 Menurunkan volume pengolahan sampah yang ramah lingkungan di destinasi wisata	Urusan Lingkungan Hidup	DLH
		4 Meningkatkan sarana dan sarana perdagangan yang dibangun di destinasi wisata	Urusan Perdagangan	DISPERINDAG
		5 Meningkatkan sarana prasarana penunjang perhubungan darat di destinasi wisata	Urusan Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
	14 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata	1 Meningkatkan SDM pariwisata yang mendapat pelatihan	Urusan Tenaga Kerja	UPTD BLKI
		2 Meningkatkan produktifitas tenaga kerja sektor Pariwisata	Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
		3 Meningkatkan tenaga kerja pariwisata bersertifikat kompetensi	Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
		4 Meningkatnya Siswa SMK Program Keahlian Pariwisata memiliki Sertifikasi Profesi	Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
		5 Meningkatnya sumber daya pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi	Urusan Pariwisata	DISBUDPAR
		6 Meningkatnya sumberdaya pariwisata yang terlatih di Pulau Belitung	Urusan Pariwisata	DISBUDPAR
		7 Meningkatkan SDM koperasi ekonomi kreatif pendukung pariwisata terlatih	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN,

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
				USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
		8 Meningkatkan SDM usaha kecil ekonomi kreatif pendukung pariwisata terlatih	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	15 Peningkatan Peran serta kepemudaan dan olahraga serta kebudayaan dalam pengembangan pariwisata	1 Meningkatnya budaya lokal yang dapat dikembangkan menjadi event wisata	Urusan Pariwisata	DISBUDPAR
		2 Meningkatnya event olahraga yang dapat dikembangkan menjadi event wisata	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
	16 Peningkatan peran KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan	1 Meningkatkan volume usaha ekonomi kreatif pendukung pariwisata	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
		2 Meningkatkan produk usaha kecil ekonomi kreatif pendukung pariwisata yang dikembangkan	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
	17 Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam pengembangan pariwisata	1 Meningkatkan kunjungan wisatawan domestik melalui media promosi	Urusan Pariwisata	DISBUDPAR
		2 Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara melalui media promosi	Urusan Pariwisata	DISBUDPAR
		3 Meningkatnya investasi di sektor pariwisata	Urusan Penanaman Modal	DINAS PMPTSP
		4 Meningkatnya informasi ke masyarakat terkait pengembangan pariwisata	Urusan Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO
		5 Meningkatnya rekomendasi kebijakan pengembangan pariwisata yang diimplementasikan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO EKONOMI

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
	18 Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Pangkalpinang – Mendo Barat – Bangka Tengah dan sekitarnya fokus Pengembangan hinterland dan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung Gunung	1 Meningkatkan Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi dalam Kondisi mantap menuju Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung Gunung	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
		2 Meningkatnya sarana prasarana penunjang perhubungan darat menuju Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung Gunung	Urusan Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
	19 Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Belinyu– Sungailiat dan sekitarnya fokus Pengembangan <i>hinterland</i> dan Kawasan Peruntukan Pariwisata lintas timur Pulau Bangka	1 Meningkatkan Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi dalam Kondisi mantap menuju Kawasan Peruntukan Pariwisata Lintas Timur Pulau Bangka	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
		2 Meningkatnya sarana prasarana penunjang perhubungan darat menuju Kawasan Peruntukan Pariwisata Lintas Timur Pulau Bangka	Urusan Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
	20 Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Pulau Belitung fokus Pengembangan hinterland dan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang	1 Meningkatkan Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi dalam Kondisi mantap menuju Kawasan Peruntukan Pariwisata KEK Tanjung Kelayang	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
		2 Meningkatkan sarana prasarana penunjang perhubungan darat menuju Kawasan Peruntukan Pariwisata KEK Tanjung Kelayang	Urusan Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
	21 Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata Pulau Punai	Meningkatkan Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi dalam Kondisi mantap menuju Kawasan Peruntukan Pariwisata Pulau Punai	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
		Meningkatkan sarana prasarana penunjang perhubungan darat menuju Kawasan Peruntukan Pariwisata KEK pulau punai	Urusan Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
	22 Pengembangan pintu masuk wisatawan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera	1 Meningkatkan luas tanah provinsi di pintu masuk wisatawan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
		2 Meningkatkan ketersediaan dokumen pendukung perencanaan di kawasan pintu masuk wisatawan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
		3 Meningkatkan kerjasama di pintu masuk wisatawan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera dengan Prov. Sumsel	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO PEMERINTAHAN
	23 Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil pendukung pariwisata	1 Meningkatnya sarana dan prasarana yang terbangun di Desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam mendukung pariwisata	Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
		2 Meningkatnya pulau-pulau berpenduduk yang terkoneksi kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil dalam mendukung pariwisata	Urusan Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
4 Meningkatkan PDRB sektor pertambangan dan energi	24 Peningkatan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan	1 Meningkatkan Persentase cadangan Mineral yang potensial	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
	25 Peningkatan promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam pengembangan sumber daya mineral	1 Meningkatnya investasi di sektor Sumberdaya mineral	Urusan Penanaman Modal	DINAS PMPTSP
	26 Peningkatan ketersediaan energi listrik masyarakat	Meningkatkan Persentase EBT yang digunakan	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
	27 Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan pemenuhan energi listrik daerah	Meningkatnya investasi di sektor energi	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
5 Meningkatkan PDRBSektor industri pengolahan dan perdagangan	28 Pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular dan sekitarnya	1 Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan Industri Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
	29 Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai dan sekitarnya	1 Meningkatnya pertumbuhan jumlah industri di kawasan industri sadai dan sekitarnya	Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
	30 Peningkatan tata kelola industri		Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
	31 Peningkatan tata kelola perdagangan		Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
Tujuan 2 : Meningkatkan Pemerataan Pendapatan				
6 Menurunkan Tingkat Pengangguran	32 Peningkatan kesempatan kerja	1 Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan	Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
		2 Meningkatnya tenaga kerja industri	Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
		3 Meningkatnya pemuda yang bekerja	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
		4 Meningkatnya wirausaha	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS UMKM
		5 Meningkatnya jumlah masyarakat desa yang terlatih dalam kewirausahaan	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINAS PEMDES
		6 Meningkatnya tenaga konstruksi yang bersertifikasi profesi	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
7 Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	33 Peningkatan kompetensi, hubungan industrial dan keselamatan tenaga kerja	1 Meningkatnya pembinaan hubungan industrial	Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
8 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	34 Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	1 Meningkatnya PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Urusan Sosial	DINAS SOSIAL
		2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas rumah bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PERKIM
		3 Meningkatnya Kepala Keluarga perempuan miskin yang diberdayakan	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3ACSKB
		4 Meningkatkan siswa/masyarakat miskin mendapatkan beasiswa	Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
		5 Meningkatkan masyarakat miskin mendapatkan jaminan kesehatan	Urusan Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	35 Peningkatkan pendapatan masyarakat miskin	1 Meningkatnya pembedayaan PMKS	Urusan Sosial	DINAS SOSIAL
		2 Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga miskin yang bekerja disektor perdagangan	Urusan Perdagangan	DISPERINDAG
		3 Meningkatnya kenaikan upah tenaga kerja	Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
9 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa	36 Peningkatan pembangunan desa	Meningkatnya peran kelembagaan desa	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINAS PEMDES
Misi II. Mewujudkan Infrastruktur Dan Konektivitas Daerah Yang Berkualitas				
Tujuan : Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur				
10 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	37 Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatnya Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi yang berfungsi baik	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
		Meningkatkan infrastruktur sumber daya air tersedia dan berfungsi	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
	38 Peningkatan kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan	Meningkatkan rekomendasi pemanfaatan ruang	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan	DINAS PUPR

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
	rencana tata ruang		Ruang	
	39 Peningkatan ketersediaan dan kapasitas SDM Konstruksi	Meningkatkan SDM konstruksi yang terlatih	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
11 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar	40 Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman	1 Meningkatkan infrastruktur keciptakaryaan tersedia dan berfungsi	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PERKIM
		1 Tersusunnya dokumen perencanaan dan teknis TPA Regional	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PERKIM
		2 Meningkatnya infrastruktur TPA regional yang terbangun	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PERKIM
		3 Meningkatnya Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik menuju TPA Regional	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
		4 Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW untuk kepentingan di TPA Regional	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
12 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	41 Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana perhubungan	1 Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan laut yang tersedia dan berfungsi baik	Urusan Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
		2 Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan darat yang tersedia dan berfungsi baik	Urusan Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
		3 Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan udara yang tersedia dan berfungsi baik	Urusan Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
Misi III. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Handal				
Tujuan 1 : Meningkatnya Pendidikan Masyarakat				
13 Meningkatkan Akses Pendidikan Masyarakat	42 Peningkatan akses pelayanan pendidikan	1 Meningkatnya partisipasi sekolah SMA	Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
		2 Meningkatnya partisipasi sekolah SMK	Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
		3 Meningkatnya partisipasi sekolah SLB	Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
		4 Meningkatnya Sekolah penerima BOS	Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
		5 Meningkatnya siswa yang berprestasi di bidang olah raga	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
		6 Meningkatnya jumlah kebijakan pengembangan pendidikan yang diimplementasikan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO KESRA
14 Meningkatkan Kualitas Pendidikan	43 Peningkatan mutu layanan pendidikan	1 Meningkatnya Rata-rata nilai UN SMA	Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
		2 Meningkatnya SMA terakreditasi	Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
		3 Meningkatnya SLB terakreditasi A	Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
		4 Meningkatnya SMK terakreditasi A	Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
		5 Meningkatnya SMA terakreditasi A	Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
		6 Meningkatnya Guru Berkualifikasi S1/D4	Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
		7 Meningkatnya Guru Bersertifikat Pendidik	Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
		8 Meningkatnya perpustakaan terakreditasi	Urusan Perpustakaan	DKPUS
Tujuan 2 : Meningkatkan Pembangunan Sosial Masyarakat				
15 Meningkatkan Kesejahteraan Anak	44 Peningkatan pelayanan terhadap pemberian hak-hak anak	1 Meningkatnya Kabupaten/Kota Layak Anak	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3ACSKB
		2 Meningkatnya anak memiliki identitas	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3ACSKB
		3 Meningkatnya anak terlantar yang mendapatkan hak asuh	Urusan Sosial	DINSOS
16 Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	45 Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang	1 Mengendalikan tingkat kelahiran	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3ACSKB

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
		2 Meningkatnya jumlah masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang teradministrasi kependudukan	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3ACSKB
		3 Meningkatnya Jumlah data base kependudukan tingkat provinsi yang akurat	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3ACSKB
		4 Tersedianya kebijakan grand design kependudukan seProvinsi Kepulauan Bangka Belitung	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3ACSKB
		5 Meningkatnya Perangkat Daerah yang memanfaatkan NIK Data base kependudukan dan KTP dalam meningkatkan pelayanan ke masyarakat	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3ACSKB
17 Meningkatkan Pembangunan Responsif Gender	46 Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender	1 Meningkatnya perempuan yang bekerja	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3ACSKB
		2 Meningkatkan PD menyusun PPRG	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3ACSKB
	47 Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	1 Menurunkan tindak kekerasan terhadap anak	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3ACSKB
		2 Menurunkan tindak kekerasan terhadap perempuan	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3ACSKB
		3 Menurunkan anak yang bermasalah dengan hukum	Urusan Sosial	DINSOS
18 Meningkatkan Kualitas Pemuda	48 Peningkatan Insan pemuda yang mandiri dan berprestasi	Meningkatnya Pemuda Berprestasi	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
		Meningkatnya pemuda mandiri	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
19 Meningkatkan Pembangunan Olahraga	49 Peningkatan prestasi dan peran serta masyarakat dalam berolahraga	Meningkatnya Atlet pelajar Berprestasi yang dibina ditingkat provinsi yang memperoleh medali	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
		Meningkatnya masyarakat berolahraga	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
20 Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	50 Peningkatan rehabilitasi, jaminan dan perlindungan sosial	Meningkatnya PMKS mendapatn rehabilitasi sosial	Urusan Sosial	DINSOS
		Meningkatnya PMKS mendapatn jaminan sosial	Urusan Sosial	DINSOS
		Meningkatnya PMKS mendapatkan perlindungan sosial	Urusan Sosial	DINSOS
Misi IV. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat				
Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat				
21 Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	51 Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	1 Meningkatnya masyarakat sehat	Urusan Kesehatan	DINKES
		2 menurunkan penderita penyakit menular dan tidak menular	Urusan Kesehatan	DINKES
		3 Meningkatnya masyarakat yang terlayani kesehatan	Urusan Kesehatan	DINKES
		4 Meningkatnya SDM kesehatan yang berkompeten	Urusan Kesehatan	DINKES
		5 Meningkatnya Kenaikan Skor PPH Ketersediaan	Urusan Pangan	DINAS PANGAN
		6 Meningkatnya jumlah penduduk rawan pangan yang keluar dari katagori penduduk rawan pangan	Urusan Pangan	DINAS PANGAN
		7 Meningkatnya cakupan pelayanan akses air minum di kawasan permukiman kumuh Provinsi	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PERKIM
		8 Meningkatnya sarana air limbah yang layak di kawasan kumuh Provinsi	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PERKIM
		9 Meningkatnya peserta yang megikuti olahraga rekreasi dan tradisional	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
	52 Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	1 Menurunkan Lama hari rawat (<i>Length of Stay</i>)	Urusan Kesehatan	RSUP

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
		2 Meningkatnya penduduk yang terlayani pelayanan medis	Urusan Kesehatan	RSUP
		3 Meningkatnya pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar	Urusan Kesehatan	DINKES
		4 Meningkatnya penduduk dengan gangguan jiwa, NAPZA dan kesehatan lainnya yang terlayani pelayanan medis kejiwaan	Urusan Kesehatan	RSJ
		5 Meningkatnya penduduk dengan gangguan jiwa, NAPZA dan Kesehatan lainnya yang terlayani pelayanan keperawatan jiwa	Urusan Kesehatan	RSJ
	53 Peningkatan penanganan <i>stunting</i>	Meningkatkan akses terhadap air bersih		
Misi V. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pembangunan Demokrasi				
Tujuan 6 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Berkualitas				
22 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	54 Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah	1 Meningkatnya Tingkat kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jadwal penetapan APBD dan perubahan APBD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BAKUDA
		2 Meningkatnya Prosentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BAKUDA
	55 Meningkatkan tata kelola pengawasan	1 Meningkatnya Prosentase jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan APIP dan BPK yang selesai ditindaklanjuti	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	INSPEKTORAT
	56 Peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	1 Meningkatnya persentase ketepatan jadwal penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BAKUDA
		2 Meningkatnya Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD)	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	BAPPEDA
	57 Peningkatan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah	1 Meningkatnya Persentase peningkatan pengembangan kinerja ASN dan Pemerintah Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
		2 Meningkatnya Persentase Pemenuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan formasi	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
		3 Meningkatnya Persentase ASN yang produktif	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
	58 Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah	1 Meningkatnya presentase perpustakaan terakreditasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Urusan Perpustakaan	DKPus
		2 Meningkatnya persentase Perangkat daerah yang melaksanakan tata laksana sesuai standar	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO ORGANISASI
		1 Meningkatnya persentase kesesuaian antar laporan LAKIP dengan dokumen perencanaan dan evaluasi	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO ORGANISASI
	59 Peningkatan penataan peraturan perundangan dan kebijakan daerah (tambah Biro Ekonomi, Kesra, Biro Pemerintahan)	2 Meningkatnya Persentase Produk hukum daerah yang tidak tumpang tindih	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO HUKUM
		3 Meningkatnya Persentase Jumlah pegawai yang menyampaikan LHKPN	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO ORGANISASI
		4 Meningkatnya Persentase jumlah Organisasi perangkat daerah yang sesuai antar beban kerja organisasi dengan ukuran kelembagaannya	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO ORGANISASI
		5 Meningkatnya Persentase kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO HUMAS
		6 Persentase kesesuaian antar agenda kepala daerah di Jakarta yang layani dengan arah kebijakan pembangunan daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BADAN PENGHUBUNG
		7 Meningkatnya Presentase jumlah administrasi kewilayahan yang terselesaikan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO PEMERINTAHAN
		8 Meningkatnya Presentase peningkatan fungsi lembaga DPRD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	SETWAN
	60 Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	1 Meningkatnya Persentase informasi priortas pembangunan yang terpublikasi	Urusan Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO
		2 Meningkatnya persentase perangkat daerah yang memanfaatkan IT	Urusan Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO
		3 Meningkatkan Persentase data untuk perencanaan yang tersedia	Urusan Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
	61 Peningkatan transparansi Pengadaan barang dan jasa			
	62 Peningkatan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah (BKD)			
	63 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi			
	64 Peningkatan kompetensi ASN (Diklat)			
Tujuan : Meningkatkan Demokrasi Indonesia				
23 Meningkatkan Kebebasan Sipil	61 Peningkatan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi	1 Meningkatnya Persentase masyarakat yang memahami kebebasan sipil	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL
	62 Peningkatan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)	1 Meningkatnya Prosentase jumlah pelanggaran Tibumtranmas yang ditindak sesuai dengan aturan	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP
		2 Menurunnya Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/kota	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL
24 Meningkatkan Hak-Hak Politik	63 Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat	1 Meningkatnya persentase masyarakat yang paham tentang politik	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL
		Meningkatnya Persentase keterwakilan perempuan dilembaga politik	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3ACSKB
		Meningkatnya Persentase Jumlah organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3ACSKB
25 Meningkatkan Peran Lembaga Demokrasi	64 Peningkatan pengembangan Lembaga-Lembaga Demokrasi	1 Meningkatnya Persentase peran lembaga demokrasi	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
		2 Meningkatnya Persentase pembinaan dan pengawasan ormas	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL
Misi VI . Meningkatkan Pengendalian Bencana Dan Kualitas Lingkungan Hidup				
Tujuan : Menurunnya Resiko Bencana				
26 Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana	65 Peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	1 Meningkatnya Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Urusan Sosial	BPBD
		2 Meningkatnya Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Urusan Sosial	DINAS SOSIAL
		3 Meningkatnya Persentase Cadangan Pangan	Urusan Pangan	DINAS PANGAN
		4 Meningkatnya Persentase persentase peningkatan kualitas linmas dalam penanganan bencana dan kebakaran	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP
		5 Meningkatnya Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Penanggulangan Bencana	Urusan Sosial	BPBD
		6 Meningkatnya Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan rujukan	Urusan Kesehatan	RSUP
		7 Meningkatnya persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air di kawasan rawan bencana	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
		8 Meningkatnya Persentase rumah akibat bencana yang tertangani	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PERKIM
		9 Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di kawasan rawan bencana	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
		10 Meningkatnya proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik di kawasan rawan bencana	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
		11 Meningkatnya Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Urusan Sosial	BPBD
		12 Meningkatnya Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa	Urusan Kesehatan	RSJ
	66 Peningkatan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	1 Meningkatnya persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air di kawasan rawan bencana	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
		2 Meningkatnya Persentase DAS kritis yang di kelola	Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAN
		3 Meningkatnya Persentase kegiatan pengelolaan hutan oleh UPTD KPH (%)	Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAN
	67 Peningkatan penataan hilir dan hulu daerah rawan bencana Teluk Bayur	1 Meningkatnya persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
		2 Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
		3 Meningkatnya persentase ketaatan terhadap RTRW di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)				
27 Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	69 Peningkatan pengendalian terhadap kualitas air sungai	1 Persentase penurunan konsentrasi BOD, COD dan TSS	Urusan Lingkungan Hidup	DLH
		2 Persentase Kawasan lindung (%)	Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAN
	70 Peningkatan pengendalian terhadap kualitas udara	1 Persentase penurunan Konsentrasi SO2 dan NO2 yang melebihi Nilai Ambang Batas	Urusan Lingkungan Hidup	DLH
		2 Persentase penurunan luas kebakaran Hutan dan lahan	Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAN
	71 Peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap kawasan hutan	1 Persentase luas kawasan Perhutanan Sosial (%)	Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAN

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
		2 persentase penanganan tindak pidana kehutanan	Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAN
	72 Peningkatan tata kelola kehutanan	1 Menurunya Luas Kerusakan Hutan dan Lahan	Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAN
	73 Peningkatan pemanfaatan kawasan hutan	1 Meningkatkan Persentase luas Kawasan Hutan yang terkelola	Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAN
	74 Peningkatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	1 Jumlah rekomendasi kajian lingkungan hidup	Urusan Lingkungan Hidup	DLH
		2 Persentase luas rehabilitasi hutan dan lahan	Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAN
		3 Persentase lahan kritis di arel IUP yang di reklamasi,	Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAN
		4 Persentase cadangan air tanah yang potensial yang dapat dimanfaatkan	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
		5 Persentase pengelolaan kawasan hutan oleh UPTD KPH	Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAN
		6 Persentase luas kawasan Perhutanan Sosial (%)	Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAN

Tabel VI.7
Arah Kebijakan dan Sasaran Kegiatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 dan 2022

TUJUAN BARU	INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU	STRATEGI BARU	ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2021	2022		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	1	Meningkatnya PDRB sub sektor pertanian	1	Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan			Pertanian	DISTAN
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			Pertanian	DISTAN
					2	Peningkatan Produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan			Pertanian	DISTAN
						PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERIER			Pertanian	DISTAN
						PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			Pertanian	DISTAN
						PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			Pertanian	DISTAN
					3	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Pertanian, Perkebunan dan Peternakan			Pertanian	DISTAN
						PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			Pendidikan	DINDIK
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM
						PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM
						PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			Koperasi dan Usaha Kecil	DINAS KUKM
					4	Peningkatkan peran KUKM dalam			Koperasi dan Usaha Kecil	DINAS KUKM
						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN				

TUJUAN BARU	INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU	STRATEGI BARU	ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				2021	2022		2021	2022		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14
			meningkatkan nilai tambah hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan			KOPERASI			Menengah	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM
			5 Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan produksi dan nilai Tambah hasil produksi Pertanian, perkebunan dan Peternakan			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			Penanaman Modal	DPMPPTSP
						PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM
			6 Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Teknopark Lada Air Gegas			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			Pertanian	DISTAN
						PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
		2 Meningkatkan PDRB Sub sektor perikanan	7 Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
			8 Peningkatan produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan			PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP			Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP

TUJUAN BARU	INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU	STRATEGI BARU	ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2021	2022		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14
			Budidaya							
						PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA			Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
						PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
			9 Peningkatan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya			PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP			Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
						PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA			Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
			10 Peningkatkan peran KUKM dalam meningkatkan nilai tambah hasil Produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
						PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			Urusan Kelautan dan Perikanan	UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN
			11 Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan produksi dan nilai Tambah hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya			PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN			Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
						PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			Penanaman Modal	DPMPTSP

TUJUAN BARU	INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU	STRATEGI BARU	ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2021	2022		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14
						PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
		3 Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	12 Peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata serta Pengembangan ekonomi kreatif			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			Urusan Pariwisata	DISBUDPAR
						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			Urusan Pariwisata	DISBUDPAR
						PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	KUMKM
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
			13 Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana destinasi pariwisata			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Urusan Pariwisata	DISBUDPAR
						PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			Urusan Perhubungan	DISHUB
						PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
						PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI			Urusan Komunikasi dan	DISKOMINFO

TUJUAN BARU	INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU	STRATEGI BARU	ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2021	2022		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14
						PUBLIK			Informatika	
			14	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia pariwisata		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			Urusan Pariwisata	DISBUDPAR
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Urusan Pendidikan	DINDIK
						PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	KUMKM
						PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	KUMKM
			15	Peningkatan Peran serta kepemudaan dan olahraga serta kebudayaan dalam pengembangan pariwisata		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
						PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			Urusan Kebudayaan	DISBUDPAR
						PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN BUDAYA			Urusan Kebudayaan	DISBUDPAR
			16	Peningkatkan peran KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
						PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO			Urusan Perindustrian	DINAS KUMKM

TUJUAN BARU	INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU	STRATEGI BARU	ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				2021	2022		2021	2022		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14
						(UMKM)				
			17	Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam pengembangan pariwisata		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			Penanaman Modal	DPMPPTSP
			18	Pengembangan hinterland dan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Urusan Pariwisata	DISBUDPAR
						PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			Urusan Perhubungan	DISHUB
						PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
			19	Pengembangan hinterland dan Kawasan Peruntukan Pariwisata lintas timur Pulau Bangka		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DISHUB
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
						PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			Urusan Perhubungan	DISHUB
						PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Urusan Pariwisata	DISBUDPAR
			20	Pengembangan hinterland dan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			Urusan Perhubungan	DISHUB

TUJUAN BARU	INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU	STRATEGI BARU	ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2021	2022		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14
			ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang							
						PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
						PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			Urusan Lingkungan Hidup	DLH
			21 Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata Pulau Punai			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			Urusan Perhubungan	DISHUB
						PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
						PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			Urusan Lingkungan Hidup	DLH
						PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Urusan Pariwisata	DISBUDPAR
			22 Pengembangan pintu masuk wisatawan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			Urusan Perhubungan	DISHUB
						PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
						PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Urusan Pariwisata	DISBUDPAR
			23 Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			Urusan Perhubungan	DISHUB

TUJUAN BARU	INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU	STRATEGI BARU	ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				2021	2022		2021	2022		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14
			Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil pendukung pariwisata							
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
						PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Urusan Pariwisata	DISBUDPAR
						PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
		4	Meningkatnya PDRB sektor pertambangan dan energi	24	Meningkatkan produksi dan nilai tambah sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
						PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
				25	Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam pengembangan sumber daya mineral	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			Urusan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				26	Peningkatan ketersediaan energi listrik masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
				27	Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan pemenuhan energi listrik daerah	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			Urusan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TUJUAN BARU	INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU	STRATEGI BARU	ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2021	2022		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14
		5	Meningkatnya PDRB industri pengolahan dan perdagangan	28	Pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			Urusan Pertanahan	DINAS PUPR
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
						PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
				29	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			Urusan Pertanahan	DINAS PUPR
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
						PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
				30	Peningkatan tata kelola industri	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
						PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
				31	Peningkatan tata kelola perdagangan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			Urusan Perdagangan	DISPERINDAG
						PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Urusan Perdagangan	DISPERINDAG
						PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			Urusan Perdagangan	DISPERINDAG
						PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			Urusan Perdagangan	DISPERINDAG

TUJUAN BARU		INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2021	2022		2021	2022		
	1	2		3		4	6	7	8	11	12	13	14
2	Meningkatnya pemerataan pendapatan	Indeks Gini	6	Menurunkan tingkat pengangguran	32	Peningkatan kesempatan kerja			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
									PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA			Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
									PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP			Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
									PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			Urusan Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO
									PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
									PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			7	Meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja	33	Peningkatan Kompetensi, hubungan industrial dan keselamatan tenaga kerja			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
			8	Menurunkan tingkat kemiskinan	34	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			Urusan Sosial	DINSOS
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PUPR
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN

TUJUAN BARU	INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU	STRATEGI BARU	ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2021	2022		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Urusan Kesehatan	DINAS KESEHATAN
			35 Peningkatkan pendapatan masyarakat miskin			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
						PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			Urusan Sosial	DINSOS
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			Urusan Pertanian	DINAS PERTANIAN
						PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			Urusan Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO
		9 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	36 Peningkatan pendapatan masyarakat desa			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINAS PMD
3	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Indeks ketersediaan Infrastruktur	10 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pekerjaan Umum	37 Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
						PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR			Urusan Pekerjaan	DINAS PUPR

TUJUAN BARU	INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU	STRATEGI BARU	ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				2021	2022		2021	2022		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14
						LIMBAH			Umum dan Penataan Ruang	
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
						PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
						PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
						PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
						PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
			38	Peningkatan kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan tata ruang		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
			39	Peningkatan ketersediaan dan kapasitas SDM Konstruksi		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
		11	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar	40	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PRKP

TUJUAN BARU	INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU	STRATEGI BARU	ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2021	2022		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14
						PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PRKP
						PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PRKP
		12	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perhubungan	41	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS			Urusan Perhubungan	DISHUB
						PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			Urusan Perhubungan	DISHUB
						PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN			Urusan Perhubungan	DISHUB
4	Meningkatnya Pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah, (Rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan)	13	Meningkatkan kesempatan pendidikan	42	Peningkatan akses pelayanan pendidikan			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
						PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
		14	Meningkatkan kualitas pendidikan	43	Peningkatan mutu layanan pendidikan	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
						PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
						PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
5	Meningkatnya pembangunan sosial masyarakat	Indeks Pembangunan Sosial	15	Meningkatnya kesejahteraan anak	44	Peningkatan pelayanan terhadap pemberian hak-hak anak			Urusan Pemberdayaan Perempuan dan	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB

TUJUAN BARU	INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU	STRATEGI BARU	ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				2021	2022		2021	2022		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14
									Perlindungan Anak	
						PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PENDIDIKAN
		16 Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	45 Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		17 Meningkatkan pembangunan responsif gender	46 Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			47 Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
						PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS NEGARA			Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
						PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB

TUJUAN BARU	INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU	STRATEGI BARU	ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2021	2022		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14
		18	Meningkatkan kualitas pemuda	48	Peningkatan Insan pemuda yang mandiri dan berprestasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
						PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
		19	Meningkatkan pembangunan olah raga	49	Peningkatan prestasi dan peran serta masyarakat dalam berolahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
		20	Meningkatkan kesejahteraan sosial	50	Peningkatan rehabilitasi, jaminan dan perlindungan sosial	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			Urusan Sosial	DINSOS
						PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Urusan Sosial	DINSOS
						PROGRAM PENANGANAN BENCANA			Urusan Sosial	DINSOS
						PROGRAM PENANGANAN BENCANA			Urusan Sosial	DINSOS
						PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			Urusan Sosial	DINSOS
6	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)	21	Meningkatnya kesehatan masyarakat	51	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Urusan Kesehatan	DINKES
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			Urusan Kesehatan	DINKES
						SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			Urusan Kesehatan	DINKES
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			Urusan Kesehatan	DINKES

TUJUAN BARU	INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU	STRATEGI BARU	ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				2021	2022		2021	2022		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			Urusan Pekerjaan Umum	DINAS PRKP
						PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			Urusan Pangan	DINAS PANGAN
						PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			Urusan Pangan	DISPERINDAG
			52 Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Urusan Kesehatan	DINKES
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			Urusan Kesehatan	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
						PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			Urusan Kesehatan	RSUP
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			Urusan Kesehatan	RSJ
7	Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	22 Meningkatkan tata pemerintahan	53	Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BAKUDA
						PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BAKUDA
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BAKUDA
				54	Peningkatan tata kelola pengawasan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			Fungsi Penunjang	INSPEKTORAT

TUJUAN BARU	INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU	STRATEGI BARU	ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				2021	2022		2021	2022		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14
									Urusan Pemerintahan	
						PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	INSPEKTORAT
			55 Peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan			PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	BAPPEDA
						PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	BAPPEDA
						PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	BAPPEDA
						PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	BAPPEDA
			56 Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah			PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO ORGANISASI
						PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO PEMERINTAHAN
						program pengelolaan arsip			Fungsi Penunjang Urusan	DKPUS

TUJUAN BARU	INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU	STRATEGI BARU	ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2021	2022		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14
									Pemerintahan	
						program perlindungan dan penyelamatan arsip			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	DKPUS
						program perizinan penggunaan arsip			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	DKPUS
			57	Peningkatan penataan peraturan perundangan dan kebijakan daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO HUKUM
						Program Layanan dan Administrasi Keuangan			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	SETWAN
						Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	SETWAN
			58	Peningkatan transparansi Pengadaan barang dan jasa		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO LAYANAN PENGADAAN
			59	Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO LAYANAN PENGADAAN
			60	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BAKUDA

TUJUAN BARU	INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU	STRATEGI BARU	ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2021	2022		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14
						PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			Urusan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Urusan Kesehatan	RSUP
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Urusan Kesehatan	RSJ
			61	Peningkatan kompetensi dan profesional ASN		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			Urusan Kepegawaian	BKPSDM
8	Meningkatnya demokrasi indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	23	Meningkatnya Kebebasan sipil	62	Peningkatan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi			Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL
			24	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	63	Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat			Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL
					64	Peningkatan Penyeleng-garaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)			Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP

TUJUAN BARU	INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU	STRATEGI BARU	ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				2021	2022		2021	2022		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL
						PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.			Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL
		25	Meningkatnya Peran lembaga demokrasi masyarakat	65	Peningkatan pengembangan Lembaga-Lembaga Demokrasi	Program Penanggulangan Kebakaran			Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP
9	Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	26	Meningkatnya Kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana	66	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana			Urusan Sosial	BPBD
						PROGRAM PENANGANAN BENCANA			Urusan Sosial	DINSOS
						PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			Urusan Pangan	DINAS PANGAN
						Program Penanggulangan Kebakaran			Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP

TUJUAN BARU	INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU	STRATEGI BARU	ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2021	2022		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14
			67 Peningkatan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
						PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			Urusan Sosial	BPBD
			68 Peningkatan penataan hilir dan hulu daerah rawan bencana teluk bayur			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
10	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	27 Meningkatnya Pengendalian Lingkungan Hidup	69 Peningkatan pengendalian terhadap kualitas air sungai		Program Perencanaan Lingkungan Hidup			Urusan Lingkungan Hidup	DLH
						Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			Urusan Lingkungan Hidup	DLH
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			Urusan Lingkungan Hidup	DLH
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			Urusan Kehutanan	DLH
			70 Peningkatan pengendalian terhadap kualitas udara			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			Urusan Lingkungan Hidup	DLH
						PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN
			71 Peningkatan pengendalian dan pengawasan hutan			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN

TUJUAN BARU	INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU	STRATEGI BARU	ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2021	2022		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14
			72 Peningkatan tata kelola kehutanan			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN
			73 Peningkatan pemanfaatan kawasan hutan			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN
			74 Peningkatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan			Program Pengelolaan Persampahan			Urusan Lingkungan Hidup	DLH
						PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAN
						Program Peningkatan Geologi dan Air Tanah			Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
						Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam dan Batuan			urusan perhubungan	DINAS ESDM

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN

PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan diperlukan, agar dapat memastikan kemampuan riil keuangan daerah, untuk membiayai program jangka menengah RPJMD 2017-2022 (selama 5 tahun). Untuk itu dilakukan dulu analisis keuangan daerah, karena dengan melakukan analisis keuangan daerah akan diperoleh: (1) Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah dan (2) Kerangka pendanaan dan pedoman indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan daerah.

7.1. Analisis Keuangan Daerah

Keuangan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencakup semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah ini dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah itu diwujudkan dalam APBD, sehingga analisa keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.

Keuangan daerah dalam APBD terdiri dari 3 (tiga) elemen utama, yaitu Pendapatan, Belanja serta Pembiayaan.

7.1.1. Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan.

Selama lima tahun sebelumnya (2014-2018) realisasi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel VII.1, berikut ini:

Tabel VII.1

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	1.719.774.423.456,42	1.886.998.635.504,14	1.949.866.524.266,77	2.251.024.652.420,48	2.556.977.711.924,35
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	563.108.840.861,42	571.802.890.055,14	574.258.443.819,77	709.832.181.818,48	850.441.774.831,35
1.1.1.	Pajak Daerah	508.844.014.371,82	506.944.936.060,22	507.983.460.531,72	629.136.457.212,39	787.235.420.038,83
1.1.2.	Retribusi Daerah	9.357.405.765,00	11.520.365.059,00	8.651.866.891,72	5.434.540.818,00	7.613.352.047,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	7.500.000.000,00	5.243.416.236,78	5.613.342.582,77	5.306.417.427,05	5.114.092.291,88
1.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	44.138.193.812,09	48.094.172.699,14	52.009.773.813,56	69.954.766.361,04	50.478.910.453,64
1.2.	Dana Perimbangan	1.034.374.722.920,00	1.130.400.495.449,00	1.126.284.913.345,00	1.537.241.446.289,00	1.694.218.759.243,00
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	184.182.116.920,00	188.157.236.449,00	142.860.016.345,00	120.836.218.678,00	215.555.879.603,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	806.820.146.000,00	897.887.443.000,00	905.526.208.000,00	980.297.314.000,00	1.018.435.174.809,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	43.372.460.000,00	44.355.816.000,00	77.898.689.000,00	438.826.469.824,00	460.227.704.831,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	131.522.785.000,00	184.795.250.000,00	249.323.167.102,00	1.232.468.100,00	12.317.177.850,00

Sumber :Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Tabel VII.1 merupakan data tentang realisasi pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014-2018. Pada tahun 2014, pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp1.719.774.423.456,42 dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp563.108.840.861,42. Kemudian pada tahun 2015, pendapatan daerah menjadi Rp1.886.998.635.504,00 atau naik sebesar Rp167.224.212.047,72 atau tumbuh sebesar 9,72 %. Pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus naik dengan pendapatan rata-rata sebesar 10,52 persen.

Berdasarkan pada tabel VII.1, pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum dengan rata-rata sebesar Rp921.793.257.161,80 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,071 persen. Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami peningkatan yang signifikan dari Rp43.372.460.000,00 pada tahun 2014 menjadi Rp460.227.704.831,00 atau dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 136,52 persen selama 5 tahun. Persentase DAK besar ini disebabkan oleh peningkatan yang signifikan pada tahun anggaran 2016-2017 dengan DAK pada tahun 2016 sebesar Rp77.898.689.000,00 menjadi Rp 438.826.469.824,00 atau naik sebesar Rp360.927.780.824,00. Rata-rata pendapatan dari DAK selama 5 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp212.936.227.931,00.

Setelah dilakukan analisis realisasi pendapatan selama lima tahun sebelumnya (2014-2018), termasuk analisis perkembangan neraca daerah serta peluang-peluang optimalisasi penerimaan di masa datang, maka disusunlah proyeksi pendapatan daerah lima tahun kedepan seperti pada tabel VII.2 berikut ini.

Tabel VII.2
Proyeksi dan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

No	Uraian	Realisasi (Rp)			Proyeksi (Rp)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN DAERAH	2.251.024.652.420,48	2.556.977.711.924,35	2.763.433.155.880,37	2.874.236.165.757,38	2.940.990.420.387,71	3.007.744.675.017,04
1.1	Pendapatan asli daerah	709.832.181.818,48	850.441.774.831,35	884.562.215.880,37	963.634.368.637,38	1.030.388.623.267	1.097.142.877.896,00
1.1.1	Pajak daerah	629.136.457.212,39	787.235.420.038,83	790.139.435.584,04	850.307.137.560,93	907.314.557.672	964.465.763.799,68
1.1.2	Retribusi daerah	5.434.540.818,00	7.613.352.047,00	9.315.527.150,00	16.194.191.546,00	17.333.655.676,17	18.616.905.823,41
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.306.417.427,05	5.114.092.291,88	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	69.954.766.361,04	50.478.910.453,64	79.607.253.146,33	91.633.039.530,45	99.524.730.893,17	108.560.208.272,95
1.2	Dana Perimbangan	1.537.241.446.289,00	1.694.218.759.243,00	1.766.282.638.000,00	1.766.183.450.000	1.766.183.450.000	1.766.183.450.000
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	120.836.218.678,00	215.555.879.603,00	228.805.440.000,00	140.897.249.000,00	140.897.249.000,	140.897.249.000,
1.2.2	Dana alokasi umum	980.297.314.000,00	1.018.435.174.809,00	1.046.862.622.000,00	1.052.377.716.000,00	1.052.377.716.000,00	1.052.377.716.000,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	438.826.469.824,00	460.227.704.831,00	490.614.576.000,00	572.908.485.000,00	572.908.485.000,00	572.908.485.000,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	1.232.468.100,00	12.317.177.850,00	111.588.302.000,00	144.418.347.120,00	144.418.347.120,00	144.418.347.120,00
1.3.1	Hibah	0,00	0,00	86.102.500.000,00	101.004.857.120,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	0,00	0,00	25.485.802.000,00	43.413.490.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Sumbangan pihak ketiga	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Pendapatan lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.251.024.652.420,48	2.556.977.711.924,35	2.763.433.155.880,37	2.874.236.165.757,38	2.940.990.420.387,71	3.007.744.675.017,04

Sumber :Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Tabel VII.2 menunjukkan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022. Secara keseluruhan, pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp 2.251.024.652.420,48 kemudian naik sebesar Rp305.953.059.503,87 dengan tingkat pertumbuhan pendapatan dari tahun sebelumnya sebesar 14 persen. Setelah itu, pada tahun 2022 pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diproyeksikan mencapai 3.007.313.316.965,83 dengan asumsi pendapatan dana perimbangan dari pusat sama seperti pada tahun 2020. Dengan demikian, pada tahun 2022 rata-rata pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diproyeksikan akan tumbuh sebesar 6,05 % dari tahun 2017.

Selain itu, pada tabel VII.2 ini menunjukkan beberapa item yang menjadi sumber pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017-2022. Dana perimbangan dari pusat masih menjadi sumber pendapatan yang besar bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2017, dana perimbangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp1.539.960.002.502,00. Kemudian pada tahun 2019, dana perimbangan ini naik menjadi Rp1.766.282.638.000,00 atau rata-rata pertumbuhan sebesar 14 persen dari tahun 2017. Pada tahun 2020, terjadi penurunan dana perimbangan dari tahun 2017 sebesar Rp99.188.000,00 dan hal terjadi akibat adanya penurunan penerimaan dana bagi hasil (DBH).

Sektor kedua yang menjadi penyumbang terbesar pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah pajak daerah. Pada tahun 2017, pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp629.136.457.212,39,00. Pada tahun 2018, pajak daerah mengalami kenaikan sebesar Rp158.098.962.826,44 dari tahun 2017 dan terus menaik sebesar Rp2.904.015.545,21 pada tahun 2019. Kenaikan pajak daerah yang meningkat ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam pemutihan pajak kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua dan empat. Pada tahun 2022, diproyeksikan pajak daerah naik dari tahun 2017 dengan analisis berdasarkan pada realisasi pada tahun 2017-2019. Diproyeksikan rata-rata pertumbuhan pajak daerah naik sebesar 9,22 persen dari tahun 2017-2022.

Selain dari pajak daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga membuat kebijakan terkait peningkatan pendapatan daerah melalui sektor retribusi dengan memperbaharui peraturan daerah terkait dengan sumber retribusi baru. Pada tahun 2017 retribusi daerah sebesar Rp5.434.540.818,00 dan naik sebesar 7.613.352.47 pada tahun 2018 serta Rp9.315.527.150,00. Pada tahun 2020, retribusi ditargetkan naik sebesar Rp 16.194.191.546,00 atau naik sebesar Rp6.878.664.396,00 dari tahun 2019 sehingga realisasi retribusi daerah pada akhir 2020 menjadi lebih baik.

7.1.2. Belanja Daerah

Belanja daerah dan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lima tahun (2014-2018) sebelumnya, perkembangan dapat dilihat data-datanya pada Tabel VII.3 berikut ini :

Tabel VII.3
Realisasi Belanja Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Realisasi
1	2
2014	1.596.086.858.479,20
2015	1.869.958.486.295,70
2016	2.069.868.292.386,32
2017	2.359.078.163.818,47
2018	2.364.345.563.586,80
Jumlah	10.259.337.364.566,50

Sumber :Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Dari tabel VII.3 menunjukkan bahwa belanja daerah dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan. Belanja daerah merupakan pembiayaan daerah yang meliputi belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa, penggunaan SILPA daerah dan belanja hibah. Pada tahun 2014, belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp1.596.086.858.479,20 dan naik sebesar Rp768.258.705.107,60 dalam kurun waktu 4 tahun.

7.2. Kerangka Pendanaan

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah disusun dengan memperhatikan pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik akan mewujudkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Saat ini telah ditetapkan kebijakan *money follow priority program*, bukan lagi *money follow function*.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sumber penerimaan daerah Provinsi terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA); Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pengelolaan pendapatan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode 2012-2017 diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan yang berlaku; (2)

Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan asas pemerataan pembangunan; dan (4) meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak yang taat.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis pendapatan asli daerah terdapat beberapa perubahan, yaitu: jenis pajak daerah menjadi 5 jenis meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan untuk Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Untuk Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah, sesuai dengan Undang-Undang tersebut mulai Tahun 2011 diserahkan pengelolaannya oleh kabupaten/kota.

7.2.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Strategi belanja daerah tahun 2017-2022 diarahkan untuk mendukung:

- a. Pencapaian pembangunan nasional 2015-2019 dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional (NAWACITA) dan RPJMN 2020-2024;
- b. *Dedicated program* Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Peningkatan sasaran IPM. Untuk itu, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian IPM guna memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur.

Untuk itu, kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2017-2022 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, ekonomis, efisien dan efektif, yaitu:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka mendukung *dedicated program* Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.
2. Belanja daerah dialokasikan dalam rangka pelaksanaan urusan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
3. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan

profil risiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.

4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
6. Pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.
8. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis 'desa membangun', pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan.
9. Penurunan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan.
10. Dalam mendukung pengembangan aktivitas pembangunan ekonomi di pedesaan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
11. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung sebesar 30%, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.
12. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.
13. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan.
14. Pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB)
15. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada

Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- d. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- e. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten dan kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten dan kota dalam melaksanakan otonomi daerah;
- f. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota maupun kecamatan/kelurahan/Pemerintah Desa yang digunakan untuk melaksanakan fungsi provinsi yang bersifat khusus dari Provinsi. Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota maupun kecamatan/kelurahan/Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

Selain itu juga terdapat peluang bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi

daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, akan mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi:

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD;
2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran;
3. Penyertaan modal disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

Pengeluaran periodik, wajib dan mengikat serta prioritas utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018 sebagaimana ditampilkan pada Tabel VII.4.

Tabel VII.4
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Belanja Tidak Langsung	855.780.981.423,84	1.080.851.837.395,72	1.209.394.930.768,63	1.330.059.029.641,26	1.360.176.219.327,02	12,61
1	Belanja Pegawai	274.339.635.936,42	312.375.890.443	396.188.131.149,20	620.836.142.868,21	657.760.322.587,62	25,84
2	Belanja Bunga	0,00		-	-	-	
3	Belanja Subsidi	0,00		0,00		0,00	0,00
4	Belanja Hibah	167.022.782.500,00	257.790.335.224,00	403.743.237.430,00	254.263.301.000,00	267.958.447.520,00	19,83
5	Belanja Bantuan Sosial	745.500.000,00	666.700.000,00	717.060.000,00	700.000.000,00	479.075.000,00	(9,24)
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	212.859.716.663,42	303.413.474.847,19	156.076.110.183,43	351.012.561.851,05	261.064.334.164,64	(39,36)
7	Belanja Bantuan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	200.796.461.884,00	206.510.260.515,00	251.916.010.142,00	102.528.477.024,00	170.854.282.754,76	8,04
8	Belanja Tidak Terduga	16.884.440,00	95.176.366,45	754.381.864,00	718.546.898,00	59.757.300,00	6,06
B	Belanja Langsung	740.305.877.055,36	789.106.648.899,98	860.473.361.617,69	1.029.019.134.177,21	1.004.169.344.259,78	8,20
1	Belanja Pegawai	70.712.733.013,01	81.446.272.543,00	99.601.380.686,93	143.373.444.944,00	36.915.135.524,00	1,79
2	Belanja Barang dan Jasa	364.039.655.088,00	473.942.522.699,00	531.095.000.241,86	517.435.756.892,24	651.856.375.641,14	16,41
3	Belanja Modal	305.553.488.954,35	233.717.853.657,98	229.776.980.688,90	368.209.932.340,97	315.397.833.094,64	5,18
C	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	5.000.000.000,00	-	100
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-	-
3	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah	-	5.000.000.000,00	-	5.000.000.000,00	-	100
4	Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (A+B+C)	1.596.086.858.479,20	1.874.958.486.295,70	2.069.868.292.386,32	2.364.078.163.818,47	2.364.345.563.586,80	10,52

Sumber: Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

7.2.2. Proyeksi Data Masa Lalu

Jika memperhatikan kinerja pendapatan daerah pada 2017-2022, pendapatan daerah akan diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Walaupun kondisi perekonomian Bangka Belitung dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan memaksimalkan strategi dan kebijakan pendapatan daerah yang telah diuraikan diatas dalam meningkatkan pertumbuhan dan realisasi PAD. Hal ini dapat dipahami karena disparitas PAD memiliki kecenderungan yang tinggi akibat kepastiannya masih rendah. Selama ini pendapatan daerah masih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor yang bersifat *closed list* dan pertumbuhannya memiliki keterbatasan (terbatas oleh ketersediaan ruang dan sarana prasarana infrastruktur), sehingga rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Jika memperhatikan proyeksi perekonomian nasional yang akan mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7%-8,0% pada periode 2017-2022 dengan asumsi perekonomian global tidak akan mengalami penurunan dalam periode 2010, stabilitas sektor keuangan dunia sudah pulih, serta harga komoditas pangan dan energi menyesuaikan secara bertahap dan tidak mengalami gejolak tajam, maka pendapatan daerah pada tahun 2017-2022 diperkirakan akan dapat memberikan kontribusi terhadap belanja daerah rata-rata sebesar 84,62-89,90 persen.

Tabel VII.5
Prediksi Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah
Provinsi Kep Bangka Belitung Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Daerah	Pajak Daerah	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	2.251.024.652.420,48	629.136.457.212,39	27,94
2018	2.556.977.711.924,35	787.235.420.038,83	30,78
2019	2.762.433.155.880,37	790.139.435.584,04	28,60
2020	2.874.236.165.757,38	850.307.137.560,93	29,58
2021	2.940.990.420.387,71	907.314.557.672,77	30,85
2022	3.007.313.316.965,83	964.321.977.782,61	32,0

Sumber: Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Prediksi Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu 2017-2022 diasumsikan terjadi peningkatan rata-rata sebesar 6,05 persen. Sedangkan untuk pajak daerah diprediksi akan mengalami kenaikan secara bertahap rata-rata sebesar 9,22 persen pertahun, dengan asumsi kondisi perekonomian stabil. Pada tahun 2017 kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 27,94 persen dan 2018 sebesar 30,78 persen. Meskipun kontribusi pajak di tahun 2019 mengalami penurunan namun sampai dengan tahun 2020 terus mengalami kenaikan dan diproyeksi akan terus mengalami kenaikan

Demikian juga dengan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD, dengan asumsi tumbuh rata-rata sebesar 29,98 persen. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD ditahun 2017 hanya sebesar 0,77 namun ditahun berikutnya selalu mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan pelayanan terhadap masyarakat semakin meningkat.

Tabel VII.6
Realisasi dan Prediksi PAD dan Retribusi Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022

Tahun	PAD	Retribusi Daerah	Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	709.832.181.818,48	5.434.540.818,00	0,77
2018	850.441.774.831,35	7.613.352.047,00	0,90
2019	884.562.215.880,37	9.315.527.150,00	1,05
2020	963.634.368.637,38	16.194.191.546,00	1,68
2021	1.030.388.623.267,71	17.333.655.676,17	1,68
2022	1.096.711.519.845,83	18.473.119.806,34	1,68

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Dalam era otonomi daerah, proporsi belanja daerah disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah tersebut. Diperkirakan dalam periode 2017–2022, kebutuhan belanja daerah akan mengalami kenaikan sebesar 9–15 persen. Hal ini disebabkan harapan masyarakat Bangka Belitung terhadap keseimbangan pembangunan antara desa dan kota serta mendukung pencapaian pembangunan nasional 2017-2022 dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional (NAWACITA). Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah menyampaikan Visi dan Misi Pembangunan yang merupakan *dedicated program* sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat Bangka Belitung. Untuk itu, proporsi belanja langsung dan tidak langsung dalam periode 2017-2022 diupayakan sebesar 60-65 persen dan 35-40 persen.

Tabel VII.7
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

TAHUN	JUMLAH BELANJA
(1)	(2)
2017	2.359.078.163.818,47
2018	2.364.345.563.586,80
2019	3.064.703.819.549,99
2020	3.062.554.203.541,42
2021	2.810.096.306.561,47
2022	2.967.325.392.508,68

Sumber: Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Kondisi pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun Tahun 2017-2022 dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran, sedangkan sisanya untuk melakukan investasi.

Untuk realisasi sisa lebih perhitungan anggaran pemerintah daerah, dengan kurun waktu yang sama pada Tahun 2017-2022, gambarannya seperti terlihat pada Tabel VII.8.

Tabel VII.8
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Lalu (SILPA) pada APBD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

Tahun	Realisasi
(1)	(2)
2018	86.078.107.369,51
2019	0
2020	0
2021	0
2022	0
Jumlah	86.078.107.369,51

Sumber: Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

7.2.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Jika memperhatikan kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada, maka Rencana alokasi pengeluaran prioritas adalah sebagai berikut:

- a. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (*dedicated*) Kepala daerah serta melaksanakan amanat pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, RPJMN 2020-2024 dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Selain itu program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan program prioritas di tingkat PD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi PD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.
- c. Rencana alokasi pengeluaran prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan ASN, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III baru akan dipenuhi setelah pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu.

Adapun kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel VII.9 berikut:

Tabel VII.9
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pendapatan	2.386.297.015.485,16	2.487.065.640.565,87	2.709.871.336.952,00	2.874.236.165.757,38	3.036.882.549.181,45	3.199.528.932.605,53
2	Pencairan dana cadangan (sesuai perda)	0	0				
3	Sisa lebih riil perhitungan anggaran (defisit)	(212.692.026.730,06)	(109.638.515.332,24)	(212.150.362.880,72)	155.590.452.215,95	278.351.278.531,28	401.112.104.846,62
	Total penerimaan	2.173.604.988.755,10	2.377.427.125.233,63	2.497.720.974.071,28	3.029.826.617.973,33	3.315.233.827.712,73	3.600.641.037.452,15
	Dikurangi						
4	Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	1.847.505.552.264,82	1.840.783.755.975,91	2.136.400.788.419	2.187.020.028.675	2.346.143.228.447,44	2.412.897.483.077,77
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	326.099.436.490,28	536.643.369.257,72	361.320.185.652,56	842.806.589.298,33	969.090.599.265,29	1.187.743.554.374,38

Sumber: Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang terus bertambah hingga tahun 2022, demikian juga dengan proyeksi jumlah pengeluaran terus meningkat, maka terdapat sejumlah pertimbangan alokasi belanja ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu pengetatan dalam memilah program dan kegiatan sesuai urutan prioritasnya.
2. Perlunya peningkatan keperansertaan sektor swasta dalam pendanaan pembangunan, baik melalui skenario kemitraan pemerintah dan sektor swasta (*public private partnership*) maupun potensi *corporate social responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah, yang tersebar diberbagai lapangan usaha di Kepulauan Bangka Belitung;
3. Reorganisasi struktur organisasi pemerintah daerah yang semakin relevan dengan posisi dan kedudukan pemerintahan provinsi yang lebih difokuskan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan pada skala regional dan lintas kabupaten/kota. Dengan reorganisasi ini, akan diperlukan besaran organisasi yang lebih efisien serta gugus penugasan yang makin ahli dengan penguatan jabatan fungsional di berbagai lini.

Adapun rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagaimana diuraikan pada Tabel VII.10.

Tabel VII.10
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022

No	Uraian	Proyeksi				
		2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	2.487.065.640.565,87	2.709.871.336.952,00	2.874.236.165.757,38	3.036.882.549.181,45	3.199.528.932.605,53
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I					
II.a	Belanja Langsung	1.135.511.218.578,25	1.396.956.337.772,00	1.378.726.195.007,00	1.448.857.028.490,84	1.426.618.916.832,58
II.b	Pembentukan dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dikurangi:					
II.c	Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Total rencana pengeluaran prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)	1.135.511.218.578,25	1.396.956.337.772,00	1.378.726.195.007,00	1.448.857.028.490,84	1.426.618.916.832,58
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	1.351.554.421.987,62	1.312.914.999.180,00	1.495.509.970.750,38	1.588.025.520.690,61	1.772.910.015.772,95
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.a	Belanja Tidak Langsung	705.272.537.397,66	776.087.070.545,72	808.293.833.668,00	897.286.199.956,00	986.278.566.245,19
	Dikurangi:					
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)	705.272.537.397,66	776.087.070.545,72	808.293.833.668,00	897.286.199.956,00	986.278.566.245,19
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)	646.281.884.589,96	536.827.928.634,28	687.216.137.082,38	690.739.320.734,61	786.631.449.527,76

Sumber: Proyeksi dan Perhitungan Bakuda, 2020

Selanjutnya Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022, digambarkan seperti terlihat pada Tabel VII.11.

Tabel VII.11
Realisasi dan Proyeksi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

No	Uraian	Realisasi (Rp)			Proyeksi (Rp)			Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	PENDAPATAN DAERAH	2.251.024.652.420,48	2.556.977.711.924,35	2.762.433.155.880,00	2.874.236.165.757,38	0	0	10.444.671.685.982,20
1.1	Pendapatan Asli Daerah	709.832.181.818,48	850.441.774.831,35	884.562.215.880,37	963.634.368.637,38	0	0	2.558.028.766.336,23
1.1.1	Pajak daerah	629.136.457.212,39	787.235.420.038,83	790.139.435.584,04	850.307.137.560,93	0	0	3.056.818.450.396,19
1.1.2	Retribusi daerah	5.434.540.818,00	7.613.352.047,00	9.315.527.150,00	16.194.191.546,00	0	0	38.557.611.561,00
1.1.3	Hasil pengelolaan keayaan daerah yang dipisahkan	5.306.417.427,05	5.114.092.291,88	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0	0	21.420.509.718,93
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	69.954.766.361,04	50.478.910.453,64	79.607.253.146,33	91.633.039.530,45	0	0	291.673.969.491,46
1.2	Dana Perimbangan	1.539.960.002.500	1.694.218.759.243,00	1.766.282.638.000,00	1.766.183.450.000,00	0	0	6.763.926.293.532,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	120.836.218.678,00	215.555.879.603,00	228.805.440.000	140.897.249.000,00	0	0	706.094.787.281,00
1.2.2	Dana alokasi umum	980.297.314.000,00	1.018.435.174.809,00	1.046.862.622.000,00	1.052.377.716.000,00	0	0	4.097.972.826.809,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	438.826.469.824,00	460.227.704.831,00	490.614.576.000,00	572.908.485.000,00	0	0	1.962.577.235.
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	1.232.468.100,00	12.317.177.850,00	111.588.302.000,00	144.418.347.120,00	0	0	269.556.295.070,00
1.3.1	Hibah	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Dana darurat	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5	Bantuan keuangan dari pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0	0

No	Uraian	Realisasi (Rp)			Proyeksi (Rp)			Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	lainnya							
1.3.6	Sumbangan pihak ketiga	0	0	0	0	0	0	0
1.3.7	Pendapatan lainnya	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah pendapatan	2.251.024.652.420,48	2.556.977.711.924,35	2.762.433.155.880,37	2.874.236.165.757,38	0	0	10.444.671.685.982,60
2	BELANJA DAERAH	2.359.078.163.818,47	2.364.345.563.586,80	3.064.703.819.550,99	2.718.645.713.541,43	0	0	10.506.773.260.496,70
2.1.1	Belanja pegawai	620.836.142.868,21	659.760.332.587,62	831.673.001.025,99	808.293.833.668,00	0	0	2.920.563.300.149,82
2.1.2	Belanja bunga	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Belanja subsidi	0	812.500.000,00	0	3.000.000.000,00	0	0	3.812.500.000,00
2.1.4	Belanja hibah	254.263.301.000,00	267.958.447.520,00	289.082.219.060,00	114.974.840.000,00	0	0	926.278.807.580,00
2.1.5	Belanja bantuan sosial	700.000.000	479.075.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0	0	2.679.075.000,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	351.012.561.851,05	261.064.334.164,64	446.568.577.113,00	350.006.099.384,43	0	0	1.408.651.572.513,12
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	102.528.477.024,00	170.854.282.754,76	95.095.479.172,00	57.894.745.482,00	0	0	426.372.984.432,76
2.1.8	Belanja tidak terduga	718.546.898,00	59.757.300,00	4.578.205.407,00	5.000.000.000,00	0	0	10.356.509.605,00
2.2	Belanja langsung	1.029.019.134.177,21	1.004.169.344.259,78	1.396.956.337.772,00	1.378.726.195.007,00	0	0	4.808.871.011.215,69
2.2.1	Belanja pegawai	143.373.444.944,00	36.915.135.524,00	68.572.393.000,00	224.263.920.234,57	0	0	473.134.893.702,57
2.2.2	Belanja barang dan jasa	517.435.756.892,24	651.856.375.641,14	850.980.385.728,00	778.337.336.149,04	0	0	2.798.609.854.410,42
2.2.3	Belanja Modal	368.209.932.340,97	315.397.833.094,64	477.403.559.044,00	376.114.938.623,39	0	0	1.537.126.263.103,00
	Jumlah belanja	2.359.078.163.818,47	2.364.345.563.586,80	3.064.703.819.549,99	2.718.645.713.541,43	0	0	10.506.773.260.496,70
	Surplus/(defisit)	-108.053.511.397,99	192.632.148.337,55	-302.270.663.669,62	155.590.452.215,95	0	0	-62.101.574.514,11
	Penerimaan pembiayaan			302.270.663.669,62				
	Sisa lebih penghitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	108.053.511.397,99	192.632.148.337,55	302.270.663.669,62	155.590.452.215,95	0	0	758,546.775.621,11
	Pencairan dana cadangan	0	0	0	0	0	0	0

No	Uraian	Realisasi (Rp)			Proyeksi (Rp)			Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0
	Penerimaan pinjaman daerah	0	0	0	0	0	0	0
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0	0	0	0	0	0
	Penerimaan piutang daerah	0	0	0	0	0	0	0
	Penggunaan Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA)	0	0	0	0	0	0	0
	Pencairan dana cadangan	0	0	0	0	0	0	0
	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0	0	0	0	0	0
	Penerimaan piutang daerah	0	0	0	0	0	0	0
	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah penerimaan pembayaran	108.053.511.397,99	192.632.148.337,55	302.270.663.669,62	155.590.452.215,95	0	0	758,546.775.621,11
	Penyertaan modal (investasi) daerah	0	0	0	0	0	0	0
	Pembayaran pokok utang	0	0	0	0	0	0	0
	Pemberian pinjaman daerah	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah pengeluaran pembiayaan	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah pembiayaan netto	108.053.511.397,99	109.638.515.332,07	302.270.663.669,62	155.590.452.215,95	0	0	758,546.775.621,11
	Sisa Lebih Pembiayaan anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0	0	0	0	0	0	0

Tabel VII.12
Realisasi dan Proyeksi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

No	Uraian	Proyeksi		Jumlah
		2021	2022	
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN DAERAH	2.883.443.678.214,87	2.892.240.376.817,39	5.775.684.055.032,26
1.1	Pendapatan asli daerah	972.841.881.093,87	981.638.579.696,39	1.954.480.460.790,26
1.1.1	Pajak daerah	850.483.494.524,53	851.249.037.634,17	1.701.732.532.158,70
1.1.2	Retribusi daerah	17.333.655.676,17	18.473.119.806,34	35.806.775.482,51
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	11.000.000.000,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	99.524.730.893,17	106.416.422.255,88	205.941.153.149,05
1.2	Dana Perimbangan	1.766.183.450.000,00	1.766.183.450.000,00	3.532.366.900.000,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	140.897.249.000,00	140.897.249.000	281.794.498.000,00
1.2.2	Dana alokasi umum	1.052.377.716.000,00	1.052.377.716.000	2.104.755.432.000,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	572.908.485.000,00	572.908.485.000	1.145.816.970.000,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	144.418.347.121,00	144.418.347.121,00	288.836.694.242,00
1.3.1	Hibah	0	0	0
1.3.2	Dana darurat	0	0	0
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	0	0	0
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	0	0	0
1.3.5	Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya	0	0	0
1.3.6	Sumbangan pihak ketiga	0	0	0
1.3.7	Pendapatan lainnya	0	0	0
	Jumlah pendapatan	2.883.443.678.214,87	2.892.240.376.817,39	5.775.684.055.032,26
2	BELANJA DAERAH	2.936.443.678.214,87	2.976.240.376.817,39	5.912.684.055.032,26

No	Uraian	Proyeksi		Jumlah
		2021	2022	
1	2	3	4	5
2.1	Belanja Operasi	2.169.841.203.116,21	2.236.405.041.664,90	4.406.246.244.781,11
2.1.1	Belanja Pegawai	1.153.277.414.102,35	1.212.995.672.596,78	2.366.273.086.699,13
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	813.392.918.981,29	820.143.421.226,94	1.633.536.340.208,23
2.1.3	Belanja Bunga	0	0	0
2.1.4	Belanja Subsidi	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	6.000.000.000,00
2.1.5	Belanja Hibah	199.420.870.032,57	199.515.947.841,18	398.936.817.873,75
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	750.000.000,00	750.000.000,00	1.500.000.000,00
2.2	Belanja Modal	379.472.895.363,80	348.685.449.106	728.158.344.469,80
2.3	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00
2.4	Belanja Transfer	382.129.579.734,86	386.149.886.046,88	768.279.465.781,74
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	249.875.788.588,53	253.805.774.975,90	503.681.563.564,43
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	132.253.791.146,33	132.344.111.070,98	264.597.902.217,31
	Jumlah Belanja daerah	2.936.443.678.214,87	2.976.240.376.817,39	5.912.684.055.032,26
	Surplus/(defisit)	-53.000.000.000,00	-84.000.000.000,00	-137.000.000.000,00
	Penerimaan pembiayaan	0	0	
	Sisa lebih penghitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	53.000.000.000,00	84.000.000.000,00	137.000.000.000,00
	Pencairan dana cadangan	0	0	0
	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0
	Penerimaan pinjaman daerah	0	0	0
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0	0
	Penerimaan piutang daerah	0	0	0
	Penggunaan Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA)	0	0	0
	Pencairan dana cadangan	0	0	0

No	Uraian	Proyeksi		Jumlah
		2021	2022	
1	2	3	4	5
	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0	0
	Penerimaan piutang daerah	0	0	0
	Pembentukan dana cadangan	0	0	0
	Jumlah penerimaan pembayaran	0	0	0
	Penyertaan modal (investasi) daerah	0	0	0
	Pembayaran pokok utang	0	0	0
	Pemberian pinjaman daerah	0	0	0
	Jumlah pengeluaran pembiayaan	0	0	0
	Jumlah pembiayaan netto	53.000.000.000,00	84.000.000.000,00	137.000.000.000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0	0	0

Sumber : Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Kebijakan belanja daerah khususnya belanja operasi tahun anggaran 2017-2022 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, ekonomis, efisien dan efektif, yaitu:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka mendukung *dedicated program* Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka mendukung program prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
3. Belanja daerah dialokasikan dalam rangka pelaksanaan urusan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
4. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil risiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.
5. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
7. Pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, peningkatan akses terhadap pendidikan serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.
9. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis 'desa membangun', pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan.
10. Pengembangan sektor pariwisata terutama pada daerah-daerah tujuan wisata, pemberdayaan masyarakat di daerah tujuan wisata, budaya dan olah raga dalam mendukung pengembangan pariwisata serta pemenuhan sarana prasarana keolah ragaan dalam mendukung pariwisata.
11. Penurunan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan.

12. Dalam mendukung pengembangan aktivitas pembangunan ekonomi di pedesaan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
13. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung sebesar 30%, pengendalian bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.
14. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.
15. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan.
16. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
 - d. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
 - e. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten dan kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten dan kota dalam melaksanakan otonomi daerah;
 - f. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota maupun kecamatan/kelurahan/Pemerintah Desa yang digunakan untuk melaksanakan fungsi provinsi yang bersifat khusus dari Provinsi. Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota maupun kecamatan/kelurahan/Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung, yaitu mendukung keseimbangan pembangunan desa dan kota. Secara khusus belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan melalui Program Gerakan Pembangunan Memajukan Desa (GERBANG MASA)

Kemudian dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah untuk menggantikan Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005. Seiring dengan perubahan peraturan tersebut maka, uraian dalam postur keuangan daerah berubah sesuai dengan Peraturan Pengelolaan Keuangan daerah yang baru seperti yang tertera dalam tabel VII.9. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdapat perubahan dalam uraian belanja daerah. Perubahan uraian tersebut yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Uraian perubahan tersebut untuk mengganti uraian pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yaitu belanja langsung dan tidak langsung.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bunga dan belanja subsidi dimasukkan dalam belanja operasi. Untuk belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan dimasukkan dalam belanja transfer. Sedangkan untuk belanja modal dan belanja tidak terduga menjadi uraian belanja sendiri.

Dalam melaksanakan program Perangkat Daerah kita senantiasa mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Dengan demikian maka program yang disusun memberi keyakinan akan dapat dibiayai sehingga mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya gambaran kerangka pendanaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel VII.13.

Tabel VII.13
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2018-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kode	Kapasitas Riil/Belanja	Proyeksi				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kapasitas Riil Keuangan					
	BELANJA					
	Belanja Tidak Langsung	1.360.176.219.327,02	1.667.747.481.777,99	1.339.919.518.534,43	1.591.417.712.871,27	1.680.694.400.133,25
	Belanja Pegawai	659.760.322.587,62	831.673.001.025,99	808.293.833.668,00	897.286.199.956,60	986.278.566.245,19
	Belanja Bunga	0,00	0,00			
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	Belanja Hibah	267.958.447.520,00	289.082.219.060,00	114.974.840.000,00	233.487.690.667,14	233.582.464.324,93
	Belanja Bantuan Sosial	479.075.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
	Belanja Bagi Hasil	261.064.334.164,64	446.568.577.113,00	350.006.099.384,43	297.047.279.497,58	297.142.053.155,38
	Belanja Bantuan Keuangan	170.854.282.754,76	95.095.479.172,00	57.894.745.482,00	154.846.542.749,95	154.941.316.407,75
	Belanja Tidak Terduga	59.757.300,00	4.578.205.407,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Belanja Langsung	1.004.169.344.259,78	1.396.956.337.772,00	1.378.726.195.007,00	1.448.857.028.490,84	1.426.618.916.832,58
	Belanja Pegawai	36.915.135.524,00	68.572.393.000,00	224.273.920.234,57	255.991.214.145,76	257.790.046.500,03
	Belanja Modal	651.856.375.641,14	850.980.385.728,00	778.337.336.149,04	813.392.918.981,29	820.143.421.226,94
	Belanja Barang dan Jasa	315.397.833.094,64	477.403.559.044,00	376.114.938.623,39	379.472.895.363,80	348.685.449.105,61

Sumber : Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Tabel VII.14
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2018-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kapasitas Riil/Belanja	Proyeksi		Jumlah
		2021	2022	
1	2	3	4	5
	Kapasitas Riil Keuangan			
	BELANJA			
2.1	Belanja Operasi	1.390.515.104.769,50	1.481.401.077.070,15	2.871.916.181.839,65
2.1.1	Belanja Pegawai	1.153.277.414.102,36	1.244.068.612.745,22	2.397.346.026.847,58
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	379.472.895.363,80	348.685.449.105,61	728.158.344.469,41
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	6.000.000.000,00
2.1.5	Belanja Hibah	233.487.690.667,14	233.582.464.324,93	467.070.154.992,07
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	750.000.000,00	750.000.000,00	1.500.000.000,00
2.2	Belanja Modal	813.392.918.981,29	820.143.421.226,94	1.633.536.340.208,23
2.3	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00
2.4	Belanja Transfer	451.893.822.247,53	452.083.369.563,13	903.977.191.810,66
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	297.047.279.497,58	297.142.053.155,38	594.189.332.652,96
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	154.846.542.749,95	154.941.316.407,75	309.787.859.157,70

Sumber : Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel VII.14 merupakan penyusunan kapasitas riil pembangunan daerah berdasarkan uraian belanja yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah. Menurut Kementerian Dalam Negeri, Kapasitas riil ini digunakan dalam melakukan pembiayaan yang dialokasikan untuk melakukan pembiayaan prioritas 1, 2 dan 3. Pada Prioritas 1 pembiayaan dilakukan pada prioritas yang berkaitan dengan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas pertama dan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak langsung yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah seperti bantuan sosial, tambahan penghasilan dan belanja hibah serta prioritas 2 merupakan pembiayaan kegiatan prioritas.

7.3. Indikasi Rencana Program Prioritas

Indikasi rencana program prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berisi program prioritas untuk perencanaan strategis yaitu untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah serta program prioritas untuk perencanaan operasional yaitu untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Sebagaimana telah dirumuskan pada Bab VI, indikasi rencana program prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 terdiri dari 45 program pembangunan daerah yang dirumpunkan kedalam 24 Urusan Wajib, 6 Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan program prioritas dibutuhkan sejumlah dana sehingga disusunlah pagu indikatif yang penghitungannya berdasarkan pendekatan prioritas program. Selanjutnya setiap program prioritas mempunyai target indikator kinerja pertahun yang disertai kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun juga oleh sumber pendanaan lainnya. Namun demikian, pagu indikatif yang dicantumkan dalam Tabel VII.1 hanya bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan selengkapnya disajikan pada Tabel VII.15.

Tabel VII.15
Indikasi Program Pembangunan Prioritas dan Pendanaan Berdasarkan Urusan
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR															
URUSAN PENDIDIKAN															
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	`	Nilai 4	Nilai 4	19.577.236.000	Nilai 4	22.951.669. 825	Nilai 5	43.615.598. 300							DINDIK
	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	100%		100%		100%								DINDIK
Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	Persentase Siswa SMA miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100%	100%	12.449.061.000	0%	29.221.004. 500	100%	37.859.645. 000							DINDIK
	Rata-rata nilai UN SMA	63 poin	63		6,5		6,8								DINDIK
	APK SMA Perempuan	39,25%	39,25		42,44										DINDIK
	APK SMA,	35,29%	35,29		38,88		40,63								DINDIK
	APK SMA Laki- Laki	31,55%	31,55		35,52										DINDIK
	Persentase SMA terakreditasi A	37,88%	37,88		42,42		50								DINDIK
Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan-	Persentase SMK Pertanian dan Pternakan memiliki lembaga Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	0%	0	23.612.491.000	50	44.836.815. 424	50	33.821.936. 500							DINDIK

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase SMK dengan program keahlian Pertanian, Perkebunan dan Peternakan yang memiliki Akreditasi A	100%	100		100		100								DINDIK
	Persentase SMK pariwisata Terkareditasi minimal A	100%	100		100		100								DINDIK
	APK SMK	34,98%	34,98		38,38		40,63								DINDIK
	APK SMK Perempuan	33,72%	33,72		37,44										DINDIK
	APK SMK Laki-laki	36,17%	36,17		39,27										DINDIK
	Persentase SMK Program Keahlian Kesehatan Terkareditasi A	100%	100		100		100								DINDIK
	Persentase SMK Kelautan dan perikanan Terkareditasi A	50%	50		100		100								DINDIK
	Persentase SMK Program Keahlian Pariwisata memiliki lembaga Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	33,33%	33,33		33,33		66,66								DINDIK
	Rata-rata nilai UN SMK	64 poin	6,4		6,5		6,7								DINDIK
	Persentase SMK Program Keahlian Kesehatan memiliki lembaga Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	0%	0		0		100								DINDIK

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase SMK Kejuruan yang mendukung pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal	100%	100		100		100								DINDIK
	Persentase SMK Program Keahlian Kelautan dan Perikanan memiliki lembaga Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	50%	50		100		100								DINDIK
	Persentase siswa SMK miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100%	100		0		100								DINDIK
Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus	APK SLB	26,21%	26,21	9.359.178.000	29,47	5.902.154.500	29,47	12.853.388.010							DINDIK
	Persentase SLB terakreditasi A	30%	30		50		80								DINDIK
Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4,	95%	95	3.587.971.904	97	2.615.988.343	100	16.601.873.000							DINDIK
	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	36%	36		40		45								DINDIK
	Persentase guru dengan Nilai Rata-rata Kompetensi Guru minimal 50	85%	85		90		95								DINDIK

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)	Persentase Sekolah penerima BOS	100	100	65.476.087.397	100	94.786.811. 800	100	66.448.122. 000							DINDIK
Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Pangkalpinang dan Bangka	76,61%	76,61	34.452.540.000	79,29	36.315.130. 000	81,97	41.916.781. 840							DINDIK
	APK Pendidikan Menengah di Cabang Dinas						81,26%								DINDIK
	APK Pendidikan khusus di Cabang Dinas						29,47%								DINDIK
	rata-rata nilai ujian akhir, UK GTK SMA, SMK, SLB di Cabang Dinas						68 poin								DINDIK
	Jumlah siswa SMA/SMK/PK dan GTK yang berprestasi di Tingkat Provinsi						60 orang								DINDIK
Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka	76,61%	76,61	13.735.620.000	79,29	14.278.363. 000	81,97	16.976.523. 360							DINDIK

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Barat														
	APK Pendidikan Menengah di Cabang Dinas						81,26%								DINDIK
	APK Pendidikan khusus di Cabang Dinas						29,47%								DINDIK
	rata-rata nilai ujian akhir, UK GTK SMA, SMK, SLB di Cabang Dinas						68 poin								DINDIK
	Jumlah siswa SMA/SMK/PK dan GTK yang berprestasi di Tingkat Provinsi						60 orang								DINDIK
Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	76,61%	76,61	26.921.510.000	79,29	30.412.850.000	81,97	33.343.240.000							DINDIK
	APK Pendidikan Menengah di Cabang Dinas						81,26%								DINDIK
	APK Pendidikan khusus di Cabang Dinas						29,47%								DINDIK

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	rata-rata nilai ujian akhir, UK GTK SMA, SMK, SLB di Cabang Dinas						68 poin								DINDIK
	Jumlah siswa SMA/SMK/PK dan GTK yang berprestasi di Tingkat Provinsi						60 orang								DINDIK
Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Belitung dan Belitung Timur	76,61%	76,61	23.035.240.000	79,29	23.494.749. 500	81,97	30.883.974. 040							DINDIK
	APK Pendidikan Menengah di Cabang Dinas						81,26%								DINDIK
	APK Pendidikan khusus di Cabang Dinas						29,47%								DINDIK
	rata-rata nilai ujian akhir, UK GTK SMA, SMK, SLB di Cabang Dinas						68 poin								DINDIK
	Jumlah siswa SMA/SMK/PK dan GTK yang berprestasi di Tingkat Provinsi						60 orang								DINDIK

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka Tengah	APK Pendidikan Menengah di Cabang Dinas						81,26%	30.883.974.040							DINDIK
	APK Pendidikan khusus di Cabang Dinas						29,47%								DINDIK
	rata-rata nilai ujian akhir, UK GTK SMA, SMK, SLB di Cabang Dinas						68 poin								DINDIK
	Jumlah siswa SMA/SMK/PK dan GTK yang berprestasi di Tingkat Provinsi						60 orang								DINDIK
Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka	APK Pendidikan Menengah di Cabang Dinas						81,26%	30.000.000.000							DINDIK
	APK Pendidikan khusus di Cabang Dinas						29,47%								DINDIK
	rata-rata nilai ujian akhir, UK GTK SMA, SMK, SLB di Cabang Dinas						68 poin								DINDIK
	Jumlah siswa SMA/SMK/PK dan GTK yang berprestasi di Tingkat Provinsi						60 orang								DINDIK
Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Selatan	APK Pendidikan Menengah di Cabang Dinas						81,26%	30.000.000.000							DINDIK

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	APK Pendidikan khusus di Cabang Dinas						29,47%								DINDIK
	rata-rata nilai ujian akhir, UK GTK SMA, SMK, SLB di Cabang Dinas						68 poin								DINDIK
	Jumlah siswa SMA/SMK/PK dan GTK yang berprestasi di Tingkat Provinsi						60 orang								DINDIK
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Sakip PD								80	321.000.000	82	321.000.000	82	321.000.000	DINDIK
Program Pengelolaan Pendidikan	APK SMA								44,43	44.896.947.490		26.289.637.500		26.289.637.500	DINDIK
	APK SMK								42,8	31.302.162.910		17.460.022.900		17.460.022.900	DINDIK
	APK Pendidikan Khusus								86	16.841.821.000		13.883.961.000		13.883.961.000	DINDIK
	Jumlah medali siswa dalam kompetisi nasional /Internasional								3	7.261.704.900	3	7.261.520.540	3	7.261.520.540	DINDIK
	Jumlah Lulusan Smk Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi								400	4.204.399.000		1.596.490.000		1.596.490.000	DINDIK
	Persentase GTK Bersertifikasi								80%	785.000.000		485.000.000		485.000.000	DINDIK
	Rata-Rata Nilai Assesment di Cabang Dinas pendidikan Wilayah I								415	19.788.036.000		19.737.913.000		19.737.913.000	DINDIK

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Rata-Rata Nilai Assesment di Cabang Dinas pendidikan Wilayah II								87,23	12.965.887. 000		13.029.900. 000		13.029.900.00 0	DINDIK
	Rata-Rata Nilai Assesment di Cabang Dinas pendidikan Wilayah III								415	10.351.551. 000		10.351.551. 000		10.351.551.00 0	DINDIK
	Rata-Rata Nilai Assesment di Cabang Dinas pendidikan Wilayah IV								415	13.518.914. 000		13.510.719. 000		13.510.719.00 0	DINDIK
	Rata-Rata Nilai Assesment di Cabang Dinas pendidikan Wilayah V								415	15.658.076. 000		15.658.076. 000		15.658.076.00 0	DINDIK
	Rata-Rata Nilai Assesment di Cabang Dinas Pendidikan								415	72.282.464. 000		72.288.159. 000		72.288.159.00 0	DINDIK
	Rata-Rata Nilai Assessment di SMA/SMK dan Pendidikan khusus								415	22.727.060. 600		137.564.380 .300		##### #####	DINDIK
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase dokumen kurikulum yang terintegrasi dengan kurikulum nasional								75%	826.247.000	100%	1.039.757.0 00	100%	1.039.757.000	DINDIK

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang mengajar sesuai dengan kompetensi								80%	100.000.000	85%	1.000.000.000	85%	1.000.000.000	DINDIK
Program Pengembangan Sastra dan Bahasa	Persentase minat siswa terhadap bahasa dan sastra								70%	200.000.000	75%	200.000.000	75%	200.000.000	DINDIK
Program Pengembangan Kurikulum	Jumlah kebijakan Kurikulum yang dihasilkan								3	4.500.000.000	3	4.500.000.000	9	17.592.518.000	DINDIK
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Jumlah kebijakan GTK yang dihasilkan								1	750.000.000	1	1.000.000.000	3	1.950.000.000	DINDIK
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Jumlah kebijakan perizinan pendidikan yang dihasilkan								1	20.000.000	1	20.000.000	6	90.000.000	DINDIK
URUSAN KESEHATAN															
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Persentase tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah Dinas kesehatan Provinsi dan Balai Labkes	-	70,51 %	4.307.593.119	75%	9.011.485.472	80%	6.068.000.000							Dinas Kesehatan
	Predikat (nilai) SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi	67,98	75,55	347.440.480	80	114.210.000	90	660.000.000							Dinas Kesehatan
Program Kesehatan Masyarakat	Persentase Kab/Kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS minimal 1	0,60%	0,85%	851.617.804	0,57%	1.294.287.860	0,90%	1.434.557.840							Dinas Kesehatan

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	kebijakan baru pertahun														
	Angka kematian ibu per kelahiran hidup	24/26.021 KH	44/KH	746.652.900	36/KH	471.580.200	21/KH	1.181.715.260							Dinas Kesehatan
	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	7,22/1000 KH	6,31/1000 KH	530.023.000	7,17/1000 KH	407.857.188	7,16/ 1000 KH	132.510.000							Dinas Kesehatan
	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)	0,144	0,0225	876.170.500	0,0562	724.538.885	0,1425	876.000.000							Dinas Kesehatan
	Persentase penduduk yang memiliki kualitas lingkungan sehat	0,76%	85,98%	367.018.190	0,89%	316.884.100	0,84%	640.550.000							Dinas Kesehatan
	Persentase puskesmas yang menjalankan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga	0,60%	1%	98.425.950	1%	38.081.800	0,70%	642.148.335							Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase Kabupaten/ Kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) minimal 85%	0,57%	0,69%	151.152.200	0,89%	118.213.900	0,85%	125.995.000							Dinas Kesehatan
	Prevalensi HIV (persen) pada penduduk beresiko	0,062	0,0043	391.479.066	0,0039	310.629.100	<10%	0							Dinas Kesehatan

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase Kabupaten/Kota mencapai eliminasi malaria	0,7143	0,7143	169.440.520	0,8571	0	1	23.216.000							Dinas Kesehatan
	persentase penanganan penyakit menular lainnya	0,85	0,9999	490.829.650	1	313.042.000	0,88	75.337.500							Dinas Kesehatan
	Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	0,057	0,2674	75.029.600	0,3856	68.946.800	0,275	0							Dinas Kesehatan
	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular lainnya	0,80%	101,49%	170.772.719	1,25%	118.865.928	0,87%	83.236.725							Dinas Kesehatan
	Persentase Kab/Kota yang 20 % Puskesmasnya menyelenggaraka n upaya kesehatan jiwa	0,70%	1%	339.943.371	1%	125.915.400	0,90%	85.191.500							Dinas Kesehatan
	Persentase Kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon	0,80%	1%	1.363.544.199	0,97%	571.515.925	0,90%	277.677.450							Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	13 kecamatan	47 kec	639.982.894	47 kec	2.768.345.200	47 Kec	165.929.500							Dinas Kesehatan
	Jumlah RSUD yang tersertifikasi akreditasi	5 RSUD	10 RSUD	866.271.914	18 RSUD	664.347.043	10 RSUD	1.125.577.500							Dinas Kesehatan

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	nasional														
	Persentase kepesertaan JKN	0,62%	78,52%	14.925.678.874	0,81%	13.364.324. 383	0,67%	33.268.183. 543							Dinas Kesehatan
	Persentase PKM yang menyelenggaraka n kesehatan tradisional	0,45%	0,80%	230.141.790	0,98%	23.098.200	0,85%	101.570.910							Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)	360	1592	1.188.112.600	2049	1.432.716.6 00	4746	1.953.293.7 50							Dinas Kesehatan
	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin essensial	0,85%	0,91%	753.365.221	0,96%	369.839.243	0,96%	582.873.000							Dinas Kesehatan
	Persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat	0,88%	1990	149.299.699	0,8205	84.090.600	0,92	31.375.320							Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan	Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar	1400 sampel	1718 sampel	933.873.180	3825 sampel	863.103.228	2600 sampel	830.962.752							Dinas Kesehatan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Sakip PD								76	200.000.000	83	220.000.000	83	220.000.000	DINKES

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	survey kepuasan pelayanan internal								75%	24.375.011.208	77,50%	26.804.512.329	77,5%	22.491.262.475	DINKES
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase peningkatan pemeriksaan laboratorium kesehatan								90%	180.000.000	90,00%	313.831.630	90%	313.831.630	DINKES
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal madya								82%	46.055.706.567	86,00%	50.661.277.224	86%	55.000.000	DINKES
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menggunakan Sistem Informasi Kesehatan								80%	228.178.000	96,00%	250.995.800	85%	104.500.000	DINKES
	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit								80%	7.266.925.375	85,00%	7.993.617.913	85%	5.924.366.250	DINKES
	Persentase Peningkatan Kesehatan Masyarakat								80%	1.296.900.000	95,00%	1.341.590.000	95%	2.723.490.000	DINKES
	Persentase pelaksanaan sinkronisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Lintas								90%	61.000.000	95,00%	67.100.000	95%	128.100.000	DINKES

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kabupaten/Kota														
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi								80%	1.373.000.000	85,00%	1.510.300.000	85%	2.883.300.000	DINKES
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana sedaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat								85%	220.000.000	90,00%	242.000.000	90%	462.000.000	DINKES
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kab/kota yang memiliki kebijakan Germas								85%	408.100.000	100,00%	448.910.000	100%	857.820.000	DINKES
RUMAH SAKIT PROVINSI															
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	85	85	8.934.452.300	85	15.040.724.550	85	30.486.460.070						54.461.636.920	RSUP
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0	70		74		75								RSUP
	Tingkat kunjungan pasien	0	40		50		55								RSUP

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab	
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	ke rumah sakit															
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSUP	Persentase dana BLUD yang digunakan untuk kegiatan operasional dan pelayanan kepada masyarakat	0	0	2.500.000.000	20	10.000.000. 000	25	12.500.000. 000						41.500.000.00 0	RSUP	
	persentase ketersediaan pelayanan di RS dari dana BLUD	90	90	1.500.000.000	90	5.000.000.0 00	90	10.000.000. 000							RSUP	
Program Pelayanan Teknis Keperawatan	indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan teknis keperawatan di RSUP	50	70	3.311.070.600	100	1.053.966.2 00	100	854.512.000						5.219.548.800	RSUP	
	Lama hari rawat (Length of Stay)	70	0		0		0									RSUP
Program Pelayanan Teknis Medis dan Penunjang Medis	indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan teknis medis dan penunjang medis	65	70	14.933.913.000	100	28.855.275. 000	100	14.162.545. 000						57.951.733.00 0	RSUP	
	Persentase ketersediaan pelayanan di rumah sakit	65	70		0		75									RSUP
	Persentase kesiapan sumber daya RS dalam penanggulangan bencana	0	70		75		75									RSUP

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase SDM yang sesuai standar rumah sakit kelas B	0	0		0		0								RSUP
	Nilai tingkat kelulusan Akreditasi RSUP yang memenuhi standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS)	0	0		0		0								RSUP
	Jumlah pegawai yang sudah mendapat latihan siaga bencana	0	0		0		0								RSUP
Program Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit Umum	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap sarana dan prasarana pelayanan Rumah Sakit	80	80	90.341.756.154	85	71.325.431.300	85	14.289.785.000						##### #####	RSUP
	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di Rumah Sakit	80	80		85		85								RSUP
	Persentase sarana prasarana yang tersedia sesuai standar kelas B	0	0		0		0								RSUP
	Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap sarana dan prasarana rumah sakit														
Program Penunjang Urusan Pemerintah	Nilai SAKIP PD								76	44.793.716.905	80	44.793.716.905	80	44.793.716.905	RSUP

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Daerah															
	Survey Kepuasan Pelayanan internal								78	38.655.734.405	80	38.655.734.405	80	38.655.734.405	RSUP
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan kesehatan rumah Sakit Terakreditasi paripurna								80%	91.276.895.990	85%	91.276.895.990	85%	63.700.254.190	RSUP
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase kapasitas sumber daya manusia kesehatan								80%	14.431.812.000	85%	14.431.812.000	85%	14.431.812.000	RSUP
RUMAH SAKIT JIWA															
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	80	80	12.474.155.000	85	26.454.226.400	90	36.227.496.140							RSJD
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSJ	Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa yang sesuai Standar	70	75	7.500.000.000	80	8.000.000.000	85	8.500.000.000							RSJD
	Persentase Sarana dan Prasarana yang dianggarkan dari BLUD RSJ	0	75		80		85								

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan Napza	Persentase penduduk dengan gangguan jiwa, NAPZA dan kesehatan lainnya yang mendapatkan pelayanan medis kejiwaan	85	90	9.038.778.283	90	11.821.089.000	95	8.566.730.000							RSJD
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan teknis medis kejiwaan dan NAPZA	50	42		42		42								
Program Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa dan Napza	Persentase penduduk dengan gangguan jiwa, NAPZA dan Kesehatan lainnya yang mendapatkan pelayanan keperawatan jiwa	50	55	1.047.190.000	60	1.297.309.000	65	1.182.000.000							RSJD
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan teknis keperawatan jiwa dan NAPZA	75	90		95		100								
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSJ	80	90	24.571.304.717	95	22.521.252.000	100	23.834.319.375							RSJD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)								76	60.000.000	80	60.000.000	80	60.000.000	RSJD

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Survey Kepuasan Pelayanan Internal								80	30.473.099.036	80	31.055.675.036	80	69.305.558.238	RSJD
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat ataupun perorangan yang mendapat upaya pelayanan kesehatan								80	12.572.000.000	85	12.572.000.000	85	12.572.000.000	RSJD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan								85	8.545.000.000	90	8.545.000.000	90	8.545.000.000	RSJD
URUSAN SOSIAL															
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	100	20,45	2.796.430.000	11,36	5.040.990.000	22,73	5.190.990.000	22,73						Dinas Sosial
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah		10,64	778.543.000	19,15	1.078.130.000	23,4	1.690.000.000	23,4						Dinas Sosial
Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase PPKS/PSKS yang tertangani kesejahteraan sosialnya	100	32,21	10.696.967.500	32,76	3.592.465.000	32,92	4.675.200.000	1,06						Dinas Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang terlindungi dan terjamin kesejahteraan sosialnya	100	22,99	246.146.000	24,89	1.385.870.000	24,89	1.500.000.000	13,25						Dinas Sosial

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial		3,26	779.520.000	20	896.980.000	20	950.000.000	20						
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang terehabilitasi kesejahteraan sosialnya	100	10,17	380.695.000	20,47	2.188.820.000	20,49	2.228.600.000	22,4						Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PPKS/PSKS yang terberdayakan	100	5,18	817.471.000	6,34	1.669.652.000	19,3	2.032.250.000	34,04						Dinas Sosial
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Panti Sosial	Persentase PPKS terehabilitasi kesejahteraan sosialnya melalui pelayanan teknis panti sosial	100	7,37	627.008.000	18,35	1.222.150.000	19,06	1.192.000.000	25,9						Panti Sosial Bina Serumpun
Program Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial	Persentase PPKS terehabilitasi kesejahteraan sosialnya melalui Penyelenggaraan Panti Sosial	100	16,18	1.236.490.000	17,63	2.120.000.000	23,12	1.450.000.000	17,34						Panti Sosial Bina Laras Hijrah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip PD								77,70	195.475.000	77,8	323.500.000	78	518.975.000	DINAS SOSIAL
	Survey kepuasan pelayanan internal								90	14.510.153.053	90	15.975.701.558	90	30.485.854.611	DINAS SOSIAL
	Survey kepuasan pelayanan internal di PSBS								90	990.873.351	90	1.039.100.000	90	2.029.973.351	Panti Sosial Bina Serumpun
	Nilai Sakip PD								77,7	16.516.000	77,7	25.000.000	78	41.516.000	Panti Sosial Bina Laras Hijrah

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Survey kepuasan pelayanan internal di PSBL								90	621.050.000	90	843.450.000	90	1.464.500.000	Panti Sosial Bina Laras Hijrah
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PPKS/PSKS yang terberdayakan								50	1.176.563.000	50%	1.538.190.913	100	2.714.753.913	DINAS SOSIAL
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di ditangani								50	75.000.000	50	100.000.000	100	175.000.000	DINAS SOSIAL
Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti Non Pemerintah								50	953.249.291	50	982.000.000	100	1.935.249.291	DINAS SOSIAL
	Prosentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial didalam panti pemerintah								50	98.900.000	50	110.900.000	100	209.800.000	Panti Sosial Bina Serumpun
	Prosentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di PSBL								50	656.550.000	50	656.550.000	100	1.313.100.000	Panti Sosial Bina Laras Hijrah
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial								50	1.276.759.238	50	1.475.000.000	100	2.751.759.238	DINAS SOSIAL
Program Pengelolaan TMP	Prosentase TMP yang dikelola								100	500.000.000	100	520.000.000	100	1.020.000.000	DINAS SOSIAL
Program Penanganan Bencana	Prosentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial								50	940.000.000	50	1.000.000.000	100	1.940.000.000	DINAS SOSIAL

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
BIDANG SATPOLPP															
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100	100	5.602.000.000	100	8.158.033.650	100	9.195.628.132							Satpol PP
	Predikat SAKIP perangkat daerah	B	B	110.000.000											Satpol PP
	Nilai SAKIP perangkat daerah	63,38			69	57.000.000	77	143.396.000							Satpol PP
Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase penindakan pelanggaran tibusmtranmas	100	100	1.888.084.150	100	1.379.270.500	100	2.450.000.000							Satpol PP
Program Penegakan Perda dan Perkada	Cakupan penegakan perda	100	100	301.522.600	100	161.065.000	100	320.000.000							Satpol PP
Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Persentase peningkatan kualitas linmas dalam penyelenggaraan kantrantibnas	12,4	1,51	91.341.500	5,74	286.521.000	2,72	794.891.000							Satpol PP
	Persentase peningkatan kualitas linmas dalam penanganan bencana dan kebakaran	6,05	4,23		6,05	201.806.300	6,05	515.210.000							Satpol PP

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pembinaan dan Pengembangan Personil Satpol PP	Persentase pembinaan dan pengembangan personil Satpol pp	32,46	1,62	317.113.000	16,23	245.256.000	16,23	475.000.000							Satpol PP
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah								78	123.091.708	80	282.182.000	80	282.182.000	SATPOL PP
	Survey kepuasan pelayanan internal (persentase)								90	13.432.110. 000	95	23.165.448. 000	95	39.804.516.00 0	SATPOL PP
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran tibusmtranmas yang ditindak								100	7.833.056.0 00	100	8.219.689.0 00	100	5.366.774.000	SATPOL PP
	Persentase penegakkan pelanggar Perda								100	250.000.000	100	285.000.000	100	699.619.760	SATPOL PP
	Persentase Satlinmas yang terlatih dalam penyelenggaraan kantrantibmas dan membantu penanganan bencana dan kebakaran								44,78	175.000.000	55,07	180.000.000	55,07	735.000.000	SATPOL PP
	Persentase personil satpol pp yang berkompeten								83,75	246.500.000	87,5	326.500.000	87,5	616.348.000	SATPOL PP
Program Penanggulangan Kebakaran	Cakupan relawan pemadam kebakaran di kabupaten dan kota								0,26	77.000.000	0,27	77.000.000	0,28	1.045.000.000	SATPOL PP

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BIDANG BENCANA															
Penigkatan Pelayanan Pemerintah	Persentase Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Keseekretariatan	0	72	1.620.460.029	74	2.632.253.7 00	76								BPBD
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	2	2		3		3								BPBD
Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	74	72	816.541.930	74	2.385.749.0 00	76	1.099.260.0 00							BPBD
Kedaruratan Dan Logistik / Peralatan Penanggulangan Bencana	Persentase Daerah Bencana yang Diintervensi Dalam Kedaruratan Penangulungan Bencana	100	100	2.838.890.000	100	3.152.720.0 00	100	3.668.700.0 00							BPBD
Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Persentase Daerah Bencana Yang Di Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	76,6	75	262.925.000	75	401.193.500	80	474.215.000							BPBD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah								82	8.341.630.9 08	100	8.977.444.1 05	85	5.055.369.572	BPBD
	Survey Kepuasan Pelayanan Internal								4		5		5		

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Penanggulangan Bencana										8.612.100.4 55		9.473.310.5 01			BPBD
	Persentase Daerah Rawan Bencana Yang Di intervensi Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana								14,29	1.027.750.0 00	14,29	1.030.000.0 00	14,29	2.057.750.000	BPBD
	Persentase Daerah Bencana Yang Di Intervensi Dalam Kedaruratan Penanggulangan Bencana.								14,29	3.580.000.0 00	14,29	3.600.000.0 00	14,29	7.180.000.000	BPBD
	Persentase Daerah Bencana Yang Di Rehabilitasi Dan Rekonstruksi.								14,29	450.000.000	14,29	660.000.000	14,29	1.110.000.000	BPBD
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	100%	100%	4.120.049.254	100%	5.651.510.5 00	100%	6.447.611.5 50							DPUPR
Program Pengembangan Sumber Daya Air	Rasio Jaringan Irigasi	1.043	1.334	3.958.590.000	1.495	732.240.000	1.676	677.725.535							DPUPR
	Persentase Penyediaan Air Baku	0,09%	0,10%	326.220.000	0,10%	1.046.115.0 00	0,11%	1.255.338.0 00							DPUPR
	Persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari	1,11%	0,02%	12.906.020.000	0,13%	15.462.427. 200	0,20%	35.435.560. 499							DPUPR

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	daya rusak air														
Program Penataan Ruang dan Pertanahan	Ketaatan terhadap RTRW	16,67	20	3.543.610.000	30	14.354.920.000	40	19.018.260.800							DPUPR
Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Ahli Konstruksi yang bersertifikat	0%	20%	975.290.000	20%	680.279.000	20%	680.279.000							DPUPR
Program Kebinamargaan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	93%	83,66%	140.041.812.567	84,16%	269.756.518.200	84,66%	416.287.992.120							DPUPR
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan								100%	7.092.372.705	100%	7.801.609.976	100%	31.113.153.985	DPUPR
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Alat Berat dalam kondisi baik								85,16%	1.284.993.712	85,56%	1.619.642.583	85,56%	1.619.642.583	DPUPR
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rasio layanan Irigasi								59%	2.276.098.089	100%	2.503.707.897	100%	10.148.361.521	DPUPR
	Persentase Penyediaan Air Baku								0,11%	1.380.871.800	0,12%	1.518.958.980	0,12%	5.527.503.780	DPUPR
	persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air								5%	35.995.672.599	6,25%	38.041.846.869	6,25%	38.041.846.869	DPUPR
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang								83%	7.560.086.880	100%	9.310.095.568	100%	78.786.973.248	DPUPR

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pengembangan Jasa Kontruksi	Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi								50%	1.307.185.000	65%	551.072.500	65%	4.194.105.500	DPUPR
Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap								91%	130.284.993.712	92%	140.619.642.583	92%	140.619.642.583	DPUPR
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN															
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Persentase tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap kesekretariatan	100%	100%	2.789.365.000	100%	3.973.851.793	100%	4.170.131.672							PERKIM
	Predikat Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76	76		78		82								PERKIM
Program Pembangunan Perumahan Rakyat	Persentase berkurangnya rumah tidak layak huni	22,48%	22,48%	11.759.260.000	22,51%	23.348.486.250	22,54%	25.697.259.188							PERKIM
Program Penyediaan Infrastruktur Kawasan	Persentase Tersedianya Infrastruktur Kawasan	0%	0%	-	5%	640.000.000	10%	24.640.000.000							PERKIM
Program Pembangunan dan Pengembangan Permukiman	Persentase berkurangnya lingkungan Permukiman Kumuh Provinsi	0,01%	0,01%	1.491.250.000	0,00%	4.384.200.000	0,00%	6.203.230.000							PERKIM
Program Pengembangan Sarana Prasarana Air Minum	Persentase rumah tangga berakses air minum	68,14%	68,14%	1.473.000.000	68,52%	2.099.000.000	69,21%	4.059.000.000							PERKIM

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pengembangan Sarana Prasarana Sanitasi	Persentase rumah tangga bersanitasi	83,56%	83,56%	900.000.000	83,65%	2.250.000.000	83,77%	2.250.000.000							PERKIM
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat kepuasan aparaturnya perangkat daerah terhadap kesekretariatan								100%	3.560.144.839	100%	4.620.438.193	100%	16.167.828.879	PERKIM
	Predikat Nilai SAKIP Perangkat Daerah								85		88		88		PERKIM
Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah akibat bencana yang tertangani								10%	500.000.000	25%	500.000.000	25%	500.000.000	PERKIM
Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU								50%	2.761.000.000	50%	4.141.500.000	50%	4.141.500.000	PERKIM
Program Penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase Luas Kawasan yang Tertata								3%	1.400.000.000	3,8%	2.000.000.000	3,8%	2.000.000.000	PERKIM
Program Penataan bangunan gedung	Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara								33%	12.500.000.000	100%	15.000.000.000	100%	15.000.000.000	PERKIM
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak								74,65%	1.355.119.349	80%	1.750.000.000	80%	1.750.000.000	PERKIM
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak								10%	700.000.000	30%	1.000.000.000	30%	1.000.000.000	PERKIM

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PERTANAHAN															
Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	0	77.460.000	5.385.583.757	0	700.574.000	0	480.578.842							BIRO PEMERINTAH AN
	Persentase bidang tanah pemerintah provinsi yang bersertifikat	0	30		30		40								BIRO PEMERINTAH AN
	Persentase kasus sengketa batas wilayah administrasi yang diselesaikan	0	20		40		60								BIRO PEMERINTAH AN
Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum								1 Dok	30.000.000	1 Dok	33.000.000	1 Dok	33.000.000	DINAS PUPR
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian darn santunan tanah untuk pembangunan								50%	170.000.000	100%	187.000.000	100%	187.000.000	DINAS PUPR
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Sengketa tanah garapan								67%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	DINAS PUPR
Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Jumlah Dokumen Redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan								1 Dok	50.000.000	1 Dok	55.000.000	1 Dok	55.000.000	DINAS PUPR

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	maksimum dan tanah absentee														
Program Penataagunaan Tanah	Persentase kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang								83%	280.000.000	100%	308.000.000	100%	308.000.000	DINAS PUPR
URUSAN KETENAGAKERJAAN															
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	0	100	4.479.642.971		12.602.892.654									DISNAKER
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Ket: AA=6 A=5 BB=4 B=3 CC=2 C=1)	54,55	76											DISNAKER	
Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kompetensi		30	639.601.650		2.634.995.000									DISNAKER
	Persentase perusahaan pertanian yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan		2											DISNAKER	

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	persentase perusahaan kelautan perikanan yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan		1,2												DISNAKER
	persentase Jumlah perusahaan dibidang pariwisata yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan		1,6												DISNAKER
	Persentase perusahaan sumber daya mineral yang diperiksa dan dibinasesuai standar		1,36												DISNAKER
	Pertumbuhan kenaikan upah tenaga kerja		0												DISNAKER
	persentase penyelesaian kasus tenaga kerja		0,5												DISNAKER
	persentase penurunan kecelakaan kerja		0,34												DISNAKER

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab	
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Pengembangan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja sektor sumber daya mineral		0,05	261.341.331		3.086.909.142									DISNAKER	
	Persentase peningkatan tenaga kerja pertanian yang bersertifikasi		0												DISNAKER	
	Persentase peningkatan tenaga kerja kelautan dan perikanan bersertifikat kompetensi		0												DISNAKER	
	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tenaga kerja Asing		150000000												DISNAKER	
	Persentase peningkatan tenaga kerja pariwisata bersertifikat kompetensi		0												DISNAKER	
	Persentase peningkatan tenaga kerja sektor sumber daya mineral bersertifikat kompetensi		0												DISNAKER	
	Persentase pencari kerja		17,14													DISNAKER

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab			
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD					
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	yang ditempatkan														DISNAKER			
	Pesentase lansia potensial yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan		0													DISNAKER		
	Persentase Exs korban Napza yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan		0														DISNAKER	
	Persentase wanita Tuna sosial yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan		0															DISNAKER
	Persentase penyandang disabilitas yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan		0															
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Hygienis Perusahaan dan Kesehatan Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja		2,73	156.460.400		220.500.000										DISNAKER		
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan tentang pertanian yang berkompetensi		0,14	1.495.500.000		9.250.000.000										DISNAKER		

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan tentang Kelautan dan perikanan yang berkompetensi		0,001												DISNAKER
	Persentase pencari kerja pariwisata yang mendapat pelatihan		0,11												DISNAKER
	Persentase tenaga kerja bidang sumber daya mineral yang mendapat pelatihan pertambangan berkelanjutan		0,14												DISNAKER
	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kompetensi		0,25												DISNAKER
Program Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja sektor pertanian	0,02	0,02	183.705.000											DISNAKER
	Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja sektor Perikanan	0,12	0,12												DISNAKER
	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja	0	0,05												DISNAKER

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	bidang pariwisata														DISNAKER
	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja sektor sumber daya mineral	0	0,05												
Penunjang Urusan Pemda	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan pelayanan Kesekretariatan								80	3.245.850.000	80	3.465.850.000	80	3.465.850.000	DISNAKER
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Ket: AA=6 A=5 BB=4 B=3 CC=2 C=1)							BB	BB		BB		DISNAKER		
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah dokumen perencanaan makro ketenagakerjaan yang dikerjakan								4 Dok	1.682.155.981	4 Dok	1.753.748.364	4 Dok	3.435.904.345	DISNAKER
Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang telah memiliki sarana hubungan industrial								41,31%	454.685.000	42%	522.887.750	42,5%	522.887.750	DISNAKER
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang dilakukan pengawasan ketenagakerjaan								61%	498.000.000	62%	572.700.000	63%	572.700.000	DISNAKER

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1). Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi								4%	1.217.619.938	5,00%	1.400.262.929	6%	1.750.328.661	DISNAKER
	2). Persentase Pelatihan Kerjasama dengan sektor swasta dan instansi pemerintah lainnya untuk penyedia instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja							20%			35%		40%		DISNAKER
	3). Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas							15 Perusah aan			16 Perusah aan		17 Perusah aan		DISNAKER
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase kegiatan yang responsif gender			462.910.500		749.802.000		1.395.812.500							DP3ACSKB
Program Peningkatan Perlindungan Perempuan	Rasio ketersediaan SDM Perlindungan Perempuan			1.488.146.850		1.508.069.000		2.057.834.000							DP3ACSKB

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Perlindungan Anak	Rasio ketersediaan SDM Perlindungan Anak														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip PD	8							74 (B)	132.340.000	74 (B)	135.648.500	74 (B)	155.995.775	DP3ACSKB
	Survey kepuasan pelayanan internal	100							100%	8.266.289.043	100%	8.472.946.269	100%	9.743.888.209	DP3ACSKB
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah yang Responsif Gender								84,37%	316.329.000	91,00%	347.961.900	91,00%	400.156.185	DP3ACSKB
Program Peningkatan Kualitas Negara	Persentase IR yang di bina								0,71%	508.044.000	0,74%	558.848.400	0,74%	642.675.660	DP3ACSKB
Program Perlindungan perempuan	Persentase peningkatan SDM Perlindungan Perempuan								0,039%	178.560.000	0,040%	196.416.000	0,040%	225.878.400	DP3ACSKB
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase capaian OPD yang menyediakan data pilah gender dan anak								84,37%	75.700.000	90,62%	83.270.000	90,62%	95.760.500	DP3ACSKB
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase peningkatan SDM dalam Pemenuhan Partisipasi ANAK								0,183 %	730.946.920	0,189%	804.041.612	0,189 %	924.647.854	DP3ACSKB
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase SDM Perlindungan Anak								0,20%	569.335.000	0,30%	626.268.500	0,30%	720.208.775	DP3ACSKB

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
Program Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target kepemilikan dokumen kependudukan		28,57%	1.818.862.562		1.914.966.000		398.066.350		417.969.668		438.868.151			DP3ACSKB
	Persentase PD yang mengadakan perjanjian kerjasama (PKS)		9,37%												
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA)								68,35%	1.200.000.000	70,25%	502.500.000	0,7025	1.702.500.000	DP3ACSKB
Program Pencatatan Sipil	Persentase masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil (Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan)								72,15%	775.000.000	72,15%	913.750.000	72,15%	1.688.750.000	DP3ACSKB
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pemanfaatan database kependudukan yang terintegrasi								75,45%	900.000.000	75,45%	995.000.000	75,45%	1.895.000.000	DP3ACSKB
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera	Persentase Kampung KB		29,16%	1.230.249.350		997.365.818		680.169.000		714.177.450		749.886.323			DP3ACSKB
Program Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen pengendalian penduduk								2 Dokumen	175.000.000	8 dokumen	1.102.500.000	8 dokumen	1.277.500.000	DP3ACSKB
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	jumlah kab/kota yang dibina								7 kab/kota	300.000.000	7 kab/kota	1.155.000.000	7 kab/kota	1.455.000.000	DP3ACSKB
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	jumlah keluarga pra sejahtera								7 kab/kota	525.000.000	7 kab/kota	1.995.000.000	7 kab/kota	2.520.000.000	DP3ACSKB
URUSAN PANGAN															
Program Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan	Capaian Skor PPH Ketersediaan	78,78	79,8	1.335.200.000	81,9	3.450.000.000	84	4.390.000.000							DINAS PANGAN
	Persentase penduduk rawan pangan yang difasilitasi		1		1,1		1,1						DINAS PANGAN		
Program Pengembangan Distribusi, Stabilitas, Dan Cadangan Pangan	Coefisien Varian Harga Pangan		CV Beras ≤ 5%	855.447.455	CV Beras ≤ 5%	1.750.000.000	CV Beras ≤ 5%	1.845.000.000							DINAS PANGAN
					CV Cabe≤ 25%		CV Cabe≤ 25%								
			CV Cabe≤ 35%		CV Daging Ayam 10%		CV Daging Ayam 10%								
			CV Daging Ayam 10%												

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase peningkatan cadangan pangan pemerintah		2,5		2,7		2,8								DINAS PANGAN
Program Peningkatan Konsumsi Dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan yang aman dikonsumsi	78	80	1.521.649.500	83	4.920.000.000	86	5.300.000.000							DINAS PANGAN
	Peningkatan Skor PPH Konsumsi	77,1	79		81		83						DINAS PANGAN		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip PD								76	116.000.000	80	380.000.000	90	380.000.000	DINAS PANGAN
	survey kepuasan pelayanan internal								80%	7.102.408.031	80%	8.081.830.000	80%	8.081.830.000	DINAS PANGAN
Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras)								15%	250.000.000	18%	383.000.000	18%	383.000.000	DINAS PANGAN
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan a) Kelompok Pangan Padi-Padian, b) Kelompok Pangan Kacang-kacangan, c) Kelompok Pangan buah dan sayur								a)23,9; b) 9,9; c) 25,6	610.000.000	a)23,9; b) 9,9; c) 25,6	1.206.000.000	a)23,9; b) 9,9; c) 25,6	1.206.000.000	DINAS PANGAN

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi pangan pada a) kelompok Pangan Umbi-umbian, b) kelompok Pangan Kacang-kacangan dan c) kelompok Pangan buang dan sayur								a. 2; b. 4; c. 21,8	225.000.000	a. 2; b. 4; c. 21,8	225.000.000	a. 2; b. 4; c. 21,8	225.000.000	DINAS PANGAN
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Menurunnya daerah rentan rawan pangan								17	160.000.000	15	180.000.000	15	180.000.000	DINAS PANGAN
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi								86%	275.000.000	90%	325.000.000	90%	325.000.000	DINAS PANGAN
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP															
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	##### ####	1	5.848.056.200	1	##### ####								DLH
	Nilai Sakip PD	77,06	337.213.000	77,09	72.965.000	72	196.058.335								DLH
Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Pertumbuhan kebijakan berkaitan pengelolaan lingkungan berkelanjutan	100%	829.750.000	1	649.366.300	---	---								DLH

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase Pertumbuhan Perusahaan yang memiliki kajian Lingkungan	10%	173.363.58 5	0	21.065.000	0	49.725.000								DLH
	Persentase Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang terpenuhi	0%	---	0	---	0	89.236.663								DLH
Program Peningkatan Pengendalian dan Penaatan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan BOD, COD, TSS	2%	428.405.00 0	0	366.365.00 0	0	100.374.650								DLH
	Persentase Penurunan SO2 dan NO2	2%	106.060.00 0	0	46.214.000	0	160.330.650								DLH
Program Peningkatan pengolahan Sampah, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah kaca dari sektor limbah terhadap BAU	6,47%	256.762.00 0	7,29%	589.450.00 0	7,29%	56.955.900								DLH
	Persentase Volume Sampah yang terolah berbasis peran serta masyarakat	2%	644.636.00 0	0	385.655.00 0	0	91.591.918								DLH
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dari Laboratorium Lingkungan	0,50%	##### ####	0	1.082.824. 000	1,15%	##### ####								DLH
	Persentase Paramter Kualitas Lingkungan Yang	100%	322.725.00 0	1	736.876.00 0	1	248.258.000								DLH

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	terakreditasi														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah								70-80	13.092.251. 644	82	12.201.476. 808	82	25.293.728.45 2	DLH
	Survey Kepuasan Internal								100%						
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup								75%	531.522.873	100%	584.675.160	100%	1.116.198.033	DLH
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Titik Pantau Air Sungai yang memenuhi baku mutu								50%	2.260.622.5 73	2%	2.486.684.8 30	10%	4.747.307.403	DLH
	Persentase Titik Pantau Air Laut yang memenuhi baku mutu								50%		50%		50%		DLH
	Persentase Titik Pantau Udara yang memenuhi baku mutu								80%		80%		80%		DLH
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Rekomendasi Izin Lingkungan yang diterbitkan								80%	320.342.353	85%	352.376.588	85%	672.718.941	DLH

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Penerima Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi								80%	150.000.000	40%	75.000.000	50%	225.000.000	DLH
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penerima Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi								80%	150.000.000	85%	165.000.000	85%	315.000.000	DLH
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Aduan Masyarakat yang diverifikasi								100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	231.000.000	DLH
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan aparaturnya perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100	100	2.312.197.023	100	3.474.775.000	100	4.400.238.750							DPMD
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (Ket: AA = 6 A = 5 BB = 4 B = 3 CC = 2 C = 1)	3	3		3		3								DPMD
Program Pembinaan Pemerintah Desa	Persentase aparaturnya desa dan BPD yang meningkat kompetensinya	8,95	0,86	1.411.127.668	1,94	2.065.649.051	1,94	2.311.431.504							DPMD

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Profil Desa dan Kelurahan yang tersusun dan terbina	286	21		21		21								DPMD
Program Peningkatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase PKK aktif	8,16	1,94	1.188.045.082	3,24	1.843.301.3 36	3,24	1.914.364.2 51							DPMD
	Persentase Posyandu aktif	26,24	14,48		14,48		14,48								DPMD
	Persentase sarana prasarana penunjang peningkatan pemberdayaan masyarakat desa	31,91	6,38		8,51		10,64								DPMD
Program Pengembangan Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Pelatihan Masyarakat	Persentase KPM yang aktif	8,16	1,94	1.188.045.082	3,24	1.843.301.3 36	3,24	1.914.364.2 51							DPMD
	Persentase Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan	26,24	14,48		14,48		14,48								DPMD
	Persentase kelom pok masyarakat yang mendaya gunakan tekno logi tepat guna (TTG) di sektor pertanian	31,91	6,38		8,51		10,64								DPMD
Program Pembangunan Kawasan Pedesaan	Persentase kawasan pedesaan yang	0	0,65	1.107.901.157	0,65	1.173.296.2 15	0,65	3.488.151.0 26							DPMD

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	diintervensi														
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)								82	195.000.000	83	477.472.000	85	520.000.000	DPMD
	Survey Kepuasan Pelayanan Internal								85	8.785.754.402	90	9.836.188.199	95	10.000.000.000	DPMD
Program Pemberdaya an Lembaga Kemasya rakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lem baga kemasyara katan yang aktif. Persentase lembaga adat desa yang aktif								100%	2.550.000.000	100%	2.960.000.000	100%	3.060.000.000	DPMD
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kerja sama Desa yang dilaksanakan								0,97	250.000.000	0,98	250.000.000	0,99	250.000.000	DPMD
URUSAN PERHUBUNGAN															
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Indikator 1 : Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan			1.338.807.303		7.105.804.618									
	Indikator 2 : Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (Ket: AA = 6 A = 5 BB = 4 B = 3 CC = 2 C = 1)														
Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana		22,3	8.124.431.500	24,5	12.931.264.130	25,7	24.197.177.489							DISHUB

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Perhubungan Darat														
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Perhubungan Laut		27,5	1.092.865.200	36,6	2.275.620.125	44	15.454.832.220							DISHUB
Program Peningkatan Pengendalian dan Operasional dan Kebandarudaraan	Prosentase Pemenuhan Prasarana Kebandarudaraa n		10	1.674.985.000	10	8.909.200.000	20	3.195.695.000							DISHUB
	Persentase Angkutan umum yang laik jalan		14,22	253.684.000	14,1	433.660.000	13,85	818.660.000							DISHUB
Program Pengembangan Kebandarudaraan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas bandara		10	1.674.985.000	10	11.150.316.829	20	5.909.885.000							DISHUB
Program Peningkatan Pengendalian dan Operasional	persentase penurunan angka pelanggaran lalu lintas		2,61	-	2,61	718.660.000	2,61	2.036.410.000							DISHUB
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Sakip PD								80	11.434.311.348	85	3.837.651.800	87	15.271.963.148	DISHUB
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)								26,47%	6.632.281.000	28,47%	18.092.859.100	28,47%	24.725.140.100	DISHUB
Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pemenuhan Infrastruktur								67%	12.211.752.348	85%	0	85%	12.211.752.348	DISHUB

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pelayaran														
Program Pengelolaan Penerbangan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas bandara								20%	2.520.000.000	35%	1.535.625.000	95%	4.055.625.000	DISHUB
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI															
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan			3.813.483.160		2.564.045.204									DISKOMINFO
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (Ket: AA = 6 A = 5 BB = 4 B = 3 CC = 2 C = 1)														DISKOMINFO
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola	-	9449%%	3.029.205.000	95	5.858.380.000	95	9.333.636.456							DISKOMINFO
	Jumlah data/informasi pemerintah daerah		5		5		5								DISKOMINFO
	Jumlah mitra yang terfasilitasi		60		60		60								DISKOMINFO
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah layanan infrastruktur dan teknologi	-	94,14%	3.296.250.000	100	6.723.552.480	97	7.685.841.156							DISKOMINFO

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kapasitas layanan publik dan pemerintah berbbasis e-Government		40		5		5								DISKOMINFO
	Kapasitas jaringan komunikasi data		1		1		1								DISKOMINFO
	jumlah insiden atau penyimpangan keamanan sistem informasi		0		0		0								DISKOMINFO
Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian	Persentase Data dan informasi statistik yang digunakan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan	-	92,97%	497.317.220	93	1.431.917.785	95	566.047.338							DISKOMINFO
	Persentase peningkatan pemberdayaan Teknologi Informasi dan komunikasi untuk birokrasi		-		6		6								DISKOMINFO
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)								80	232.000.000	85	255.200.000	90	4.985.250.000	DISKOMINFO
	Survey Kepuasan Pelayanan Internal								100	12.129.293.250	100	13.336.172.575	100	14.312.162.580	DISKOMINFO
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Jumlah layanan infrastruktur dan teknologi dan Kapasitas layanan publik dan								90%	2.854.558.000	95%	3.140.013.800	97%	3.430.011.200	DISKOMINFO

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	pemerintah berbasis e- Government														
URUSAN STATISTIK															
Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian	Persentase Data dan informasi statistik yang digunakan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan	-	92,97%	497.317.220	93	1.431.917.7 85	95	566.047.338							
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Identifikasi kebutuhan Data Statistik Sektoral Daerah Provinsi dan Diskominfo Kabupaten/Kota								75%	520.000.000	80%	572.000.000	90%	600.000.000	DISKOMINFO
URUSAN PERSANDIAN															
Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian	Persentase peningkatan pemberdayaan Teknologi Informasi dan komunikasi untuk birokrasi		6	75.000.000	7	80.000.000	8	90.000.000							

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase penerapan e-Government di Prov. Kep Babel dengan sistem informasi pemerintah daerah yang aman								90%	600.000.000	95%	660.000.000	100%	700.000.000	DISKOMINFO
	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)								3	100.000.000	4	110.000.000	5	120.000.000	DISKOMINFO
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH															
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (Ket: AA=6 A=5 BB=4 B=3 CC=2 C=1)	0	3	3.218.763.750	3	5.980.767.500	4	3.793.111.700							DKUKM
	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan (Ket: angka sementara sebelum di konfirmasi ke kepala skpd)	0	100		100		100								DKUKM
Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	persentase pertumbuhan koperasi aktif	0	15,5	614.307.840	15,5	1.218.276.500	15,5	500.000.000							DKUKM
	persentase pertumbuhan	0	12,7		12,7		12,7								DKUKM

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab	
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	kelembagaan koperasi														DKUKM	
	persentase peningkatan koperasi berkualitas	0	6,6		6,6		6,6									
Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	persentase peningkatan volume usaha koperasi	0	10	605.011.630	10	1.205.219.500	11	800.000.000							DKUKM	
	persentase peningkatan investasi koperasi sektor kelautan dan perikanan	0	4		4		4									
	persentase peningkatan investasi koperasi sektor pariwisata	0	7		7		7									
Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	persentase pertumbuhan volume usaha pelaku usaha kecil	0	5	3.680.045.900	10	2.784.850.000	15	3.055.705.880							DKUKM	
	persentase pertumbuhan pelaku usaha kecil	0	15		15		15									
	persentase pertumbuhan produk usaha kecil yang dikembangkan	0	4		4		4									
	pertumbuhan produk usaha kecil yang tersertifikasi	0	20		20		20									

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	persentase SDM koperasi terlatih	185	4,13	2.907.202.350	10,32	5.819.903.000	10,32	2.053.244.000							DKUKM
	persentase SDM Usaha Kecil terlatih	541	0,68		1,07		1,12								
Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT KUMKM	0	0	71.830.100	0	281.266.000	0	850.444.000							DKUKM
	Pertumbuhan produk parekraf	0	10		10		10								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (pakai angka)								80	153.775.000	85	169.152.500	90	-	DKUKM
	survey kepuasan pelayanan internal (persen)								90	13.457.277.064	92	14.803.004.770	95		DKUKM
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (persen)								70%	159.390.000	72%	175.329.000	75%	-	DKUKM
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas (persen)								50%	150.000.000	60%	165.000.000	65%	-	DKUKM
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi Yang								30%	225.000.000	35%	235.000.000	40%	-	DKUKM

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Terlatih (persen)														
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Diberdayakan (persen)								20%	1.450.000.0 00	25%	1.595.000.0 00	30%	-	DKUKM
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM Yang Diberdayakan (persen)								1%	1.257.320.8 22	1,5%	1.383.052.9 04	2%	-	DKUKM
Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM Yang Dikembangkan (persen)								1%	1.950.000.0 00	1,5%	2.145.000.0 00	2%	-	DKUKM
URUSAN PENANAMAN MODAL															
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	1 Predikat Nilai SAKIP Perangkat Daerah	3	3	1.553.962.747	3	3.289.842.6 99	3	3.415.447.7 30							
	2 Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100%	100%		100%		100%								
Program Peningkatan Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1 Jumlah Profil Investasi	-	1	247.038.221											DPMPTSP
	2 Jumlah UKM Yang Bermitra Dengan Investor	-	1												DPMPTSP

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1 Pertambahan Jumlah Profil Investasi Sektor Pertanian Yang Digunakan Untuk Promosi Investasi Daerah Di Sektor Pertanian	-			0	466.129.456	0	726.727.670							DPMPTSP
	2Pertambahan Jumlah UMK Pertanian Yang Bermitra Dengan Investor	-			1		1								DPMPTSP
	3 Pertambahan Jumlah Profil Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan YAng Digunakan Untuk Promosi Investasi Daerah Di Sektor Kelautan Dan Perikanan	-			0		0								DPMPTSP
	4 Pertambahan Jumlah UMK Kelautan dan Perikanan Yang Bermitra Dengan Investor	-			1		1								DPMPTSP
	5 Pertambahan Jumlah Profil Investasi Sektor Pariwisata Yang Digunakan Untuk Promosi Investasi Daerah Di Sektor Pariwisata	-			0		0								DPMPTSP

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6 Pertambahan Jumlah UKM Pariwisata Yang Bermitra Dengan Investor	-			1		1								DPMPTSP
	7 Pertambahan Jumlah Profil Sumber Daya Mineral Yang Bermitra Dengan Investor	-			3		3								DPMPTSP
	8 Pertambahan Jumlah UMK Sumber Daya Mineral Yang Bermitra Dengan Investor	-			1		1								DPMPTSP
Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	1 Pertambahan Jumlah Investor Sektor Pertanian	-	2	599.807.818	3	299.411.000	3	753.296.500							DPMPTSP
	2 Pertambahan Jumlah Investor Sektor Kelautan dan Perikanan	-	1		2		2								DPMPTSP
	3 Pertambahan Jumlah Investor Sektor Pariwisata	-	2		3		3								DPMPTSP
	4 Pertambahan Jumlah Investor Sektor Sumber Daya Mineral	-	2		3		3								DPMPTSP
Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Sistem Informasi	1 Persentase Perusahaan Sektor Pertanian Yang Sesuai Realisasi Investasi dengan Rencana Investasi	-	0,43%		0,44%	318.061.260	45%	524.488.500							DPMPTSP

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2 Persentase Perusahaan Sektor Kelautan dan Perikanan Yang Sesuai Realisasi Investasi Dengan Rencana Investasi	-	0,43%		0,44%		45%								DPMPTSP
	3 Persentase Perusahaan Sektor Pariwisata Yang Sesuai Realisasi Investasi Dengan Rencana Investasi	-	0,43%		0,44%		45%								DPMPTSP
	4 Persentase Perusahaan Sektor Sumber Daya Mineral Yang Sesuai Realisasi Investasi Dengan Rencana Investasi	-	0,43%		0,44%		45%								DPMPTSP
															DPMPTSP
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	1 Persentase Ketepatan Waktu Penerbitan Sumber Daya Mineral	-	79%	514.517.984	79%	365.893.670	82%	700.100.644							DPMPTSP
	2 Rata-rata Ketepatan Waktu Penyelesaian Perjanjian	-	11		10		10								DPMPTSP
	Persentase Penerbitan Izin	-	78%												DPMPTSP

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Tepat Waktu														
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Sakip PD (pakai angka)								76	96.000.000	80	110.400.000	85	120.000.000	DPMPTSP
	survey kepuasan pelayanan internal								85%	7.345.967.2 82	90%	9.669.053.4 91	100%	9.889.071.502	DPMPTSP
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Kerjasama Mitra Kerja Dengan Investor								80%	472.751.000	90%	543.663.650	95%	605.731.250	DPMPTSP
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Investor Yang Berinvestasi								65%	393.675.000	70%	452.726.250	75%	500.000.000	DPMPTSP
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP								100%	474.800.000	100%	482.770.000	100%	500.000.000	DPMPTSP
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang Patuh Terhadap Perundang- Undangan								15%	319.246.800	17%	367.133.820	20%	412.386.460	
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Valid dan Update								100%	71.886.000	100%	82.668.900	100%	90.342.980	DPMPTSP
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Persentase Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	NA	75	3.393.386.111	80	3.732.724.7 72	85	4.105.997.1 94							DISKEPORA
	Persentase Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	NA	75	3.751.358.661	80	3.938.926.5 94	85	4.199.001.9 45							DISKEPORA
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga	NA	62	525.200.000	70	577.720.000	73	635.492.000							DISKEPORA
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan	57,01	76		82		85								DISKEPORA
Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	Persentase Pemuda Berprestasi yang dibina	0,04	0,08	3.726.427.000	0,16	4.009.069.7 00	0,24	4.508.976.6 70							DISKEPORA
	Persentase Pemuda Berprestasi	NA	0,2287	3.421.427.000	0,2287	4.099.069.7 00	0,2287	4.508.976.6 70							DISKEPORA
	Persentase Kunjungan Pemuda Lintas	200	200	415.000.000	220	456.500.000	240	502.150.000							DISKEPORA

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Negara														
	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Pemuda Lintas Negara	NA	0,2	415.000.000	0,0667	456.500.000	0,0625	502.150.000							DISKEPORA
	Persentase Insan Kepemudaan yang Berprestasi dan berdedikasi Yang mendapatkan pembinaan	6,41	6,41	100.000.000	12,82	110.000.000	19,23	121.000.000							DISKEPORA
	Persentase Insan Kepemudaan yang berprestasi dan berdedikasi yang dibantu	NA	641	100.000.000	0,0641	110.000.000	0,0641	121.000.000							DISKEPORA
	Persentase Pemuda yang menciptakan peluang lapangan Pekerjaan	0,003	0,003	300.770.106	0,005	330.847.117	0,011	363.931.828							DISKEPORA
	Persentase pemuda yang bekerja	NA	0,102	300.770.106	0,102	330.847.117	0,102	363.931.828							DISKEPORA
Program Peningkatan Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Pertumbuhan Peserta yang mengikuti Babel Sport Tourism	20	20	1.500.000.000	22	1.650.000.000	24	1.815.000.000							DISKEPORA
	Pertumbuhan Jumlah peserta yang mengikuti babel sport tourism	NA	0,02	500.000.000	0,04	550.000.000	0,06	605.000.000							DISKEPORA

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	persentase atlet pelajar berprestasi yang memperoleh medali yang dibina di tingkat provinsi	NA	5,08	5.903.531.075	5,42	6.493.884.183	5,76	7.143.272.601							DISKEPORA
	Persentase Atlet pelajar Berprestasi yang dibina ditingkat provinsi yang memperoleh medali	NA	0,05	5.474.531.075	0,05	6.208.984.183	0,05	6.829.982.601							DISKEPORA
	Persentase peserta yang mengikuti olahraga rekreasi dan tradisional	NA	0,004	426.036.567	0,005	468.640.224	0,006	515.504.246							DISKEPORA
	Persentase pelajar penyandang Disabilitas yang dibina dalam bidang keolahragaan	NA	4,02	259.000.000	4,24	284.900.000	4,46	313.390.000							DISKEPORA
	Persentase peserta yang megikuti olahraga rekreasi dan tradisional	NA	0	351.036.567	0	386.140.224	0	424.754.246							DISKEPORA
	Persentase Pelajar Penyandang Disabilitas yang berprestasi di bidang keolahragaan	NA	0,0402	259.000.000	0,0402	284.900.000	0,0402	313.390.000							DISKEPORA

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase lansia yang mengikuti olahraga khusus	NA	0,19	75.000.000	0,21	82.500.000	0,22	90.750.000							DISKEPORA
	Persentase lansia yang aktif yang mengikuti pelayanan olah raga khusus lansia	NA	0,0019	75.000.000	0,0019	82.500.000	0,0019	90.750.000							DISKEPORA
	Persentase Insan Olahraga Yang Beprestasi dan Berdedikasi yang mendapatkan pembinaan	NA	3,39	150.000.000	3,73	165.000.000	4,07	181.500.000							DISKEPORA
	Persentase Insan Olahraga yang berprestasi	NA	0,05	150.000.000	0,05	165.000.000	0,05	181.500.000							DISKEPORA
	Persentase Sumber Daya Tenaga Keolahragaan yang mendapatkan pembinaan	NA	2,67	120.000.000	2,93	132.000.000	3,2	145.200.000							DISKEPORA
	Persentase Sumber Daya Tenaga Keolahragaan yang memiliki standar Nasional	NA	0,0267	120.000.000	0,0267	132.000.000	0,0267	145.200.000							DISKEPORA
Program Pengembangan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Sarana dan Prasarana Kepemudaan Yang Terbangun	NA	20	1.150.000.000	30	3.200.000.000	20	2.600.000.000							DISKEPORA

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Presentase jumlah sarana dan prasaran kepemudaan yang terbangun yang difungsikan	NA	0,0833		0,1667		0,1667								DISKEPORA
	Persentase Sarana dan Prasarana Untuk Event Olahraga Tingkat Regional dan Nasional Yang Terbangun	NA	8,33	3.194.898.774	16,67	642.250.000 .000	16,67	809.100.000 .000							DISKEPORA
	Presentase jumlah sarana dan prasaran olahraga yang terbangun dalam mendukung event olahraga regional dan nasional	NA	0,0833	3.007.917.057	0,1667	753.250.000 .000	0,1667	409.100.000 .000							DISKEPORA
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Sakip PD (pakai angka)								75	251.676.614	75	276.844.275	75	276.844.275	DISKEPORA
	survey kepuasan pelayanan internal								75	8.422.965.9 73	75	9.265.262.5 70	75	9.265.262.570	DISKEPORA
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Pemuda	Persentase Pemuda Yang Berprestasi								0,15%	1.589.047.5 71	0,15%	1.747.952.3 28	0,15%	1.747.952.328	DISKEPORA
	Persentase Pemuda yang Memiliki Keterampilan								0,03%	98.940.000	0,03%	108.834.000	0,03%	108.834.000	DISKEPORA
	Persentase Organisasi Pemuda yang								48,61%	400.000.000	48,61%	440.000.000	48,61%	440.000.000	DISKEPORA

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	aktif														
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Organisasi Pramuka yang memiliki kapasitas								2,01%	8.000.000.000	2,01%	8.800.000.000	2,01%	8.800.000.000	DISKEPORA
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet pelajar yang berprestasi								14,29%	7.817.973.589	14,29%	9.919.770.948	14,29%	9.919.770.948	DISKEPORA
	Persentase cabang olahraga yang dibina								61,54%	1.018.800.000	61,54%	1.120.660.663	61,54%	1.120.660.663	DISKEPORA
	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang dimanfaatkan								100%	3.400.000.000	100%	3.740.000.000	100%	3.740.000.000	DISKEPORA
	Persentase standarisasi tenaga keolahragaan								58,97%	15.000.000.000	58,97%	16.500.000.000	58,97%	16.500.000.000	DISKEPORA
URUSAN KEARSIPAN															
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah														Dinas kearsipan dan perpustakaan
	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Terhadap Pelayanan Kesekretariatan														

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Persentase lembaga yang melaksanakan tertib arsip		0%	-	0%	-	20%	297.639.000	20%	475.000.000	25%	510.000.000	45%	1.282.639.000	Dinas kearsipan dan perpustakaan
	Persentase kelembagaan kearsipan yang melaksanakan tertip arsip		46%	487.103.500	17%	140.699.000							46%	627.802.500	Dinas kearsipan dan perpustakaan
Program peningkatan pengelolaan dan pelestarian kearsipan	Pertambahan jumlah arsip yang terkelola (dinamis dan statis)		320 arsip	290.887.400	200 arsip	192.492.000	378 arsip	314.204.000	1150 arsip	850.000.000	1400 arsip	1.050.000.000	2550 arsip	2.697.583.400	Dinas kearsipan dan perpustakaan
Program penunjang urusan pemerintah daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah								77	52.220.000	78	100.000.000	78	24.903.500.000	Dinas kearsipan dan perpustakaan
	Survey Kepuasan Pelayanan Internal								100	12.120.248.907	100	12.455.475.000	100		
Program pengelolaan arsip	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kearsipan sesuai dengan standard baku kearsipan								20%	424.997.315	20%	1.115.425.000	20%	1.400.000.000	Dinas kearsipan dan perpustakaan
Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Persentase berkas arsip yang dilindungi dan diselamatkan sesuai dengan ketentuan								20%	120.000.000	20%	120.000.000	20%	240.000.000	Dinas kearsipan dan perpustakaan
Program perizinan penggunaan arsip	Persentase berkas layanan perizinan penggunaan arsip yang digunakan								15%	55.200.000	15%	107.836.000	15%	160.000.000	Dinas kearsipan dan perpustakaan

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	sesuai dengan ketentuan														
URUSAN PERPUSTAKAAN															
Program pengembangan sumber daya perpustakaan	Persentase perpustakaan terakreditasi		0%	0	20%	69.669.850	18,18%	66.487.500	70%	500.000.000	100%	600.000.000	100%	1.236.157.350	Dinas kearsipan dan perpustakaan
	Persentase perpustakaan sekolah yang terakreditasi		18,18%	130.189.700	0%	-	0	-	0%	-	0%	-	18,18%	130.189.700	Dinas kearsipan dan perpustakaan
	Pertambahan pengelola perpustakaan yang dapat menerapkan perpustakaan sesuai standar		40	230.395.440	0	43.191.500	40	208.393.500	-	-	-	-	-	481.980.440	Dinas kearsipan dan perpustakaan
	Pertambahan jumlah koleksi buku perpustakaan		0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Dinas kearsipan dan perpustakaan
	Pertambahan jumlah jenis koleksi bahan pustaka		308	118.651.500	14	22.460.000	400	142.957.000	-	-	-	-	-	284.068.500	Dinas kearsipan dan perpustakaan
	Pertambahan pengunjung perpustakaan		8131	461.666.400	5907	253.910.000	12500	371.957.500	-	-	-	-	-	1.087.533.900	Dinas kearsipan dan perpustakaan
Program pembinaan perpustakaan	Persentase perpustakaan yang dibina								60%	416.375.000	60%	525.000.000	60%	2.543.545.000	Dinas kearsipan dan perpustakaan

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase perpustakaan yang dikembangkan								35%	78.191.500	35%	275.000.000	35%		Dinas kearsipan dan perpustakaan
Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Jumlah dokumen koleksi nasional dan naskah kuno								9 doku men	239.000.000	9 doku men	239.000.000	9 doku men	200.000.000	Dinas kearsipan dan perpustakaan
URUSAN KEBUDAYAAN															
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	76	78	4.469.243.000	80	11.144.155. 450	81	9.045.544.7 00	81	9.665.260.5 00	82	10.398.142. 500	82	44.722.346.15 0	DISBUDPAR
	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	70	75		75		77		80		85				
Program Pelestarian Budaya	Pertumbuhan Warisan Budaya Daerah	6	17,29	4.713.898.000	29,37	6.853.981.8 00	4238	11.092.929. 800	55,39	20.718.831. 500	69,52	17.279.097. 550	42,79	60.658.738.65 0	DISBUDPAR
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Sakip PD (pakai angka)								81	11.463.822. 924	82	26.190.100. 000	82	3.617.500.000	DISBUDPAR
	survey kepuasan pelayanan internal								80%		85%		85%		DISBUDPAR
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kebudayaan yang dikelola								55%	350.000.000	62%	150.250.000	65%	2.633.246.812	

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan								55%	550.000.000	62%	2.733.275.000	65%	5.505.677.013	DISBUDPAR
Program Pembinaan Sejarah	Persentase Pembinaan Sejarah								35%	250.000.000	45%	375.000.000	55%	1.590.000.000	
Program Pelestarian dan Pengelolaan Budaya	Persentase cagar budaya dilestarikan dan dikelola								50%	250.000.000	60%	600.000.000	65%	3.975.000.000	DISBUDPAR
Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase museum provinsi yang dikelola								100%	700.000.000	100%	300.000.000	100%	600.000.000	
URUSAN PILIHAN															
URUSAN PARIWISATA															
Program Pelestarian Budaya	Pertumbuhan Warisan Budaya Daerah	6	17,29	4.713.898.000	29,37	6.853.981.800	4238	11.092.929.800	55,39	20.718.831.500	69,52	17.279.097.550	42,79	60.658.738.650	DISBUPAR
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Pangsa Pasar Wisatawan Daerah	0,32	0,35	6.296.385.000	0,38	11.656.079.400	0,41	23.312.425.700	0,45	25.511.946.800	0,49	27.709.362.900	0,41	94.486.199.800	DISBUPAR
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	Persentase Sumber Daya Pariwisata yang Bersertifikat	12,35	2,77	2.064.009.000	6,45	13.714.426.300	7,38	21.230.129.160	8,3	23.461.142.576	8,39	25.609.167.877	6,65	86.079.874.913	DISBUPAR
	Persentase Sumber Daya Pariwisata yang Bersertifikat di Pulau Belitung														

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pengembangan Desrinasi Pariwisata	Persentase Derstinasi Pariwisata yang Memenuhi Standar	0	81,52	6.874.615.000	44,44	12.793.498. 800	70,37	14.614.300. 000	96,3	15.742.949. 375	100	17.654.168. 548	65,92	69.679.531.72 3	DISBUPAR
	Persentase Destinasi Pariwisata yang Memenuhi Standar di Pulau Belityung														
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pangsa Pasar Wisatawan Daerah								9,7%	1.600.000.0 00	10,5%	6.306.625.2 88	20,3%	11.449.620.07 2	DISBUDPAR
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak kekayaan Intelektual	Persentase kabupaten/kota yang teridentifi kasi untuk pe ngembangan kabupaten/kota kreatif, ruang kreasi dan jaring an orang kreatif								1,9%	790.000.000	1,94%	990.000.000	3,88%	1.780.000.000	DISBUDPAR
	Persentase pro duk kreatif yang potensial untuk perluasan pasar								3,38%		3,38%		7,78%		DISBUDPAR
	Persentase unit usaha kreatif untuk pengem bangan usaha														DISBUDPAR
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif terlatih dan terserfikasi								6,75%	600.000.000	31,65%	1.150.000.0 00	81,33%	2.000.000.000	DISBUDPAR
	Persentase Kemitraan								82,85%	100.000.000	57,15%	125.000.000	100%	225.000.000	DISBUDPAR

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pariwisata yang terbentuk														
	Persentase Lembaga LSP P1 yang terbentuk								33%	75.000.000	33%	75.000.000	66%	150.000.000	DISBUDPAR
	Persentase Asesor bidang yang terlatih								50%	180.000.000	50%	200.000.000	100%	380.000.000	DISBUDPAR
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Pariwisata yang memenuhi standar								0,7%	1.661.669.680	85%	1.950.000.000	85%	13.865.000.000	DISBUDPAR
URUSAN TRANSMIGRASI															
Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Tingkat kesejahteraan petani masyarakat transmigrasi di kawasan KTM Batu Betumpang		0	198.842.050		150.020.000		127.190.000							DISNAKER
	Tingkat kesejahteraan petani masyarakat transmigrasi di kawasan KTM Gantung		0											DISNAKER	
	Persentase desa di kawasan transmigrasi yang diberdayakan		0											DISNAKER	
Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Persentase Produktivitas Tenaga Kerja di kawasan		0											DISNAKER	

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	transmigrasi														
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Satuan Kawasan Transmigrasi								1 Kawasan	103.000.000	2 Kawasan	118.450.000	2 Kawasan	148.062.500	DISNAKER
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Nilai LAKIP		BB	4.299.755.000	BB	12.577.218. 460	A	8.117.479.3 83							DKP
Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Laut	Persentase sarana dan prasarana yang terbangun di Desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)		1,6	5.100.000.000	2,13	6.210.000.0 00	2,13	9.466.000.0 00							DKP
	Luas Kawasan Konservasi yang dicadangkan (Ha)		815,077	195.020.000	820,077	2.100.000.0 00	825,077	2.220.000.0 00							DKP
	Persentase Usulan Pemanfaatan Ruang Laut yang terekomendasi (%)		60	880.520.000	65	516.000.000	75	570.000.000							DKP
Program Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)		65	1.216.773.000	70	2.550.000.0 00	75	2.860.000.0 00							DKP
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Volume Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	181.000	211.300	6.026.470.900	215300	20.945.000. 000	219300	25.370.000. 000							DKP
	Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	107	108	182.230.000	109	2.900.000.0 00	110	3.100.000.0 00							DKP

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok (Ton)			-	19500	610.000.000	22500	1.220.000.000							DKP
	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Etalase Perikanaan Selat Nasik (Ton)			-	33000	610.000.000	35000	1.220.000.000							DKP
	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Industri Perikanaan Tanjung Binga (Ton)			-	10	457.500.000	13125	915.000.000							DKP
	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap di Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar (Ton)			-	10000	152.500.000	13125	305.000.000							DKP

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan	Volume Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	17.080	11.620	559.168.000	12120	1.564.000.000	12620	2.489.000.000							DKP
	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya di kawasan Strategis Mina-politan Lepar Pongok (Ton)			-	220	73.000.000	270	113.000.000							DKP
	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya dikawasan Strategis Etalase Perikanaan Selat Nasik (Ton)			-	121	73.000.000	163	113.000.000							DKP
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau	Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)		8,75	276.672.000	9,63	885.000.000	10,59	1.140.000.000							DKP
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Laut	Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)		0,05	223.906.000	0,06	540.000.000	0,07	600.000.000							DKP
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Tawar	Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)			560.600.000											DKP

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan	Angka Konsumsmi Ikan (Kg/Org/Tahun)	49	53	734.620.000	54	1.446.000.0 00	55	1.485.000.0 00							DKP
	Volume Produksi Olahan (Ton)	24	20.610	1.907.545.000	21110	2.645.000.0 00	21610	2.750.000.0 00							DKP
	Pertumbuhan Volume Produksi Olahan dikawasan Strategis Industri Perikanaan Tanjung Binga (Ton)			-	121	5.400.000.0 00	163	6.430.000.0 00							DKP
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	Persentase Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (%)	-	80	-	84	700.000.000	88	600.000.000							DKP
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertambahan pendapatan asli daerah dari layanan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (Juta Rupiah)	-	-	1.941.740.000	360	2.200.000.0 00	480	2.400.000.0 00							DKP
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau	Pertambahan Jumlah pendapatan dari layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan	25	25	863.730.400	26,25	1.850.000.0 00	28,88	1.900.000.0 00							DKP

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	penyakit (Juta Rupiah)														
Program Peningkatan Pelayanan Teknis	Pertambahan Jumlah pendapatan dari layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Juta Rupiah)	150	75	789.380.000	82,5	1.200.000.0 00	86,63	1.300.000.0 00							DKP
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	Pertambahan Jumlah pendapatan dari layanan pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan (Juta Rupiah)	150	75	820.286.000	82,5	900.000.000	86,63	950.000.000							DKP
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Sakip PD (pakai angka)								4	17.627.047. 410	75	19.377.058. 410	75	19.377.058.41 0	DKP
	Survey kepuasan pelayanan internal								90,00 %	15.499.463. 410		15.249.663. 410		15.249.663.41 0	DKP
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau- pulau Kecil	Luasan ruang laut, pesisir dan pulau pulau kecil yang termanfaatkan (Ha)								1.050.00 0	700.000.000	1.100.00 0	433.550.000	3.150.00 0	433.550.000	DKP
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)								75	900.000.000	77	250.000.000	224	250.000.000	DKP

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pengembangan perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (%)								1,85%	71.404.515.145	1,90%	7.700.000.000	0	7.700.000.000	DKP
Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (%)								4,20%	4.072.416.000	4,30%	1.981.465.111	0	1.981.465.111	DKP
Program Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Pertumbuhan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (%)								3,30%	1.000.000.000	3,50%	575.000.000	0	575.000.000	DKP
URUSAN PERTANIAN															
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	4	5	7.194.525.000	5	7.558.834.825	6	9.601.891.900							Dinas Pertanian
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah														
	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan (%)	80	80		90		100								
Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi komoditi strategis tanaman pangan (padi) (Ton)	38.393	40.313,00	1.552.435.000	43.135	964.202.000	47.017	1.683.605.000							Dinas Pertanian
	Produksi komoditi strategis Hortikultura (Cabai Besar)	2.284,80	2.528,54		2.813,28		3.113,22								Dinas Pertanian

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab		
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	(Ton)																
	Produksi komoditi strategis Hortikultura (Cabai Rawit) (Ton)	1.916,10	2.257,43		2.651,13		3.095,08									Dinas Pertanian	
	Produksi komoditi strategis Hortikultura (Bawang Merah) (Ton)	65,4	81,72		98,11		114,51									Dinas Pertanian	
	Kawasan komoditas padi	1	-		1		-									Dinas Pertanian	
	Kawasan komoditi cabai	1	-		1		-									Dinas Pertanian	
	Kawasan bawang merah	1	-		1		-									Dinas Pertanian	
	Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan hortikultura	-	30		40		50									Dinas Pertanian	
	NTP subsektor Tanaman Pangan	93,08	94,08		95,08		97,08										Dinas Pertanian
	NTP subsektor Hortikultura	100,35	100,55		100,75		100,95										Dinas Pertanian
Program Pengembangan Perkebunan	Peningkatan produksi lada (ton)	39.153	41.111	4.088.978.500	43.577	4.515.562.000	46.628	5.737.225.000							Dinas Pertanian		

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Peningkatan produksi karet (ton)	56.864	58.438		60.173		61.407								Dinas Pertanian
	Pengembangan kawasan lada (ton)	3	1		1		1								Dinas Pertanian
	Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil perkebunan	6	31		56		81								Dinas Pertanian
	NTP subsektor Perkebunan	97,03	98,8		100,6		102,4								Dinas Pertanian
Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah populasi ternak besar sapi (ekor)	11.545	13.090	3.649.402.000	14.399	2.878.432.750	15.838	3.047.927.000							Dinas Pertanian
	Jumlah populasi ternak ayam (ekor)	11.500.000	12.075.000		12.678.800		13.312.700								Dinas Pertanian
	Kawasan pengembangan ternak sapi	2	1		1		-								Dinas Pertanian
	Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil peternakan	4	8		14		20								Dinas Pertanian
	NTP subsektor Peternakan	92,86	93,86		94,86		95,86								Dinas Pertanian
Program Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pertanian	17	14	4.551.447.720	15	4.998.825.500	15	12.839.194.000							Dinas Pertanian

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kebijakan dan implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan	-	1		2		1								Dinas Pertanian
	Peningkatan pemberdayaan petani dalam mendukung sektor pertanian	10	10		10		10								Dinas Pertanian
	Peningkatan fungsi kelembagaan pertanian	10	10		10		10								Dinas Pertanian
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Pertanian	Ketersediaan kandang ternak, gudang pakan, gedung pertemuan dan sarana prasarana	1	6	5.288.106.200	1	8.856.022.000	1	3.593.065.000							Dinas Pertanian
	Ketersediaan bibit ayam (ekor)	1	5		6		8								Dinas Pertanian
	Ketersediaan anakan sapi (ekor)	8	15		20		25								Dinas Pertanian
	Ketersediaan benih sumber padi (ton)	-	2		4		6								Dinas Pertanian
	Ketersediaan bibit lada (polibag)	-	25		50		75								Dinas Pertanian
	Ketersediaan bibit karet (polibag)	200	40		40		40								Dinas Pertanian
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman	Terkendalinya areal tanam yang terserang OPT dan DPI	5	5	368.380.000	5	1.323.491.000	5	550.000.000							Dinas Pertanian

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah benih tanaman perkebunan yang bersertifikat dan berlabel (polibag)	750	1.050.000	441.573.000	1.310.000	353.411.000	1.570.000	553.530.000							Dinas Pertanian
	Jumlah benih tanaman pangan yang bersertifikat dan berlabel (ton)	100	125		150		175								Dinas Pertanian
	Jumlah benih tanaman hortikultura yang bersertifikat dan berlabel (polibag)	1	1.250		1.500		1.750								Dinas Pertanian
	Pengawasan peredaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (produsen)	34	40		44		47								Dinas Pertanian
	Jumlah varietas unggul yang didaftarkan	2	2		2		2								Dinas Pertanian
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Sakip PD								79,89	477.000.000	80,39	482.800.000	80	482.800.000	Dinas Pertanian
	Survey Kepuasan Internal								80%	27.396.446. 632	80%	32.823.719. 958	80%	32.823.719.95 8	Dinas Pertanian
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase terawasinya peredaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung peningkatan produksi								100%	150.000.000	100%	157.500.000	100%	157.500.000	Dinas Pertanian

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase peningkatan luas tanam Tanaman Pangan & Hortikultura								69,58%	1.013.807.752	83,32%	1.031.250.000	83,32%	1.031.250.000	Dinas Pertanian
	Persentase peningkatan luas tanam perkebunan								10,17%	19.250.441.057	11,96%	20.187.816.500	11,96%	20.187.816.500	Dinas Pertanian
	Persentase benih/bibit pertanian berlabel dan bersertifikat								5%	502.481.191	5%	634.000.000	5%	634.000.000	Dinas Pertanian
	Persentase Ketersediaan benih/bibit pertanian tingkat lapang (daerah)								50%	642.250.000	50%	674.362.500	50%	674.362.500	Dinas Pertanian
	Persentase Pertambahan Angka Kelahiran Ternak								35,63%	1.400.000.000	43,41%	1.680.000.000	50%	1.680.000.000	Dinas Pertanian
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rasio Ketersediaan Prasarana Prapanen Pertanian (%)								15%	2.000.000.000	15%	2.000.000.000	15%	2.000.000.000	Dinas Pertanian
	Rasio Ketersediaan Prasarana Pascapanen Pertanian (%)								5%	800.000.000	5%	840.000.000	5%	840.000.000	Dinas Pertanian
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterier	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular								75%	600.000.000	75%	720.000.000	75%	720.000.000	Dinas Pertanian

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dokumen Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)								1 Dok	237.500.000	1 Dok	238.000.000	1 Dok	238.000.000	Dinas Pertanian
	Dokumen Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim								1 Dok	125.000.000	1 Dok	126.000.000	1 Dok	126.000.000	Dinas Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kelas kelompok tani								80%	975.000.000	80%	1.050.000.000	80%	1.050.000.000	Dinas Pertanian
URUSAN KEHUTANAN															
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Indikator 1 : Persentase pelayanan Dinas Kehutanan	100	100	2.940.595.709	100	4.678.298.500	100								DINAS KEHUTANAN
	Indikator 1 : Nilai SAKIP PD Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Ket: AA=(>90-100); A=(>80-90); BB=(>70-90); B=(>60-70); CC=(>50-60); C=(>30-50); D=0-30)	45,6	75		80,2		82,5								DINAS KEHUTANAN

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Persentase kawasan hutan yang dikelola			1.530.886.554		2.179.693.6 50		3.531.271.8 13							DINAS KEHUTANAN
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan	Persentase luas kawasan hutan yang termanfaatkan		33,33	1.866.722.000	62,5	1.866.722.0 00	75	2.670.000.0 00							DINAS KEHUTANAN
Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Ekosistem	Pesrentase penurunan luas kerusakan hutan			1.462.545.640		1.220.127.0 00		2.742.400.0 00							DINAS KEHUTANAN
Program Peningkatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Program dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase luas DAS yang terkelola			1.388.597.287		2.975.989.0 00		6.670.000.0 00							DINAS KEHUTANAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah								83	150.000.000	80	370.000.000	80	420.000.000	DINAS KEHUTANAN
	Survey Kepuasan Aparatur								100	29.065.660. 736	100	28.318.628. 735	100	30.000.000.00 0	DINAS KEHUTANAN
Program Pengelolaan Hutan	Persentase Pengelolaan Hutan								90	4.951.696.0 00		2.456.800.0 00		7.408.496.000	DINAS KEHUTANAN
	Persentase hasil hutan yang dikelola								33	160.000.000	35	175.000.000	38	185.000.000	DINAS KEHUTANAN
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Persentase Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya								20	250.000.000		400.000.000		650.000.000	DINAS KEHUTANAN

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase Penyuluh Kehutanan yang meningkat Kapasitasnya dan terbinanya KTH								100	754.164.040	119.438	1.796.328.080	218.979	2.550.492.120	DINAS KEHUTANAN
	Persentase Penyuluh Kehutanan yang meningkat Kapasitasnya								100	150.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	DINAS KEHUTANAN
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Persentase Kelompok Tani Hutan yang terbina								62,5	413.164.040	65	946.328.080	70	950.321.000	DINAS KEHUTANAN
	Persentase Luas Perhutanan Sosial								80	191.000.000	83	500.000.000	85	600.000.000	DINAS KEHUTANAN
	Persentase DAS yang dikelola								1,64	375.000.000	22	500.000.000	50	875.000.000	DINAS KEHUTANAN
URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL															
Program Peningkatan Dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah	nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			4.479.920.662		8.394.009.000									ESDM
Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Persentase perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang menerapkan 'Good Mining Pratice'	45%	50%	223.820.000	65%	450.000.000	70%	450.000.000							ESDM

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah IUP mineral bukan logam dan batuan yang dibina dan diawasi														ESDM
Program Pengembangan Pertambangan Mineral	Persentase perusahaan pertambangan mineral logam dan batuan yang menerapkan 'Good Mining Praticice'	45%	50%	350.000.000	60%	550.000.000	65%	650.000.000							ESDM
	Jumlah IUP mineral logam dan batuan yang dibina dan diawasi														ESDM
Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah	Indikator 1 : Persentase cadangan mineral yang potensial	-	16,28%	150.000.000	32,55%	500.000.000	48,83%	500.000.000							ESDM
	Indikator 2 : Persentase cadangan mineral yang diselidiki	-	16,28%	317.270.000		-		-							ESDM
Program Pengembangan Sumber Daya Energi	Indikator 1 : Persentase Penggunaan EBT	6,81%	6,82%	12.118.110.000	6,83%	15.000.000.000	6,84%	15.000.000.000							ESDM
	Indikator 2 : Persentase perusahaan pendistribusian minyak dan gas yang taat aturan	40%	50%	150.000.000	60%	250.000.000	65%	250.000.000							ESDM

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Indikator 3. Persentase perusahaan yang bergerak di bidang ketenagalistrikan yang sesuai dengan aturan	40%	50%	150.000.000	60%	200.000.000	65%	250.000.000							ESDM
Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam dan Batuan	Indikator 1: Pertambangan Jumlah DBH (Dana Bagi Hasil) SDA (Sumber Daya Alam)	77,7 Miliar	70 Miliar	103.700.000	80 Miliar	250.000.000	80 Miliar	250.000.000							ESDM
Program Pengembangan Sumber Daya Energi	Indikator 1 : Jumlah Dana Bagi Hasil dan Lifting Migas Babel	480 Ribu barel	460 Ribu Barel	125.850.000	440 ribu barel	300.000.000	420 ribu barel	350.000.000							ESDM
Program Peningkatan Geologi dan Air Tanah	Indikator: Pertumbuhan jumlah pendapatan daerah dari retribusi pergantian biaya cetak peta	4 miliar	1,5 miliar	-	1,7 miliar	200.000.000	1,9 miliar	200.000.000							ESDM
Program Pengembangan Pertambangan Mineral	Indikator 1: Persentase lahan kritis diareal IUP yang direklamasi	NA	15%%	900.396.000	13%	2.250.000.000	12%	2.250.000.000							ESDM
	Indikator 2: Nilai Jaminan Reklamasi	200 miliar	10 miliar	103.945.000	10 miliar	350.000.000	10 miliar	350.000.000							ESDM
	Indikator 3: Persentase luas lahan terganggu diareal IUP	5,6%%	24,50%	900.396.000	43,40%	2.250.000.000	81,20%	2.500.000.000							ESDM

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pengelolaan Geologi dan Air Tanah	Indikator 1: Persentase cadangan air tanah yang potensial	NA	18,20%	0	40,90%	200.000.000	63,60%	200.000.000							ESDM
	Indikator 2: Persentase pemenuhan air tanah di lokasi yang rawan air	NA	1%	1.700.000.000	0	0	1,70%	1.300.000.000							ESDM
	Indikator 3: Jumlah Obyek Geologi yang diusulkan menjadi kawasan cagar alam geologi	10 Obyek	10 obyek	0	10 Obyek	150.000.000	10 Obyek	175.000.000							ESDM
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat Nilai SAKIP Perangkat Daerah								80	20.962.304.592	4	26.810.000.000	4	26.810.000.000	ESDM
	Survey kepuasan pelayanan internal								95%	15.802.454.592	100%	20.085.000.000	100%	20.085.000.000	ESDM
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Penataan pengelolaan kegeologian								70%	250.000.000	75%	350.000.000	75%	350.000.000	ESDM
Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	Persentase pertambangan yang "good mining practices"								70%	500.000.000	75%	850.000.000	80%	850.000.000	ESDM
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase Bauran Energi								10,68%	350.000.000	10,94%	700.000.000	11%	700.000.000	ESDM
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi								98%	275.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	ESDM
URUSAN PERDAGANGAN															

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab	
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (Ket: AA=6 A=5 BB=4 B=3 CC=2 C=1)		3	3.779.265.000	3	3.550.931.4 00	3	3.700.831.2 75								
	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Keseekretariatan		100		100		100									
	Nilai SAKIP															
Program Pengembangan Perdagangan	Pertumbuhan Volume Ekspor		860	18.293.331.000	862	34.774.061. 000	862	27.746.093. 000							DISPERINDAG	
	Persentase rumah tangga miskin yang bekerja di sektor perdagangan		10		10		10									
	Persentase pemantauan dan pengawasan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan pokok)		73		83		89									
	Persentase peningkatan sarana dan sarana perdagangan yang dibangun		0		63		12									
	Pertumbuhan nilai resi gudang		0		20		40									

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	yang diterbitkan														
	Pertumbuhan komoditi yang terjual melalui Pasar Lelang		0		1		1								
	Persentase peningkatan promosi produk dalam negeri		10		10		10								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)								80	213.007.000	82	234.307.700	84	330.000.000	DISPERINDAG
	Survey Kepuasan Pelayanan Internal								80%	14.934.809.848	90%	16.382.074.333	100%	17.495.500.000	DISPERINDAG
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Ketaatan Perdagangan Bahan Berbahaya								1%	84.678.000	2%	93.145.800	3%	100.000.000	DISPERINDAG
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Barang terdistribusi								60%	247.846.000	70%	272.630.600	80%	320.000.000	DISPERINDAG
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase ketersediaan Bapokting								80%	392.199.000	85%	431.418.900	90%	500.000.000	DISPERINDAG
	Persentase Tersalurkannya Pupuk Bersubsidi								70%	151.426.000	75%	166.568.600	80%	170.000.000	DISPERINDAG
Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Produk Non Migas (USD juta)								900	580.338.672	1.100	638.372.539	1.300	700.000.000	DISPERINDAG
Program Standardisasi Dan	Indeks Keberdayaan								40 (Mampu	501.038.500	43 (Mampu	551.142.350	43 (Mampu	600.000.000	DISPERINDAG

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Perlindungan Konsumen	Konsumen								)		)		)		
	Persentase Layanan Terstandarisasi								75%	312.153.033	805	343.368.336	85%	400.000.000	DISPERINDAG
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri								40%	247.846.000	45%	272.630.600	48%	312.000.000	DISPERINDAG
URUSAN PERINDUSTRIAN															
Program Pengembangan Wilayah dan Pegawasan Industri	Jumlah kawasan strategis/kawasa n industri/kawasan sentra	0		852.398.000	1	3.250.000.000	1	5.075.000.000							DISPERINDAG
	Jumlah industri yang memenuhi standar industri	15			15		15								DISPERINDAG
Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi dan Akses Industri	Persentase tenaga kerja Industri terhadap total tenaga kerja	5,1			5,17		5,24								DISPERINDAG
	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di Industri Kelautan dan Perikanan	0,68		4.351.752.500	0,7	7.459.432.700	0,71	8.468.061.691							DISPERINDAG
	Persentase Tenaga Kerja yang tererap di Industri Pariwisata	0,308			0,319		0,333								DISPERINDAG

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase industri yang memiliki informasi kandungan nutrisi olahan pangan		2,96		4,68		6,71								DISPERINDAG
	Pertumbuhan industri pada sektor pertanian		1,474		1,499		1,524								DISPERINDAG
	Persentase tenaga kerja industri pada sektor pertanian		10,13		10,28		10,44								DISPERINDAG
	Pertumbuhan industri turunan Potensi Sumber Daya Mineral yang dikembangkan		4		4		5								DISPERINDAG
	Persentase tenaga kerja yang terserap di bidang industri turunan pertambangan`		1.035		1.035		1.036								DISPERINDAG
Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian	Indeks Keberdayaan Konsumen (Ket: Sadar = 0-20 Paham = 21-40 Mampu = 41-60 Kritis = 61-80 Berdaya = 81-100)		20	1.346.796.000	22	5.966.000.000	25	7.890.000.000							DISPERINDAG

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga (112 barang SNI wajib; 140 pelaku usaha Tertib Niaga)		10		14		18								DISPERINDAG
	Persentase pengembangan standarisasi dan lab kemetrolagian		10		20		50								
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk	Persentase komoditi unggulan daerah yang di uji (7 komoditi) dan kalibrasi peralatan (4 besaran)		27	1.237.299.000	18	3.526.429.000	18	3.489.907.000							DISPERINDAG
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan jumlah industri								5%	2.469.794.500	6%	2.716.773.950	7%	3.210.000.000	DISPERINDAG
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Industri yang sesuai Izin Usaha Industri								30%	190.111.000	35%	209.122.100	40%	330.000.000	DISPERINDAG
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data informasi industri di SIINAS								70%	69.564.000	73%	76.520.400	75%	80.000.000	DISPERINDAG
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
UNSUR PERENCANAAN															

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Keseekretariatan		100	6.440.435.100	100	8.131.546.000	100	7.512.876.000							BAPPEDA
	Predikat SAKIP Bappeda		76		82		85								BAPPEDA
Program Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	100	100	1.778.538.953	100	2.135.903.000	100	3.309.455.000							BAPPEDA
Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase PD Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dalam Penilaian LAKIP PD pada Aspek Perencanaan Kienrja mendapatkan skor/nilai > 25	100	85	341.052.387	90	324.747.000	90	1.353.250.000							BAPPEDA
Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase PD Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang dalam Penilaian LAKIP PD pada Aspek Perencanaan Kienrja mendapatkan skor/nilai > 25	100	85	266.559.095	90	435.602.000	90	1.311.500.000							BAPPEDA

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan	Persentase PD Mitra Bidang Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang dalam Penilaian LAKIP PD pada Aspek Perencanaan Kienrja mendapatkan skor/nilai > 25	100	85	69.019.018	90	216.365.700	90	1.325.000.000							BAPPEDA
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip PD								83,24	150.000.000	85	190.000.000	90	200.000.000	BAPPEDA
	survey kepuasan pelayanan internal								75%	15.216.686.200	80%	13.045.000.000	85%	14.500.000.000	BAPPEDA
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah	Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD								100%	2.805.647.000	100%	2.926.659.000	100%	3.105.261.160	BAPPEDA
Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Pesentase kesesuaian dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								100%	315.665.000	100%	520.000.000	100%	640.000.000	BAPPEDA
Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Pesentase kesesuaian dokumen perencanaan bidang Perekonomian								100%	325.723.000	100%	420.000.000	100%	540.000.000	BAPPEDA

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	dan Sumber Daya Alam														
Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pesentase kesesuaian dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								100%	424.366.000	100%	490.000.000	100%	533.675.000	BAPPEDA
UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian dan inovasi daerah yang dijadikan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan	100%	85%	853.645.209	90%	896.575.500	90%	1.180.000.000							BAPPEDA
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan								80%	2.586.155.000	85%	510.000.000	85%	1.850.000.000	BAPPEDA
	Persentase jumlah inovasi daerah yang dikembangkan								75%	1.350.000.000	80%	205.000.000	85%	560.000.000	BAPPEDA

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
UNSUR KEUANGAN															
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	-	100	14.242.602.958	100	19.803.282. 257	100	14.542.421. 133							BAKUDA
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (AA=90- 100, A=80-90, BB=70-80, B=60- 70, CC=50-60, C=40-50)	55	69,5	59.227.984	74	5.825.000	78	111.775.000							BAKUDA
Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah	Prosentase Pertumbuhan pendapatan pajak daerah	19,26%	6,10%	1.192.187.500	4,78%	1.667.882.2 50	4,99%	1.910.540.0 00							BAKUDA
Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah	Prosentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan LLPADS	17,87%	5,03%	539.812.100	5,03%	124.399.250	5,03%	919.072.000							BAKUDA
Program Peningkatan Fungsi Perbendaharaan dan Verifikasi	prosentase kesesuaian waktu pelayanan terhadap pencairan dana keuangan	100,00%	100,00%	307.701.000	100,00%	298.132.000	100,00%	543.431.100							BAKUDA
	Persentase Pemda yang telah melaksanakan transaksi non tunai sesuai regulas														BAKUDA

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan	persentase laporan keuangan PD yang sesuai dengan SAP	81,58%	100,00%	1.105.197.642	100,00%	411.443.000	100,00%	789.138.000							BAKUDA
Peningkatan Tata Kelola Asset Daerah	persentase laporan BMD PD yang sesuai dengan Peraturan	n/a	100,00%	1.285.176.800	100,00%	865.234.200	100,00%	1.708.081.000							BAKUDA
	persentase nilai asset yang dimanfaatkan terhadap seluruh nilai asset daerah	n/a	0,27%	156.150.000	0,27%	285.000.000	0,28%	238.214.000							BAKUDA
Program Penganggaran Pembangunan Daerah	Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Provinsi	n/a	100,00%	2.784.419.400	100,00%	1.162.813.800	100,00%	1.930.981.000							BAKUDA
	Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten/Kota	n/a	100,00%	627.311.400	100,00%	71.450.000	100,00%	591.939.000							BAKUDA
Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah	N/A	78	3.501.414.014	79,5	5.086.988.750	81	6.064.870.000							BAKUDA

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap terhadap pelayanan Publik Jasa Lainnya Badan Keuangan Daerah	N/A	80	462.071.000	81	228.110.000	82	69.626.000							BAKUDA
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip PD								80	141.000.000	82	188.415.000	86	189.211.434	BAKUDA
	Survey Kepuasan Pelayanan Internal								80,33%	64.196.213. 423	83%	75.748.541. 220	85%	80.546.780.00 0	BAKUDA
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Transaparansi dan akuntabiitas pengelolaan keuangan daerah								100%	2.834.351.6 50	100%	3.881.237.0 00	100%	3.881.237.000	BAKUDA
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tindak lanjut temuan BPK terhadap nilai aset daerah yang dianggap belum diyakini kewajarannya/tid ak memadai								95,5%	1.125.689.0 00	96%	1.379.170.0 00	97%	1.379.170.000	BAKUDA
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peesentase Peningkatan pertumbuhan PAD								7,52%	1.582.847.5 00	7,60%	4.452.873.0 00	7,80%	4.452.873.000	BAKUDA
UNSUR KEPEGAWAIAN															

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat BKPSDMD	90	92	9.676.024.880	95	8.689.426.924	97	13.505.000.000							BKPSDMD
	Nilai LAKIP BKPSDMD	0	63		76		80								BKPSDMD
	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	53	59		65		70								BKPSDMD
	Persentase Sarana dan Prasarana Yang Layak Fungsi	85	87		91		92								BKPSDMD
Program Pengadaan Pegawai, Mutasi, Promosi, dan Kepangkatan	Persentase Pegawai ASN Yang Ditempatkan Sesuai Dengan Kompetensi	55	64	2.105.411.100	74	1.902.015.000	83	3.500.400.000							BKPSDMD
	Persentase Pemenuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan dan Formasi	79	83		87		92								BKPSDMD
	Persentase Pegawai ASN Naik Pangkat dan Pensiun Tepat Waktu	90	91		92		93								BKPSDMD
Program Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi Dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara	Persentase ASN Yang SKP nya Dinilai Tepat Waktu	46	56	1.949.545.050	65	5.205.277.000	76	8.703.250.000							BKPSDMD
	Persentase Akurasi Data dan Informasi Kepegawaian	72	78		84		90								BKPSDMD

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin Minimal Sedang	0,19	0,17		0,15		0,13								BKPSDMD
	Persentase ASN Yang Menerima Penghargaan	1,85	2,17		2,19		2,21								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)								85	18.291.541	86	125.000.000	87	143.291.541	BKPSDMD
	Survey Kepuasan Pelayanan Internal								95%	20.747.267.052	98%	32.045.390.662	98%	52.792.657.714	BKPSDMD
Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Pegawai ASN yang sesuai dengan kebutuhan dan formasi								73%	2.125.666.670	73%	5.744.771.897	73%	7.870.438.567	BKPSDMD
	Persentase ASN yang memiliki kinerja dan disiplin minimal baik								99,79%	269.309.088	99,82%	1.012.201.489	99,87%	1.281.510.577	BKPSDMD
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya								74%	1.538.598.750	83%	9.453.468.279	83%	10.992.067.029	BKPSDMD
UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	Persentase Pegawai ASN Yang Memenuhi Kompetensi Dasar dan	88	92	6.346.790.160	96	7.486.508.400	97	15.884.500.000							BKPSDMD

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab		
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Manajerial																
	Persentase Pegawai ASN Yang Meningkatkan Kompetensi Teknis dan Fungsional	4,45	23				42				60						
	Nilai Akreditasi Diklat	71	71				81				81						
	Persentase Pegawai ASN Yang Meningkatkan Pendidikan Formalnya	31,6	36,9				39,9				41						
Program Penilaian dan Pemetaan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mempunyai profil kompetensi sesuai dengan standar penilaian	11,12	20,89	856.571.320	0	0	0	0							BKPSDMD		
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya								80%	590.000.000	85%	915.000.000	89%	1.770.000.000	BKPSDMD		
UNSUR PENGHUBUNG																	
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat Badan Penghubung	0	70	11.513.512.800	71	10.656.944. 500	72	91.140.000. 000	73	10.430.000. 000	74	12.170.000. 000	74	##### #####	Badan Penghubung Provinsi		
	Nilai Lakip Badan Penghubung	60	65		70		75		80		85		85		Badan Penghubung Provinsi		

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Informasi, Investasi dan Pelayanan Serta Hubungan antar Lembaga Penghubung Provinsi	Persentase Promosi, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga serta Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Ibukota Jakarta	0	100	9.438.748.000	100	9.448.555.500	100	10.730.692.500	100	8.150.000.000	100	9.420.000.000	100	47.187.996.000	Badan Penghubung Provinsi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat Nilai SAKIP Perangkat Daerah								80	46.336.859	85	101.687.449	85	110.000.000	Badan Penghubung Provinsi
	Persentase tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap kesekretariatan								90%	8.490.258.967	100%	10.660.499.538	100%	10.094.206.462	Badan Penghubung Provinsi
Program Pelayanan Penghubung	Jumlah Pelayanan Penghubung yang terlaksana								100%	583.773.883	100%	5.081.328.026	100%	9.728.417.250	Badan Penghubung Provinsi
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
SEKRETARIAT DPRD															
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan		90%	10.176.790.497	90%	12.051.552.139									SETWAN
	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD		76		80		85								
	Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD						90%	8.715.032.000							SETWAN

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Nilai LAKIP Sekretariat DPRD		60		65		77								
Program Pengembangan Risalah Rapat dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan	Persentase Peningkatan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD dan Alat Kelengkapan Lainnya		80%	78.085.172.513	80%	78.666.051. 520									SETWAN
	Persentase meningkatnya Produk Hukum yang ditetapkan oleh Lembaga DPRD						80%	62.741.236. 923							SETWAN
Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan, Kehumasan dan Protokoler Dewan	Persentase Kesesuaian antar Informasi yang dipublikasikan dan layanan keprotokoler dewan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah		95%	7.043.213.400	95%	8.130.940.0 00	95%	9.504.587.5 00							SETWAN
	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana lembaga DPRD		75%		76%		77%								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)								79	21.385.851. 963	80	23.524.437. 159	82	44.910.289.12 2	SETWAN
	Survey Kepuasan Pelayanan Internal								92%	10.209.202. 221	93%	11.230.122. 443	95%	21.439.324.66 4	SETWAN

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Meningkatnya Fungsi Lembaga DPRD								82%	47.952.788.487	85%	52.748.067.336	87%	##### #####	SETWAN
SEKRETARIAT DAERAH															
BIRO UMUM															
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	80	100	48.394.471.715	100	50.942.622.648	100	53.489.753.780							BIRO UMUM
BIRO PEREKONOMIAN															
Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian	Prosentase Koordinasi Kebijakan Perekonomian	0	100	818.556.850	100	1.306.000.000	100	1.916.000.000							BIRO PEREKONOMIAN
Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	0	100	644.924.775	100	882.500.000	100	1.171.500.000							BIRO PEREKONOMIAN
Program Peningkatan Koordinasi Bumda, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya	Prosentase Koordinasi Kebijakan BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya	0	100	2.350.877.200	100	3.260.000.000	100	2.207.661.933							BIRO PEREKONOMIAN
BIRO PEMBANGUNAN															

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBN	Prosentase Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Penyelenggaraan Dana APBN di Provinsi dan Kabupaten/ Kota	0	75	475.514.731	80	1.407.072.6 23	85	1.208.633.1 40							BIRO PEMBANGUN AN
Program Perencanaan Setda	Persentase Dokumen Keuangan dan Laporan Kinerja meningkat	0	75	301.467.968	80	428.313.000	85	492.559.950							BIRO PEMBANGUN AN
Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Prosentase Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Penyelenggaraan Dana APBD di Provinsi dan Kabupaten/Kota	0	92	779.993.020	95	1.549.651.6 06	97	1.780.849.3 47							BIRO PEMBANGUN AN
Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD	Persentase Realisasi Program dan Kegiatan APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0	80	501.326.670	85	1.982.884.1 94	90	2.209.852.0 94							BIRO PEMBANGUN AN
BIRO LAYANAN PENGADAAN															
Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan	Persentase data dan informasi pengadaan barang/jasa yang dikelola dan dipublikasikan berbasis IT;	90	90	554.899.000	92	1.446.989.5 00	94	1.591.688.4 50							BIRO LAYANAN PENGADAAN

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Survey kepuasan masyarakat terhadap pengembangan data informasi layanan pengadaan	0	80		80		80								BIRO LAYANAN PENGADAAN
Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Persentase RPP siap lelang yang selesai ditangani ULP	100	90	2.337.898.000	92	5.034.568.000	94	5.538.024.800							BIRO LAYANAN PENGADAAN
	Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan Barang dan Jasa	0	80		80		80								BIRO LAYANAN PENGADAAN
Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Penggunaan e - Procrument terhadap belanja pengadaan pengadaan secara elektronik	60	90	2.539.128.000	92	5.020.020.500	94	5.522.022.550							BIRO LAYANAN PENGADAAN
	Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan secara elektronik	0	80		80		80								BIRO LAYANAN PENGADAAN
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL															
Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi Media dan IT	Persentase pemanfaatan media dan IT untuk layanan kehumasan, dokumentasi dan publikasi	0	80	2.193.142.400	85	3.503.023.340	90	4.020.448.841							BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Pelayanan Protokoler	Persentase agenda kepala daerah yang terlayani	0	80	162.698.250	85	535.354.305	90	678.246.464							BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan dan Penyaringan Informasi	Persentase Pelayanan dan Penyampaian informasi kepada aparatur dan publik	0	80	1.224.371.325	85	1.975.838.255	90	2.278.149.960							BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
BIRO PEMERINTAHAN															
Program Pengembangan Otonomi Daerah	Peringkat penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi	0	15	1.448.652.830	13	2.638.074.000	11	2.272.931.408							BIRO PEMERINTAH AN
	Persentase kebijakan yang diterbitkan dalam rangka harmonisasi dan efektifnya pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan	0	10		15		20								BIRO PEMERINTAH AN
	Jumlah kepala daerah dan anggota legislative yang terfasilitasi secara administrasi	0	20		20		20								BIRO PEMERINTAH AN

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Indikator 4 : Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan kepuasan masyarakat atas layanan-layanan publik	0	90		90		90								BIRO PEMERINTAH AN
Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah	Indikator 1 : Meningkatnya koordinasi hubungan kepala daerah di Prov Kep Bangka Belitung	0	90	1.639.284.704	90	1.665.551.000	90	1.549.338.000							BIRO PEMERINTAH AN
	Meningkatnya jumlah kerjasama antar pemerintah daerah, swasta dan luar negeri	0	90		90		90								BIRO PEMERINTAH AN
BIRO HUKUM															
Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penataan Peraturan Perundang- undangan	100	80	1.912.323.600	85	3.420.000.000	90	4.078.050.000							BIRO HUKUM
Program Peningkatan Pelayanan Hukum Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Hukum	100	80	955.806.626	85	1.816.000.000	90	1.970.046.250							BIRO HUKUM
Program Pengembangan Dokumentasi Hukum Dan Informasi Hukum	Persentase Pengembangan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum	100	80	750.391.500	85	1.510.000.000	90	1.670.000.000							BIRO HUKUM
BIRO KESEJAHTERAAN															

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
RAKYAT															
Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan	Indikator : Prosentase pembinaan keagamaan	0	100	8.394.550.000	100	12.728.933. 000	100	11.595.068. 000							BIRO KESEJAHTERA AN RAKYAT
Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, Pemuda dan Pariwisata	Indikator : Prosentase pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata	0	100	1.323.400.000	100	2.010.920.0 00	100	2.160.920.0 00							BIRO KESEJAHTERA AN RAKYAT
Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Indikator : Prosentase koordinasi kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi	0	100	535.189.000	100	1.067.422.0 00	100	1.217.422.0 00							BIRO KESEJAHTERA AN RAKYAT
BIRO ORGANISASI															
Program Peningkatan Dan Pengembangan Kelembagaan Serta Analisis Jabatan	Persentase organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan ukuran kelembagaannya	0	70	2.047.186.525	75	952.670.000	80	1.563.440.0 00							BIRO ORGANISASI
	Persentase ASN memahami dan mengimplementa sikan analisa jabatan,analisa beban kerja,peta jabatan dan standar kompetensi	0	75		80		85								BIRO ORGANISASI

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	teknis														
	Persentase jumlah pejabat struktural ASN yang memahami dan mengimplemen- tasi uraian tugas dan fungsi	0	75		80		85								BIRO ORGANISASI
	Persentase jumlah OPD provinsi, kabupaten, kota yang efektif dan efisien	0	70		75		80								BIRO ORGANISASI
Program Peningkatan Dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan pengembangan kinerja ASN dan Pemerintah Daerah	0	70	2.868.168.893	75	4.115.000.000	80	4.744.777.000							BIRO ORGANISASI
	Persentase peningkatan informasi data profil aparatur jabatan struktural provinsi kepulauan bangka belitung	0	65		75		80								BIRO ORGANISASI

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	61,89	63		65		67								BIRO ORGANISASI
	Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN	95,08	96		97		99								BIRO ORGANISASI
Program Peningkatan Dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Peningkatan kepuasan masyarakat	0	0	852.840.935	0	1.900.000.000	0	2.035.000.000							BIRO ORGANISASI
	Peningkatan kinerja sumber daya aparatur	0	50		55		60								BIRO ORGANISASI
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah								85	89.996.875.049	85	99.096.062.554	95	99.927.171.782	Biro Umum
	Survey Layanan Internal								100%	49.274.795.830	100%	54.202.275.413	100%	55.000.000.000	Biro Umum
	Persentase Terlaksananya Cakupan Layanan Administrasi Umum								100%	40.227.079.219	100%	44.349.287.141	8	4.552.481.541	Biro Umum
	Persentase Tersedianya sarana penunjang kedisiplinan dan peningkatan Kapasitas ASN								90%	310.000.000	90%	341.000.000	90%	350.000.000	Biro Umum
Program Penataan Administrasi Umum	Persentase Cakupan Layanan Pelaksanaan Administrasi Umum								100%	2.671.846.940	100%	2.939.031.634		3.039.031.634	Biro Umum

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase OPD dengan type kelembagaan yang tepat dan nilai kinerja baik								80%	805.705.855	80%	886.276.441	95	920.276.441	Biro Organisasi
	Persentase Cakupan Layanan Pelaksanaan Administrasi Pimpinan								100%	1.517.644.000	100%	1.669.408.400	8	1.759.408.400	Biro Humas dan Protokol
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan dibidang ekonomi yang teimplementasikan								90%	323.403.576	95%	355.743.934	100	440.620.008	Biro Perekonomia n
	Tingkat Kematangan UKPBJ								Level 4	2.750.935.525	Level 4	3.053.709.755		3.200.709.755	Biro Pengadaan Barang/Jasa
	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah								85%	270.000.000	95%	270.000.000			Biro Pembanguna n
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Terimplementasikan								90%	36.731.042.470	90%	40.441.411.168	96,4	41.441.411.168	Biro Pemerintaha n
	Persentase Kebijakan dibidang Kesejahteraan Rakyat yang terimplementasikan								100%	34.273.071.745	100%	37.737.643.370	100%	38.007.643.370	Biro Kesra

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase Produk Hukum yang selaras dan terimplementasik an								90%	825.589.259	90%	908.148.185	90%	1.080.148.185	Biro Hukum
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Keseekretariatan	70%	75%	2.902.348.030	75%	10.391.720. 000	80%	10.911.256. 000							Inspektorat
	Skor (Nilai) SAKIP Perangkat daerah	70	75		75		82								Inspektorat
Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	Peningkatan capaian Level Kapabilitas APIP	2	3	400.000.000	3	1.067.500.0 00	3	1.420.625.0 00							Inspektorat
	Peningkatan Capaian Level Maturitas SPIP	1	2		2		3								Inspektorat
Program Pengawasan dan Pembinaan Pegelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Prosentase jumlah pengembalian uang yang disetorkan ke kas daerah	88,83	90	4.255.463.000	90	6.058.961.0 00	90	6.165.669.0 00							Inspektorat
	Prosentase jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan APIP dan BPK yang selesai ditindaklanjuti	91,63	93		94		95								Inspektorat

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Prosentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	100	100		100		100								Inspektorat
Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur	Prosentase tingkat capaian OPD dengan Laporan Kinerja BAIK	65,94%	75%	283.650.000	75%	1.199.000.000	75%	1.632.244.700							Inspektorat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)								80	272.000.000	82	535.000.000	85	565.250.000	Inspektorat
	Survey Kepuasan Pelayanan Internal								85%	17.276.216.979	90%	18.887.963.639	95%	19.887.963.639	Inspektorat
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan								<5%	1.480.000.000	<4%	3.000.000.000	<3%	4.800.000.000	Inspektorat
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Level 3								3	860.000.000	3	1.410.000.000	3	1.550.000.000	Inspektorat
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM															
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Nilai Lakip Badan Kesbangpol	75	75	226.512.737	80	424.740.000	82	479.688.000							Bakesbangpol
	Nilai kepuasan pelayanan sekretariat Badan Kesbangpol	100%	100	1.586.800.774	100	4.184.088.000	100	4.602.496.800							Bakesbangpol
Program Penguatan Kewaspadaan Nasional	Tingkat Kerawanan Konflik	17	12	316.049.170	9	1.275.000.000	7	6.680.000.000							Bakesbangpol

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kabupaten/kota														
Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	persentase kasus terhadap simbol negara yang dapat diantisipasi		0	-	0	358.000.000	0	2.250.000.000							Bakesbangpol
	persentase kasus konflik sara yang dapat diantisipasi	3	3	1.063.837.150	2	2.334.000.000	1	5.750.000.000							Bakesbangpol
Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan		25	130.993.950	35	724.000.000	45	1.050.000.000							Bakesbangpol
	Persentase Jumlah sanggar/paguyub an yang melestarikan seni dan budaya		0	-	40	77.000.000	50	2.080.000.000							Bakesbangpol
	pertumbuhan masyarakat yang sadar bahaya NAPZA		50	43.261.960	500	303.000.000	0	1.450.000.000							Bakesbangpol
Program Pembinaan Politik dalam Negeri	Pertumbuhan Cakupan Pembinaan Politik Daerah		7	242.566.000	7	983.000.000	7	1.125.000.000							Bakesbangpol
	persentase rekomendasi pengembangan berdemokrasi yang ditindak lanjuti		40	215.054.600	50	555.000.000	60	2.065.000.000							Bakesbangpol
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip PD								80	7.143.897.063	90	9.258.563.393	90	4.703.805.740	Bakesbangpol

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungj awab
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	survey kepuasan pelayanan internal								100%	6.948.812.263	100%	8.858.563.393	100%	9.561.200.000	
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kasus Penistaan terhadap simbol-simbol Negara								0	2.285.136.200	0	2.000.000.000	0	2.200.000.000	Bakesbangpol
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas								1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	300.000.000	Bakesbangpol
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Jumlah Angka Kriminalitas Menurun								1 Laporan	120.005.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	Bakesbangpol
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Ketidakhadiran Masyarakat dalam Pemilu/Pemilu Kada								15,00%	1.198.044.172	76,52%	502.932.906	77%	600.000.000	Bakesbangpol
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Potensi Konflik Sosial Menurun.								1 Laporan	644.999.700	1 Laporan	700.000.000	1 Laporan	852.932.906	Bakesbangpol

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci ini, selain dipedomani dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus menjadi alat ukur yang bisa dimiliki dan dievaluasi, sehingga pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dapat diukur dan dievaluasi, baik tahunan maupun lima tahunan. Oleh karena itu Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Perubahan RPJMD 2017-2022 ini, dirumuskan menjadi 2 (dua), yaitu: (1) Indikator Kinerja Utama dan (2) Indikator Kinerja Kunci.

8.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2017-2022 tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diharapkan akan terus berlangsung dalam proses pembangunan di Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun ke depan. Pemerataan pendapatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan diupayakan dapat menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tersedia, sehingga dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan. Muara dari seluruh pelaksanaan pembangunan tersebut adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Disamping hal tersebut, seluruh pelaksanaan pembangunan di wilayah Bangka Belitung diupayakan mampu menjaga keselarasan, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup. Guna mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama lima tahun ke depan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator Sasaran Strategik RPJMD Tahun 2017-2022 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini,

Tabel VIII.1
Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL RPJMD	2018	2019	2020	2021	2022	KONDISI AKHIR RPJMD
			Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
1	5	6	8		10	11	12	13
1	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	1,17	4,17	1,42	3,9	5,97	5,98	5,98
2	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	-3,74	8,11	5,87	3,90	4,42	4,59	4,59
3	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	15,30	2,92	-58,94	2,15	2,20	2,25	2,25
4	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Energi	2,22	-1,08	0,87	1,50	1,74	1,76	1,76
5	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan	7,02	5,36	1,47	2,00	2,70	2,75	2,75
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,78	3,65	3,62	5,42	5,50	5,40	5,40
7	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	58,83	63,23	63,82	63,95	64,00	64,80	64,80
8	Persentase Angka Kemiskinan	5,30	4,77	4,50	5,77	5,50	5,00	5,00
9	Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa	1.120.353	1.214.930	1.271.837	1.334.870	1.409.026	1.479.389	1.479.389
10	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	10	35	45	75	86	100	100
11	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Dasar	8	10	15	20	25	54	54
12	Indeks Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	30,25	34,53	39	60	69,45	71,84	71,84
13	Angka Harapan Lama Sekolah, (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)	11,71	11,83	11,94	11,96	12,5	13,00	13,00
		L=11,35	L=11,70	L=11,78	L=11,80	L=12,5	L=13	L=13
		P=12,07	P=12,05	P=12,11	P=12,13	P=12,5	P=13	P=13

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL RPJMD	2018	2019	2020	2021	2022	KONDISI AKHIR RPJMD
			Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
1	5	6	8		10	11	12	13
14	Persentase Sekolah Terakreditasi A	35,66	40,15	43,38	44	44,30	60	60
15	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	60	63,05	65,55	67,85	68,1	68,5	68,5
16	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,07	2,02	1,98	2,00	2,08	2,08	2,08
17	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,93	89,15	89	89,01	89,02	89,05	89,05
18	Indeks Pembangunan Pemuda	49	53,67	54,50	55,50	56,50	57,50	57,50
19	Indeks Pembangunan Olah Raga	0,25	0,26	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50
20	Persentase PMKS Sejahtera	44%	62%	63%	64,00%	65,92%	67,00%	67,00%
21	Angka Kesehatan Masyarakat	76,94	88,35	88,48	82,97	83,21	86,22	86,22
22	Indeks Reformasi Birokrasi	65,49	65,39	66,84	66,97	67	67,50	67,50
23	Nilai Kebebasan Sipil	83,07	80,95	84,12	85,02	87,79	87,82	87,82
24	Nilai Hak-Hak Politik	82,30	73,56	71,71	75,80	81,79	81,85	81,85
25	Nilai Kelembagaan Demokrasi	72,89	63,76	75,48	78,50	80,36	80,54	80,54
26	Indeks Kapasitas Terhadap Bencana Daerah	0,10	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41
27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,85	67,68	63,99	75,51	75,74	75,99	75,99

8.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK)

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2017-2022 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara rinci disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel VIII.2
Indikator Kinerja Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2017	Proyeksi Capaian Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2022
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
A.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4,47	4,46	3,32	4,50	3,50	4,00	4,00
2.	PDRB Per Kapita	48.827.254	50.087.237	50.933.457	51.999.546	52.788.473	53.555.410	53.555.410
3.	Inflasi	3,13	3,18	2,62	3,00	3,01	4,00	4,00
4.	Indeks Gini	0,276	0,272	0,262	0,260	0,258	0,255	0,255
5.	Indeks ketimpangan Williamson	0,1932	0,1993	0,2004	0,2020	0,2030	0,2050	0,2050
6.	Indeks Pembangunan Manusia	69,99	70,67	71,30	71,05	71,20	71,40	71,40
7.	Persentase Penduduk Miskin	5,20	5,25	4,50	5,10	5,00	4,50	4,50
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,78	3,65	3,62	3,50	5,20	4,50	4,50
B.	Fokus Kesejahteraan Masyarakat							
1.	Pendidikan							
1.1.	Angka rata-rata lama sekolah	7,78	7,84	7,98	8,00	8,02	8,05	8,05
1.2.	Harapan Lama Sekolah	11,71	11,83	11,89	11,93	11,97	12	12
2.	Kesehatan							
2.1.	Angka usia harapan hidup	69,95	70,18	70,50	70,70	71,00	71,10	71,10
2.2.	Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	3,11	3,25	3,21	7,160	7,140	7,120	7,120
2.3.	Angka Kematian Balita (per 1000 kelahiran hidup)	3,59	3,72	3,21	7	7	7	7
2.3.	Prevalensi Kurang Gizi anak balita	27,30	12,05	8,16	7,14	7,80	6,20	6,20
2.4.	Angka Kematian ibu (per 100.000 orang)	21	44	36	21	20	19	19
3.	Ketenagakerjaan							
3.1.	Rasio penduduk yang bekerja	0,96	0,96	0,96	0,98	0,99	0,99	0,99

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2017	Proyeksi Capaian Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2022
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
C.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga							
1.	Kebudayaan							
1.1.	Jumlah grup kesenian	2,50	2,69	2,89	3,08	3,27	3,47	3,47
1.2.	Jumlah gedung	0,0079	0,0080	0,0081	0,0082	0,0083	0,0084	0,0084
2.	Pemuda dan Olahraga							
2.1.	Jumlah klub olahraga	625	635	640	645	650	660	660
2.2.	Jumlah gedung olahraga	1732	1732	1733	1734	1735	1736	1736
II.	ASPEK PELAYANAN UMUM							
A.	Fokus Layanan Urusan Wajib							
1.	Pendidikan							
	APM Sekolah Menengah	49,99	55,24	61,92	62,10	62,85	63,20	63,20
	Akreditasi Sekolah	35,66	40,15	43,38	44,25	44,50	45,10	45,10
2.	Kesehatan							
	Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya	1395	1718	2049	2150	2230	2300	2300
	Akreditasi Rumah Sakit	65	70,83	72	73	74	75	75
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	93	93,43	94,21	94,40	94,60	95	95
	Rasio Jaringan Irigasi	1,04	6,5	7	7,6	7,8	80	80
	Persentase Penyediaan Air Baku Peningkatan Luas Kawasan Yang Terlindungi Dari Daya Rusak Air	10	15	19	25	28	30	30
	Persentase Penyediaan Air Baku	1,11	5,7	6,06	8,03	8,50	8,80	8,80
4.	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak	68,14	68,83	73,45	74,10	75,25	75,80	75,80

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2017	Proyeksi Capaian Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2022
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak	83.56	85,64	90,30	90,80	91,40	92	92
5.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Kepala Daerah yang Ditindaklanjuti	417	277	169	115	110	100	100
6.	Urusan Sosial							
	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	394.681	391.124	398.970	399.030	399.100	399.150	399.150
	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Terbedayakan	1.017	980	962	960	980	990	990
7.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
	Persentase Industri Rumah (IR) Yang Dibina	0.30	0.40	0.66	0.68	0.69	0.70	0.70
8.	Urusan Tenaga Kerja							
	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi	2.5	1	3	4	5	6	6
9.	Urusan Pangan							
	Capaian Skor PPH Ketersediaan	78.78	86.09	87.84	88,03	88,90	89,02	89,02
	Capaian PPH Konsumsi	81.2	80.09	83.01	84,00	85,00	85,50	85,50
	Persentase Penduduk Rawan Pangan	9.66	10.13	7.9	7,5	7,0	6,8	6,8
10.	Urusan Pertanahan							
	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah	100	75	80	80	80	85	85
11.	Urusan Lingkungan Hidup							
	Persentase Peningkatan Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan	60	72	34.11	50	60	75	75
	Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	50	50	85	88	90	92	92

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2017	Proyeksi Capaian Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2022
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Jumlah Rekomendasi Izin Lingkungan Yang Diterbitkan	126	135	146	160	170	180	180
	Persentase Aduan Masyarakat Yang Diverifikasi	100	85	94	95	98	99	99
12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	46.41	60.41	74.41	88.41	89,41	90,03	90,03
	Persentase akta pencatatan sipil	55.54	63.32	71.10	79.26	79,50	80,00	80,00
13.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
	Persentase Kampung KB	30	63.63	76.62	76.62	77	78	78
14.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	232	277	289	290	295	230	230
15.	Urusan Perhubungan							
	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	30	30.25	34.53	35	35,80	36	36
	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	20	21	38.12	38,50	39	39,30	39,30
16.	Urusan Penanaman Modal							
	Nilai Investasi	3.781	3.733	4.246	4.329	4.350	4.400	4.400
17	Urusan Kepemudaan dan Olahraga							
	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	1,12	1.20	2.50	3.10	4.05	4.16	4.16
	Persentase Angkatan Kerja Pemuda	3,15	4.10	4.50	5.20	5.50	6.01	6.01
	Persentase Cabang Olahraga Berprestasi	50	55	60	65	70	75	75
	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Berolahraga	0.10	0.15	0.17	0.18	0.20	0.21	0.21
	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	49	53.67	54,05	54,30	54,70	56,00	56,00
	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	0.26	0.26	0,28	0,30	0,32	0,35	0,35

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2017	Proyeksi Capaian Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2022
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18.	Urusan Komunikasi dan Informasi							
	Persentase Jumlah layanan infrastruktur teknologi dan Kapasitas layanan publik pemerintah berbasis e-Government	75	85	90	97	98	99	99
19.	Urusan Statistik							
	Persentase Data dan informasi statistik yang digunakan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan	35	90	95	98	99	100	100
20.	Urusan Persandian							
	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	1	1	2	3	3	4	4
21.	Urusan Kebudayaan							
	Persentase Cagar Budaya Dilestarikan dan Dikelola	5	10	35	45	50	55	55
22.	Urusan Perpustakaan							
	Persentase Perpustakaan Yang Dibina	1.34%	2.69%	9.50%	10%	15%	20%	20%
	Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan	23.055	22.379	24.429	26.600	27.000	27.300	27.300
23.	Urusan Kearsipan							
	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Dengan Standard Baku Kearsipan	30%	36%	40%	45%	50%	55%	55%
	Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE)	39	45.82	47.76	48,30	48,60	49	49
24.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
	Persentase Koperasi Aktif	72.86	69.42	62.37	62.50	63.05	63.40	63.40
	Jumlah Koperasi Aktif	714	681	654	700	750	780	780
	Jumlah Koperasi	980	981	1.049	1.100	1.150	1.200	1.200
	Jumlah UMKM Yang Diberdayakan	150.87	150.948	161.186	162.172	162.486	163.121	163.121
B	Fokus Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan							
1.	Urusan Pemerintahan Umum							
	Nilai Kebebasan Sipil	83.07	80.95	84.12	85,02	87.79	87.82	87.82
	Nilai Kelembagaan Demokrasi	72.89	63.76	75.48	75,80	81,79	81,85	81,85

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2017	Proyeksi Capaian Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2022
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Nilai Hak-Hak Politik	82.30	73.56	71.71	78,50	80,36	80,54	80,54
2.	Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan							
	Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD	78%	80%	85%	100%	100%	100%	100%
3.	Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Penelitian							
	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	59	62	80.6	80.88	92	95	95
4.	Urusan Pengawasan Pemerintahan							
	Nilai SAKIP	66.84	67.16	70.26	80	83	86	86
	Persentase Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan	0.88	0.86	0.06	0.03	0.02	0.01	0.01
5.	Urusan Keuangan							
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Persentase Peningkatan pertumbuhan PAD	30.09%	35.97%	29.78%				
6.	Urusan Kesekretariatan Daerah							
	Indeks Reformasi Birokrasi	65.49	65.39	66.84	66,97	67	67,50	67,50
7.	Urusan Kesekretariatan DPRD							
	Persentase Meningkatnya Fungsi Lembaga DPRD	79%	80%	81%	82%	83%	85%	85%
8.	Urusan Penghubung							
	Persentase Jumlah Pelayanan Penghubung yang terlaksana	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%
C.	Fokus Layanan Urusan Pilihan							
1.	Urusan Kelautan dan Perikanan							
	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	-3.24	8.11	5.87	6,20	7,25	8,50	8,50
	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	20.57	21.58	19.53	21.50	22.20	23.50	23.50
	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	0.25	0.71	0.54	0.72	0.80	0.85	0.85

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2017	Proyeksi Capaian Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2022
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pertumbuhan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Tangkap	0.05	-16.94	-20.66	0.07	0.10	0.15	0.15
	Pertumbuhan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Budidaya	33	0	25	33	35	40	40
2.	Urusan Pariwisata							
	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	15.30	2.92	-58.94	2,15	2,20	2,25	2,25
	Persentase Tenaga Pariwisata yang Tersertifikasi	4	5	9	10	12	15	15
3.	Urusan Pertanian							
	Rasio Sarana dan Prasarana Pertanian	12	13	14	15	16	17	18
	Produksi Komoditi Strategis Tanaman Pangan dan Holtikultura Padi	37.123	45.736	48.812	68.290	69.200	69.780	69.780
	Produksi Komoditi Strategis Tanaman Pangan dan Holtikultura Cabai Rawit	1.729	2.035	2.002	2.546	2.600	2.630	2.630
	Produksi Komoditi Strategis Tanaman Pangan dan Holtikultura Cabai Merah	1.993	2.501	2.468	5.386	5.400	5.420	5.420
	Produksi Komoditi Strategis Tanaman Pangan dan Holtikultura Bawang Merah	13	87	170	97.94	110	120	120
	Produksi Lada	59.146	55.625	56.529	56.378	56.400	57.180	57.180
	Produksi Karet	34.278	32.811	33.457	33.92	34.20	37.80	37.80
	Jumlah Populasi Ternak Besar Sapi	10.000	11.500	12.832	11.614	11.732	11.870	11.870
	Jumlah Populasi Ternak Ayam	12.644	13.760	14.743	15.742	16.400	17.257	17.257
4.	Urusan Kehutanan							
	Persentase Luas Kawasan Perhutanan Sosial	0	52.02	50.49	49.52	50.30	51,80	52
	Persentase Daerah Aliran Sungai Yang Dikelola	0	9.24	32.58	59.19	60,01	60,22	60,22
5.	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral							
	Rasio Elektrifikasi	98.04	100	99.99	100	100	100	100
6.	Urusan Perdagangan							
	Perkembangan Ekspor dan Import Nilai Ekspor Produk Non Migas (USD Juta)	1.140	1.563	1.294	1.310	1.344	1.389	1.465

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2017	Proyeksi Capaian Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2022
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.	Urusan Perindustrian							
	Laju Pertumbuhan Industri	0.19	0.13	0.09	0.10	0.12	0.18	0,20
8.	Urusan Transmigrasi							
	Berkembangnya Satuan Kawasan Transmigrasi	1	2	2	2	2	2	2
D.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah							
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	12.066	12.666	12.959	12..999	13.100	13.200	13.200
2.	Nilai Tukar Petani							
	Indeks Yang Diterima Petani (It)	116,43	106,13	103,96	104,20	104,800	108,100	108,100
	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	122,09	125,73	129,05	130,35	130,80	131,25	131,25
3	Rasio Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT untuk Non Pangan)	0,96	0,84	0,80	0,85	0,90	0,98	0,98
	Total Pengeluaran Konsumsi RT Non-Pangan	639.949	709.094	758.333	780.200	798.026	799.900	799.900
	Total pengeluaran	1.360.994	1.419.495	1.509.974	1.590.124	1.600.000	1.620.100	1.620.100
4.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	0,470	0,500	0,502	0,505	0,510	0,515	0,515
	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	3.543	4.512	5.499	6.113	6.300	6.470	6.470
	Jumlah seluruh PMA/PMDN	235	411	633	650	670	680	633
	Rasio daya serap tenaga kerja	15,07	10,97	8,68	10,05	14,20	16,20	16,20
E.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
1.	Rasio Panjang jalan Per Jumlah Kendaraan							
	Panjang Jalan Provinsi	899,33	850,99	850,99	850,99	850,99	850,99	850,99
	Jumlah Kendaraan	934.354	998.080	1.039.803	1.048.188	1.052.723	1.058.897	1.061.450
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,0016	0,0037	0,0038	0,0039	0,0040	0,0041	0,0042
2.	Luas Wilayah Produktif	0,0021	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020
	Rasio Luas Wilayah Produktif	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
3.	Infrastruktur							

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2017	Proyeksi Capaian Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2022
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Jumlah pelabuhan udara	2	2	2	2	2	2	2
	Jumlah Pelabuhan Laut	12	13	17	17	17	17	17
	Jumlah Terminal	10	13	13	13	13	13	13
	Jumlah Perbankan	202	247	281	287	290	292	292
	Jumlah Hotel Berbintang/Non Bintang	105	170	220	257	259	262	262
F.	Fokus Iklim Berinvestasi							
1.	Angka Kriminalitas							
	Jumlah Kriminalitas	609	331	320	310	280	250	250
	Jumlah Penyelesaian Kasus	374	210	220	230	240	250	250
2.	Jumlah Demo	16	10	6	3	2	1	1
3.	Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha	10	12	13	14	15	16	16
5.	Pengenaan Pajak Daerah							
	Pajak Daerah	629.136	787.235	790.139	850.307	841.315	868.153	868.153
	Retribusi Daerah	5.435	7.613	9.315	16.194	13.621	16.470	16.470
G.	Fokus Sumber Daya Manusia							
1.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	66.678	67.800	68.200	69.400	70.230	71.900	71.900
	Jumlah penduduk	1.430.865	1.459.873	1 488 792	1.517.590	1.588.200	1.590.100	1.590.100
	Rasio lulusan S1/S2/S3 (1/2)	465,99	467,20	470,80	478,01	480,22	483,69	483,69

Tabel VIII.3
Sasaran Pokok Provinsi Dan Kabupaten/Kota
Tahun 2017-2022

SASARAN POKOK	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2017	TARGET				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Kesejahteraan Rakyat	1. Kemiskinan (%)						
	Kepulauan Bangka Belitung	5,20	5,25	4,62	4,53	5,50	5,00
	Pangkalpinang	4,80	4,95	4,25	4,36	4,20	4,10
	Bangka	5,10	5,47	4,92	4,51	4,45	4,25
	Bangka Tengah	6,07	5,81	5,02	4,85	4,00	3,8
	Bangka Barat	2,98	3,05	2,67	2,70	2,65	2,60
	Bangka Selatan	3,92	3,70	3,36	3,52	3,45	3,40
	Belitung	7,77	7,56	6,29	6,27	6,20	6,15
	Belitung Timur	6,81	7,06	6,60	6,52	6,33	6,13
	2. Pengangguran (%)						
	Kepulauan Bangka Belitung	3,78	3,65	3,62	5,25	5,50	5,00
	Pangkalpinang	5,80	4,70	5,01	6,93	7,37	6,27
	Bangka	4,29	4,12	3,80	5,42	4,83	4,42
	Bangka Tengah	3,38	3,93	4,39	5,59	3,50	3,30
	Bangka Barat	4,23	3,11	2,85	4,12	4,10	4,00
	Bangka Selatan	2,74	4,35	3,87	5,42	4,20	4,10
	Belitung	2,57	2,93	2,90	4,82	4,05	3,93
	Belitung Timur	2,62	1,50	1,71	3,93	3,50	2,50
Meningkatnya ekonomi daerah	3. Pertumbuhan PDRB (%)						
	Kepulauan Bangka Belitung	4,47	4,45	3,32	-2,30	3,00	3,22
	Pangkalpinang	5,19	5,08	3,29	-3,02	2,90	3,20
	Bangka	5,04	4,52	2,89	-0,73	2,50	2,60
	Bangka Tengah	3,46	3,42	1,23	-2,87	2,00	2,50

SASARAN POKOK	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2017	TARGET				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bangka Barat	5,26	5,20	7,08	-5,43	3,00	3,50
	Bangka Selatan	4,57	4,52	2,55	-1,99	2,00	2,55
	Belitung	5,30	5,38	3,36	-2,31	2,25	3,10
	Belitung Timur	4,85	4,22	3,29	-3,02	2,10	2,70
	4. Inflasi (%)						
	Kepulauan Bangka Belitung	2,09	3,83	2,31	2,23	3,00	4,00
	Pangkalpinang	2,27	2,26	2,62	1,71	2,17	2,50
	Tanjung Pandan	1,75	6,73	1,17	1,49	1,40	1,37
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM	5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)						
	Kepulauan Bangka Belitung	69,99	70,67	71,47	70,57	71,35	71,45
	Pangkalpinang	76,86	77,43	77,97	78,22	78,35	78,45
	Bangka	71,09	71,80	72,39	72,40	72,48	72,53
	Bangka Tengah	68,99	69,52	70,33	70,45	70,73	70,80
	Bangka Barat	67,94	68,68	69,05	69,08	70,00	71,10
	Bangka Selatan	65,02	65,98	66,54	66,90	66,94	67,00
	Belitung	70,93	71,70	72,46	72,51	72,57	72,60
	Belitung Timur	69,57	70,22	70,84	70,92	70,98	71,00

BAB IX

PENUTUP

9.1. Pedoman Transisi

Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan sasaran dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Jangka Menengah Daerah.

Tahun 2022 merupakan tahun transisi pemerintahan Gubernur Erzaldi Rosman dan Abdul Fatah. Terkait dengan hal tersebut maka penyusunan dokumen RKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 nantinya yang disusun tahun 2021 diarahkan untuk menjaga kesinambungan aktivitas dan capaian program tahun sebelumnya, sehingga setiap Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun perencanaan pembangunan tahun 2022 tetap mengacu kepada program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran tahap ketiga dan keempat RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025. Sebagai upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

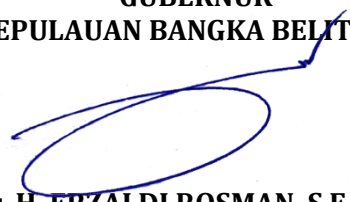
1. Pelaksanaan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, dalam melaksanakan pembangunan agar mengacu pada Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022 ini dengan sebaik-baiknya.
4. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 yang memuat tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta indikasi anggaran pembangunan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

5. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi yang selanjutnya merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya.
6. RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Renja-PD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja.
7. Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022 dipublikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi acuan bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Perangkat Daerah dan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan dibuat sebagai landasan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu lima tahun ke depan. Selanjutnya diharapkan peran aktif seluruh pelaku pembangunan dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sangat tergantung dari kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta pemangku kepentingan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu Tahun 2017-2022.

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

**Kompleks Pusat Perkantoran dan Perumahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Belitung No. 2, Kel. Air Itam, Telp. (0717) 439333-439336 Fax: (0717) 439335
PANGKALPINANG 33149**